



SALINAN

WALI KOTA PEKALONGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN
NOMOR 5 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTA PEKALONGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam penyelenggaraan pemerintah daerah memerlukan perencanaan pembangunan jangka menengah sebagai arah dan prioritas pembangunan secara menyeluruh yang akan dilakukan secara bertahap untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah diperlukan sebagai pedoman dalam menyelenggarakan pembangunan daerah agar pelaksanaan dan tujuan pembangunan Daerah dapat berjalan efektif, efisien, dan terarah;
- c. bahwa berdasarkan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Ketjil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
5. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 30 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pekalongan Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 30) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pekalongan Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Tahun 2020 Nomor 9);
6. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025 – 2045 (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2024 Nomor 5);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PEKALONGAN

dan

WALI KOTA PEKALONGAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2025-2029.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Pekalongan.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Wali Kota adalah Wali Kota Pekalongan.
5. Wakil Wali Kota adalah Wakil Wali Kota Pekalongan.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekalongan yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
7. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
8. Pembangunan Daerah adalah usaha yang sistematis untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.
9. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah.
10. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 yang selanjutnya disebut RPJP Nasional adalah dokumen perencanaan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun dari Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2045.
11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut RPJM Nasional adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahun dari Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2029.
12. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2045 yang selanjutnya disebut RPJP Daerah

Provinsi Jawa Tengah adalah dokumen perencanaan Provinsi Jawa Tengah untuk periode 20 (dua puluh) tahun dari Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2045.

13. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut RPJM Daerah Provinsi Jawa Tengah adalah dokumen perencanaan Provinsi Jawa Tengah untuk periode 5 (lima) tahun dari Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2029.
14. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Pekalongan Tahun 2025-2045, yang selanjutnya disingkat RPJP Daerah adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2045.
15. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pekalongan yang selanjutnya disingkat RPJM Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah dengan berpedoman pada RPJP Daerah dan RPJM Nasional.
16. Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pekalongan Tahun 2009-2029 yang selanjutnya disebut RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang yang merupakan penjabaran strategi dan arahan kebijakan pemanfaatan ruang wilayah nasional, provinsi, dan kabupaten/kota kedalam struktur dan pola pemanfaatan ruang wilayah.
17. Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang selanjutnya disingkat KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah sampai dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana dan/atau program.
18. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut dengan Renstra-PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
19. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Pekalongan yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan daerah.
20. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja-PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
21. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan daerah.
22. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
23. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah/Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran.

24. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.
25. Prioritas Pembangunan Daerah adalah fokus penyelenggaraan pemerintah Daerah yang dilaksanakan secara bertahap untuk mencapai sasaran RPJM Daerah.
26. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
27. Kinerja adalah capaian keluaran/hasil/dampak dari kegiatan/program/sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan.
28. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.
29. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program Perangkat Daerah

BAB II RPJM DAERAH

Pasal 2

- (1) RPJM Daerah merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagai landasan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan, yang merupakan penjabaran dari Visi, Misi, dan Program Wali Kota dan Wakil Wali Kota masa jabatan Tahun 2025 - 2030.
- (2) RPJM Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan, dan program pembangunan yang akan dilaksanakan oleh PD, disertai dengan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.
- (3) RPJM Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada RPJP Daerah, RPJM Nasional, RPJM Daerah Provinsi Jawa Tengah, RTRW, serta memperhatikan KLHS, Pengembangan Wilayah Terpadu; dan RPJM Daerah Kabupaten/Kota sekitar.

Pasal 3

RPJM Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi:

- a. pedoman penyusunan Renstra PD;
- b. instrumen evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan

- c. acuan bagi seluruh pemangku kepentingan di daerah dalam melaksanakan kegiatan pembangunan selama masa jabatan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2025 – 2030.

BAB III SISTEMATIKA RPJM DAERAH

Pasal 4

- (1) RPJM Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan sistematika sebagai berikut :
 - a. bab I berisi pendahuluan;
 - b. bab II berisi gambaran umum Daerah;
 - c. bab III berisi visi, misi, dan program prioritas pembangunan Daerah;
 - d. bab IV berisi program Perangkat Daerah dan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
 - e. bab V berisi penutup.
- (2) RPJM Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 5

- (1) Wali Kota melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJM Daerah .
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. kebijakan perencanaan RPJM Daerah; dan
 - b. pelaksanaan RPJM Daerah.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. kebijakan perencanaan RPJM Daerah;
 - b. pelaksanaan RPJM Daerah; dan
 - c. hasil RPJM Daerah.
- (4) Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh PD yang melaksanakan urusan pemerintahan sesuai dengan tugas dan fungsi.
- (5) Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJM Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V PERUBAHAN RPJM DAERAH

Pasal 6

- (1) Perubahan RPJM Daerah dapat dilakukan apabila :

- a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan, tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan Daerah ;
 - b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - c. terjadi perubahan yang mendasar, dan/atau
 - d. merugikan kepentingan Daerah dan Nasional.
- (2) Dalam rangka efektivitas, perubahan RPJM Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a dan huruf b tidak dapat dilakukan apabila sisa masa berlaku RPJM Daerah kurang dari 3 (tiga) tahun.
 - (3) Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi terjadinya bencana alam, guncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial, gangguan keamanan, pemekaran daerah, atau perubahan kebijakan nasional.
 - (4) Merugikan kepentingan Daerah dan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, apabila bertentangan dengan kebijakan Daerah dan Nasional.
 - (5) Perubahan RPJM Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman RKPD dan Perubahan Renstra PD.

Pasal 7

Perubahan RPJM Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, RKPD Tahun 2025 dan RKPD Tahun 2026 yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2021 Nomor 8) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pekalongan.

Ditetapkan di Pekalongan
pada tanggal 20 Agustus 2025

WALI KOTA PEKALONGAN,

TTD

STEMPEL

ACHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAID

Diundangkan di Pekalongan
pada tanggal 20 Agustus 2025

SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKALONGAN

TTD

STEMPEL

NUR PRIYANTOMO

LEMBARAN DAERAH KOTA PEKALONGAN TAHUN 2025 NOMOR 5

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN,
PROVINSI JAWA TENGAH : (5-128/2025)

Salinan sesuai dengan aslinya,

KEPALA BAGIAN HUKUM

SEKRETARIAT DAERAH KOTA PEKALONGAN



ADAM MUHAMAD, S.H

Pembina

NIP. 19790407 200902 1 004

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN
NOMOR 5 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2025-2029

I. UMUM

RPJM Daerah Kota Pekalongan Tahun 2025-2029 akan mengarahkan pelaksanaan pembangunan di Kota Pekalongan untuk mewujudkan satu visi, yaitu “Mewujudkan Kota Pekalongan Lebih Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan Berlandaskan Akhlaqul Karimah”.

Untuk mewujudkan visi tersebut, telah dirumuskan 9 (sembilan) misi pembangunan, yaitu:

1. Menjunjung tinggi hukum demi menjamin hak-hak rakyat dengan mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, Kolaboratif, dan Sinergis sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945.
2. Meningkatkan Akses dan Kualitas Pendidikan di semua jenjang secara merata.
3. Meningkatkan kualitas kesehatan dan mewujudkan jaminan Layanan Kesehatan Masyarakat.
4. Membangun Infrastruktur yang Berkelanjutan dan Ramah Lingkungan.
5. Peningkatan Layanan untuk mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat.
6. Membangun Kemandirian Ekonomi daerah berbasis potensi sumber daya lokal.
7. Melestarikan dan Mengembangkan Budaya Lokal.
8. Meningkatkan Keamanan dan Kondusivitas Wilayah.
9. Mewujudkan Pengelolaan Lingkungan yang Bersih dan Berkelanjutan.

Dengan berpijak pada visi dan misi tersebut, maka setiap dinamika pembangunan di Kota Pekalongan, khususnya yang dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah harus sejalan, terintegrasi dan bersinergi dalam mengolah keseluruhan sumber daya yang dimiliki sehingga pada akhirnya akan dapat mewujudkan kesejahteraan dan kemandirian masyarakat Kota Pekalongan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan Pemangku kepentingan adalah pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah antara lain unsur DPR RI, DPRD provinsi dan kota, TNI, POLRI, Kejaksaan, akademisi, LSM/Ormas, tokoh masyarakat provinsi dan kabupaten/kota/desa, pengusaha/investor, pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kabupaten/kota, dan kelurahan serta keterwakilan perempuan dan kelompok masyarakat rentan termajinalkan.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN
NOMOR 5 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2025-2029

DOKUMEN
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KOTA PEKALONGAN TAHUN 2025-2029

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum wr wb

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT, karena dengan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga Dokumen RPJM Daerah Tahun 2025 - 2029 dapat kami selesaikan. RPJM Daerah ini merupakan penjabaran visi, misi, dan program Wali kota dan Wakil Wali kota dan memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif. Dalam penyusunannya, RPJM Daerah Tahun 2025-2029 ini berpedoman pada RPJP Daerah, RTRW dan RPJM Nasional untuk periode 5 (lima) tahun.

Proses penyusunan RPJM Daerah ini melibatkan berbagai elemen, mulai dari pemerintah daerah, masyarakat, serta berbagai pihak terkait yang memberikan kontribusi pemikiran dan aspirasi. Dokumen ini diharapkan dapat menjadi dasar dalam merumuskan kebijakan-kebijakan pembangunan yang akan dilaksanakan selama masa jabatan 2025-2030, dengan tetap memperhatikan kebutuhan dan tantangan yang ada, serta potensi dan peluang yang dapat dimanfaatkan untuk kemajuan daerah. Secara umum, dokumen RPJM Daerah Tahun 2025-2029 ini disusun dalam 5 (lima) bab. Bab I membahas tentang pendahuluan, Bab II membahas tentang gambaran umum daerah, Bab III membahas tentang Visi, Misi, Dan Program Prioritas Pembangunan Daerah, Bab IV membahas Program Perangkat Daerah dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Bab V Penutup.

Kami menyadari bahwa penyusunan RPJM Daerah ini masih memerlukan masukan dan kritik konstruktif dari berbagai pihak untuk penyempurnaan lebih lanjut. Oleh karena itu, kami mengharapkan partisipasi aktif dari seluruh elemen masyarakat untuk menyukseskan perencanaan pembangunan yang lebih baik bagi Kota Pekalongan. Dengan demikian, maka dokumen ini dapat bermanfaat bagi pembangunan di Kota Pekalongan.

Wassalamu'alaikum wr wb

Pekalongan, Agustus 2025

Wali Kota Pekalongan,


ACHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAID

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	ii
Daftar Isi.....	iii
Daftar Tabel	vi
Daftar Gambar	xii
BAB I Pendahuluan.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Dasar Hukum Penyusunan	6
1.3. Hubungan Antar Dokumen RPJM Daerah Tahun 2025-2029 dengan Dokumen Perencanaan Lainnya	10
1.3.1. RPJM Daerah Tahun 2025-2029 dengan RPJP Daerah	11
1.3.2. RPJM Daerah Tahun 2025-2029 dengan RPJM Nasional	11
1.3.3. RPJM Daerah Tahun 2025-2029 dengan RTRW	15
1.3.4. RPJM Daerah Tahun 2025-2029 dengan RPJM Daerah Provinsi Jawa Tengah	17
1.3.5. RPJM Daerah Tahun 2025-2029 dengan Renstra-PD	18
1.3.6. RPJM Daerah Tahun 2025-2029 dengan RKPD	18
1.3.7. RPJM Daerah Tahun 2025-2029 dengan Rencana Pembangunan Sektoral.....	18
1.4. Maksud Dan Tujuan	18
1.4.1. Maksud	18
1.4.2. Tujuan	18
1.5. Sistematika Penulisan	19
BAB II Gambaran Umum Daerah.....	21
2.1. Aspek Geografi Dan Demografi.....	21
2.1.1. Posisi dan Peran Strategis Daerah	21
2.1.2. Potensi Sumber Daya Alam	22
2.1.3. Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup	30
2.1.4. Lingkungan Hidup Berkualitas	33
2.1.5. Demografi.....	39
2.1.6. Potensi Pengembangan Wilayah.....	42

2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat.....	48
2.2.1. Kesejahteraan masyarakat dan perlindungan sosial yang adaptif...	48
2.2.2. Kesehatan Untuk Semua	64
2.2.3. Pendidikan Berkualitas Secara Inklusif	73
2.2.4. Pemajuan Kebudayaan dan Pendidikan Karakter.....	78
2.3. Aspek Daya Saing Daerah	87
2.3.1. Daya Saing Sumber Daya Manusia.....	87
2.3.2. IPTEK, Inovasi dan Produktivitas Ekonomi	88
2.3.3. Infrastruktur Perkotaan dan Permukiman yang Berkualitas	115
2.3.4. Kondisi Fiskal Daerah.....	124
2.4. Aspek Pelayanan Umum	129
2.4.1. Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif	129
2.4.2. Ketentraman dan ketertiban umum	133
2.4.3. Kinerja Setiap Urusan Pemerintah Daerah	139
2.5. Hasil Evaluasi Kinerja Pemerintah Daerah Sampai Dengan Tahun 2024	145
2.6. Gambaran Keuangan Daerah	182
2.6.1. Gambaran Ringkas Kondisi Keuangan Daerah Lima Tahun Terakhir (Tahun 2020 s/d Tahun 2024).....	185
2.6.2. Proyeksi Keuangan Daerah Lima Tahun Ke Depan	195
2.7. Permasalahan Dan Isu Strategis.....	208
2.7.1. Permasalahan Pembangunan Daerah.....	208
2.7.2. Isu Strategis Daerah.....	218
BAB III Visi, Misi, dan Program Prioritas Pembangunan Daerah.....	285
3.1. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran	285
3.1.1. Visi	285
3.1.2. Misi	290
3.1.3. Tujuan dan Sasaran RPJM Daerah Tahun 2025-2029.....	295
3.2. Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah	302
3.2.1. Strategi.....	302
3.2.2. Arah Kebijakan.....	306
3.2.3. Arah Kebijakan Kewilayahan.....	314
3.2.4. Program Unggulan Daerah	322
3.2.5. Program Pembangunan Daerah.....	328
3.2.6. Dukungan Program Delegasi	352

BAB IV	Program Perangkat Daerah dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.....	357
4.1.	Program Perangkat Daerah	357
4.1.1.	Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar	357
4.1.2.	Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar.....	362
4.1.3.	Urusan Pemerintahan Pilihan	371
4.1.4.	Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan	375
4.1.5.	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan	376
4.1.6.	Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan	377
4.1.7.	Unsur Kewilayahan	378
4.1.8.	Unsur Pemerintahan Umum	379
4.1.9.	Non Urusan	379
4.2.	Kinerja Penyelenggara Pemerintahan Daerah.....	403
BAB V	Penutup	421
5.1.	Pedoman Transisi.....	421
5.2.	Kaidah Pelaksanaan	421
Daftar Pustaka		423

DAFTAR TABEL

Tabel I-1	Hubungan RPJM Daerah Tahun 2025-2029 dengan RPJP Daerah -----	11
Tabel I-2	Hubungan RPJM Daerah Tahun 2025-2029 dengan RPJM Nasional-----	14
Tabel I-3	Hubungan RPJM Daerah Tahun 2025-2029 dengan RPJM Daerah Provinsi Jawa Tengah-----	17
Tabel II-1	Banyaknya Hari Hujan dan Curah Hujan Kota Pekalongan Tahun 2024-----	27
Tabel II-2	Luas Penggunaan Tanah di Kota Pekalongan Tahun 2020-2024-----	28
Tabel II-3	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kota Pekalongan Tahun 2020-2024-----	33
Tabel II-4	Luas Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Pekalongan -----	34
Tabel II-5	Neraca Pengelolaan Sampah Kota Pekalongan Tahun 2024 -----	36
Tabel II-6	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah Tahun 2024 -----	36
Tabel II-7	Perkembangan Pemanfaatan IPAL Komunal di Kota Pekalongan Tahun 2020-2024-----	37
Tabel II-8	Penggunaan Air Bersih Untuk Kebutuhan Sambungan Rumah (SR) di Kota Pekalongan Tahun 2020-2024 -----	38
Tabel II-9	Jumlah Penduduk Kota Pekalongan Tahun 2020-2024 -----	39
Tabel II-10	Penduduk Kota Pekalongan Berumur 15 Tahun Ke atas yang Bekerja Tahun 2020-2024 -----	41
Tabel II-11	Jumlah Penduduk Kota Pekalongan Tahun 2024 Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin -----	41
Tabel II-12	Garis Kemiskinan (GK) Kota Pekalongan, Daerah Setara, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2020-2024 -----	48
Tabel II-13	Indeks Gini Kota Pekalongan Tahun 2020-2024-----	57
Tabel II-14	Perkembangan Kepemudaan di Kota Pekalongan Tahun 2020-2024-----	64
Tabel II-15	Perkembangan Jumlah Klub dan Gedung Olahraga di Kota Pekalongan Tahun 2020-2024 -----	64
Tabel II-16	Kasus Kematian Ibu dan Angka Kematian Ibu (AKI) di Kota Pekalongan Tahun 2020-2024 -----	66
Tabel II-17	Angka Kematian Bayi dan Angka Kelangsungan Hidup Bayi di Kota Pekalongan Tahun 2020-2024-----	66
Tabel II-18	Prevalensi Balita Stunting Kota Pekalongan Tahun 2019-2024 -----	67
Tabel II-19	Rasio Puskesmas, Puskesmas Pembantu per Satuan Penduduk di Kota Pekalongan Tahun 2020-2024 -----	68
Tabel II-20	Cakupan Penemuan dan Pengobatan Kasus Tb Tahun 2020-2024 -----	69

Tabel II-21	Angka Keberhasilan Tuberkulosis Tahun 2020-2024-----	69
Tabel II-22	Cakupan Penduduk Kota Pekalongan Penerima Jaminan Kesehatan Tahun 2020-2024 -----	70
Tabel II-23	Rasio Ketersediaan Pangan Utama Kota Pekalongan Tahun 2020-2024----	71
Tabel II-24	Skor PPH Kota Pekalongan Tahun 2020-2024 -----	71
Tabel II-25	Angka Partisipasi Sekolah Menurut Jenjang Pendidikan di Kota Pekalongan Tahun 2020 – 2024 -----	76
Tabel II-26	Angka Partisipasi Sekolah Jenjang TK-SMP di Kota Pekalongan Tahun 2020 – 2024 -----	76
Tabel II-27	Kemampuan Literasi Membaca dan Numerasi pada Jenjang Pendidikan Dasar di Kota Pekalongan Tahun 2021-2024 -----	77
Tabel II-28	Implementasi Pendidikan Keagamaan dan Pendidikan Karakter di Kota Pekalongan Tahun 2020-2024 -----	79
Tabel II-29	Persentase Satuan Pendidikan yang Mempunyai Guru Mengajar Mulok Bahasa Daerah / Seni Budaya dan Mengarusutamakan Kebudayaan di Kota Pekalongan Tahun 2020-2024 -----	79
Tabel II-30	Penyelenggaraan Even Seni Budaya dan Pelestarian Cagar Budaya Kota Pekalongan Tahun 2020-2024 -----	80
Tabel II-31	Jenis Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK) di Kota Pekalongan -----	80
Tabel II-32	Seni Budaya di Kota Pekalongan Tahun 2020-2024 -----	81
Tabel II-33	Perkembangan Jumlah Kelompok Kesenian dan Gedung Kesenian Kota Pekalongan Tahun 2020-2024 -----	82
Tabel II-34	Persentase Kelompok Kesenian yang Aktif Terlibat/Mengadakan Pertunjukan Kesenian dalam Satu Tahun Terakhir Kota Pekalongan Tahun 2020-2024 -----	83
Tabel II-35	Persentase Cagar Budaya yang Dilestarikan Kota Pekalongan Tahun 2020-2024 -----	84
Tabel II-36	Persentase Warisan Budaya Tak Benda yang Dilestarikan -----	84
Tabel II-37	Jumlah Pengunjung Museum Batik Nasional Kota Pekalongan Tahun 2020-2024 -----	85
Tabel II-38	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pelestarian Budaya Lokal -----	86
Tabel II-39	Komponen IPM Kota Pekalongan Tahun 2020-2024 -----	88
Tabel II-40	Nilai Indeks Daya Saing Daerah Kota Pekalongan dan Kabupaten/Kota Sekitarnya Tahun 2020-2024 -----	89
Tabel II-41	Riset Unggulan Daerah Kota Pekalongan Tahun 2024 -----	92
Tabel II-42	Riset Bersama Kota Pekalongan Tahun 2022-2024 -----	92
Tabel II-43	Rekapitulasi Inovasi Daerah Berdasarkan Bentuk Inovasi dan Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2023 dan 2024-----	94
Tabel II-44	Inovasi Daerah Bidang Perikanan-----	98

Tabel II-45	Rasio Kewirausahaan Kota Pekalongan dan Jawa Tengah Tahun 2020-2024 -----	100
Tabel II-46	Rasio Volume Usaha Koperasi Terhadap PDRB Kota Pekalongan Tahun 2020-2024 -----	101
Tabel II-47	<i>Return On Asset</i> BUMD Kota Pekalongan Tahun 2020-2024 -----	102
Tabel II-48	Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara di Kota Pekalongan Tahun 2020-2024 -----	104
Tabel II-49	Nilai PDRB, PDRB Per Kapita dan Pertumbuhan PDRB Per Kapita Kota Pekalongan tahun 2020-2024 -----	105
Tabel II-50	Kontribusi Sektor Lapangan Usaha terhadap PDRB Kota Pekalongan Tahun 2020-2024 (persen) -----	106
Tabel II-51	Peternakan di Kota Pekalongan Tahun 2020-2024 -----	107
Tabel II-52	Rumah Tangga dengan Akses Internet Kota Pekalongan Tahun 2020-2024 -----	111
Tabel II-53	Nilai Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga dalam PDRB ADHB Kota Pekalongan Tahun 2020-2024 -----	112
Tabel II-54	Pembentukan Modal Tetap Bruto Kota Pekalongan Tahun 2020-2024 -----	113
Tabel II-55	Kondisi Jaringan Jalan Negara di Kota Pekalongan Tahun 2020-2024 -----	116
Tabel II-56	Kondisi Jaringan Jalan Kota di Kota Pekalongan Tahun 2020-2024 -----	116
Tabel II-57	Persentase Panjang Jalan Kondisi Permukaan Mantap Kewenangan Kabupaten/ Kota di Kota Pekalongan Tahun 2020-2024 -----	117
Tabel II-58	Kategori Tingkat Pelayanan Jalan -----	118
Tabel II-59	Kinerja Ruas Jalan di Kota Pekalongan yang Diukur Dari Tingkat Pelayanan -----	119
Tabel II-60	Persentase Kelengkapan Jalan yang Telah Terpasang terhadap Kondisi Ideal pada Jalan Kota Pekalongan Tahun 2020-2024 -----	122
Tabel II-61	Data Jumlah Pelanggan Layanan Sedot Tinja di Kota Pekalongan -----	123
Tabel II-62	Inflasi Menurut Kelompok Pengeluaran di Kota Pekalongan Tahun 2020-2024 -----	125
Tabel II-63	Disparitas harga bahan pokok Kota Pekalongan terhadap Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 -----	125
Tabel II-64	Total Dana Pihak Ketiga pada Bank Milik Kabupaten / Kota per PDRB Kota Pekalongan Tahun 2020-2024 -----	127
Tabel II-65	Total Kredit pada Bank Milik Kabupaten / Kota per PDRB Kota Pekalongan Tahun 2020-2024 -----	128
Tabel II-66	Komponen Penilaian Indeks Reformasi Birokrasi Kota Pekalongan Tahun 2021-2022 -----	129
Tabel II-67	Komponen Penilaian Indeks Reformasi Birokrasi Kota Pekalongan Tahun 2023-2024 -----	130
Tabel II-68	Nilai SAKIP Kota Pekalongan Tahun 2018 – 2021 -----	130

Tabel II-69	Nilai SAKIP Kota Pekalongan Tahun 2022-2024-----	131
Tabel II-70	Rasio Jumlah Polisi PP (PNS) dan Jumlah Polisi PP (Banpol Non PNS) Per 10.000 Penduduk di Kota Pekalongan 2020-2024 -----	133
Tabel II-71	Penyelesaian Pelanggaran Peraturan Daerah di Kota Pekalongan Tahun 2020-2024 -----	134
Tabel II-72	Banyaknya Kasus Tindak Kejahatan yang Terjadi di Kota Pekalongan Tahun 2020-2024 -----	134
Tabel II-73	Jumlah Kasus Konflik Sosial di Kota Pekalongan Tahun 2020-2024-----	135
Tabel II-74	Tabel Perkembangan Indeks Risiko Bencana Kota Pekalongan Tahun 2020-2024 -----	137
Tabel II-75	Tabel Kegiatan Aksi Perubahan Iklim di Kota Pekalongan Tahun 2024 -----	138
Tabel II-76	Capaian Indikator Kinerja Kunci Kota Pekalongan Tahun 2020 - 2024-----	139
Tabel II-77	Capaian Indikator Kinerja Daerah (IKD) Kota Pekalongan Sampai Dengan Tahun 2024 -----	146
Tabel II-78	Capaian Indikator Kinerja Utama Kota Pekalongan Sampai Dengan Tahun 2024-----	154
Tabel II-79	Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Kota Pekalongan Tahun 2020-2024 -----	188
Tabel II-80	Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Belanja Daerah Kota Pekalongan Tahun 2020-2024 -----	189
Tabel II-81	Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Pembiayaan Daerah Kota Pekalongan Tahun 2020-2024 -----	190
Tabel II-82	Neraca Pemerintah Kota Pekalongan Tahun 2020-2024 -----	191
Tabel II-83	Rasio Kemandirian Daerah Kota Pekalongan Tahun 2020 - 2024-----	192
Tabel II-84	Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kota Pekalongan Tahun 2020-2024 -----	193
Tabel II-85	Rasio Belanja Modal Kota Pekalongan Tahun 2020-2024 -----	193
Tabel II-86	Defisit Riil Anggaran Kota Pekalongan Tahun 2020-2024 -----	194
Tabel II-87	Komposisi Penutup Riil Anggaran Kota Pekalongan Tahun 2020-2024-----	194
Tabel II-88	Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Kota Pekalongan Tahun 2021 - 2024-----	195
Tabel II-89	Proyeksi Pendapatan Daerah Kota Pekalongan Tahun 2026 s.d 2030 -----	199
Tabel II-90	Proyeksi Belanja Daerah Kota Pekalongan Tahun 2026 s.d 2030-----	201
Tabel II-91	Proyeksi Pembiayaan Daerah Kota Pekalongan Tahun 2026 s.d 2030 -----	203
Tabel II-92	Analisis Belanja Periodik Dan Pengeluaran Pembiayaan Yang Wajib Dan Mengikat Serta Prioritas Utama Kota Pekalongan Tahun 2020-2024 -----	204
Tabel II-93	Proyeksi Belanja Periodik Dan Pengeluaran Pembiayaan Yang Wajib Dan Mengikat Serta Prioritas Utama Kota Pekalongan 2026-2030 -----	205

Tabel II-94	Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Untuk Mendanai Pembangunan Daerah Kota Pekalongan Tahun 2026-2030 -----	205
Tabel II-95	Kerangka Pendanaan yang Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Tahun 2025-2030 -----	206
Tabel II-96	Keterkaitan Masalah Pokok Belum Optimalnya Implementasi Tata Kelola Pemerintahan Digital yang Akuntabel, Transparan, Berintegritas, Tangkas dan Kolaboratif, Masalah dan Akar Masalah -----	209
Tabel II-97	Keterkaitan Masalah Pokok Belum optimalnya Upaya Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berkarakter Dan Religius, Masalah dan Akar Masalah -----	211
Tabel II-98	Keterkaitan Masalah Pokok Belum Optimalnya Kemandirian Ekonomi Daerah, Masalah dan Akar Masalah-----	212
Tabel II-99	Keterkaitan Masalah Pokok Belum Optimalnya Tingkat Kesejahteraan Masyarakat, Masalah dan Akar Masalah -----	213
Tabel II-100	Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah -----	214
Tabel II-101	Misi dan Arah Kebijakan Indonesia Emas 2045 -----	221
Tabel II-102	Asta Cita Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka Tahun 2025-2029-----	222
Tabel II-103	Perumusan Visi-----	229
Tabel II-104	Sasaran Utama Visi, Indikator dan Target Tahun 2029 -----	237
Tabel II-105	Sasaran Pokok dan Arah Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Pekalongan Tahun 2025-2045-----	239
Tabel II-106	Indikator Utama Pembangunan Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat Tahun 2025-2029 -----	240
Tabel II-107	Indikator Utama Pembangunan Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan Kota Pekalongan Tahun 2025-2029 -----	241
Tabel II-108	Indikator Utama Pembangunan Peningkatan Pendidikan Karakter dan Pemajuan Budaya Kota Pekalongan Tahun 2025-2029-----	242
Tabel II-109	Indikator Utama Pembangunan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Kota Pekalongan Tahun 2025-2029 -----	243
Tabel II-110	Indikator Utama Pembangunan Peningkatan Kondusivitas Wilayah Kota Pekalongan Tahun 2025-2029-----	244
Tabel II-111	Indikator Utama Pembangunan Peningkatan Kualitas Birokrasi Kota Pekalongan Tahun 2025-2029-----	244
Tabel II-112	Indikator Utama Pembangunan Peningkatan Kondusivitas Wilayah Kota Pekalongan Tahun 2025-2029-----	248
Tabel II-113	Indikator Utama Pembangunan Peningkatan Kualitas Infrastruktur Kota Pekalongan Tahun 2025-2029-----	249
Tabel II-114	Indikator Utama Pembangunan Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup Kota Pekalongan Tahun 2025-2029 -----	250

Tabel II-115	Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Pekalongan Tahun 2025-2029 -----	254
Tabel II-116	Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Batang Tahun 2025-2029 -----	256
Tabel II-117	Keterkaitan Isu Strategis Kota Pekalongan, Isu Internasional, Isu/ Kebijakan Nasional, Isu/ Kebijakan Provinsi Jawa Tengah serta Isu Strategis KLHS-----	281
Tabel III-1	Keterkaitan Isu Strategis dengan Misi Daerah-----	290
Tabel III-2	Keterkaitan Tujuan, Sasaran, Indikator, dan Target dalam Pencapaian Visi RPJM Daerah Tahun 2025– 2029 -----	299
Tabel III-3	Rumusan Misi, Strategi, Arah Kebijakan dan Masalah Kota Pekalongan Tahun 2025-2029 -----	308
Tabel III-4	Analisis LQ Kota Pekalongan Tahun 2020-2024-----	317
Tabel III-5	Rencana Implementasi Program Prioritas Daerah Tahun 2025-2029 -----	323
Tabel III-6	Program Pembangunan Daerah Kota Pekalongan Tahun 2025-2029 Dalam Rangka Pencapaian Visi dan Misi Wali Kota-----	329
Tabel III-7	Dukungan terhadap Program Delegasi Provinsi Jawa Tengah kepada Kabupaten/Kota di Kota Pekalongan Tahun 2025-2030 -----	352
Tabel IV-1	Indikasi Rencana Program Perangkat Daerah Yang Disertai Kebutuhan Pendanaan Kota Pekalongan -----	381
Tabel IV-2	Penetapan Indikator Kinerja Utama Kota Pekalongan -----	404
Tabel IV-3	Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kota Pekalongan -----	405

DAFTAR GAMBAR

Gambar I-1	Mandatori RPJP Daerah dalam penyusunan RPJM Daerah Tahun 2025-2029 -----	1
Gambar I-2	Mandatori RPJM Nasional dalam penyusunan RPJM Daerah Tahun 2025-2029 -----	4
Gambar I-3	Hubungan Antar Dokumen-----	11
Gambar I-4	Hubungan Perencanaan Pembangunan dengan Rencana Tata Ruang----	16
Gambar II-1	Peta Orientasi Kota Pekalongan -----	22
Gambar II-2	Jenis Tanah di Wilayah Kota Pekalongan -----	23
Gambar II-3	Peta Geologi Wilayah Kota Pekalongan-----	24
Gambar II-4	Wilayah Sungai Pemali-Comal -----	25
Gambar II-5	Peta Penggunaan Lahan di Kota Pekalongan -----	29
Gambar II-6	Indeks Jasa Lingkungan Hidup Kota Pekalongan -----	33
Gambar II-7	Persentase Rumah Tangga (RT) Pengguna Air Bersih di Kota Pekalongan Tahun 2020-2024-----	38
Gambar II-8	Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Pekalongan Tahun 2020-2024-----	39
Gambar II-9	Kepadatan Penduduk Kota Pekalongan Tahun 2020-2024 -----	40
Gambar II-10	Jumlah Penduduk Kota Pekalongan Tahun 2024 Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin -----	42
Gambar II-11	Peta Rencana Struktur Ruang -----	44
Gambar II-12	Peta Rencana Pola Ruang-----	44
Gambar II-13	Perbandingan Garis Kemiskinan di Kota Pekalongan dengan Daerah Setara, Provinsi dan Nasional Tahun 2020-2024 -----	49
Gambar II-14	Jumlah Penduduk Miskin di Kota Pekalongan Tahun 2020-2024 (000 jiwa)-----	50
Gambar II-15	Perbandingan Rasio Penduduk Miskin Kota Pekalongan dengan Daerah Setara, Provinsi dan Nasional Tahun 2020-2024 -----	51
Gambar II-16	Indeks Kedalaman Kemiskinan di Kota Pekalongan Tahun 2020-2024----	52
Gambar II-17	Perbandingan Indeks Kedalaman Kemiskinan di Kota Pekalongan dengan Daerah Setara, Provinsi dan Nasional Tahun 2020-2024 -----	52
Gambar II-18	Indeks Keparahan Kemiskinan di Kota Pekalongan Tahun 2020-2024 ----	53
Gambar II-19	Perbandingan Indeks Keparahan Kemiskinan Kota Pekalongan dengan Daerah Setara, Provinsi dan Nasional Tahun 2020-2024 -----	54
Gambar II-20	Perbandingan Tingkat Kemiskinan Ekstrem Antar Kota Se-Jawa Tengah Tahun 2021-2024-----	55

Gambar II-21	Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Kota Pekalongan dengan Provinsi dan Nasional Tahun 2020-2024 -----	56
Gambar II-22	Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Kota Pekalongan dibandingkan dengan Daerah Setara Tahun 2020-2024-----	56
Gambar II-23	Rasio TPAK dan Bukan Angkatan Kerja di Kota Pekalongan Tahun 2020-2024 -----	58
Gambar II-24	Rasio TKK dan TPT di Kota Pekalongan Tahun 2020-2024-----	59
Gambar II-25	Indeks Pembangunan Keluarga Kota Pekalongan Tahun 2021-2024 -----	59
Gambar II-26	Indeks Pembangunan Keluarga Kota Pekalongan dibanding Petanglong Tahun 2021-2024-----	60
Gambar II-27	Perbandingan IPG di Kota Pekalongan dengan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020-2024 -----	61
Gambar II-28	Perkembangan IDG Kota Pekalongan dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020-2024 -----	62
Gambar II-29	Indeks Ketimpangan Gender Kota Pekalongan Tahun 2020-2024-----	62
Gambar II-30	Perbandingan Indeks Ketimpangan Gender di Kota Pekalongan dengan Kabupaten sekitar Kota Pekalongan serta Provinsi Jawa Tengah -----	63
Gambar II-31	Perbandingan Usia Harapan Hidup (UHH) Kota Pekalongan dengan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020-2024 -----	65
Gambar II-32	Perkembangan Angka Kematian Balita di Kota Pekalongan dan Jawa Tengah Tahun 2020-2024-----	67
Gambar II-33	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan Kota Pekalongan Tahun 2020-2024 -----	72
Gambar II-34	Indeks Ketahanan Pangan Kota Pekalongan Tahun 2020-2024-----	73
Gambar II-35	Harapan Lama Sekolah di Kota Pekalongan dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020-2024 -----	74
Gambar II-36	Perbandingan Angka Rata-Rata Lama Sekolah Kota Pekalongan dengan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020-2024 -----	75
Gambar II-37	Literasi Membaca SD dan SMP di Kota Pekalongan Tahun 2021-2024 ----	77
Gambar II-38	Numerasi SD / Sederajat di Kota Pekalongan Tahun 2020-2024-----	78
Gambar II-39	Perbandingan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Pekalongan dengan Daerah Sekitar Tahun 2020-2024 -----	87
Gambar II-40	Daya Saing Daerah Berdasarkan Skor Pilar Dalam Ekosistem Inovasi ----	90
Gambar II-42	Indeks Kapabilitas Inovasi-----	91
Gambar II-42	Indeks Inovasi Daerah -----	93
Gambar II-43	Perkembangan Produktivitas Tenaga Kerja Kota Pekalongan -----	103
Gambar II-44	Cakupan Kepesertaan Jaminan Ketenagakerjaan Kota Pekalongan Tahun 2021-2024 -----	103

Gambar II-45	Distribusi Pengeluaran Berdasarkan Kriteria Bank Dunia Kota Pekalongan Tahun 2020-2024 -----	113
Gambar II-46	Perkembangan Nilai Investasi di Kota Pekalongan Tahun 2020-2024 ----	114
Gambar II-47	Realisasi Nilai Ekspor dan Impor di Kota Pekalongan Tahun 2020-2024 -----	115
Gambar II-48	Peta V/C Ratio Ruas Jalan di Kota Pekalongan -----	119
Gambar II-49	Perbandingan Laju Inflasi Kota Pekalongan dengan Provinsi dan Nasional Tahun 2020-2024 -----	124
Gambar II-50	Perbandingan Laju Inflasi Kota Pekalongan dengan Daerah Setara Tahun 2020-2024 -----	124
Gambar II-51	Rasio Pajak Daerah Terhadap PDRB Kota Pekalongan Tahun 2020-2024 -----	127
Gambar II-52	Perolehan Indeks Integritas Nasional Kabupaten/Kota Tertinggi di Jawa Tengah Tahun 2020-2024-----	132
Gambar II-53	Perkembangan Pendapatan, Belanja Daerah dan Pembiayaan Kota Pekalongan Tahun 2020-2024-----	186
Gambar II-54	Hasil Penjaringan Harapan Masyarakat -----	227
Gambar II-55	Hasil FGD Tematik -----	228
Gambar II-56	Visi Pembangunan Kota Pekalongan 2025-2045-----	230
Gambar II-57	Kerangka Pikir RPJPD Kota Pekalongan 2025-2045-----	236
Gambar II-58	Sasaran Utama Visi Pembangunan Kota Pekalongan 2025-2045 -----	236
Gambar II-59	Misi Pembangunan Kota Pekalongan 2025-2045 -----	237
Gambar II-60	Tahapan Pembangunan RPJPD Kota Pekalongan 2025-2045 -----	238
Gambar III-1	Gambaran Visi RPJM Daerah Tahun 2025-2029-----	285
Gambar III-2	Konsep Pencapaian Tujuan dan Sasaran Pembangunan -----	298
Gambar III-3	Tema pada tahapan tahunan pembangunan -----	302
Gambar III-4	Kawasan Strategis Kota Pekalongan -----	314

BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJM Daerah adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. RPJM Daerah ini merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJP Daerah, RTRW dan RPJM Nasional. Hal ini telah ditegaskan dalam Pasal 12 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Dalam kerangka Perencanaan Jangka Panjang (RPJP Daerah) Kota Pekalongan Tahun 2025-2045, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pekalongan Tahun 2025-2029 merupakan periode jangka menengah pertama. Sesuai dengan arah kebijakan periode tahun 2025-2029, maka RPJM Daerah Tahun 2025-2029 diarahkan pada kebijakan **“Penguatan Fondasi Perwujudan Mina Batik”**. Tahap pertama ini dilakukan dengan penguatan fondasi *transformasi ekonomi menuju ekonomi sirkular yang didukung dengan peningkatan lingkungan hidup dan infrastruktur yang berkualitas*. Penguatan tersebut disertai dengan *penguatan Transformasi Sosial yang Produktif, Berkarakter dan Berbudaya*. Kebijakan tersebut dapat dicapai dengan dukungan *penguatan landasan transformasi tata kelola pemerintahan digital yang akuntabel, transparan, berintegritas, tangkas dan kolaboratif* serta *penguatan kondusivitas wilayah yang memberikan rasa aman bagi warga*.



Sumber: Bapperida Kota Pekalongan, 2025

Gambar I-1

Mandatori RPJP Daerah dalam penyusunan RPJM Daerah Tahun 2025-2029

Pada periode 2025-2029, **Transformasi Sosial** yang Produktif, Berkarakter dan Berbudaya diarahkan pada peningkatan layanan pendidikan yang merata, inklusif dan berorientasi pada internalisasi nilai agama dan budaya dalam pendidikan karakter sebagai muatan lokal di semua jenjang pendidikan formal maupun non formal, serta pemenuhan pelayanan kesehatan untuk semua serta memperluas perlindungan sosial yang adaptif bagi masyarakat rentan. **Perwujudan kondusivitas wilayah** untuk memberikan rasa aman bagi warga diarahkan pada pembangunan karakter masyarakat berwawasan kebangsaan dengan fondasi agama, peningkatan kualitas SDM penegak trantibum linmas, serta dukungan sarpras kebencanaan yang memadai. **Transformasi tata kelola pemerintahan** digital yang akuntabel, transparan, berintegritas, tangkas dan kolaboratif diarahkan pada penguatan kelembagaan, SDM, regulasi yang tepat fungsi, partisipasi dan kolaborasi, disertai penguatan fondasi pemerintahan digital untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan akuntabel dengan fokus peningkatan akuntabilitas kinerja pemerintahan sampai level A. **Transformasi ekonomi** menuju ekonomi sirkular yang kreatif, inovatif, merata dan inklusif diarahkan pada penguatan fondasi perwujudan sektor perikanan, batik dan jasa sebagai produk unggulan serta implementasi ekonomi sirkular dengan fokus pada penguatan pengetahuan dan kesadaran pelaku dan stakeholder ekonomi, pembangunan sistem dan tata kelola, penguatan branding, penguatan riset dan inovasi untuk meningkatkan nilai tambah produk unggulan daerah. Peningkatan pemahaman tentang prinsip-prinsip ekonomi sirkular, baik di kalangan konsumen, pelaku usaha, maupun pembuat kebijakan menjadi prasyarat dalam mewujudkan transformasi ini. **Perwujudan lingkungan hidup, infrastruktur perkotaan dan permukiman yang berkualitas** diarahkan pada penguatan pengelolaan lingkungan hidup, infrastruktur perkotaan dan permukiman yang nyaman dan berkualitas, dengan fokus pada kelompok air, manajemen limbah, penguatan pondasi kerjasama daerah dalam penanganan limbah, feeder angkutan aglomerasi Petanglong dan stasiun kereta api, serta dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Selain berpedoman pada RPJP Daerah, RPJM Daerah Tahun 2025-2029 juga berpedoman pada Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan nomor 30 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pekalongan Tahun 2009-2029. Di dalam Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020, khususnya Pasal 4, dan Pasal 5, disebutkan bahwa tujuan penataan ruang wilayah kota adalah **Terwujudnya Kota Kreatif yang didukung perdagangan dan jasa, industri, dan perikanan, yang nyaman, aman, produktif, serta berkelanjutan**. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, telah ditetapkan kebijakan-kebijakan yang meliputi :

1. pengembangan kegiatan industri kreatif yang mempertimbangkan kualitas lingkungan;
2. pengembangan kawasan perdagangan dan jasa yang mampu meningkatkan peran Kota sebagai pusat kawasan regional Petanglong;
3. pengaturan kegiatan industri;
4. peningkatan hasil perikanan dan optimalisasi lahan pertanian;
5. peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan prasarana;
6. peningkatan pengelolaan dan pelestarian kawasan lindung;
7. pengelolaan dan pengembangan kawasan budidaya sesuai dengan daya tampung dan daya dukung kawasan;
8. peningkatan pengelolaan kawasan strategis Kota;
9. peningkatan pengelolaan kawasan rawan bencana; dan
10. peningkatan pengendalian pemanfaatan ruang.

Untuk mewujudkan keselarasan, serta sekaligus sinergi dan kolaborasi dalam perencanaan pembangunan antara dokumen perencanaan pembangunan dengan dokumen perencanaan tata ruang, Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah nomor 59

Tahun 2022 tentang Perkotaan, serta secara lebih teknis telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Penyelenggaraan Pengelolaan Perkotaan. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut disebutkan bahwa Rencana Penyelenggaraan Pengelolaan Perkotaan atau RP2P merupakan bagian dokumen RPJM Daerah yang dioperasionisasikan dalam RKPD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pedoman ketiga yang diamanatkan dalam penyusunan RPJM Daerah adalah RPJM Nasional. Saat ini, Pemerintah telah menetapkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029. Sejalan dengan RPJM Nasional tersebut, maka terdapat rencana pemerintah pusat dalam Pengembangan Kawasan Perkotaan Pekalongan-Batang dan Kawasan Pengembangan Industri Batang, sebagai berikut :

1. Pengembangan dan penataan kawasan Perkotaan Pekalongan - Batang, antara lain melalui :
 - Penyusunan Masterplan penataan kawasan perkotaan dan rencana tata ruang yang mengintegrasikan potensi dan masalah perkotaan secara terpadu.
 - Pemenuhan layanan dasar air minum, penanganan limbah dan penyediaan ruang terbuka hijau.
 - Penyediaan dan peningkatan layanan pendidikan/pelatihan tenaga kerja yang terintegrasi dengan sektor ketenagakerjaan.
2. Penataan permukiman kumuh terpadu perkotaan.
3. Pembangunan rumah murah bersanitasi baik bagi pekerja, MBR, Gen Z, dan milenial di kawasan perkotaan Pekalongan-Batang (PHTC).
4. Pengembangan layanan unggulan kesehatan ibu-anak, kanker, jantung, stroke, dan sistem rujukan berbasis kompensasi di RSUD Provinsi dan Kab/Kota, khususnya pada RSUD Kraton Kab. Pekalongan (PHTC).
5. Pembangunan TPST Regional Pekalongan-Batang.
6. Pengembangan SPAM Regional Pekalongan-Batang.
7. Peningkatan ketahanan banjir perkotaan Pekalongan dan pembangunan pengaman pantai pesisir Pekalongan-Batang.
8. Pembangunan pipa gas bumi Cirebon - Semarang
9. Perencanaan dan persiapan Pembangunan Kereta Api Cepat (HST) Jakarta-Surabaya.
10. Pengembangan kota agropolitan Pekalongan
11. Penguatan pendidikan dan pelatihan vokasi, serta produktivitas tenaga kerja, melalui pembangunan / pengembangan / peningkatan Balai Latihan Kerja sesuai kebutuhan industri wilayah.

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 juga telah menetapkan 77 Proyek Strategis Nasional (PSN). Salah satu di antaranya yang bersinggungan dengan pembangunan di Kota Pekalongan adalah Pembangunan *Giant Sea Wall* Pantai Utara Jawa yang melingkupi DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Banten, dan Jawa Tengah. Selain itu, terdapat juga PSN lain yang lokasinya secara nasional, dimana dapat diprakarsai / diusulkan dan dilaksanakan baik oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara maupun badan usaha swasta. PSN-PSN tersebut, antara lain : Revitalisasi Sarana dan Prasarana Sekolah dan Madrasah yang Berkualitas; Pembangunan dan Penyelenggaraan Sekolah Unggul; Pembangunan Rumah Sakit Lengkap Berkualitas di Kabupaten / Kota; dan juga layanan Irigasi Pendukung Lumbung Pangan Nasional.



Sumber: Bapperida Kota Pekalongan, 2025

Gambar I-2
Mandatori RPJM Nasional dalam penyusunan RPJM Daerah Tahun 2025-2029

Selain berpedoman pada RPJP Daerah, RTRW, ataupun RPJM Nasional, secara substansi, penyusunan RPJM Daerah Tahun 2025-2029 juga memperhatikan rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJM Daerah, serta memperhatikan prinsip dan tujuan pembangunan berkelanjutan. Selain itu, hal pokok dalam penyusunan RPJM Daerah adalah mengimplementasikan bahwa RPJM Daerah merupakan dokumen perencanaan jangka menengah Daerah yang disusun berdasarkan visi dan misi yang diusung oleh Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pekalongan terpilih untuk periode tahun 2025-2030. Sesuai dengan visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pekalongan terpilih pada tahapan pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024, maka RPJM Daerah Tahun 2025-2029 akan diarahkan untuk mewujudkan Visi **“Mewujudkan Kota Pekalongan Lebih Maju, Sejahtera, dan Berkelanjutan Berlandaskan Akhlaqul Karimah”**. Kemudian untuk mewujudkan visi tersebut, terdapat 9 (sembilan) misi yaitu:

1. Menjunjung tinggi hukum demi menjamin hak-hak rakyat dengan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, kolaboratif, dan sinergis sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945;
2. Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan di semua jenjang secara merata;
3. Meningkatkan kualitas kesehatan dan mewujudkan jaminan layanan kesehatan masyarakat;
4. Membangun infrastruktur yang berkelanjutan dan ramah lingkungan;
5. Peningkatan layanan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat;
6. Membangun kemandirian ekonomi daerah berbasis potensi sumber daya lokal;
7. Melestarikan dan mengembangkan budaya lokal;
8. Meningkatkan keamanan dan kondusivitas wilayah; dan
9. Mewujudkan pengelolaan lingkungan yang bersih dan berkelanjutan.

Penyusunan RPJM Daerah Tahun 2025-2029 tidak terlepas dari kondisi lingkungan, baik lokal, regional, ataupun nasional dan global. Pada tataran lokal, penyusunan RPJM Daerah ini memperhatikan dan mempertimbangkan dinamika terbaru, seperti :

1. Dengan telah selesainya pembangunan Pasar Banjarsari yang akan berdampak pada perkembangan ekonomi, maka perlu dilakukan kelanjutan penataan ruang terbuka publik yaitu Taman Sorogonen dan Jalan Pati Unus;

2. Penataan kawasan alun-alun sebagai ruang terbuka publik sejalan dengan pembangunan pusat kuliner di eks pendopo Kabupaten Pekalongan;
3. Penanganan permasalahan sampah dan limbah cair yang belum terselesaikan dengan baik;
4. Kelanjutan pembangunan pengendali banjir dan rob pada sistem Breml – Meduri;
5. Rencana pembangunan pelabuhan perikanan *onshore* dengan pembiayaan dari JICA;
6. Rencana pemindahan RSUD Kraton setelah selesainya pembangunan RSUD Kraton di Wiradesa, yang nantinya perlu diantisipasi dampak pelayanan kesehatan rujukan untuk masyarakat di sekitar RSUD Kraton; dan
7. Pengembangan Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB) serta pengembangan kawasan wisata pegunungan di Kabupaten Batang dan Kabupaten Pekalongan perlu disikapi peluang dan tantangan yang dapat memberikan dampak positif bagi Kota Pekalongan.

Pada tataran regional, sesuai RPJP Daerah Provinsi, Provinsi Jawa Tengah ditetapkan sebagai salah satu pusat pengembangan industri dan penyediaan pangan nasional, menjadi penting untuk ditangkap sebagai salah satu peluang positif bagi Kota Pekalongan. Selain itu, kebijakan pembangunan yang bersinggungan dengan kepentingan Kota Pekalongan, seperti rencana pengembangan SPAMREG PETANGLONG dan juga rencana pengembangan moda transportasi angkutan publik massal untuk aglomerasi PETANGLONG, perlu untuk menjadi salah satu perhatian dalam RPJM Daerah Tahun 2025-2029.

Pada tataran nasional, selain kebijakan yang tertuang dalam RPJM Nasional, RPJM Daerah tahun 2025-2029 juga perlu memperhatikan dinamika tata kelola pemerintahan. Kebijakan efisiensi dan realokasi anggaran yang berdampak cukup signifikan pada awal tahun 2025, perlu disikapi secara bijak. Hal ini mengingat, bahwa roda pemerintahan juga tetap terbebani untuk mencapai target-target makro pembangunan seperti pertumbuhan ekonomi yang harus mencapai minimal 8 persen ataupun penurunan angka kemiskinan harus 0,25 - 0,75 persen pada tahun 2045. Kebijakan Makan Bergizi Gratis dan rencana pembangunan Sekolah Rakyat, juga menjadi salah satu isu nasional yang akan tetap memberikan warna pada dinamika pembangunan di Kota Pekalongan.

Kemudian, untuk tataran global, kondisi Kota Pekalongan yang sangat rentan terdampak perubahan iklim menjadi sangat perlu disikapi dengan berbagai upaya adaptasi. Kesiapan pemerintah dan masyarakat secara bersama-sama dalam menyikapi dampak perubahan iklim menjadi strategis guna mengurangi munculnya risiko sebagai akibat dari fenomena perubahan iklim tersebut. Di sisi lain, Kota Pekalongan saat ini menjadi semacam laboratorium bagi berbagai penelitian di tingkat nasional dan internasional atas dampak fenomena perubahan iklim. Kondisi ini harus dipandang sebagai peluang untuk mampu menyinergikan berbagai sumber pembiayaan pembangunan untuk dapat dialokasikan di Kota Pekalongan.

Gambaran ringkas tersebut serta berbagai permasalahan dan isu strategis lain berdasarkan gambaran umum yang ada, maka perlu mempertimbangkan aspek sinergitas antara berbagai sumber daya dan pemerintahan di dalam penyusunan strategi dan arah kebijakan, program, dan kegiatan yang kemudian akan menjadi pedoman bagi Pemerintah Kota Pekalongan dan masyarakat dalam mengimplementasikannya selama periode tahun 2025-2029.

1.2. DASAR HUKUM PENYUSUNAN

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-Kota Ketjil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4868);
9. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
10. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
11. Undang-undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

12. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan PerUndang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
13. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5315);
14. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
15. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
16. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
17. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
18. Undang-undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025 – 2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Dati II Pekalongan dengan Kabupaten Dati II Pekalongan, dan Kabupaten Dati II Batang, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan

- Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6624);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 23. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
 24. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 25. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 26. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 27. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
 28. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
 29. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2021 tentang Kemudahan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6654);
 30. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2022 tentang Perkotaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6840);
 31. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6909);
 32. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
 33. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal-Semarang-Salatiga-Demak-Grobogan, Kawasan Purworejo-Wonosobo-Magelang-Temanggung dan Kawasan Brebes-Tegal-Pemalang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 224);
 34. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
 35. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);

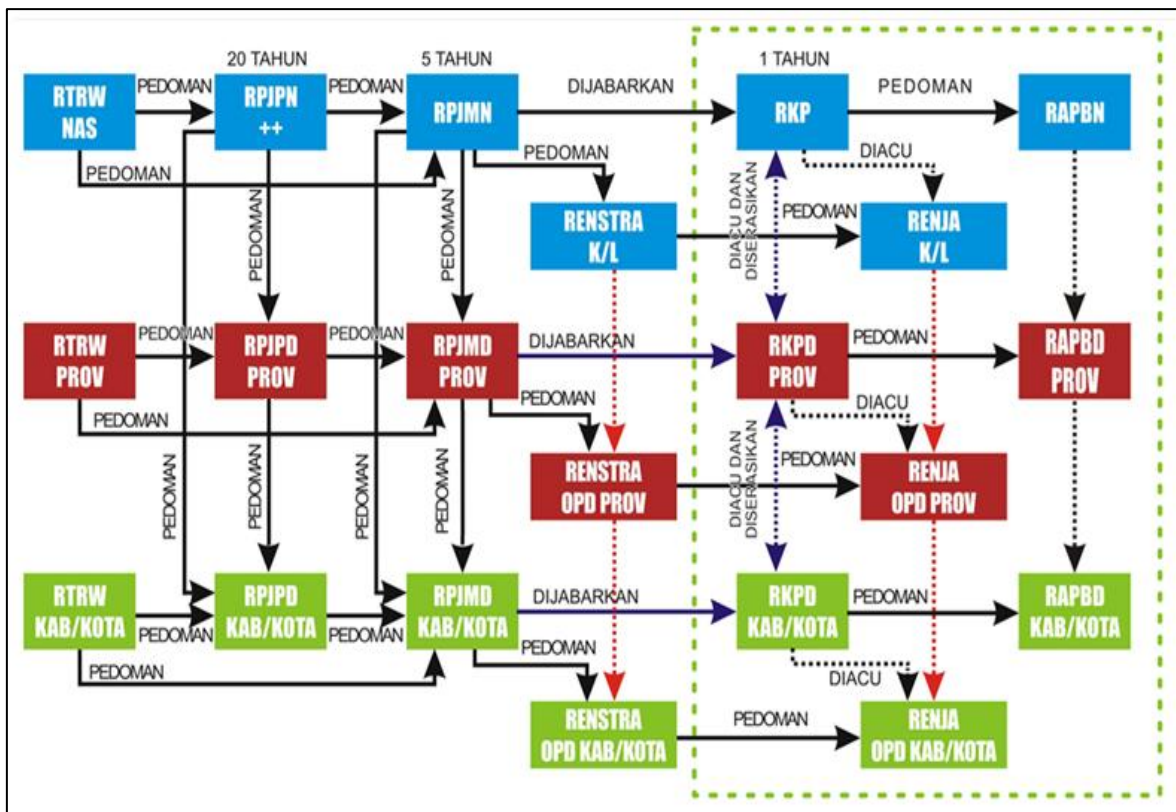
36. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
37. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025 – 2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 159);
38. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2044 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 161);
39. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan Nomor 5 Tahun 1992 tentang Pekalongan Kota Batik Sebagai Sesanti Masyarakat dan Pemerintah Tingkat Kotamadya Pekalongan dalam Membangun Masyarakat, Kota dan Lingkungannya (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tahun 1992 Nomor Seri D Nomor 8);
40. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 30 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pekalongan Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2011 Nomor 30) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pekalongan Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2020 Nomor 9);
41. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2014 Nomor 13);
42. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekalongan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2016 Nomor 5), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekalongan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2020 Nomor 1);
43. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2016 Nomor 14);
44. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2017 Nomor 9);
45. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2019 Nomor 1);
46. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2019 Nomor 13);
47. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025 – 2045 (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2024 Nomor 5);
48. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2029 (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2024 Nomor 8);
49. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;

50. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
51. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
52. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
53. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
54. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
55. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
56. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
57. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
58. Peraturan Menteri Dalam Negeri 24 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Penyelenggaraan Pengelolaan Perkotaan (RP2P);
59. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029,

1.3. HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN RPJM DAERAH TAHUN 2025-2029 DENGAN DOKUMEN PERENCANAAN LAINNYA

RPJM Daerah Tahun 2025-2029 merupakan periode pertama dari RPJP Daerah. Untuk mewujudkan suatu dokumen perencanaan pembangunan sebagai satu kesatuan yang utuh dengan sistem perencanaan pembangunan nasional dan pembangunan daerah Provinsi Jawa Tengah, maka RPJM Daerah Tahun 2025-2029 disesuaikan dan berpedoman pada RPJP Daerah, RTRW, RPJM Nasional dan RPJM Daerah Provinsi Jawa Tengah.



Sumber: Bapperida Kota Pekalongan, 2025

Gambar I-3
Hubungan Antar Dokumen

1.3.1. RPJM Daerah Tahun 2025-2029 dengan RPJP Daerah

Sesuai dengan Pasal 12 ayat (2) Permendagri Nomor 86 tahun 2017, bahwa RPJM Daerah disusun dengan berpedoman pada RPJP Daerah. RPJM Daerah Tahun 2025-2029 disusun berpedoman pada RPJP Daerah. Visi Kota Pekalongan Tahun 2025-2045 “PEKALONGAN Kota MINA BATIK yang BERKELANJUTAN” selain memiliki akronim Makmur, berIntegritas, Nyaman, Aman, berBudaya, Agamis, Transformatif, Inovatif, dan Kreatif yang Berkelanjutan, juga mencerminkan Pekalongan sebagai daerah dengan produk unggulan MINA dan BATIK. Filosofi MINA BATIK dalam Visi RPJP Daerah mengandung makna sebuah cita-cita mewujudkan Kota Pekalongan sebagai daerah maju di tahun 2045 yang didukung oleh dua produk unggulan daerah, yaitu ikan dan batik

Hubungan antar dokumen RPJM Daerah Tahun 2025-2029 dengan RPJP Daerah ditunjukkan dalam tabel I-1 berikut.

Tabel I-1
Hubungan RPJM Daerah Tahun 2025-2029 dengan RPJP Daerah

RPJP Daerah	RPJM Daerah Tahun 2025-2029
Visi: <i>“PEKALONGAN Kota MINA BATIK yang BERKELANJUTAN”</i> <i>Makmur, berIntegritas, Nyaman, Aman, berBudaya, Agamis, Transformatif, Inovatif, dan Kreatif yang Berkelanjutan</i>	Visi: <i>Mewujudkan Kota Pekalongan Lebih Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan Berlandaskan Akhlaqul Karimah</i>

RPJP Daerah	RPJM Daerah Tahun 2025-2029
<i>Misi</i>	<i>Misi</i>
1. Mewujudkan transformasi sosial yang produktif, berkarakter dan berbudaya	2. Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan di semua jenjang secara merata 3. Meningkatkan kualitas kesehatan dan mewujudkan jaminan layanan kesehatan masyarakat 5. Peningkatan layanan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat
2. Mewujudkan kondusivitas wilayah untuk memberikan rasa aman bagi warga	8. Meningkatkan keamanan dan kondusivitas wilayah
3. Menyelenggarakan transformasi tata kelola pemerintahan digital yang akuntabel, transparan, berintegritas, tangkas dan kolaboratif	1. Menjunjung tinggi hukum demi menjamin hak-hak rakyat dengan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, kolaboratif, dan sinergis sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945
4. Mewujudkan transformasi ekonomi menuju ekonomi sirkular yang kreatif, inovatif, merata dan inklusif	6. Membangun kemandirian ekonomi daerah berbasis potensi sumber daya lokal 7. Melestarikan dan mengembangkan budaya lokal
5. Mewujudkan lingkungan hidup, serta infrastruktur perkotaan dan permukiman yang berkualitas	4. Membangun infrastruktur yang berkelanjutan dan ramah lingkungan 9. Mewujudkan pengelolaan lingkungan yang bersih dan berkelanjutan

Sumber : Bapperida Kota Pekalongan, 2025

Arah kebijakan periode pertama (Tahun 2025-2029) RPJP Daerah adalah “Penguatan Pondasi Perwujudan Mina Batik” yang dijabarkan sebagai berikut:

1. Transformasi sosial yang produktif, berkarakter dan berbudaya diarahkan pada peningkatan layanan pendidikan yang merata, inklusif dan berorientasi pada internalisasi nilai agama dan budaya dalam pendidikan karakter sebagai muatan lokal di semua jenjang pendidikan formal maupun non formal, pemenuhan pelayanan kesehatan untuk semua serta memperluas perlindungan sosial yang adaptif bagi masyarakat rentan.
2. Perwujudan kondusivitas wilayah untuk memberikan rasa aman bagi warga diarahkan pada pembangunan karakter masyarakat berwawasan kebangsaan dengan pondasi agama, peningkatan kualitas SDM penegak trantibum linmas, serta dukungan sarpras yang memadai.
3. Transformasi tata kelola pemerintahan digital yang akuntabel, transparan, berintegritas, tangkas dan kolaboratif diarahkan pada penguatan kelembagaan, SDM, regulasi yang tepat fungsi, partisipasi dan kolaborasi, disertai penguatan pondasi pemerintahan digital untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan akuntabel dengan fokus peningkatan akuntabilitas kinerja pemerintahan sampai level A.
4. Transformasi ekonomi menuju ekonomi sirkular yang kreatif, inovatif dan merata diarahkan pada penguatan pondasi perwujudan sektor perikanan, batik dan jasa sebagai produk unggulan serta implementasi ekonomi sirkular dengan fokus pada penguatan pengetahuan dan kesadaran pelaku dan stakeholder ekonomi, pembangunan sistem dan tata kelola, penguatan branding, penguatan riset dan inovasi untuk meningkatkan nilai tambah produk unggulan daerah.

5. Perwujudan lingkungan hidup, infrastruktur perkotaan dan permukiman yang berkualitas diarahkan pada penguatan pengelolaan lingkungan hidup serta infrastruktur perkotaan dan permukiman yang nyaman dan berkualitas, dengan fokus pada kelompok air, manajemen limbah serta dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi.

1.3.2. RPJM Daerah Tahun 2025-2029 dengan RPJM Nasional

Berdasarkan RPJM Nasional, visi pembangunan nasional tahun 2025-2029 yaitu “Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045”. Visi tersebut mengandung arti pembangunan memerlukan kerja sama seluruh putra-putri terbaik bangsa dengan kesamaan tekad berdasarkan fondasi yang telah dibangun oleh pemerintah sebelumnya untuk mewujudkan Indonesia setara negara maju di tahun 2045. Visi ini dicapai melalui 8 (delapan) Misi yang dituangkan dalam 8 (delapan) Asta Cita, yaitu :

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
3. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur.
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.
5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur

Pembangunan nasional jangka menengah tahun 2025-2029 yang dilaksanakan guna menuju pada sasaran pembangunan nasional sebagai berikut:

- a. Meningkatkan Pendapatan per Kapita Menuju Setara Negara Maju
 - Penumbuhan ekonomi dan 5,05 persen (2024) menjadi 5,3 persen (2025) dan menuju 8 persen (2029);
 - GNI per kapita meningkat dari 4.870 USD (2023) menjadi 5,410 USD (2025) dan 8.000 USD (2029);
 - Kontribusi PDB maritim meningkat dari 7,9 persen (2022) menjadi 8,1 persen (2025) dan 9,1 persen (2029);
 - Kontribusi PDB manufaktur meningkat dari 18,57 persen (2023) menjadi 20,8 persen (2025) dan 21,9 persen (2029).
- b. Kepemimpinan dan Pengaruh di Dunia Internasional Meningkat
 - Global Power Indeks meningkat dari peringkat 34 (2023) menjadi peringkat 33 (2025) dan peringkat 29 (2029).
- c. Kemiskinan Menurun dan Ketimpangan Berkurang
 - Tingkat kemiskinan turun dari 9,03 persen (Maret 2024) menjadi 7,0 - 8,0 persen (2025) dan 4,5 - 5,0 persen (2029) serta kemiskinan ekstrem (2,15 PPP-*purchasing power parity*) hingga <0,5 persen (2026);

- Rasio gini turun dari 0,379 (Maret 2024) menjadi 0,378 - 0,382 (2025) dan 0,372 - 0,375 (2029);
 - Kontribusi PDRB Kawasan Timur Indonesia (KTI) meningkat dari 20,9 persen (2023) menjadi 21,4 persen (2025) dan 22,4 persen (2029).
- d. Daya Saing Sumber Daya Manusia Meningkat
- Indeks Modal Manusia (IMM) meningkat dari 0,54 (2020) menjadi 0,56 (2025) dan 0,59 (2029).
- e. Intensitas Emisi GRK menurun menuju *net zero emission*
- Penurunan intensitas emisi GRK dari 34,09 persen (2022) menjadi 35,53 persen (2025) dan 45,17 persen (2029);
 - Indeks kualitas lingkungan hidup meningkat dari 72,54 (2023) menjadi 76,49 (2025) dan 77,20 (2029).

Hubungan antar dokumen RPJM Daerah Tahun 2025-2029 dengan RPJM Nasional ditunjukkan dalam tabel I-2 berikut.

Tabel I-2
Hubungan RPJM Daerah Tahun 2025-2029 dengan RPJM Nasional

RPJM Nasional	RPJM Daerah Tahun 2025-2029
Visi	Visi
<i>Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045</i>	<i>Mewujudkan Kota Pekalongan Lebih Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan Berlandaskan Akhlaqul Karimah</i>
Misi	Misi
1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM)	1. Menjunjung tinggi hukum demi menjamin hak-hak rakyat dengan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, kolaboratif, dan sinergis sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945 8. Meningkatkan keamanan dan kondusivitas wilayah
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	6. Membangun kemandirian ekonomi daerah berbasis potensi sumber daya lokal 8. Meningkatkan keamanan dan kondusivitas wilayah
3. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur	4. Membangun infrastruktur yang berkelanjutan dan ramah lingkungan 6. Membangun kemandirian ekonomi daerah berbasis potensi sumber daya lokal
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas	2. Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan di semua jenjang secara merata 3. Meningkatkan kualitas kesehatan dan mewujudkan jaminan layanan kesehatan masyarakat
5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri	6. Membangun kemandirian ekonomi daerah berbasis potensi sumber daya lokal
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan	5. Peningkatan layanan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat

RPJM Nasional	RPJM Daerah Tahun 2025-2029
	6. Membangun kemandirian ekonomi daerah berbasis potensi sumber daya lokal
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba	1. Menjunjung tinggi hukum demi menjamin hak-hak rakyat dengan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, kolaboratif, dan sinergis sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan Makmur	7. Melestarikan dan mengembangkan budaya lokal 8. Meningkatkan keamanan dan kondusivitas wilayah 9. Mewujudkan pengelolaan lingkungan yang bersih dan berkelanjutan

Sumber : Bapperida Kota Pekalongan, 2025

1.3.3. RPJM Daerah Tahun 2025-2029 dengan RTRW

Amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa dalam rangka penyusunan rencana pembangunan daerah harus mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah. RPJM Daerah Tahun 2025-2029 disusun berpedoman pada RTRW.

Amanat Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang bahwa Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota menjadi pedoman untuk: a) penyusunan rencana pembangunan jangka panjang daerah; b) penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah; c) pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah kabupaten/kota; d) pewujudan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan antarsektor; dan e) penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi. Berdasarkan ketentuan tersebut maka penyusunan RPJM Daerah Tahun 2025-2029 berpedoman pada RTRW. RPJM Daerah berpedoman pada RTRW merupakan kebutuhan dan sangat penting karena kedua dokumen ini saling terkait dalam perencanaan pembangunan daerah.

Urgensi RPJM Daerah Tahun 2025-2029 berpedoman pada RTRW dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Dasar Legal dan Kewajiban Regulasi.
Menurut ketentuan perundang-undangan, seperti UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, perencanaan pembangunan (termasuk RPJM Daerah) wajib memperhatikan dan berpedoman pada RTRW. Ini adalah keharusan hukum, bukan sekadar pilihan;
2. Menjamin Konsistensi dan Sinkronisasi Perencanaan.
RPJM Daerah menetapkan arah kebijakan pembangunan daerah dalam jangka menengah (5 tahun), sedangkan RTRW mengatur pemanfaatan ruang wilayah untuk jangka panjang

(20 tahun). Dengan berpedoman pada RTRW, RPJM Daerah akan memastikan bahwa program dan kegiatan pembangunan tidak bertentangan dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;

3. Mencegah Konflik Pemanfaatan Ruang.

RTRW memuat zonasi dan peruntukan ruang wilayah, seperti kawasan permukiman, industri, pertanian, konservasi dan lain-lain. Jika RPJM Daerah tidak mengacu pada RTRW, ada potensi kegiatan pembangunan terjadi di zona yang tidak sesuai, sehingga berisiko menimbulkan konflik sosial, kerusakan lingkungan, atau pelanggaran hukum;

4. Menjamin Keberlanjutan Pembangunan.

RTRW memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan. Dengan mengikuti arahan RTRW, RPJM Daerah akan lebih memperhatikan aspek keberlanjutan dalam pembangunan, termasuk dalam penggunaan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan;

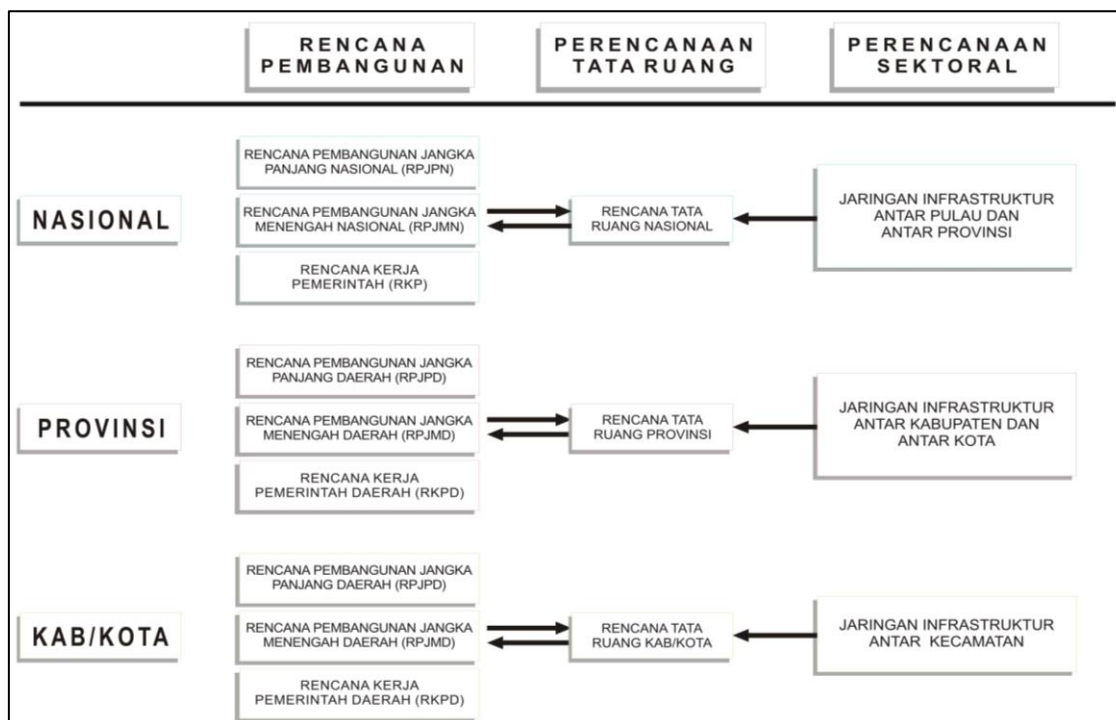
5. Memperkuat Keterpaduan Program Lintas Sektor.

Dengan berpedoman pada RTRW, maka RPJM Daerah akan lebih mudah dalam menyusun program-program lintas sektor (misalnya infrastruktur, ekonomi, lingkungan hidup) secara terpadu dan tidak tumpang tindih; serta

6. Efisiensi Anggaran dan Program.

Dengan berpedoman pada RTRW, alokasi anggaran pembangunan dalam RPJM Daerah akan lebih tepat sasaran, karena diarahkan ke lokasi dan sektor yang memang direncanakan dalam tata ruang wilayah.

Berdasarkan uraian tersebut maka disimpulkan bahwa penyusunan RPJM Daerah berpedoman pada RTRW agar pembangunan daerah dilakukan secara terarah, legal, efisien, berkelanjutan, dan tidak menimbulkan konflik pemanfaatan ruang. Menjadi kebutuhan Pembangunan daerah bahwa RPJM Daerah berpedoman pada RTRW.



Sumber: Bapperida Kota Pekalongan, 2025

Gambar I-4
Hubungan Perencanaan Pembangunan dengan Rencana Tata Ruang

1.3.4. RPJM Daerah Tahun 2025-2029 dengan RPJM Daerah Provinsi Jawa Tengah

RPJM Daerah Tahun 2025-2029 disusun berpedoman pada RPJM Daerah Provinsi Jawa Tengah. Namun demikian, sehubungan dengan rentang waktu penyusunan RPJM Daerah Provinsi Jawa Tengah yang sama dengan rentang waktu penyusunan RPJM Daerah Tahun 2025-2029, maka makna mempedomani dipraktikkan dengan penyusunan yang dilaksanakan secara simultan dan resiprokal. Artinya, pada saat terdapat perkembangan dalam penyusunan dokumen RPJM Daerah Provinsi Jawa Tengah, maka akan dilakukan penyesuaian pada dokumen RPJM Daerah Tahun 2025-2029. Demikian juga sebaliknya, jika terdapat dinamika pembangunan di Kota Pekalongan yang belum diprediksikan sebelumnya, maka akan disampaikan sebagai masukan agar dapat diwujudkan adanya keselarasan dokumen antar-jenjang pemerintahan.

Hubungan antar dokumen RPJM Daerah Tahun 2025-2029 dengan RPJM Daerah Provinsi Jawa Tengah ditunjukkan dalam tabel I-3 berikut.

Tabel I-3
Hubungan RPJM Daerah Tahun 2025-2029 dengan
RPJM Daerah Provinsi Jawa Tengah

RPJM Daerah Provinsi Jawa Tengah	RPJM Daerah Tahun 2025-2029
Visi: <i>Jawa Tengah Sebagai Provinsi Maju Yang Berkelanjutan Untuk Menuju Indonesia Emas 2045</i>	Visi: <i>Mewujudkan Kota Pekalongan Lebih Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan Berlandaskan Akhlaqul Karimah</i>
Misi	Misi
1. Meningkatkan layanan dasar yang inklusif untuk mewujudkan sumber daya manusia yang mandiri, kompetitif dan berwawasan global	2. Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan di semua jenjang secara merata 3. Meningkatkan kualitas kesehatan dan mewujudkan jaminan layanan kesehatan masyarakat
2. Meningkatkan pertumbuhan perekonomian perkotaan dan pedesaan berbasis sektor unggulan yang inovatif, mandiri dan berkelanjutan	6. Membangun kemandirian ekonomi daerah berbasis potensi sumber daya lokal 7. Melestarikan dan mengembangkan budaya lokal 9. Mewujudkan pengelolaan lingkungan yang bersih dan berkelanjutan
3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan kolaboratif dengan mengedepankan nilai-nilai integritas	1. Menjunjung tinggi hukum demi menjamin hak-hak rakyat dengan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, kolaboratif, dan sinergis sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945
4. Mewujudkan pembangunan infrastruktur Jawa Tengah yang merata dan berkeadilan, melalui perencanaan tata ruang yang responsif	4. Membangun infrastruktur yang berkelanjutan dan ramah lingkungan
5. Menjaga stabilitas dan kondusivitas daerah dengan pendekatan budaya lokal, serta menjamin kebebasan warga dalam menjalankan ibadah, perlindungan kesejahteraan sosial serta hak asasi manusia yang berkeadilan	8. Meningkatkan keamanan dan kondusivitas wilayah
6. Menjaga iklim investasi yang kondusif dan kolaboratif untuk membuka kesempatan kerja	5. Peningkatan layanan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat

RPJM Daerah Provinsi Jawa Tengah	RPJM Daerah Tahun 2025-2029
dan berusaha seluas-luasnya bagi warga Jawa Tengah. Serta mengembangkan pembiayaan pembangunan yang partisipatif, kolaboratif, dan terintegrasi	

Sumber : Bapperida Kota Pekalongan, 2025

1.3.5. RPJM Daerah Tahun 2025-2029 dengan Renstra-PD

Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM Daerah). Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJM Daerah dan bersifat indikatif.

1.3.6. RPJM Daerah Tahun 2025-2029 dengan RKPD

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang disusun dengan menjabarkan rencana tahunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM Daerah). RKPD memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

1.3.7. RPJM Daerah Tahun 2025-2029 dengan Rencana Pembangunan Sektoral

Selain memiliki hubungan dengan dokumen perencanaan pembangunan Nasional, Provinsi Jawa Tengah, RTRW dan RPJP Daerah, RPJM Daerah Tahun 2025-2029 juga memperhatikan beberapa dokumen antara lain; 1) Agenda pembangunan *Sustainable Development Goals* (SDGs); 2) Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM); 3) Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJM Daerah dan dokumen perencanaan sektoral lainnya.

1.4. MAKSUD DAN TUJUAN

1.4.1. Maksud

Maksud dari penyusunan dokumen RPJM Daerah Tahun 2025-2029 adalah untuk memberikan gambaran/konsep dari arah perencanaan dan pelaksanaan strategi pembangunan dalam 5 (lima) tahun kedepan kepada semua *stakeholders* pembangunan dalam mewujudkan cita-cita masyarakat Kota Pekalongan sesuai dengan visi, misi dan program pembangunan dari Wali Kota dan Wakil Wali Kota masa bakti 2025-2029.

1.4.2. Tujuan

Tujuan penyusunan RPJM Daerah Tahun 2025-2029 adalah:

1. Menjabarkan visi misi ke dalam tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program prioritas pembangunan Daerah dan gambaran keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJP Daerah, RTRW dan RPJM Nasional;
2. Menjamin konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan;

3. Menjadi tolak ukur kinerja Wali Kota dan Wakil Wali Kota dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan daerah serta instrumen bagi DPRD dalam melaksanakan fungsi pengawasan;
4. Menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra-PD Tahun 2025-2029.

1.5. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika RPJM Daerah Tahun 2025-2029 disusun berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029, sebagai berikut:

BAB I	:	Pendahuluan Bab ini menguraikan latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen RPJM Daerah Tahun 2025-2029 dengan dokumen perencanaan lainnya, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan.
BAB II	:	Gambaran Umum Daerah Bab ini menjelaskan dan menyajikan secara logis dasar-dasar analisis, gambaran umum daerah yang meliputi aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek daya saing daerah, aspek pelayanan umum, hasil evaluasi kinerja Pemerintah Daerah, gambaran keuangan daerah serta permasalahan dan isu strategis.
BAB III	:	Visi, Misi, dan Program Prioritas Pembangunan Daerah Bab ini menjelaskan tentang uraian visi kepala daerah terpilih, artikulasi atau penjelasan kata-kata kunci dari pernyataan visi, pernyataan dan penjelasan masing-masing misi, rumusan dan pernyataan masing-masing tujuan dan sasaran, strategi yang dipilih untuk mencapai tujuan dan sasaran, arah kebijakan dari setiap strategi yang terpilih serta program pembangunan daerah. Penjelasan ini mencakup hubungan antara setiap strategi dengan arah dan kebijakan yang ditetapkan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran tersebut. Selanjutnya, program pembangunan daerah disusun berdasarkan masing-masing strategi untuk menentukan program prioritas. Program pembangunan daerah ini mencerminkan keselarasan antara program prioritas dengan sasaran pembangunan melalui implementasi strategi yang dipilih.
BAB IV	:	Program Perangkat Daerah dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Bab ini memuat program perangkat daerah yang dirancang untuk mencapai visi dan misi, serta kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.
BAB V	:	Penutup Bab ini menjelaskan tentang pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan.

BAB II GAMBARAN UMUM DAERAH

2.1. ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI

2.1.1. Posisi dan Peran Strategis Daerah

Kota Pekalongan merupakan salah satu kota di wilayah Provinsi Jawa Tengah (terdapat 35 kabupaten/kota di wilayah Provinsi Jawa Tengah, terdiri dari 6 kota dan 29 kabupaten). Luas wilayah Kota Pekalongan adalah 46,42 km² atau hanya 0,14 persen dari luas wilayah Provinsi Jawa Tengah. Kota Pekalongan merupakan kawasan pesisir Utara Pulau Jawa dan merupakan salah satu simpul strategis jalur pantai Utara Pulau Jawa karena Kota Pekalongan terletak di pertengahan antara Jakarta dan Kota Surabaya. Jarak Kota Pekalongan ke Jakarta adalah 384 Km dan jarak Kota Pekalongan ke Kota Surabaya adalah 409 Km. Kota Pekalongan dapat dicapai melalui transportasi darat jalan raya serta jalur kereta api.

Dengan telah beroperasinya jalan tol trans Jawa sejak Desember 2018, seluruh wilayah yang dilewati jalur jalan tol trans Jawa memiliki posisi yang relatif sama. Posisi strategis wilayah sangat ditentukan oleh seberapa besar daya tarik dan peran suatu daerah tersebut. Oleh karena itu, masing-masing daerah berkompetisi, meningkatkan daya tarik dan perannya, agar tetap dan semakin menarik kunjungan dari wilayah lainnya. Kota Pekalongan, dengan segala potensi dan permasalahan yang dimilikinya, harus terus meningkatkan daya tarik dan perannya, sehingga dapat lebih mendorong laju pertumbuhan ekonominya, dan pada akhirnya dapat mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Secara historis-morfologis, Kota Pekalongan yang berbentuk linier dengan kecenderungan ke arah Barat dan Timur menandakan kuatnya jalur transportasi regional pantai Utara Pulau Jawa. Dalam perkembangannya bentuk linier kota juga berkembang ke arah Selatan, yang menunjukkan keterkaitan erat Kota Pekalongan dengan kawasan sekitarnya, terutama dengan Kabupaten Pekalongan. Kondisi ini tentunya menjadi keunggulan dan daya tarik yang bersifat geografis alami.

Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) menetapkan Kota Pekalongan sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW). Sebagai PKW maka diharapkan Kota Pekalongan dapat berperan menjadi pusat pengembangan bagi wilayah di sekitarnya, yang meliputi Kabupaten Pekalongan dan Kabupaten Batang. Dalam sistem pengembangan wilayah Provinsi Jawa Tengah, RTRW Provinsi Jawa Tengah juga menetapkan Kota Pekalongan sebagai bagian dan simpul utama dari Wilayah Pengembangan (WP) Petanglong (Kota Pekalongan, Kabupaten Batang dan Kabupaten Pekalongan).

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Nomor 8 Tahun 2024 tentang RTRW Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2044, arah pengembangan WP Petanglong adalah memadukan pengembangan permukiman perkotaan, mendorong kerjasama antar daerah, mendorong pengembangan wilayah dan prasarana KITB (Kawasan Industri Terpadu Batang) dengan daerah sekitarnya, pengembangan fasilitas logistik dalam rangka mendorong kemudahan pergerakan barang hasil industri, pengendalian pemanfaatan wilayah pesisir yang mengalami penurunan tanah dan peningkatan rob, mengendalikan alih fungsi lahan sawah, pengelolaan

limbah industri/ kerajinan batik, mengembangkan pelabuhan umum dan pelabuhan perikanan serta pengembangan industri pengolah hasil pertanian, kehutanan perikanan dengan tetap mempertimbangkan kelestarian alam. Pada arah pengembangan WP Petanglong, Kota Pekalongan diarahkan dalam hal pengembangan permukiman perkotaan, pengendalian wilayah pesisir yang mengalami degradasi tanah dan rob, pengelolaan limbah industri batik, pengembangan pelabuhan perikanan. Selain itu, dalam penetapan Kawasan Strategis Provinsi (KSP) Provinsi Jawa Tengah, Kota Pekalongan termasuk dalam KSP dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi dan KSP dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup. Jenis KSP dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi di Kota Pekalongan adalah KSP Kawasan Industri Maritim. Sedangkan jenis KSP dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup yang ada di Kota Pekalongan adalah KSP Kawasan Rawan Rob dan Penurunan Muka Tanah.

Dalam konstelasi regional, Kota Pekalongan memiliki posisi yang strategis yaitu dilalui jalan arteri primer Pantai Utara (pantura) Jawa dan memiliki akses langsung dari pintu tol, sehingga Kota Pekalongan memiliki keunggulan komparatif (*comparative advantage*) jika dibandingkan daerah lainnya. Keunggulan ini diharapkan dapat menjadi lokomotif bagi kemajuan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.



Sumber: RTRW Kota Pekalongan 2009-2029, 2025

Gambar II-1
Peta Orientasi Kota Pekalongan

2.1.2. Potensi Sumber Daya Alam

2.1.2.1. Topografi dan Jenis Tanah

Secara topografis, wilayah Kota Pekalongan terletak di dataran rendah pantai Utara Pulau Jawa dengan ketinggian lahan pada sebagian wilayah terletak antara 0 - 20 meter dpl. Keseluruhan wilayah berada pada kemiringan lereng 0-8 persen. Kondisi ini dapat menggambarkan bahwa keseluruhan wilayah Kota Pekalongan sangat datar, beda tinggi yang sangat kecil dan bahkan di beberapa tempat tertentu telah teridentifikasi memiliki ketinggian di bawah permukaan air laut seperti di kawasan Pabean Kelurahan Padukuhan Kraton Kecamatan Pekalongan Utara, dan juga di kawasan Pasirsari Kelurahan Pasirkratonkramat

Kecamatan Pekalongan Barat. Kondisi tersebut mengindikasikan adanya amblesan tanah (*land subsidence*) di wilayah Kota Pekalongan. Berdasarkan penelitian dan pendapat beberapa ahli, amblesan tanah di wilayah Kota Pekalongan telah terjadi secara signifikan dan menjadi salah satu ancaman bagi pengembangan wilayah kota ke depan sehingga harus mendapatkan perhatian yang sangat serius untuk menanggulangnya.

Dengan kondisi wilayah yang sangat datar dan terdapat kawasan yang memiliki ketinggian di bawah permukaan air laut, berimplikasi terhadap pengelolaan sumberdaya air, terutama drainase. Tantangan pengelolaan sumberdaya air dan drainase ini tentunya akan semakin berat dihadapi Kota Pekalongan, apalagi dengan adanya fenomena pemanasan global dan perubahan iklim yang berimplikasi terjadinya kenaikan permukaan air laut.

Seluruh daratan Kota Pekalongan terbentuk karena sedimentasi, sehingga tanahnya berjenis *alluvial*. Tanah *alluvial* yang ada di Kota Pekalongan dapat dikelompokkan menjadi *alluvial hidromorf*, *alluvial* kelabu tua serta *alluvial* kelabu dan *alluvial* coklat kekelabuan. Sebaran tanah *alluvial* hidromorf yaitu di kawasan Utara kota (merupakan bagian dari kipas *alluvial*). Sebaran *alluvial* kelabu tua di wilayah Timur dan Barat kota serta sebaran tanah *alluvial* kelabu dan *alluvial* coklat kekelabuan terdapat di sepanjang koridor ke arah Selatan kota.

Jenis tanah *alluvial hidromorf* mempunyai ciri-ciri fisik warna kelabu, bertekstur liat, dan memiliki permeabilitas (*water run off*) lambat. Jenis tanah ini biasanya banyak digenangi oleh air sehingga warnanya tua kelabu sampai kehitaman. Daerah penyebarannya terdapat di berbagai ketinggian tetapi umumnya di dataran rendah dengan wilayah relatif datar. Jenis tanah *alluvial hidromorf* cocok dimanfaatkan untuk pertanian, pertambakan dan permukiman. Jenis tanah *alluvial* kelabu tua mempunyai ciri-ciri yang sama dengan jenis tanah *alluvial hidromorf*, namun warnanya yang kelabu tua. Jenis tanah *alluvial* kelabu tua cocok juga digunakan untuk pertanian, pertambakan dan permukiman. Demikian juga jenis tanah *alluvial* kelabu dan *alluvial* coklat kekelabuan memiliki ciri-ciri yang sama dengan jenis tanah *alluvial hidromorf* dan cocok dimanfaatkan untuk penggunaan pertanian, pertambakan dan permukiman.



Sumber: RTRW Kota Pekalongan 2009-2029, 2025

Gambar II-2
Jenis Tanah di Wilayah Kota Pekalongan

Wilayah Kota Pekalongan didominasi oleh jenis tanah *alluvial* yang tersebar di seluruh kecamatan, sementara jenis tanah kipas *alluvial* hanya terdapat di sebagian wilayah utara. Kecamatan di bagian selatan dan barat memiliki sebaran tanah *alluvial* yang merata, sedangkan wilayah utara menjadi kawasan terluas karena memiliki kombinasi antara tanah *alluvial* dan kipas *alluvial*. Komposisi ini mencerminkan potensi lahan yang subur dan strategis, namun juga menunjukkan adanya kerentanan terhadap dinamika lingkungan, terutama di wilayah-wilayah yang berada pada elevasi rendah.

2.1.2.2. Geologi

Berdasarkan informasi batuan yang berasal dari analisis Peta Geologi Lembar Pekalongan skala 1:1000 yang bersumber dari Pusat Penelitian dan Pengembangan Geologi Bandung, bahwa litologi batuan di Kota Pekalongan merupakan endapan sedimen *alluvium*, terbentuk pada jaman *holosen* periode tersier dengan ketebalan ± 150 meter yang terdiri dari kerikil, pasir, lanau dan lempung, endapan sungai dan rawa. Endapan *alluvium* ini terbentuk menutupi lapisan batuan anggota breksi formasi Ligung yang bersusunan andesit, lava andesit *hornblend* dan *tufa* yang merupakan bagian atas formasi Ligung yang terbentuk pada *pliosen* akhir-*pliosen* awal. Lapisan *alluvium* pada permukaan di sepanjang pantai didominasi oleh pasir sedangkan di daerah muara adalah lempung, endapan sungai dan rawa.

Morfologi pantai di bagian Barat, berpasir halus yang bercampur dengan vegetasi seperti semak belukar atau ladang dan di pantai bagian Timur adalah berpasir cenderung berlumpur. Bentuk lahan di Kota Pekalongan dibedakan menjadi 2 bentukan yaitu dataran *alluvial* dan dataran *alluvial* pantai. Dataran *alluvial* merupakan hasil proses *fluvial* sedangkan dataran *alluvial* pantai merupakan hasil dari proses *marine*.

Satuan-satuan bentuk lahan yang berada pada kelompok dataran *alluvial* semuanya tersusun atas batuan yang berasal dari pengendapan material yang dibawa oleh aliran air karena diendapkan oleh aliran air maka terdapat sortasi yang baik. Material yang berukuran halus akan diendapkan belakangan dibandingkan dengan material yang berukuran kasar.



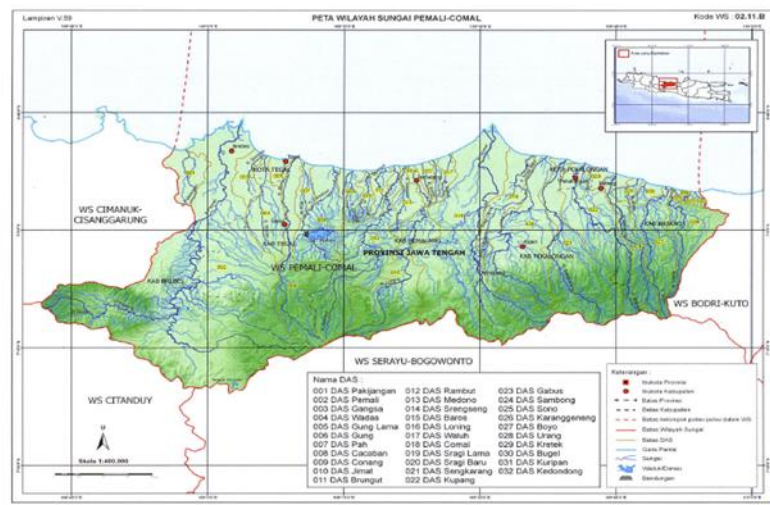
Sumber: RTRW Kota Pekalongan 2009-2029, 2025

Gambar II-3
Peta Geologi Wilayah Kota Pekalongan

Seluruh wilayah Kota Pekalongan berada di atas dataran *alluvium* yang tersebar merata di empat kecamatan, dengan Kecamatan Pekalongan Utara sebagai wilayah terluas. Kondisi geologi ini, ditambah posisi geografis kota yang terletak di kawasan pesisir dan hilir sungai, menyebabkan sebagian wilayah—terutama Pekalongan Utara dan Pekalongan Barat—rentan terhadap pasang surut air laut, curah hujan tinggi, dan limpasan air dari hulu. Hal ini memicu terjadinya genangan permanen dan meluasnya kawasan rob, terutama di daerah permukiman yang tersebar di wilayah Kota Pekalongan.

2.1.2.3. Hidrologi

Kota Pekalongan sebagai kota yang berbatasan langsung dengan Laut Jawa, dialiri beberapa sungai. Terdapat 4 (empat) sungai yang melewati wilayah Kota Pekalongan yaitu Sungai Meduri, Bremini, Pekalongan dan Banger. Keempat sungai tersebut termasuk ke dalam 3 (tiga) Daerah Aliran Sungai (DAS) yaitu DAS Sengkarang, DAS Kupang dan DAS Susukan.



Sumber: Keppres No. 12 Tahun 2012 tentang Penetapan Wilayah Sungai

Gambar II-4
Wilayah Sungai Pemali-Comal

Sebaran DAS yang melintasi Kota Pekalongan diketahui sebaran DAS merata ke seluruh kecamatan di Kota Pekalongan, dengan Pekalongan Utara memiliki luasan DAS terbesar (15,08 km²), menunjukkan potensi tekanan lingkungan yang tinggi di wilayah ini, terutama dalam hal drainase, banjir, dan pencemaran. Dominasi DAS Kupang dan DAS Sengkarang, yang mencakup >87 persen total luas DAS Kota Pekalongan, memperlihatkan bahwa permasalahan yang terjadi di bagian hulu DAS (Kabupaten Pekalongan dan Batang) sangat mempengaruhi kondisi lingkungan di wilayah Kota Pekalongan sebagai hilirnya.

Daerah Irigasi (DI) yang berada di wilayah Kota Pekalongan merupakan DI kewenangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. DI kewenangan Pemerintah Pusat meliputi DI Kupang-Krompeng seluas 919 Ha dan DI Pesantren Kletak seluas 271 Ha, sedangkan DI kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yaitu Asem Siketek/Kesetu seluas 262 Ha. Pemerintah Kota Pekalongan sendiri tidak mempunyai kewenangan Daerah Irigasi (DI) yang mengacu pada Peraturan Menteri PUPR No.14/PRT/M/2015 tentang Kriteria dan Penetapan Daerah Irigasi.

Kota Pekalongan merupakan dataran rendah yang hanya memiliki rata-rata elevasi 6 mdpl menyebabkan laju aliran sungai menuju muara tidak terlalu deras karena berada pada wilayah muara sehingga setiap limbah yang dibuang ke sungai banyak yang mengendap. Ditambah lagi dengan beban pencemaran yang sangat besar dari buangan limbah rumah

tangga dan industri di wilayah Kota Pekalongan maupun dari wilayah hulu (terutama Kabupaten Pekalongan) maka air permukaan di wilayah Kota Pekalongan tidak bisa dimanfaatkan sebagai air baku untuk air bersih. Di wilayah Kota Pekalongan muncul suatu keyakinan, jika air sungainya berwarna-warni atau sangat kotor maka menunjukkan perekonomian sedang bagus. Air sungai yang kotor tersebut menunjukkan limbah buangan industri di Kota Pekalongan meningkat karena terjadinya proses produksi industri yang meningkat. Sebaliknya, jika air sungai relatif bersih maka menandakan berkurangnya proses produksi yang dilakukan industri.

Berdasarkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 2 Tahun 2017 tentang Cekungan Air Tanah (CAT) di Indonesia maka wilayah Kota Pekalongan termasuk dalam bagian CAT Pekalongan-Pemalang. CAT Pekalongan-Pemalang berlokasi pada 1090 18' 45,31" - 1090 51' 52,35" Bujur Timur dan 060 46' 33,52" - 070 13' 24,20" Lintang Selatan, yang meliputi wilayah Kabupaten Pemalang, Pekalongan, Batang dan Kota Pekalongan. Air baku untuk air bersih Kota Pekalongan berasal dari wilayah Kota Pekalongan, Kabupaten Batang dan Kabupaten Pekalongan. Sumber air baku dari wilayah Kabupaten Pekalongan dan Batang meliputi: a) sumber air baku dari Program SPAM Regional Petanglong Tahap 1 yang terletak di Desa Jambangan Kecamatan Talun Kabupaten Pekalongan; b) sumber air baku dari Sungai Kupang Sambong di Desa Cepagan Kecamatan Warungasem Kabupaten Batang, pemanfaatan melalui Instalasi Pengolah Air (IPA); c) sumber air baku dari mata air Desa Kembanglangit Kecamatan Blado Kabupaten Batang, pemanfaatan dengan pengambilan langsung; d) sumber air baku dari mata air di Desa Rogoselo Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan, pemanfaatan dengan pengambilan langsung, pemanfaatan melalui IPA (Instalasi Pengolahan Air). Sumber air baku bagi air minum dari wilayah Kota Pekalongan berasal dari pemanfaatan air tanah karena tidak adanya sumber mata air dan air permukaan yang sudah tidak memungkinkan dimanfaatkan sebagai sumber air baku.

Dengan memperhatikan faktor topografi, geologi dan kondisi hidrogeologi, sumber daya air tanah di wilayah Kota Pekalongan termasuk ke dalam kategori air tanah dataran pantai sehingga kondisi air tanahnya sebagian besar merupakan air tanah dangkal. Air tanah dataran pantai ditutupi oleh *al gluvium* dan endapan pantai sebagai hasil rombakan batuan yang lebih tua. Kondisi ini dapat kita temui di sebagian besar wilayah, ketika kita melubangi tanah 1 (satu) meter saja maka akan segera keluar rembesan air tanah. Dengan memperhitungkan sebaran batuan, vegetasi dan kemiringan lereng, maka diperkirakan 30 persen dari jumlah curah hujan tersebut merupakan surplus pengisian kembali air tanah.

Karena ketersediaan air tanah yang cukup memadai maka beberapa lokasi telah dilakukan pengeboran sumur tanah dalam yang dikelola oleh PDAM Kota Pekalongan maupun PAMSIMAS (Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat). Tetapi dengan kecenderungan peningkatan kebutuhan air tanah, baik kebutuhan untuk perumahan/permukiman maupun kebutuhan industri pengolahan, dan kondisi wilayah Kota Pekalongan yang merupakan wilayah pesisir maka seharusnya pengambilan air tanah dalam di wilayah Kota Pekalongan dapat dikendalikan sehingga tidak mengganggu ketersediaannya. Data Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kota Pekalongan Tahun 2016-2021 menunjukkan bahwa terjadi pemanfaatan air tanah yang melebihi daya dukungnya. Hal ini dapat ditunjukkan melalui data bahwa ketika tahun 1985 PDAM Kota Pekalongan mulai membuat sumur bagi air baku, dapat dilakukan dengan kedalaman lebih dari 100 meter. Namun ketika tahun 2015 PDAM membuat sumur maka kedalamannya telah mencapai ± 24 meter. Apabila hal ini berlangsung terus-menerus maka dapat menimbulkan risiko lingkungan yang sangat besar, utamanya intrusi air laut dan penurunan permukaan tanah.

Bertambahnya jumlah penduduk menjadikan kebutuhan air bersih juga terus bertambah. Sebagai salah satu sumber terbaik untuk air bersih, air tanah terus diambil secara intensif, terutama untuk memenuhi kebutuhan air bersih. Pengambilan air tanah ini menjadi tidak terkontrol dan tidak sesuai dengan ketersediaan serta zona pemanfaatannya yang dapat berdampak terhadap kuantitas, kualitas dan daya dukung lingkungan pada CAT setempat. Hal ini juga dapat menimbulkan terjadinya penurunan muka air tanah yang melebihi ambang batas dan juga amblesan tanah dan daya rusak air tanah lain seperti pencemaran air tanah dan penyusutan (intrusi) air laut.

Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral sejak tahun 2020 melakukan penelitian untuk memastikan faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya penurunan permukaan tanah di wilayah Kota Pekalongan. Pada tahun 2020 telah dipasang patok tetap penurunan tanah di Stadion Hoegeng dan Kecamatan Pekalongan Selatan, dilanjutkan pemasangan patok tetap penurunan tanah di Tirta, Kandang Panjang, Degayu dan Setono pada tahun 2021. Diharapkan hasil penelitian ini dapat segera didapatkan sehingga dapat dijadikan dasar bagi pengambilan kebijakan ke depan bagi terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan di Kota Pekalongan.

2.1.2.4. Klimatologi

Iklim Kota Pekalongan termasuk dalam kategori iklim tropis basah. Curah hujan dipengaruhi oleh keadaan iklim, geografi dan perputaran/pertemuan arus udara. Jumlah hari dan curah hujan selama setahun sangat bervariasi. Selama kurun waktu lima tahun terakhir, curah hujan tertinggi terjadi pada tahun 2021 yaitu 3.303 mm dengan jumlah hari hujan sebanyak 124 hari. Sedangkan Curah hujan terendah terjadi pada tahun 2024 yaitu 2.036 mm dengan jumlah hari hujan sebanyak 130 hari. Selengkapnya disajikan dalam Tabel II-1 berikut.

Tabel II-1
Banyaknya Hari Hujan dan Curah Hujan Kota Pekalongan
Tahun 2024

No	Bulan	Hari Hujan (Hari)	Curah Hujan (mm)
1	Januari	22	345
2	Februari	18	340
3	Maret	13	339
4	April	14	144
5	Mei	7	138
6	Juni	7	75
7	Juli	5	86
8	Agustus	4	20
9	September	5	160
10	Oktober	1	5
11	November	15	159
12	Desember	19	225
TOTAL		130	2.036
Tahun 2023		95	2.071
Tahun 2022		126	2.365
Tahun 2021		124	3.303
Tahun 2020		116	2.896

Sumber: Kota Pekalongan Dalam Angka Tahun 2025, 2025

Dilihat dari kondisi tersebut maka menurut Smith dan Ferguson bahwa tipe iklim di wilayah Kota Pekalongan adalah Tipe B. Iklim Tipe B menggambarkan bahwa wilayah tersebut merupakan wilayah basah, dengan nilai Q (perbandingan bulan kering dan bulan basah dikalikan 100 persen) bernilai antara 14,3-33,3 persen.

2.1.2.5. Penggunaan Lahan

Penggunaan tanah dibedakan menjadi tanah sawah dan kering. Luas tanah di Kota Pekalongan tidak mengalami perubahan dari tahun ke tahun, namun apabila dilihat dari fungsi/penggunaannya maka mengalami pergeseran. Tanah sawah luasnya berkurang setiap tahun, namun sebaliknya, tanah kering mengalami peningkatan perluasan. Pada tahun 2024 tanah sawah mengalami sedikit penurunan perluasan menjadi 720,60 Ha, berkurang sekitar 1,96 persen dari tahun 2023 tanah sawah seluas 735,00 Ha. Luasan Tanah kering, meningkat menjadi 3.921,40 Ha, ada penambahan sekitar 14.40 Ha atau 0,37 persen dari luas 2023 yaitu 3.907 Ha.

Tabel II-2
Luas Penggunaan Tanah di Kota Pekalongan Tahun 2020-2024

No	Kecamatan	Tanah Sawah (Ha)	Tanah Kering (Ha)	Jumlah (Ha)
1	Pekalongan Barat	54,00	951,00	1.005,00
2	Pekalongan Timur	228,70	723,30	952,00
3	Pekalongan Selatan	406,90	790,10	1.197,00
4	Pekalongan Utara	31,00	1457,00	1.488,00
TOTAL		720,60	3.921,40	4.642,00
Tahun 2023		735,00	3.907,00	4.642,00
Tahun 2022		832,00	3.810,00	4.642,00
Tahun 2021		886,00	3.756,00	4.642,00
Tahun 2020		886,00	3.756,00	4.642,00

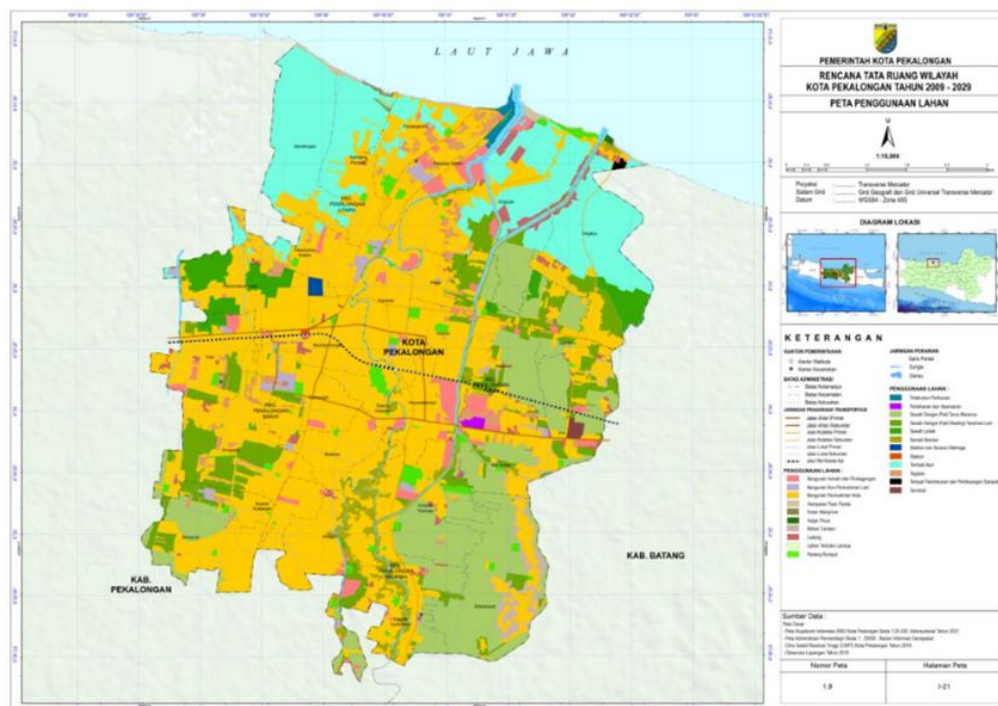
Sumber: Dinperpa Kota Pekalongan, 2025

Menurut sistem pengairannya, sawah-sawah di Kota Pekalongan menggunakan sistem pengairan teknis. Total sawah irigasi teknis tahun 2023 adalah seluas 720,60 Ha, yang meliputi Kecamatan Pekalongan Barat seluas 54 Ha, Kecamatan Pekalongan Timur seluas 228,70 Ha, Kecamatan Pekalongan Selatan seluas 406,90 Ha dan Kecamatan Pekalongan Utara seluas 31 Ha. Kecenderungan yang ada, dari tahun ke tahun, jumlah sawah irigasi teknis semakin menyusut. Jumlah sawah irigasi teknis di Kota Pekalongan tahun 2020 seluas 886 Ha, tahun 2021 tidak ada perubahan sementara pada tahun 2022 luasan tanah sawah mengalami penurunan menjadi 832 Ha. Pada tahun 2023 menurun menjadi 735 Ha dan tahun 2024 mengalami penurunan lagi menjadi 720,60 Ha.

Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa perubahan penggunaan lahan yang kecenderungannya semakin meningkat untuk kawasan terbangun (*built up area*). Kawasan terbangun tersebut terutama untuk pembangunan perumahan/kawasan permukiman, industri serta jasa dan perdagangan. Di samping karena kebutuhan untuk kegiatan budidaya non pertanian, semakin berkurangnya sawah/sawah beririgasi teknis karena semakin meluasnya kawasan sawah yang terkena air laut dan tidak bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya sehingga menjadi lahan *idle* (lahan menganggur atau lahan yang tidak digunakan), terutama lahan yang berada di wilayah Kecamatan Pekalongan Utara.

Upaya pengendalian alih fungsi lahan pertanian dapat dilakukan melalui perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan. Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009, perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan adalah sistem dan proses dalam

merencanakan dan menetapkan, mengembangkan, memanfaatkan dan membina, mengendalikan, dan mengawasi lahan pertanian pangan dan kawasannya secara berkelanjutan. Dimana lahan yang dapat ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan yaitu: lahan beririgasi, lahan reklamasi rawa pasang surut dan non pasang surut, maupun lahan tidak beririgasi. Berdasarkan RTRW maka telah dialokasikan lahan pertanian pangan berkelanjutan seluas 521 Ha atau berkurang dari luasan sebelumnya yaitu seluas 737 Ha. Perubahan luas lahan pertanian pangan berkelanjutan dalam luasan yang lebih kecil karena didasarkan kondisi dan fakta di lapangan semakin menyempitkan lahan pertanian di wilayah Kota Pekalongan serta semakin meningkatnya kebutuhan lahan bagi pengembangan permukiman, sarana dan prasarana perkotaan.



Sumber: RTRW Kota Pekalongan 2009-2029, 2025

Gambar II-5
Peta Penggunaan Lahan di Kota Pekalongan

Penggunaan lahan di wilayah Kota Pekalongan yang paling dominan adalah kawasan permukiman, pertanian, tambak serta perdagangan dan jasa. Akibat kebutuhan bagi pengembangan wilayah, termasuk penyediaan sarana dan prasarana perkotaan maka tekanan terhadap kebutuhan lahan akan terus meningkat. Kecenderungan tekanan tersebut lebih banyak terhadap penggunaan sawah karena sawah dan tambak tentunya memiliki nilai lahan (*land value*) yang relatif lebih rendah. Sedangkan pilihan penggunaan tambak tidak dilakukan karena sebagian besar tambak berlokasi di wilayah Utara, yang merupakan kawasan rob/pasang surut sehingga kecenderungan alih fungsi lahan adalah pada lahan pertanian.

Permasalahan umum pengembangan wilayah di Kota Pekalongan adalah keterbatasan lahan. Kebutuhan pembangunan perkotaan berimplikasi terhadap semakin meningkatnya kebutuhan lahan. Tentunya, kecenderungannya adalah menyebabkan semakin berkurangnya lahan pertanian. Namun, di sisi lain terdapat kebijakan untuk tetap mempertahankan lahan pertanian pangan berkelanjutan. Salah satu dinamika permasalahan perkotaan ini harus dikelola sebaik-baiknya, khususnya dalam kerangka kebijakan penataan ruang. Fokus

pelaksanaan urusan penataan ruang harus lebih ditekankan pada tataran pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.

2.1.3. Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup

Dari hasil kajian daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup di Kota Pekalongan dapat disimpulkan bahwa terdapat 3 (tiga) komponen yang mempengaruhi pembentukan jasa lingkungan hidup yaitu:

1. **Bentang alam** yang merupakan unit geomorfologis yang dikategorikan berdasarkan karakteristik elevasi, kelandaian, orientasi, stratifikasi, paparan batuan, dan jenis tanah. Kota Pekalongan terdiri dari 2 tipe bentang alam, yaitu dataran *fluvial* berombak - bergelombang bermaterial *alluvium* dan dataran *fluviomarin* bermaterial *alluvium*. Bentang alam yang paling dominan adalah dataran *fluvial* berombak – bergelombang bermaterial *alluvium* yang mencapai 95,50 persen atau sebesar 4.412,05 hektar. Tipe bentang alam ini tersebar di semua wilayah Kota Pekalongan. Tipe bentang alam kedua adalah dataran *fluviomarin* bermaterial *alluvium* yang hanya mencapai 4,50 persen atau sebesar 207,99 hektar dan di sepanjang wilayah pesisir di Kecamatan Pekalongan Utara.
2. **Vegetasi alami** merupakan vegetasi atau tumbuh-tumbuhan yang tumbuh secara alami tanpa adanya pembudidayaan. Kota Pekalongan terdiri dari 2 tipe vegetasi alami, yaitu vegetasi hutan tepian sungai malar hijau dan vegetasi mangrove. Tipe vegetasi yang paling dominan adalah vegetasi hutan tepian sungai malar hijau yang mencapai 95,5 persen dari luas total wilayah atau mencapai 4.412,05 hektar yang tersebar hampir di seluruh wilayah Kota Pekalongan. Tipe bentang alam kedua adalah vegetasi mangrove yang hanya mencapai 4,5 persen atau 207,99 hektar dan hanya terdapat di sepanjang wilayah pesisir di Kecamatan Pekalongan Utara.
3. **Penggunaan lahan** merupakan tutupan biofisik pada permukaan bumi yang dapat diamati dan merupakan hasil pengaturan, aktivitas, dan perlakuan manusia. Penggunaan lahan yang paling dominan di Kota Pekalongan baik pada tahun 2020 maupun tahun 2024 adalah permukiman dan lahan terbangun, yang luasnya mencapai lebih dari 50 persen wilayah Kota Pekalongan. Tipe penggunaan lahan lainnya yang dominan adalah sawah yang mencapai kurang lebih 15 persen, dan tambak yang mencapai lebih dari 10 persen.

Analisis jasa lingkungan hidup penting terdiri dari 7 jenis yang terbagi dalam dua kategori yaitu penyedia dan pengatur. Berdasarkan hasil penyusunan daya dukung lingkungan hidup berbasis jasa lingkungan hidup di Kota Pekalongan maka memiliki hasil sebagai berikut.

1. **Jasa Lingkungan Hidup Penyedia Air** yang menunjukkan kemampuan lingkungan dalam menyediakan sumber daya air yang berasal dari air permukaan maupun air tanah. Kondisi di Kota Pekalongan saat ini menunjukkan bahwa sebagian besar yaitu lebih dari 90 persen termasuk dalam kelas sedang. JLH penyedia air kelas tinggi dan sangat tinggi total hanya mencapai kurang lebih 4 persen yang mana kelas tinggi 0,3 persen dan sisanya 3,85 persen merupakan kelas sangat tinggi. Nilai agregat indeks JLH penyedia air di Kota Pekalongan adalah 2,91 pada tahun 2017 yang mengalami peningkatan pada tahun 2023 yang mencapai 2,97. Kecamatan Pekalongan Utara memiliki agregat indeks JLH penyedia air yang relatif tinggi dibandingkan dengan kecamatan lainnya.
2. **Jasa Lingkungan Hidup Penyedia Pangan** merupakan kondisi yang menunjukkan bahwa suatu kawasan dapat menyediakan pangan baik bagi manusia maupun bagi makhluk hidup lainnya. Kota Pekalongan sebagian besar dalam kategori rendah yang mencapai lebih dari 50 persen. Meskipun demikian, JLH penyedia pangan di Kota Pekalongan dengan kelas tinggi dan sangat tinggi relatif besar yaitu mencapai 40 persen yang terdiri

dari kelas tinggi mencapai 7,68 persen dan kelas sangat tinggi mencapai 33,22 persen. Hal ini yang menyebabkan secara agregat indeks JLH penyedia pangan di Kota Pekalongan masuk dalam kategori kelas sedang yaitu mencapai 3,32 pada tahun 2017 dan mengalami penurunan pada tahun 2023 yang mencapai 3,31. Kecamatan yang mempunyai penggunaan lahan berupa sawah dan tambak memiliki nilai agregat indeks JLH penyedia pangan lebih tinggi dibandingkan dengan kecamatan lainnya, seperti Kecamatan Pekalongan Utara.

3. **Jasa Lingkungan Hidup Pengatur Air** merupakan kemampuan lingkungan dalam mengatur siklus hidrologi suatu wilayah. Sebagian besar Kota Pekalongan didominasi oleh JLH pengatur air kelas rendah yaitu mencapai lebih dari 50 persen. Kawasan dengan kemampuan pengatur air kelas sangat tinggi hanya mencapai 4,15 persen pada tahun 2023. Nilai Agregat Indeks JLH pengatur air di Kota Pekalongan termasuk pada kelas rendah yaitu 2,79 pada tahun 2023, nilai ini mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan nilai agregat indeks JLH pengatur air pada tahun 2017 yang mencapai 2,74. Kecamatan Pekalongan Utara merupakan wilayah yang memiliki nilai agregat indeks JLH pengatur air relatif tinggi dibandingkan dengan wilayah lainnya.
4. **Jasa Lingkungan Hidup Pendukung Keanekaragaman Hayati** yang merupakan kemampuan lingkungan dalam memberikan manfaat dengan menyediakan habitat mulai dari tempat istirahat, makan, hingga berkembang biak. Hanya terdapat 2 kelas JLH Pendukung Keanekaragaman Hayati di Kota Pekalongan, yaitu Rendah dan Sedang. Sebagian besar wilayah Kota Pekalongan termasuk dalam kelas rendah yang mencapai lebih dari 90 persen. Nilai agregat indeks jasa lingkungan hidup pendukung keanekaragaman hayati di Kota Pekalongan mengalami penurunan dari tahun 2017 yang mencapai 2,02 dan pada tahun 2023 menjadi 1,99. Wilayah dengan indeks JLH pendukung keanekaragaman hayati relatif tinggi di Kecamatan Pekalongan Barat.
5. **Jasa Lingkungan Hidup Pengatur Iklim** yang merupakan kemampuan lingkungan dalam mengatur berbagai unsur iklim seperti suhu, hujan dan penguapan, kelembaban, serta angin. Kondisi JLH pengatur iklim di Kota Pekalongan sebagian besar dalam kategori rendah sebesar lebih dari 50 persen dari total wilayah. Sedangkan kawasan dengan kelas tinggi hanya sebesar 4,32 persen. Nilai agregat indeks jasa lingkungan hidup pengatur iklim cenderung naik, 2,47 pada tahun 2017, sedangkan pada tahun 2023 yaitu sebesar 2,79.
6. **Jasa Lingkungan Hidup Mitigasi Perlindungan Bencana Banjir** yang merupakan kemampuan lingkungan dalam pencegahan dan perlindungan dari bencana banjir. Kondisi di Kota Pekalongan saat ini sebagian besar dalam kelas rendah yaitu lebih dari 80 persen, sedangkan yang masuk kategori kelas tinggi hanya mencapai 4,32 persen. Nilai agregat indeks jasa lingkungan hidup mitigasi perlindungan bencana banjir di Kota Pekalongan yaitu 2,17 pada tahun 2017, mengalami kenaikan menjadi 2,18 pada tahun 2023. Kecamatan Pekalongan Barat mempunyai nilai agregat indeks jasa lingkungan hidup mitigasi perlindungan bencana banjir lebih tinggi dibandingkan dengan wilayah lainnya.
7. **Jasa Lingkungan Hidup Mitigasi Perlindungan Bencana Longsor**, merupakan kemampuan lingkungan dalam memberikan perlindungan terhadap bencana longsor. Kondisi di Kota Pekalongan saat ini menunjukkan bahwa sebagai besar wilayah untuk JLH mitigasi perlindungan bencana longsor dalam kelas rendah yaitu lebih dari 50 persen. Sedangkan wilayah dengan kelas tinggi dan sangat tinggi mencapai 21,92 persen pada tahun 2023, yang mana 8,13 persen merupakan kelas tinggi dan 13,79 persen masuk dalam kategori sangat tinggi. Nilai agregat indeks jasa lingkungan mitigasi perlindungan bencana longsor saat ini mencapai 3,17. Nilai tersebut menunjukkan bahwa secara nilai

indeks Kota Pekalongan termasuk ke dalam kelas sedang. Wilayah yang memiliki indeks jasa lingkungan hidup mitigasi perlindungan bencana longsor paling tinggi adalah di Kecamatan Pekalongan Utara.

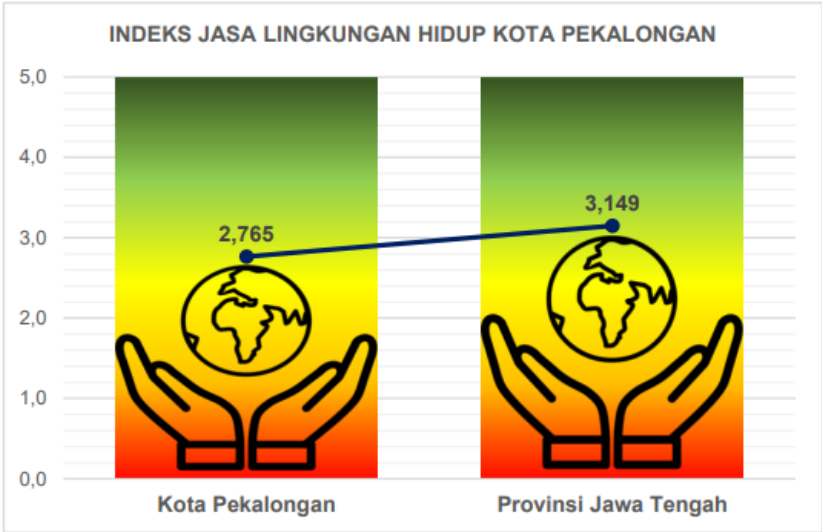
Dalam kajian daya dukung lingkungan hidup dengan membandingkan ketersediaan dan kebutuhan terhadap sumber daya yang meliputi daya dukung air dan daya dukung pangan. Hasil kajian daya dukung lingkungan hidup dengan perbandingan ketersediaan dan kebutuhan di Kota Pekalongan menunjukkan hasil berikut.

1. **Daya dukung air** merupakan perbandingan antara ketersediaan dan kebutuhan air. Potensi ketersediaan air bersumber dari air permukaan (Wilayah Sungai) serta air tanah bebas (Cekungan Air Tanah). Daya dukung air di Kota Pekalongan menunjukkan kondisi terlampaui baik hanya dari potensi air permukaan (wilayah sungai) maupun dengan menggunakan potensi air bawah tanah bebas, namun jika berbasis pada ketersediaan air permukaan dan air bawah tanah bebas, Kota Pekalongan dalam kondisi belum terlampaui. Potensi ketersediaan air permukaan mencapai 50.573.557,23 m³/tahun, ketersediaan air bawah tanah bebas sebesar 35.403.271,17 m³/tahun, sedangkan kebutuhannya mencapai 53.430.447,59 m³/tahun sehingga surplus 32.546.380,81 m³/tahun. Kecamatan Pekalongan Selatan dan Pekalongan Timur dalam kondisi terlampaui jika hanya berbasis ketersediaan air permukaan. Jika hanya berbasis ketersediaan air bawah tanah bebas, semua wilayah di Kota Pekalongan dalam kondisi terlampaui. Namun jika digabungkan, antara air permukaan dengan air bawah tanah bebas maka seluruh kecamatan dalam kondisi belum terlampaui. Dengan potensi ketersediaan air permukaan dan air bawah tanah bebas yang ada maka Kota Pekalongan masih dapat menampung penduduk sampai dengan 358.854 jiwa, namun potensi ketersediaan air ini hanya dilihat berdasarkan kuantitasnya. Permasalahan yang dihadapi Kota Pekalongan saat ini adalah kualitas air yang ada di sungai yang melintas di Kota Pekalongan tercemar oleh air limbah domestik maupun dari industri rumah tangga. Sedangkan potensi air tanah terutama di kawasan rawan rob dan amblesan tanah juga mengalami pencemaran akibat intrusi air laut yang telah mencapai pusat Kota Pekalongan.
2. **Daya dukung pangan**, merupakan perbandingan antara ketersediaan dan kebutuhan yang mana dihitung dengan menggunakan dua pendekatan yaitu berbasis pangan pokok saja (beras) dan juga berbasis kebutuhan total kalori penduduk.
 - **Daya dukung pangan berbasis pangan pokok (beras)** menunjukkan status keseluruhan terlampaui dengan defisit mencapai 16.544,94 ton/tahun yang mana total ketersediaan hanya terdapat 4.235,44 ton/tahun, sedangkan kebutuhan mencapai 20.780,38 ton/tahun. Semua kecamatan di Kota Pekalongan dalam status daya dukung pangan pokok terlampaui.
 - **Daya dukungan pangan berbasis kebutuhan kalori**, menunjukkan status yang terlampaui yang mana defisit mencapai lebih dari 243 miliar kalori per tahun. Seluruh kecamatan dalam status terlampaui.

Dengan kondisi daya dukung pangan berbasis pangan pokok yang mana status saat ini menunjukkan defisit atau terlampaui, maka Kota Pekalongan sudah tidak dapat menampung penduduk eksisting, karena jumlah penduduk yang hanya mampu didukung oleh ketersediaan pangan saat ini hanya 64.849 jiwa saja.

Berdasarkan SK MenLHK No. 973 Tahun 2024 tentang Penetapan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Nasional dan Pulau/Kepulauan yang mana selanjutnya diturunkan menjadi Penentuan dan Penetapan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Sub Provinsi Jawa Tengah, menjelaskan bahwa biokapasitas yang sesuai dengan

karakteristik ekoregion ditentukan oleh jasa lingkungan hidup penyedia air, jasa lingkungan hidup pengatur air, jasa lingkungan penyedia pangan, dan jasa lingkungan pendukung keanekaragaman hayati. Berdasarkan kondisi tersebut maka Indeks Jasa Lingkungan Hidup (IJLH) Kota Pekalongan adalah 2,765 (kategori sedang) yang mana lebih rendah dari IJLH Provinsi Jawa Tengah yang mencapai 3,149 (kategori sedang).



Sumber: Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan Hidup Kota Pekalongan Tahun 2024, 2025

Gambar II-6
Indeks Jasa Lingkungan Hidup Kota Pekalongan

2.1.4. Lingkungan Hidup Berkualitas

2.1.4.1. Kualitas Lingkungan Hidup

Kondisi sumber daya alam dan lingkungan hidup ditunjukkan dengan indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH). Terjadi kecenderungan peningkatan IKLH Kota Pekalongan dalam kurun waktu 2020-2024 sebesar 8,31 poin, dan pada tahun 2024 IKLH Kota Pekalongan mencapai 59,15. Meski terus mengalami peningkatan, kondisi IKLH Kota Pekalongan masih berada di bawah IKLH Provinsi Jawa Tengah dan IKLH Nasional setiap tahunnya, dengan capaian terendah pada komponen Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) dikarenakan peningkatan alih fungsi atau perubahan tata guna lahan serta keterbatasan vegetasi tutupan lahan.

Tabel II-3
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kota Pekalongan Tahun 2020-2024

Tahun	IKA	IKU	IKTL	IKLH
2020	35,33	79,96	23,60	50,84
2021	45,00	80,21	22,40	54,31
2022	45,33	79,29	22,68	54,12
2023	48,86	80,33	24,39	56,24
2024	50,56	84,98	26,14	59,15

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekalongan, 2025

Rendahnya Indeks Kualitas Air (IKA) di Kota Pekalongan disebabkan oleh beberapa parameter yang melebihi baku mutu air kelas II seperti BOD, COD, DO, dan *Fecal Coliform*.

Parameter tersebut merupakan karakteristik dari limbah cair domestik yang bersumber dari pemukiman berupa *grey water* yang merupakan hasil dari cucian dapur, cucian pakaian dan kamar mandi, dan sekitar 60-85 persen dari total volume kebutuhan air bersih akan menjadi limbah cair domestik. Karakteristik dari limbah domestik (*grey water*) yaitu mengandung unsur nitrogen, fosfat, dan potasium, unsur tersebut merupakan nutrisi bagi tumbuhan yang akan menyebabkan eutrofikasi pada badan air. Tingginya kadar organik dalam perairan akan berdampak pada tingginya konsentrasi BOD, COD dan rendahnya konsentrasi DO. Adanya pertumbuhan penduduk di wilayah perkotaan merupakan salah satu potensi terhadap tingginya pencemaran air di Kota Pekalongan. Indeks Kualitas Udara (IKU) di Kota Pekalongan memiliki angka yang relatif masih tinggi. Capaiannya juga menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun.

Indeks kualitas tutupan lahan (IKTL) merupakan penyempurnaan dari indeks tutupan lahan (ITH) yang digunakan sebelum tahun 2015. Metode perhitungan IKTL yang mengkolaborasi beberapa parameter kunci yang menggambarkan adanya aspek konservasi, aspek rehabilitasi dan karakteristik wilayah secara spasial, namun dapat disajikan secara sederhana dan mudah dipahami. Sementara itu Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) di Kota Pekalongan dari tahun 2020-2024 masih relatif rendah, dengan nilai IKTL yang kecil. Kondisi ini dikarenakan di wilayah Kota Pekalongan lebih didominasi oleh permukiman/kawasan terbangun, sedangkan persentase tutupan lahannya masih sangat kurang. Sehingga perlu adanya upaya dalam memperbaiki kondisi tutupan lahan di Kota Pekalongan terutama di kawasan mangrove.

Kualitas tutupan lahan dapat diukur dengan berbagai parameter seperti keragaman jenis vegetasi, kepadatan vegetasi, keberadaan dan kondisi habitat satwa liar, serta kualitas lingkungan hidup yang dihasilkan oleh tutupan lahan tersebut. Hal ini berkaitan erat dengan ketersediaan ruang terbuka hijau yang memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan ekologi dan lingkungan kota, seperti menyediakan habitat bagi keanekaragaman hayati dan menyerap polusi udara. Oleh karena itu, RTH menjadi salah satu komponen penting dalam perencanaan perkotaan yang berkelanjutan.

Berdasarkan data Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kota Pekalongan Tahun 2024–2044, total luas Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Pekalongan adalah sebesar 240,55 hektar. RTH ini terbagi ke dalam enam jenis, yaitu jalur hijau, pemakaman, hutan kota, taman kecamatan, taman kelurahan, dan taman kota. Dari total tersebut, taman kota merupakan jenis RTH yang paling dominan dengan luas 104,48 hektar atau sekitar 43,4 persen. Selanjutnya, taman kecamatan memiliki luas 56,65 hektar (23,5%), taman kelurahan 40,53 hektar (16,8%), pemakaman 32,12 hektar (13,4%), rimba kota 4,20 hektar (1,7%), dan jalur hijau 2,57 hektar (1,1%).

Berdasarkan wilayah kecamatan, Kecamatan Pekalongan Utara memiliki luas RTH terbesar dengan total 104,34 hektar atau 43,4% dari total RTH kota. Disusul oleh Kecamatan Pekalongan Barat seluas 51,68 hektar (21,5%), Kecamatan Pekalongan Selatan seluas 49,10 hektar (20,4%), dan Kecamatan Pekalongan Timur seluas 35,43 hektar (14,7%).

Tabel II-4
Luas Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Pekalongan

Jenis RTH	Luas Menurut Kecamatan (Ha)				Total
	Pekalongan Barat	Pekalongan Selatan	Pekalongan Timur	Pekalongan Utara	
Jalur Hijau	1,33	0,22	0,55	0,47	2,57
Pemukaman	11,56	11,35	2,80	6,42	32,12
Rimba Kota	0,43	0,20	3,58		4,20
Taman Kecamatan	19,87	21,81	8,31	6,66	56,65

Jenis RTH	Luas Menurut Kecamatan (Ha)				Total
	Pekalongan Barat	Pekalongan Selatan	Pekalongan Timur	Pekalongan Utara	
Taman Kelurahan	15,49	4,33	14,83	5,87	40,53
Taman Kota	3,01	11,19	5,37	84,92	104,48
Total	51,68	49,10	35,43	104,34	240,55

Sumber: RTDR Kota Pekalongan Tahun 2024-2044

2.1.4.2. Pengelolaan Sampah

Pengelolaan sampah di Kota Pekalongan selama ini mengandalkan penyelesaian di sisi “hilir”, yaitu Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Degayu. TPA Degayu berada di Kelurahan Degayu Kecamatan Pekalongan Utara dan beroperasi sejak tahun 1994. Luas TPA tersebut adalah 5,8 Ha dan pemrosesannya menggunakan sistem *open dumping* dan mulai tahun 2013 diupayakan peralihan ke sistem *control landfill*. Selama kurang lebih 30 (tiga puluh) tahun, TPA Degayu telah menjadi “tulang punggung” pengelolaan sampah di Kota Pekalongan.

Mulai tahun 2025, Kota Pekalongan harus menerapkan perubahan paradigma pengelolaan sampah dari sebelumnya mengandalkan penyelesaian di “hilir” menjadi penguatan di “hulu” dan “tengah”. Hal ini karena terhitung sejak 20 Maret 2025, TPA Degayu berada dalam pengawasan Pejabat Pengawas LH (PPLH) KLH dan tidak diperbolehkan adanya aktivitas apapun di dalamnya. Selanjutnya pada tanggal 21 Maret 2025, Wali Kota Pekalongan secara cepat menetapkan Status Darurat Sampah melalui surat nomor 600.4.15/0556 Tahun 2025 tentang Status Darurat Pengelolaan Sampah. Dan puncaknya pada tanggal 7 Mei 2025 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 742 Tahun 2025 tentang Penerapan Sanksi Administratif berupa Paksaan Pemerintah Penghentian Seluruh Kegiatan Tempat Pemrosesan Akhir Sampah Degayu, yang didalamnya berisikan:

- Penghentian seluruh kegiatan TPA Degayu paling lama 180 (seratus delapan puluh) hari.
- Melaksanakan pembangunan dan operasionalisasi TPA di tempat baru dengan sistem lahan urug saniter (*sanitary landfill*) paling lama 1 (satu) tahun;
- Melakukan upaya pemulihan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup paling lama 60 (enam puluh) hari, antara lain pembuatan Instalasi Pengolahan Lindi (IPL), Penanganan gas methana dan Pemantauan kualitas udara ambien.

Merespon situasi tersebut, Pemerintah Kota Pekalongan melalui Keputusan Wali Kota Pekalongan Nomor 600.4.15/0836 tahun 2025 tentang Penetapan Dokumen Rencana Penghentian Seluruh Kegiatan TPA Degayu Kota Pekalongan yang menetapkan beberapa hal terkait rencana penghentian seluruh kegiatan TPA Degayu Kota Pekalongan. Dalam dokumen tersebut terdapat langkah-langkah yang akan dilakukan Pemerintah Kota Pekalongan pasca penutupan TPA Degayu antara lain pengalihan lokasi TPA Degayu ke lokasi lain dan pemulihan kualitas lingkungan TPA Degayu.

Berdasarkan data terakhir sebagaimana termuat dalam SIPSN, total timbulan sampah Kota Pekalongan pada tahun 2024 adalah 59.229,58 Ton/ tahun. Sejumlah 10.944,70 ton (18,48%) berhasil dilakukan pembatasan timbulan sampah (*reduce*), pemanfaatan kembali sampah (*reuse*), dan daur ulang sampah (*recycle*). Sebanyak 45.187,00 ton/ tahun (76,29%) masuk ke TPA, sedangkan sisanya 3.097,88 (5,23%) tidak teridentifikasi. Apabila mengacu pada kategorisasi yang dipedomani selama ini, yaitu membedakan pengelolaan sampah menjadi 3 (tiga) kelompok, yaitu: (1) Pengurangan, (2) Penanganan, dan (3) Sampah Tidak Terkelola. Maka, dapat disimpulkan sebagai berikut: (1) Pengurangan sebesar 18,48 persen, (2) Penanganan sebesar 76,29 persen dan Sampah Tidak Terkelola sebesar 5,23 persen, Neraca pengelolaan sampah Kota Pekalongan tahun 2024 sebagaimana tabel II-5.

Tabel II-5
Neraca Pengelolaan Sampah Kota Pekalongan Tahun 2024

No.	KETERANGAN	NILAI (Ton/Tahun)
I	JUMLAH TIMBULAN SAMPAH	
	Jumlah Penduduk x Faktor Estimasi Timbulan Perkapita	59.229,58
II	JUMLAH PENGURANGAN SAMPAH	850,27
	Persentase pengurangan sampah (persen)	1,44
a	Jumlah Pembatasan Timbulan Sampah	2.533,10
b	Jumlah Pemanfaatan Kembali Sampah	850,27
c	Jumlah Pendaauran Ulang Sampah	-
III	JUMLAH PENANGANAN SAMPAH	7.441,30
	Persentase penanganan sampah (persen)	12,56
d	Pemilahan/Pengumpulan	
e	Pengangkutan(*)	-
	Sampah diangkut ke tempat pengolahan sampah (residu pemilahan)	-
	Sampah diangkut ke tempat pemrosesan akhir (residu pengolahan)	-
f	Pengolahan	7.441,30
	Jumlah Sampah terolah menjadi bahan baku (pakan ternak, kompos, daur ulang dan <i>upcycle</i>)	7.441,30
	Jumlah Sampah termanfaatkan menjadi sumber energi	-
g	Pemrosesan akhir	45.187,00
	Jumlah Sampah yang terproses di tempat pemrosesan akhir	45.187,00
IV	SAMPAH YANG DIKELOLA (II + III)	8.291,57
	Persentase sampah terkelola (persen)	14,00
V	SAMPAH TIDAK DIKELOLA (I - IV)	50.938,01
	Persentase sampah tidak terkelola (persen)	86,00

Sumber : Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional, 2025

Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah, merupakan indikator utama pembangunan (IUP). Pada tahun 2024, jumlah timbulan sampah harian mencapai 59.299,58 ton/tahun. Dari jumlah tersebut, 7.441,30 ton dikelola melalui proses pengolahan. Dengan demikian, persentase timbulan sampah yang terolah di fasilitas pengolahan sampah adalah sebesar 12,56 persen. Angka ini mencerminkan proporsi pengolahan sampah yang telah dilakukan dibandingkan dengan total timbulan sampah yang dihasilkan setiap harinya. Upaya peningkatan kapasitas dan efisiensi pengolahan sampah perlu terus dilakukan agar persentase sampah terolah dapat meningkat, mendukung tercapainya target pengelolaan sampah berkelanjutan di Kota Pekalongan.

Tabel II-6
Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah Tahun 2024

Uraian	2024	
	Satuan	Jumlah
Timbulan sampah (data I)	ton/hari	162,27
Jumlah Pendaauran Ulang Sampah (data IIc)	ton/hari	0,00
Pengolahan (data IIIf)	ton/hari	20,39
Timbulan sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah	persen	12,56

Sumber: DLH Kota Pekalongan, 2025

2.1.4.3. Pengelolaan Limbah

Sebagai salah satu kota penghasil batik, Pemerintah Kota Pekalongan berkomitmen untuk melestarikan lingkungan hidup. Komitmen tersebut antara lain diwujudkan dengan dengan pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) baik untuk kebutuhan industri batik dan industri lainnya. Hal ini diperlukan dalam rangka menjaga keseimbangan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Perkembangan Pemanfaatan IPAL Komunal di Kota Pekalongan Tahun 2020-2024 tersaji pada tabel berikut.

Tabel II-7
Perkembangan Pemanfaatan IPAL Komunal di Kota Pekalongan
Tahun 2020-2024

IPAL	2020		2021		2022		2023		2024	
	Jumlah Industri	Limbah (m ³)	Jumlah Industri	Limbah (m ³)	Jumlah Industri	Limbah (m ³)	Jumlah Industri	Limbah (m ³)	Jumlah Industri	Limbah (m ³)
IPAL Kauman	20	125	20	150	19	150	19	200	19	200
IPAL Jenggot	80	600	80	600	80	600	80	150	80	150
IPAL Industri Kecil	73	426	75	430	75	430	-	-	75	1.998
IPAL Bersama	2	700	2	700	2	700	2	500	2	300
IPAL Industri Besar	3	500	3	500	3	500	6	190	8	190
IPAL Biogas Duwet	30	70	30	70	30	70	4	150	4	-
IPAL Pringrejo	25	60	25	75	-	-	-	-	-	-
IPAL Banyurip	55	125	60	150	60	150	-	-	83	250
JUMLAH	288	2.606	295	2.675	269	2.600	111	1190	271	3088

Sumber: DLH Kota Pekalongan, 2025

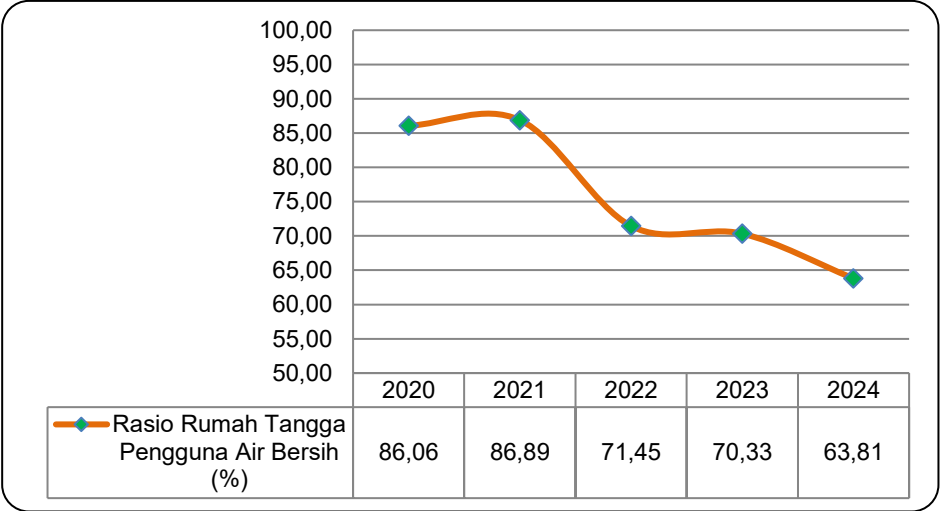
Perkembangan pemanfaatan IPAL komunal di Kota Pekalongan tiap tahunnya mengalami penambahan, baik dalam jumlah industri maupun jumlah limbah yang dihasilkan. Namun untuk IPAL Jenggot dan IPAL Industri Besar mengalami penurunan. Pada IPAL Jenggot dengan jumlah industri yang sama pada tahun 2020 (80 industri) jumlah limbah yang dihasilkan menurun dari 700 m³ menjadi 600 m³. Sedangkan di tahun 2021 dan 2022 tetap sama dengan 2020, dan ditahun 2023 mengalami penurunan yang cukup besar sehingga hanya menyisakan 150 m³ saja. Pada IPAL industri besar, dengan berkurangnya jumlah industri pada tahun 2020 (3 industri) maka jumlah limbah berkurang menjadi 500m³. Jumlah ini sama dengan jumlah di tahun 2021 dan 2022. Beberapa usaha yang belum memiliki pengolahan limbah B3 pada umumnya adalah industri kecil. Untuk IPAL Biogas ternak, sejak tahun 2020 sudah tidak ada limbah karena sudah tidak ada industri yang menghasilkan limbah tersebut. Terjadi anomali jumlah limbah pada tahun 2024 apabila dibandingkan dengan capaian pada tahun-tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan adanya perbedaan cara perhitungan jumlah limbah pada tahun 2020-2023.

Namun demikian masih terdapat daerah yang merupakan sentra industri kecil yang menghasilkan limbah dan belum terdapat layanan IPAL komunal, yaitu: Pringlangu, Bendan Kergon, Pasir Kraton Kramat, Krapyak, Kelgo, Medono, Kuripan Kertoharjo, sebagian wilayah Jenggot dan sebagian wilayah Banyurip.

2.1.4.4. Penyediaan Air Bersih

Dengan jumlah penduduk yang semakin bertambah, membawa konsekuensi meningkatnya kebutuhan air bersih di Kota Pekalongan. Pemenuhan kebutuhan air minum di Kota Pekalongan dilayani melalui PDAM (oleh Perumda Tirtayasa) dan melalui PAMSIMAS

(oleh masyarakat). Secara umum, jumlah layanan air minum (Sambungan Rumah/ SR) oleh PDAM cenderung meningkat. Sebaliknya, jumlah layanan air minum (Sambungan Rumah/ SR) oleh PAMSIMAS cenderung menurun / tetap. Hal ini sejalan dengan upaya Pemerintah untuk menambah pasokan air minum yang bersumber dari air permukaan di banding dengan air bawah tanah. Meskipun demikian, secara keseluruhan (PDAM dan PAMSIMAS), jika dilihat secara persentase capaian layanan air minum sejak 2020 mengalami fluktuasi dan cenderung menurun.



Sumber: DPUPR, Perumda Tirtayasa Kota Pekalongan (diolah), 2025

Gambar II-7
Persentase Rumah Tangga Pengguna Air Bersih di Kota Pekalongan Tahun 2020-2024

Menurunnya rasio rumah tangga pengguna air bersih yang terjadi sejak tahun 2022 dikarenakan perbedaan cara menghitung dari tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun 2022, diasumsikan 1 SR melayani 4,03 jiwa sebagaimana hasil audit BPKP atas kinerja Perumda Tirtayasa tahun 2023 (mengacu pada data BPS yang diperoleh dari pembagian jumlah penduduk dengan jumlah Kartu Keluarga (KK)). Sementara itu, cara menghitung pada tahun-tahun sebelumnya diasumsikan 1 SR melayani 5 jiwa. Data selengkapnya disajikan dalam Tabel II-8 berikut.

Tabel II-8
Penggunaan Air Bersih Untuk Kebutuhan Sambungan Rumah (SR) di Kota Pekalongan Tahun 2020-2024

Tahun	PDAM					PAMSIMAS & DAK (Sumur)		TOTAL		Persentase	
	SR (Sambungan Rumah)		HU (Hidran Umum)								
	Jumlah	Jiwa	Jumlah HU	Jumlah Rumah Tangga	Jiwa	Jumlah	Jiwa	Rumah Tangga	Jiwa	Rumah Tangga	Jiwa
2020	26.923	134.615	214	4.280	21.400	21.663	108.315	52.866	264.330	86,06	86,06
2021	27.193	135.965	214	4.280	21.400	22.103	110.515	53.576	267.880	86,89	86,89
2022	27.538	110.978	251	6.228	25.100	21.150	85.235	54.916	221.313	71,45	71,45
2023	28.035	112.981	251	6.228	25.100	21.150	85.235	55.413	223.316	70,33	70,33
2024	27.918	87.383	285	9.105	28.500	27.851	87.174	77.189	203.057	63,81	63,81

Sumber: DPUPR, Perumda Tirtayasa Kota Pekalongan (diolah), 2025

Pada saat ini, Pemerintah pusat mulai menggeser penggunaan indikator pemenuhan layanan air bersih, dari sebelumnya berupa layanan air bersih menjadi layanan air siap minum. Sehingga terjadi kekosongan data dari lima tahun sebelumnya karena tidak dilakukan pengukuran terhadap semua parameter air siap minum sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 2 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan.

2.1.5. Demografi

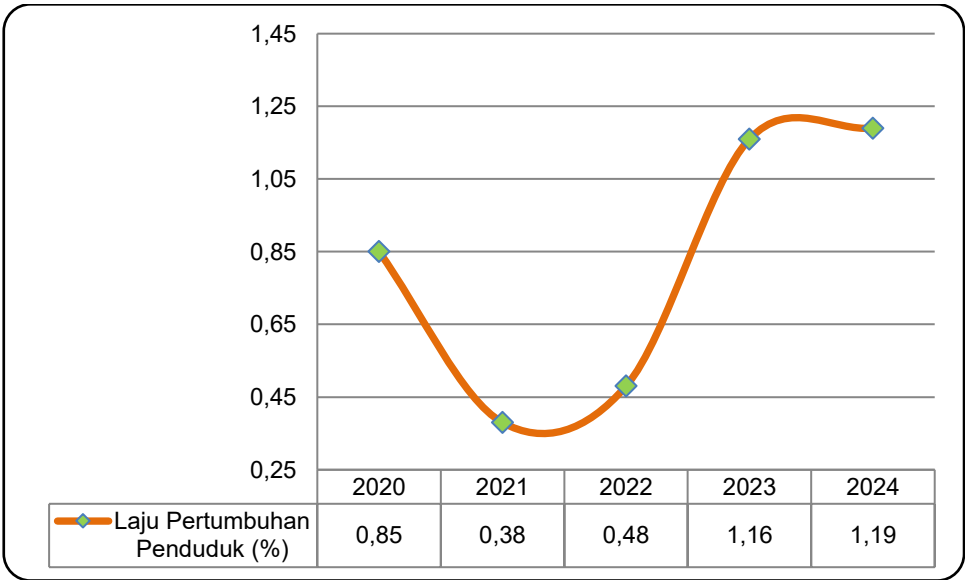
Jumlah penduduk Kota Pekalongan pada tahun 2024 berdasarkan data BPS Jawa Tengah sebanyak 321.095 jiwa, terdiri dari 162.158 jiwa laki-laki dan 158.937 jiwa perempuan. Perkembangan selama lima tahun terakhir, jumlah laki-laki hampir sama dengan jumlah perempuan. Hal ini terlihat pada angka sex ratio sebesar 102,0 yang berarti bahwa setiap 100 penduduk perempuan terdapat 102 penduduk laki-laki. Pada tahun 2024 bertambah 3.571 jiwa dengan laju pertumbuhan sebesar 1,19 persen. Jumlah penduduk Kota Pekalongan dan berdasarkan jenis kelaminnya, disajikan dalam Tabel II-9 berikut.

Tabel II-9
Jumlah Penduduk Kota Pekalongan Tahun 2020-2024

Tahun	Jumlah Penduduk (Jiwa)		
	Laki-laki	Perempuan	Total
2020	155.145	152.005	307.150
2021	155.701	152.609	308.310
2022	156.391	153.351	309.742
2023	160.369	157.155	317.524
2024	162.158	158.937	321.095

Sumber: Kota Pekalongan Dalam Angka Tahun 2025 dan www.jateng.bps.go.id, 2025

Selama lima tahun terakhir, laju pertumbuhan penduduk Kota Pekalongan menunjukkan fluktuasi. Pertumbuhan terendah terjadi pada tahun 2021, yaitu sebesar 0,38 persen



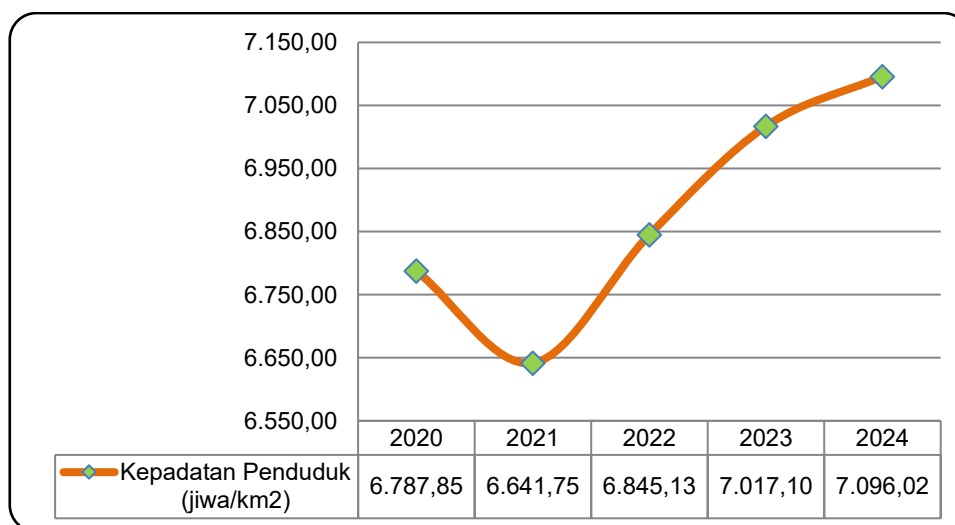
Sumber: Kota Pekalongan Dalam Angka Tahun 2025 dan www.jateng.bps.go.id, 2025

Gambar II-8
Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Pekalongan Tahun 2020-2024

Laju pertumbuhan penduduk Kota Pekalongan lebih kecil dibandingkan rata-rata laju pertumbuhan penduduk Indonesia maupun Provinsi Jawa Tengah. Fenomena laju pertumbuhan penduduk yang lebih kecil dan cenderung menurun tersebut, juga dialami kota-kota lain di Provinsi Jawa Tengah. Laju pertumbuhan penduduk yang cenderung menurun menunjukkan pelaksanaan program keluarga berencana membawa dampak yang cukup signifikan. Namun demikian, dalam kerangka pengembangan wilayah, laju pertumbuhan penduduk yang cenderung menurun menunjukkan proses urbanisasi yang telah mengalami perlambatan. Kondisi ini merupakan fenomena wajar karena proses urbanisasi pada tahapan tertentu akan mengalami perlambatan dan bahkan pada saat tertentu akan stagnan.

Proses urbanisasi yang mengalami perlambatan dapat dilihat dari pertambahan penduduk secara alami dan migrasi. Dengan asumsi pertambahan penduduk alami terjadi secara konstan maka perlambatan tersebut diakibatkan daya tarik Kota Pekalongan yang menurun, sehingga semakin menurunnya migrasi masuk ke Kota Pekalongan. Dapat dimaknai juga semakin banyaknya migrasi keluar dari Kota Pekalongan ke wilayah lain karena berbagai pertimbangan. Fenomena pertumbuhan penduduk Kota Pekalongan yang cenderung menurun, secara sederhana dapat dimaknai sebagai suatu kondisi, dimana daya tarik Kota Pekalongan yang mulai menurun.

Dari segi kepadatan penduduk, Kota Pekalongan mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Seiring dengan bertambahnya penduduk yang lahir, penduduk yang meninggal, migrasi masuk ke Kota Pekalongan dan ke luar Kota Pekalongan, kepadatan penduduk per kilometer persegi mengalami peningkatan. Namun demikian pada tahun 2024 mengalami peningkatan sebanyak 78,92 jiwa/km² dibandingkan dengan tahun 2023. Berikut data kepadatan penduduk Kota Pekalongan dari tahun 2020-2024 disajikan dalam gambar berikut.



Sumber: Kota Pekalongan Dalam Angka Tahun 2025 dan www.jateng.bps.go.id, 2025

Gambar II-9
Kepadatan Penduduk Kota Pekalongan Tahun 2020-2024

Jumlah penduduk berumur 15 tahun ke atas yang bekerja dan berpendidikan tertinggi yang ditamatkan di Kota Pekalongan pada Tahun 2024, pendidikan SD ke bawah sebanyak 58.341 jiwa (32,60 persen), diikuti SMP sebanyak 38.926 jiwa (21,75 persen) dan Sekolah Menengah (SM) ke atas sebanyak 81.685 jiwa (45,65 persen) Adapun jumlah penduduk yang berumur 15 tahun keatas yang bekerja pada tahun 2024 berjumlah 178.952 jiwa.

Secara bertahap mulai tahun 2020, struktur pekerja yang lulusan SD ke bawah berfluktuatif akan tetapi tidak signifikan baik secara persentase maupun jumlah. Demikian juga struktur pekerja pada pendidikan SLTP dan Sekolah Menengah (SM) ke atas selama lima

tahun baik dalam jumlah kuantitatif maupun persentase mengalami perbaikan namun tidak signifikan. Secara lengkap data Penduduk Kota Pekalongan Berumur 15 Tahun keatas yang Bekerja Tahun 2020-2024 disajikan dalam Tabel II-10 berikut.

Tabel II-10
Penduduk Kota Pekalongan Berumur 15 Tahun Ke atas yang Bekerja
Tahun 2020-2024

Tahun	Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas yang Bekerja						Jumlah
	≤SD		SLTP		≥SM		
	orang	persen	orang	persen	orang	persen	
2020	52.326	35,79	29.357	20,08	64.536	44,13	146.219
2021	58.085	34,43	34.121	20,22	56.191	33,30	168.725
2022	50.573	31,32	35.349	21,89	75.548	46,79	161.470
2023	50.065	29,19	37.745	22,00	83.712	48,81	171.522
2024	58.341	32,60	38.926	21,75	81.685	45,65	178.952

Sumber: Kota Pekalongan Dalam Angka Tahun 2025 (diolah), 2025

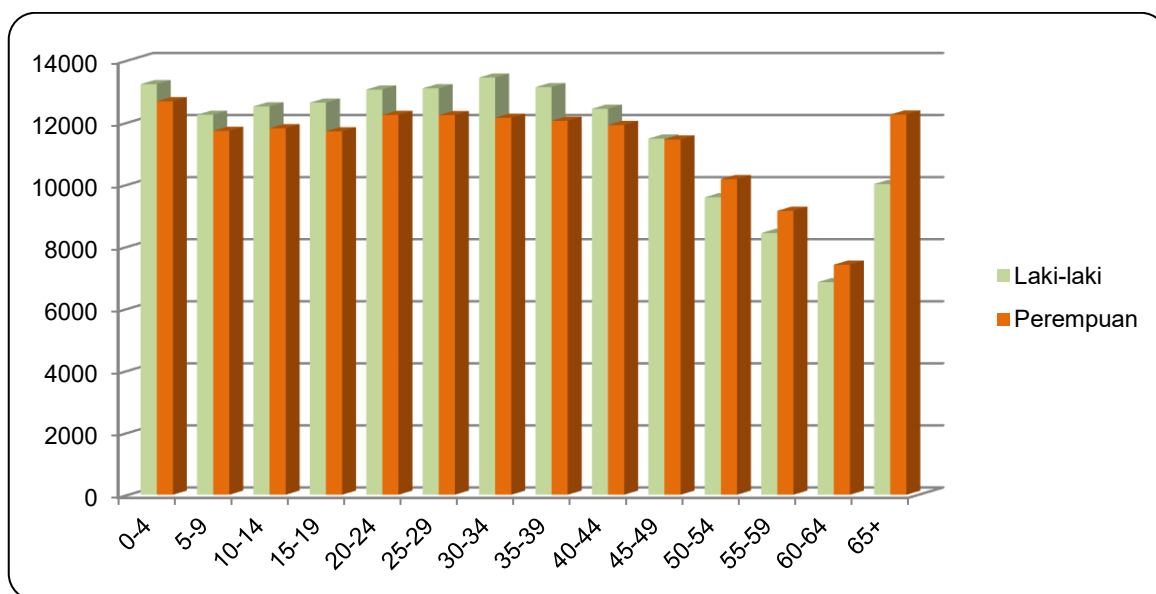
Dalam konteks rentang usia, penduduk Kota Pekalongan tahun 2024 paling banyak berada pada rentang usia 0-4 tahun yaitu sebanyak 25.911 jiwa, diikuti rentang usia 30-34 tahun sebanyak 25.591 jiwa. Sedangkan jumlah lansia di atas usia 65 tahun sebanyak 22.265 jiwa. Dan pada rentang usia lainnya perbedaan jumlah penduduk tidak terlalu signifikan. Secara lengkap data Jumlah Penduduk Kota Pekalongan Tahun 2024 menurut kelompok umur dan jenis kelamin (jiwa) disajikan dalam Tabel II-11 berikut.

Tabel II-11
Jumlah Penduduk Kota Pekalongan Tahun 2024
Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin

Umur (tahun)	Jenis Kelamin (jiwa)		Jumlah
	Laki-laki	Perempuan	
0-4	13.231	12.680	25.911
5-9	12.245	11.724	23.969
10-14	12.515	11.809	24.324
15-19	12.636	11.711	24.347
20-24	13.057	12.238	25.295
25-29	13.097	12.232	25.329
30-34	13.444	12.147	25.591
35-39	13.135	12.049	25.184
40-44	12.438	11.915	24.353
45-49	11.476	11.447	22.923
50-54	9.588	10.171	19.759
55-59	8.433	9.149	17.582
60-64	6.850	7.413	14.263
65+	10.013	12.252	22.265
Jumlah	162.158	158.937	321.095

Sumber: Kota Pekalongan Dalam Angka Tahun 2025, 2025

Penduduk Kota Pekalongan tahun 2024 menurut kelompok umur dan jenis kelamin disajikan dalam bentuk diagram batang seperti berikut.



Sumber: Kota Pekalongan Dalam Angka Tahun 2025 (diolah), 2025

Gambar II-10
Jumlah Penduduk Kota Pekalongan Tahun 2024
Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin

Dari data jumlah penduduk berdasarkan struktur umur tersebut, dapat diketahui bahwa Kota Pekalongan memiliki bonus demografi. Bonus demografi adalah suatu kondisi dimana populasi masyarakat akan didominasi oleh individu-individu dengan usia produktif, yaitu rentang usia 15 hingga 64 tahun. Jumlah penduduk usia produktif Kota Pekalongan adalah 224.626 jiwa atau sebesar 69,96 persen dari jumlah penduduk seluruhnya.

Fenomena yang cukup jarang terjadi ini tentu akan memberikan banyak perubahan dan penyesuaian pada kehidupan bermasyarakat dalam suatu daerah. Tidak selalu menguntungkan, jika fenomena tersebut tidak diimbangi dengan persiapan yang matang maka justru dapat menjadi ancaman bagi suatu daerah. Pemerintah Kota Pekalongan harus melakukan upaya terintegrasi untuk memanfaatkan bonus demografi ini menjadi keuntungan bagi Kota Pekalongan. Salah satunya, fenomena ini menjadi peluang besar bagi Kota Pekalongan untuk meningkatkan kinerja perekonomian, terutama sektor industri pengolahan, sektor perdagangan dan jasa, serta sektor lainnya yang menjadi sektor unggulan di Kota Pekalongan.

2.1.6. Potensi Pengembangan Wilayah

Dalam pengembangan wilayah Provinsi Jawa Tengah, Kota Pekalongan berperan sebagai pusat WP Petanglong. Arah pengembangan WP Petanglong adalah:

1. memadukan pengembangan permukiman perkotaan Kota Pekalongan dan Kabupaten di sekitarnya;
2. mendorong kerja sama antar dsaerah dalam hal:
 - a. pengembangan ekonomi Daerah yang saling menguntungkan;
 - b. koordinasi dan pengelolaan pengembangan Kawasan Permukiman di perbatasan Kabupaten/Kota;
 - c. penyediaan prasarana dan sarana di bidang transportasi, air minum, persampahan, drainase, dan pengelolaan limbah;

- d. penyediaan ruang terbuka hijau Kota Pekalongan dengan Kabupaten lain yang berbatasan;
 - e. pengelolaan dan pengembangan pariwisata;
 - f. penanganan bencana dan kawasan terdampak rob.
3. mendorong pengembangan wilayah dan prasarana Kawasan Industri Terpadu Batang dengan daerah sekitarnya;
 4. pengembangan fasilitas logistik dalam rangka mendorong kemudahan pergerakan barang hasil industri;
 5. pengendalian pemanfaatan wilayah pesisir yang mengalami penurunan tanah dan peningkatan rob;
 6. pengendalian alih fungsi lahan sawah;
 7. pengelolaan limbah industri/ kerajinan batik;
 8. pengembangan pelabuhan umum dan pelabuhan perikanan; dan
 9. pengembangan industri pengolah hasil pertanian, kehutanan, perikanan dengan tetap mempertimbangkan kelestarian alam.

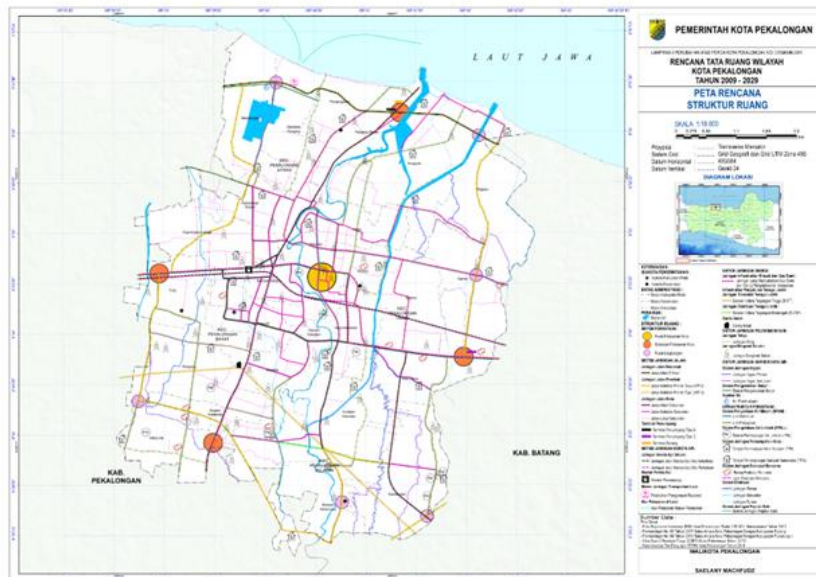
Sesuai dengan RPJP Daerah bahwa visi Kota Pekalongan adalah “Pekalongan Kota Batik yang Maju, Mandiri dan Sejahtera”. Sedangkan berdasarkan RTRW bahwa tujuan penataan ruang wilayah Kota Pekalongan adalah “Terwujudnya Kota Kreatif yang didukung Perdagangan dan Jasa, Industri, dan Perikanan, yang Nyaman, Aman, Produktif, serta Berkelanjutan”.

Sebagaimana visi dan tujuan di atas serta kondisi yang telah diuraikan pada bagian sebelumnya bahwa wilayah Kota Pekalongan memiliki kekhasan kondisi yang tentunya berbeda dengan daerah lainnya. Secara geografis alami, Kota Pekalongan merupakan simpul strategis di koridor pantai utara pulau Jawa. Berdasarkan sistem pengembangan wilayah pun, Kota Pekalongan merupakan salah satu simpul pengembangan wilayah di Provinsi Jawa Tengah. Kondisi ini pun tidak terlepas dari perkembangan perekonomian di Kota Pekalongan yang didominasi oleh sumbangan lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; Industri Pengolahan; dan Konstruksi.

Tidak dapat dipungkiri bahwa Kota Pekalongan berkembang dengan industri batik sebagai penggerak perekonomian wilayah, di samping sektor andalan lainnya yang terus dikembangkan yaitu sektor perikanan dan industri pengolahan. Pengembangan batik, perikanan, industri pengolahan ke depan diharapkan dapat semakin terus ditingkatkan dengan daya inovasi yang dimiliki seluruh warga Kota Pekalongan sehingga dapat memberikan nilai tambah (*value added*) setinggi-tingginya bagi Kota Pekalongan. Namun demikian, tentunya pengembangan potensi tersebut harus tetap dibingkai dalam kerangka tata ruang wilayah dan lingkungan hidup sehingga dapat mewujudkan pembangunan Kota Pekalongan yang berkelanjutan.

Berdasarkan RTRW, rencana struktur ruang Kota Pekalongan terdiri atas pusat kegiatan dan sistem jaringan prasarana. Pusat kegiatan dijabarkan dalam hirarki yang terdiri dari Pusat Pelayanan Kota (PPK), Sub Pusat Pelayanan Kota (SPPK), dan Pusat Lingkungan (PL). PPK meliputi kawasan alun-alun, pusat kegiatan perdagangan-jasa skala regional di Kelurahan Kauman dan kawasan stasiun di Kelurahan Bendan Kergon. SPPK sebagai pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi yang melayani sub wilayah kota, SPPK Kecamatan Pekalongan Utara terletak di Kelurahan Panjang Wetan, SPPK Kecamatan Pekalongan Barat terletak di Kelurahan Tirto, SPPK Kecamatan Pekalongan Timur terletak di Kelurahan Gamer dan Kelurahan Kalibaros, SPPK Kecamatan Pekalongan Selatan terletak di Kelurahan Banyurip. Pusat lingkungan sebagai pusat pelayanan ekonomi, sosial dan/atau administrasi lingkungan kota berada di Kelurahan Pringrejo, Kelurahan Kandang Panjang, Kelurahan Degayu, Kelurahan Gamer, Kelurahan Kuripan Kertoharjo dan Kelurahan Sokoduwet.

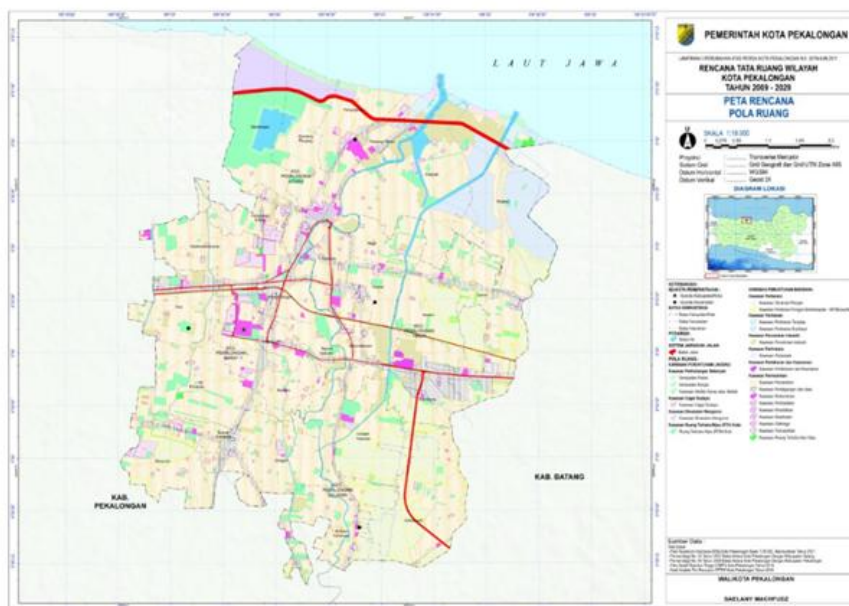
Sistem jaringan prasarana terdiri atas sistem jaringan transportasi, sistem jaringan energi, sistem jaringan telekomunikasi, sistem jaringan sumber daya air, dan infrastruktur perkotaan. Gambaran lebih detail dapat dilihat pada peta rencana struktur ruang berikut.



Sumber: RTRW Kota Pekalongan Tahun 2009-2029, 2025

Gambar II-11
Peta Rencana Struktur Ruang

Berdasarkan RTRW, peruntukan lahan dengan memperhatikan rencana pola ruang, terdiri dari kawasan lindung dan kawasan budidaya. Kawasan lindung terdiri atas kawasan perlindungan setempat, kawasan cagar budaya, ruang terbuka hijau (RTH) kota dan kawasan ekosistem mangrove. Adapun kawasan budidaya terdiri atas kawasan pertanian, kawasan perikanan, kawasan permukiman, kawasan peruntukan industri, kawasan pariwisata dan kawasan pertahanan keamanan. Rencana pola ruang digambarkan sebagaimana peta berikut.



Sumber: RTRW Kota Pekalongan 2009-2029, 2025

Gambar II-12
Peta Rencana Pola Ruang

Berikut diuraikan potensi pengembangan wilayah Kota Pekalongan, sebagaimana tertuang pada Rencana Pola Ruang RTRW :

1. Kawasan Lindung

a. Kawasan Perlindungan Setempat

Terdiri atas sempadan sungai, sempadan pantai dan kawasan sekitar danau atau waduk. Sempadan sungai memiliki luas ± 24 Ha, sempadan pantai memiliki luas ± 26 Ha dan kawasan sekitar danau atau waduk memiliki luas ± 15 Ha. Kawasan sempadan sungai bertanggung dengan lebar sempadan sungai 3 meter meliputi sempadan Sungai Kupang, Sungai Banger, Sungai Gabus, Sungai Meduri dan Sungai Bremi. Sempadan pantai diperuntukkan perlindungan pantai dari erosi dan abrasi serta perlindungan untuk mangrove dan terumbu karang, selebar 100 meter dari titik pasang tertinggi dengan luas kurang lebih 120 Ha ke arah darat yang berlokasi di Kecamatan Pekalongan Utara, meliputi, Kelurahan Bandengan, Kandang Panjang, Panjang Baru, Krapyak dan Degayu. Kawasan sekitar danau atau waduk yang berfungsi pokok sebagai perlindungan, penggunaan, dan pengendalian atas sumber daya yang ada pada danau atau waduk yang berada di Kelurahan Bandengan dan Kandang Panjang Kecamatan Pekalongan Utara.

b. Kawasan Cagar Budaya

Seluas ± 9 Ha, terdiri dari Kawasan Heritage Jetayu di Kelurahan Kandang Panjang, Kelurahan Panjang Wetan dan Kelurahan Padukuhan Kraton Kecamatan Pekalongan Utara.

c. Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kota

Persentase tersedianya luasan RTH publik di Kota Pekalongan mengalami penurunan pada tahun 2021 menjadi sekitar 2,89 persen dibandingkan tahun 2020 sebesar 18,6 persen. Hal ini disebabkan adanya revisi RTRW pada tahun 2020 sehingga dilakukan pendataan ulang untuk luasan RTH serta adanya perubahan perhitungan RTH sesuai dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala BPN nomor 1 tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Rencana tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten dan Kota. Persentase luasan RTH dari tahun 2021 sampai dengan 2024 terus meningkat yaitu menjadi 2,94 persen.

d. Kawasan Ekosistem Mangrove

Kawasan Ekosistem Mangrove merupakan sebuah lingkungan dengan ciri khusus dimana lantai hutannya digenangi oleh air dimana salinitas juga fluktuasi permukaan air tersebut sangat dipengaruhi oleh pasang surut air laut. Kawasan ekosistem mangrove berada di Kelurahan Bandengan, Kandang Panjang, Krapyak dan Panjang Baru seluas 88 Ha.

2. Kawasan budidaya

a. Kawasan Pertanian

Kawasan Pertanian berupa tanaman pangan seluas 521 Ha berada di Kelurahan Banyurip, Kuripan Kertoharjo, Kuripan Yosorejo, Sokoduwet, Pringrejo, Degayu, Gamer, Kalibaros dan Setono. Lahan pertanian tanaman pangan tersebut merupakan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B).

b. Kawasan Perikanan

Terdiri atas kawasan perikanan tangkap dan kawasan perikanan budidaya. Kawasan perikanan tangkap seluas kurang lebih 38 Ha berupa pengembangan fasilitas hasil perikanan tangkap meliputi:

- a. Pengolahan hasil perikanan berada di Kelurahan Panjang Wetan, Kelurahan Krapyak dan Kelurahan Degayu Kecamatan Pekalongan Utara.
- b. Kawasan pemasaran hasil perikanan berupa fasilitas pelelangan/pasar ikan yang berada di Kelurahan Panjang Wetan dan/ atau Kelurahan Krapyak.
- c. Teknopark perikanan yang berada di Kelurahan Panjang Wetan.
- d. Prasarana penunjang pelabuhan perikanan.

Kawasan perikanan budidaya dengan luas kurang lebih 173 Ha berada di Kelurahan Degayu dan Kelurahan Krapyak Kecamatan Pekalongan Utara. Namun demikian, seiring dengan selesainya pembangunan pengendalian banjir dan rob sistem Loji-Banger terdapat perubahan kondisi tutupan lahan yaitu sebagian lahan yang sebelumnya tergenang menjadi lahan kering. Kondisi ini terutama terjadi di Kelurahan Degayu dan Krapyak.

3. Kawasan Permukiman

Kawasan permukiman terdiri atas kawasan perumahan, kawasan perdagangan dan jasa, kawasan perkantoran, kawasan peribadatan, kawasan pendidikan, kawasan kesehatan, kawasan olahraga, kawasan transportasi, kawasan ruang terbuka non hijau dan kawasan sektor informal yang tersebar di seluruh Kota Pekalongan, dengan luas sebagai berikut:

- a. Kawasan perumahan dengan luas kurang lebih 2.430 Ha.
- b. Kawasan perdagangan dan jasa dengan luas kurang lebih 386 Ha.
- c. Kawasan perkantoran terdiri atas perkantoran pemerintah dan perkantoran swasta dengan luas kurang lebih 51 Ha.
- d. Kawasan peribadatan dengan luas kurang lebih 10 Ha.
- e. Kawasan pendidikan dengan luas kurang lebih 94 Ha.
- f. Kawasan kesehatan dengan luas kurang lebih 16 Ha.
- g. Kawasan olahraga dengan luas kurang lebih 6 Ha.
- h. Kawasan transportasi dengan luas kurang lebih 9 Ha.
- i. Kawasan ruang terbuka non hijau, yang terdiri atas TPA dengan luas kurang lebih 2 Ha, Kolam Renang dengan luas kurang lebih 1 Ha dan Lapangan Olahraga dengan luas kurang lebih 1 Ha.
- j. Kawasan sektor informal.

4. Kawasan Peruntukan Industri

Kawasan peruntukan industri terdiri atas industri besar dan industri menengah, seluas kurang lebih 189 Ha yang tersebar di 23 kelurahan.

5. Kawasan Pariwisata

Kawasan pariwisata terdiri dari pariwisata budaya, pariwisata alam, dan pariwisata buatan. Pariwisata budaya berada di Kelurahan Panjang Wetan (Kawasan Jetayu), Kelurahan Krapyak, Kelurahan Padukuhan Kraton, Kelurahan Sapuro Kebulen, Kelurahan Pringrejo Kelurahan Noyontaansari dan Kelurahan Kauman. Pariwisata alam seluas kurang lebih 11 Ha berada di Kelurahan Krapyak, Panjang Wetan dan Kandang Panjang Kecamatan Pekalongan Utara. Pengembangan pariwisata buatan, meliputi wisata belanja batik, kerajinan tenun, dan *handycraft* terletak di Kelurahan Podosugih, Medono,

Bendan Kergon, Poncol, Kali Baros, Gamer, Noyontaansari, Setono, Klego, Banyurip, Kauman; dan Pasirkratonkramat.

6. Kawasan Pertahanan-Keamanan Negara

Kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan negara terdiri atas asrama dan markas Brimob di Kelurahan Gamer Kecamatan Pekalongan Timur; asrama dan kantor Polwil di Kelurahan Pasirkratonkramat dan Kelurahan Podosugih Kecamatan Pekalongan Barat; kantor eks Polwil di Kelurahan Padukuhan Kraton Kecamatan Pekalongan Utara; kantor Polresta di Kelurahan Padukuhan Kraton Kecamatan Pekalongan Utara; kantor Kodim di Kelurahan Medono Kecamatan Pekalongan Barat; Kantor Koramil dan Kantor Polsekta di seluruh wilayah kecamatan.

7. Sinergi Kota Pekalongan dengan Daerah Tetangga Berkaitan pada Aspek Tata Ruang

Terkait aspek perencanaan tata ruang dalam RTRW telah direncanakan beberapa hal yang dapat bersinergi dengan Peraturan Daerah RTRW Kabupaten Pekalongan dan Peraturan Daerah RTRW Kabupaten Batang, sebagai berikut:

a. Struktur Ruang

- 1) Telah direncanakan Jalan Lingkar Utara Petanglong, yang akan menghubungkan kawasan strategis PLTU Batang dan Kawasan Industri Terpadu (di Kabupaten Batang) – Kawasan Pelabuhan Perikanan Nusantara dan Kawasan Wisata Pantai (di Kota Pekalongan) – Rencana Kawasan Industri (di Kabupaten Pekalongan) – jalur Pantura. Adanya Jalan Lingkar Utara Petanglong ini akan mempermudah akses ke kawasan-kawasan strategis tersebut, sekaligus juga akan mengurangi kemacetan di jalur Pantura, sehingga harapannya akan menaikkan potensi pertumbuhan ekonomi di 3 daerah tersebut.
- 2) Telah direncanakan jalur transportasi masal (BRT) yang menghubungkan dari Kota Batang – Kota Pekalongan – Kota Kajen. Diharapkan dengan disediakannya fasilitas transportasi masal (BRT) yang nyaman ini, akan mengurangi pemakaian kendaraan pribadi, sehingga akan mengurangi kepadatan lalu-lintas pada jalur-jalur yang menghubungkan 3 daerah tersebut.

b. Pola Ruang

Perencanaan Pola Ruang untuk wilayah-wilayah perbatasan telah melalui proses padu serasi dengan Kabupaten Batang dan Kabupaten Pekalongan, sehingga sudah ada sinkronisasi. Namun demikian, perlu diperhatikan juga perkembangan potensi kebencanaan di masa mendatang yang ada di wilayah-wilayah perbatasan tersebut, yang menjadikan perlu dipikirkan dan disepakati bersama antara dua daerah yang berbatasan, rencana Pola Ruang yang lebih *feasible*.

Di samping itu, perlu memperhatikan kondisi Kota Pekalongan yang berada di dataran rendah pantai utara Jawa. Hasil kajian Yayasan Mercy Corps Indonesia, 2021, menyebutkan bahwa wilayah-wilayah yang dekat pantai, berpotensi mengalami pergerakan kawasan yang terdampak rob dengan probabilitas tinggi bergeser dari tahun 2025 hingga 2030 pada kawasan tambak. Kondisi ini menunjukkan bahwa lahan tambak merupakan lahan yang memiliki probabilitas paling tinggi terdampak dan berubah menjadi kawasan rob. Hingga pada akhir tahun 2035, rob mulai masuk pada kawasan persawahan untuk menjadi kawasan rob. Hal ini tentu menggambarkan dampak yang diberikan pada risiko bencana banjir, mengancam aktivitas ekonomi masyarakat di lokasi kajian, khususnya aktivitas perikanan dan pertanian (*Laporan Loss and Damage Assesment in Pekalongan City*

dan *Pekalongan Regency Under Zurich Flood Resilience Alliance Program*, Yayasan Mercy Corps Indonesia, 2021).

c. Batas Wilayah Administratif

Telah dilakukan kegiatan survey dan perapatan patok batas wilayah di 3 daerah tersebut, yang melibatkan Bagian Tata Pemerintahan Setda, Lurah / Kepala Desa yang berbatasan dan BPN. Yang outputnya akan menghasilkan batas wilayah yang lebih detail deliniasinya. Untuk melegalformalkan *output* kegiatan ini perlu dilakukan penandatanganan Berita Acara Kesepakatan di tingkat kepala daerah, kemudian dimintakan persetujuan ke Kementerian Dalam Negeri.

2.2. ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

2.2.1. Kesejahteraan masyarakat dan perlindungan sosial yang adaptif

2.2.1.1. Kemiskinan

Kemiskinan merupakan permasalahan sosial yang kompleks, baik faktor penyebabnya maupun dampaknya. Selain itu, kemiskinan menjadi salah satu indikator yang sangat diperhatikan oleh Pemerintah karena menjadi salah satu ukuran kesejahteraan masyarakat.

1. Garis Kemiskinan

Garis Kemiskinan merupakan penjumlahan dari Garis Kemiskinan Makanan dan Garis Kemiskinan Non Makanan. Garis Kemiskinan Makanan (GKM) merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2.100 kilokalori perkapita perhari. Paket komoditi kebutuhan dasar makanan diwakili oleh 52 jenis komoditi (padi-padian, umbi-umbian, ikan, daging, telur dan susu, sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan, minyak dan lemak, dan lain-lain). Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM) adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan. Paket komoditi kebutuhan dasar non makanan diwakili oleh 51 jenis komoditi di perkotaan dan 47 jenis komoditi di pedesaan.

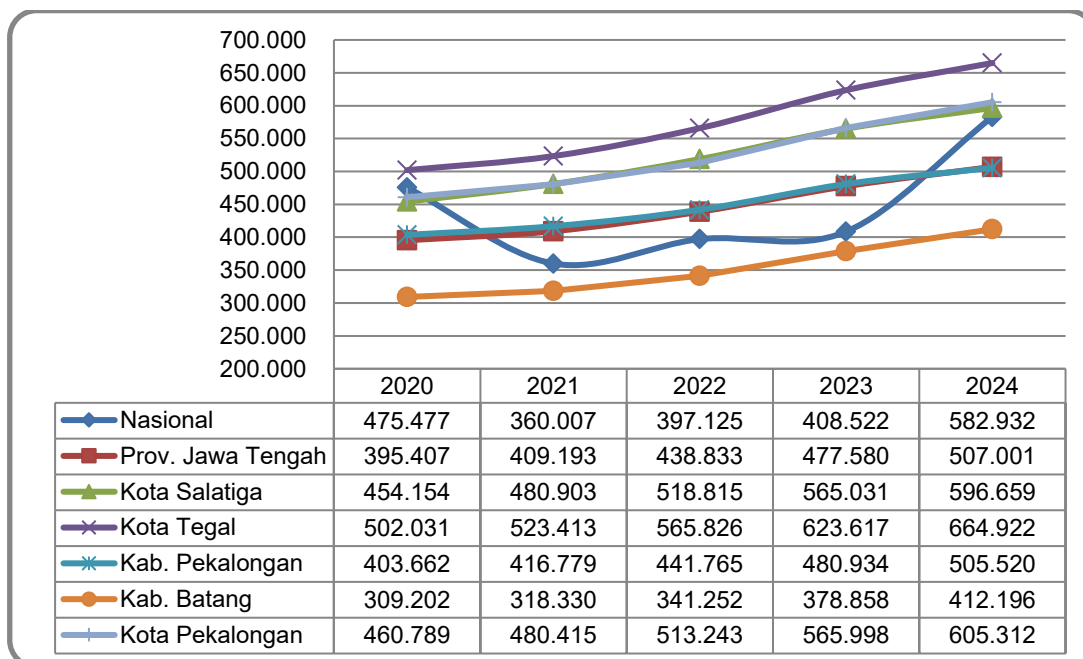
Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan dikategorikan sebagai penduduk miskin. Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah pada Maret 2024, Garis Kemiskinan di Kota Pekalongan sebesar Rp. 605.312/kapita/bulan. Angka ini di atas Garis Kemiskinan Nasional sebesar Rp. 582.932/kapita/bulan dan di atas Garis Kemiskinan Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp. 507.001/kapita/bulan.

Tabel II-12
Garis Kemiskinan (GK) Kota Pekalongan, Daerah Setara,
Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2020-2024

Tahun	GK Kota Pekalongan (Rp)	GK Kab Batang (Rp)	GK Kab Pekalongan (Rp)	GK Kota Tegal (Rp)	GK Kota Salatiga (Rp)	GK Provinsi Jawa Tengah (Rp)	GK Nasional (Rp)
2020	460.789	309.202	403.662	502.031	454.154	395.407	454.652
2021	480.415	318.330	416.779	523.413	480.903	409.193	472.525
2022	513.243	341.252	441.765	565.826	518.815	438.833	513.517
2023	565.998	378.858	480.934	623.617	565.031	477.580	408.522
2024	605.312	412.196	505.520	664.922	596.659	507.001	582.932

Sumber: <https://pekalongankota.bps.go.id/>, <https://jateng.bps.go.id/>, dan <https://www.bps.go.id/> (diolah), 2025

Untuk memberikan gambaran perbandingan garis kemiskinan antara Kota Pekalongan, daerah setara, Provinsi Jawa Tengah dan nasional, disajikan dalam grafik berikut.



Sumber: <https://pekalongankota.bps.go.id/>, <https://jateng.bps.go.id/>, dan <https://www.bps.go.id/> (diolah), 2025

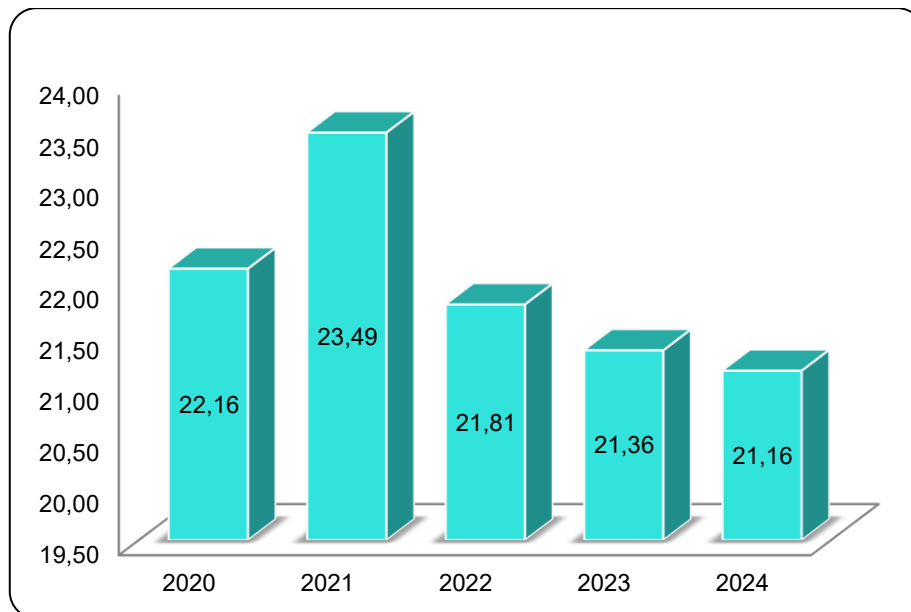
Gambar II-13
Perbandingan Garis Kemiskinan di Kota Pekalongan
dengan Daerah Setara, Provinsi dan Nasional Tahun 2020-2024

Data garis kemiskinan (GK) Kota Pekalongan dalam periode 2020-2024 menunjukkan tren peningkatan yang konsisten. Pada tahun 2020, GK Kota Pekalongan tercatat sebesar Rp460.789, kemudian terus meningkat hingga mencapai Rp605.312 pada tahun 2024. Peningkatan ini mencerminkan kenaikan biaya hidup minimum yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dasar. Jika dibandingkan dengan daerah setara di sekitar Kota Pekalongan, seperti Kabupaten Batang dan Kabupaten Pekalongan, garis kemiskinan Kota Pekalongan cenderung lebih tinggi, mengindikasikan standar hidup yang lebih tinggi di wilayah perkotaan.

Kenaikan garis kemiskinan di Kota Pekalongan sejalan dengan tren daerah setara dan nasional, menunjukkan adanya tekanan inflasi serta meningkatnya kebutuhan dasar. Hal ini menuntut perhatian lebih dalam upaya pengendalian harga kebutuhan pokok serta pemberdayaan ekonomi masyarakat agar daya beli tetap terjaga.

2. Jumlah Penduduk Miskin

Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Garis kemiskinan dipergunakan sebagai suatu batas untuk menentukan miskin atau tidaknya seseorang.



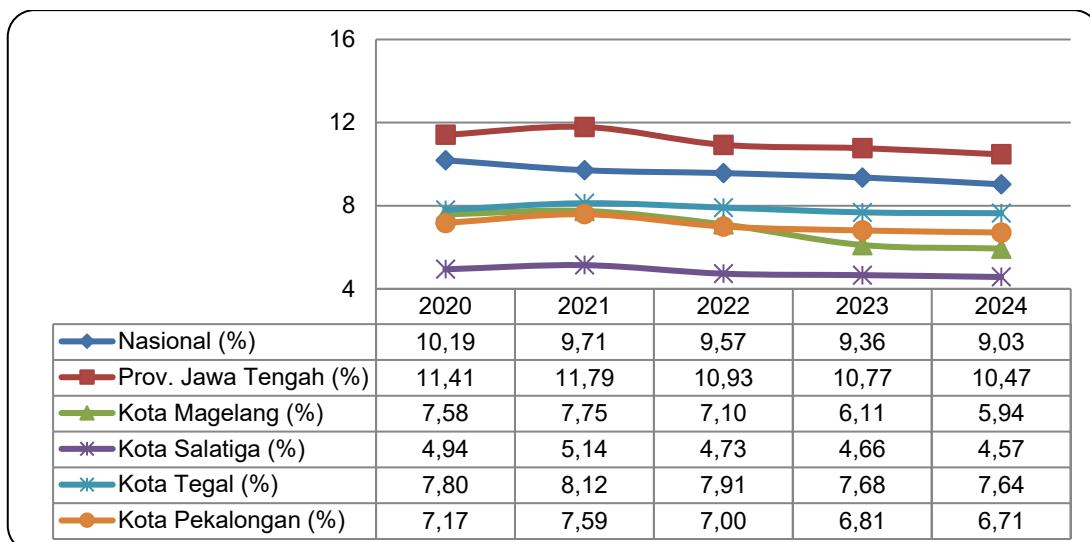
Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2025

Gambar II-14
Jumlah Penduduk Miskin di Kota Pekalongan
Tahun 2020-2024 (000 jiwa)

Jumlah penduduk miskin di Kota Pekalongan mengalami fluktuasi dari tahun 2020 hingga 2024, dengan peningkatan signifikan pada 2021 mencapai 23,49 ribu jiwa, kemungkinan akibat dampak pandemi *Covid-19*. Namun, sejak 2022, angka tersebut menunjukkan tren penurunan bertahap, dari 21,81 ribu jiwa pada 2022 menjadi 21,16 ribu jiwa pada 2024. Penurunan ini mencerminkan upaya pemulihan ekonomi serta efektivitas program pengentasan kemiskinan yang dijalankan Pemerintah Daerah. Meski demikian, angka kemiskinan masih perlu terus ditekan agar mencapai target kesejahteraan yang lebih baik bagi masyarakat Kota Pekalongan.

Konsistensi strategi pengentasan kemiskinan harus terus dijaga dan ditingkatkan sehingga jumlah penduduk miskin dan tingkat kemiskinan dapat menurun signifikan. Beberapa strategi tersebut adalah dengan mengurangi beban pengeluaran warga miskin, meningkatkan kemampuan dan pendapatan warga miskin, serta menyinergikan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan.

Strategi mengurangi beban pengeluaran warga miskin yaitu melalui pemberian bantuan sembako dan BLT (bantuan langsung tunai). Dalam hal meningkatkan kemampuan dan pendapatan warga miskin, Pemerintah Kota melakukan perluasan kesempatan kerja melalui pelatihan-pelatihan, baik yang dilaksanakan oleh Balai Latihan Kerja (BLK), Dindagkop UKM, maupun kelurahan. Sedangkan dalam hal menyinergikan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan, Pemerintah Kota menyinergikan kebijakan bantuan tunai yang bersumber dari DBHCHT dengan mempersyaratkan penerima bantuan adalah warga miskin dari DTKS yang belum menerima bantuan apapun.



Sumber: pekalongankota.bps.go.id, jateng.bps.go.id, dan www.bps.go.id (diolah), 2025

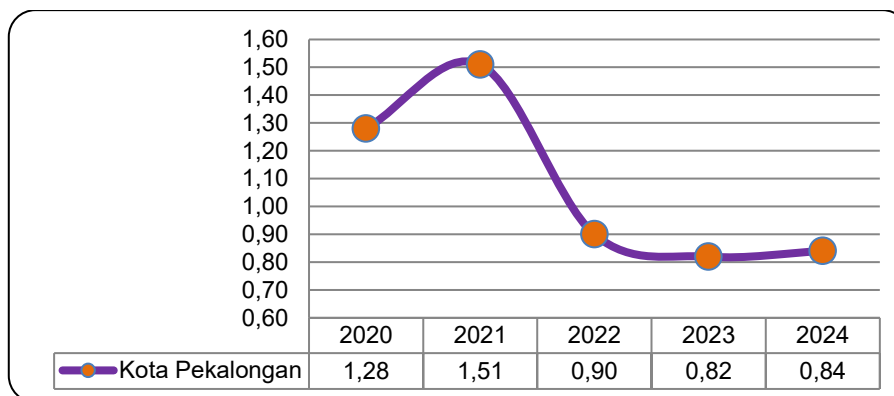
Gambar II-15
Perbandingan Rasio Penduduk Miskin Kota Pekalongan
dengan Daerah Setara, Provinsi dan Nasional Tahun 2020-2024

Selama kurun waktu 2020 hingga tahun 2024, Rasio penduduk miskin di Kota Pekalongan menunjukkan tren yang relatif stabil dengan sedikit kenaikan pada 2021 sebesar 7,59 persen, sebelum mengalami penurunan bertahap hingga mencapai 6,71 persen pada 2024. Dibandingkan dengan daerah setara, Kota Pekalongan memiliki tingkat kemiskinan yang lebih rendah dari Kota Tegal namun masih lebih tinggi dari Kota Salatiga yang konsisten berada di bawah 5 persen. Kota Magelang juga mengalami penurunan signifikan, dari 7,58 persen pada 2020 menjadi 5,94 persen pada 2024. Sementara itu, rasio kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah dan tingkat nasional juga menunjukkan tren menurun, masing-masing dari 11,41 persen dan 10,19 persen pada 2020 menjadi 10,47 persen dan 9,03 persen pada 2024. Penurunan rasio kemiskinan di Kota Pekalongan mencerminkan adanya upaya pemerintah daerah dalam mengatasi kemiskinan, meskipun masih perlu langkah strategis untuk mencapai angka yang lebih kompetitif dibandingkan dengan daerah setara yang memiliki capaian lebih baik.

3. Indeks Kedalaman Kemiskinan

Indeks Kedalaman Kemiskinan (*Poverty Gap Index-P1*) merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai P1 semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Indeks ini merupakan produk BPS dengan mengolah sumber data Susenas (Survei Sosial Ekonomi Nasional).

Indeks Kedalaman Kemiskinan di Kota Pekalongan mengalami fluktuasi selama periode 2020-2024. Pada 2020, indeks ini tercatat sebesar 1,28 sebelum meningkat tajam menjadi 1,51 pada 2021, yang kemungkinan mencerminkan dampak ekonomi dari pandemi *Covid-19*. Setelah itu, indeks menunjukkan penurunan signifikan pada 2022 menjadi 0,90 dan terus menurun menjadi 0,82 pada 2023, sebelum sedikit meningkat menjadi 0,84 pada 2024. Tren ini menunjukkan bahwa setelah lonjakan pada 2021, tingkat kedalaman kemiskinan di Kota Pekalongan berhasil ditekan, mencerminkan perbaikan kondisi ekonomi dan efektivitas program pengentasan kemiskinan. Namun, kenaikan kecil pada 2024 menunjukkan perlunya perhatian lebih lanjut agar penurunan dapat berlanjut secara konsisten. Indeks Kedalaman Kemiskinan Kota Pekalongan Tahun 2020-2024 disajikan pada gambar berikut.

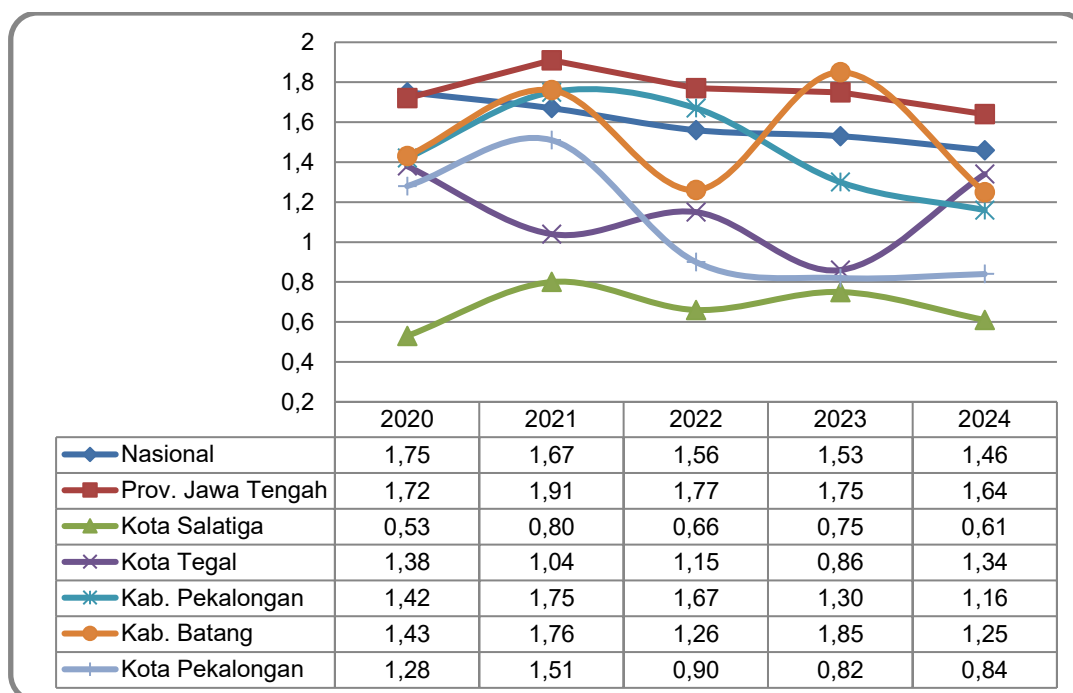


Sumber: <https://pekalongankota.bps.go.id/> dan <https://jateng.bps.go.id/> (diolah), 2025

Gambar II-16

Indeks Kedalaman Kemiskinan di Kota Pekalongan Tahun 2020-2024

Indeks Kedalaman Kemiskinan di Kota Pekalongan dibandingkan dengan daerah setara, Provinsi Jawa Tengah, dan tingkat nasional menunjukkan pola fluktuatif dalam periode 2020-2024. Kota Pekalongan mengalami peningkatan pada 2021 dari 1,28 ke 1,51, sebelum menurun signifikan pada 2022 menjadi 0,90 dan relatif stabil di kisaran 0,82–0,84 pada 2023-2024. Dibandingkan dengan daerah lain, Kota Pekalongan memiliki indeks yang lebih rendah dibandingkan Kabupaten Pekalongan dan Kabupaten Batang, yang mengalami fluktuasi lebih tajam dengan puncak pada 2021 dan 2023. Kota Salatiga memiliki indeks terendah di antara semua wilayah, menandakan tingkat kedalaman kemiskinan yang lebih ringan. Secara nasional dan di Provinsi Jawa Tengah, indeks menunjukkan tren menurun, mengindikasikan perbaikan ekonomi secara luas. Data ini menunjukkan bahwa Kota Pekalongan telah berhasil menekan kedalaman kemiskinan pasca-2021, tetapi perlu terus mempertahankan tren positif agar kondisi kesejahteraan masyarakat semakin membaik. Selengkapnya disajikan dalam gambar berikut.



Sumber: pekalongankota.bps.go.id, jateng.bps.go.id, dan www.bps.go.id (diolah), 2025

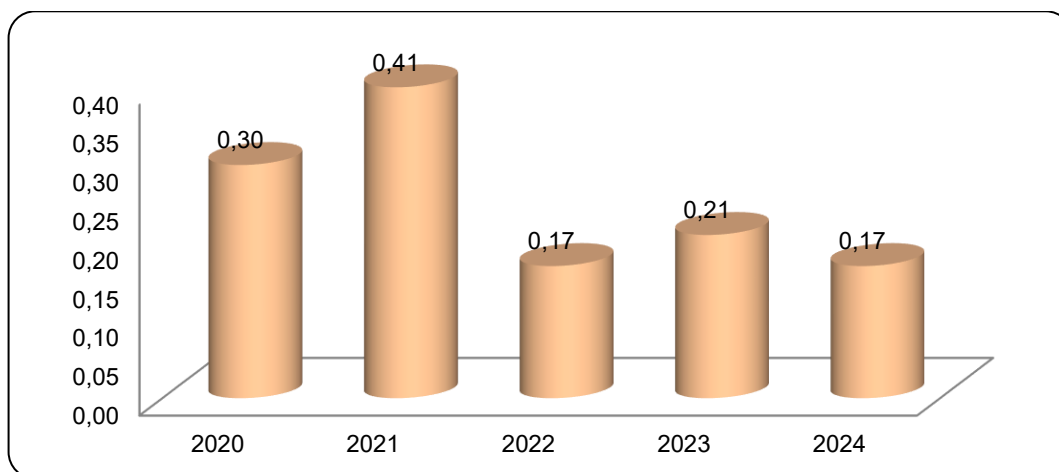
Gambar II-17

Perbandingan Indeks Kedalaman Kemiskinan di Kota Pekalongan dengan Daerah Setara, Provinsi dan Nasional Tahun 2020-2024

4. Indeks Keparahahan Kemiskinan

Indeks Keparahahan Kemiskinan (*Poverty Severity Index-P2*) memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks semakin tinggi ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin. Indeks ini merupakan produk BPS dengan mengolah sumber data Susenas (Survei Sosial Ekonomi Nasional).

Indeks Keparahahan Kemiskinan di Kota Pekalongan mengalami fluktuasi selama periode 2020-2024. Pada tahun 2020, indeks ini tercatat sebesar 0,30 sebelum meningkat signifikan pada 2021 menjadi 0,41, yang kemungkinan besar dipengaruhi oleh dampak pandemi *Covid-19* terhadap perekonomian masyarakat. Namun, pada 2022 terjadi penurunan drastis hingga 0,17, menandakan adanya perbaikan kondisi ekonomi dan efektivitas program pengentasan kemiskinan. Pada 2023, indeks sedikit meningkat menjadi 0,21 sebelum kembali turun menjadi 0,17 pada 2024. Tren ini menunjukkan bahwa setelah lonjakan pada 2021, tingkat keparahan kemiskinan berhasil ditekan, meskipun masih terdapat fluktuasi kecil dalam dua tahun terakhir yang memerlukan perhatian lebih lanjut agar stabilitas kesejahteraan masyarakat dapat terus terjaga.

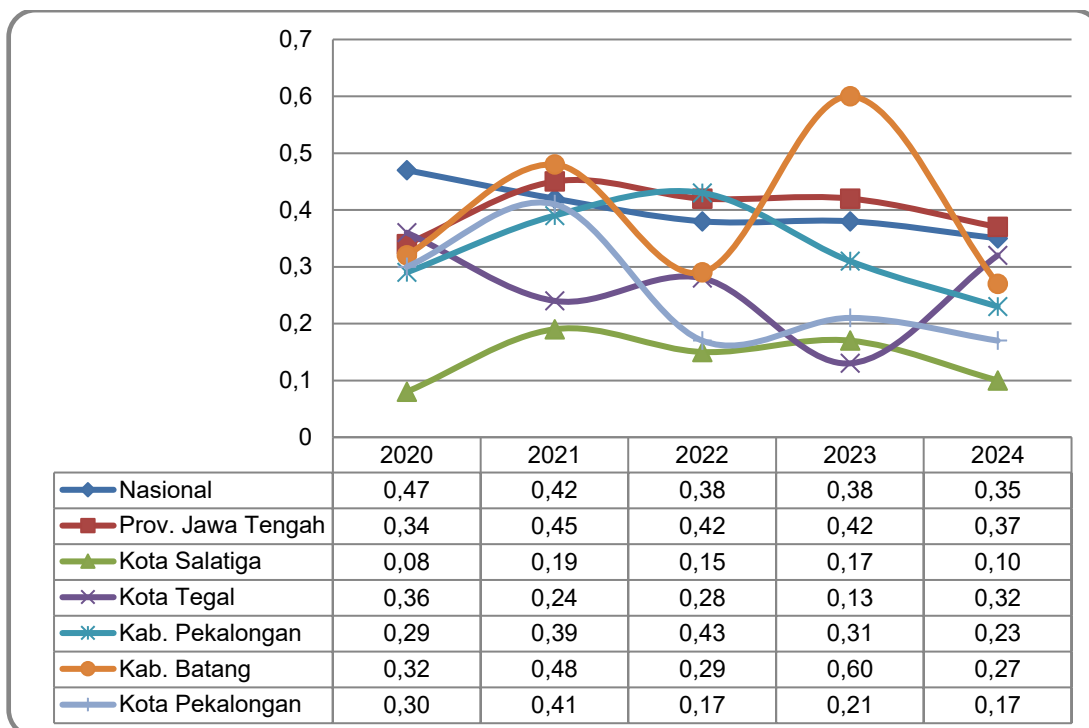


Sumber: pekalongankota.bps.go.id dan jateng.bps.go.id (diolah), 2025

Gambar II-18

Indeks Keparahahan Kemiskinan di Kota Pekalongan Tahun 2020-2024

Jika dibandingkan dengan daerah setara, Kota Pekalongan memiliki indeks yang relatif lebih rendah dibandingkan Kabupaten Batang dan Kabupaten Pekalongan, yang mencapai puncak tertinggi masing-masing pada 2023 dengan 0,60 dan 0,43. Sementara itu, Kota Salatiga memiliki indeks keparahan kemiskinan paling rendah, berkisar antara 0,08 hingga 0,19, menunjukkan kondisi kemiskinan yang lebih terkendali. Secara nasional dan di Provinsi Jawa Tengah, indeks juga menunjukkan tren fluktuatif, dengan sedikit penurunan dari 2020 ke 2024. Data ini mencerminkan bahwa Kota Pekalongan telah berhasil menekan tingkat keparahan kemiskinan pasca-2021, namun tetap perlu memperkuat kebijakan pengentasan kemiskinan agar tren positif ini lebih stabil dan berkelanjutan.



Sumber: pekalongankota.bps.go.id, jateng.bps.go.id, dan www.bps.go.id (diolah), 2025

Gambar II-19
Perbandingan Indeks Keparahatan Kemiskinan Kota Pekalongan dengan Daerah Setara, Provinsi dan Nasional Tahun 2020-2024

Upaya terintegrasi telah dilakukan Pemerintah Kota Pekalongan bersama para pemangku kepentingan, dalam rangka untuk terus menurunkan angka kemiskinan. Namun demikian, karena angka kemiskinan telah mencapai angka satu digit, maka penurunan angka kemiskinan telah mengalami perlambatan. Hal ini disebabkan karena kemiskinan yang harus dientaskan adalah kemiskinan struktural. Oleh karena itu, upaya penanggulangan kemiskinan harus dilakukan lebih terintegrasi antar pemangku kepentingan pembangunan Kota Pekalongan dan dilakukan secara kontinyu.

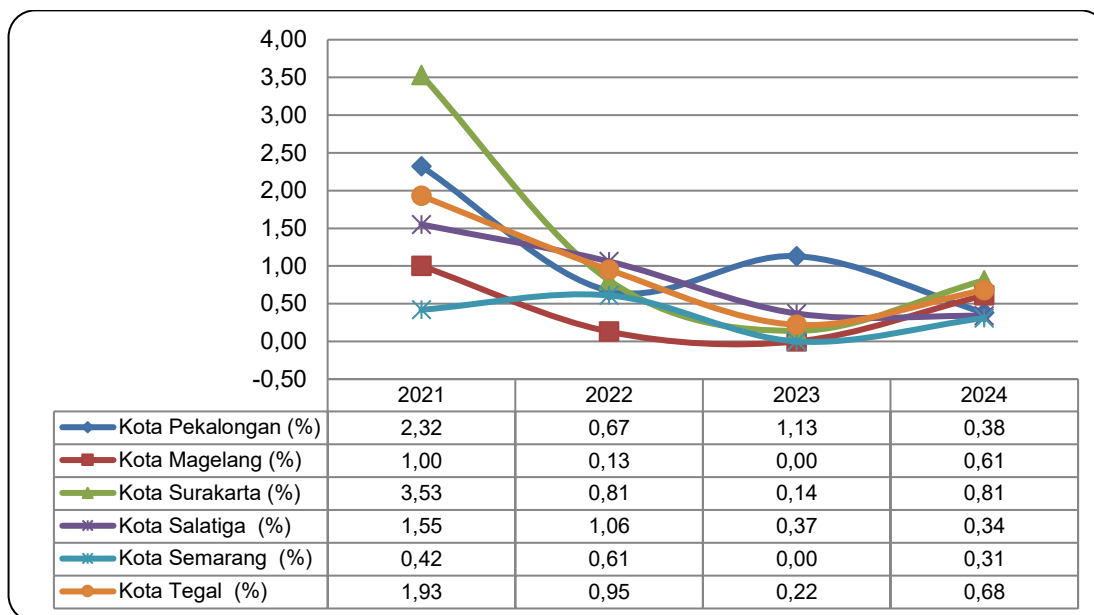
Salah satu cara pandang dalam upaya penanggulangan kemiskinan di Kota Pekalongan adalah dengan mencermati data angka kemiskinan selama 1 (satu) dekade ini, dengan dibandingkan indikator yang lain, terutama indikator kinerja makro penyelenggaraan pemerintahan daerah, sebagaimana Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020. Berdasarkan berbagai perkembangan data berbagai indikator selama 1 (satu) dekade ini (tahun 2013-2022) bahwa angka kemiskinan memiliki korelasi signifikan dengan IPM (Indeks Pembangunan Manusia) dan PDRB Per Kapita. Angka kemiskinan memiliki korelasi tidak signifikan dengan pertumbuhan ekonomi, TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka), Indeks Gini, dan Inflasi.

Korelasi angka kemiskinan dengan IPM dan PDRB per kapita adalah berbanding terbalik. Semakin tinggi IPM dan pendapatan per kapita maka angka kemiskinan akan semakin rendah. Oleh karena itu, upaya terintegrasi dalam rangka penanggulangan kemiskinan harus dipadukan dengan upaya Pemerintah Kota Pekalongan untuk terus meningkatkan IPM maupun PDRB atau PDRB per kapita. Di sisi yang lain, indikator pertumbuhan ekonomi dan TPT belum memiliki korelasi yang signifikan dengan angka kemiskinan. Upaya penurunan TPT harus dapat berkorelasi dengan penurunan angka kemiskinan. Pertumbuhan ekonomi yang harus diwujudkan pun adalah pertumbuhan

ekonomi inklusif, yaitu pertumbuhan ekonomi yang mampu dalam menurunkan kemiskinan, menurunkan ketimpangan, dan meningkatkan penyerapan tenaga kerja.

5. Kemiskinan Ekstrem

Upaya penanggulangan kemiskinan saat ini juga dilakukan terhadap kemiskinan ekstrem sebagai bagian dari kebijakan Pemerintah Pusat. Upaya ini menunjukkan hasil yang cukup baik dimana sejak tahun 2021-2024 mengalami penurunan dari 2,32 menjadi 0,38. Sementara itu, jika dibandingkan dengan kota-kota lain di Jawa Tengah, Kota Pekalongan berada di urutan ketiga setelah Kota Semarang dan Kota Salatiga. Upaya yang terus dilakukan diharapkan akan dapat mencapai target nol persen kemiskinan ekstrem pada akhir periode RPJM Daerah Tahun 2025-2029.



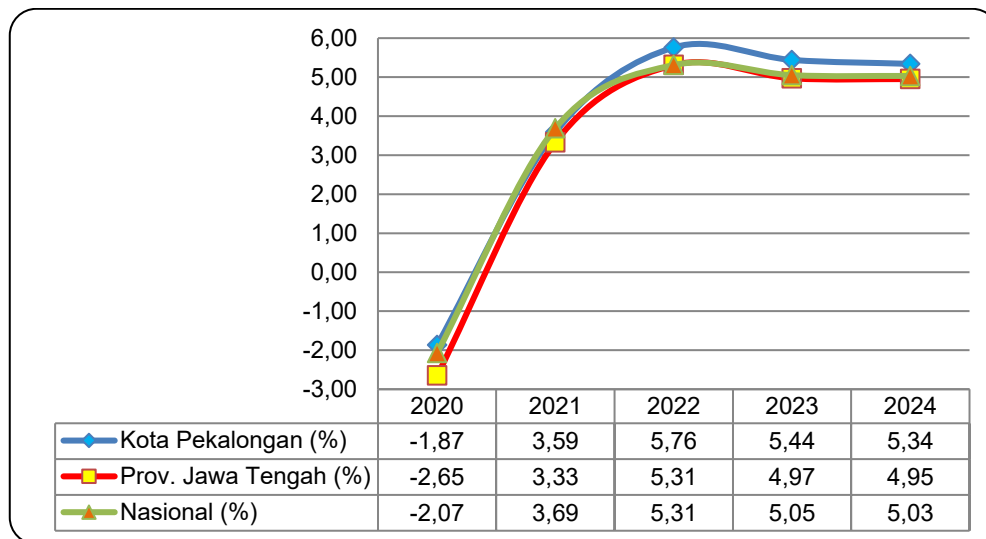
Sumber: pekalongankota.bps.go.id, jateng.bps.go.id, dan www.bps.go.id (diolah), 2025

Gambar II-20
Perbandingan Tingkat Kemiskinan Ekstrem Antar Kota Se-Jawa Tengah
Tahun 2021-2024

2.2.1.2. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang bertumbuh oleh suatu daerah. Pertumbuhan ekonomi Kota Pekalongan pada tahun 2020 sampai dengan 2024 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2020 pertumbuhan ekonomi menurun tajam, mengalami kontraksi, yaitu minus 1,87 persen. Hal ini disebabkan wabah global yaitu *Covid-19* yang menyerang ke seluruh dunia hingga menjadi pandemi dan berdampak sangat signifikan terhadap tatanan kehidupan ekonomi, sosial dan budaya. Seluruh sendi kehidupan tak terhindar dari dampak wabah ini hingga mengakibatkan penurunan aktivitas ekonomi global. Namun demikian, pada tahun 2021, perekonomian global, nasional dan Kota Pekalongan tumbuh kembali. Pertumbuhan ekonomi Kota Pekalongan tahun 2021 sebesar 3,59 persen dan tumbuh kembali sebesar 5,76 persen pada tahun 2022. Namun pertumbuhan ekonomi Kota Pekalongan pada tahun 2023 mengalami perlambatan sebesar 5,44 persen. Pada tahun 2024 pertumbuhan ekonomi Kota Pekalongan mengalami perlambatan lagi sebesar 5,34 persen. Pertumbuhan ini lebih baik dibandingkan pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Tengah dan pertumbuhan ekonomi nasional. Hal ini dikarenakan keberlanjutan pemulihan ekonomi yang tidak hanya dilandasi pada keberhasilan dalam penanganan

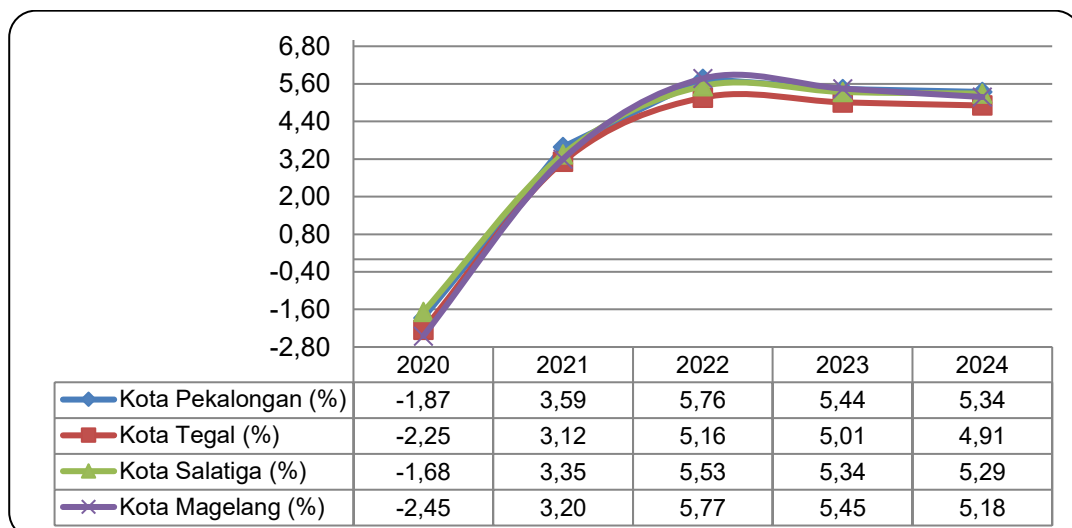
pandemi dan program vaksinasi, namun juga bergantung pada efektivitas respon kebijakan yang ditempuh.



Sumber: www.jateng.bps.go.id (diolah), 2025

Gambar II-21
Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Kota Pekalongan dengan
Provinsi dan Nasional Tahun 2020-2024

Jika dibandingkan dengan daerah setara seperti Kota Tegal, Kota Salatiga dan Kota Magelang, pertumbuhan ekonomi Kota Pekalongan secara umum cukup tinggi diantara ketiga daerah tersebut. Pada tahun 2020 pertumbuhan ekonomi Kota Pekalongan berada di bawah Kota Salatiga serta di atas Kota Tegal dan Kota Magelang. Pada tahun 2021 pertumbuhan ekonomi Kota Pekalongan semakin membaik dan berada di atas ketiga kota tersebut. Pada tahun 2022 pertumbuhan ekonomi Kota Pekalongan berada di bawah Kota Magelang dan di atas Kota Salatiga dan Kota Tegal. Pada tahun 2023 pertumbuhan ekonomi Kota Pekalongan lebih tinggi dibandingkan Kota Tegal dan Kota Salatiga, namun lebih rendah dibandingkan dengan Kota Magelang. Sementara pada tahun 2024 pertumbuhan ekonomi Kota Pekalongan lebih tinggi dibandingkan dengan kota setara. Selengkapnya disajikan dalam gambar berikut.



Sumber: www.jateng.bps.go.id (diolah), 2025

Gambar II-22
Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Kota Pekalongan
dibandingkan dengan Daerah Setara Tahun 2020-2024

Dari data tersebut di atas menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi Kota Pekalongan menunjukkan kecenderungan yang meningkat dari tahun ke tahun. Dalam rangka pemulihan dan percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat, sebagai dampak pandemi *Covid-19*, pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu faktor pendorongnya. Dibutuhkan sinergi para pemangku kepentingan agar pertumbuhan ekonomi Kota Pekalongan dapat memiliki kecenderungan meningkat dari waktu ke waktu, sehingga kesejahteraan masyarakat terus semakin meningkat.

Tantangan berikutnya adalah bagaimana mewujudkan pertumbuhan ekonomi Kota Pekalongan yang berkualitas. Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas adalah pertumbuhan yang menciptakan pemerataan pendapatan, pengentasan kemiskinan dan membuka kesempatan kerja yang luas. Berdasarkan data satu dekade ini, dengan menggunakan analisis korelasi, dapat diidentifikasi bahwa keempat aspek tersebut, yaitu pertumbuhan ekonomi, pemerataan pendapatan (Indeks Gini), pengentasan kemiskinan (angka kemiskinan), dan kesempatan kerja (TPT, tingkat pengangguran terbuka), memiliki korelasi yang tidak signifikan. Artinya pertumbuhan ekonomi Kota Pekalongan selama ini, tidak berkorelasi atau tidak mempengaruhi terhadap pemerataan pendapatan, pengentasan kemiskinan dan membuka kesempatan kerja yang luas.

Pada tahun 2020, laju pertumbuhan ekonomi Kota Pekalongan mengalami kontraksi sebesar -1,87 persen. Namun pada tahun 2021 dan 2022 pertumbuhan ekonomi Kota Pekalongan mengalami kenaikan dan kembali mengalami perlambatan di tahun 2023 dan 2024. Pertumbuhan ekonomi Kota Pekalongan tahun 2024 sebesar 5,34 dengan pertumbuhan tiga sektor terbesar yaitu Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 15,16 persen, Jasa Lainnya 9,40 persen dan Jasa Perusahaan sebesar 9,10 persen.

2.2.1.3. Indeks Gini

Indeks Gini atau Koefisien Gini adalah salah satu ukuran umum untuk distribusi pendapatan atau kekayaan yang menunjukkan seberapa merata pendapatan dan kekayaan didistribusikan di antara populasi. Indeks Gini memiliki kisaran 0 sampai 1. Nilai 0 (nol) menunjukkan distribusi yang sangat merata yaitu setiap orang memiliki jumlah penghasilan atau kekayaan yang sama persis. Nilai 1 menunjukkan distribusi yang timpang sempurna yaitu satu orang memiliki segalanya dan semua orang lain tidak memiliki apa-apa. Data selengkapnya disajikan dalam Tabel II-13 berikut.

Tabel II-13
Indeks Gini Kota Pekalongan Tahun 2020-2024

Tahun	Indeks Gini
2020	0,314
2021	0,357
2022	0,373
2023	0,321
2024	0,330

Sumber: BPS Kota Pekalongan, 2025

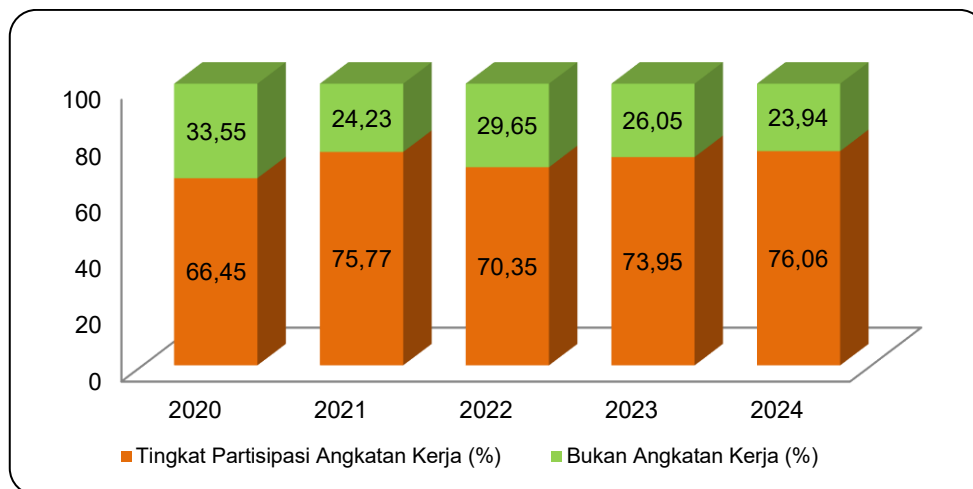
Indeks Gini Kota Pekalongan dalam periode 2020-2024 menunjukkan fluktuasi dalam tingkat ketimpangan pendapatan masyarakat. Pada tahun 2020, Indeks Gini tercatat sebesar 0,314, yang kemudian mengalami peningkatan sampai dengan pada tahun 2022, mencerminkan meningkatnya kesenjangan ekonomi di masyarakat. Namun, pada tahun 2023, angka ini turun drastis menjadi 0,321, menunjukkan perbaikan dalam distribusi

pendapatan. Tren perbaikan ini berlanjut pada tahun 2024 dengan sedikit kenaikan menjadi 0,330. Secara keseluruhan, meskipun terjadi peningkatan ketimpangan pada awal periode, langkah-langkah kebijakan yang diambil tampaknya berhasil mengurangi kesenjangan ekonomi pada tahun-tahun berikutnya. Tantangan ke depan adalah menjaga tren positif ini agar ketimpangan tetap terkendali dan kesejahteraan masyarakat dapat meningkat secara merata.

Pembangunan inklusif yang dapat dilaksanakan antara lain terus mendorong pengembangan sektor unggulan, yaitu sektor yang memiliki pertumbuhan dan kontribusi yang tinggi terhadap perekonomian serta sebagian besar masyarakat memiliki mata pencaharian di sektor tersebut. Upaya lain yang harus terus dilakukan adalah mendorong pembangunan pusat-pusat pertumbuhan baru sehingga perekonomian dapat terus tumbuh serta revitalisasi kawasan terdampak rob dan banjir.

2.2.1.4. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Penduduk usia kerja dikategorikan menjadi dua, yang disebut angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Menurut *International Labour Organization* (ILO), penduduk usia kerja adalah penduduk yang telah mencapai umur 15 tahun atau lebih. Penduduk Usia Kerja (PUK) di Kota Pekalongan Tahun 2024 tercatat sebanyak 178.952 orang. Dari angka tersebut, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (penduduk usia produktif/usia kerja 15 tahun ke atas yang bekerja, punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja, dan pengangguran) sebesar 76,06 persen atau naik 2,11 persen dari tahun 2023. Sedangkan yang Bukan Angkatan Kerja (penduduk usia produktif/usia kerja 15 tahun ke atas yang bersekolah/kuliah, mengurus rumah tangga, pensiunan, atau melaksanakan kegiatan lainnya selain kegiatan pribadi) yaitu 23,94 persen. Tren kenaikan TPAK pada tahun 2020-2024 terjadi seiring dengan kenaikan jumlah penduduk usia kerja.

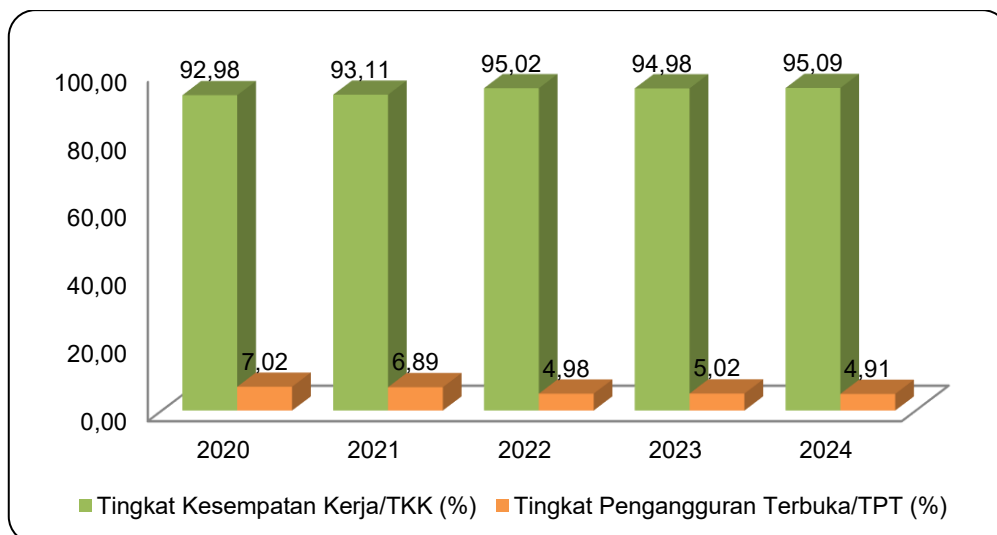


Sumber: <https://jateng.bps.go.id/>, 2025

Gambar II-23

Rasio TPAK dan Bukan Angkatan Kerja di Kota Pekalongan Tahun 2020-2024

Sementara itu Tingkat Kesempatan Kerja (TKK) di Kota Pekalongan cukup baik. Hal ini dapat dilihat pada persentase penduduk yang termasuk angkatan kerja yang bekerja pada tahun 2024 mencapai 95,09 persen. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 4,91 persen atau turun 0,11 poin, artinya adalah pada setiap 100 orang yang termasuk angkatan kerja, maka ada 11 orang yang benar-benar menganggur.



Sumber: <https://jateng.bps.go.id/>, 2025

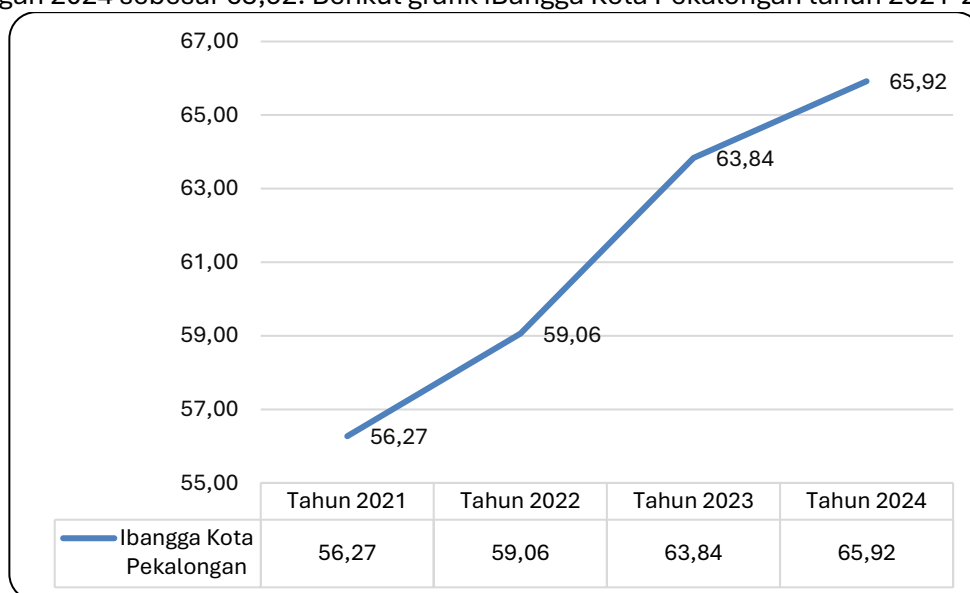
Gambar II-24

Rasio TKK dan TPT di Kota Pekalongan Tahun 2020-2024

Nilai TPT secara persentase mengalami penurunan dari 5,02 persen menjadi 4,91 persen. Semua sektor diharapkan terus berpacu untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, karena, dengan pertumbuhan ekonomi yang baik, maka mampu menyerap tenaga kerja dan membuka peluang kerja lebih tinggi.

2.2.1.5. Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) - IUP

iBangga mengukur kesejahteraan keluarga melalui tiga dimensi utama: ketentraman, kemandirian, dan kebahagiaan keluarga. Dimensi kebahagiaan menjadi penopang utama, sementara dimensi kemandirian masih menjadi tantangan yang perlu ditangani lebih lanjut. Tren kenaikan iBangga Kota Pekalongan dari 2021 hingga 2024 menunjukkan adanya perbaikan dalam kesejahteraan keluarga di Kota Pekalongan. Capaian iBangga Kota Pekalongan tahun 2024 berdasarkan dimensi penunjangnya sebagai berikut: iBangga Kota Pekalongan 2024 sebesar 65,92. Berikut grafik iBangga Kota Pekalongan tahun 2021-2024:



Sumber: Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, 2025.

Gambar II-25

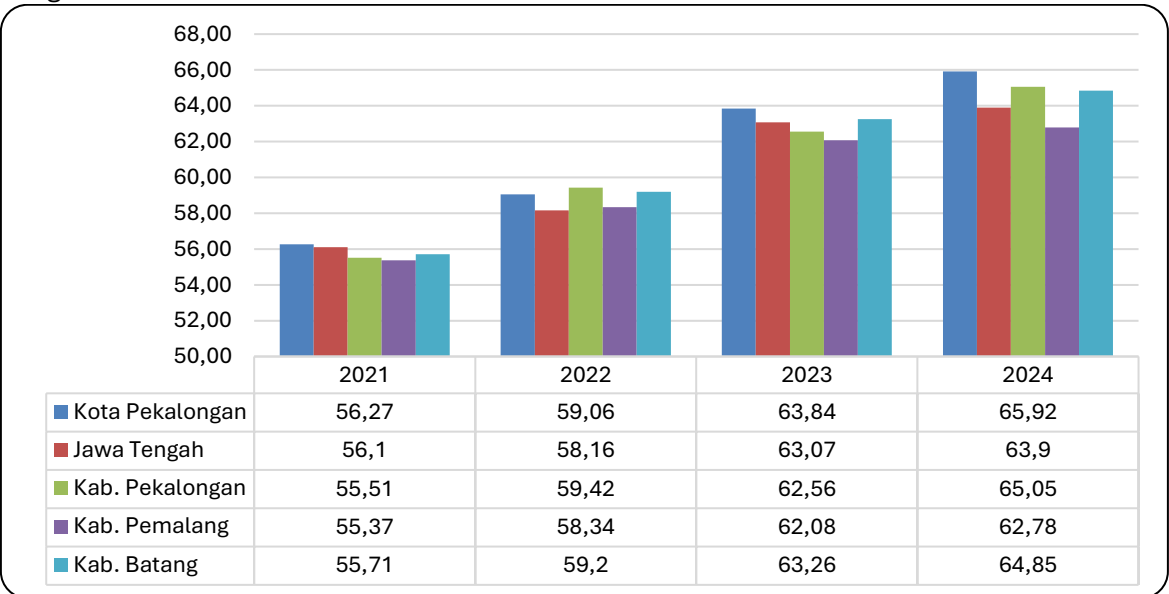
Indeks Pembangunan Keluarga Kota Pekalongan Tahun 2021-2024

Dimensi kebahagiaan faktor-faktor seperti interaksi antaranggota keluarga, pengasuhan anak bersama, rekreasi keluarga, dan partisipasi sosial mendukung tingginya angka kebahagiaan. Kota Pekalongan memiliki modal sosial kuat berupa budaya kekeluargaan dan gotong royong. Program seperti kelas parenting, keberadaan PUSPAGA (Pusat Pembelajaran Keluarga), dan kegiatan keagamaan keluarga memperkuat struktur emosional rumah tangga. Hal ini menunjukkan pentingnya pendekatan spiritual dan sosial dalam membangun ketahanan keluarga.

Pada dimensi ketentraman didukung oleh faktor kegiatan ibadah, legalitas keluarga, jaminan kesehatan, dan keharmonisan keluarga. Di Kota Pekalongan banyaknya keberagaman dan tingginya toleransi agama, cakupan kepemilikan akta kelahiran yang tinggi, program UHC (*Universal Health Coverage*) turut berkontribusi besar dalam pencapaian di dimensi ini.

Pada dimensi kemandirian didukung oleh faktor pemenuhan kebutuhan dasar, jaminan keuangan, keberlangsungan pendidikan, kesehatan keluarga, dan akses media online/daring. Program pemerintah seperti Program Keluarga Harapan (PKH), bantuan sosial (bansos), atau pelatihan keterampilan untuk UMKM memungkinkan membantu keluarga di Pekalongan menjadi lebih mandiri. Pada 2022–2023, banyak program pemulihan ekonomi nasional yang menyasar keluarga miskin, yang dapat meningkatkan indikator kemandirian. Pada faktor akses media online/daring, Kota Pekalongan menunjukkan kemajuan signifikan dalam digitalisasi, termasuk penyediaan Wi-Fi publik dan *smart city dashboard*. Namun, kesenjangan digital antar generasi dan keterbatasan perangkat digital di beberapa rumah tangga masih menjadi tantangan. Upaya literasi digital dan pelatihan daring sangat dibutuhkan agar tidak terjadi ketimpangan akses informasi. Tantangan terbesar pada dimensi kemandirian salah satunya yaitu pada keberlangsungan pendidikan dimana masih banyak Anak Putus Sekolah dan Anak Tidak Sekolah.

Kota Pekalongan menunjukkan skor iBangga yang lebih tinggi dibanding kabupaten tetangga dan Provinsi Jawa Tengah. Hal ini mengindikasikan adanya potensi besar Kota Pekalongan yang terus dapat dimanfaatkan optimalisasi iBangga. Berikut perbandingan iBangga di Kota Pekalongan dengan Kabupaten sekitar Kota Pekalongan serta Provinsi Jawa Tengah tahun 2024:



Sumber: Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, 2025.

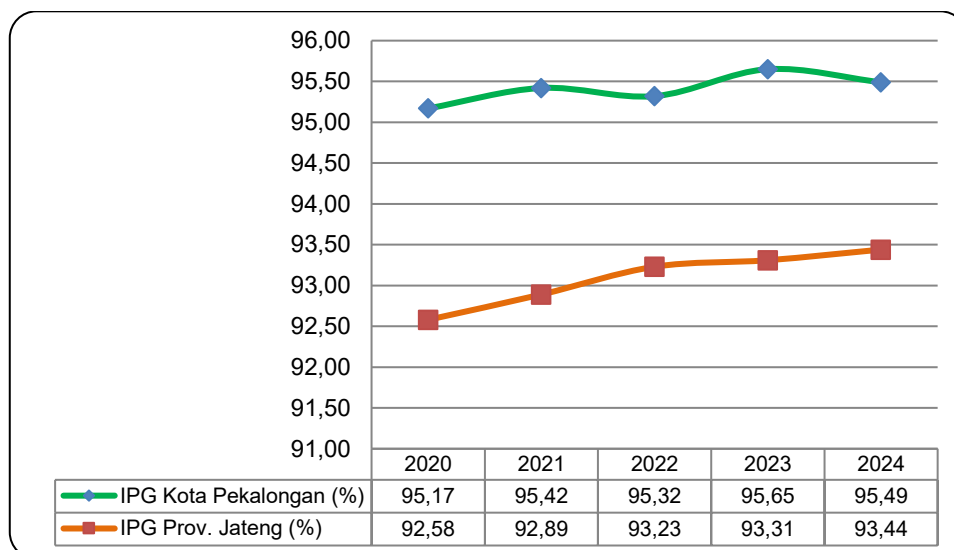
Gambar II-26
Indeks Pembangunan Keluarga Kota Pekalongan dibanding Petanglong
Tahun 2021-2024

2.2.1.6. Inklusif dan Responsif Gender

1. Indeks Pembangunan Gender (IPG)

Indeks Pembangunan Gender (IPG) merupakan indeks pencapaian kemampuan dasar pembangunan manusia yang sama seperti IPM dengan memperhitungkan ketimpangan gender. IPG dapat digunakan untuk mengetahui kesenjangan pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan. Kesetaraan gender terjadi apabila nilai IPM sama dengan nilai IPG.

Perkembangan IPG Kota Pekalongan sepanjang tahun 2020-2024 cenderung fluktuatif. Jika dibandingkan dengan IPG Provinsi Jawa Tengah, IPG Kota Pekalongan masih berada di atas rata-rata Provinsi Jawa Tengah. Pada tahun 2024, IPG Kota Pekalongan sebesar 95,49 mengalami penurunan dibanding tahun 2023 tetapi masih lebih tinggi dari tahun 2020 sebesar 95,17. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas sumber daya manusia perempuan di Kota Pekalongan semakin membaik khususnya pada bidang pendidikan, kesehatan dan upaya peningkatan pendapatan. Sedangkan jika dibandingkan dengan IPG Provinsi Jawa Tengah, IPG Kota Pekalongan masih di atas rata-rata Provinsi Jawa Tengah.



Sumber: www.jateng.bps.go.id, 2025

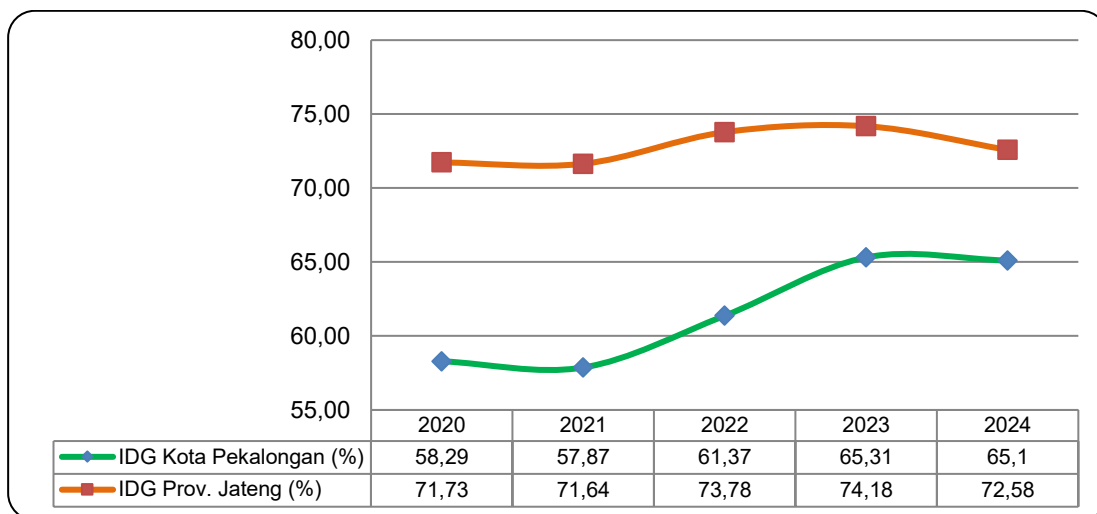
Gambar II-27
Perbandingan IPG di Kota Pekalongan dengan Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2020-2024

2. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) adalah indeks komposit yang mengukur peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik. Selama empat tahun terakhir yaitu dari tahun 2020 sampai dengan 2024, nilai IDG Kota Pekalongan cenderung meningkat. Pada tahun 2020, nilai IDG Kota Pekalongan sebesar 58,29, kemudian terus meningkat sampai tahun 2024 menjadi 65,10.

Jika dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah sepanjang tahun 2020-2024, nilai IDG Kota Pekalongan masih di bawah rata-rata Provinsi Jawa Tengah sebagaimana disajikan dalam Gambar II-28. Kondisi ini menunjukkan bahwa peran aktif penduduk perempuan di Kota Pekalongan dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah dalam kehidupan ekonomi dan politik menurun partisipasinya. Hal ini menjadi tantangan

pembangunan Kota Pekalongan ke depan dalam rangka peningkatan partisipasi perempuan.



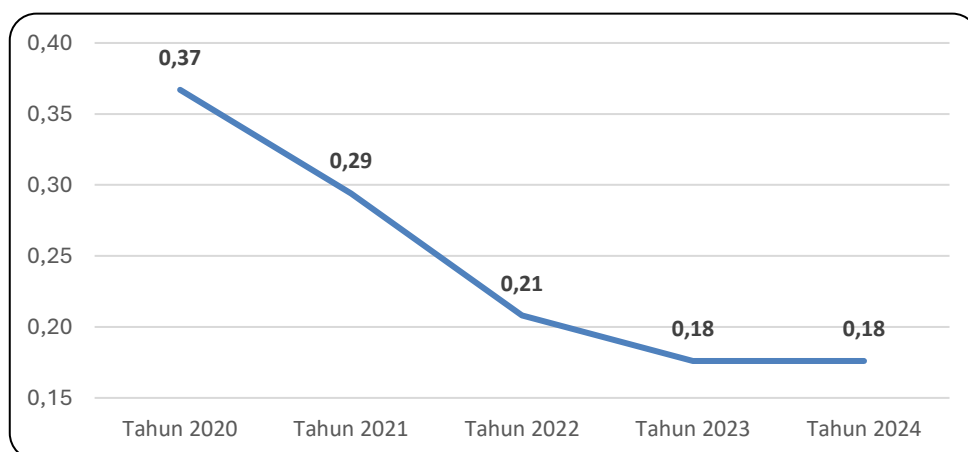
Sumber: www.jateng.bps.go.id, 2025

Gambar II-28

Perkembangan IDG Kota Pekalongan dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020-2024

3. Indeks Ketimpangan Gender (IKG)

Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Kota Pekalongan menunjukkan tren penurunan yang signifikan dari tahun 2020 hingga 2024. Pada tahun 2020, IKG Kota Pekalongan tercatat sebesar 0,37 dan terus menurun hingga mencapai 0,18 pada tahun 2023, stabil di angka yang sama pada tahun 2024. Penurunan ini mencerminkan adanya perbaikan dalam kesetaraan gender di Kota Pekalongan. IKG mengukur kesenjangan antara perempuan dan laki-laki dalam tiga dimensi utama, yaitu: kesehatan reproduksi, pemberdayaan, dan partisipasi dalam pasar tenaga kerja. Penurunan nilai IKG di Kota Pekalongan menunjukkan peningkatan di ketiga dimensi tersebut.



Sumber: BPS Kota Pekalongan, 2025.

Gambar II-29

Indeks Ketimpangan Gender Kota Pekalongan Tahun 2020-2024

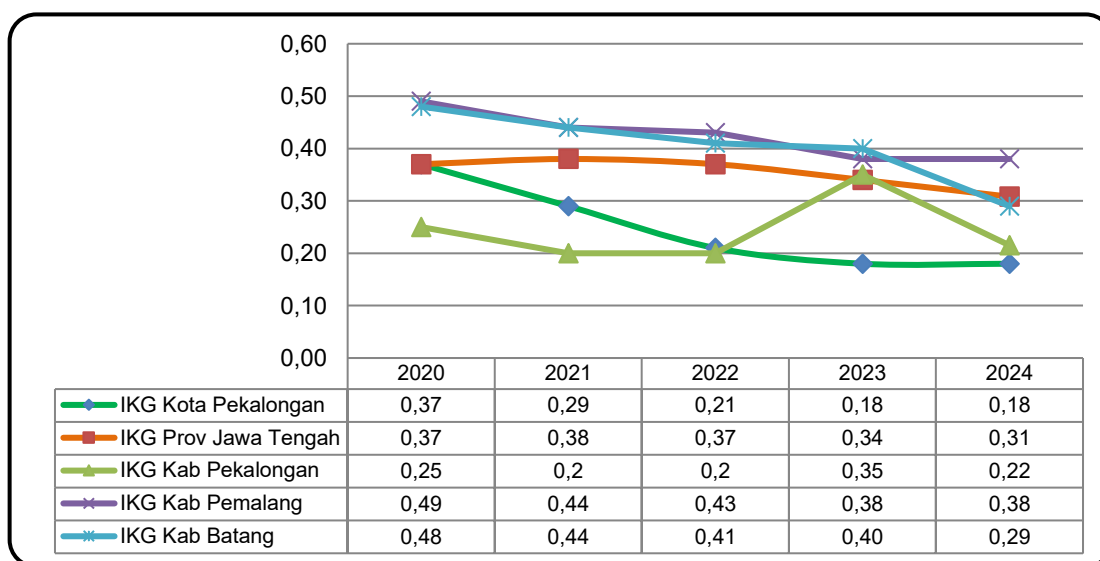
Adanya peningkatan akses terhadap fasilitas kesehatan, khususnya layanan persalinan, sosialisasi kesehatan reproduksi kepada remaja, program KB pascapersalinan menjadi salah satu faktor pendukung dalam dimensi kesehatan reproduksi. Selain itu, adanya kebijakan *Universal Health Coverage* (UHC) atau jaminan

kesehatan yang bertujuan memastikan setiap warga memiliki akses terhadap pelayanan kesehatan yang bermutu dan terjangkau juga berkontribusi pada peningkatan ini pada dimensi ini.

Dalam dimensi pemberdayaan, langkah afirmatif seperti penerapan kuota keterwakilan perempuan dalam legislatif dan dukungan partai politik lokal telah membuka ruang partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan. Selain itu, sektor ekonomi kreatif, khususnya industri batik, menjadi ruang penting pemberdayaan ekonomi perempuan. Pelatihan wirausaha dan dukungan bagi UMKM, penerapan Pengarusutamaan Gender (PUG) di setiap OPD, serta peran organisasi perempuan seperti PKK, Dharma Wanita, Aisyiyah, dan Fatayat NU memperkuat fondasi sosial-ekonomi perempuan di Pekalongan.

Pada dimensi pasar tenaga kerja, tingginya partisipasi perempuan dalam industri kreatif, yang menawarkan fleksibilitas kerja, mendorong peningkatan keterlibatan perempuan di sektor informal maupun formal. Pelatihan keterampilan dan skema pembiayaan usaha kecil seperti kredit ultra mikro telah meningkatkan **Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)** perempuan, menjadikan ekonomi sebagai alat utama pemberdayaan.

Dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah dan kabupaten sekitar yaitu Kabupaten Pemalang, Kabupaten Pekalongan serta Kabupaten Batang, ketimpangan gender di Kota Pekalongan relatif lebih rendah. Berikut perbandingan Indeks Ketimpangan Gender di Kota Pekalongan dengan Kabupaten sekitar Kota Pekalongan serta Provinsi Jawa Tengah:



Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2025. *) tahun 2024 data belum rilis

Gambar II-30
Perbandingan Indeks Ketimpangan Gender di Kota Pekalongan dengan
Kabupaten sekitar Kota Pekalongan serta Provinsi Jawa Tengah

2.2.1.7. Perlindungan Anak

Perlindungan anak merupakan salah satu pilar penting dari sebuah kota yang layak untuk anak. Kota Layak Anak (KLA) didefinisikan sebagai Kabupaten/Kota yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha, yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin pemenuhan hak dan perlindungan anak. Ada 24 indikator yang mampu mewakili terpenuhinya hak-hak anak

sehingga dapat dikatakan menuju kabupaten/kota layak anak yang terdiri dari 5 kluster, yaitu: (1) hak sipil dan kebebasan; (2) lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif/pengganti; (3) kesehatan dasar dan kesejahteraan; (4) pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan seni budaya; (5) perlindungan khusus.

Pada tahun 2020, Kota Pekalongan meraih penghargaan Kota Layak Anak kategori Madya. Upaya-upaya yang telah dilakukan diantaranya di Tahun 2022, Kota Pekalongan telah mendeklarasikan bebas pekerja anak, advokasi dan peresmian sejumlah Sekolah Ramah Anak (SRA) di Kota Pekalongan, kegiatan Konvensi Hak Anak (KHA) kepada semua guru di Kota Pekalongan baik di tingkat PAUD, TK, SD, dan SMP, serta SMA secara mandiri dan bersinergi kepada Pemkot Pekalongan. Upaya lain juga dilakukan untuk memenuhi indikator dan klaster KLA. Hasilnya, pada tahun 2023 Kota Pekalongan kembali meraih penghargaan Kota Layak Anak kategori Nindya dengan nilai 769,80.

2.2.1.8. Pemuda dan Olahraga

Pemuda sebagai motor penggerak pembangunan mempunyai peran dan arti penting bagi proses pembangunan. Pembangunan dan pembinaan generasi muda dilakukan melalui organisasi kepemudaan yang ada di Kota Pekalongan. Adapun organisasi yang masih berperan aktif selama tahun 2020-2024 antara lain adalah PPI, Forum Kota Pekalongan, Gerakan Pemuda Nusantara, Forum Pemuda Mataram, GMPI, Pemuda Muhammadiyah, KAMMI, KNPI, dan Karang Taruna. Lebih lengkapnya perkembangan organisasi pemuda dan kegiatan kepemudaan Kota Pekalongan disajikan dalam Tabel II-14 berikut.

Tabel II-14
Perkembangan Kepemudaan di Kota Pekalongan Tahun 2020-2024

Uraian	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Organisasi Pemuda	24	24	16	40	40
Jumlah Kegiatan Kepemudaan	8	10	16	20	33

Sumber: Dinparbudpora Kota Pekalongan, 2025

Selain pembinaan organisasi kepemudaan, juga dilakukan pembinaan dan fasilitasi terhadap klub-klub olahraga yang ada di Kota Pekalongan.

Tabel II-15
Perkembangan Jumlah Klub dan Gedung Olahraga di Kota Pekalongan Tahun 2020-2024

Uraian	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Klub Olahraga	20	35	50	50	50
Jumlah Gedung Olahraga	2	2	2	2	2

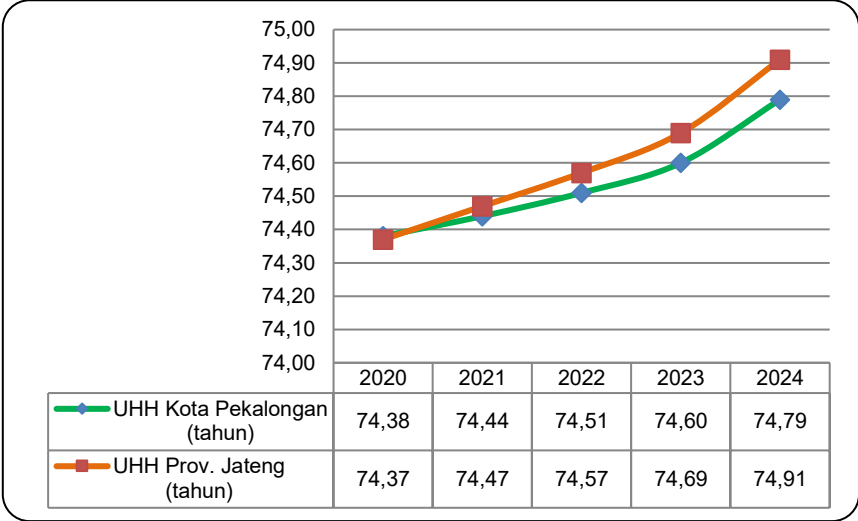
Sumber: Dinparbudpora Kota Pekalongan, 2025

2.2.2. Kesehatan Untuk Semua

2.2.2.1. Usia Harapan Hidup

Usia Harapan Hidup (UHH) merupakan ukuran terhadap peningkatan kesejahteraan penduduk pada umumnya dan derajat kesehatan pada khususnya. Dalam kurun waktu 2020-2024, UHH di Kota Pekalongan semakin meningkat dari 74,38 pada tahun 2020 menjadi 74,79 di tahun 2024. Artinya, secara rata-rata anak yang dilahirkan di Kota Pekalongan dapat

bertahan hidup hingga mencapai usia 74 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas kesehatan masyarakat di Kota Pekalongan secara umum sudah semakin membaik. Dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah, UHH Kota Pekalongan tahun 2022 sampai dengan tahun 2024 berada di bawah UHH Provinsi Jawa Tengah. Selengkapnya disajikan pada gambar berikut.



Sumber: www.jateng.bps.go.id, 2025

Gambar II-31
Perbandingan Usia Harapan Hidup (UHH) Kota Pekalongan
dengan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020-2024

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi UHH dan bersifat kompleks yaitu aspek ekonomi, aspek kesehatan, aspek sosial dan aspek lingkungan. Faktor dominan yang mempengaruhi UHH adalah aspek kesehatan yang bertujuan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan merupakan hak asasi manusia yang harus dilindungi dan diperhatikan serta menjadi investasi di masa yang akan datang. Menjadi tantangan besar Kota Pekalongan bahwa perbedaan UHH Kota Pekalongan dan Provinsi Jawa Tengah memiliki kecenderungan semakin melebar.

Dalam rangka mewujudkan peningkatan derajat kesehatan masyarakat, maka diperlukan berbagai upaya paradigma sehat melalui kegiatan promotif dan preventif sebagai landasan pembangunan kesehatan termasuk pemberdayaan masyarakat dan keterlibatan lintas sektor. Perwujudan peningkatan UHH sangat dipengaruhi oleh faktor kesehatan ibu, bayi dan balita; perbaikan gizi; perubahan perilaku; pencegahan penyakit menular dan tidak menular; kesehatan lingkungan serta faktor pelayanan kesehatan dengan pendekatan *continuum of care* atau asuhan pelayanan kesehatan berkesinambungan yang komprehensif disepanjang siklus kehidupan mulai dari sejak masa kehamilan, bayi, anak, remaja, dewasa sampai dengan lanjut usia (lansia) yang melibatkan peran keluarga, komunitas, fasilitas kesehatan primer (Puskesmas) dan fasilitas kesehatan rujukan (Rumah Sakit).

2.2.2.2. Angka Kematian Ibu (AKI)

Angka Kematian Ibu (AKI) menggambarkan jumlah kematian ibu selama masa kehamilan, persalinan dan nifas yang disebabkan oleh kehamilan, persalinan, dan nifas atau pengelolaannya tetapi bukan karena sebab-sebab lain seperti kecelakaan, terjatuh, dan lain-lain, di setiap 100.000 kelahiran hidup. Angka Kematian Ibu mencerminkan risiko yang dihadapi ibu-ibu selama kehamilan dan melahirkan yang dipengaruhi status gizi ibu, keadaan sosial ekonomi, keadaan kesehatan yang kurang baik menjelang kehamilan, kejadian berbagai komplikasi pada kehamilan dan kelahiran, tersedianya dan penggunaan fasilitas pelayanan

kesehatan termasuk pelayanan *prenatal* dan *obstetri*. Tingginya Angka Kematian Ibu menunjukkan keadaan sosial ekonomi dan fasilitas pelayanan kesehatan termasuk pelayanan *prenatal* dan *obstetri* yang belum optimal.

Tabel II-16
Kasus Kematian Ibu dan Angka Kematian Ibu (AKI)
di Kota Pekalongan Tahun 2020-2024

Tahun	Jumlah Kasus Kematian Ibu	Jumlah Kelahiran Hidup	AKI per 100.000 kelahiran hidup
2020	9	5905	152,41
2021	11	5844	188,23
2022	7	5621	124,53
2023	6	4887	122,77
2024	5	3855	129,70

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Pekalongan dan Evaluasi RKPD Kota Pekalongan TW. IV Tahun 2024, 2025

Kondisi Angka Kematian Ibu (AKI) Kota Pekalongan dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 mengalami fluktuasi. Tingginya angka kematian dipengaruhi status gizi ibu, keadaan sosial ekonomi, keadaan yang kurang baik selama kehamilan, kejadian berbagai komplikasi pada kehamilan dan kelahiran. Adapun penyebab langsung kematian Ibu di Kota Pekalongan diantaranya disebabkan karena kasus perdarahan, infeksi, eklamsia dan penyebab lain.

2.2.2.3. Angka Kematian Bayi (AKB)

Kematian bayi merupakan kejadian kematian yang terjadi pada periode sejak bayi lahir sampai bayi belum berusia tepat satu tahun. Kematian bayi dipengaruhi oleh jumlah kematian *neonatal* yang merupakan masalah dan kontribusinya sangat tinggi terhadap kematian bayi. Penyebab kematian *neonatal* antara lain adanya infeksi (*pneumonia*, tetanus, diare), prematur/BBLR, dan kelainan *congenital*. Status kesehatan bayi tersebut sangat terkait dengan status kesehatan ibu selama hamil dan melahirkan yang dipengaruhi beberapa faktor seperti rendahnya persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan, rendahnya pemeriksaan selama masa kehamilan dan juga status gizi ibu hamil yang masih rendah.

Angka Kematian Bayi dari tahun 2021 sampai 2024 per 1.000 kelahiran mengalami fluktuasi, dan di tahun 2024 Angka Kematian Bayi sebesar 10,89 dengan jumlah kasus kematian bayi sebesar 42 kasus. Adapun penyebab Angka Kematian Bayi di Kota Pekalongan diantaranya disebabkan oleh kasus BBLR (Berat Bayi Lahir Rendah), asfiksia, kelainan *congenital*, kelainan saluran pencernaan, *pneumonia*, diare dan adanya penyakit penyerta lainnya.

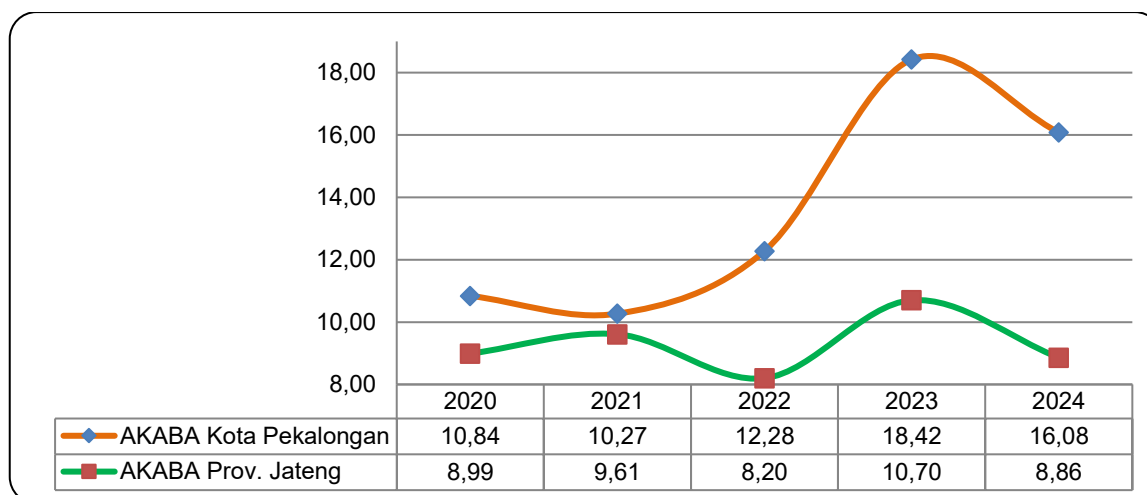
Tabel II-17
Angka Kematian Bayi dan Angka Kelangsungan Hidup Bayi
di Kota Pekalongan Tahun 2020-2024

Tahun	AKB per 1000 kelahiran	AKHB per 1000 kelahiran
2020	8,81	991,19
2021	8,90	991,10
2022	9,96	990,04
2023	13,71	986,29
2024	10,89	989,11

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Pekalongan, 2025

2.2.2.4. Angka Kematian Balita (AKABA)

Angka Kematian Balita (AKABA) adalah jumlah anak yang dilahirkan pada tahun tertentu dan meninggal sebelum mencapai usia 5 tahun, dinyatakan sebagai angka kematian balita per 1.000 kelahiran hidup (KH). AKABA menggambarkan tingkat permasalahan kesehatan balita, tingkat pelayanan kesehatan pada balita dan kondisi sosial, ekonomi dan sanitasi lingkungan tempat balita tinggal.



Sumber: Evaluasi RKPD Kota Pekalongan TW. IV Tahun 2024 dan Buku Saku Kinerja Program Kesehatan 2022 Dinkes Jawa Tengah, 2025

Gambar II-32
Perkembangan Angka Kematian Balita di Kota Pekalongan dan Jawa Tengah Tahun 2020-2024

Tingginya Angka Kematian Balita (AKABA) di Kota Pekalongan disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya disebabkan oleh adanya penyakit penyerta pada Balita seperti ISPA, Diare, DBD, Campak ataupun kombinasi dari penyakit menular lainnya serta kurangnya pemahaman orang tua tentang deteksi dini balita sakit.

2.2.2.5. Prevalensi Balita Stunting

Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak Balita akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang yang ditandai dengan panjang badan atau tinggi badan dibandingkan umur berada di bawah standar yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan. Menurut WHO *stunting* atau pertumbuhan yang terhambat mencerminkan proses kegagalan untuk mencapai potensi pertumbuhan linier sebagai akibat dari kondisi kesehatan atau gizi yang kurang optimal. Berdasarkan populasi, tingkat *stunting* yang tinggi dikaitkan dengan kondisi sosial ekonomi yang buruk dan peningkatan risiko sering dan awal terpapar dengan kondisi buruk seperti penyakit atau praktik pemberian makan yang tidak tepat. Gambaran prevalensi angka *stunting* Kota Pekalongan dari tahun 2019-2024 disajikan dalam Tabel II-18 berikut.

Tabel II-18
Prevalensi Balita *Stunting* Kota Pekalongan Tahun 2019-2024

Tahun	Prevalensi <i>Stunting</i> (persen)
2019	26,59
2020	nihil

Tahun	Prevalensi <i>Stunting</i> (persen)
2021	20,6
2022	23,1
2023	28,2
2024	19,3

Sumber: Survey Status Gizi Indonesia (SSGI) dan Survey Kesehatan Indonesia (SKI) tahun 2023, Kemenkes, 2025

Dari Tabel II-18 dapat dilihat bahwa prevalensi *stunting* di Kota Pekalongan menunjukkan fluktuasi yang cukup signifikan selama kurun waktu enam tahun terakhir. Pada tahun 2019, prevalensi *stunting* tercatat sebesar 26,59 persen, namun, data tahun 2020 nihil dikarenakan pandemi *Covid-19* sehingga tidak dilakukan pendataan/survey. Tahun 2021 prevalensi *stunting* Kota Pekalongan berada pada angka 20,6 persen, pada tahun 2022 angka *stunting* kembali naik menjadi 23,1 persen, dan bahkan meningkat lebih tinggi pada tahun 2023 mencapai 28,2 persen. Kenaikan ini menunjukkan adanya tantangan dalam efektivitas program penanggulangan *stunting* atau mungkin karena faktor sosial-ekonomi yang memengaruhi ketersediaan pangan bergizi dan layanan kesehatan dasar. Tahun 2024 angka *stunting* di Kota Pekalongan menurun menjadi 19,3 persen, meskipun angka tersebut masih merupakan hasil perhitungan sementara yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kota Pekalongan atas hasil Survey Kesehatan Indonesia (SKI) tahun 2024 yang telah dilaksanakan.

2.2.2.6. Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas)

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat mendefinisikan Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif di wilayah kerja. Jaringan pelayanan Puskesmas terdiri atas Puskesmas pembantu, Puskesmas Keliling dan Praktik Bidan Desa. Sampai dengan tahun 2024, jumlah jaringan Puskesmas di Kota Pekalongan adalah sebagai berikut : (1) Puskesmas Pembantu sebanyak 23 unit, (2) Puskesmas Keliling sebanyak 4 unit, (3) Untuk Bidan Desa, Kota Pekalongan tidak memiliki Bidan Desa dikarenakan Kota Pekalongan termasuk dalam wilayah perkotaan.

Adapun pemenuhan kebutuhan pelayanan kesehatan primer dapat dilihat secara umum dari Rasio Puskesmas terhadap Jumlah Penduduk. WHO merekomendasikan Rasio Puskesmas per Penduduk yang ideal adalah 1 Puskesmas untuk setiap 30.000 penduduk, sedangkan Rasio Puskesmas Pembantu dan Rasio Tenaga Medis dihitung untuk setiap 1000 penduduk.

Tabel II-19
Rasio Puskesmas, Puskesmas Pembantu per Satuan Penduduk di Kota Pekalongan Tahun 2020-2024

Tahun	Jumlah Penduduk	Puskesmas		Pustu	
		Jml	Rasio	Jml	Rasio
2020	307.150	14	1,367	26	0.085
2021	316.216	14	1,328	27	0,085
2022	316.933	14	1,325	22	0,069
2023	317.958	14	1,321	23	0,072

Tahun	Jumlah Penduduk	Puskesmas		Pustu	
		Jml	Rasio	Jml	Rasio
2024	318.182	14	1,319	23	0.072

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Pekalongan, 2025

2.2.2.7. Cakupan Penemuan dan Pengobatan Kasus Tuberkulosis

Treatment Coverage atau Cakupan Penemuan dan Pengobatan Kasus Tuberkulosis (Tb) merupakan langkah pertama dalam kegiatan tata laksana pasien Tb. Penemuan dan pengobatan pasien Tb menular, dapat menurunkan kesakitan dan kematian akibat Tb, menurunkan terjadinya penularan Tb di masyarakat dan sekaligus merupakan kegiatan pencegahan penularan Tb yang paling efektif di masyarakat.

Tabel II-20
Cakupan Penemuan dan Pengobatan Kasus Tb Tahun 2020-2024

Tahun	Target Penemuan Kasus Tb	Kasus yang Ditemukan dan Diobati	Angka Kesakitan (persen)
2020	1109	543	48,96
2021	1109	544	49,05
2022	1108	837	75,54
2023	1018	995	97,74
2024	1105	1029	93,12

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Pekalongan, 2025

Dalam periode tahun 2020 hingga 2024, cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis di Kota Pekalongan mengalami perkembangan yang cukup signifikan, meskipun diawali dengan capaian yang rendah. Pada tahun 2020, capaian berada di angka 48,96 persen, yang tergolong rendah. Hal ini sangat dipengaruhi oleh situasi pandemi *Covid-19* yang menyebabkan gangguan pada sistem layanan kesehatan, termasuk menurunnya mobilisasi petugas surveilans, keterbatasan akses masyarakat ke layanan kesehatan, serta prioritas layanan yang lebih difokuskan pada penanganan *Covid-19*. Akibatnya, proses deteksi dini dan pengobatan Tb berjalan kurang optimal selama dua tahun tersebut.

Memasuki tahun 2022, cakupan penemuan dan pengobatan Tb menunjukkan peningkatan signifikan, hal ini menandakan bahwa sistem layanan Tb mulai pulih. Upaya aktif untuk menggiatkan kembali penemuan kasus dan pengobatan, serta normalisasi pelayanan kesehatan pasca-pandemi menjadi faktor penting dalam pengendalian kasus Tb.

Angka Keberhasilan Pengobatan Tuberkulosis (*Treatment Success Rate*) menggambarkan kualitas pengobatan Tuberkulosis. Angka keberhasilan pengobatan semua kasus tuberkulosis ditargetkan minimal 90 persen.

Tabel II-21
Angka Keberhasilan Tuberkulosis Tahun 2020-2024

Tahun	Angka Keberhasilan Pengobatan Tb (persen)
2020	92
2021	93
2022	95
2023	91
2024	N/A

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Pekalongan, 2025

Angka Keberhasilan Pengobatan Tb di Kota Pekalongan sampai dengan 2024 belum dapat mencapai 100 persen dari jumlah kasus yang ditemukan walaupun capaiannya sudah melebihi target minimal yang dianjurkan oleh WHO (lebih dari 90%). Masih banyak penderita Tb yang tidak meneruskan pengobatan (*drop out*) sehingga menyebabkan semakin meningkatnya kasus Tb Resisten Obat (Tb RO) di Kota Pekalongan.

Di tingkat nasional sendiri, beban kasus Tb RO di Indonesia merupakan salah satu yang tertinggi di dunia sehingga diperlukan berbagai upaya untuk mengendalikan kasus Tb RO diantaranya : pelaksanaan kegiatan pemantauan dan evaluasi terhadap pengelolaan kasus Tb RO secara berkala menggunakan metode *monthly interim cohort analysis* (MICA), pemberian enablers bulan 0 untuk pasien Tb Resisten Rifampisin (TB-RR) terkonfirmasi, pemberian konseling/edukasi untuk memulai pengobatan oleh nakes terlatih, serta pendampingan minum obat pasien Tb oleh komunitas.

2.2.2.8. Cakupan Penerima Jaminan Kesehatan

Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) adalah program pemerintah yang bertujuan untuk memberikan perlindungan kesehatan kepada seluruh masyarakat secara menyeluruh dan berkesinambungan. Program ini dilaksanakan oleh BPJS Kesehatan (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan) sebagai lembaga yang mengelola jaminan sosial di bidang kesehatan, melalui JKN, masyarakat dapat mengakses layanan kesehatan mulai dari fasilitas kesehatan tingkat pertama hingga layanan rujukan ke rumah sakit, baik negeri maupun swasta yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Program ini dirancang untuk memastikan bahwa setiap warga negara, tanpa memandang status ekonomi, memiliki akses terhadap layanan kesehatan yang terjangkau dan berkualitas, sehingga mendukung peningkatan derajat kesehatan masyarakat secara keseluruhan.

Cakupan Penduduk Kota Pekalongan yang menjadi peserta Jaminan Kesehatan Nasional dalam kurun waktu 5 tahun terakhir (Tahun 2020-2024) semakin meningkat seiring dengan adanya kebijakan Pemerintah tentang UHC (*Universal Health Coverage*), dimana ditargetkan minimal 98 persen penduduk Kab/Kota menjadi peserta Jaminan Kesehatan Nasional dengan tingkat keaktifan kepesertaan JKN minimal 75 persen dari seluruh peserta JKN. Secara lengkap data penduduk menjadi penerima jaminan kesehatan di Kota Pekalongan selama 5 tahun terakhir (tahun 2020-2024) disajikan dalam tabel berikut:

Tabel II-22
Cakupan Penduduk Kota Pekalongan Penerima Jaminan Kesehatan Tahun 2020-2024

Tahun	Jumlah Penduduk (jiwa)	Penerima Jaminan Kesehatan					Cakupan Penerima Jaminan Kesehatan (persen)
		PBI JK	PBI APBD	PPU	BP	Jumlah Total	
2020	307.150	91.049	62.196	61.459	6.331	257.992	84,00
2021	308.310	93.980	61.868	59.204	6.554	257.132	83,40
2022	309.742	119.751	47.813	62.197	6.584	273.794	88,39
2023	316.933	120.203	80.803	62.803	7.937	310.902	98,10
2024	318.812	116.985	88.719	63.851	7.067	314.875	98,77

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Pekalongan, 2025

2.2.2.9. Ketahanan Pangan

Ketahanan pangan dapat dilihat dari 3 hal, yaitu ketersediaan pangan, pola pangan harapan dan Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan. Ketersediaan pangan pada satu wilayah ditunjukkan dengan rasio ketersediaan pangan utama. Di Kota Pekalongan ketersediaan pangan dalam kurun 5 (lima) tahun (2020-2024) disajikan dalam Tabel II-23.

Dapat dilihat bahwa ketersediaan pangan pada tahun 2020-2024 mengalami penurunan. Rasio ketersediaan pangan secara otomatis juga sebanding dengan fluktuasi ketersediaan pangan.

Tabel II-23
Rasio Ketersediaan Pangan Utama Kota Pekalongan Tahun 2020-2024

Tahun	Ketersediaan Pangan Utama Per tahun	Jumlah Penduduk	Rasio
2020	4.769.190	307.150	15,53
2021	5.738.290	308.310	18,61
2022	5.179.300	309.742	16,72
2023	4.235.430	317.520	13,34
2024	4.830.960	321.095	15,05

Sumber: Dinperpa Kota Pekalongan, 2025

Sementara itu, PPH di Kota Pekalongan selama lima tahun terakhir (tahun 2020-2024) dapat dilihat dalam Tabel II-24.

Tabel II-24
Skor PPH Kota Pekalongan Tahun 2020-2024

Tahun	Skor PPH Kota Pekalongan
2020	92,01
2021	87,10
2022	81,20
2023	93,70
2024	92,12

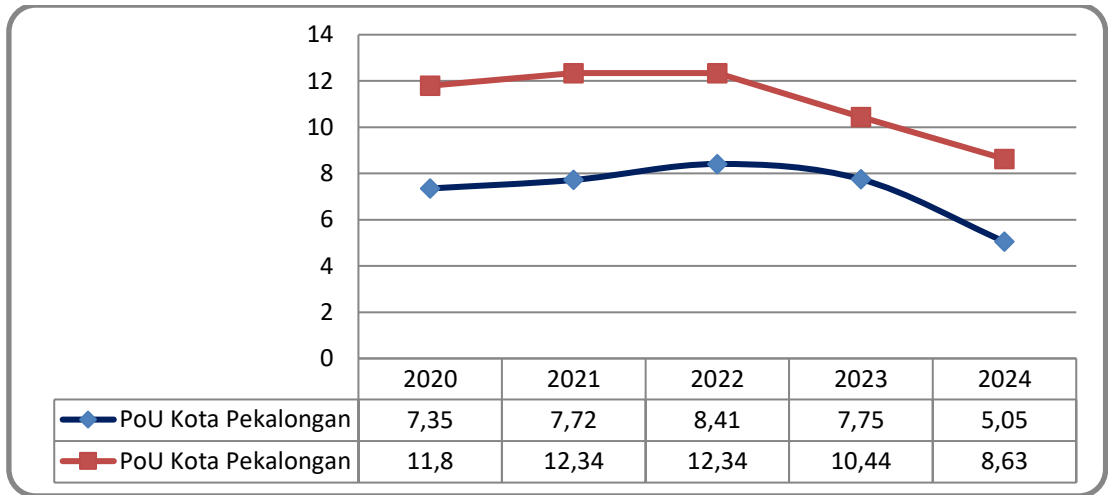
Sumber: Dinperpa Kota Pekalongan, 2025

Upaya yang terus dilakukan untuk meningkatkan skor PPH antara lain dengan: penyediaan dan penyaluran pangan pokok dan pangan lainnya; penyediaan cadangan pangan daerah; penyusunan, pemutakhiran dan analisis peta ketahanan dan kerentanan pangan; meningkatkan ketersediaan pangan segar dan pelaksanaan kegiatan pengawasan keamanan pangan segar. Secara umum Skor PPH Kota Pekalongan masih di bawah Provinsi Jawa Tengah, hal ini disebabkan karena Kota Pekalongan merupakan wilayah perkotaan yang kegiatan utamanya bukan pertanian.

Parameter ketiga yaitu Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (*Prevalence of Undernourishment /PoU*) adalah konsep yang lebih holistik daripada sekedar kekurangan kalori dan mencerminkan aspek ketidakamanan pangan yang mempengaruhi status gizi dan kesehatan masyarakat. Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan secara umum mengacu pada proporsi populasi yang tidak memiliki akses terhadap makanan yang cukup secara kuantitas dan/atau kualitas untuk memenuhi kebutuhan gizi mereka dalam menjalani kehidupan yang sehat dan aktif. Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan mengidentifikasi seberapa banyak penduduk yang mengonsumsi pangan di bawah standar kecukupan energi yang direkomendasikan. Semakin tinggi nilai PoU mengidentifikasi bahwa semakin banyak penduduk yang mengonsumsi pangan tidak ideal secara kandungan nutrisinya, begitu juga sebaliknya semakin menurun nilai PoU berarti bahwa semakin sedikit penduduk yang mengonsumsi pangan tidak ideal secara kandungan nutrisinya.

Kondisi PoU Kota Pekalongan bersifat fluktuatif namun mengalami perbaikan yang ditunjukkan dengan penurunan nilai PoU dari tahun 2020 sebesar 7,35 persen menjadi 5,05

persen di tahun 2024. Hal ini artinya jumlah populasi penduduk yang mengonsumsi pangan di bawah jumlah minimum kebutuhan energi semakin berkurang. Kondisi PoU demikian juga terjadi di Jawa Tengah yaitu mengalami perbaikan cukup signifikan yang ditunjukkan dengan penurunan nilai PoU sebesar 11,8 persen di tahun 2020 dan turun menjadi 8,63 persen di tahun 2024. Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan Kota Pekalongan dan Jawa Tengah dapat terlihat pada tabel di bawah ini:



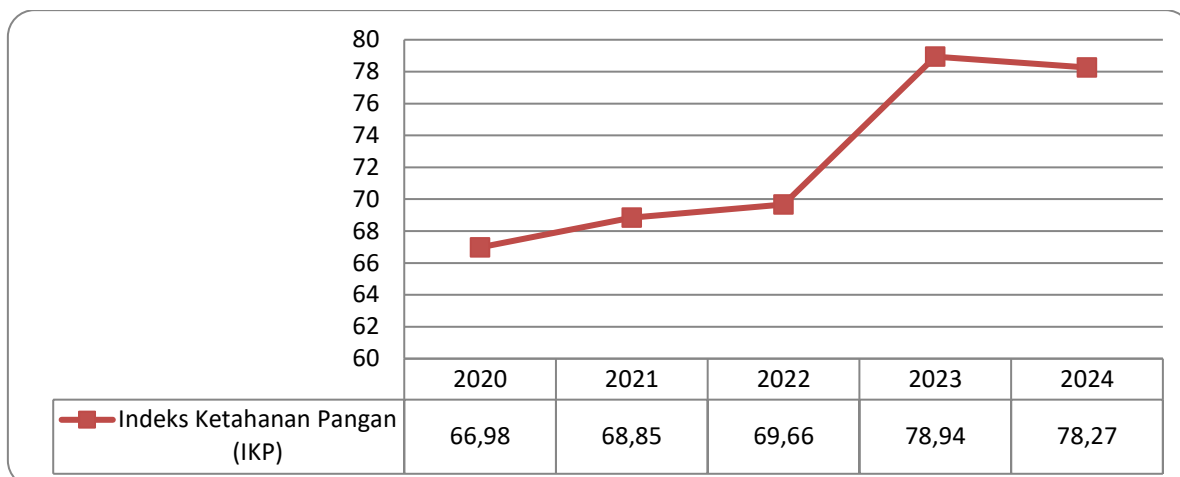
Sumber: Badan Pangan Nasional, 2025

Gambar II-33

Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan Kota Pekalongan Tahun 2020-2024

Prevalensi ketidacukupan konsumsi pangan di Kota Pekalongan menunjukkan tren penurunan yang signifikan dari tahun 2020 hingga 2024. Pada saat dahulu, isu kekurangan gizi terutama pada balita dan kelompok masyarakat rentan menjadi suatu perhatian. Dampaknya terasa pada kualitas sumber daya manusia, kesehatan masyarakat dan potensi pembangunan kota secara keseluruhan. Namun, dengan upaya dari berbagai pihak, program intervensi gizi mulai digalakkan. Puskesmas dan posyandu semakin aktif memantau tumbuh kembang anak, memberikan edukasi gizi kepada ibu hamil dan menyusui serta menyediakan makanan tambahan bergizi bagi keluarga yang membutuhkan. Selain itu juga program-program pemberdayaan masyarakat juga turut berperan penting. Pelatihan keterampilan untuk meningkatkan pendapatan keluarga, sosialisasi mengenai pentingnya diversifikasi pangan lokal secara bertahap meningkatkan akses masyarakat terhadap makanan bergizi. Meskipun demikian, upaya berkelanjutan dan kewaspadaan tetap diperlukan untuk memastikan tren positif ini terus berlanjut dan tidak ada lagi warga yang mengalami kekurangan gizi.

Indeks Ketahanan Pangan (IKP) merupakan indikator yang digunakan untuk menghasilkan nilai komposit kondisi ketahanan pangan di suatu wilayah. Ketahanan pangan Kota Pekalongan dapat ditunjukkan dengan indikator IKP yang dilakukan pengukurannya oleh Badan Ketahanan Pangan Nasional. IKP Kota Pekalongan menunjukkan tren yang positif dari tahun ke tahun sejak tahun 2020 hingga tahun 2024. Pada tahun 2020, IKP Kota Pekalongan sebesar 66,98 dan pada tahun 2024 menjadi 78,27, yang mengindikasikan wilayah dengan tingkat ketahanan pangan kategori baik. Kondisi ketahanan pangan Kota Pekalongan serupa dengan ketahanan pangan Provinsi Jawa Tengah, yaitu menunjukkan tren positif sejak tahun 2020 sebesar 82,31 menjadi 84,80 di tahun 2023. IKP Kota Pekalongan dapat terlihat pada tabel di bawah ini:



Sumber: Badan Pangan Nasional, 2025

Gambar II-34
Indeks Ketahanan Pangan Kota Pekalongan Tahun 2020-2024

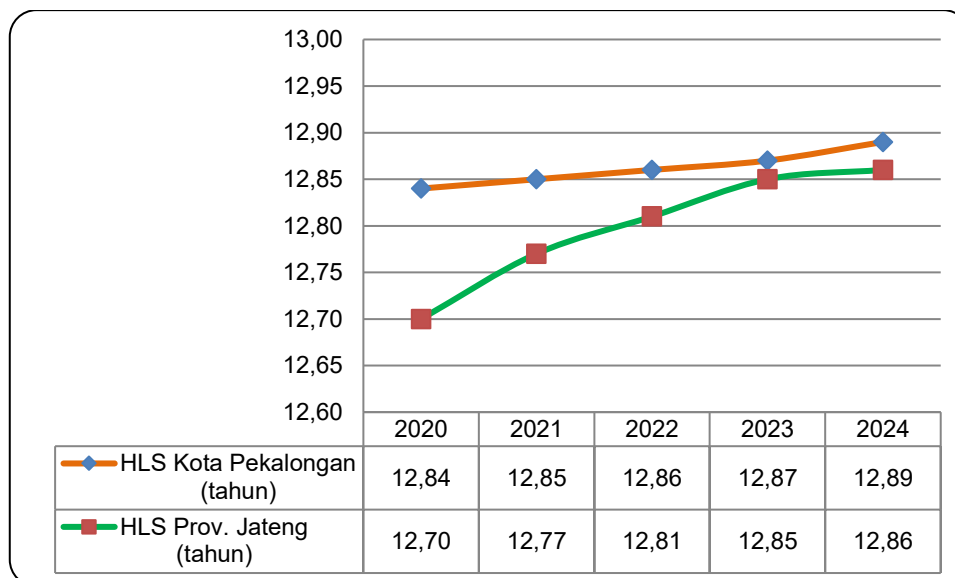
Ketahanan pangan merupakan suatu kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perorangan yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif secara berkelanjutan. Dalam mengetahui tingkat ketahanan pangan suatu wilayah telah dikembangkan suatu sistem penilaian dalam bentuk IKP yang mengacu pada definisi ketahanan pangan dan subsistem yang membentuk sistem ketahanan pangan. Kota Pekalongan termasuk wilayah perkotaan yang menggunakan delapan indikator dari aspek keterjangkauan dan pemanfaatan pangan, mengingat ketersediaan pangan di tingkat perkotaan tidak dipengaruhi oleh produksi yang berasal dari perdagangan antarwilayah.

Nilai ketahanan pangan Kota Pekalongan menunjukkan tren positif berarti bahwa aspek keterjangkauan pangan dan pemanfaatan pangan di Kota Pekalongan dalam kondisi baik. Keterjangkauan pangan diartikan sebagai akses pangan oleh rumah tangga di Kota Pekalongan untuk mendapatkan makanan melalui produksi sendiri, pembelian, maupun bantuan lainnya. Akses pangan tersebut dipengaruhi oleh kemampuan ekonomi rumah tangga, infrastruktur pendukung untuk akses pangan, serta dukungan sosial seperti program jaring pengaman sosial. Pemanfaatan pangan mencakup konsumsi makanan oleh rumah tangga dan kemampuan individu di Kota Pekalongan untuk menyerap nutrisi.

2.2.3. Pendidikan Berkualitas Secara Inklusif

2.2.3.1. Harapan Lama Sekolah (HLS)

HLS Kota Pekalongan meningkat dari 12,84 tahun pada 2020 menjadi 12,89 tahun pada 2024. Sementara itu, HLS Provinsi Jawa Tengah juga mengalami kenaikan yang lebih signifikan dari 12,70 tahun pada 2020 menjadi 12,86 tahun pada 2024. Meskipun terjadi peningkatan di kedua wilayah, Kota Pekalongan secara konsisten memiliki HLS yang lebih tinggi dibandingkan rata-rata Provinsi Jawa Tengah, menandakan bahwa penduduk Kota Pekalongan memiliki ekspektasi pendidikan yang lebih baik. Selengkapnya disajikan pada gambar berikut.



Sumber: www.jateng.bps.go.id, 2025

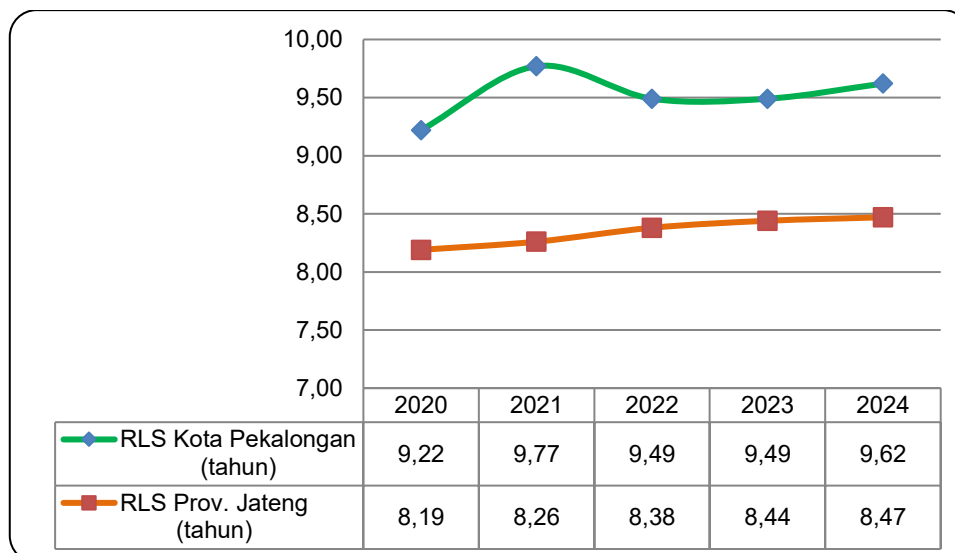
Gambar II-35
Harapan Lama Sekolah di Kota Pekalongan dan Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2020-2024

Pada tahun 2024 angka HLS Kota Pekalongan sebesar 12,89 tahun, peningkatan HLS ini menunjukkan adanya perbaikan dalam aksesibilitas dan kualitas pendidikan di Kota Pekalongan. Hal ini dapat didorong oleh berbagai faktor, seperti program pendidikan gratis, peningkatan fasilitas sekolah, serta kampanye kesadaran akan pentingnya pendidikan bagi masa depan. Namun, meskipun peningkatan ini positif, masih diperlukan upaya lebih lanjut agar HLS dapat mendekati atau mencapai angka 13 tahun, sehingga generasi muda di Kota Pekalongan memiliki kesempatan lebih besar untuk menyelesaikan pendidikan setingkat Diploma atau minimal SMA secara penuh.

2.2.3.2. Angka Rata-Rata Lama Sekolah

Angka rata-rata lama sekolah (RLS) merupakan angka yang menggambarkan lamanya (tahun) masa sekolah yang dialami penduduk usia 15 tahun ke atas. Selama periode tahun 2020 hingga 2024, RLS Kota Pekalongan menunjukkan tren yang relatif stabil dengan capaian yang konsisten lebih tinggi dibandingkan rata-rata Provinsi Jawa Tengah. Pada tahun 2020, RLS Kota Pekalongan tercatat sebesar 9,22 tahun, kemudian meningkat menjadi 9,77 tahun pada tahun 2021 sebagai capaian tertinggi dalam lima tahun terakhir. Meski sempat mengalami sedikit penurunan pada tahun 2022 dan 2023, yaitu di angka 9,49 tahun, angka tersebut kembali mengalami peningkatan pada tahun 2024 menjadi 9,62 tahun.

Selama lima tahun terakhir, selisih RLS antara Kota Pekalongan dan Provinsi Jawa Tengah berkisar antara 1,03 hingga 1,51 tahun, yang mengindikasikan bahwa Kota Pekalongan berada dalam posisi yang relatif lebih baik dalam hal capaian rata-rata lama sekolah. Capaian ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Pekalongan telah berhasil mempertahankan akses dan kualitas pendidikan formal bagi masyarakat. Ke depan, upaya peningkatan RLS tetap menjadi prioritas, khususnya dalam mendorong anak-anak usia sekolah untuk menuntaskan pendidikan menengah serta mengurangi angka putus sekolah. Selengkapnya disajikan pada gambar berikut.



Sumber: www.jateng.bps.go.id, 2025

Gambar II-36

Perbandingan Angka Rata-Rata Lama Sekolah Kota Pekalongan dengan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020-2024

2.2.3.3. Angka Partisipasi Sekolah (APS)

Angka Partisipasi Sekolah (APS) 5-6 tahun menunjukkan proporsi peserta didik usia 5-6 tahun terhadap penduduk kelompok usia 5-6 tahun di suatu wilayah. Berdasarkan Rapor Pendidikan Kemendikbud RI, capaian APS 5-6 Kota Pekalongan dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2024 menunjukkan angka yang fluktuatif. APS 5-6 tahun pada tahun 2021 sebesar 98,23 persen, mengalami penurunan menjadi 91,12 persen pada tahun 2022, kemudian pada tahun 2023 meningkat menjadi 93,57 persen, dan pada tahun 2024 mengalami penurunan menjadi 90,58 persen. Data capaian APS 5-6 tahun selengkapnya disajikan dalam tabel berikut:

Tabel II-25

Angka Partisipasi Sekolah 5-6 Tahun di Kota Pekalongan Tahun 2021-2024

Tahun	APS 5-6 Tahun (persen)
2021	98,23
2022	91,12
2023	93,57
2024	90,58

Sumber: Rapor Pendidikan Kemendikdasmen RI, 2025

Angka Partisipasi Sekolah Jenjang Pendidikan Dasar pada tahun 2020-2024 untuk jenjang pendidikan SD/MI cenderung menurun, dari 103,79 di tahun 2020 menjadi 99,70 di tahun 2024. Sama halnya dengan capaian APS jenjang SMP/MTs dari 103,67 di tahun 2020 menjadi 96,52 di tahun 2024. Dalam perjalanannya, di tahun 2023 dan 2024 capaian APS jenjang SD/MI dan SMP/MTS tidak mencapai target seperti pada tahun-tahun sebelumnya yang selalu di atas 100 persen. Penurunan APS juga terjadi di tahun 2022 jika dibandingkan tahun 2021. Hal ini karena adanya kebijakan zonasi yang mulai diterapkan di tahun ajaran 2018/2019. Selain itu, sebagian besar orang tua menyekolahkan anaknya di usia yang lebih muda daripada ketentuan yang berlaku juga menjadi faktor penurunan target ini.

Perkembangan APS Kota Pekalongan untuk jenjang pendidikan dasar (SD/MI dan SMP/MTs) selama kurun waktu tahun 2020 sampai dengan 2024 disajikan dalam tabel berikut:

Tabel II-26
Angka Partisipasi Sekolah Menurut Jenjang Pendidikan
di Kota Pekalongan Tahun 2020 – 2024

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
APS SD/MI	103,79	101,86	101,74	99,98	99,70
APS SMP/MTs	103,67	102,56	103,29	96,72	96,52

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Pekalongan, 2025

Angka Partisipasi Sekolah Jenjang Usia 5-15 tahun pada jenjang pendidikan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Pekalongan pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 disajikan dalam tabel berikut:

Tabel II-27
Angka Partisipasi Sekolah Jenjang TK-SMP di Kota Pekalongan Tahun 2020 – 2024

Tahun		Jml. Siswa Usia Sekolah TK s.d SMP	Jml. Penduduk Usia 5-15 Tahun	APS (persen)	
2020	L	28.348	29.524	96,02	96,75
	P	27.019	27.703	97,53	
2021	L	29.319	29.610	99,02	101,38
	P	28.911	27.830	103,88	
2022	L	29.567	29.598	99,90	101,96
	P	28.889	27.737	104,15	
2023	L	29.304	29.609	98,97	101,24
	P	28.779	27.763	103,66	
2024	L	29.020	29.690	97,7	97,20
	P	26.852	27.773	96,7	

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Pekalongan, 2025

2.2.3.4. Literasi dan Numerasi

Kemampuan literasi dan numerasi siswa merupakan rata-rata kemampuan literasi dan numerasi siswa berdasarkan asesmen nasional yang dituangkan dalam rapor pendidikan. Dalam asesmen nasional, kemampuan literasi dan numerasi menjadi penilaian dalam Asesmen Kemampuan Minimum (AKM) siswa yang dapat menggambarkan mutu atau kualitas pendidikan, selain hasil atas penilaian Survey Karakter dan Survey Lingkungan Belajar.

Kemampuan literasi membaca dan numerasi di Kota Pekalongan untuk jenjang SD/ sederajat menunjukkan tren yang meningkat dari tahun 2021 sampai dengan 2023 dan mengalami penurunan pada tahun 2024. Literasi membaca untuk SD/ sederajat pada tahun 2021 sebesar 63,20, meningkat menjadi 76,24 pada tahun 2022 dan 82,29 pada tahun 2023, namun mengalami penurunan pada tahun 2024 menjadi 72,80.

Numerasi untuk SD/ sederajat pada tahun 2021 sebesar 36,31, meningkat pada tahun 2022 menjadi 52,62 pada tahun 2022 dan 72,35 pada tahun 2023, dan mengalami penurunan pada tahun 2024 menjadi 71,70. Sedangkan pada jenjang SMP/ sederajat, kemampuan literasi membaca ataupun numerasi dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2024 selalu mengalami kenaikan. Literasi membaca untuk jenjang SMP/ sederajat pada tahun 2021 sebesar 65,38 dan

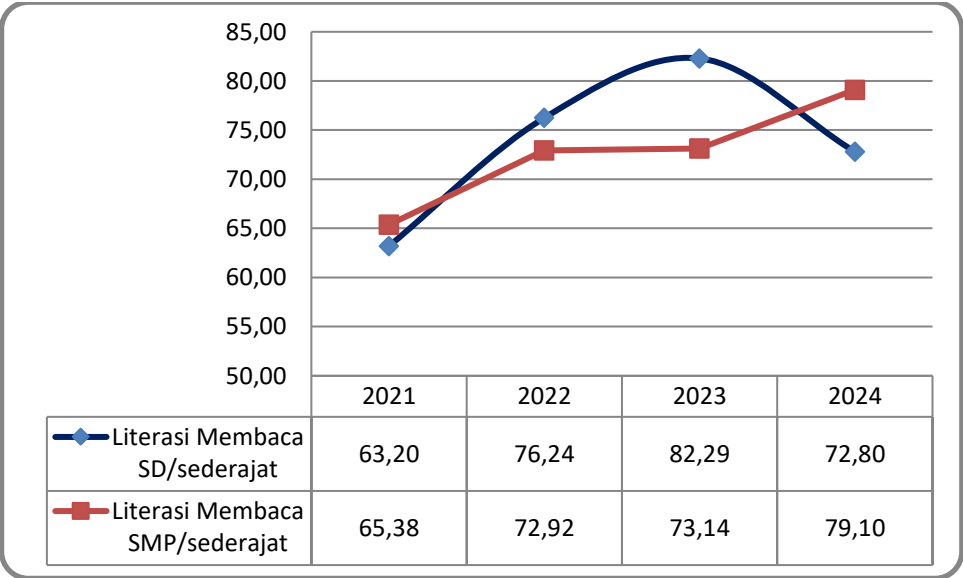
pada tahun 2024 naik menjadi 79,10. Numerasi untuk jenjang SMP/ sederajat pada tahun 2021 sebesar 43,76 dan pada tahun 2024 naik menjadi 76,86. Data selengkapnya tersaji dalam tabel berikut ini.

Tabel II-28
Kemampuan Literasi Membaca dan Numerasi pada Jenjang Pendidikan Dasar di Kota Pekalongan Tahun 2021-2024

Tahun	Kemampuan Literasi Membaca dan Numerasi SD/ Sederajat (persen)		Kemampuan Literasi Membaca dan Numerasi SMP/ Sederajat (persen)	
	Literasi	Numerasi	Literasi	Numerasi
2021	63,20	36,31	65,38	43,76
2022	76,24	52,62	72,92	48,24
2023	82,29	72,35	73,14	68,57
2024	72,80	71,70	79,10	76,86

Sumber: Kemendikdasmen RI, 2025

Literasi Membaca SD dan SMP Sederajat (IUP), Capaian literasi membaca di Kota Pekalongan selama periode 2021 hingga 2024 menunjukkan perkembangan yang cenderung positif, meskipun tidak sepenuhnya konsisten pada semua jenjang. Pada jenjang SD/ sederajat, capaian literasi meningkat signifikan dari 63,20 persen pada tahun 2021 menjadi 76,24 persen di tahun 2022, dan mencapai puncaknya pada tahun 2023 sebesar 82,29 persen. Namun demikian, pada tahun 2024 terjadi penurunan capaian menjadi 72,80 persen, yang mengindikasikan adanya tantangan atau kendala dalam pelaksanaan program literasi di tingkat sekolah dasar. Di sisi lain, capaian literasi membaca jenjang SMP/ sederajat menunjukkan tren yang lebih stabil dan terus meningkat dari tahun ke tahun. Dimulai dari 65,38 persen pada tahun 2021, capaian ini naik menjadi 72,92 persen pada tahun 2022, kemudian sedikit meningkat menjadi 73,14 persen di tahun 2023, dan mencapai angka tertinggi sebesar 79,10 persen di tahun 2024.

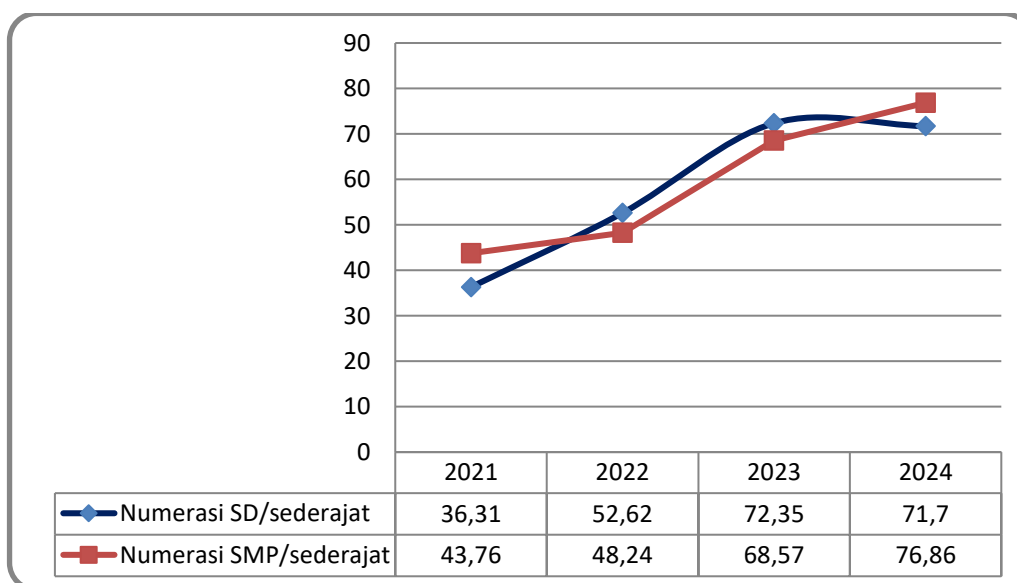


Sumber: Kemendikdasmen RI, 2025

Gambar II-37
Literasi Membaca SD dan SMP di Kota Pekalongan Tahun 2021-2024

Perbedaan pola capaian ini mengindikasikan bahwa pelaksanaan program literasi di tingkat SMP lebih konsisten dan berhasil, baik dari segi metode pembelajaran, ketersediaan bahan bacaan, maupun peran aktif tenaga pendidik. Sebaliknya, penurunan capaian di jenjang SD pada tahun terakhir menjadi catatan penting bagi pemerintah daerah untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap intervensi yang telah dilakukan. Diperlukan strategi yang lebih menyeluruh dan berkelanjutan, termasuk peningkatan kapasitas guru, penyediaan sarana pendukung literasi, serta pelibatan orang tua dan komunitas sekolah dalam membangun budaya membaca sejak dini. Pemantauan dan evaluasi rutin juga menjadi kunci untuk memastikan capaian literasi membaca terus meningkat dan merata di semua jenjang pendidikan.

Numerasi SD dan SMP / Sederajat (IUP), Capaian numerasi siswa SD dan SMP di Kota Pekalongan dari tahun 2021 hingga 2024 menunjukkan tren peningkatan yang cukup signifikan. Pada jenjang SD/ sederajat, capaian numerasi meningkat dari 36,31 persen pada tahun 2021 menjadi 52,62 persen pada 2022. Peningkatan yang lebih tajam terjadi di tahun berikutnya, yakni mencapai 72,35 persen di tahun 2023, meskipun kemudian sedikit menurun menjadi 71,70 persen pada tahun 2024. Sementara itu, pada jenjang SMP/ sederajat, capaian numerasi juga mengalami kemajuan yang stabil. Dimulai dari 43,76 persen pada tahun 2021, naik menjadi 48,24 persen pada 2022, kemudian melonjak ke angka 68,57 persen di tahun 2023, dan mencapai 76,86 persen di tahun 2024. Tren ini mencerminkan adanya peningkatan efektivitas pembelajaran numerasi di sekolah-sekolah Kota Pekalongan, baik di tingkat dasar maupun menengah pertama.



Sumber: Kemendikdasmen RI, 2025

Gambar II-38
Numerasi SD / Sederajat di Kota Pekalongan Tahun 2020-2024

2.2.4. Pemajuan Kebudayaan dan Pendidikan Karakter

2.2.4.1. Implementasi Pendidikan Keagamaan dan Pendidikan Karakter

Persentase implementasi pendidikan keagamaan dan pendidikan karakter di Kota Pekalongan diukur berdasarkan rata-rata persentase implementasi pendidikan keagamaan dan implementasi pendidikan karakter. Pendidikan keagamaan di Kota Pekalongan telah diimplementasikan di seluruh jenjang mulai usia dini sampai dengan pendidikan dasar (PAUD, SD dan SMP). Pelaksanaan pendidikan keagamaan dan pendidikan karakter di Kota Pekalongan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel II-29
Implementasi Pendidikan Keagamaan dan Pendidikan Karakter
di Kota Pekalongan Tahun 2020-2024

Tahun	Sekolah yang mengimplementasi pendidikan keagamaan		Sekolah yang mengimplementasi pendidikan karakter		Rata-rata
	Jumlah	Persen	Jumlah	Persen	
2020	294	100	294	100	100
2021	296	100	296	100	100
2022	300	100	300	100	100
2023	304	100	304	100	100
2024	305	100	305	100	100

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Pekalongan, 2025

Persentase satuan pendidikan yang mempunyai guru mengajar mulok bahasa daerah / seni budaya dan mengarusutamakan kebudayaan di Kota Pekalongan dari tahun 2020 hingga tahun 2024 cenderung mengalami penurunan. Persentase pada tahun 2020 sebesar 7,53 persen, meningkat menjadi 8,44 persen pada tahun 2021 dan mengalami penurunan terus hingga tahun 2024 menjadi 6,06 persen. Penurunan ini disebabkan jumlah guru yang mengajar mulok bahasa daerah / seni budaya dan mengarusutamakan kebudayaan di Kota Pekalongan semakin berkurang karena guru tersebut pensiun ataupun meninggal dunia, sementara jumlah penambahan guru baru tidak seimbang dengan jumlah pengurangan yang terjadi. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel II-30
Persentase Satuan Pendidikan yang Mempunyai Guru Mengajar
Mulok Bahasa Daerah / Seni Budaya dan Mengarusutamakan Kebudayaan
di Kota Pekalongan Tahun 2020-2024

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Satuan Pendidikan yang mempunyai guru mengajar mulok bahasa daerah/seni budaya dan mengarusutamakan kebudayaan (persen)	7,53	8,44	6,95	6,63	6,06

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Pekalongan, 2025

2.2.4.2. Kebudayaan

Pembangunan kebudayaan pada hakekatnya diarahkan pada upaya untuk mewujudkan ketahanan budaya. Ketahanan budaya sangat diperlukan, mengingat semakin pesatnya arus globalisasi akan membawa konsekuensi terjadinya ekspansi seni dan budaya global yang dapat mempengaruhi kelestarian budaya daerah, yang pada akhirnya akan berimplikasi kepada budaya nasional.

Guna mewujudkan ketahanan budaya, dalam kurun waktu tahun 2020-2024 telah dilaksanakan berbagai kegiatan seni dan budaya. Meskipun jumlah sarana penyelenggaraan seni dan budaya cenderung tetap, tetapi jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya justru semakin meningkat dan stabil mulai tahun 2022; Semula berjumlah 2 *event* pada tahun 2020, menjadi 4 *event* di tahun 2021 dan meningkat menjadi 9 event seni dan budaya di tahun 2022 - 2024. Hal ini menunjukkan keberhasilan penguatan seni dan budaya serta minat masyarakat terhadap penyelenggaraan *event* tersebut. *Event* yang diselenggarakan di tahun

2024 antara lain Festival Imlek Pintu Dalem, Kirab Ritual Budaya, Sadranan, Syawalan, Hari Wayang, Bubur Suro, Karnaval Batik, Kauman Batik *Art Fest*, dan Pesindon Batik *Vibes*.

Selain seni dan budaya, hal lain yang patut menjadi perhatian adalah pengelolaan cagar budaya. Inventarisasi yang dilakukan pada tahun 2017, tercatat sebanyak 282 Obyek yang Diduga Cagar Budaya (ODCB) milik pemerintah daerah, BUMN maupun milik masyarakat. Namun, jumlah ini mengalami penurunan tajam karena banyak diantara bangunan tersebut yang mengalami perubahan fisik secara signifikan, atau pemilik bangunan tidak bersedia untuk ditetapkan sebagai cagar budaya di kemudian hari. Hal ini, menjadikan bangunan tersebut tidak dapat dikategorikan lagi sebagai ODCB. Pada tahun 2024, dilakukan inventarisasi ulang yang melibatkan pihak akademisi. Dari jumlah 282 obyek, yang mempunyai potensi untuk diteruskan menjadi cagar budaya hanya sebanyak 100 obyek, melalui proses penetapan dengan rekomendasi dari Tim Ahli Cagar Budaya (TACB). Dengan telah dibentuknya TACB di Kota Pekalongan pada tahun 2019, Pemerintah Kota Pekalongan sampai dengan tahun 2024 telah menetapkan sebanyak 15 OCB yang ditetapkan melalui Surat keputusan Wali Kota Pekalongan. Pemerintah Kota Pekalongan terus memberikan kontribusi positif dengan melakukan identifikasi dan upaya pelestarian cagar budaya, seperti disajikan dalam Tabel II-31 berikut.

Tabel II-31
Penyelenggaraan Even Seni Budaya dan Pelestarian Cagar Budaya Kota Pekalongan Tahun 2020-2024

Uraian	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya	2	4	9	9	9
Jumlah Sarana penyelenggaraan seni dan budaya	4	4	4	4	4
Jumlah Benda, Bangunan, Struktur, Situs dan Kawasan Obyek Diduga Cagar Budaya yang tercatat	282	282	282	282	282

Sumber: Dinparbudpora Kota Pekalongan, 2025

Kota Pekalongan merupakan kota dengan tiga corak kebudayaan, yaitu budaya maritim, budaya agraris, dan budaya perniagaan. Banyaknya kebudayaan yang ada di Kota Pekalongan dapat dilihat dari jumlah data Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK) yang ada di Kota Pekalongan sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel II-32
Jenis Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK) di Kota Pekalongan

Jenis OPK	Jumlah	Keterangan
Manuskrip	2	Kitab Ramal di Klenteng Po An Thian, Kamus Kuno di Masjid Jami Kauman Pekalongan
Tradisi Lisan	5	Cerita Mitos Dewi Lanjar, Cerita Mitos Kebo Ndanu, Cerita Rakyat Sulasih Sulandono, Cerita Rakyat Ki Bahurekso, dan Cerita Asal Usul Kelurahan
Adat Istiadat	5	Terkait ritual daur hidup manusia: Adat perkawinan, Siklus kelahiran, Siklus dewasa, Ritual kematian dan Prosesi membangun rumah tinggal/ ngedekke omah
Ritus	10	Ritus yang masih sering dilakukan dan lestari di Kota Pekalongan : Syawalan Krapyak, Sya'banan Krapyak, Megengan, sehari sebelum puasa, Rabu Pungkasan, Khoul Habib Ahmad Sapuro, Nyadran Laut, Pek Chun, Perayaan Cap Go Meh, Kirab Panjang Jimat, dan Perayaan Bulan Muharram

Jenis OPK	Jumlah	Keterangan
Pengetahuan Tradisional	3	- Pembuatan batik mulai dari pemilihan kain, proses pengerjaan hingga pewarnaan. - Pembuatan jamu oleh BP. Saintifikasi Jamu - Pembuatan Tauco oleh orang Tionghua.
Teknologi Tradisional	2	- Pembuatan kapal kayu di galangan kapal Degayu - Tenun dengan metode ATBM (Alat Tenun Bukan Mesin) di sentra Kampung Tenun Medono.
Seni	4	Berdasarkan genre komunitas, membagi seni menjadi : seni musik, seni tari, seni pertunjukan, dan seni rupa
Bahasa	1	Bahasa Jawa Ngoko Dialek Pekalongan
Permainan Rakyat	5	Yang masih relatif masih dimainkan yakni : Egrang, Layangan, Bekelan, Jengklek, dan Gobak Sodor

Sumber: Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Kota Pekalongan, 2025.

Terdapat 10 (sepuluh) jenis OPK yang dilestarikan oleh masyarakat dan pemerintah daerah. Pada tahun 2020-2023 banyaknya jenis OPK yang dilestarikan mengacu pada Dokumen Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Kota Pekalongan Tahun 2018. Kemudian pada tahun 2024, dimutakhirkan kembali menyesuaikan kondisi yang ada yang tercantum dalam Dokumen Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Kota Pekalongan Tahun 2024-2025. Pemutakhiran PPKD wajib dilakukan oleh Pemerintah Daerah minimal setiap 5 tahun sekali.

Pemerintah Kota Pekalongan bersama masyarakat berupaya melestarikan semua seni budaya yang ada dengan cara melakukan pembinaan, fasilitasi dan penyelenggaraan event seni budaya. Pada tahun 2020 dikelompokkan terdapat 17 macam seni budaya, namun mengalami penurunan pada tahun 2021 menjadi 12 macam seni budaya dikarenakan selama masa pandemi banyak even seni budaya yang tidak diselenggarakan dan kembali meningkat pada tahun 2022, 2023 dan 2024 sebanyak 19 jenis kesenian. Data selengkapnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel II-33
Seni Budaya di Kota Pekalongan Tahun 2020-2024

No	Seni Budaya	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
1	Band			V	V	V
2	Barongan			V	V	V
3	Dekorasi	V	V			
4	Gendukan			V	V	V
5	Kerajinan	V		V	V	V
6	Ketoprak			V	V	V
7	Komunitas Musik Rakyat	V	V			
8	Kuntulan			V	V	V
9	Musik Keroncong	V	V	V	V	V
10	Orkes Melayu (Dangdut)	V	V	V	V	V
11	Perfilman	V	V			
12	Rampak			V	V	V
13	Reklame	V				
14	Reog			V	V	V
15	Samroh	V		V	V	V
16	Sanggar Teater	V	V			
17	Sastra	V	V			

No	Seni Budaya	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
18	Seni Karawitan	V	V	V	V	V
19	Seni Lukis	V	V	V	V	V
20	Seni Musik	V	V			
21	Seni Rakyat	V	V			
22	Seni Tari	V	V	V	V	V
23	Seni Teater			V	V	V
24	Simtuduror	V		V	V	V
25	Sintren			V	V	V
26	Terbang/Genjring/Jawan	V		V	V	V
27	Wayang			V	V	V
Jumlah		17	12	19	19	19

Sumber: Dinparbudpora Kota Pekalongan, 2025

Perkembangan jumlah kelompok kesenian di Kota Pekalongan sebagaimana disajikan dalam Tabel II-34 menunjukkan angka yang fluktuatif. Pada tahun 2020 terdapat 162 kelompok kesenian. Namun di tahun 2021 mengalami peningkatan mencapai hampir dua kali lipatnya menjadi 232 kelompok, tetapi kembali mengalami penurunan yang sangat signifikan di tahun 2022 menjadi 144 kelompok dan kembali menurun pada tahun 2023 sejumlah 128 kelompok kesenian. Jumlah kembali bertambah pada tahun 2024 sejumlah 130 kelompok kesenian. Sementara itu gedung kesenian jumlahnya tetap yaitu 4, meliputi Warung Apresiasi, GOR Jetayu, Sanggar Laras Wisata, dan Sanggar Cahyo Kedaton.

Tabel II-34
Perkembangan Jumlah Kelompok Kesenian dan Gedung Kesenian
Kota Pekalongan Tahun 2020-2024

Uraian	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Kelompok Kesenian	162	100	144	128	130
Jumlah Gedung Kesenian	4	4	4	4	4
Persentase Sarana Budaya per Jumlah Kelompok (persen)	2,47	4,00	2,78	3,12	3,08

Sumber: Dinparbudpora Kota Pekalongan, 2025

Jumlah kelompok kesenian yang dapat difasilitasi dan disediakan sarana masih sangat terbatas. Hal ini dikarenakan jumlah kelompok seni budaya yang jumlahnya cenderung bertambah sedangkan ketersediaan sarana yang diberikan terbatas.

Persentase Kelompok Kesenian yang Aktif Terlibat/Mengadakan Pertunjukan Kesenian dalam Satu Tahun Terakhir, Kebudayaan merupakan suatu kesatuan utuh yang mencakup seluruh gagasan, nilai-nilai, norma, perilaku, adat istiadat, serta karya cipta manusia yang diwariskan dari generasi ke generasi. Kebudayaan tidak hanya berperan sebagai identitas daerah, tetapi juga berfungsi sebagai pedoman hidup yang dapat membentuk kepribadian serta menuntun kehidupan manusia agar menjadi lebih bermartabat, beradab, dan memiliki arah yang jelas. Dalam konteks pembangunan daerah, pembangunan kebudayaan menjadi salah satu aspek penting yang tidak dapat dipisahkan dari dinamika globalisasi dan kemajuan zaman. Di era globalisasi seperti sekarang ini, berbagai budaya baru dari luar dengan mudah masuk dan memengaruhi kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, pembangunan kebudayaan harus mampu menyesuaikan diri dengan pengaruh budaya global

tersebut, namun tetap menjaga dan memperkuat identitas nasional yang sarat dengan nilai-nilai luhur sesuai dengan falsafah Pancasila sebagai dasar negara.

Kota Pekalongan, yang dikenal sebagai salah satu kota pesisir di wilayah utara Pulau Jawa, juga menerapkan prinsip serupa dalam proses pembangunannya. Pemerintah daerah dan masyarakat Kota Pekalongan memandang bahwa unsur-unsur budaya dan warisan kebudayaan lokal memiliki potensi besar untuk dijadikan sebagai modal dasar dalam mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan. Salah satu wujud nyata dari kebudayaan tersebut adalah kesenian. Kesenian tidak hanya menjadi sarana hiburan atau ekspresi kreatif, tetapi juga sebagai cerminan dari nilai-nilai, sejarah, dan keragaman budaya masyarakat setempat.

Di Kota Pekalongan, perkembangan kesenian sangat dipengaruhi oleh berbagai latar belakang budaya yang membentuk identitas kota. Pengaruh budaya Jawa sebagai budaya lokal, kemudian berpadu dengan unsur budaya Arab, Tionghoa, serta budaya pesisir lainnya, menciptakan ragam kesenian yang unik dan khas. Berikut disajikan data persentase Kelompok Kesenian yang aktif terlibat/mengadakan pertunjukan kesenian di Kota Pekalongan pada tahun 2020-2024.

Tabel II-35
Persentase Kelompok Kesenian yang Aktif Terlibat/Mengadakan Pertunjukan Kesenian dalam Satu Tahun Terakhir Kota Pekalongan Tahun 2020-2024

Uraian	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah kelompok kesenian yang aktif	162	100	144	128	130
Jumlah kelompok kesenian yang tercatat	232	232	144	144	144
Persentase Kelompok Kesenian yang Aktif (persen)	70	43	100	89	90

Sumber: Dinparbudpora Kota Pekalongan, 2025

Berdasarkan data di atas, terlihat bahwa persentase kelompok kesenian yang aktif terlibat atau mengadakan pertunjukan di Kota Pekalongan mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. Pada tahun 2020, persentasenya tercatat sebesar 70 persen. Namun, pada tahun 2021 terjadi penurunan cukup tajam menjadi 43 persen, yang disebabkan oleh dampak pandemi *Covid-19*, di mana banyak kelompok kesenian yang tidak beroperasi. Memasuki tahun 2022, terjadi lonjakan signifikan dengan persentase mencapai 100 persen, menunjukkan bahwa seluruh kelompok kesenian yang tercatat kembali aktif dan terlibat dalam berbagai pertunjukan. Pada tahun 2023, angka tersebut sedikit menurun menjadi 89 persen, sebelum akhirnya naik kembali sebesar 1 persen pada tahun 2024, sehingga mencapai 90 persen.

Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang dilestarikan. Cagar Budaya (CB) adalah warisan budaya yang bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan / atau kebudayaan melalui proses penetapan. Objek yang ditetapkan sebagai Cagar Budaya harus memenuhi kriteria tertentu, memiliki makna budaya yang kuat, serta dianggap perlu dilestarikan karena berkontribusi terhadap jati diri suatu daerah.

Pelestarian Cagar Budaya dilakukan melalui kegiatan perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan, dengan tujuan menjaga keaslian, keutuhan, dan keberlanjutannya. Upaya

ini bisa berupa pemugaran bangunan bersejarah, perawatan benda pusaka, serta penyuluhan kepada masyarakat mengenai pentingnya menjaga warisan budaya tersebut.

Pelestarian baik CB maupun WBTB penting dilakukan secara berkelanjutan untuk menjaga identitas budaya lokal dan memperkuat warisan nasional di tengah arus globalisasi yang terus berkembang. Berikut data persentase CB dan WBTB yang dilestarikan di Kota Pekalongan pada tahun 2020-2024:

Tabel II-36
Persentase Cagar Budaya yang Dilestarikan Kota Pekalongan
Tahun 2020-2024

Uraian	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Cagar Budaya yang dilestarikan	2	2	3	3	4
Jumlah Cagar Budaya yang tercatat	100	100	100	100	100
Persentase Cagar Budaya yang Dilestarikan (persen)	2	2	3	3	4

Sumber: Dinparbudpora Kota Pekalongan, 2025

Berdasarkan data di atas, dapat diketahui bahwa persentase CB yang berhasil dilestarikan di Kota Pekalongan mengalami peningkatan dari tahun ke tahun selama periode 2020-2024. Peningkatan ini menunjukkan adanya komitmen yang semakin kuat dari pemerintah daerah maupun masyarakat dalam upaya pelestarian warisan budaya yang memiliki nilai sejarah.

Pada tahun 2020, persentase CB yang dilestarikan mencapai 2 persen. Pada tahun 2021 terjadi peningkatan menjadi 5 persen. Tren positif ini berlanjut, di mana pada tahun 2022 persentasenya meningkat menjadi 8 persen, lalu naik kembali menjadi 11 persen pada tahun 2023, dan mencapai 15 persen pada tahun 2024. Kenaikan ini mencerminkan peningkatan kesadaran akan pentingnya menjaga situs, bangunan, dan benda bersejarah yang menjadi bagian dari identitas budaya Kota Pekalongan.

Tabel II-37
Persentase Warisan Budaya Tak Benda yang Dilestarikan
Kota Pekalongan Tahun 2020-2024

Uraian	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Warisan Budaya Tak Benda yang dilestarikan	0	0	0	0	0
Jumlah Warisan Budaya Tak Benda yang tercatat	10	10	10	10	10
Persentase Warisan Budaya Tak Benda yang Dilestarikan (persen)	0	0	0	0	0

Sumber: Dinparbudpora Kota Pekalongan, 2025

Berdasarkan data di atas, dapat diketahui bahwa hingga tahun 2024 belum ada satu pun Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) dari Kota Pekalongan yang berhasil dilestarikan secara resmi melalui proses penetapan di kancah nasional, meskipun tercatat terdapat sepuluh

unsur obyek pemajuan kebudayaan yang berpotensi memperoleh penetapan dari pemerintah pusat.

Salah satu faktor utama yang menyebabkan belum memperoleh penetapan WBTB tersebut adalah karena proses pengajuan dan penetapan WBTB yang memakan waktu yang panjang dan bersaing dengan daerah lain. Di samping itu, proses penetapan WBTB juga membutuhkan dukungan anggaran yang tidak sedikit, serta upaya aksi nyata dari pemerintah daerah adalah salah satu faktor keberhasilan penetapan WBTB. Sehingga diperlukan persiapan yang matang dan upaya yang berkelanjutan dari berbagai pihak, termasuk komunitas budaya, akademisi, dan masyarakat umum, agar proses pelestarian WBTB di Kota Pekalongan dapat berjalan secara efektif dan menghasilkan pengakuan resmi terhadap kekayaan budaya tak benda yang dimiliki.

Jumlah Pengunjung Tempat Bersejarah. Tempat bersejarah merupakan aset yang sangat penting bagi suatu daerah karena selain memiliki nilai sejarah yang tinggi, tempat-tempat tersebut juga berperan sebagai cerminan dari identitas dan kekayaan budaya lokal yang telah diwariskan secara turun-temurun. Salah satu tempat bersejarah yang ada di Kota Pekalongan adalah Museum Batik Pekalongan. Museum ini diresmikan pada tanggal 12 Juli 2006 dan sejak saat itu telah menjadi salah satu ikon kebudayaan Kota Pekalongan.

Pendirian Museum Batik tidak dapat dipisahkan dari peran serta masyarakat, khususnya mereka yang tergabung dalam berbagai komunitas pecinta dan pelestari batik, baik yang berasal dari Pekalongan sendiri maupun dari wilayah-wilayah lain di Indonesia. Keterlibatan komunitas ini menunjukkan adanya kepedulian dan komitmen kuat untuk melestarikan warisan budaya batik sebagai bagian tak terpisahkan dari identitas bangsa. Museum Batik Pekalongan tidak hanya dikunjungi oleh Wisatawan Nusantara, tetapi juga Wisatawan Mancanegara. Berikut ini disajikan data jumlah pengunjung Museum Batik Pekalongan selama periode tahun 2020-2024:

Tabel II-38
Jumlah Pengunjung Museum Batik Nasional Kota Pekalongan
Tahun 2020-2024

Uraian	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Wisatawan Mancanegara	138	1	85	236	327
Wisatawan Nusantara	9.982	6.193	24.592	40.697	44.205
Total	10.120	6.194	24.677	40.933	44.532

Sumber: Dinparbudpora Kota Pekalongan, 2025

Berdasarkan data di atas, dapat disimpulkan bahwa jumlah pengunjung Museum Batik Pekalongan mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. Pada tahun 2020, jumlah total pengunjung tercatat sebanyak 9.982 orang. Namun, pada tahun berikutnya, yaitu tahun 2021, jumlah pengunjung menurun drastis menjadi hanya 6.193 orang. Penurunan signifikan ini disebabkan oleh situasi pandemi *Covid-19* yang saat itu masih berlangsung, di mana pemerintah menerapkan berbagai kebijakan pembatasan sosial, termasuk pembatasan jumlah pengunjung di tempat-tempat umum seperti museum, demi menjaga kesehatan dan keselamatan masyarakat. Dampak dari kebijakan tersebut sangat terasa terhadap tingkat kunjungan wisatawan ke Museum Batik.

Meskipun demikian, mulai tahun 2022 hingga tahun 2024, terlihat adanya tren peningkatan jumlah pengunjung secara bertahap yaitu secara berturut-turut sebanyak 24.592 orang, 40.697 orang, dan 44.205. Hal ini disebabkan oleh membaiknya situasi pandemi,

dilonggarkannya pembatasan kegiatan masyarakat, serta meningkatnya minat masyarakat dan wisatawan untuk kembali mengunjungi destinasi budaya seperti museum. Peningkatan ini juga mencerminkan kembalinya semangat masyarakat untuk mengenal, menghargai, dan melestarikan warisan budaya bangsa melalui kunjungan ke tempat-tempat bersejarah.

Tingkat partisipasi Masyarakat dalam pelestarian budaya lokal. Pelestarian budaya lokal merupakan tanggung jawab bersama yang tidak hanya dibebankan kepada pemerintah, tetapi juga memerlukan keterlibatan aktif dari seluruh lapisan masyarakat. Budaya lokal adalah identitas dan warisan berharga yang mencerminkan nilai, norma, serta tradisi yang tumbuh dan berkembang dalam suatu komunitas. Oleh karena itu, partisipasi masyarakat menjadi elemen penting dalam menjaga kelangsungan budaya tersebut agar tidak tergerus oleh arus globalisasi dan modernisasi.

Di berbagai daerah, masyarakat menunjukkan partisipasi mereka melalui beragam cara, seperti menghidupkan kembali tradisi-tradisi lama, mendukung dan mengikuti kegiatan kesenian lokal, hingga membentuk komunitas-komunitas budaya yang berfokus pada pelestarian adat, bahasa daerah, maupun kerajinan tradisional. Di Kota Pekalongan, masyarakat turut serta dalam pelestarian budaya lokal melalui keterlibatan aktif dalam kegiatan seni seperti pertunjukan batik, kesenian musik dan tari tradisional, serta upacara adat yang terus dilestarikan secara turun-temurun.

Dengan adanya kesadaran dan peran aktif dari masyarakat, pelestarian budaya lokal tidak hanya sekadar menjadi program seremonial, tetapi benar-benar menjadi gerakan bersama yang hidup dalam keseharian. Dukungan masyarakat ini sangat penting untuk memastikan bahwa kekayaan budaya lokal dapat terus dinikmati, dipelajari, dan diwariskan kepada generasi mendatang. Berikut data tingkat partisipasi masyarakat dalam pelestarian budaya lokal di Kota Pekalongan Tahun 2020-2024:

Tabel II-39
Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pelestarian Budaya Lokal
Kota Pekalongan Tahun 2020-2024

Tahun	Event Budaya	Jumlah Masyarakat yang berpartisipasi	Jumlah penduduk Kota Pekalongan	Tingkat Partisipasi Masyarakat (persen)
2020	Pembuatan Video dan Pembuatan Tarian	400	307.097	0,13
2021	Sadranan, Lomba Kesenian, Pekan Seni, Pelatihan Seni	1050	316.119	0,33
2022	Festival Jl. Belimbing, Sadranan, Pekcun, Syawalan, Hari Wayang, Bubur Suro, Karnaval Batik, Kauman Fest, Pesindon Fest	30.000	316.798	9,47
2023	Festival Imlek Pintu dalam, Kirab Ritual Budaya, Sadranan, Syawalan, Hari Wayang, Bubur Suro, Karnaval Batik, KBAF, Pesindon Batik Vibes	31.600	316.798	9,97
2024	Festival Imlek Pintu dalam, Kirab Ritual Budaya, Sadranan, Syawalan, Hari Wayang, Bubur Suro, Karnaval Batik, KBAF, Pesindon Batik Vibes	32.000	317.535	10,06

Sumber: Dinparbudpora Kota Pekalongan, 2025

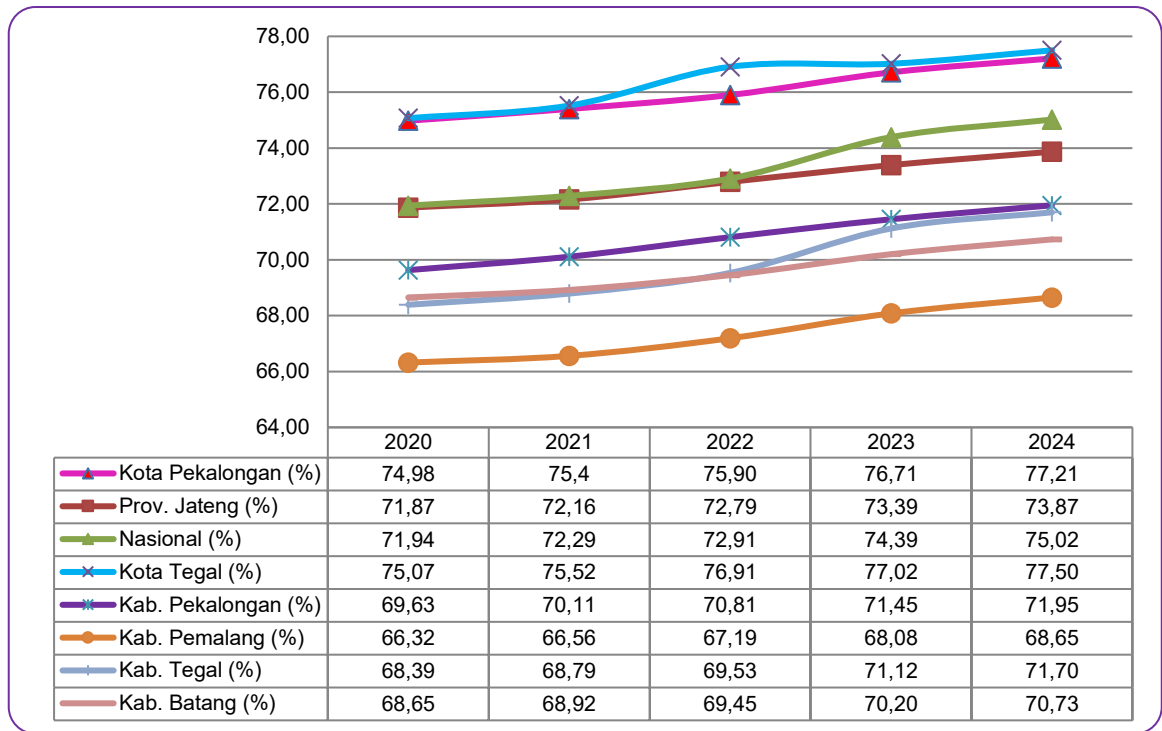
Berdasarkan data di atas, diketahui bahwa tingkat partisipasi masyarakat dalam pelestarian budaya lokal di Kota Pekalongan mengalami peningkatan setiap tahunnya selama

periode 2020 hingga 2024. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat semakin antusias dan peduli terhadap pelestarian budaya daerah. Adapun persentase partisipasi masyarakat tercatat sebesar 0,13 persen pada tahun 2020, naik menjadi 0,33 persen di tahun 2021, kemudian melonjak menjadi 9,47 persen pada 2022, 9,97 persen pada 2023, dan sedikit meningkat lagi menjadi 10,06 persen pada tahun 2024. Peningkatan ini mencerminkan tumbuhnya kesadaran masyarakat dalam menjaga warisan budaya lokal.

2.3. ASPEK DAYA SAING DAERAH

2.3.1. Daya Saing Sumber Daya Manusia

Daya saing sumber daya manusia ditunjukkan dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM merupakan salah satu indikator kinerja pembangunan untuk mengukur 3 (tiga) dimensi pokok pembangunan manusia yang mencerminkan status kemampuan dasar penduduk, yaitu Angka Harapan Hidup saat lahir, capaian tingkat pendidikan yang terdiri dari Angka Rata-Rata Lama Sekolah dan Angka Harapan Lama Sekolah serta pengeluaran per kapita per tahun yang disesuaikan guna mengukur akses terhadap sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai standar hidup yang layak.



Sumber: www.jateng.bps.go.id dan www.bps.go.id (diolah), 2025

Gambar II-39
Perbandingan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Pekalongan dengan Daerah Sekitar Tahun 2020-2024

IPM Kota Pekalongan menunjukkan tren peningkatan yang konsisten selama periode 2020-2024. Pada 2020, IPM Kota Pekalongan berada di angka 74,98 dan terus meningkat hingga mencapai 77,21 pada 2024. Angka ini lebih tinggi dibandingkan rata-rata Provinsi Jawa Tengah dan nasional, yang masing-masing mencatat angka 73,87 dan 75,02 pada 2024. Jika dibandingkan dengan daerah sekitar, Kota Pekalongan juga memiliki IPM yang lebih unggul dibandingkan Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Batang, dan Kabupaten. IPM Kota Tegal memiliki capaian yang lebih tinggi dibandingkan IPM Kota Pekalongan. Jika dibandingkan kota-kota lainnya di Jawa Tengah maka IPM Kota Pekalongan

memiliki nilai yang paling rendah. Menjadi tantangan pembangunan ke depan agar IPM Kota Pekalongan dapat meningkat dan tidak tertinggal dibandingkan kota lainnya di Jawa Tengah.

Peningkatan IPM ini mencerminkan keberhasilan berbagai program pembangunan di bidang pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan ekonomi masyarakat di Kota Pekalongan. Dukungan dari pemerintah daerah dalam peningkatan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan, serta pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkontribusi pada pencapaian ini. Namun, untuk terus meningkatkan kualitas hidup masyarakat, diperlukan upaya berkelanjutan dalam pemerataan akses terhadap layanan dasar, peningkatan daya saing tenaga kerja, serta penguatan sektor ekonomi kreatif dan industri lokal agar IPM Kota Pekalongan dapat terus mengalami pertumbuhan yang lebih signifikan di masa mendatang. Secara lengkap, komponen IPM Kota Pekalongan Tahun 2020-2024 disajikan dalam Tabel II-40 berikut.

Tabel II-40
Komponen IPM Kota Pekalongan Tahun 2020-2024

Tahun	Rata-rata Lama Sekolah (tahun)	Harapan Lama Sekolah (tahun)	Usia Harapan Hidup (tahun)	Pengeluaran per Kapita per tahun (Rp. 000)	IPM
2020	8,96	12,84	74,38	12.467,00	74,98
2021	9,18	12,85	74,44	12.598,00	75,40
2022	9,20	12,86	74,51	13.158,00	75,90
2023	9,29	12,87	74,60	14.056,00	76,71
2024	9,34	12,89	74,79	14.547,00	77,21

Sumber: www.jateng.bps.go.id, 2025

Peningkatan IPM Kota Pekalongan selama periode 2020-2024 didorong oleh kenaikan di berbagai komponen utama. Rata-rata lama sekolah meningkat dari 8,96 tahun pada 2020 menjadi 9,34 tahun pada 2024, yang menunjukkan adanya peningkatan akses dan partisipasi pendidikan masyarakat. Harapan lama sekolah juga mengalami kenaikan meskipun relatif kecil, dari 12,84 tahun pada 2020 menjadi 12,89 tahun pada 2024, yang mencerminkan ekspektasi terhadap lama pendidikan yang akan ditempuh oleh anak-anak di Kota Pekalongan.

Selain itu, usia harapan hidup meningkat dari 74,38 tahun pada 2020 menjadi 74,79 tahun pada 2024, yang mengindikasikan perbaikan dalam kualitas layanan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Pengeluaran per kapita per tahun juga mengalami peningkatan signifikan dari Rp12.467.000 pada 2020 menjadi Rp14.547.000 pada 2024, menunjukkan adanya pertumbuhan ekonomi dan daya beli masyarakat yang lebih baik. Secara keseluruhan, kombinasi peningkatan di sektor pendidikan, kesehatan, dan ekonomi berkontribusi pada peningkatan IPM Kota Pekalongan dari 74,98 pada 2020 menjadi 77,21 pada 2024, mencerminkan peningkatan kualitas hidup yang berkelanjutan bagi masyarakat.

2.3.2. IPTEK, Inovasi dan Produktivitas Ekonomi

2.3.2.1. Penguatan Sistem Inovasi Daerah

Sistem Inovasi Daerah (SIDa) merupakan pendekatan pembangunan daerah yang dilakukan secara sistematis, inovatif, holistik, dan berkelanjutan dengan menekankan kerja kolaboratif antar-stakeholder. SIDa mencakup berbagai pelaku pembangunan, kelembagaan (termasuk kebijakan), interaksi, serta proses produktif yang mempengaruhi perkembangan, kecepatan inovasi, dan difusi inovasi, termasuk teknologi, praktik terbaik, serta proses pembelajaran.

Untuk mengoptimalkan implementasi SIDA, Pemerintah Pusat menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah, yang menjadi dasar bagi Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Inovasi Daerah Provinsi Jawa Tengah. Regulasi ini menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam mendorong inovasi di wilayahnya agar tercipta keselarasan kebijakan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Di Kota Pekalongan, penyelenggaraan SIDA diatur melalui Peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor 59 Tahun 2022 tentang Sistem Inovasi Daerah Kota Pekalongan.

Keberhasilan implementasi SIDA dapat diukur melalui Indeks Inovasi Daerah (IID) yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). IID mencerminkan sejauh mana daerah mampu mengembangkan dan menerapkan inovasi dalam tata kelola pemerintahan, pelayanan publik, serta pembangunan ekonomi lokal.

Berdasarkan IID tahun 2024, Kota Pekalongan berhasil masuk dalam kategori "Terinovatif", dengan peringkat ke-7 dari 93 kota di Indonesia, memperoleh nilai 77,07. Capaian ini menunjukkan peningkatan yang signifikan dibandingkan tahun 2023, di mana Kota Pekalongan hanya memperoleh nilai 53,96 dengan predikat "Inovatif". Kenaikan ini mencerminkan efektivitas SIDA dalam mendorong inovasi di berbagai sektor, meningkatkan efisiensi pelayanan publik, serta mempercepat pembangunan berbasis inovasi.

Selain IID, indikator lain yang menggambarkan keberhasilan inovasi daerah adalah Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) yang ditetapkan oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). IDSD bertujuan untuk mengukur kondisi dan kemampuan suatu daerah dalam mengoptimalkan potensinya melalui peningkatan produktivitas, nilai tambah, dan daya saing guna mencapai kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan. Pada tahun 2024, Kota Pekalongan memperoleh nilai IDSD sebesar 3,87, menunjukkan daya saing yang lebih tinggi dibandingkan dengan daerah sekitarnya, yaitu Kabupaten Batang, Kabupaten Pekalongan, dan Kabupaten Pemalang.

Tabel II-41
Nilai Indeks Daya Saing Daerah Kota Pekalongan dan Kabupaten/Kota Sekitarnya
Tahun 2020-2024

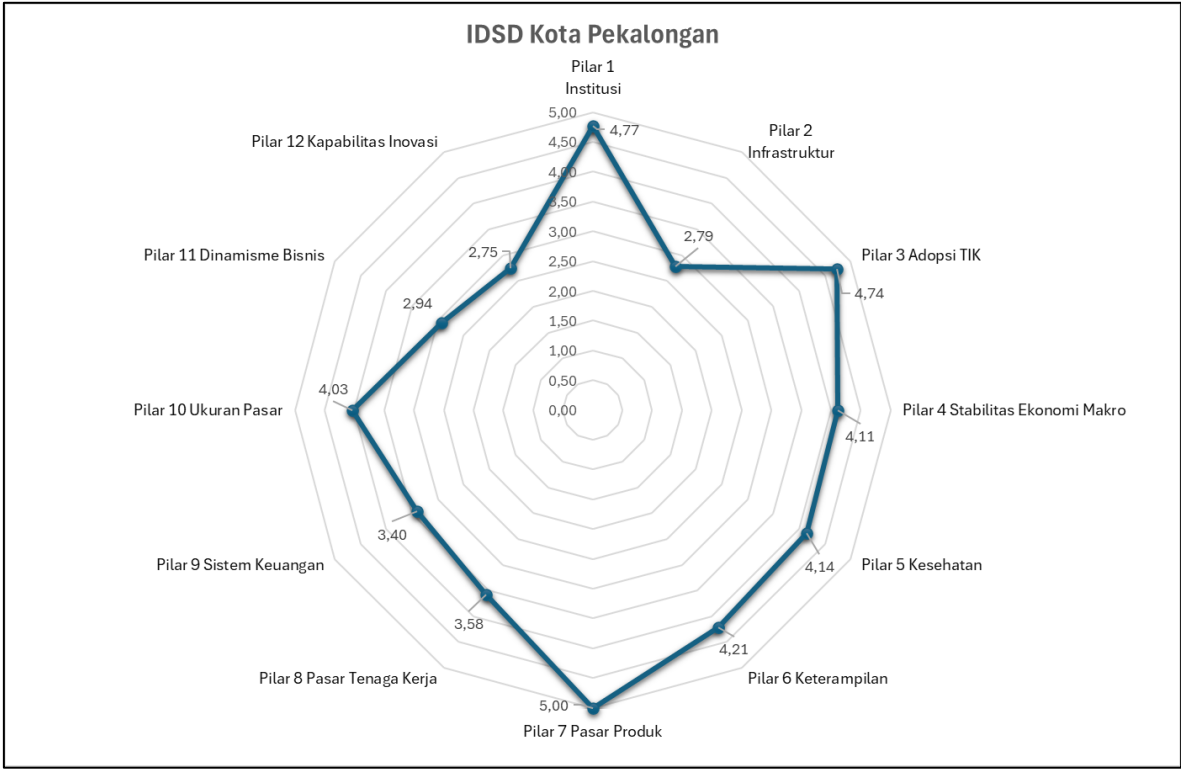
No	Kab/Kota	Nilai Indeks				
		2020*	2021*	2022	2023	2024
1	Kota Pekalongan	3,676	3,418	3,14	3,60	3,87
Persandingan dengan kabupaten sekitar						
2	Kab. Pekalongan	3,613	3,395	2,91	3,36	3,61
3	Kab. Batang	3,368	3,403	2,97	3,32	3,59
4	Kab. Pemalang	3,063	2,848	2,93	3,20	3,62
Persandingan dengan kota di Jawa Tengah						
5	Kota Tegal	3,755	3,298	3,30	3,63	4,08
6	Kota Salatiga	3,568	3,430	3,40	3,77	4,16
7	Kota Magelang	3,259	3,130	3,50	3,81	4,26

*Terdapat perubahan metode pengukuran IDSD antara tahun 2018-2021 dan Tahun 2022. Tahun 2018-2021 menggunakan kuesioner yang diisi oleh Pemerintah Provinsi/Kab/Kota sedangkan pada Tahun 2022, pengukuran dilakukan mandiri oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional.

Sumber: idsd.jateng.id (diolah), 2025

Secara lebih rinci, IDSD diukur melalui 4 aspek, yang meliputi 12 pilar (Institusi, Instruktur, Adopsi TIK, Stabilitas Ekonomi Makro, Kesehatan, Keterampilan, Pasar Porduk, Pasar Tenaga Kerja, Sistem Keuangan, Ukuran Pasar, Dinamisme Bisnis, dan Kapabilitas

Inovasi). Capaian Kota Pekalongan berdasarkan skor pilar dalam ekosistem inovasi dapat digambarkan dalam diagram sebagai berikut:



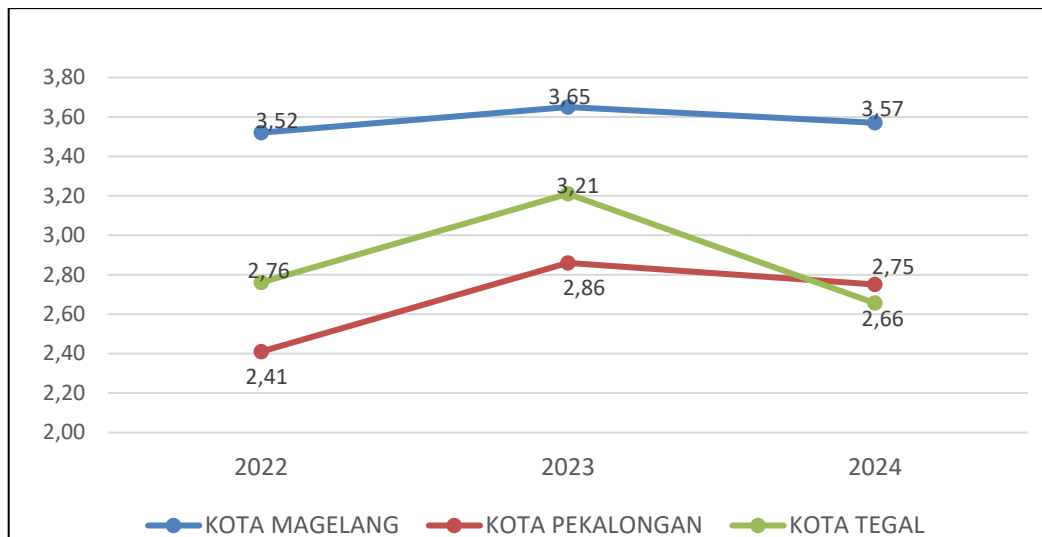
Sumber: diolah dari hasil pengukuran Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) BRIN 2025

Gambar II-40
Daya Saing Daerah Berdasarkan Skor Pilar Dalam Ekosistem Inovasi

Berdasarkan capaian di atas, Kota Pekalongan memiliki daya saing yang cukup baik dengan skor IDSD 2024 sebesar 3,87, didukung oleh keunggulan pada pilar pasar produk (5,00), institusi (4,77), dan adopsi teknologi informasi (4,74). Stabilitas ekonomi makro, kesehatan, dan keterampilan tenaga kerja juga cukup baik. Namun, terdapat tantangan utama pada pilar infrastruktur (2,79), kapabilitas inovasi (2,75), dan dinamisme bisnis (2,94). Keterbatasan akses keuangan, pasar tenaga kerja, dan ukuran pasar juga masih perlu diperbaiki. Untuk meningkatkan daya saing, Kota Pekalongan harus berfokus pada penguatan infrastruktur, peningkatan inovasi, digitalisasi UMKM, perluasan akses pembiayaan, serta ekspansi pasar dan konektivitas guna mempercepat pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah.

Berkaitan dengan **Kapabilitas Inovasi** yang merupakan bagian dalam IDSD, aspek ini bertujuan menggambarkan kuantitas dan kualitas penelitian dan pengembangan formal untuk mendorong kolaborasi, konektivitas, kreativitas, keragaman, dan konfrontasi lintas visi dan sudut pandang yang berbeda, serta kapasitas untuk mengubah ide menjadi barang dan jasa baru. Indikator Kapabilitas Inovasi adalah keanekaragaman tenaga kerja, status pengembangan klaster, publikasi ilmiah, aplikasi Kekayaan Intelektual (KI), belanja riset, indeks keunggulan lembaga riset, dan aplikasi merek dagang.

Kapabilitas Inovasi Kota Pekalongan menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan. Dari posisi terendah 2,41 pada tahun 2022, Pekalongan berhasil melonjak menjadi 2,86 pada tahun 2023, meskipun kemudian sedikit terkoreksi ke 2,75 pada tahun 2024. Capaian tahun 2024 tersebut masih berada di bawah Kota Magelang, namun relatif lebih baik dibandingkan dengan Kota Tegal. Hal ini tergambar pada visualisasi berikut:



Sumber : diolah dari <https://www.brin.go.id/drid/page/indeks-daya-saing-daerah>

Gambar II-41
Indeks Kapabilitas Inovasi

Penurunan Indeks Kapabilitas Inovasi Kota Pekalongan pada tahun 2024 terutama dipengaruhi oleh penurunan jumlah publikasi ilmiah yang diterbitkan dalam jurnal terakreditasi SINTA serta jumlah kekayaan intelektual (KI) di masyarakat termasuk didalamnya kekayaan intelektual komunal, yang didaftarkan ke Kementerian Hukum dan HAM. Beberapa faktor yang berkontribusi terhadap penurunan tersebut yaitu:

- Keterbatasan jumlah peneliti dan penelitian bersumber anggaran daerah yang dapat dilakukan oleh peneliti atau akademisi daerah, yang didaftarkan publikasinya pada jurnal terakreditasi SINTA
- Akses ke jurnal terindeks dan biaya publikasi tinggi,
- Biaya pendaftaran paten dan proses verifikasi di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual relatif mahal dan kompleks,
- Minimnya pendampingan hukum dan teknis pendaftaran Kekayaan Intelektual..

Kondisi ini memerlukan perhatian bersama semua stakeholder riset secara komprehensif, yang dapat dilakukan melalui penyelenggaraan riset yang lebih intensif, kolaboratif dan *matching fund* dengan universitas atau Lembaga ilmiah lain untuk riset dan publikasi. Untuk pengelolaan publikasi riset di Kota Pekalongan, Jurnal Litbang telah terakreditasi SINTA 4 pada akhir tahun 2024 sehingga diharapkan capaian publikasi akan meningkat di tahun-tahun mendatang. Secara lebih lanjut dalam jangka panjang, dorongan atas publikasi kekayaan intelektual dapat dilaksanakan melalui Klinik Publikasi dan Kekayaan Intelektual (KI), workshop penulisan dan pendampingan KI gratis.

Dalam upaya memperkuat kapabilitas inovasi daerah dan juga dalam rangka mendekatkan perencanaan pembangunan daerah secara teknokratis, Pemerintah Kota Pekalongan menggunakan mekanisme kegiatan penelitian yang telah melibatkan metode dan kerangka berpikir ilmiah dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Updaya ini dilakukan melalui akselerasi langkah melalui kegiatan penelitian dan pengembangan yang selaras dengan tema perencanaan pembangunan serta dapat membangun langkah-langkah strategis yang menempatkan *science-based policy* yakni aktivitas riset sebagai basis pengambilan kebijakan yang mampu menjadi solusi atas permasalahan yang muncul di Kota Pekalongan.

Hal-hal yang berkaitan dengan penelitian dan pengembangan diharapkan dapat mendukung Pemerintah Daerah dalam proses perumusan kebijakan dalam upaya

meningkatkan daya saing daerah. Kegiatan yang rutin dilaksanakan adalah Riset Unggulan Daerah (RUD) dan fasilitasi Riset Bersama (Risber). RUD merupakan kegiatan fasilitasi pembiayaan riset yang mengarah kepada isu aktual dan strategis Kota Pekalongan, sedangkan fasilitasi Riset Bersama merupakan salah satu upaya pengambilan keputusan dan kebijakan publik berbasis fakta dan bukti ilmiah yaitu dengan memperluas mitra kerja sama di bidang penelitian dan pengkajian.

Tabel II-42
Riset Unggulan Daerah Kota Pekalongan Tahun 2024

No.	Judul	Institusi Pelaksana
1	Penentuan Prioritas Produk Unggulan Daerah dan Pengembangannya di Kota Pekalongan Menggunakan Metode <i>Multi Attribute Utility Theory</i> (MAUT)	Universitas Pekalongan
2	Pengembangan Model dan Materi Pembelajaran Adaptasi Lingkungan Berbasis Teknologi di Kota Pekalongan	STAI Ki Ageng Pekalongan
3	Metode Etnoinformatika untuk Strategi Pengembangan dan Promosi Kuliner di Pasar Sugihwaras Kota Pekalongan	FISIPOL UGM
4	Strategi Tata Kelola Kebijakan Penanganan Anak Tidak Sekolah dan Rentan Anak Tidak Sekolah di Kota Pekalongan	Pusat Studi Pancasila UGM
5	Pemetaan Sumber Daya Lokal Kota Pekalongan untuk Mendukung Kawasan Industri Terpadu Batang	Fakultas Teknik UGM

Sumber: Bapperida Kota Pekalongan (diolah), 2025

Riset Bersama dilaksanakan oleh perguruan tinggi atau lembaga penelitian melalui penunjukan langsung. Tema yang diusung dalam riset bersama berdasarkan usulan dari OPD atau kebijakan Pemerintah Kota Pekalongan sesuai dengan kebutuhan.

Tabel II-43
Riset Bersama Kota Pekalongan Tahun 2022-2024

No.	Judul	Institusi Pelaksana
1	Penyusunan Strategi Pengelolaan Air Limbah dan Pemanfaatan Air Tanah di Kota Pekalongan	Universitas Terbuka
2	Visioning Transformasi Kawasan Pesisir Kota Pekalongan: Studi Kasus Kawasan Degayu dan Slamaran	Institut Teknologi Bandung
3	Studi Antropologi : Konstruksi Sosial Pada Kemiskinan Di Kota Pekalongan	Lingkar Kajian Kota Pekalongan (LKKP)
4	Penelitian Penerapan Teknologi Pertanian pada Produk Tempe di Kampung Tempe Kota Pekalongan	UGM
5	Mitigasi Dampak Banjir dan Rob terhadap Lahan Pertanian di Kota Pekalongan	UGM

Sumber: Bapperida Kota Pekalongan (diolah), 2025

RUD dan Riset Bersama yang dilakukan dalam kerangka menjembatani penelitian terhadap kebijakan (*bridging knowledge to policy*) di wilayah Kota Pekalongan. Tema RUD dan Riset Bersama yang dilakukan didasarkan atas isu strategis pembangunan, yaitu isu strategis RKPD Kota Pekalongan. Seleksi pelaksana RUD dan Riset Bersama didasarkan atas inovasi yang akan dikembangkan oleh pelaksana terhadap isu strategis pembangunan. RUD dan Riset

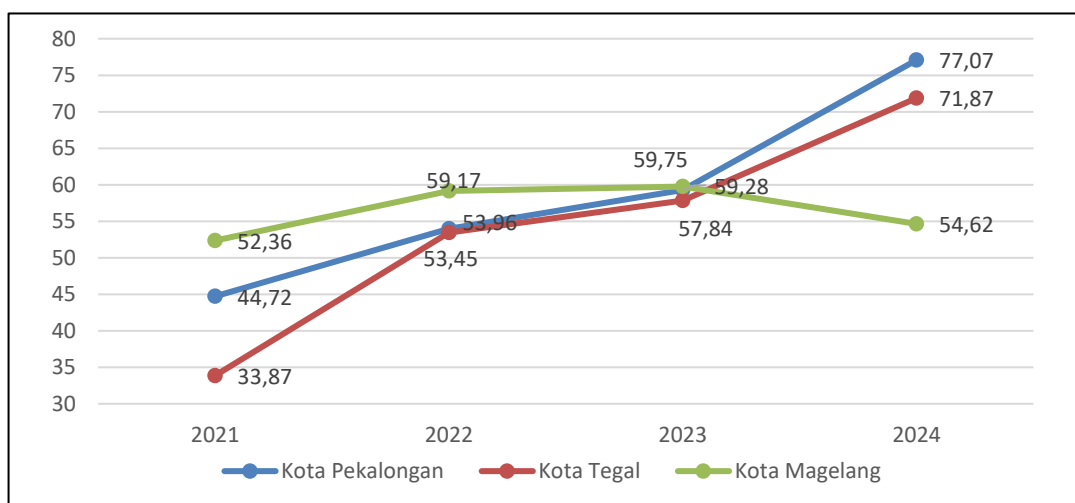
Bersama memiliki sasaran merumuskan kebijakan pembangunan, sebagai inovasi pembangunan, dalam kerangka pembangunan Kota Pekalongan. Hal ini didasarkan kondisi bahwa perguruan tinggi merupakan bagian integral dari pemangku kepentingan pembangunan serta memiliki kemampuan yang dapat dioptimalkan dan diintegrasikan dalam perumusan kebijakan pembangunan.

Di sisi lain, tantangan penelitian dan pengembangan yang dilakukan adalah bagaimana terus meningkatkan peran perguruan tinggi di wilayah Kota Pekalongan untuk semakin besar berkontribusi dalam pengembangan kebijakan pembangunan. Hal ini didasarkan kondisi bahwa perguruan tinggi di wilayah Kota Pekalongan lebih memahami permasalahan maupun isu strategis pembangunan, sehingga diharapkan memiliki penguasaan permasalahan yang lebih baik dalam pengembangan kebijakan pembangunan Kota Pekalongan.

Disisi lain, Kementerian Dalam Negeri melalui Badan Strategi Kebijakan Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) juga melakukan penilaian **Indeks Inovasi Daerah (IID)** dengan tujuan mengukur sejauh mana pemerintah daerah mampu mengembangkan dan menerapkan inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Tujuan utama dari IID adalah untuk mendorong terciptanya budaya inovatif di lingkungan pemerintahan daerah, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih efisien dan efektif.

Penilaian IID mencakup berbagai aspek, seperti jumlah inovasi yang diimplementasikan, kemantapan kualitas dokumen inovasi, manfaat dan dampak nyata bagi masyarakat. Selain itu, keberlanjutan dan potensi replikasi inovasi juga menjadi pertimbangan penting dalam penilaian. Sebagai apresiasi atas upaya yang dilaksanakan Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat juga memberikan penghargaan dan insentif kepada daerah-daerah yang dinilai inovatif melalui mekanisme seperti *Innovative Government Award (IGA)*.

Capaian skor IID Kota Pekalongan selama 4 (empat) tahun terakhir cukup signifikan dibandingkan 5 (lima) kota di Provinsi Jawa Tengah. Diawali dengan nilai IID sebesar 44,72 pada tahun 2021, capaian Kota Pekalongan terus meningkat kurang lebih +9 poin setiap tahunnya sampai di Tahun 2023, dan kemudian naik signifikan +17,79 poin menjadi 77,07 pada tahun 2024. Perkembangan ini telah melampaui nilai Kota Tegal dan Kota Magelang sebagai kota yang setara dengan Kota Pekalongan. Rincian perkembangan skor disajikan pada grafik berikut:



Sumber : diolah dari <https://e-database.kemendagri.go.id/kemendagri/dataset/846/tabel-data>

Gambar II-42
Indeks Inovasi Daerah

Peningkatan signifikan yang dicapai Kota Pekalongan, khususnya dari tahun 2023 ke 2024 dengan lonjakan sebesar +17,79 poin, merupakan yang tertinggi di antara ketiga kota. Hal ini mencerminkan adanya transformasi nyata dalam sistem inovasi daerah. Skor tersebut menempatkan Kota Pekalongan dalam kategori Sangat Inovatif, serta menjadikannya sebagai salah satu penerima IGA dengan peringkat ke-7 secara nasional.

Tren peningkatan IID ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Pekalongan semakin serius dan strategis dalam mengembangkan inovasi. Capaian ini tidak hanya berdampak pada peningkatan kualitas pelayanan publik, tetapi juga berkontribusi besar dalam memperkuat daya saing dan reputasi daerah di tingkat nasional.

Dalam rangka mengembangkan inovasi lebih lanjut, Kota Pekalongan menyelenggarakan Festival Inovasi Daerah yang menetapkan inovasi daerah Tahun 2023, menetapkan pemenang inovasi tahun 2024 dan inisiasi inovasi tahun 2025, serta inisiasi inovasi yang mendapatkan pembiayaan APBD tahun 2025. Keberadaan festival inovasi ini sangat mendorong perkembangan penghimpunan inovasi daerah yang dikirimkan pada ajang IGA 2025, yang berhasil menghimpun inovasi aktif di Tahun 2023 dan 2024 sebanyak 211 (dua ratus sebelas) inovasi daerah, pada 3 (tiga) bentuk inovasi Tata Kelola Pemerintah Daerah, Inovasi Pelayanan Publik dan Inovasi bentuk lainnya sesuai bidang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Tabel II-44
Rekapitulasi Inovasi Daerah Berdasarkan Bentuk Inovasi dan Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2023 dan 2024

No	Urusan	Inovasi Tata Kelola Pemerintahan	Inovasi Pelayanan Publik	Inovasi Sesuai Kewenangan Daerah
1	Pendidikan	3	29	80
2	Kesehatan	2	20	4
3	Pekerjaan Umum	1	0	0
4	Perumahan Permukiman	3	0	1
5	Sosial	0	0	1
6	Ketentraman Ketertiban Umum	2	1	0
7	Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	0	2	0
8	Pangan	0	1	1
9	Lingkungan Hidup	0	1	2
10	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1	2	0
11	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1	0	0
12	Perhubungan	0	1	0
13	Komunikasi dan Informatika	1	1	0
14	Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah	0	1	0
15	Penanaman Modal	0	3	0
16	Statistika	1	0	0
17	Kebudayaan	0	0	1
18	Perpustakaan	0	1	0
19	Kearsipan	0	0	1
20	Kelautan dan Perikanan	0	2	8

No	Urusan	Inovasi Tata Kelola Pemerintahan	Inovasi Pelayanan Publik	Inovasi Sesuai Kewenangan Daerah
21	Pariwisata	0	1	0
22	Pertanian	0	0	1
23	Perdagangan	0	1	0
24	Perindustrian	0	0	1
25	Transmigrasi	0	0	0
26	Perencanaan	1	0	0
27	Keuangan	2	0	1
28	Kepegawaian	6	2	0
29	Penelitian dan pengembangan	0	0	1
30	Fungsi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	6	5	4
Jumlah		30	74	107

Sumber : diolah dari <https://indeks.inovasi.bskdn.kemendagri.go.id/>, 2025

Berikut ini gambaran inovasi yang telah dilakukan Kota Pekalongan Tahun 2023-2024, yang meliputi:

1. Inovasi Tata Kelola Pemerintah Daerah

Dalam hal inovasi tata kelola Pemerintah Daerah, Pemerintah Kota Pekalongan telah menggunakan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam membangun dan mengembangkan tata kelola yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel, atau lebih dikenal dengan istilah *e-Government*. Infrastruktur jaringan (disebut Batiknet) serta berbagai aplikasi telah dibangun sejak tahun 2008 dan terus dikembangkan hingga sekarang. Hampir semua unit kerja di lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan terkoneksi jaringan Batiknet, baik menggunakan serat optik maupun radio *wireless*. Lebih dari 50 Sistem Informasi Manajemen (SIM)/aplikasi telah dibangun guna mendukung tata kelola yang lebih baik.

Pada tahun 2023 – 2024, telah berkembang inovasi unggulan dalam bentuk tata kelola tata kelola pemerintah daerah, antara lain :

- Sistem Penghimpun Inovasi, Krenova & RUD Kota Pekalongan (INSPIRASI). Sistem Inspirasi merupakan sistem berbasis web yang berfungsi untuk mempermudah terkait perhimpunan atau pendataan seluruh Inovasi Daerah Kota Pekalongan sebelum di-*upload* ke web Kemendagri (BSKDN) terkait *Innovative Government Award* (IGA). Selain itu, Sistem Inspirasi juga menghimpun data Riset Unggulan Daerah (RUD) serta Kreativitas dan Inovasi (KRENOVA)
- EPROKUMDA (Penyusunan Produk Hukum Daerah Secara Elektronik) untuk mengoptimalkan mekanisme fasilitasi penyusunan produk hukum daerah pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Pekalongan .
- SIMANTAP BISA REBORN 23 (Sistem Informasi Manajemen Tambahan Penghasilan Pegawai Berbasis E-Presensi dan E-Kinerja di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan) adalah suatu inovasi yang berfungsi untuk mengintegrasikan aplikasi E-Presensi dan EKinerja sebagai dasar pemberian TPP PNS sehingga proses perhitungan TPP PNS dapat dilakukan secara digital oleh Sistem Informasi secara efektif dan efisien serta akurat dan meminimalisir kesalahan dalam perhitungan
- Si-Pandai (Sistem Informasi Pelayanan Digital Kepegawaian Terintegrasi). Sebelum ada aplikasi Si-Pandai, aplikasi yang ada masih berdiri sendiri-sendiri, misalnya

aplikasi : E-Kenaikan Pangkat, E-Pensiun, E-Kakak (Karis, Karsu, Karpeg), maupun E-MPP (Masa Persiapan Pensiun), namun setelah adanya aplikasi Si-Pandai, input dokumen cukup sekali data langsung terintegrasi sehingga tidak berulang-ulang.

- e. SEKSAMA (Sistem Evaluasi Kinerja Satu Masukan). Pengelolaan evaluasi kinerja dari RPJM Daerah, RKPD, LKPD, dan LAKIP. Fitur-fitur seperti evaluasi IKD, cetak laporan realisasi kinerja, dan pembuatan form data dukung untuk LAKIP memungkinkan user untuk melakukan analisis yang cermat.
- f. SITANTRI (Sistem Informasi Pencatatan Pendapatan Retribusi). Memudahkan dalam merekap data pendapatan retribusi pasar serta dapat mengetahui dengan pasti jumlah pendapatan dari retribusi pasar di seluruh Kota Pekalongan.

2. Inovasi Pelayanan Publik

Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban untuk menyelenggarakan pelayanan publik yang prima dan dituntut untuk terus melahirkan inovasi-inovasi. Begitu halnya dengan Pemerintah Kota Pekalongan yang berupaya membuat inovasi-inovasi untuk pelayanan publik dalam beberapa tahun terakhir, antara lain sebagai berikut:

- a. DUKCAPIL PINTAR (Pelayanan Integrasi TANpa Ribet). DUKCAPIL PINTAR merupakan sistem digitalisasi administrasi kependudukan dimana masyarakat dapat mengurus dokumen Adminduk secara online kapanpun dan dimanapun sehingga tidak perlu lagi datang ke kantor.
- b. SIKASTEWE (Sistem Informasi Kas RT RW) adalah sistem informasi pengelolaan kas yang dapat diterapkan oleh pengurus RT/RW se-wilayah kelurahan Kota Pekalongan agar bisa memberikan informasi atau laporan keuangan yang dikelolanya ke warga di wilayah RT/RW setempat
- c. Tuntas (Totalitas Upaya Nyata enTaskan Anak tidak Sekolah). Tujuan pembentukan aplikasi Tuntas adalah untuk menyediakan sistem yang akurat dan efisien dalam mendeteksi, memverifikasi, dan memvalidasi data anak tidak bersekolah di Kota Pekalongan.
- d. KATALIS (Kolaborasi Pemerintah dan Lintas Sektor) merupakan inovasi yang digunakan mengkolaborasikan Pemerintah dan lintas sektor diantaranya untuk menyediakan database badan usaha dan penerima TJSLBU (Tanggungjawab Sosial Lingkungan dan Badan Usaha), mekanisme pengajuan dan *approval* TJSLBU serta menampilkan hubungan kemitraan TJSLBU secara spasial.
- e. SIAPPEM adalah inovasi berupa Platform untuk pengelola Penanaman Modal / Investasi di lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan yang terintegrasi dan terpadu dengan stakeholder terkait
- f. PELANGI (Kelurahan Peduli Lingkungan Dan Adaptasi Perubahan Iklim) adalah program untuk mendorong/memperkuat kepedulian terhadap isu lingkungan secara umum, termasuk persoalan persampahan, dan perubahan iklim. Program Kelurahan PELANGI secara operasional dilaksanakan dalam bentuk lomba antar Kelurahan secara umum dan melibatkan satu RW di wilayah Kelurahan sebagai lokus unggulan.

3. Inovasi Daerah Lainnya

Inovasi daerah lainnya merupakan inovasi yang dilakukan pemerintah daerah sesuai dengan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah. Inovasi dalam konteks ini adalah inovasi selain tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik. Dalam kurun waktu 2023-2024, beberapa inovasi daerah lainnya antara lain:

- a. Inovasi pada urusan pendidikan dan sekolah

- 1) KARIN (Karnaval Inovasi Guru) merupakan kegiatan yang memfasilitasi guru untuk bisa belajar, berkarya, dan berbagi Praktik Baik/Inovasi melalui channel Youtube
- 2) BIJAK IPAS (belajar interaksi dan menyenangkan dengan *E-Book* IPAS) Harmonis
- 3) JELAJAH (Jelantah Jadi Berfaedah) merupakan inovasi yang memanfaatkan minyak jelantah untuk mengurangi limbah minyak jelantah setelah tidak layak digunakan menjadi sabun herbal, sabun cuci piring dan baju, lilin aroma terapi, pestisida dan cairan pengkilap *body* kasar motor.
- 4) Mi Gelas Sehat (*Micro Green* Kelas Sekolah Sehat) adalah inovasi untuk memperkenalkan dan mengajarkan serta mempraktekan menanam sayuran dengan konsep *micro green* untuk diterapkan di tiap-tiap kelas pembelajaran kepada anak-anak.

b. Inovasi pada urusan kesehatan

- 1) DIMENSI PEKA yaitu meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang kesehatan mental dan pencegahan gangguan jiwa yang ada di Kota Pekalongan serta meningkatkan pelayanan tentang kesehatan mental yang bisa dijangkau masyarakat terdekat dan intervensi untuk gangguan mental emosional oleh faskes terdekat.
- 2) Pengintegrasian Sistem Informasi Kerjasama Rumah Sakit (SISARASA) Berbasis Web di RSUD Bendan Kota Pekalongan
- 3) CENDOL TBC (Cegah Nular dan Obati Langsung TBC). Inovasi berupa metode deteksi penyakit menular TB yang mendeteksi gejala TB dengan merata dan menyeluruh serta dapat ditangani dengan cepat sehingga meminimalisir penularan penyakit TB
- 4) Aplikasi Digital Analisis Z-Score Status Gizi dan Kontrol *Stunting* adalah sebuah platform inovasi yang dirancang untuk mendukung para kader posyandu di Kecamatan Pekalongan Utara dalam memantau dan mengelola data status gizi anak secara lebih akurat dan efisien. Aplikasi ini bertujuan untuk memonitor status gizi dalam upaya penurunan angka *stunting* melalui teknologi aplikasi yang mempermudah pengumpulan, analisis, dan pelaporan data gizi anak.
- 5) MAS CANTING singkatan dari Remaja Sehat Cegah *Stunting*, merupakan program yang diinisiasi oleh DINSOSP2KB Kota Pekalongan sebagai bagian dari upaya mendukung prioritas nasional dalam penurunan angka *stunting*. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan kesehatan remaja, terutama dalam mencegah anemia dan kekurangan gizi yang dapat menjadi faktor risiko *stunting* di masa depan. Dengan menyasar remaja usia 12–23 tahun, Mas Canting berupaya menciptakan generasi muda yang sehat secara fisik dan mental, sehingga siap menghadapi tantangan masa depan.

c. Inovasi pada urusan perumahan dan permukiman

- 1) Untuk menangani kawasan kumuh di Kota Pekalongan, khususnya Kampung Bugisan, pemerintah meluncurkan Program MAPAN MENAWAN (Maju, Adaptif, Partisipatif untuk Aksi Nyata Menata Kawasan). Program ini mendorong kolaborasi antara pemerintah, badan usaha, perguruan tinggi, komunitas, dan masyarakat guna menata lingkungan secara berkelanjutan. Kampung Bugisan dipilih sebagai lokasi prioritas tahun 2024 karena telah terdampak banjir dan rob selama lebih dari tujuh tahun, menyebabkan kerusakan lingkungan, infrastruktur, dan penurunan kualitas hidup. Masalah di wilayah ini mencakup aspek fisik dan sosial ekonomi, seperti kondisi bangunan yang buruk, minimnya akses air bersih, serta rendahnya kesadaran menjaga lingkungan.

- 2) Jabang Tetuko (Jejaring Mbangun Omah Tetulung Kanca Warga) adalah inovasi yang membantu masyarakat berpenghasilan rendah memiliki rumah. Skemanya, warga membeli tanah, lalu Pemerintah Kota Pekalongan membantu membangun rumah di atasnya. Inovasi ini diterapkan di Kelurahan Klego dan Kampung Bugisan, dengan dukungan DAK dari Pemerintah Pusat, untuk meningkatkan kepemilikan rumah bagi warga kurang mampu.
- 3) Inovasi daerah “Motor Kawanku” mempermudah pengumpulan dan perhitungan data kawasan kumuh secara efektif dan efisien melalui aplikasi berbasis web. Data tersimpan otomatis di server, menghindari input dan hitung ulang. Hasilnya menjadi dasar pemetaan luasan kumuh tiap tahun dan acuan strategi untuk mewujudkan Kota Pekalongan bebas kumuh.

d. Inovasi pada urusan Kelautan dan Perikanan

Permasalahan perikanan tangkap dan perikanan budidaya di Kota Pekalongan yang diakibatkan oleh banjir rob sangatlah kompleks. Menghadapi hal tersebut Pemerintah Kota Pekalongan dan *stakeholder* perikanan berupaya mencari solusi. Berbagai pihak terus dirangkul dan dikolaborasikan dalam satu komitmen bersama untuk mengembalikan kejayaan perikanan Kota Pekalongan. Pihak-pihak tersebut tidak hanya pemerintah (Kota Pekalongan, Provinsi dan Pusat), tetapi juga memerlukan keterlibatan *legislatif*, masyarakat (pengusaha kapal, nelayan, pembudidaya, buruh dll), industri kecil dan umkm, akademisi dan pihak terkait lainnya. Dengan latar belakang pemikiran ini, pemerintah Kota Pekalongan meluncurkan program Kolaboratif dengan nama “KAKAP Emas - KembALikan Kejayaan perAiran Pekalongan bagi Ekonomi dan kesejahteraan MASyarakat”. Inovasi-inovasi dalam program KAKAP Emas berikut diharapkan mampu mengangkat kembali kejayaan perikanan Kota Pekalongan.

Tabel II-45
Inovasi Daerah Bidang Perikanan

No.	Nama Inovasi	Keterangan
1	Sistem Informasi Aplikasi Perikanan (SIAPKAN)	Sistem informasi terkait pengelolaan perikanan dan data perikanan, serta memuat aplikasi layanan berusaha dan berkegiatan di sektor perikanan.
2	FISH Apartement	Rumah ikan sebagai tempat pengasuhan benih di laut menggunakan terumbu karang buatan
3	JALABU (Jaring Jala Bubu)	merupakan inovasi yang mengadaptasi kebutuhan resiliensi masyarakat Degayu yang terdampak banjir dan rob.
4	APUNGKU (Program Jaring APUNG Untuk Pembudidaya Kreatif dan Unggul)	Adaptasi pemanfaatan Jaring Apung untuk budidaya ikan pada kawasan terdampak banjir dan rob
5	Perahu Nelayan Tangguh	Pemberian bantuan kapal bermotor kepada masyarakat Degayu terdampak rob yang alih profesi dari petani sawah menjadi nelayan
6	Budi Mantap (Budidaya Karamba Jaring Tancap)	Pemberian bantuan jaring tancap pada petambak yang kondisi dampak banjir dan rob belum terlalu tinggi seperti di Bandengan dan Degayu.

No.	Nama Inovasi	Keterangan
7	PINTU BERDAYA (Progam Pintu Bersama untuk Perikanan Budidaya)	Pembuatan pintu air payau dari Kali Banger ke tambak pembudidaya yang ada di Slamaran, Krapyak (di ujung sungai).
8	TPI LUNAS	Manajemen pembayaran lelang ikan yang selesai pada hari yang sama, sehingga penerimaan pendapatan nelayan tidak tertunda
9	PELITA (Pekalongan Lelang Ikan Transparan dan Amanah)	Inovasi berupa opsi 3 (tiga) jenis pelelangan ikan, yakni - Lelang terbuka, merupakan lelang konvensional - Lelang terbuka dengan sampel, dimana hanya sampel yang digelar - Lelang terbatas, lelang ikan yang dibeli oleh pemilik sendiri karena tidak ada kesepakatan harga sehingga disimpan di <i>cold storage</i>.
10	Gerai Oleh-Oleh Bersama	
11	OLIK (Aneka Olahan Ikan)	Peningkatan nilai tambah olahan ikan melalui penambahan sarana prasarana pemasaran
12	TAMBAK MILENIAL (Budidaya Udang Vaname dengan Kolam Bundar)	Budidaya tambak udang vaname dengan kolam bundar
13	GRANIT (Program Nila Gratis)	Pemanfaatan lahan tergenang rob dengan nila salina, yakni ikan nila yang dapat hidup pada air payau.
14	SLBB (Sekolah Lapangan Budidaya Bandeng)	SLBB merupakan kolaborasi <i>Mercy Corps</i> Indonesia dan masyarakat dalam program pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan nilai tambah usaha budidaya bandeng
15	WANA MINA (Program Budidaya Ikan Berdampingan Mangrove)	Budidaya ikan bandeng, nila dan kepiting yang berdampingan mangrove
16	Jajan Ikan (Jajan Olahan Perikanan)	Pembinaan dan pelatihan pengolah ikan pemula pada teknopark perikanan
17	KOBILTU (Program Kolam Bundar Ikan Lele Terpadu)	Budidaya lele pada kolam dengan bentuk bundar sebagai upaya perbaikan sirkulasi air dan ketahanan terhadap banjir rob
18	ITU HOKI (Ikan Bermutu dan Harga Oke Sekali)	Perluasan dan perlengkapan <i>cold storage</i>

Sumber: Bapperida Kota Pekalongan (diolah), 2025

Selain itu, dalam rangka penguatan inovasi, kreatifitas dan teknologi tepat guna, Pemerintah Kota Pekalongan juga perlu mendorong partisipasi masyarakat melalui penyelenggaraan Lomba Krenova (Kreativitas dan Inovasi Masyarakat) dan Teknologi Tepat Guna (TTG) yang rutin diadakan setiap tahun. Untuk krenova ini menyasar masyarakat kreatif, dunia usaha, akademisi dan juga pelajar melalui 2 (dua) kategori, yaitu kategori pelajar dan kategori umum. Adapun untuk lomba TTG, menyasar masyarakat atau dunia usaha yang memiliki dampak peningkatan ekonomi masyarakat melalui kegiatan pemberdayaan dan tepat guna, yang dilaksanakan pada 2 (dua) kategori yakni TTG Inovasi dan TTG unggulan.

Penyelenggaraan lomba dan penilaian tersebut berlanjut sampai dengan tingkat provinsi dan nasional sesuai dengan agenda yang diselenggarakan Bripda Provinsi Jateng dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan, dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah.

Berdasarkan gambaran pelaksanaan yang telah diuraikan diatas, dapat disimpulkan beberapa hal untuk memperkuat sistem inovasi daerah, antara lain :

- a. Korelasi antara SIDA, IID, dan IDSD menjadi sangat penting dalam pembangunan daerah. Implementasi SIDA yang optimal akan meningkatkan IID, yang pada akhirnya berkontribusi terhadap peningkatan IDSD. Hal ini menunjukkan bahwa inovasi yang berkelanjutan tidak hanya mendorong efisiensi pemerintahan dan pelayanan publik, tetapi juga meningkatkan daya saing daerah dalam skala nasional dan global.
- b. Perlu dilakukan pemetaan kebutuhan riset yang sistematis serta publikasi yang lebih luas untuk mendapatkan penelitian yang lebih tepat sasaran. Penelitian juga diharapkan dapat meningkatkan kerjasama Bapperida dengan Perguruan Tinggi di sekitar Kota Pekalongan, Perguruan Tinggi Nasional ataupun dengan Badan Riset Inovasi Nasional.
- c. Perlunya peningkatan peran perguruan tinggi di wilayah Kota Pekalongan untuk berkontribusi dalam pengembangan kebijakan pembangunan. Hal ini didasarkan kondisi bahwa perguruan tinggi di wilayah Kota Pekalongan lebih memahami permasalahan maupun isu strategis pembangunan, sehingga diharapkan memiliki penguasaan permasalahan yang lebih baik, dalam pengembangan kebijakan pembangunan Kota Pekalongan.

2.3.2.2. Produktivitas UMKM, Koperasi dan BUMD

Rasio kewirausahaan Daerah sebagai perbandingan status pekerjaan utama dengan jenis angkatan kerja yang dinyatakan dalam persen. Rasio kewirausahaan Kota Pekalongan meskipun lebih tinggi dari pada rasio kewirausahaan Provinsi Jawa Tengah namun bergerak melambat. Hal tersebut terlihat dari sejak tahun 2020 dengan rasio sebesar 5,8 persen dan selama 5 (lima) tahun berikutnya yaitu tahun 2024 sebesar 5,4 persen. Rasio kewirausahaan Kota Pekalongan dan Jawa Tengah dapat terlihat pada tabel di bawah ini:

Tabel II-46
Rasio Kewirausahaan Kota Pekalongan dan Jawa Tengah Tahun 2020-2024

Rasio Kewirausahaan		2020	2021	2022	2023	2024
Kota Pekalongan	Berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar	9.178	8.635	9.755	10.302	10.136
	Angkatan Kerja	157.260	181.210	169.940	180.597	188.194
	Rasio Kewirausahaan (persen)	5,8	4,8	5,7	5,7	5,4
Jawa Tengah	Berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar	552.390	552.291	556.838	591.544	616.770
	Angkatan Kerja	18.751.277	18.963.993	19.474.934	21.069.135	21.908.844
	Rasio Kewirausahaan (persen)	2,9	2,9	2,8	2,8	2,82

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2020-2024, 2025

Hubungan antara berusaha dibantu buruh tetap dengan angkatan kerja secara sederhana menggambarkan sebuah usaha dimana pemilik tidak hanya menjalankan usahanya sendiri tetapi juga memiliki karyawan dengan status tetap yang menerima upah/gaji teratur dan membantu operasional usaha tersebut. Melambatnya rasio kewirausahaan merupakan salah satu indikator melambatnya perekonomian suatu wilayah. Hal ini

menunjukkan bahwa tidak berkembangnya penduduk usia produktif yang memilih untuk menciptakan lapangan pekerjaannya sendiri dan juga tenaga kerja atau buruh dengan status karyawan tetap untuk bekerja di lapangan pekerjaannya tersebut. Implikasi dari berusaha dibantu buruh tetap yaitu adanya perkembangan usaha karena cenderung berskala besar dibandingkan usaha mikro atau usaha yang hanya melibatkan pemiliknya saja. Selain itu juga, pengusaha memiliki tanggung jawab hukum dan keuangan terhadap buruh tetap termasuk pembayaran gaji/upah, jaminan sosial, kesehatan, dan hak-hak pekerja lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Rasio kewirausahaan di Kota Pekalongan bergerak cenderung melambat selama 5 (lima) tahun dari Tahun 2020 hingga 2024. Hal tersebut mengindikasikan adanya stagnasi atau kurangnya pertumbuhan dalam ekosistem kewirausahaan di Kota Pekalongan. Implikasi hal tersebut berakibat pada potensi pertumbuhan ekonomi terhambat karena kewirausahaan merupakan salah satu motor penggerak pertumbuhan ekonomi melalui inovasi, penciptaan lapangan kerja dan peningkatan produktivitas. Kurangnya inovasi dan peluang pasar baru dapat menjadi penyebab melambatnya rasio kewirausahaan, jika tidak ada perkembangan teknologi atau identifikasi peluang pasar baru yang menarik maka potensi untuk munculnya usaha baru juga akan terbatas. Kualitas pendidikan dan pelatihan kewirausahaan yang kurang efektif menghasilkan lulusan dengan mentalitas dan keterampilan berwirausaha kurang memadai. Budaya dan persepsi masyarakat yang kurang mendukung dalam berwirausaha.

Rasio Volume Usaha Koperasi Terhadap PDRB – IUP, rasio volume usaha koperasi di Kota Pekalongan mengalami tren yang menurun. Hal ini dapat terlihat sejak tahun 2020 sebesar 47,06 persen kemudian mengalami penurunan tiap tahunnya yaitu 46,76 persen di tahun 2021 hingga menjadi 32,40 persen di tahun 2024. Meskipun nilai PDRB mengalami peningkatan tiap tahunnya dari tahun 2020 hingga 2024, namun nilai atau volume usaha koperasi cenderung mengalami penurunan sejak tahun 2020 hingga 2024. Volume usaha koperasi sempat mengalami peningkatan dari tahun 2020 hingga 2022 namun mengalami penurunan lagi sejak tahun 2023 hingga 2024. Rasio volume usaha koperasi terhadap PDRB Kota Pekalongan dapat terlihat pada tabel di bawah ini:

Tabel II-47
Rasio Volume Usaha Koperasi Terhadap PDRB Kota Pekalongan Tahun 2020-2024

Kriteria	2020	2021	2022	2023	2024
Volume Usaha Koperasi (dalam milyar rupiah)	5.106,08	5.356,30	5.903,98	5.546,39	4.785,36
PDRB (ADHB) (dalam milyar rupiah)	10.848,87	11.460,58	12.590,98	13.744,22	14.766,95
Rasio (persen)	47,06	46,76	46,89	40,35	32,40

Sumber: Badan Pusat Statistik, Dindagkop&UKM, 2020-2024, 2025

Rasio volume usaha koperasi terhadap PDRB merupakan indikator yang menunjukkan seberapa besar kontribusi nilai usaha (omzet atau volume usaha) seluruh koperasi dalam suatu wilayah terhadap PDRB wilayah tersebut dalam suatu periode waktu tertentu. Rasio ini menggambarkan seberapa penting peran sektor koperasi dalam menghasilkan nilai tambah ekonomi suatu wilayah. Rasio yang tinggi menunjukkan bahwa sektor koperasi memiliki kontribusi yang signifikan terhadap perekonomian suatu wilayah. Rasio yang rendah menunjukkan bahwa kontribusi sektor koperasi terhadap perekonomian suatu wilayah masih kecil dibandingkan dengan sektor lain. Hal tersebut dapat menjadi indikasi bahwa koperasi belum dimanfaatkan secara maksimal atau koperasi menghadapi berbagai kendala dalam pengembangan usahanya.

Penurunan rasio volume usaha koperasi terhadap PDRB Kota Pekalongan selama 5 tahun terakhir (2020-2024) merupakan indikasi adanya penurunan kontribusi sektor koperasi terhadap perekonomian Kota Pekalongan. Koperasi seringkali memiliki tujuan ganda yaitu ekonomi dan sosial. Penurunan volume usaha dapat mengurangi dampak positif koperasi dalam hal pemberdayaan anggota, penciptaan lapangan kerja serta pemerataan ekonomi di tingkat lokal. Kontribusi koperasi dalam menghasilkan nilai ekonomi dan menggerakkan aktivitas bisnis di Kota Pekalongan menjadi semakin tidak signifikan dibandingkan dengan sektor-sektor lain. Kurang optimalnya manajemen maupun daya saing produk dan layanan koperasi yang ditawarkan dalam hal kualitas, harga maupun inovasi dibandingkan dengan pesaing lainnya.

Return On Asset (ROA) adalah indikator untuk mengukur kemampuan aset perusahaan dalam menghasilkan laba bersih. Indikator ini dapat digunakan untuk mengukur produktivitas perusahaan melalui pemanfaatan aset yang dimiliki. Dengan mengetahui tingkat ROA perusahaan maka dapat diketahui tingkat produktivitas perusahaan jika dibandingkan dengan perusahaan lain dalam sektor atau industri yang sama. Dengan demikian, data ROA dapat dimanfaatkan untuk perencanaan strategis dalam mencapai sasaran pembangunan daerah.

ROA pada BUMD Kota Pekalongan yaitu PT. BPR Bank Pekalongan, PT. BPR BKK Kota Pekalongan, PT. BPR BKK Jateng, Perumda Tirtayasa menunjukkan persentase yang fluktuatif. Terjadi kenaikan dari tahun 2020 sebesar 1,6 persen menjadi 2,2 persen di tahun 2021 sebagai dampak positif dari kenaikan laba bersih. Namun kemudian terjadi penurunan hingga tahun 2024 sebesar 1,4 persen sebagai akibat dari penurunan laba bersih. ROA BUMD Kota Pekalongan dapat terlihat pada tabel di bawah ini:

Tabel II-48
Return On Asset BUMD Kota Pekalongan Tahun 2020-2024

BUMD	2020	2021	2022	2023	2024
Aset (dalam jutaan)	2.472.499,36	2.713.275,57	2.778.063,16	2.656.821,14	2.698.666,54
Laba Bersih (dalam jutaan)	40.388,77	59.472,41	49.877,34	48.976,24	38.785,37
ROA (persen)	1,6	2,2	1,8	1,8	1,4

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2020-2024, 2025

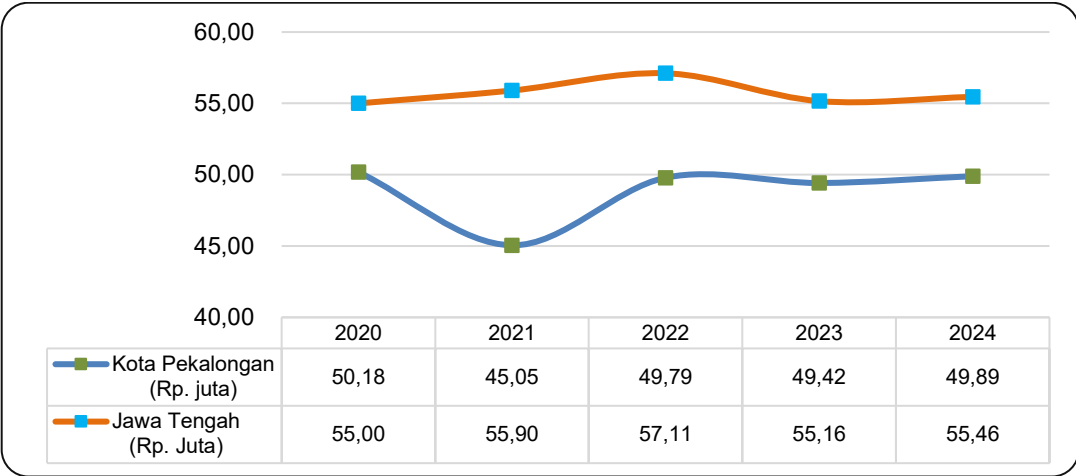
Naik atau turunnya persentase ROA BUMD Kota Pekalongan selama periode 5 tahun terakhir (2020-2024) mengindikasikan adanya kurang optimalnya efisiensi dan profitabilitas dalam pengelolaan aset BUMD. ROA mengukur seberapa efektif 4 (empat) BUMD menghasilkan laba bersih dari total aset yang dimilikinya. Fluktuatifnya ROA BUMD terjadi karena naik atau turunnya laba bersih dan aset. Laba bersih dipengaruhi oleh pendapatan, biaya operasional, beban bunga serta kerugian lainnya. Sedangkan aset dipengaruhi oleh investasi baru baik yang sudah menghasilkan maupun belum menghasilkan, akumulasi aset tidak produktif, piutang tak tertagih serta revaluasi aset.

2.3.2.3. Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja

Tingkat produktivitas tenaga kerja Kota Pekalongan tahun 2024 sebesar 49,89 juta rupiah meningkat dibandingkan dengan tahun 2023 yang sebesar 49,42 juta rupiah, meskipun pada tahun 2021 sempat mengalami penurunan akibat dampak pandemi *Covid-19* yang menyebabkan terbatasnya aktivitas ekonomi. Peningkatan produktivitas tenaga kerja di Kota Pekalongan menunjukkan kemampuan tenaga kerja yang semakin optimal dalam menghasilkan produk yang menjadi sumber keunggulan kompetitif suatu perusahaan atau

daerah, serta memungkinkan perusahaan menghasilkan lebih banyak *output* dengan jumlah tenaga kerja yang sama, sehingga keuntungan perusahaan lebih besar.

Jika dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah, produktivitas tenaga kerja Kota Pekalongan masih berada di bawahnya. Pada tahun 2024, produktivitas tenaga kerja Jawa Tengah mencapai Rp55,46 juta, lebih tinggi dibandingkan Kota Pekalongan. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun terjadi perbaikan, Kota Pekalongan masih perlu mendorong peningkatan efisiensi dan daya saing tenaga kerja agar mampu mengejar ketertinggalan dari rata-rata provinsi.

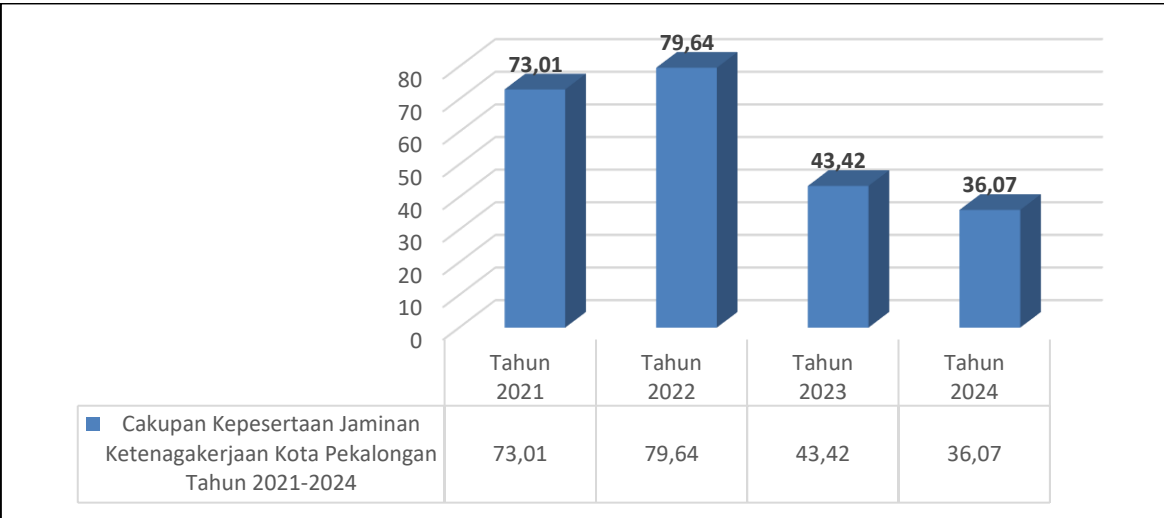


Sumber: www.jateng.bps.go.id (diolah), 2025

Gambar II-43

Perkembangan Produktivitas Tenaga Kerja Kota Pekalongan Tahun 2020-2024

Cakupan kepesertaan Jaminan Ketenagakerjaan. Cakupan kepesertaan Jamsostek di Kota Pekalongan menunjukkan tren penurunan yang signifikan dari 2021 hingga 2024. Faktor utama yang mungkin memengaruhi adalah kondisi ekonomi lokal, kepatuhan perusahaan, dan efektivitas sosialisasi program. Faktor penyebab masih rendahnya cakupan kepesertaan jaminan ketenagakerjaan antara lain ketidaktahuan kalangan pekerja sektor informal akan program ini. Diperlukan upaya lebih intensif dalam edukasi, pengawasan kepatuhan, dan dukungan untuk sektor informal di Pekalongan. Berikut Gambaran cakupan kepesertaan jaminan ketenagakerjaan di Kota Pekalongan tahun 2021-2024:



Sumber: BPJS Ketenakerjaan Kota Pekalongan, 2025

Gambar II-44

Cakupan Kepesertaan Jaminan Ketenagakerjaan Kota Pekalongan Tahun 2021-2024

2.3.2.4. Pariwisata

Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara yang berkunjung di Kota Pekalongan dari tahun 2020 hingga 2024 mengalami fluktuasi. Kunjungan wisatawan mancanegara terbanyak di tahun 2023 yaitu 296 wisatawan dan paling sedikit di tahun 2021 sebanyak 1 wisatawan. Museum Batik merupakan objek wisata yang paling digemari wisatawan mancanegara.

Kondisi hal tersebut sedikit berbeda dengan sektor pariwisata Jawa Tengah yang mengalami tren kenaikan setiap tahunnya. Hal tersebut terlihat sejak tahun 2020 dimana pertumbuhan PDRB sektor pariwisata sebesar 2,99 persen menjadi 3,56 persen di tahun 2024. Pertumbuhan sektor pariwisata Jawa Tengah salah satunya disebabkan karena adanya peningkatan jumlah kunjungan wisatawan baik nusantara maupun mancanegara. Tamu wisatawan mancanegara yang berkunjung di Kota Pekalongan dapat terlihat pada tabel di bawah ini:

Tabel II-49
Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara di Kota Pekalongan Tahun 2020-2024

No	Objek Wisata	Kunjungan Wisman				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Pantai Pasir Kencana	-	-	-	-	-
2.	Pantai Slamaran	-	-	-	-	-
3.	Museum Batik	138	1	85	236	200
4.	Wisata Bahari PPNP	5	-	-	-	-
5.	PMP	6	-	-	-	-
6.	Grosir Setono	34	-	-	-	-
7.	Dreams Big Park	5	-	-	-	-
8.	Dupan Water Park	-	-	-	-	-
9.	Kampung Wisata Religi Sapuro	3	-	-	56	-
10.	Kampung ATBM Medono	-	-	-	-	-
11.	Kampung Batik Kauman	7	-	-	-	-
12.	Kampung Batik Pesindon	2	-	-	-	-
13.	Kampung Canting Landungsari	-	-	-	-	-
14.	Festival dan Seni Budaya	6	-	4	4	6
Jumlah		206	1	89	296	206

Sumber: Dinparbudpora, 2025

Tahun 2024 mengalami penurunan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara jika dibandingkan dengan tahun 2023, hal tersebut terlihat dari kunjungan di Museum Batik dan Kampung Wisata Religi Sapuro. Namun demikian, adanya peningkatan kunjungan di festival dan seni budaya dari tahun 2023 sebanyak 4 wisman menjadi 6 wisman di tahun 2024. Penurunan kunjungan baik di Museum Batik maupun di Kampung Wisata Religi Sapuro disinyalir disebabkan oleh pemasaran pariwisata yang belum efektif dan sinergi untuk menarik kunjungan wisatawan mancanegara. Selain itu juga peran sumber daya manusia dalam menyinergikan semua pihak untuk pengembangan wisata belum berjalan optimal. Infrastruktur dan fasilitas pariwisata seperti transportasi wisata yang nyaman, aman dan terintegrasi serta fasilitas pendukung lainnya seperti toilet bersih masih perlu untuk ditingkatkan keberadaannya. Aglomerasi Petanglong yang sudah direncanakan oleh Pemerintah Provinsi masih membutuhkan dukungan penuh dari Pemerintah Kota Pekalongan.

2.3.2.5. PDRB per Kapita

Salah satu indikator tingkat kemakmuran penduduk di suatu daerah/wilayah dapat dilihat dari nilai PDRB per kapita, yang merupakan hasil bagi antara nilai tambah yang

dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi dengan jumlah penduduk. Oleh karena itu, besar kecilnya jumlah penduduk akan mempengaruhi nilai PDRB per kapita, sedangkan besar kecilnya nilai PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor-faktor produksi yang terdapat di daerah tersebut. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk.

Tabel II-50
Nilai PDRB, PDRB Per Kapita dan Pertumbuhan
PDRB Per Kapita Kota Pekalongan tahun 2020-2024

Uraian	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Nilai PDRB					
- ADHB (Miliar Rp)	10.848,87	11.460,58	12.590,98	13.744,22	14.766,95
- ADHK (Miliar Rp)	7.337,83	7.601,49	8.039,46	8.476,55	8.928,80
PDRB Per Kapita					
- ADHB (Juta Rp)	35,32	37,17	40,12	43,29	45,99
- ADHK (Juta Rp)	23,89	24,66	25,61	26,70	27,81
Pertumbuhan PDRB per Kapita					
- ADHB (persen)	-0,25	5,24	7,92	6,48	6,25
- ADHK (persen)	-1,88	3,20	3,89	2,85	4,16

Sumber: BPS Kota Pekalongan (diolah), 2025

Perekonomian Kota Pekalongan menunjukkan tren pertumbuhan yang positif selama periode 2020-2024, sebagaimana terlihat dari perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan PDRB per kapita. Nilai PDRB atas dasar harga berlaku (ADHB) meningkat dari Rp10.848,87 miliar pada tahun 2020 menjadi Rp14.766,95 miliar pada tahun 2024, sementara PDRB atas dasar harga konstan (ADHK) juga mengalami kenaikan dari Rp7.337,83 miliar menjadi Rp8.928,80 miliar dalam periode yang sama. Peningkatan ini mencerminkan pertumbuhan ekonomi yang stabil, meskipun sempat mengalami kontraksi pada tahun 2020 akibat dampak pandemi *Covid-19*.

PDRB per kapita ADHB menunjukkan peningkatan dari Rp. 35,32 juta pada tahun 2020 menjadi Rp. 45,99 juta pada tahun 2024, sementara PDRB per kapita ADHK naik dari Rp. 23,89 juta menjadi Rp. 27,81 juta, mencerminkan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara riil. Dari sisi pertumbuhan, tahun 2020 mencatat kontraksi sebesar -0,25 persen untuk ADHB dan -1,88 persen untuk ADHK, namun pemulihan mulai terjadi pada tahun 2021 dengan pertumbuhan masing-masing sebesar 5,24 persen dan 3,20 persen. Pertumbuhan ekonomi terus berlanjut hingga 2024 dengan laju pertumbuhan yang cukup stabil di kisaran 6-7 persen untuk ADHB dan sekitar 3-4 persen untuk ADHK. Meskipun demikian, tantangan ke depan adalah memastikan pertumbuhan ekonomi tetap berkelanjutan dan merata di seluruh sektor, sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat Kota Pekalongan.

2.3.2.6. Struktur Ekonomi

Struktur perekonomian Kota Pekalongan tidak bergeser dari lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, lapangan usaha Industri Pengolahan dan lapangan usaha Konstruksi, yang terlihat dari peranan lapangan usaha tersebut setiap tahunnya terhadap pembentukan PDRB Kota Pekalongan selama tahun 2020-2024. Hal tersebut merupakan perwujudan perkembangan sebuah kota, dimana sektor primer sudah tidak mendominasi lagi dalam perekonomian.

Pada tahun 2024, kontribusi terbesar struktur perekonomian Kota Pekalongan adalah lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 20,76 persen; lapangan usaha Industri Pengolahan sebesar 19,86 persen; dan lapangan usaha Konstruksi sebesar 15,84 persen. Ketiga lapangan usaha tersebut yang selalu mendominasi kontribusi terhadap perekonomian. Sementara itu, peranan lapangan usaha lainnya berkisar antara 0-7 persen. Struktur perekonomian Kota Pekalongan secara lengkap dalam 5 (lima) tahun terakhir yang didasarkan atas nilai PDRB atas dasar harga berlaku disajikan dalam tabel berikut.

Tabel II-51
Kontribusi Sektor Lapangan Usaha terhadap PDRB
Kota Pekalongan Tahun 2020-2024 (persen)

Lapangan Usaha		2020	2021	2022	2023	2024
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	5,09	4,79	4,71	4,48	4,57
B	Pertambangan dan Penggalian	-	-	-	-	-
C	Industri Pengolahan	21,34	21,15	20,83	20,44	19,86
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,15	0,15	0,14	0,15	0,15
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,12	0,12	0,11	0,11	0,11
F	Konstruksi	14,54	15,46	15,12	15,64	15,84
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	21,38	21,59	21,10	21,05	20,76
H	Transportasi dan Pergudangan	5,02	5,06	7,28	7,79	7,89
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	5,31	5,36	5,57	5,84	6,38
J	Informasi dan Komunikasi	5,13	5,07	4,75	4,74	4,73
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	6,21	6,22	6,15	5,93	5,69
L	Real Estat	2,73	2,66	2,58	2,54	2,55
M,N	Jasa Perusahaan	0,43	0,42	0,42	0,43	0,44
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	4,49	4,17	3,94	3,72	3,66
P	Jasa Pendidikan	4,72	4,54	4,16	4,06	4,20
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,44	1,40	1,33	1,30	1,29
R,S,T,U	Jasa lainnya	1,90	1,83	1,82	1,80	1,88
Produk Domestik Regional Bruto		100	100	100	100	100

Sumber: Kota Pekalongan Dalam Angka Tahun 2025, 2025

PDRB Kota Pekalongan menurut lapangan usaha dirinci menjadi 17 kategori lapangan usaha dan sebagian besar kategori dirinci lagi menjadi subkategori. Pemecahan menjadi subkategori ini disesuaikan dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2009. Perkembangan setiap lapangan usaha diuraikan di bawah ini.

1. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan

Kategori ini mencakup subkategori usaha Pertanian yang terdiri atas tanaman pangan, tanaman hortikultura, tanaman perkebunan, peternakan, dan jasa pertanian dan perburuan, sub kategori usaha Kehutanan dan Penebangan Kayu, dan subkategori usaha Perikanan. Lapangan usaha ini masih menjadi harapan dalam penyerapan tenaga kerja.

Pada tahun 2024, peranan pada kategori atau lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan terhadap PDRB atas dasar harga berlaku adalah sebesar 4,57 persen.

Peranan lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan relatif stagnan dikarenakan Kota Pekalongan berkembang dalam pelayanan ke wilayah sekitarnya dan kecenderungan perkembangan perkotaan bahwa sektor primer tidak dapat berkembang optimal, terutama sub sektor pertanian, diakibatkan keterbatasan lahan pertanian karena untuk penggunaan kegiatan yang dianggap lebih produktif dan sebagian wilayah Kota Pekalongan terdampak rob. Nilai produksi sub sektor perikanan jika dibandingkan dengan masa kejayaan perikanan Kota Pekalongan yang lalu, cukup kecil dan belum berkembang sesuai harapan, terutama produksi perikanan tangkap. Hal ini dikarenakan kendala teknis sedimentasi termasuk pengelolaannya sehingga semakin sedikit kapal perikanan yang membongkar hasil tangkapannya di Kota Pekalongan. Dengan kondisi tersebut maka lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan memiliki nilai produksi barang dan jasa yang relatif stagnan.

Meskipun kontribusi sektor ini relatif kecil, yaitu sekitar 4,57 persen, dampak positif dari pembangunan bendung sangat terasa pada sub-sektor perikanan. Sebelum adanya bendung, sektor perikanan mengalami penurunan produktivitas akibat sedimentasi dan banjir rob yang merusak tambak dan mengurangi hasil tangkap ikan. Rencana operasionalisasi Pasar Banjarsari juga diharapkan dapat membantu pemasaran hasil perikanan dan pertanian lokal. Dengan adanya pusat distribusi yang lebih baik, nelayan dan petani dapat memasarkan hasil panennya secara langsung dengan harga yang lebih kompetitif. Hal ini berpotensi meningkatkan pendapatan bagi petani dan nelayan serta memperkuat kontribusi sektor primer terhadap PDRB.

Sementara itu untuk kondisi peternakan di Kota Pekalongan dari tahun 2020-2024 cenderung menurun. Hal ini selain disebabkan karena faktor keterbatasan lahan sebagai akibat dari perluasan lahan permukiman juga berkurangnya jumlah peternak di Kota Pekalongan. Secara ringkas perkembangan peternakan berdasarkan jenis ternak dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel II-52
Peternakan di Kota Pekalongan Tahun 2020-2024

No	Jenis Ternak	2020	2021	2022	2023	2024
1	Sapi Perah	273	318	323	328	255
2	Sapi Potong	286	307	319	348	155
3	Kerbau	39	38	41	42	10
4	Kuda	0	0	0	0	0
5	Kambing	2310	2426	2599	2756	1609
6	Domba	1200	940	956	1025	816

Sumber: pusaka.pekalongankota.go.id, 2025

2. Industri Pengolahan

Kategori ini mencakup subkategori usaha Industri Pengolahan yang terdiri atas Industri Batubara dan Pengilangan Minyak, Industri Makanan dan Minuman, Pengolahan Tembakau, Industri Tekstil dan Pakaian Jadi, Industri Kulit; Barang dari Kulit dan Alas Kaki, Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya, Industri Kertas dan Barang dari Kertas, Percetakan dan Reproduksi Media Rekaman, Industri Kimia, Farmasi dan Obat Tradisional, Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik, Industri Barang Galian bukan Logam, Industri Logam Dasar, Industri Barang dari Logam, Komputer, Barang Elektronik, Optik dan Peralatan Listrik, Industri Mesin dan

Perlengkapan YTDL, Industri Alat Angkutan, Industri Furnitur dan Industri pengolahan lainnya, jasa reparasi dan pemasangan mesin dan peralatan. Kategori ini memiliki peranan dalam sektor perekonomian PDRB Kota Pekalongan sebesar 19,86 persen pada tahun 2024.

Peranan lapangan usaha Industri Pengolahan berfluktuasi dari tahun ke tahun. Pada tahun 2020 kontribusinya sebesar 21,34 persen. Selanjutnya, pada tahun 2021 melemah menjadi 21,15 persen dan melemah kembali menjadi 20,83 persen pada tahun 2023. Pada tahun 2023 peranannya kembali melemah menjadi 20,44 persen. Pada tahun 2024 melemah di angka 19,86 persen.

Industri pengolahan menyumbang 19,86 persen terhadap PDRB pada tahun 2024. Sebelumnya, industri tekstil, makanan, dan perikanan mengalami kendala akibat banjir yang sering kali merusak bahan baku dan memperlambat proses produksi. Dengan adanya bendung dan tanggul, kawasan industri yang berada di pesisir mendapatkan perlindungan yang lebih baik, sehingga produktivitas dapat meningkat dan potensi kerugian berkurang.

Rencana operasionalisasi Pasar Banjarsari juga akan mendukung sektor industri pengolahan, terutama dalam memasarkan produk olahan lokal. Dengan adanya fasilitas distribusi yang lebih modern dan terstruktur, industri pengolahan akan lebih mudah menyalurkan produknya langsung ke konsumen. Hal ini membuka peluang bagi pengusaha lokal untuk meningkatkan skala produksinya serta memperluas jangkauan pasar hingga ke wilayah lain di Jawa Tengah.

3. Pengadaan Listrik dan Gas

Kategori Pengadaan Listrik dan Gas, mempunyai peran sebesar 0,15 persen terhadap perekonomian Kota Pekalongan pada tahun 2024 dan 2023, meningkat dibanding tahun 2022 yaitu 0,14 persen. Peran kategori ini dalam struktur perekonomian cenderung stagnan dalam kurun waktu 2020 sampai dengan 2024.

4. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang

Kategori ini mencakup kegiatan ekonomi pengumpulan, pengolahan dan pendistribusian air melalui berbagai saluran pipa untuk kebutuhan rumah tangga dan industri. Pengoperasian peralatan irigasi untuk keperluan pertanian tidak termasuk dalam kategori ini. Peranan kategori ini terhadap struktur perekonomian di Kota Pekalongan cenderung *stagnan* selama 2020-2024 yaitu sebesar 0,12 persen pada tahun 2020 dan 2021, menurun menjadi 0,11 persen pada tahun 2022 sampai dengan tahun 2024.

5. Konstruksi

Secara umum, peranan lapangan usaha Konstruksi terhadap perekonomian Kota Pekalongan berfluktuatif. Peranan lapangan usaha ini pada perekonomian cenderung meningkat yaitu tahun 2020 sebesar 14,54 persen, tahun 2021 sebesar 15,46 persen dan menurun lagi sebesar 15,12 persen di tahun 2022 dan mengalami kenaikan pada tahun 2023 yaitu sebesar 15,64 persen, serta kembali meningkat di tahun 2024 sebesar 15,84 persen.

Pembangunan Tanggul dan Bendung Gerak Loji Banger sendiri merupakan salah satu proyek konstruksi besar yang menyerap tenaga kerja dan investasi yang cukup tinggi. Selain itu, pembangunan Pasar Banjarsari juga memberikan dampak positif terhadap sektor konstruksi. Proyek ini tidak hanya mencakup pembangunan gedung pasar, tetapi juga infrastruktur pendukung seperti area parkir, jalan akses, dan fasilitas pengelolaan limbah. Adanya proyek-proyek konstruksi baru ini meningkatkan permintaan tenaga kerja

di sektor konstruksi serta memperkuat kontribusi sektor ini terhadap PDRB Kota Pekalongan.

6. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor

Selama lima tahun terakhir, lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor mempunyai peranan terbesar dibandingkan lapangan usaha lainnya, terhadap PDRB Kota Pekalongan. Peranan lapangan usaha ini selalu lebih dari 20 persen.

Lapangan usaha ini menjadi penyumbang terbesar bagi PDRB Kota Pekalongan dengan kontribusi sebesar 20,76 persen pada tahun 2024. Keberhasilan Bendung Gerak Loji Banger memberikan dampak positif pada kelancaran distribusi barang. Sebelum adanya bendung, banjir rob seringkali mengganggu operasional pusat perdagangan dan menyebabkan kerugian yang tidak sedikit bagi pelaku usaha. Dengan teratasinya masalah banjir, aktivitas distribusi barang menjadi lebih lancar dan efisien.

Rencana operasionalisasi Pasar Banjarsari akan semakin memperkuat sektor ini. Pasar Banjarsari yang direncanakan sebagai pusat grosir modern dan tradisional dapat menjadi penggerak utama peningkatan transaksi perdagangan. Selain menyediakan fasilitas yang lebih baik bagi pedagang, pasar ini juga akan terintegrasi dengan sistem transportasi yang lebih efisien, sehingga mempercepat arus barang dan meningkatkan volume transaksi. Pasar ini diharapkan mampu menyerap lebih banyak tenaga kerja dan meningkatkan pendapatan pedagang kecil serta UMKM yang bergerak di bidang kuliner, kerajinan, dan perdagangan ritel.

7. Transportasi dan Pergudangan

Lapangan usaha Transportasi dan Pergudangan terdiri dari 6 (enam) sub kategori, yaitu Angkutan Rel, Angkutan Darat, Angkutan Laut, Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan, Angkutan Udara, serta Pergudangan dan Jasa Penunjang Angkutan. Kota Pekalongan memiliki posisi strategis dalam kerangka lalu lintas Pulau Jawa sehingga lapangan usaha ini merupakan salah satu sektor yang strategis.

Lapangan usaha ini memiliki peranan yang berfluktuatif pada tahun 2020-2024 yaitu berturut-turut sebesar 5,02 persen di tahun 2020. Perlahan menguat menjadi 5,06 persen di tahun 2021 sampai 7,89 persen pada tahun 2024, peranan lapangan usaha ini turun drastis sebagai dampak pandemi *Covid-19* karena sektor transportasi merupakan salah satu sektor yang cukup terkena dampak pandemi. Namun pada tahun 2022 dan tahun 2023 peranan lapangan usaha ini meningkat tajam menjadi sebesar 7,28 persen dan 7,79 persen.

8. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum

Perkembangan lapangan usaha ini selama lima tahun terakhir cenderung *stagnan* di kisaran 5 persen. Peranan tahun 2020-2024 memiliki kecenderungan yang meningkat secara perlahan. Peranan tahun 2020 sebesar 5,31 persen, pada tahun 2021 dan 2022 peranannya meningkat menjadi 5,36 persen dan 5,57 persen dan kembali meningkat di tahun 2023 sebesar 5,84 persen. Pada tahun 2024 meningkat sebesar 6,38 persen. Dari perkembangan tersebut, dapat diidentifikasi bahwa lapangan usaha ini menunjukkan peranannya yang menguat, namun sangat terdampak pandemi *Covid-19* pada tahun 2020, akibat sektor ini global sangat terpengaruh. Dengan berkurangnya risiko banjir, sektor pariwisata dan perhotelan di Kota Pekalongan dapat beroperasi lebih optimal.

9. Informasi dan Komunikasi

Lapangan usaha Informasi dan Komunikasi memiliki peranan sebagai penunjang aktivitas di setiap bidang perekonomian. Dalam era globalisasi, peranan kategori ini menjadi indikator kemajuan suatu daerah, terutama jasa telekomunikasi.

Peranan kategori ini terhadap PDRB Kota Pekalongan secara umum menurun dari tahun 2020-2024. Tahun 2020 peranan lapangan usaha ini sebesar 5,13 persen, tahun 2021 sebesar 5,07 persen dan tahun 2022 sebesar 4,75 persen. Selama tiga tahun tersebut menunjukkan penurunan persentase secara perlahan. Penurunan pada tahun 2020 merupakan dampak pandemi, dimana lapangan usaha ini tetap berkembang, sementara lapangan usaha lainnya mengalami penurunan. Setelah menguatnya lapangan usaha lainnya maka peranan lapangan usaha Informasi dan Komunikasi pada tahun 2023 dan tahun 2024 menurun menjadi 4,74 persen dan 4,73 persen.

10. Jasa Keuangan dan Asuransi

Secara umum, selama 5 (lima) tahun terakhir peranan lapangan usaha ini pada perekonomian Kota Pekalongan cenderung menurun. Peranan lapangan usaha ini, tahun 2020 sebesar 6,21 persen, tahun 2021 meningkat sebesar 6,22 persen, dan tahun 2022-2024 berturut-turut melemah menjadi sebesar 6,15 persen, 5,93 persen dan 5,69 persen. Penurunan ini dipengaruhi oleh kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya stabil serta adanya pergeseran preferensi masyarakat terhadap investasi yang lebih aman selama masa ketidakpastian ekonomi.

11. Real Estate

Lapangan usaha Real Estate memiliki peranan yang cenderung menurun terhadap PDRB Kota Pekalongan selama 5 (lima) tahun terakhir. Peranan lapangan usaha ini pada tahun 2020 sebesar 2,73 persen, menurun menjadi 2,66 persen pada tahun 2021. Pada tahun 2022-2023 semakin melemah menjadi 2,58 persen dan 2,54 persen. Selanjutnya meningkat pada tahun 2024 sebesar 2,55 persen.

12. Jasa Perusahaan

Selama 5 tahun terakhir, peranan dalam struktur perekonomian di Kota Pekalongan, lapangan usaha Jasa Perusahaan cenderung stagnan di kisaran 0,4 persen. Peranan lapangan usaha ini tahun 2020 sebesar 0,43 persen, tahun 2021 dan 2022 menurun sebesar 0,42 persen, tahun 2023 mengalami kenaikan menjadi 0,43 persen. Selanjutnya meningkat kembali sebesar 0,44 di tahun 2024. Dibandingkan lapangan usaha lainnya, lapangan usaha ini memiliki peranan yang paling kecil dari tahun ke tahun.

13. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib

Kategori ini meliputi kegiatan yang sifatnya pemerintahan, yang umumnya dilakukan oleh administrasi pemerintahan termasuk juga perUndang-undangan dan penterjemahan hukum yang berkaitan dengan pengadilan dan menurut peraturannya. Selama tahun 2020-2024 peranan lapangan usaha menunjukkan kecenderungan yang menurun. Peranan pada tahun 2020 menjadi sebesar 4,49 persen. Kemudian menurun tajam di tahun 2021-2024 masing-masing menjadi sebesar 4,17 persen, 3,94 persen, 3,72 persen dan 3,66 persen. Menguatnya peranan lapangan usaha ini pada tahun 2020 dimungkinkan karena menurunnya peranan lapangan usaha lain sebagai dampak pandemi *Covid-19*. Setelah perekonomian meningkat kembali pada tahun 2021 maka peranan lapangan usaha ini menunjukkan penurunan yang sangat signifikan.

14. Jasa Pendidikan

Secara umum peranan lapangan usaha Jasa Pendidikan cenderung menurun dari tahun ke tahun. Pada tahun 2020, peranan lapangan usaha ini sebesar 4,72 persen dan di tahun 2021 menurun menjadi sebesar 4,54 persen. Tahun 2022 peranannya menurun menjadi sebesar 4,16 persen, menurun kembali menjadi sebesar 4,06 persen pada tahun 2023 dan mengalami kenaikan menjadi 4,20 persen di tahun 2024. Kedua sektor ini menunjukkan tren menurun selama periode 2020-2024. Untuk jasa pendidikan, penurunan ini disebabkan oleh perubahan pola pendidikan selama pandemi, seperti pembelajaran daring yang mengurangi biaya operasional lembaga pendidikan.

15. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial

Lapangan usaha ini mencakup kegiatan penyediaan jasa kesehatan dan kegiatan sosial yang cukup luas cakupannya. Dalam periode tahun 2020-2024 peranan lapangan usaha ini cenderung menurun. Pada tahun 2020 peranannya 1,44 persen. Menurun di tahun 2021 sebesar 1,40 persen dan kembali menurun pada tahun 2022-2024 yaitu sebesar 1,33 persen, 1,30 persen dan 1,29 persen. Untuk jasa kesehatan menunjukkan penurunan kontribusi setelah masa puncak pandemi berakhir dan berkurangnya layanan kesehatan terkait penanganan Covid-19.

16. Jasa lainnya

Peranan lapangan usaha Jasa Lainnya terhadap perekonomian Kota Pekalongan cenderung menurun dari tahun ke tahun. Peranan lapangan usaha ini tahun 2020 sebesar 1,90 persen, dan tahun 2021-2023 turun sebesar 1,83 persen, 1,82 persen dan 1,80 persen. Pada tahun 2024 meningkat kembali menjadi sebesar 1,88 persen.

2.3.2.7. Rumah Tangga dengan Akses Internet

Kondisi Kota Pekalongan yang berada pada dataran rendah dengan luas wilayah hanya 46,42 km² dan bentangan terjauh hanya 9 km sangat memungkinkan terjangkaunya akses pada radius jangkauan operator seluler ataupun operator internet. Di samping itu, hampir semua aktivitas kehidupan saat ini memanfaatkan internet sebagai jaringan layanan utama. Hal ini dapat dilihat pada data persentase rumah tangga dengan akses internet berikut.

Tabel II-53
Rumah Tangga dengan Akses Internet Kota Pekalongan
Tahun 2020-2024

Tahun	Rumah Tangga	Rumah Tangga dengan Akses Internet (persen)
2020	76.788	100
2021	77.078	100
2022	77.436	100
2023	79.381	100
2024	80.274	100

Sumber: data diolah, 2025

2.3.2.7. Konsumsi Rumah Tangga

Nilai pengeluaran konsumsi rumah tangga dalam PDRB ADHB. Nilai pengeluaran konsumsi rumah tangga dalam PDRB ADHB menunjukkan kecenderungan peningkatan dari tahun ke tahun. Jika pada tahun 2020 nilai pengeluaran konsumsi rumah tangga dalam PDRB ADHB adalah Rp. 7355,26 Milyar maka pada tahun 2024 sebesar Rp. 9.701,22 Milyar atau mengalami peningkatan sebesar Rp. 2.345,96 Milyar selama lima tahun ini atau mengalami

peningkatan rata-rata per tahun sebesar 6,38 persen. Jika dicermati maka peningkatan nilai pengeluaran konsumsi rumah tangga dalam PDRB ADHB rata-rata per tahun lebih besar dibandingkan pertumbuhan ekonomi Kota Pekalongan setiap tahun. Kontribusi nilai pengeluaran konsumsi rumah tangga dalam PDRB ADHB juga relatif cukup besar dibandingkan komponen lainnya, maka nilai pengeluaran konsumsi rumah tangga dalam PDRB ADHB berimplikasi sangat kuat terhadap pertumbuhan ekonomi Kota Pekalongan. Angka pertumbuhan rata-rata nilai pengeluaran konsumsi rumah tangga dalam PDRB ADHB per tahun disebabkan karena daya beli masyarakat Kota Pekalongan yang masih terjaga serta inflasi yang masih terkendali.

Tabel II-54
Nilai Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga dalam PDRB ADHB
Kota Pekalongan Tahun 2020-2024

Tahun	Nilai Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga dalam PDRB ADHB (Miliar Rupiah)
2020	7355,26
2021	7585,83
2022	8292,36
2023	9009,78
2024	9701,22

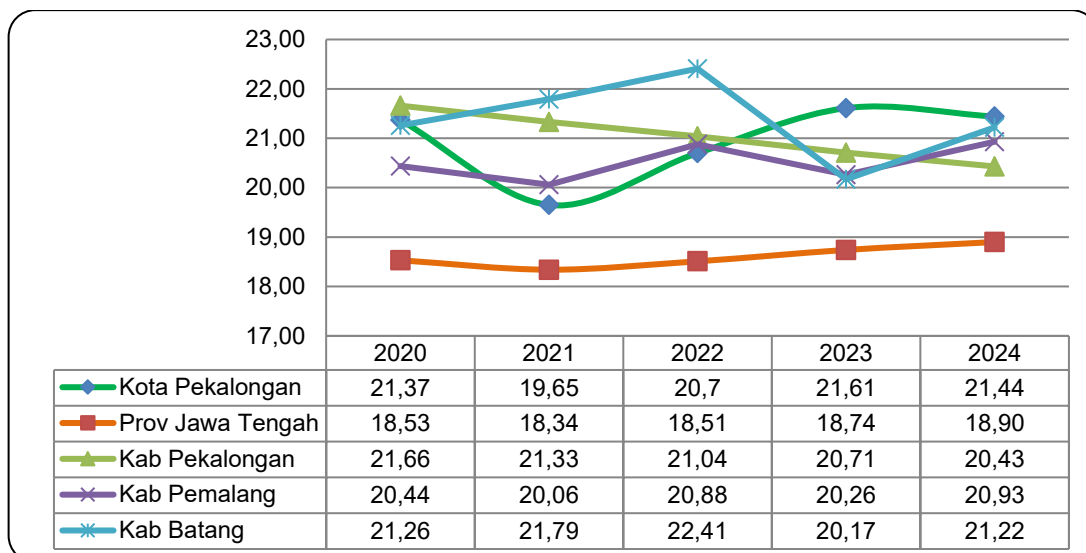
Sumber: Bapperida Kota Pekalongan, data diolah, 2025

Di era sekarang, rumah tangga kelas menengah menjadi bagian yang sangat penting dalam perekonomian Indonesia. Tidak hanya dari sisi jumlah yang terus meningkat akan tetapi perubahan gaya hidup mendorong konsumsi rumah tangga kelompok masyarakat ini mengalami peningkatan. Didukung lagi dengan melimpahnya penawaran dan persediaan berbagai jenis barang dan jasa di pasar domestik, sehingga memicu meningkatnya konsumsi. Selain itu, konsumsi tersebut juga didorong oleh populasi kaum muda yang terus bertambah hingga meningkatkan penggunaan belanja *online*. Meski isu menurunnya daya beli kalangan menengah, namun dari sisi konsumsi rumah tangga tetap solid di kisaran angka pertumbuhan di atas 5 persen, lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi.

2.3.2.8. Distribusi Pengeluaran Berdasarkan Kriteria Bank Dunia

Distribusi pengeluaran berdasarkan kriteria Bank Dunia di Kota Pekalongan selama periode 2020–2024 menunjukkan pola yang berfluktuasi, dengan kisaran antara 19,65 persen hingga 21,61 persen. Meskipun mengalami naik-turun, angka tersebut tetap berada dalam kategori ketimpangan rendah. Pada tahun 2024, distribusi pengeluaran Kota Pekalongan tercatat sebesar 21,44 persen, lebih tinggi dibandingkan rata-rata Provinsi Jawa Tengah yang mencapai 18,90 persen.

Jika dibandingkan dengan daerah sekitarnya, pada tahun 2024 distribusi pengeluaran Kota Pekalongan relatif lebih tinggi daripada Kabupaten Pekalongan (20,71%), Kabupaten Pemalang (20,93%), maupun Kabupaten Batang (21,22%). Hal ini mengindikasikan bahwa tingkat ketimpangan di Kota Pekalongan berada pada level yang lebih rendah (lebih merata) dibandingkan daerah sekitarnya. Dengan demikian, meskipun fluktuatif, distribusi pengeluaran Kota Pekalongan menunjukkan kondisi yang lebih baik dan lebih bermakna dalam mencerminkan pemerataan kesejahteraan masyarakat.



Sumber: Badan Pusat Statistik 2020-2024, 2025

Gambar II-45
Distribusi Pengeluaran Berdasarkan Kriteria Bank Dunia
Kota Pekalongan Tahun 2020-2024

2.3.2.9. Pembentukan Modal Tetap Bruto

Pertumbuhan ekonomi merupakan pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terdistribusi berdasarkan atas dasar harga berlaku menurut pengeluaran, dimana pada tahun 2022 menunjukkan bahwa sebagian besar yaitu 67,89 persen merupakan pengeluaran konsumsi rumah tangga, sebesar 38,69 persen merupakan pembentukan modal tetap bruto (PMTB), sebesar 7,53 persen merupakan pengeluaran konsumsi pemerintah, sebesar 1,23 persen merupakan pengeluaran konsumsi LNPRT, sebesar 0,44 persen merupakan perubahan inventori, serta sebesar -15,78 persen merupakan net ekspor barang dan jasa. PMTB adalah pengeluaran untuk barang modal yang mempunyai umur pemakaian lebih dari satu tahun dan tidak merupakan barang konsumsi. PMTB mencakup bangunan tempat tinggal dan bukan tempat tinggal, bangunan lain seperti jalan dan bandara, serta mesin dan peralatan.

PMTB dan persediaan merupakan faktor penting dalam mendorong pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Cara mengetahui informasi tentang PMTB dan persediaan, tidak terlepas dari upaya mengetahui besaran investasi yang dilakukan suatu wilayah atau negara dari tahun ke tahun. Bergeraknya perekonomian suatu wilayah atau negara ditentukan oleh faktor kapital dan tenaga kerja. Kedua faktor tersebut merupakan penggerak utama suatu perekonomian yang mengubah input menjadi output berupa barang dan jasa. Investasi diperlukan sebagai suatu bagian penting dalam suatu perekonomian, serta mempunyai keterkaitan langsung terhadap kegiatan ekonomi pada masa sekarang maupun masa yang akan datang. Dengan melakukan investasi, berarti kapasitas produksi juga meningkat yang pada gilirannya akan meningkatkan output, dan pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan masyarakat.

Tabel II-55
Pembentukan Modal Tetap Bruto Kota Pekalongan
Tahun 2020-2024

Tahun	Pembentukan Modal Tetap Bruto (persen)
2020	38,08

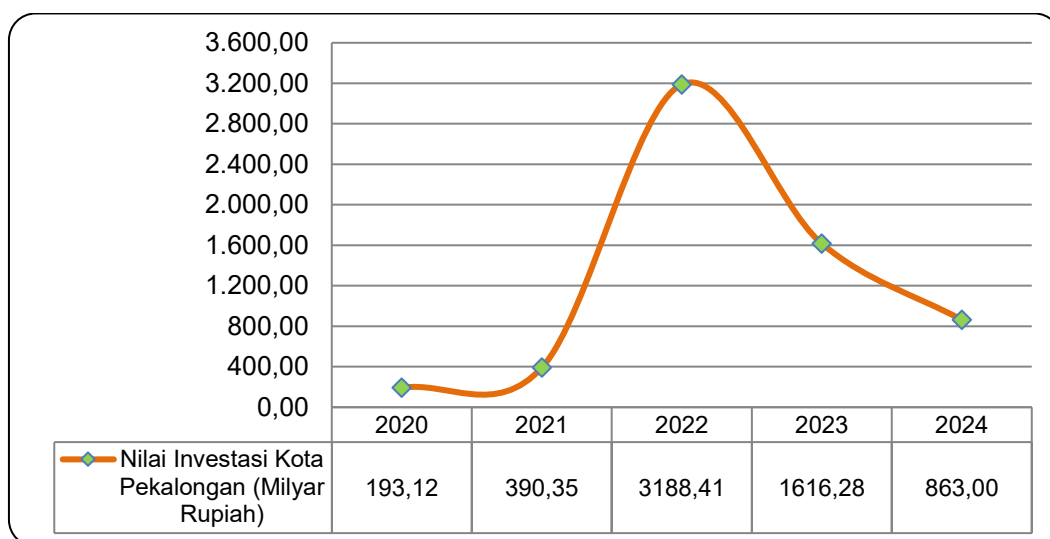
Tahun	Pembentukan Modal Tetap Bruto (persen)
2021	39,03
2022	37,53
2023	37,45
2024	39,15

Sumber: data diolah, 2025

PMTB Kota Pekalongan menunjukkan nilai yang berfluktuasi dari tahun ke tahun dan nilai PMTB tertinggi pada tahun 2024 yaitu sebesar 39,15 persen. Jika dibandingkan dengan PMTB Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020-2024 maka PMTB Kota Pekalongan relatif lebih tinggi karena PMTB Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2020 sebesar 31,01 persen dan pada tahun 2024 sebesar 30,53 persen. PMTB Provinsi Jawa Tengah juga menunjukkan nilai berfluktuasi dari tahun ke tahun. Pertumbuhan PMTB berfluktuasi, PMTB dalam bentuk bangunan memberikan proporsi lebih besar dibanding non-bangunan dalam PMTB. Rata-rata perbandingan antara kedua komponen ini adalah sekitar 85 persen untuk PMTB bangunan dan 15 persen untuk non-bangunan. Pertumbuhan PMTB bangunan cenderung lebih stabil dibandingkan non bangunan setiap tahunnya. Peningkatan pertumbuhan PMTB tidak terlepas dari kebijakan pemerintah dalam peningkatan pembangunan infrastruktur, seperti infrastruktur jalan, jembatan, sarana perhubungan, energi dan sebagainya. Peningkatan infrastruktur dapat mendukung laju pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan serta dapat meningkatkan daya saing di tengah persaingan global.

2.3.2.10. Nilai Investasi

Pemerintah Kota Pekalongan terus mendukung upaya pencapaian realisasi investasi dari tahun ke tahun melalui berbagai kebijakan dan aturan, terutama dengan semakin mudahnya pelayanan perizinan berusaha, pelayanan perizinan non berusaha maupun pelayanan non perizinan. Dengan keterbatasan wilayah dan sumber daya alam, Kota Pekalongan juga berusaha menciptakan kondisi daerah yang pro investasi yaitu dengan menguatkan perekonomian di sektor jasa dan perdagangan sehingga pertumbuhan ekonomi dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat di Kota Pekalongan. Berikut disajikan data perkembangan investasi di Kota Pekalongan.



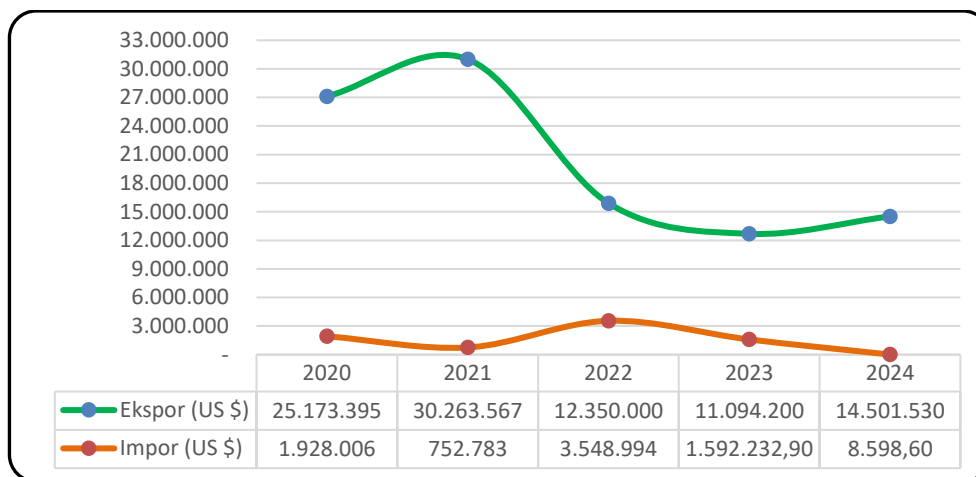
Sumber: DPMPTSP Kota Pekalongan, 2025

Gambar II-46
Perkembangan Nilai Investasi di Kota Pekalongan Tahun 2020-2024

2.3.2.11. Nilai Ekspor

Nilai ekspor tahun 2022 mengalami penurunan yang cukup tajam dibandingkan tahun sebelumnya, hal ini dikarenakan keadaan perdagangan luar negeri yang mengalami penurunan, dimana nilai ekspor perdagangan mengalami penurunan. Penurunan nilai ekspor perdagangan ini salah satunya disebabkan oleh terjadinya resesi global di tahun 2023. Adanya resesi global di tahun 2023 ini terasa semakin nyata dengan beberapa indikasi yang sudah mulai terjadi, seperti kenaikan suku bunga acuan secara agresif yang dilakukan bank sentral berbagai negara dalam upaya meredam laju inflasi dan kondisi perekonomian yang mulai lesu.

Kondisi perekonomian Indonesia yang mengalami kenaikan cukup signifikan pasca pandemi, dinilai cukup kuat untuk bertahan menghadapi ancaman terjadinya resesi global. Namun perlu untuk diwaspadai bahwa resesi ekonomi global yang terjadi terdapat ancaman yang akan berdampak salah satunya yaitu, permintaan ekspor untuk produk jadi Indonesia seperti tekstil dan kerajinan akan menurun terutama dari Amerika Serikat, Eropa dan Tiongkok. Dimana komoditas utama yang dihasilkan oleh Kota Pekalongan untuk di ekspor adalah tekstil dan kerajinan serta negara tujuan yang di tuju adalah Amerika Serikat, Eropa, Tiongkok dan negara lainnya. Dengan demikian, adanya perkiraan resesi global ini ternyata sudah mulai terjadi dan berdampak nyata pada nilai ekspor perdagangan Kota Pekalongan yang mulai mengalami penurunan. Data selengkapnya disajikan dalam Gambar II-47 berikut.



Sumber: Dindagkop dan UKM Kota Pekalongan, 2025

Gambar II-47
Realisasi Nilai Ekspor dan Impor di Kota Pekalongan Tahun 2020-2024

2.3.3. Infrastruktur Perkotaan dan Permukiman yang Berkualitas

2.3.3.1. Sarana Prasarana Perkotaan Dalam Kondisi Baik

1. Jalan

Jalan raya di Kota Pekalongan terbagi menjadi dua kategori berdasarkan kewenangan. Jalan raya milik Pemerintah Pusat dan jalan milik Pemerintah Kota. Kurun waktu 2020-2024, kondisi jalan di Kota Pekalongan mengalami perubahan. Pada tahun 2020 sepanjang 9,420 Km dengan kondisi baik 67,40 persen, kondisi sedang 20,16 persen dan kondisi rusak 12,42 persen. Pada tahun 2021, panjang jalan Negara menjadi 10,240 Km dengan kondisi baik 96,42 persen, kondisi sedang 0 persen dan kondisi rusak 3,58 persen. Pada tahun 2022 panjang jalan negara menjadi 10,240 Km dengan kondisi baik 100,00 persen, kondisi sedang 0 persen dan kondisi rusak 0,00 persen dan pada tahun 2023 panjang jalan negara menjadi 10,210 Km dengan kondisi baik 31,24 persen, kondisi sedang 63,85 persen dan kondisi rusak 4,89 persen. Sedangkan pada tahun 2024 panjang

jalan negara 10,240 km dengan kondisi baik 16,60 persen, kondisi sedang 68,61 persen dan kondisi rusak 11,24 persen.

Tabel II-56
Kondisi Jaringan Jalan Negara di Kota Pekalongan Tahun 2020-2024

Tahun	Panjang Jalan	Kondisi Baik		Kondisi Sedang		Kondisi Rusak	
	(km)	(km)	(persen)	(km)	(persen)	(km)	(persen)
2020	9,420	6,350	67,40	1,900	20,16	1,170	12,42
2021	10,240	9,874	96,42	0	0	0,366	3,58
2022	10,240	10,240	100,00	0	0	0	0
2023	10,210	3,190	31,24	6,520	63,85	0,50	4,89
2024	10,240	1,700	16,60	7,030	68,61	1,150	11,24

Sumber: Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Jawa Tengah-DIY dan DPUPR Kota Pekalongan, 2025

Sedangkan untuk jalan kota, dari tahun 2020 sampai 2021 tidak terdapat perubahan maupun penambahan ruas panjang jalan kota yaitu 153,41 km. Berdasarkan SK Wali Kota Pekalongan Nomor 600.1/0414 Tahun 2023 tentang Penetapan Ruas-Ruas Jalan dan Jembatan di Kota Pekalongan mengubah total Panjang jalan menjadi 150,274 km. Jalan dalam kondisi baik perkotaan di bawah kewenangan Pemerintah Kota Pekalongan pada tahun 2024 sepanjang 92,51 km. Selengkapnya disajikan dalam Tabel II-57 berikut.

Tabel II-57
Kondisi Jaringan Jalan Kota di Kota Pekalongan Tahun 2020-2024

Tahun	Panjang Jalan	Kondisi Baik		Kondisi Sedang		Kondisi Rusak	
	(km)	(km)	(persen)	(km)	(persen)	(km)	(persen)
2020	153,41	104,71	68,25	18,27	11,90	30,43	19,83
2021	153,41	96,37	62,82	27,25	17,77	29,79	19,42
2022	153,61	105,35	68,58	24,11	15,70	24,15	15,72
2023	150,27	118,60	78,92	4,86	3,24	26,81	17,84
2024	150,27	92,51	61,56	34,47	22,94	23,29	15,50

Sumber: DPUPR Kota Pekalongan, 2025

Persentase Panjang Jalan Kondisi Permukaan Mantap Kewenangan Kabupaten/Kota. Infrastruktur jalan merupakan salah satu pilar utama untuk kesejahteraan umum dan sebagai prasarana dasar dalam pelayanan umum dan pemanfaatan sumber daya ekonomi sebagai bagian dari sistem transportasi nasional melalui pendekatan pengembangan wilayah. Hal tersebut bertujuan agar tercapai konektivitas antarpusat kegiatan, keseimbangan, dan pemerataan pembangunan antar daerah, peningkatan perekonomian pusat dan daerah dalam kesatuan ekonomi nasional sesuai dengan amanat Pasal 33 ayat (4) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan disebutkan bahwa jalan menurut statusnya dikelompokkan ke dalam jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten, jalan kota, dan jalan desa. Jalan kota meliputi jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder yang menghubungkan antarpusat pelayanan dalam kota, pusat pelayanan dengan persil, antarpersil, antar pusat permukiman yang berada di dalam

kota, dan jalan poros kelurahan dalam wilayah kota. Penyelenggaraan, pengaturan, dan pembinaan jalan kota merupakan kewenangan Pemerintah Kota Pekalongan.

Kota Pekalongan memiliki kewenangan untuk jalan kota sepanjang 153,41 km dari tahun 2020 sampai 2021. Pada tahun tersebut tidak terdapat perubahan maupun penambahan ruas panjang jalan kota. Pada tahun 2022 terdapat penambahan ruas jalan sepanjang 200 meter dan pada tahun 2023 terdapat pengurangan total panjang menjadi 150,274 km dan ditetapkan melalui Keputusan Wali Kota Pekalongan Nomor 600.1/0414 Tahun 2023 tentang Penetapan Ruas-Ruas Jalan dan Jembatan di Kota Pekalongan. Kondisi jalan merupakan salah satu kriteria dalam standar pelayanan minimal ruas jalan yang harus dipenuhi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Adapun panjang jalan kondisi permukaan mantap yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Pekalongan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II-58
Persentase Panjang Jalan Kondisi Permukaan Mantap Kewenangan Kabupaten/ Kota di Kota Pekalongan Tahun 2020-2024

Tahun	Panjang Jalan Kota	Panjang Jalan dengan Kondisi Baik	Panjang Jalan dengan Kondisi Sedang	Panjang Jalan Kondisi Permukaan Mantap (Kondisi Baik + Sedang)	
	(km)	(km)	(km)	(km)	(persen)
2020	153,41	104,71	18,27	122,98	80,16
2021	153,41	96,37	27,25	123,62	80,58
2022	153,61	105,35	24,11	129,46	84,28
2023	150,27	118,60	4,86	123,46	82,16
2024	150,27	92,51	34,47	126,98	84,50

Sumber: DPUPR Kota Pekalongan (diolah), 2025

Berdasarkan tabel tersebut di atas dapat dilihat bahwa persentase panjang jalan kondisi permukaan mantap kewenangan Kabupaten/ Kota di Kota Pekalongan Tahun 2020-2024 memiliki nilai yang fluktuatif. Hal tersebut dipengaruhi oleh kondisi banjir rob yang menggenangi beberapa ruas jalan di Kota Pekalongan, sehingga menyebabkan ruas jalan tersebut mengalami kerusakan yang signifikan. Dalam upaya mengembalikan kondisi permukaan dengan pelayanan mantap diperlukan pemeliharaan rutin maupun rehabilitasi jalan dengan memperbaiki kerusakan-kerusakan yang terjadi pada ruas-ruas jalan tersebut.

2. Transportasi

Sebagai kota yang menghubungkan Kota Jakarta dan Kota Surabaya, Kota Pekalongan memiliki peran strategis dalam pembangunan infrastruktur sektor perhubungan. Lokasinya yang strategis juga digunakan sebagai tempat istirahat maupun sekedar transit untuk melanjutkan perjalanan ke daerah atau tempat selanjutnya. Saat ini terdapat dua jalur yang dapat dilalui kendaraan untuk melintasi Kota Pekalongan yaitu perlintasan Pantai Utara (Pantura) dan perlintasan jalan tol Transjawa yang semenjak tahun 2018 telah difungsikan. Dua jalur ini membagi kepadatan yang sebelumnya dibebankan pada satu jalur yaitu Jalur Pantura sehingga saat ini kepadatan yang terjadi akibat kendaraan besar yaitu truk dan bus berkurang.

Pada tahun 2020, pandemi *Covid-19* yang terjadi di seluruh dunia berdampak terhadap hampir semua sendi kehidupan, salah satunya yaitu adanya kebijakan pembatasan mobilitas. Dengan adanya kebijakan ini, arus lalu lintas menurun drastis yang mengakibatkan penurunan VC ratio menjadi 0,36. Meskipun demikian, mobilitas

darat tetap dapat dilakukan. Pada tahun 2021, sudah masuk era new normal dimana PPKM sudah mulai longgar dan pusat-pusat perbelanjaan sudah mulai dibuka kembali dan bermunculan yang baru. Hal ini menjadi daya tarik masyarakat untuk mengunjunginya sehingga mobilitas di perkotaan cenderung ramai kembali. Pada tahun 2021, VC Ratio mengalami peningkatan menjadi 0,49, menunjukkan adanya peningkatan volume lalu lintas dibandingkan kapasitas jalan yang tersedia. Namun, pada tahun 2022, VC Ratio menurun menjadi 0,39, yang mengindikasikan perbaikan dalam tingkat kelancaran lalu lintas. Pada tahun 2023, VC Ratio kembali mengalami peningkatan menjadi 0,44, dan bertahan di angka yang sama pada tahun 2024, yaitu 0,44. Stabilitas angka tersebut menunjukkan adanya konsistensi dalam kinerja lalu lintas, meskipun masih diperlukan upaya lanjutan untuk menjaga dan meningkatkan kualitas infrastruktur jalan demi mencegah terjadinya kemacetan di masa mendatang.

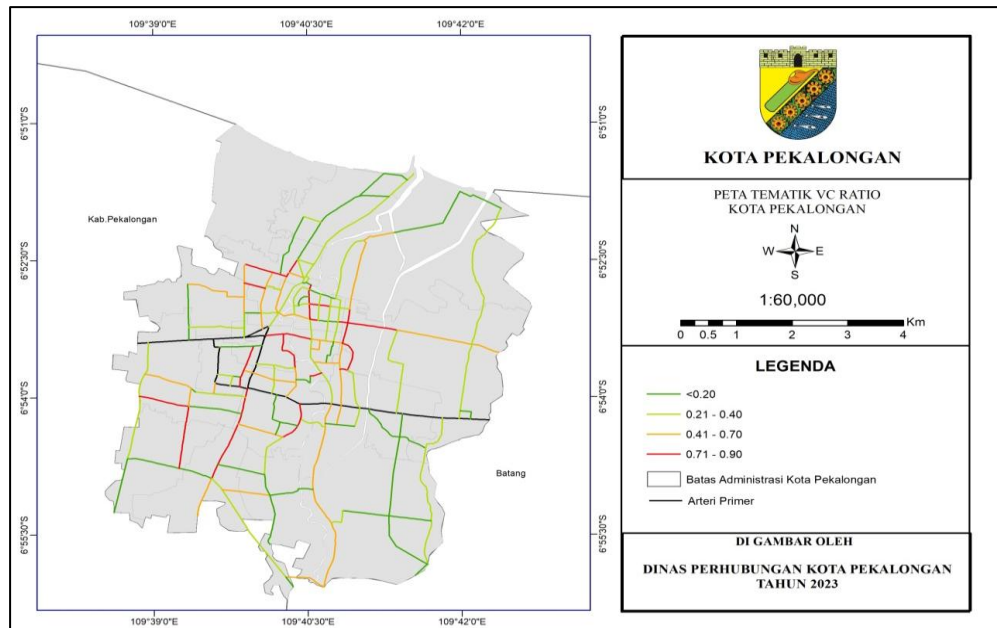
Range nilai VC *ratio* ditakegorikan ke dalam 6 (enam) tingkat pelayanan jalan sebagaimana disajikan dalam tabel berikut.

Tabel II-59
Kategori Tingkat Pelayanan Jalan

Tingkat Pelayanan	V/C Rasio
A	0,0 - 0,20
B	0,21 - 0,44
C	0,45 - 0,74
D	0,75 - 0,84
E	0,85 - 1,00
F	>1,00

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Pekalongan, 2025

Dari tabel tingkat pelayanan di atas, jalan – jalan yang memiliki tingkat pelayanan A, pada ruas tersebut kendaraan dapat memilih kecepatan yang dikehendaki. Ruas jalan yang memiliki tingkat pelayanan B, kendaraan dapat memilih kecepatannya namun kecepatan tersebut sedikit terbatas oleh arus lalu lintas. Ruas jalan yang memiliki tingkat pelayanan C kecepatannya dibatasi oleh arus lalu lintas. Ruas jalan yang memiliki tingkat pelayanan D arus mulai tidak stabil, kecepatan rendah, volume lalu lintas mendekati kapasitas ruas jalan yang ada. Ruas jalan yang memiliki tingkat pelayanan E, kecepatannya rendah volume sudah hampir sama dengan kapasitas yang ada, pada tingkat pelayanan ini ruas jalan bisa dikatakan mengalami kemacetan. Ruas jalan yang memiliki tingkat pelayanan F, arus yang terhambat, kecepatan rendah, volume diatas kapasitas, sering terjadi kemacetan pada waktu yang cukup lama. Peta V/C *Ratio* ruas jalan di Kota Pekalongan disajikan pada gambar berikut.



Sumber: Dinas Perhubungan Kota Pekalongan, 2025

Gambar II-48
Peta V/C Ratio Ruas Jalan di Kota Pekalongan

Berdasarkan gambar di atas, dapat dilihat peta kinerja ruas jalan di Kota Pekalongan. Persebaran lalu lintas yang tidak merata terjadi di Kota Pekalongan, hal itu terjadi karena pusat bangkitan dan tarikan lalu lintas (seperti pusat bisnis, pusat perbelanjaan, pusat perkantoran, acara khusus, objek pariwisata, dan lainnya) di Kota Pekalongan tidak merata pula. Sehingga terjadi kemacetan pada beberapa titik ruas di Kota Pekalongan karena pada lokasi terdapat pusat bangkitan dan tarikan lalu lintas, sehingga pola pergerakan lalu lintas warga kota pekalongan hanya pada ruas – ruas jalan di sekitar lokasi tersebut.

Oleh karena itu, pengembangan kawasan Pekalongan Baru sebagai pusat bangkitan dan tarikan lalu lintas yang baru dapat mengurangi kemacetan kendaraan serta pola pergerakan lalu lintas di kota pekalongan akan menjadi merata sehingga kemacetan akan berkurang. Pengembangan kawasan Pekalongan Baru dapat menjadikan persebaran lalu lintas yang merata. Serta dalam pengembangannya akan menimbulkan akses jalan baru guna kelancaran lalu lintas di Kawasan Pekalongan Baru. Kajian Lalu Lintas Kawasan Pekalongan Baru diperlukan untuk dapat membantu dalam mengidentifikasi solusi yang efektif dalam penentuan kebijakan penataan manajemen lalu lintas di kawasan Pekalongan Baru. Tingkat pelayanan disajikan dalam tabel berikut.

Tabel II-60
Kinerja Ruas Jalan di Kota Pekalongan yang Diukur Dari Tingkat Pelayanan

Tingkat Pelayanan A	Tingkat Pelayanan B	Tingkat Pelayanan C	Tingkat Pelayanan D
Jl. Pattimura Jl. Cenderawasih Jl. Samudera Pasai Jl. Achmad Alf Arslan D. Jl. Kenanga Jl. Surabaya Jl. Jetayu Jl. Merak Jl. Labuan Jl. Pattimura	Jl. Wachid Hasyim Jl. Hayam Wuruk Jl. Teratai Jl. Angkatan 45 Jl. Bandung Jl. Cempaka Jl. Jlamprang Jl. Supriyadi Jl. Diponegoro Jl. R.A Kartini	Jl. D. Sutomo Jl. Manggis Jl. Parang Garuda Raya Jl. Pelita III Jl. Jend. Sudirman Jl. Sunan Ampel Jl. Dharma Bhakti Jl. Dr. Cipto Jl. Tondano Jl. Untung Suropati	Jl. Dr. Setia Budi Jl. Merdeka Jl. Pemuda Jl. Letjen Suprpto

Tingkat Pelayanan A	Tingkat Pelayanan B	Tingkat Pelayanan C	Tingkat Pelayanan D
Jl. Cenderawasih Jl. Samudera Pasai Jl. Achmad Alf Arslan D. Jl. Kenanga Jl. Surabaya Jl. Jetayu Jl. Merak Jl. Labuan	Jl. Sulawesi Jl. Irian Jl. Sultan Agung Jl. Pantai Dewi Jl. Slamet Jl. Wilis Jl. Sriwijaya Jl. Ki Hajar Dewantara Jl. Jeruk Jl. Veteran Jl. Trikora Jl. WR. Supratman Jl. Bahagia Jl. Kemakmuran Jl. Manunggal Jl. Progo Jl. Belimbing Jl. Patriot Jl. Semarang Jl. Asem Binatur Jl. Kalimantan Jl. Ahmad Yani Jl. Majapahit Jl. Jawa Jl. Mataram	Jl. Gajah Mada Jl. Urip Sumoharjo Jl. Hasanudin Jl. P. Kemerdekaan Jl. Maninjau Jl. Karya Bhakti Jl. KH. Ahmad Dahlan Jl. KH. Mas Mansyur Jl. Tentara Pelajar Jl. Seruni Jl. Merpati / Parkit Jl. Nusantara Jl. KH. Saelan Jl. KH. Hasyim Ashari Jl. Melati Jl. H. Agus Salim Jl. Argopuro Jl. Kurinci Jl. Otto Iskandar Dinata Jl. HOS Cokroaminoto Jl. Salak Jl. Sumatera Jl. Ki Mangun Sarkoro Jl. Gatot Subroto Jl. Imam Bonjol Jl. Truntum Jl. Dr. Wahidin	

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Pekalongan, 2025

Hingga saat ini selain persebaran pola pergerakan kendaraan yang tidak merata, kepadatan lalu lintas dipengaruhi oleh lalu lintas regional dan lokal masih bercampur pada ruas-ruas jalan di wilayah Kota Pekalongan. Lalu lintas regional dan lokal masih bercampur pada ruas-ruas jalan di wilayah Kota Pekalongan. Lalu lintas regional yang mendominasi adalah kendaraan barang dan penumpang (AKAP maupun AKDP) yang berdimensi besar maupun kendaraan pribadi yang masih memilih melewati jalur jalan nasional dibandingkan jalan tol trans Jawa.

Kepadatan lalu lintas yang terjadi di Kota Pekalongan saat ini bercampur antara arus lalu lintas menerus dan arus lalu lintas lokal. Hal itu menyebabkan bercampurnya kendaraan-kendaraan angkutan barang yang bermuatan berat dan kendaraan penumpang dengan kendaraan-kendaraan warga lokal Kota Pekalongan sehingga menyebabkan kemacetan. Terutama pada ruas Jl. KH Mas Mansyur yang merupakan Jalur Pantura yang berpotongan dengan perlintasan kereta api *double track*. Pada saat kereta melintas maka akan terjadi antrian dan tundaan yang menyebabkan kemacetan lalu lintas. Namun, jika selanjutnya terdapat jalan lingkaran Petanglong, maka arus lalu lintas akan terurai, jadi arus lalu lintas dapat terbagi menjadi 3 yaitu perlintasan Pantura, jalan tol trans Jawa dan jalur lingkaran Petanglong.

Masih bercampurnya lalu lintas tersebut sangat berimplikasi bagi keselamatan, keamanan, ketertiban pengguna jalan, serta kebersihan dan kenyamanan kota terutama pada tata ruang kota. Dampak yang paling dirasakan adalah keamanan dan kenyamanan warga Kota Pekalongan dalam berlalu lintas karena bercampur dengan lalu lintas regional. Akibat lalu lintas yang bercampur, terutama kendaraan berdimensi besar, sebagian kawasan perdagangan dan jasa di wilayah Kota Pekalongan tidak bisa berkembang dengan optimal. Kondisi ini terutama terjadi pada koridor Jl. Jenderal Sudirman yang tidak berkembang. Salah satu sektor andalan Kota Pekalongan adalah

perdagangan dan jasa. Dengan terbatasnya luas wilayah serta kawasan perdagangan dan jasa, Pemerintah Kota Pekalongan memiliki kesulitan dalam mengembangkan kawasan perdagangan dan jasa di lokasi lain. Jika kawasan perdagangan dan jasa tidak bisa berkembang optimal tentunya akan berdampak juga bagi upaya-upaya pengembangan wilayah, khususnya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Oleh karena itu, salah satu upaya sistemik dalam mengatasi bercampurnya lalu lintas regional dan lokal di Kota Pekalongan adalah pembangunan jalan lingkar di Kota Pekalongan. Lebih tepatnya jalan lingkar Petanglong (Kota Pekalongan, Kabupaten Batang dan Kabupaten Pekalongan). Sesuai dengan Kebijakan Pengembangan Wilayah Provinsi Jawa Tengah, wilayah Petanglong, yang berpusat di Perkotaan Petanglong, merupakan salah satu wilayah Pengembangan di Jawa Tengah. Sesuai dengan RTRW Provinsi Jawa Tengah, perkotaan Petanglong merupakan salah satu kawasan strategis di Jawa Tengah. Jalan lingkar tersebut diharapkan berdampak bagi mengatasi permasalahan kemacetan dan keamanan lalu lintas, kebersihan dan kenyamanan kota, serta yang utama adalah optimalisasi tata ruang, di wilayah Kota Pekalongan khususnya, dan kawasan perkotaan Petanglong pada umumnya.

Diperlukan kajian Lalu Lintas terkait pembangunan jalan lingkar Petanglong dan sekaligus menjadi tanggul rob. Kajian Lalu Lintas pembangunan Jalan Lingkar Petanglong tersebut juga dapat menjadi acuan/ dasar untuk pengambilan kebijakan-kebijakan bagi Pemerintah Kota Pekalongan dalam penataan serta manajemen lalu lintas seperti contohnya pembatasan kendaraan angkutan barang, peningkatan sistem transportasi umum, penerapan teknologi lalu lintas yang cerdas, dan lainnya.

Dalam dimensi yang lain, mencontoh kasus di daerah lain, pembangunan jalan lingkar di Kota Petanglong dan/atau Kawasan Perkotaan Petanglong dapat dilakukan dengan konstruksi yang sekaligus dapat berfungsi sebagai tanggul penahan rob. Jika jalan lingkar tersebut dapat terwujud diharapkan dapat menjadi katalis bagi pengembangan wilayah dan mendukung pertumbuhan ekonomi Kota Pekalongan dan kawasan sekitarnya

Persentase Kelengkapan Jalan yang Telah Terpasang terhadap Kondisi Ideal pada Jalan Kabupaten / Kota – IUP. Perlengkapan jalan merupakan salah satu persyaratan teknis jalan yang harus dipenuhi untuk menjamin keselamatan pengguna jalan. Hal tersebut seperti halnya tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan Pasal 22 yang menyebutkan bahwa jalan perlu dilengkapi dengan perlengkapan jalan. Suatu ruas jalan umum dinyatakan laik fungsi secara administratif apabila memenuhi persyaratan administrasi perlengkapan jalan. Perlengkapan jalan terdiri atas perlengkapan jalan yang berkaitan langsung dan tidak langsung dengan pengguna jalan. Perlengkapan jalan yang berkaitan langsung dengan pengguna jalan meliputi perlengkapan jalan yang berkaitan langsung dengan pengguna jalan, baik wajib maupun tidak wajib.

Dalam Pasal 25 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan menyebutkan bahwa setiap jalan yang digunakan untuk lalu lintas umum wajib dilengkapi dengan perlengkapan jalan berupa rambu lalu lintas, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, alat penerangan jalan, alat pengendali dan pengaman pengguna jalan, alat pengawasan dan pengamanan jalan, fasilitas untuk sepeda, pejalan kaki, dan penyandang cacat, serta fasilitas pendukung kegiatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berada di Jalan dan di luar badan Jalan. Penyediaan perlengkapan jalan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dengan memperhatikan keselamatan pengguna jalan.

Dalam upaya mewujudkan peranan penting jalan untuk mendorong perkembangan kehidupan masyarakat Kota Pekalongan dan memberikan jaminan bagi masyarakat untuk memperoleh kemudahan serta keselamatan dalam menggunakan jalan, maka Pemerintah Kota Pekalongan berupaya melengkapi jalan dengan perlengkapan jalan sesuai dengan persyaratan teknis yang ditentukan. Berikut merupakan data persentase kelengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal pada jalan kabupaten/ kota di Kota Pekalongan.

Tabel II-61
Persentase Kelengkapan Jalan yang Telah Terpasang terhadap Kondisi Ideal pada Jalan Kota Pekalongan Tahun 2020-2024

Tahun	Jumlah Ruas Jalan Kota	Jumlah Ruas Jalan kota yang telah terpasang perlengkapan jalan	Kelengkapan jalan yang terpasang terhadap kondisi ideal (persen)
2020	217 Ruas Jalan	92 Ruas Jalan	42,40
2021	217 Ruas Jalan	92 Ruas Jalan	42,40
2022	224 Ruas Jalan	98 Ruas Jalan	43,75
2023	224 Ruas Jalan	98 Ruas Jalan	43,75
2024	224 Ruas Jalan	98 Ruas Jalan	43,75

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Pekalongan, 2025

Berdasarkan data yang diperoleh dari tahun 2020 hingga 2024 menunjukkan bahwa kemajuan kelengkapan jalan di Kota Pekalongan berlangsung sangat lambat, selama lima tahun hanya terdapat peningkatan sebesar 1,35 persen. Oleh karena itu, masih terdapat 56,25 persen ruas jalan yang masih harus dilengkapi. Berdasarkan hal tersebut perlu dilakukan beberapa upaya yang dapat meningkatkan presentase kelengkapan jalan secara bertahap antara lain mengupayakan pendanaan yang bersumber dari Non APBD, memprioritaskan ruas jalan dengan risiko tinggi kecelakaan atau arus lalu lintas padat, menetapkan target penambahan kelengkapan jalan per tahun, melakukan evaluasi terhadap kelengkapan jalan dengan membuat klasifikasi kondisi eksisting dan tingkat urgensinya.

2.3.3.2. Rumah Layak Huni

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya. Rumah Layak Huni (RLH), salah satu ukurannya adalah mempunyai bangunan yang kokoh. Salah satu indikator pelayanan pada sub urusan perumahan yaitu meningkatnya jumlah rumah layak huni.

Berdasarkan data dalam aplikasi Omahe Ndewe, diketahui saat ini tercatat sebanyak 78.486 unit rumah. Dari jumlah tersebut, terdapat 9.693 unit (12,35%) yang masih tergolong sebagai Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dan sisanya sebanyak 68.793 unit rumah (87,65%) telah memenuhi kriteria sebagai RLH. Persentase RLH yang mencapai 87,65 persen menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat Kota Pekalongan telah memiliki hunian yang memenuhi standar kelayakan. Namun, masih terdapat 12,35 persen rumah tangga yang menempati hunian tidak layak, yang mencerminkan adanya kebutuhan intervensi lanjutan

dari pemerintah daerah melalui program perbaikan, renovasi, atau pembangunan rumah baru.

Upaya untuk semakin memperbesar rumah layak huni, memiliki tantangan yang sangat berat. Tantangan pembangunan rumah layak huni di Kota Pekalongan, di samping kondisi perekonomian masyarakat dan Daerah, juga sangat dipengaruhi oleh kondisi geografis serta risiko bencana banjir dan rob yang masih mengancam wilayah Kota Pekalongan. Bencana banjir dan rob serta amblesan tanah sangat mempengaruhi kondisi rumah, sehingga berdampak terhadap usia pakai bangunan, termasuk rumah yang semakin memendek. Dengan usia bangunan yang memendek maka berimplikasi terhadap pembangunan penyediaan rumah layak huni di Kota Pekalongan.

2.3.3.3. Sanitasi

Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman. Sanitasi merupakan hal mendasar bagi pembangunan manusia. Akses terhadap sanitasi yang layak dan aman dianggap sebagai hak asasi manusia yang harus dipenuhi. Sanitasi secara umum mengacu pada penyediaan fasilitas dan layanan pembuangan *urine* dan *fezes* manusia yang aman. Sanitasi yang tidak memadai merupakan penyebab utama vektor penyakit dan peningkatan sanitasi diketahui memberikan dampak yang signifikan terhadap kesehatan masyarakat. Akses sanitasi dikategorikan aman apabila fasilitas sanitasi tersebut digunakan oleh rumah tangga itu sendiri dengan menggunakan jenis kloset leher angsa. Selain itu juga dilengkapi dengan sistem pengolahan air limbah atau tangki septik sebagai unit pengolahannya yang secara rutin disedot setidaknya sekali dalam 5 (lima) tahun. Pengolahannya dapat dilakukan di Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT), atau disambungkan ke sistem pengolahan air limbah domestik terpusat (SPALD-T).

Pemerintah Indonesia melalui berbagai program dan kebijakan telah berkomitmen untuk mencapai Visi Indonesia Emas 2045 dengan menetapkan target 100 persen akses air bersih dan 70 persen sanitasi aman di seluruh wilayah Indonesia. Kondisi akses sanitasi aman di Indonesia sampai dengan akhir tahun 2024 masih berada pada angka 12 persen dari target sebesar 30 persen. Berdasarkan data BPS menyebutkan bahwa sampai dengan tahun 2024 persentase rumah tangga di Jawa Tengah yang menggunakan layanan sanitasi dengan pengelolaan secara aman masih tergolong rendah yaitu 10,84 persen, meskipun terdapat sedikit peningkatan dibandingkan data 5 (lima) tahun terakhir yaitu 10,51 persen pada tahun 2020. Kondisi tersebut menjadi tantangan berat bagi pemerintah dalam upaya menurunkan pencemaran lingkungan.

Kota Pekalongan merupakan salah satu di Provinsi Jawa Tengah yang masih memiliki capaian akses sanitasi aman dengan nilai rendah. Akses sanitasi aman Kota Pekalongan Tahun 2024 adalah 0,58 persen berdasarkan pengolahan data Omahe Ndewe dan pelanggan layanan sedot tinja di Kota Pekalongan. Rendahnya akses sanitasi aman tersebut disebabkan karena belum ada sistem Layanan Lumpur Tinja Terjadwal (L2T2) dan belum pemisahan antara peran regulator dan operator dalam sistem operasionalnya, semua masih berada di Bidang Cipta Karya DPUPR Kota Pekalongan.

Tabel II-62
Data Jumlah Pelanggan Layanan Sedot Tinja di Kota Pekalongan

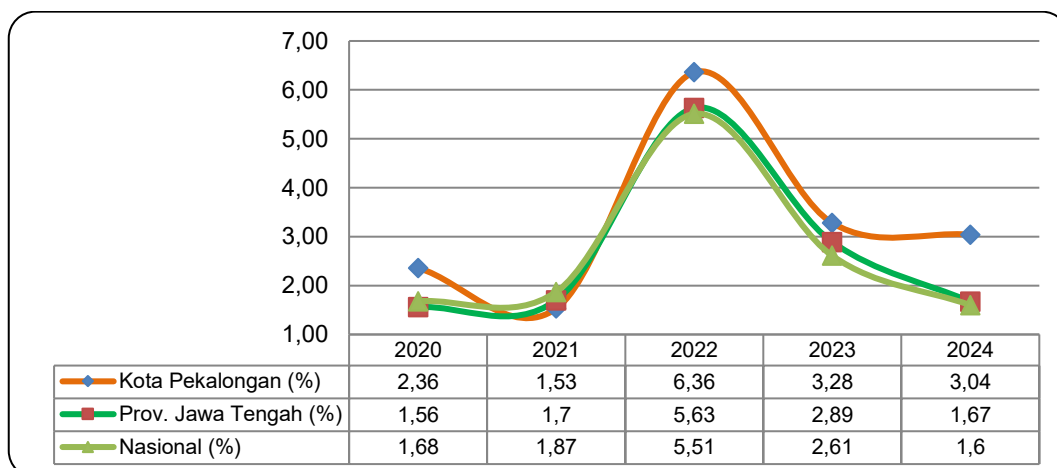
Tahun	Jumlah (unit)	Volume (m ³)
2022	264	438
2023	175	379
2024	184	392

Sumber: DPUPR Kota Pekalongan, 2025

2.3.4. Kondisi Fiskal Daerah

2.3.4.1. Inflasi

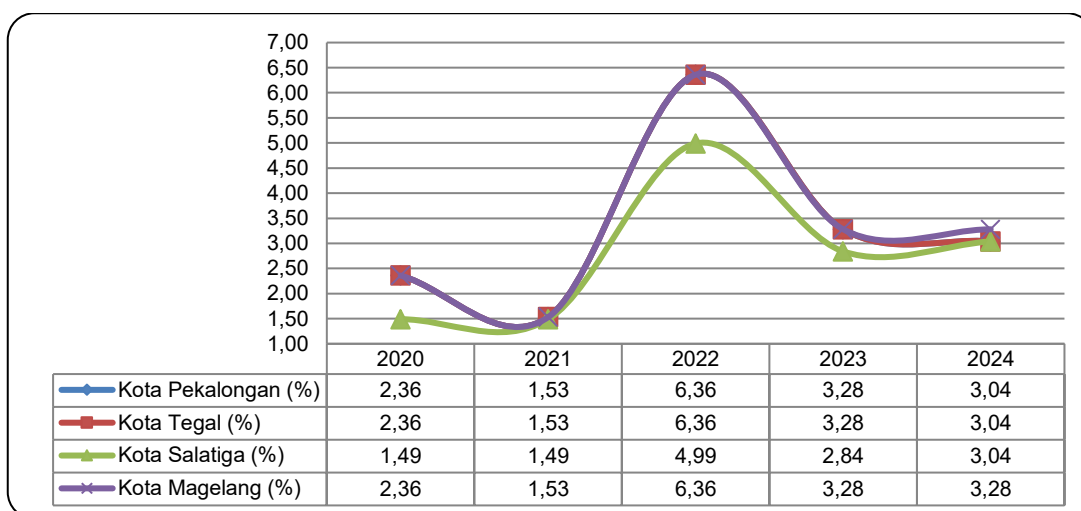
Unsur yang layak dipertimbangkan dalam perekonomian wilayah adalah besarnya laju inflasi. Indikator ini pada prinsipnya menggambarkan kenaikan indeks harga konsumen di Kota Pekalongan, laju inflasi di Kota Pekalongan merujuk angka inflasi Kota Tegal (daerah setara). Pada periode tahun 2020-2024, inflasi di Kota Pekalongan cenderung berfluktuasi dari kisaran 6,36 persen sampai 1,53 persen. Nilai inflasi Kota Pekalongan pada tahun 2021 paling rendah dibanding Provinsi Jawa Tengah dan Nasional, yaitu 1,53 persen. Angka ini merupakan inflasi terendah selama lima tahun terakhir. Adapun perkembangan inflasi Kota Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional disajikan dalam gambar berikut.



Sumber: www.bps.go.id, 2025

Gambar II-49
Perbandingan Laju Inflasi Kota Pekalongan dengan Provinsi dan Nasional Tahun 2020-2024

Mulai tahun 2020 BPS Jawa Tengah hanya merilis nilai inflasi di 6 Kota, yaitu: Kota Semarang, Kota Surakarta, Kota Kudus, Kota Purwokerto, Kota Cilacap, Kota Tegal. Kota Pekalongan dan Kota Magelang merujuk pada inflasi *sister city* nya yaitu Kota Tegal, sedangkan untuk Kota Salatiga merujuk pada nilai inflasi Kota Semarang.



Sumber: www.bps.go.id (diolah), 2025

Gambar II-50
Perbandingan Laju Inflasi Kota Pekalongan dengan Daerah Setara Tahun 2020-2024

Jika dibandingkan dengan daerah setara (Kota Tegal, Kota Salatiga, dan Kota Magelang), laju inflasi Kota Pekalongan tahun 2020 sama dengan Kota Tegal, berada di urutan tertinggi yaitu 2,36 persen dan laju inflasi paling rendah yaitu Kota Salatiga sebesar 1,49 persen. Laju inflasi pada keempat daerah setara tersebut cenderung menurun di tahun 2021, yang artinya semakin membaik. Namun pada tahun 2022 laju inflasi meningkat tajam, dimana Kota Pekalongan, Kota Tegal dan Kota Magelang meningkat menjadi 6,36 persen, dan Kota Salatiga menjadi 4,99 persen. Pada tahun 2023 laju inflasi kembali menurun menjadi 3,28 persen untuk Kota Pekalongan, Kota Tegal dan Kota Magelang, serta 2,84 persen untuk Kota Salatiga. Pada tahun 2024 turun Kota Pekalongan dan Kota Tegal turun menjadi 3,04 persen, Kota salatiga naik menjadi 3,04 persen dan kota magelang masih stagnan di 3,28 persen.

Penyumbang inflasi terbesar di Kota Pekalongan pada tahun 2024 adalah kelompok Makanan, Minuman dan Tembakau, Pendidikan, serta Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya. Faktor penyumbang terjadinya inflasi tertinggi pada 2024 lalu adalah adanya kenaikan harga kebutuhan pokok terutama komoditi beras, cabai merah, dan bawang merah. Data selengkapnya disajikan dalam Tabel II-63 berikut.

Tabel II-63
Inflasi Menurut Kelompok Pengeluaran di Kota Pekalongan Tahun 2020-2024

Kelompok Pengeluaran	2020	2021	2022	2023	2024
Makanan, Minuman dan Tembakau	4,36	2,14	8,96	7,89	2,19
Pakaian dan Alas Kaki	3,95	2,01	2,45	0,51	2,99
Perumahan, Air, Listrik, Gas dan Bahan Bakar Rumah Tangga	0,32	1,42	1,47	1,30	0,34
Perlengkapan, Peralatan, dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga	2,67	1,13	4,89	0,40	1,45
Kesehatan	2,87	0,55	2,50	2,78	0,60
Transportasi	1,36	1,01	16,42	-0,69	1,18
Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan	1,19	-0,64	1,74	0,03	-0,90
Rekreasi, Olahraga, dan Budaya	6,14	2,62	4,50	0,74	0,28
Pendidikan	-2,66	0,06	3,21	5,50	5,46
Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran	1,74	1,61	4,81	1,01	0,27
Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya	4,16	2,35	9,64	3,39	5,51
Umum	2,32	1,53	6,31	3,04	3,04

Sumber: BPS Jawa Tengah dan Kota Tegal Dalam Angka 2025, diolah, 2025

Disparitas Harga – IUP. Disparitas harga bahan pokok merupakan perbedaan harga barang-barang kebutuhan dasar yang terdiri dari 13 (tiga belas) jenis bahan pokok. Disparitas harga bahan pokok Kota Pekalongan terhadap Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2024 dapat terlihat pada tabel di bawah ini:

Tabel II-64
Disparitas harga bahan pokok Kota Pekalongan terhadap Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024

No	Komoditas	2024		
		Kota Pekalongan	Provinsi Jateng	Disparitas Harga (persen)
1	Beras Medium	13.963	13.441	3,88
2	Gula Pasir Curah	16.843	16.920	0,45

No	Komoditas	2024		
		Kota Pekalongan	Provinsi Jateng	Disparitas Harga (persen)
3	Minyak Goreng Kemasan Sederhana	16.191	15.848	2,16
4	Daging Sapi Paha Belakang	125.911	131.413	4,19
5	Daging Ayam Ras	38.467	36.288	6,00
6	Telur Ayam Ras	27.029	27.403	1,36
7	Tepung Terigu	11.782	11.277	4,48
8	Kedelai Impor	11.356	11.907	4,63
9	Cabai Merah Keriting	38.160	34.990	9,06
10	Cabai Rawit Merah	44.200	40.539	9,03
11	Bawang Merah	36.893	33.598	9,81
12	Bawang Putih Impor Kating	42.342	40.995	3,28
13	Ikan Kembung	30.000	31.135	3,64

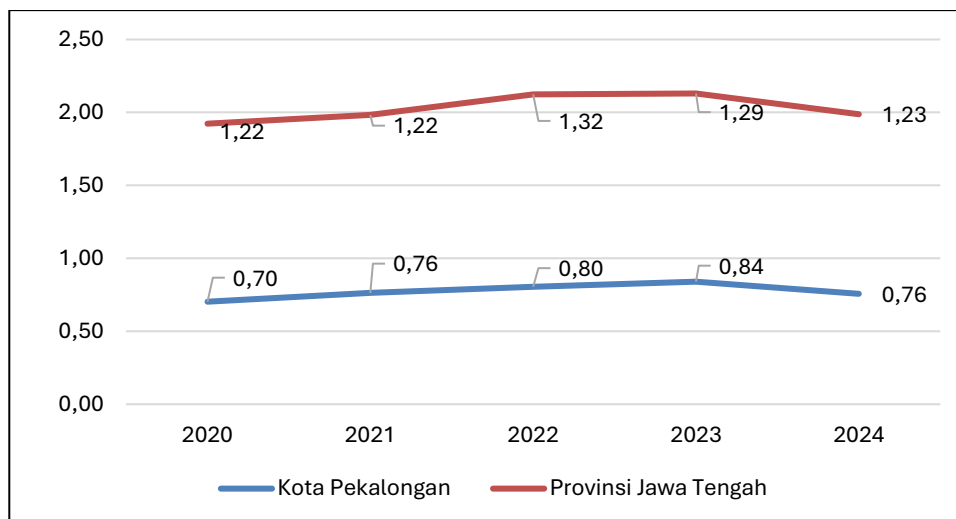
Sumber: Dindagkop UKM Kota Pekalongan, 2025

Disparitas harga seringkali mencerminkan ketidakseimbangan dalam distribusi barang, biaya transportasi, ketersediaan pasokan, dan faktor-faktor ekonomi lainnya. Semakin kecil disparitas berarti semakin kecil perbedaan harga komoditas Kab/Kota dengan harga di Provinsi Jawa Tengah untuk komoditas yang sama. Disparitas harga bahan pokok Kota Pekalongan terhadap Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2024 beragam namun tidak ada yang melebihi 10 persen. Berdasarkan tabel II-63 tersebut, nilai disparitas terkecil adalah komoditas gula pasir curah yaitu sebesar 0,45 persen. Kecilnya nilai disparitas komoditas gula pasir curah berarti adanya perbaikan dan efisiensi sistem distribusi barang antar wilayah dan menurunnya kesenjangan harga komoditas gula pasir curah. Harga komoditas yang tinggi dibandingkan dengan komoditas lainnya yaitu bawang merah sebesar 9,81 persen. Besarnya nilai disparitas komoditas bawang merah berarti belum optimalnya perbaikan maupun efisiensi sistem distribusi barang antar wilayah dan terjadi kesenjangan harga komoditas bawang merah.

2.3.4.2. Kondisi Fiskal dalam Perekonomian Daerah

Rasio Pajak Daerah Terhadap PDRB (IUP). Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB Kota Pekalongan selama periode 2020–2024 menunjukkan tren yang fluktuatif. Pada tahun 2020, rasio tercatat sebesar 0,70 sebagai dampak dari pandemi *Covid-19* yang melemahkan aktivitas ekonomi. Seiring pemulihan ekonomi, rasio meningkat menjadi 0,76 di tahun 2021 dan terus naik menjadi 0,80 pada 2022. Puncaknya terjadi pada 2023 dengan capaian rasio tertinggi sebesar 0,84, mencerminkan peningkatan efektivitas pemungutan pajak serta membaiknya kondisi ekonomi daerah. Namun, pada tahun 2024 rasio kembali menurun ke angka 0,76. Penurunan ini mengindikasikan bahwa laju pertumbuhan PDRB lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan penerimaan pajak daerah.

Jika dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah, rasio Kota Pekalongan masih berada jauh di bawah rata-rata provinsi, yang berkisar antara 1,22 hingga 1,32 selama periode yang sama. Meskipun pola pergerakan keduanya relatif searah, capaian Kota Pekalongan menunjukkan adanya ruang yang cukup besar untuk peningkatan kinerja fiskal daerah. Kondisi ini menandakan perlunya optimalisasi strategi perpajakan melalui intensifikasi, ekstensifikasi, serta digitalisasi layanan pajak agar kontribusi pajak terhadap PDRB tetap terjaga dalam mendukung kemandirian fiskal daerah.



Sumber: Bapperida Kota Pekalongan (diolah), 2025

Gambar II-51

Rasio Pajak Daerah Terhadap PDRB Kota Pekalongan Tahun 2020-2024

Total Dana Pihak Ketiga pada Bank Milik Kabupaten / Kota per PDRB. Total dana pihak ketiga mengalami penurunan dari tahun 2020 hingga 2024. Namun pada tahun 2024 mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun 2023. Persentase dana pihak ketiga per PDRB pun mengalami penurunan setiap tahunnya. Terjadi rasio penurunan sejak tahun 2020 sebesar 22,7 persen turun menjadi 14,3 persen di tahun 2024. Total Dana Pihak Ketiga pada Bank Milik Kabupaten/Kota per PDRB Kota Pekalongan dapat terlihat pada tabel di bawah ini:

Tabel II-65

Total Dana Pihak Ketiga pada Bank Milik Kabupaten / Kota per PDRB Kota Pekalongan Tahun 2020-2024

Tahun	Dana Pihak Ketiga	PDRB	Persen
2020	2.463.652.873.384	10.848.872.870.000	22,7
2021	2.267.773.453.465	11.460.582.990.000	19,8
2022	2.267.747.087.455	12.590.983.420.000	18,0
2023	2.085.309.657.175	13.744.224.050.000	15,2
2024	2.116.888.733.263	14.766.950.000.000	14,3

Sumber: Bag. Perekonomian&SDA Setda, 2020-2024, 2025

Dana pihak ketiga merupakan dana-dana yang berasal dari masyarakat, baik perorangan maupun badan usaha yang diperoleh bank dengan menggunakan berbagai instrumen produk simpanan yang dimiliki oleh bank. Bank yang dimaksud adalah seluruh unit Bank, baik Bank Umum (termasuk Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah) maupun Bank Perekonomian Rakyat (BPR-BPRS). Total dana pihak ketiga pada bank milik Kabupaten/Kota per PDRB adalah rasio total dana pihak ketiga perbankan milik Kabupaten/Kota di suatu daerah terhadap PDRB daerah tersebut pada suatu waktu dalam satuan persen. Hal ini dapat menggambarkan tingkat pendalaman keuangan suatu daerah, dimana peningkatan angka rasio menunjukkan peningkatan tingkat simpanan masyarakat di sektor keuangan yang mengarah pada semakin dalamnya sektor keuangan.

Dana pihak ketiga pada bank milik Kota Pekalongan adalah simpanan berupa tabungan dan deposito pada PT. BPR Bank Pekalongan, PT. BPR BKK Kota Pekalongan serta PT. BPR BKK

Jateng. Rasio total dana pihak ketiga per PDRB Kota Pekalongan sejak tahun 2021 hingga 2024 mengalami penurunan. Hal ini menggambarkan bahwa terjadi penurunan simpanan masyarakat di sektor keuangan (BPR BKK milik Kota Pekalongan) yang mengarah pada kurang dalamnya sektor keuangan di Kota Pekalongan. Penurunan rasio dana pihak ketiga pada bank milik Kota Pekalongan terhadap PDRB menjadi indikator berbagai faktor seperti tingkat preferensi investasi masyarakat Kota Pekalongan, kepercayaan masyarakat Kota Pekalongan terhadap Bank milik Kota Pekalongan hingga kondisi ekonomi di Kota Pekalongan.

Total Kredit pada Bank Milik Kabupaten / Kota per PDRB (IUP). Total kredit pada bank milik Kota Pekalongan mengalami peningkatan setiap tahunnya sejak tahun 2020 hingga 2024. Meskipun demikian, persentase kredit pada bank milik Kota Pekalongan per PDRB Kota Pekalongan mengalami fluktuatif dengan kecenderungan menurun yaitu dari 13,1 persen di tahun 2020 menjadi 12,0 persen di tahun 2024. Total kredit pada bank milik Kota Pekalongan per PDRB Kota Pekalongan dapat terlihat pada tabel di bawah ini:

Tabel II-66
Total Kredit pada Bank Milik Kabupaten / Kota per PDRB
Kota Pekalongan Tahun 2020-2024

Tahun	Kredit	PDRB	Persentase
2020	1.423.343.263.107	10.848.872.870.000	13,1
2021	1.571.773.847.508	11.460.582.990.000	13,7
2022	1.685.150.977.170	12.590.983.420.000	13,4
2023	1.701.636.307.705	13.744.224.050.000	12,4
2024	1.772.058.384.253	14.766.950.000.000	12,0

Sumber: Bag. Perekonomian&SDA Setda, 2020-2024, 2025

Total kredit pada bank milik Kabupaten/Kota adalah penjumlahan dari total penyaluran kredit dan pembiayaan yang disalurkan oleh perbankan milik Kabupaten/Kota. Total kredit pada bank milik Kabupaten/Kota per PDRB menunjukkan persentase rasio total kredit dan pembiayaan yang disalurkan oleh perbankan milik Kabupaten/Kota terhadap PDRB pada suatu waktu tertentu. Hal tersebut menggambarkan tingkat pemanfaatan kredit dan pembiayaan sebagai salah satu sumber pembiayaan pembangunan daerah. Semakin tinggi nilai persentasenya maka semakin berfungsinya perbankan sebagai lembaga intermediasi keuangan yang berperan dalam menyalurkan pendanaan pada usaha-usaha dalam perekonomian daerah.

Persentase total kredit pada bank milik Kota Pekalongan yaitu PT. BPR Bank Pekalongan, PT. BPR BKK Kota Pekalongan serta PT. BPR BKK Jateng terhadap PDRB Kota Pekalongan menunjukkan fluktuatif dengan kecenderungan menurun. Hal ini menunjukkan bahwa bank milik Kota Pekalongan berfungsi kurang optimal sebagai lembaga penghimpun maupun penyalur dana. Kecenderungan menurun persentase/*ratio* tersebut secara ekonomi makro terjadi karena perlambatan pertumbuhan ekonomi karena berhubungan dengan permintaan kredit dari berbagai sektor usaha dan masyarakat yang cenderung menurun sehingga akan menurunkan total penyaluran kredit oleh bank milik Kota Pekalongan. Suku bunga juga dapat menjadi penyebab kecenderungan menurunnya persentase tersebut. Faktor lainnya dari sisi perbankan yaitu kualitas layanan dan produk yang dihasilkan atau ditawarkan kurang kompetitif dan kurang inovatif. Namun, penurunan total kredit pada bank terhadap PDRB tidak selalu berarti negatif. Kemungkinan, penurunan ini disebabkan oleh pertumbuhan PDRB yang lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan kredit yang menunjukkan peningkatan efisiensi ekonomi.

2.4. ASPEK PELAYANAN UMUM

2.4.1. Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif

2.4.1.1. Pelayanan Publik

Kualitas pelayanan publik dapat diukur dengan 2 (dua) pendekatan, yaitu Indeks Pelayanan Publik (IPP) dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). IPP fokus pada kinerja dan kualitas pelayanan publik secara objektif, dilihat dari berbagai aspek seperti kebijakan, profesionalisme SDM, sarana-prasarana, sistem informasi, konsultasi pengaduan, serta inovasi dari unit penyelenggara pelayanan. Sedangkan IKM fokus pada persepsi dan perasaan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik yang mereka terima.

Hasil evaluasi pelayanan publik yang dilakukan oleh Kementerian PAN RB menunjukkan IPP Kota Pekalongan mengalami peningkatan dari tahun ke tahun dan pada tahun 2024 IPP Kota Pekalongan adalah 4,59 dengan kategori A, lebih tinggi dari capaian Provinsi Jawa Tengah sebesar 4,53. Namun demikian, jika dibandingkan dengan Kota di Jawa Tengah, capaian IPP Kota Pekalongan menempati urutan keempat, sehingga masih diperlukan upaya dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Jika dilihat dari IKM yang dilakukan pada 77 unit pelayanan publik di Kota Pekalongan, rata-rata IKM Kota Pekalongan memiliki kategori sangat baik dengan skor 91,37. Namun demikian masih diperlukan upaya berkelanjutan untuk mempertahankan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.

2.4.1.2. Reformasi Birokrasi

Upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Pekalongan dalam rangka reformasi birokrasi membuahkan hasil yang cukup memuaskan. Sesuai dengan Peraturan Menteri PANRB Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, ada perubahan dalam komponen penilaian. Perubahan mendasar dari pedoman tersebut adalah penekanan pada hal-hal yang bersifat implementatif, kolaboratif, dan analisis yang holistik. Berdasarkan evaluasi yang telah dilaksanakan, indeks Reformasi Birokrasi (RB) di Pemerintah Kota Pekalongan Tahun 2022 adalah 71,04 dengan kategori “BB” dengan rincian hasil evaluasi disajikan dalam tabel berikut.

Tabel II-67

Komponen Penilaian Indeks Reformasi Birokrasi Kota Pekalongan Tahun 2021-2022

No.	Komponen Penilaian	Bobot	2021	2022
A	Komponen Pengungkit			
	I. Pemenuhan	20,00	11,39	12,79
	II. Hasil Antara Area Perubahan	10,00	6,03	6,81
	III. Reform	30,00	18,86	19,13
Total Komponen Pengungkit		60,00	36,28	38,73
B	Komponen Hasil			
1.	Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	10,00	8,11	8,13
2.	Kualitas Pelayanan Publik	10,00	9,36	7,69
3.	Pemerintahan Yang Bersih dan Bebas KKN	10,00	8,20	8,09
4.	Kinerja Organisasi	10,00	7,71	8,40
Total Komponen Hasil		40,00	33,38	32,31
Indeks Reformasi Birokrasi (Pengungkit + Hasil)		100,00	69,66	71,04

Sumber: Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2022, 2025

Sesuai dengan Peraturan Menteri PANRB Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi dan Keputusan Menteri PANRB Nomor 128 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Evaluasi Reformasi Birokrasi Tahun 2024, ada perubahan dalam komponen penilaian. Berdasarkan evaluasi yang telah dilaksanakan, indeks RB Pemerintah Kota Pekalongan tahun 2024 adalah 87,31 dengan kategori “A”, meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya, dengan rincian hasil evaluasi disajikan dalam tabel berikut.

Tabel II-68
Komponen Penilaian Indeks Reformasi Birokrasi Kota Pekalongan
Tahun 2023-2024

No	Penilaian	Bobot	Nilai	
			2023	2024
A	RB General	100	65,08	77,80
B	RB Tematik	20	12,04	9,45
C	Indeks RB	120	77,12	87,25
			BB	A-

Sumber: Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2024, 2025

2.4.1.3. Penguatan Akuntabilitas Kinerja

Penguatan akuntabilitas kinerja terus dilaksanakan dengan peningkatan implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Dari tahun ke tahun nilai akuntabilitas Kota Pekalongan terus mengalami peningkatan, bahkan pada tahun 2018 mengalami lompatan 2 peringkat dari CC menjadi BB.

Pada Tahun 2022 hasil evaluasi menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Pekalongan memperoleh nilai 73,31 atau predikat BB. Penilaian tersebut menunjukkan tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian kinerjanya, kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada hasil di Pemerintah Kota Pekalongan sudah menunjukkan hasil yang sangat baik. Rincian penilaian SAKIP disajikan dalam Tabel II-68 berikut.

Tabel II-69
Nilai SAKIP Kota Pekalongan Tahun 2018 – 2021

No	Komponen yang dinilai	Bobot	Nilai 2018	Nilai 2019	Nilai 2020	Nilai 2021
1	Perencanaan Kinerja	30	24,42	24,53	24,70	24,32
2	Pengukuran Kinerja	25	17,07	17,54	17,92	18,18
3	Pelaporan Kinerja	15	10,46	11,09	11,17	11,45
4	Evaluasi Internal	10	7,24	7,29	7,39	7,44
5	Capaian Kinerja	20	11,69	12,14	11,89	11,77
	Nilai SAKIP	100	70,88	72,59	73,07	73,16
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja		C	CC	BB	BB

Sumber: Bagian Organisasi Setda Kota Pekalongan, 2022

Hasil Evaluasi tahun 2022 “tidak diperbandingkan” dengan hasil evaluasi tahun sebelumnya, karena berdasarkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, terdapat perubahan bobot komponen dan sub komponen serta kriteria penilaiannya. Evaluasi tahun 2022 lebih menitikberatkan pada implementasi akuntabilitas kinerja baik pada level Pemerintah Daerah maupun level Perangkat Daerah.

Hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja Pemerintah Kota Pekalongan menunjukkan bahwa nilai sebesar 73,02 dengan predikat “BB”. Hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja “Sangat Baik”, yaitu implementasi AKIP sudah sangat baik pada pemerintah daerah dan sebagian besar unit kerja, ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, serta memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi.

Tabel II-70
Nilai SAKIP Kota Pekalongan Tahun 2022-2024

No	Komponen yang dinilai	Bobot	Nilai 2022	Nilai 2023	Nilai 2024
1	Perencanaan Kinerja	30	24,38	23,24	23,30
2	Pengukuran Kinerja	30	19,50	20,04	20,09
3	Pelaporan Kinerja	15	11,48	11,52	11,59
4	Evaluasi Internal	25	17,95	18,03	18,04
	Nilai SAKIP	100	73,31	72,83	73,02
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja		BB	BB	BB

Sumber: Bagian Organisasi Setda Kota Pekalongan dan Inspektorat Kota Pekalongan, 2025

2.4.1.4. Penguatan Akuntabilitas Keuangan

Pemerintah Kota Pekalongan telah menunjukkan komitmen yang kuat dalam memperkuat akuntabilitas keuangan daerah. Hal ini tercermin dari keberhasilan meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) selama sepuluh tahun berturut-turut, yaitu sejak Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2015 hingga 2024. Capaian ini mencerminkan konsistensi dalam pengelolaan keuangan daerah secara akuntabel, transparan, dan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

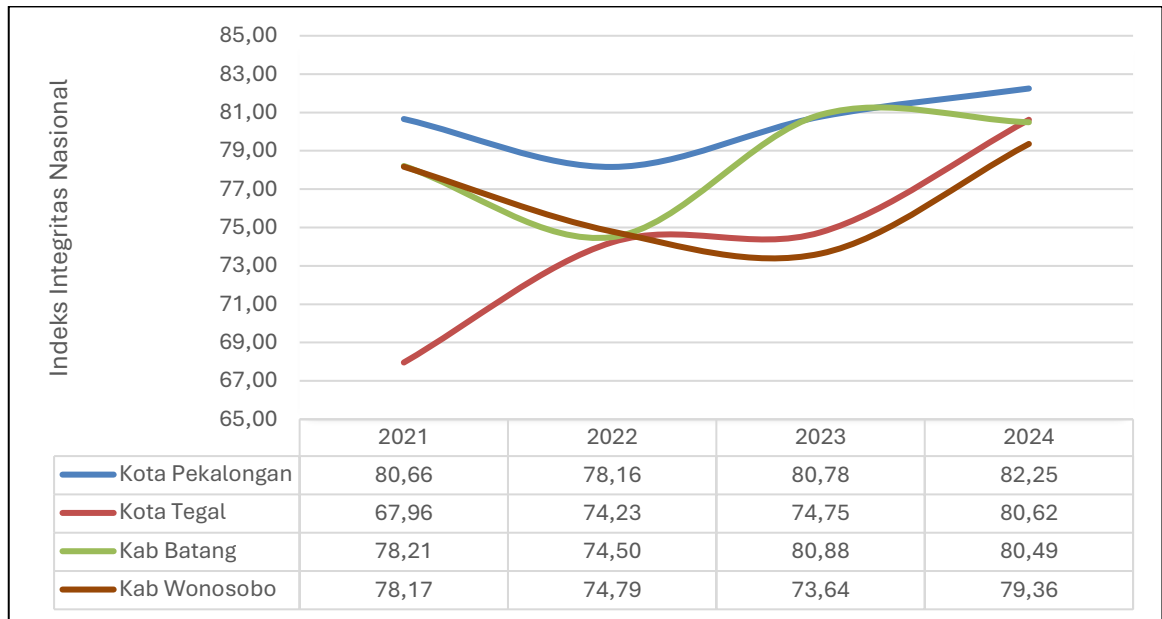
Keberhasilan meraih opini WTP selama sepuluh tahun berturut-turut menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Pekalongan telah mampu menjaga stabilitas sistem pengendalian intern, meningkatkan kualitas pelaporan keuangan, serta melakukan pengelolaan anggaran secara efisien dan tepat sasaran. Hal ini menjadi dasar penting dalam memperkuat kepercayaan publik terhadap pemerintah, sekaligus menjadi landasan yang kokoh dalam pelaksanaan program pembangunan yang berkelanjutan dan berpihak kepada masyarakat. Namun, tantangan ke depan adalah mempertahankan capaian ini melalui peningkatan kapasitas aparatur, peningkatan sistem informasi keuangan daerah, serta mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan anggaran.

2.4.1.5. Pencegahan Korupsi

Pencegahan korupsi merupakan pondasi dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel. Untuk menjaga dari perilaku korupsi, maka integritas baik individu dan organisasi menjadi penting untuk diperhatikan. Hasil Survey Penilaian Integritas (SPI) atau Indeks Integritas Nasional (IIN) digunakan untuk menunjukkan tingkat integritas individu dan organisasi Pemerintah.

Capaian nilai SPI / IIN Kota Pekalongan dalam kurun waktu tahun 2021-2024 berfluktuasi namun cenderung meningkat, dimana pada tahun 2021 sebesar 80,66 dan tahun 2024 meningkat menjadi 82,25 dengan kategori TERJAGA karena lebih dari 78,00. Jika dibandingkan dengan capaian Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 sebesar 79,47, capaian IIN Kota Pekalongan lebih tinggi.

Sementara jika dibandingkan dengan kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah, capaian IIN Kota Pekalongan merupakan yang terbaik di Jawa Tengah, disusul oleh Kota Tegal (80,62), Kabupaten Batang (80,49) dan Kabupaten Wonosobo (79,36). Bahkan untuk tipe kota kecil, IIN Kota Pekalongan menempati posisi terbaik tingkat nasional.



Sumber: www.jaga.id (diolah), 2025

Gambar II-52
Perolehan Indeks Integritas Nasional Kabupaten/Kota Tertinggi di Jawa Tengah Tahun 2020-2024

2.4.1.6. Reformasi Hukum

Reformasi hukum pemerintah daerah, yang diukur dengan Indeks Reformasi Hukum (IRH) dilakukan sebagai instrumen menilai pelaksanaan reformasi hukum dalam rangka mewujudkan birokrasi yang kapabel sesuai sasaran *road map* reformasi birokrasi tahun 2020-2024. Walaupun lebih rendah jika dibandingkan capaian IRH Provinsi Jawa Tengah sebesar 98,28 (Istimewa), capaian IRH Kota Pekalongan pada tahun 2024 sebesar 96,76 (Istimewa) mendapatkan apresiasi dari Kanwil Kemenkumham Provinsi Jawa Tengah. Jika dibandingkan dengan capaian IRH daerah sekitar, IRH Kota Pekalongan lebih baik dibandingkan IRH Kabupaten Batang sebesar 87,58 (Sangat Baik) dan IRH Kabupaten Pemalang sebesar 96,72 (istimewa), namun di bawah IRH Kabupaten Pekalongan sebesar 98,42 (Istimewa).

Walaupun nilai IRH Kota Pekalongan mendapatkan kategori AA atau istimewa, namun masih terdapat rekomendasi perbaikan yaitu masih diperlukan komitmen pimpinan dan pengelola JDIH untuk membenahi pengelolaan JDIH sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum, serta memenuhi seluruh indikator penilaian kinerja JDIH.

2.4.1.7. Manajemen ASN

Penerapan manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Kota Pekalongan berbasis sistem merit secara konsisten meningkat dari tahun ke tahun. Sistem merit merupakan manajemen ASN berdasarkan kemampuan, kinerja, dan prestasi, bukan berdasarkan faktor-faktor lain seperti afiliasi politik, hubungan pribadi, atau latar belakang sosial.

Capaian indeks merit Kota Pekalongan tahun 2021 sebesar 178.50, melonjak signifikan pada tahun 2022 dengan nilai indeks merit 264.50. Hal ini mengindikasikan adanya peningkatan dalam upaya penerapan sistem merit secara lebih menyeluruh di setiap aspek. Selanjutnya, nilai Indeks Sistem Merit terus meningkat mencapai 327 pada tahun 2024. Penerapan sistem merit yang semakin baik diharapkan berpotensi mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik, memperbaiki transparansi, serta menciptakan birokrasi yang lebih adil dan akuntabel.

Untuk Provinsi Jawa Tengah, dari 35 kabupaten/kota nilai Indeks Sistem Merit kategori Sangat Baik untuk 2 Kabupaten/kota (Kota Magelang dan Kota Pekalongan), kategori Baik untuk 30 Kabupaten/kota dan sisanya 3 Kabupaten/kota kategori Kurang.

2.4.2. Ketentraman dan ketertiban umum

2.4.2.1. Penegakan Peraturan Daerah

Pelaksanaan tugas penegakan Peraturan Daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dilaksanakan oleh Polisi Pamong Praja. Untuk melaksanakan semua tugas tersebut, salah satunya, ditentukan dengan ketersediaan Polisi Pamong Praja. Selama kurun waktu 2020-2024 rasio Polisi Pamong Praja (PNS) di Kota Pekalongan cenderung menurun. Pada tahun 2020 dengan rasio sebesar 0,88 atau 27 personel untuk setiap 10.000 penduduk dan mengalami penurunan rasio menjadi 0,84 atau 26 personel untuk setiap 10.000 penduduk di tahun 2021. Sampai dengan tahun 2024, rasio Polisi Pamong Praja (PNS) terus menurun menjadi 0,72 atau 23 personil untuk setiap 10.000 penduduk.

Bantuan Polisi PP (Banpol Non PNS) sangat membantu peningkatan rasio Polisi PP. Pada tahun 2020, rasio sebesar 3,91 atau 120 personil untuk setiap 10.000 penduduk. Pada tahun 2021 mengalami kenaikan menjadi 3,99 atau 123 personil setiap 10.000 penduduk dikarenakan penambahan jumlah penduduk. Pada tahun 2022 rasio kembali mengalami penurunan menjadi 3,97 atau 123 personil dan pada tahun 2023 rasio mengalami penurunan menjadi 3,68 atau 117 personil setiap 10.000 penduduk. Sementara itu pada tahun 2024 rasio mengalami kenaikan yaitu 3,73 atau 119 personil setiap 10.000 penduduk.

Jika Polisi PP PNS dan Banpol Non PNS dijumlahkan, maka rasio pada tahun 2020 sebesar 4,79 atau 147 personil per 10.000 penduduk. Pada tahun 2021 meningkat jumlahnya dibandingkan tahun 2020 yaitu 149 personil. Pada tahun 2022 naik menjadi 153 personil. Tahun 2023 dan 2024 jumlah Polisi PP PNS dan Banpol Non PNS sebanyak 142 personil. Berikut adalah tabel rasio jumlah Satpol PP dan Banpol dalam kurun waktu 2020-2024.

Tabel II-71
Rasio Jumlah Polisi PP (PNS) dan Jumlah Polisi PP (Banpol Non PNS) Per 10.000 Penduduk di Kota Pekalongan 2020-2024

Tahun	Polisi PP (PNS)		Polisi PP (Banpol Non PNS)		Polisi PP (PNS dan Banpol Non PNS)		Jumlah Penduduk
	Jumlah	Persentase	Jumlah	Persentase	Jumlah	Persentase	
2020	27	0,88	120	3,91	147	4,79	307.150
2021	26	0,84	123	3,99	149	4,83	308.310
2022	30	0,97	123	3,97	153	4,94	309.742
2023	25	0,79	117	3,68	142	4,47	317.524
2024	23	0.72	119	3.73	142	4.46	318.182

Sumber: Satpol P3KP Kota Pekalongan, 2025

Pelanggaran Peraturan Daerah dalam kurun waktu 2020-2024 cenderung fluktuatif. Pada tahun 2020, pelanggaran Peraturan Daerah sebanyak 1.782 kasus, dan pada tahun 2021 meningkat menjadi 3.586 kasus. Namun tahun 2022 jumlah pelanggaran Peraturan Daerah menurun menjadi 2.410 kasus. Tahun 2023 naik menjadi 2.555 kasus dan turun lagi pada tahun 2024 sebanyak 1.835. Meskipun demikian, Satpol P3KP Kota Pekalongan terus berusaha melakukan penyelesaian atas pelanggaran Peraturan Daerah yang terjadi. Hal ini dibuktikan dengan persentase penyelesaian atas pelanggaran Peraturan Daerah yang berada di atas 90 persen mulai tahun 2020 sampai dengan 2024.

Tabel II-72
Penyelesaian Pelanggaran Peraturan Daerah di Kota Pekalongan
Tahun 2020-2024

Tahun	Jumlah Pelanggaran Peraturan Daerah	Jumlah Penyelesaian Pelanggaran Peraturan Daerah	Persentase
2020	1.782	1.759	98,71
2021	3.586	3.586	100,00
2022	2.410	2.410	100,00
2023	2.555	2.555	100,00
2024	1.835	4.335	100,00

Sumber: Satpol P3KP Kota Pekalongan, 2025

2.4.2.2. Kondusivitas Wilayah

Kondusivitas daerah di Kota Pekalongan selama kurun waktu 2020-2024 secara umum menunjukkan situasi yang aman dan tertib. Pada tahun 2024 masih terjadi gangguan keamanan antara lain penganiayaan, pencurian, penipuan dan penyalahgunaan narkoba dan psikotropika. Jumlah kasus yang naik yaitu penganiayaan, pencurian, penipuan, dan kasus penyalahgunaan narkoba dan psikotropika. Oleh karenanya diperlukan koordinasi kewaspadaan dini dan pembinaan ketahanan ekonomi di masyarakat Kota Pekalongan, juga sosialisasi dan penyuluhan tentang bahaya narkoba dan psikotropika kepada masyarakat Kota Pekalongan. Selengkapnya disajikan dalam Tabel II-73 berikut.

Tabel II-73
Banyaknya Kasus Tindak Kejahatan yang Terjadi di Kota Pekalongan
Tahun 2020-2024

Tindak Kejahatan	2020	2021	2022	2023	2024
Pembunuhan	2	0	0	0	0
Pemeriksaan	0	2	0	0	0
Penganiayaan	3	2	13	6	7
Pencurian	33	59	81	72	93
Penipuan	18	2	31	6	9
Penadahan	0	0	0	0	0
Narkoba dan Psikotropika	64	46	39	49	56

Sumber: Badan Kesbangpol Kota Pekalongan, 2025

Kondusivitas wilayah juga dipengaruhi oleh terjadinya konflik sosial. Berbagai upaya preventif telah dilakukan dalam rangka mencegah potensi kerawanan sosial menjadi konflik

sosial. Tabel II-74 menunjukkan data konflik sosial di Kota Pekalongan dalam kurun waktu 2020-2024.

Tabel II-74
Jumlah Kasus Konflik Sosial di Kota Pekalongan Tahun 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Kasus Konflik Sosial	1	2	0	0	0

Sumber: Badan Kesbangpol Kota Pekalongan, 2025

Berbagai upaya terus dilakukan dalam rangka tindakan preventif agar tidak muncul konflik sosial. Pengelolaan potensi konflik sosial dilakukan melalui program kemitraan dan pengembangan wawasan kebangsaan, antara lain dengan kegiatan peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama, pembinaan wawasan kebangsaan bagi pelajar dan mahasiswa, pembinaan karakter dan penguatan wawasan kebangsaan bagi aparatur, penyuluhan pencegahan penggunaan narkoba di kalangan generasi muda, pengawasan orang asing, sosialisasi penanganan konflik sosial, dan peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan Siskamswakarsa di daerah.

2.4.2.3. Resilensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim

Kota Pekalongan, sebagaimana wilayah di Pantura Jawa lainnya, masih mengalami bencana sebagai akibat dari pasang naik air laut atau rob. Banjir rob yang terjadi di Kota Pekalongan disebabkan kombinasi dari penurunan permukaan tanah (*land subsidence*) dan dinamika air laut (pasang surut, kenaikan muka air laut dan gelombang *el nino* serta *la nina*). Para ilmuwan telah mengamati perubahan-perubahan pada indikator-indikator iklim di Indonesia selama beberapa dekade terakhir, dan secara bersamaan membuat proyeksi menggunakan model AR-4 IPCC untuk menilai perubahan-perubahan masa depan dengan hasil-hasil sebagai berikut:

- Kenaikan suhu permukaan rata-rata akan mencapai 0,8 ° C-1 ° C hingga tahun 2020-2050 dibandingkan dengan periode iklim akhir pada abad ke-20.
- Peningkatan suhu permukaan laut akan mencapai 1-1,2 ° C pada 2050 dibandingkan pada 2000.
- Pada periode 2001-2100, akan terjadi perubahan-perubahan yang berarti (terutama pada periode 2080-an) dengan kecenderungan meningkatnya curah hujan pada musim hujan dan penurunan pada bulan pancaroba.
- Kenaikan permukaan laut (SLR) diproyeksikan mencapai 35 - 40 cm pada 2050 dibandingkan dengan pada 2000. SLR maksimum dapat mencapai 175 cm pada 2100.

Dalam Rencana Aksi Nasional Adaptasi Perubahan Iklim (RAN-API) Kota Pekalongan merupakan salah satu daerah yang memiliki nilai tertinggi sebagai kota percontohan RAN-API dengan nilai 5. Kota Pekalongan masuk dalam wilayah rentan terhadap perubahan iklim dalam RAN-API meliputi banjir, rob, air bersih, sanitasi, dan kekeringan.

Genangan akibat banjir rob terus meluas dan dirasakan hampir di seluruh wilayah bagian Utara Kota Pekalongan, bahkan sudah meluas sampai ke wilayah bagian Barat dan Timur Kota Pekalongan. Namun demikian, kondisi ini diharapkan akan berkurang secara signifikan, sejalan dengan berbagai upaya yang dilakukan berbagai pihak baik Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Pemerintah Kota Pekalongan, lembaga swadaya masyarakat, akademisi serta *stakeholder* lain untuk menangani permasalahan banjir rob di Kota Pekalongan.

Upaya penanganan banjir rob secara terintegrasi juga menjadi agenda percepatan ekonomi kawasan sebagaimana dijabarkan dalam Peraturan Presiden nomor 79 Tahun 2019, antara lain:

- Pengendalian banjir sistem Sungai Loji / Pekalongan / Kupang (Kota Pekalongan dan Kabupaten Pekalongan dengan rencana investasi sebesar Rp. 300 Milyar dari APBN),
- Pengendalian banjir sistem Sungai Sengkarang (Kota Pekalongan dan Kabupaten Pekalongan dengan rencana investasi sebesar Rp. 250 Milyar dari APBN),
- Pengendalian banjir dan rob (Kota Pekalongan dan Kabupaten Batang dengan rencana investasi sebesar Rp. 500 Milyar dari APBN),
- Penyempurnaan sistem banjir dan rob (Kota Pekalongan dan Kabupaten Pekalongan dengan rencana investasi sebesar Rp. 500 Milyar dari APBN),
- Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional Petanglong sistem Kali Boyo untuk melayani Kabupaten Batang dan Kota Pekalongan dengan kapasitas rencana sebesar 450 liter / detik.

Pemerintah berbagai tingkatan telah melaksanakan pembangunan pengendali banjir dan rob sistem Loji - Banger, antara lain berupa: tanggul pantai, tanggul/parapet sungai, dan *regulator gate* di Kota Pekalongan. Pembangunan ini merupakan hasil kerja sama Pemerintah Pusat melalui Kementerian PUPR c.q. BBWS Pemali Juana yang membiayai konstruksi fisiknya, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui Dinas PUSDATARU menyiapkan kajian DED-nya, dan Pemerintah Kota Pekalongan berkontribusi melalui penyediaan lahan dan penanggulangan aspek ekonominya.

Pemerintah Kota Pekalongan juga telah menyusun Revisi *Masterplan* Drainase Kota Pekalongan Tahun 2020 sebagai pedoman dalam penataan sistem drainase kota yang lebih terarah. Pihak lain non pemerintah seperti akademisi di antaranya Universitas Diponegoro, Institut Teknologi Bandung, Institut Pertanian Bogor banyak terlibat dalam berbagai kajian/studi. Bahkan dalam beberapa waktu terakhir melibatkan Pemerintah Belanda melalui Program *Blue Deal*.

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang ikut terlibat dalam penanganan banjir rob di Kota Pekalongan melalui penyusunan berbagai kajian, peningkatan kapasitas masyarakat dan ASN, dan pembangunan infrastruktur. Beberapa LSM tersebut, antara lain Yayasan Kemitraan melalui Aksi Adaptasi Perubahan Iklim dengan pendekatan 3S yaitu *Safekeeping – Surviving – Sustaining* (Melindungi – Mempertahankan – Melestarikan). Mercy Corps Indonesia melalui kegiatan *Zurich Flood Resilient Alliance* (ZFTA) yang untuk tahap berikutnya akan diperluas menjadi *Zurich Climate Resilient Alliance* (ZCRA). Selain itu *Hoogheemraadschap van Schieland en Krimpenerwaard* (HHSK) Belanda melalui *Witteveen Bos* juga telah membuat kajian tentang Pekalongan *Coastal Zone, Coastal Erosion and Flooding in the city of Pekalongan* yang dibiayai oleh HHSK Belanda tahun 2016.

Kota Pekalongan merupakan wilayah pesisir Utara Pulau Jawa. Wilayah pesisir merupakan wilayah yang sangat dinamis, dengan berbagai macam proses fisik, termasuk kenaikan muka air laut, amblesan tanah (*land subsidence*), serta erosi-sedimentasi. Selain itu, wilayah pesisir juga menerima berbagai dampak yang disebabkan oleh aktivitas manusia, sebagai contohnya adalah beban bangunan serta ekstraksi air tanah besar-besaran yang menyebabkan penurunan permukaan tanah. Semua proses tersebut mempengaruhi perubahan garis pantai dan perkembangan bentuk landscape pesisir.

Kota Pekalongan sebagai salah satu kota pesisir di pantai Utara Jawa dengan topografi yang landai merupakan kawasan yang sangat rawan terhadap kenaikan air laut. Kondisi ini tentu saja berbeda jika dibandingkan dengan topografi di pantai Selatan Jawa yang relatif lebih curam. Beberapa ahli mengatakan bahwa kondisi geografis Kota Pekalongan memiliki tingkat

kerentanan yang relatif tinggi terhadap pemanasan global. Tingginya nilai kerentanan itu tidak terlepas dari kondisi geomorfologi Kota Pekalongan yang berupa pantai berpasir dan erosi pantai mencapai lebih dari 1 meter per tahun. Selain itu, kisaran pasang surutnya sekitar 0,7 meter. Berdasarkan kajian yang dilakukan Diposaptono (2009), penghitungan nilai risiko terhadap kenaikan paras muka air laut di Kota Pekalongan rata-rata 2,4. Nilai tersebut dikategorikan sebagai daerah berisiko besar.

Bencana alam yang telah dan berisiko terjadi di wilayah Kota Pekalongan meliputi abrasi, rob, banjir dan angin puting beliung. Perubahan iklim global yang ditandai dengan kenaikan suhu bumi dan kenaikan permukaan air laut bisa jadi juga telah melanda wilayah Kota Pekalongan. Dalam beberapa tahun ini, upaya untuk menanggulangi rob/air pasang di wilayah Kota Pekalongan terus-menerus dilakukan namun kawasan tergenang rob senantiasa bertambah luas dan bertambah intensitasnya.

Bencana yang cukup signifikan memberikan dampak bagi masyarakat yang tinggal di Kota Pekalongan, khususnya Kecamatan Pekalongan Utara dan Kecamatan Pekalongan Barat, yaitu bencana banjir dan banjir rob/pasang. Bencana tersebut memberi dampak pada kehidupan masyarakat yang tinggal di kota ini. Tidak hanya berdampak pada kerusakan infrastruktur dan sarana wilayah saja, melainkan juga pada kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat setempat. Kawasan kumuh (*slum area*) yang terdapat di wilayah Kota Pekalongan, terutama disebabkan oleh bencana rob ini. Faktor pemicu terjadinya kawasan kumuh, bukan hanya karena prasarana dan sarana perumahan dan permukiman yang tidak memadai saja tetapi akibat rob yang lebih dominan.

Amblesan tanah (*land subsidence*) juga menjadi risiko bencana yang terjadi di wilayah Kota Pekalongan. Amblesan tanah di wilayah Kota Pekalongan terjadi karena tanah yang membentuk wilayah Kota Pekalongan adalah tanah *alluvial*, yang merupakan hasil sedimentasi. Tanah-tanah hasil sedimentasi masih memerlukan waktu ratusan tahun ke depan agar kondisi tanah menjadi stabil. Amblesan tanah juga memungkinkan terjadi karena kondisi cekungan air tanah yang kosong akibat eksploitasi atau pengambilan air tanah dalam yang semakin mengkhawatirkan. Hal ini terutama disebabkan oleh pengambilan air tanah yang terjadi, kapasitasnya melebihi dari kapasitas pengisian alami air tanah.

Indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat risiko bencana suatu wilayah yaitu Indeks Risiko Bencana (IRB). Indikator ini digunakan oleh BNPB sejak tahun 2013 dan dihitung berdasarkan komponen penyusun bahaya, kerentanan dan kapasitas pemerintah daerah. IRB dibatasi pada bahaya yang ditimbulkan oleh faktor alam, yang mencakup 9 (sembilan) jenis ancaman yaitu: gempa bumi, tsunami, letusan gunung api, tanah longsor, banjir, cuaca ekstrem, kekeringan, kebakaran hutan dan lahan, serta gelombang ekstrem dan abrasi. IRB Kota Pekalongan menunjukkan kecenderungan yang menurun tiap tahunnya dan pada tahun 2024 memiliki skor 110,42 atau dalam kategori sedang.

Tabel II-75
Tabel Perkembangan Indeks Risiko Bencana
Kota Pekalongan Tahun 2020-2024

No.	Tahun	Skor	Kelas Risiko
1	2020	138,13	Sedang
2	2021	138,13	Sedang
3	2022	138,13	Sedang
4	2023	122,75	Sedang
5	2024	110,42	sedang

Sumber: BNPB, 2025

IRB Kota Pekalongan mengalami penurunan dari 138,13 pada tahun 2020 menjadi 110,42 pada tahun 2024. Sementara itu IRB Provinsi Jawa Tengah juga menunjukkan penurunan yang lebih signifikan yakni dari 132,99 pada tahun 2020 menjadi 99,61 pada tahun 2024. Meskipun sama-sama mengalami penurunan di kedua wilayah, namun angka penurunan di Kota Pekalongan masih jauh rendah dibandingkan rata-rata Provinsi Jawa Tengah. Hal ini menunjukkan bahwa risiko bencana di Kota Pekalongan tersebut lebih besar dibandingkan dengan rata-rata risiko bencana di tingkat Provinsi Jawa Tengah

Pada tahun 2024, IRB Kota Pekalongan tercatat sebesar 110,42. Penurunan angka IRB ini merupakan hasil dari peningkatan nilai Indeks Ketahanan Daerah (IKD), yang mencerminkan bahwa program-program penanggulangan bencana di Kota Pekalongan telah berjalan secara efektif. Meskipun penurunan IRB menunjukkan perkembangan yang positif, Pemerintah Kota Pekalongan tetap perlu melanjutkan dan memperkuat upaya pengurangan risiko bencana secara berkelanjutan. Hal ini dilakukan agar IRB Kota Pekalongan dapat mencapai atau bahkan berada di bawah rata-rata IRB Provinsi Jawa Tengah, dengan tetap mengedepankan peningkatan kewaspadaan, inovasi, serta adaptasi sebagai bagian dari strategi ketahanan dan pembangunan yang berkelanjutan.

Kontribusi Penurunan Emisi GRK – IUP. Pemerintah menyadari bahwa perubahan iklim merupakan persoalan krusial, berdampak luas pada berbagai sendi kehidupan serta dapat mempengaruhi capaian pembangunan nasional atas dasar itu persoalan perubahan iklim memerlukan respon yang cepat, tepat, dan terintegrasi. Pemerintah Indonesia memiliki komitmen tinggi untuk turut serta dalam penanggulangan permasalahan perubahan iklim global yang juga diungkapkan pada saat COP 21 Paris pada bulan Desember 2015. Indonesia berkomitmen untuk menurunkan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) pada tahun 2030 sebesar 29 persen dengan Skenario *Fair* atau menggunakan kemampuan sendiri dan sebesar 41 persen jika menggunakan Skenario Ambisius atau apabila ada dukungan pendanaan internasional.

Pada tahun 2024, secara nasional nilai kumulatif potensi penurunan emisi yang tercapai adalah 5,69 Giga Ton Co2eq dengan nilai intensitas emisi adalah 166 Ton CO2eq per Milyar Rupiah (PDB konstan 2010). Nilai kumulatif potensi penurunan emisi tersebut diperoleh berdasarkan data kegiatan Pembangunan Rendah Karbon (PRK) yang masuk dari periode 2020-sekarang. Sedangkan untuk Provinsi Jawa Tengah, berdasarkan 4.481 Kegiatan Aksi PRK Perubahan Iklim yang telah dilaksanakan diperoleh total potensi penurunan emisi kumulatif sebesar 2968.669 juta Ton CO2EQ dengan nilai intensitas emisi adalah 1.74 Ton CO2EQ / Milyar Rupiah.

Kota Pekalongan memiliki total potensi penurunan emisi kumulatif pada tahun 2024 sebesar 4,76 Ton CO2EQ dengan nilai intensitas emisi adalah 1,74 Ton CO2EQ / Milyar Rupiah. Nilai tersebut masih belum maksimal dikarenakan masih perlu identifikasi lebih detail terhadap upaya atau kegiatan aksi perubahan iklim yang telah dilaksanakan. Alokasi anggaran yang ditetapkan pemerintah daerah untuk penanganan perubahan iklim di Kota Pekalongan sebesar 2 (dua) Milyar Rupiah.

Tabel II-76

Tabel Kegiatan Aksi Perubahan Iklim di Kota Pekalongan Tahun 2024

No.	Nama Kegiatan	Sektor Mitigasi	Realisasi	Potensi Penurunan Emisi	OPD Pelaksana
1.	Pembangunan TPS 3R	Pengelolaan Limbah	1 unit TPS3R	282.4766 Ton CO2EQ	DLH
2.	Fasilitasi Pengujian Kendaraan Bermotor	Energi	4168 KBWU (Kendaraan Bermotor Wajib Uji)	0.01 Ton CO2EQ	DINHUB
3.	Fasilitasi ATCS	Energi	Selama 12 bulan	71.00283 Ton CO2EQ	DINHUB

Sumber: Aplikasi Aksara, 2025

2.4.3. Kinerja Setiap Urusan Pemerintah Daerah

Kinerja setiap urusan pemerintah daerah merupakan indikator kinerja kunci (IKK) sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan surat Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Nomor 100.2.2.7/10582/OTDA tanggal 24 Desember 2024 Hal Penyampaian Pedoman Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2024, sebagai berikut:

Tabel II-77
Capaian Indikator Kinerja Kunci Kota Pekalongan Tahun 2020 - 2024

No. IKK	IKK Outcome	Satuan	Capaian		Satuan	Capaian		
			2020	2021		2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar								
Pendidikan								
1.a.1	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	persen	96,23	84,23	persen	100,00	98,31	101,29
1.a.2	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	persen	93,49	89,30	persen	100,00	100,00	102,49
1.a.3	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	persen	82,04	79,65	persen	100,00	100,00	99,05
1.a.4	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	persen	25,49	5,06	persen	100,00	100,00	54,40
Kesehatan								
1.b.1	Rasio daya tampung Rumah Sakit Rujukan	rasio	0,22	0,24	rasio	2,44	2,52	2,52
1.b.2	Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi	persen	100,00	100,00	persen	100,00	100,00	100,00
1.b.3	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	persen	98,22	95,94	persen	97,49	97,50	100,00
1.b.4	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	persen	100,00	100,00	persen	100,00	100,00	100,00
1.b.5	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	persen	99,59	99,26	persen	99,47	99,16	99,53
1.b.6	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	persen	88,39	83,40	persen	96,37	95,08	100,00
1.b.7	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	persen	52,54	100,00	persen	100,00	100,00	95,29
1.b.8	Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	persen	28,57	61,88	persen	76,66	86,02	90,25
1.b.9	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	persen	70,57	79,92	persen	76,75	94,62	100,00
1.b.10	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	persen	27,10	76,11	persen	47,29	65,29	81,68
1.b.11	Persentase penderita Diabetes Melitus (DM) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	persen	100,00	100,00	persen	100,00	100,00	100,00
1.b.12	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	persen	100,00	100,00	persen	100,00	100,00	100,00

No. IKK	IKK Outcome	Satuan	Capaian		Satuan	Capaian		
			2020	2021		2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.b.13	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	persen	78,43	93,67	persen	100,00	100,00	100,00
1.b.14	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	persen	100,00	95,66	persen	100,00	100,00	100,00
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang								
1.c.1	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di Wilayah Sungai Kewenangan Kab/Kota	persen	35,35	36,90	persen	40,01	70,47	80,07
1.c.2	Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kab/Kota	persen	83,63	83,63	persen	83,63	91,72	100,00
1.c.3	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	persen	100,00	79,62	persen	100,00	-	-
1.c.4	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	persen	nihil	100,00	persen	100,00	100,00	86,67
1.c.5	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	persen	NA	99,69	persen	100,00	100,00	100,00
1.c.6	Rasio kepatuhan IMB kabupaten/kota	persen	100,00	20,78	persen	99,06	100,00	100,00
1.c.7	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota	persen	80,32	80,66	persen	84,28	83,77	84,50
1.c.8.1	Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi		nihil	95,00	persen	7,15	56,83	19,00
1.c.8.2	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	persen	nihil	100,00	persen	100,00	100,00	100,00
Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman								
1.d.1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	persen	100,00	100,00	persen	100,00	-	-
1.d.2	Fasilitasi hunian penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota	persen	12,00	-	persen	100,00	100,00	100,00
1.d.3	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kab/ kota yang ditangani	persen	11,72	87,93	persen	46,93	59,72	12,14
1.d.4	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	persen	2,69	2,31	persen	1,87	1,24	0,64
1.d.5	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	persen	0,13	0,56	persen	100,00	100,00	54,83
Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat								
1.e.1	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	persen	94,98	100,00	persen	100,00	100,00	100,00
1.e.2	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	persen	28,00	100,00	persen	100,00	100,00	100,00
1.e.3	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	orang	312.209	277.622	persen	100,00	100,00	100,00

No. IKK	IKK Outcome	Satuan	Capaian		Satuan	Capaian		
			2020	2021		2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.e.4	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	orang	27.333,00	315.997,00	persen	100,00	100,00	100,00
1.e.5	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	orang	8.404	1.049.900	persen	100,00	100,00	100,00
1.e.6	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	persen	79,31	100,00	persen	100,00	100,00	100,00
1.e.7	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	menit	10,69	11,10	menit	8,21	7,45	9,41
Sosial								
1.f.1	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM)	persen	100,00	98,67	persen	100,00	100,00	100,00
1.f.2	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	persen	100,00	100,00	persen	100,00	100,00	100,00
Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar								
Tenaga Kerja								
2.a.1	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	persen	84,00	47,06	persen	100,00	100,00	-
2.a.2	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	persen	75,00	3,78	persen	0,07	0,24	5,24
2.a.3	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	Juta Rupiah per Orang	50,18	45,05	Juta Rupiah per Orang	49,79	49,42	49,89
2.a.4	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan).	persen	77,00	90,43	persen	9,50	10,57	11,59
2.a.5	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten/kota	persen	4,00	21,80	persen	34,39	19,91	32,95
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak								
2.g.1	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	persen	16,88	3,76	persen	3,60	4,36	8,23
2.g.2	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten/kota	persen	0,02	0,01	persen	0,02	100,00	100,00
2.g.3	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	Rasio per 100.000	0,02	10,65	Rasio per 100.000	33,08	15,01	18,46
Pangan								
2.h.1	Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/ jagung sesuai kebutuhan)	persen	0,01	0,25	persen	0,36	0,01	45,45
Pertanahan								
2.i.1	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	persen	nihil	-	persen	100,00	100,00	100,00
2.i.2	Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	persen	72,07	100,00	persen	100,00	100,00	100,00
2.i.3	Tersedianya lokasi pembangunan dalam rangka penanaman modal.	persen	nihil	100,00	persen	100,00	163,81	88,73

No. IKK	IKK Outcome	Satuan	Capaian		Satuan	Capaian		
			2020	2021		2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.i.4	Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap didistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	persen	nihil	-	persen	100,00	100,00	-
2.i.5	Tersedianya tanah untuk masyarakat	persen	nihil	-	persen	100,00	100,00	-
2.i.6	Penangan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	persen	nihil	-	persen	100,00	100,00	-
Lingkungan Hidup								
2.j.1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kab/Kota	indeks	50,84	54,31	indeks	54,36	56,24	59,15
2.j.3	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	persen	13,79	32,84	persen	52,80	14,29	76,12
Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil								
2.k.1.1	Perekaman KTP elektronik	persen	97,73	96,04	persen	95,02	99,19	97,77
2.k.1.2	Persentase anak usia 01-7 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	persen	44,48	52,12	persen	56,37	60,90	68,76
2.k.1.3	Kepemilikan akta kelahiran	persen	93,46	94,49	persen	98,52	99,07	99,31
2.k.1.4	Jumlah Perangkat Daerah yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	persen	3,23	23,33	persen	23,33	26,67	33,33
Pengendalian penduduk dan keluarga berencana								
2.m.1	TFR (Angka Kelahiran Total)	angka	2,25	2,16	angka	2,18	2,03	1,64
2.m.2	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	persen	67,72	68,47	persen	64,27	61,46	68,67
2.m.3	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	persen	17,95	31,53	persen	12,78	14,95	8,48
Perhubungan								
2.n.1	Rasio konektivitas kabupaten/kota	indeks	85,71	0,86	indeks	0,86	0,86	1,00
2.n.2	V/C Rasio	Rasio Volume/ Capacity	0,36	0,49	Rasio Volume/ Capacity	0,39	0,44	0,44
Komunikasi dan Informatika								
2.o.1	Persentase Perangkat Daerah (PD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	persen	100,00	100,00	persen	100,00	100,00	100,00
2.o.2	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	persen	100,00	9,20	persen	100,00	100,00	100,00
2.o.3	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota	persen	347,43	75,36	persen	95,72	12,00	29,46
Koperasi, usaha kecil dan menengah								
2.p.1	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	persen	54,46	16,25	persen	20,21	22,48	57,42
2.p.2	Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirasausaha	persen	11,74	11,63	persen	11,71	12,85	32,00
Penanaman Modal								
2.q	Persentase peningkatan investasi di kabupaten/kota	persen	-94,14	102,13	persen	-63,56	318,43	-62,68
Kepemudaan dan Olahraga								
2.r.1	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	persen	0,20	0,05	persen	0,47	0,72	2,56
2.r.2	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	persen	0,10	4,98	persen	5,22	6,83	20,59
2.r.3	Peningkatan prestasi olahraga	medali	599,00	9,00	persen	7,00	-	28,00
Statistik								

No. IKK	IKK Outcome	Satuan	Capaian		Satuan	Capaian		
			2020	2021		2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.s.1	Persentase Perangkat Daerah (PD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	persen	100,00	100,00	persen	100,00	100,00	100,00
2.s.2	Persentase PD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	persen	100,00	100,00	persen	100,00	100,00	100,00
	Persandian							
2.t	Tingkat keamanan informasi pemerintah	persen	NA	100,00	persen	14,88	74,88	74,88
	Kebudayaan							
2.u	Terlestarikannya Cagar Budaya	persen	1,00	14,71	persen	25,71	100,00	100,00
	Perpustakaan							
2.v.1	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	poin TGM	29,38	33,83	poin TGM	55,21	47,70	80,67
2.v.2	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	indeks	nihil	31,20	indeks	86,72	76,26	94,37
	Kearsipan							
2.w.1	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Ps40 dan 59 U 43/2009)	persen	37,25	60,75	persen	60,75	51,82	73,63
2.w.2	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	persen	100,00	66,67	persen	66,67	33,33	33,33
	Urusan Pilihan							
	Kelautan dan Perikanan							
3.a	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) kabupaten/kota (sumber data: one data KKP)	ton	16.157.232	10.536,31	persen	70,28	66,86	82,70
	Pariwisata							
3.b.1	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	persen	-0,73	-100,00	persen	8.400,00	243,53	70,89
3.b.2	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke Kabupaten/Kota	persen	-0,61	11,56	persen	228,16	21,20	0,78
3.b.3	Tingkat hunian akomodasi	persen	0,22	67,34	persen	70,49	58,09	60,25
3.b.4	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	persen	nihil	184,00	persen	16,68	17,04	6,38
3.b.5	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	persen	97,67	0,05	persen	12,67	12,83	11,19
	Pertanian							
3.c.1	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	Per ton per hektar	612,84	620,04	Per ton per hektar	688,53	5,79	722,10
3.c.2	Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menularPersentase kasus zoonosis kabupaten/ kota	persen	-77,00	-14,35	persen	14.833,33	-97,99	-2,23
	Perdagangan							
3.f.1	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	persen	50,00	11,55	persen	100,00	68,13	89,25
3.f.2	Persentase kinerja realisasi pupuk	persen	1,00	92,31	persen	79,53	0,15	68,98
3.f.3	Persentase alat & alat ukur, takar, timbang dan perlengkap annya	persen	73,36	74,01	persen	76,93	47,44	69,80

No. IKK	IKK Outcome	Satuan	Capaian		Satuan	Capaian		
			2020	2021		2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	(UTTP) bertanda tera sah yang berlaku							
	Perindustrian							
3.g.1	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di kab/kota	persen	59,27	17,32	persen	2,23	29,56	13,83
3.g.2	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK	persen	65,00	61,50	persen	65,71	99,00	60,32
3.g.3	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	persen	nihil	100,00	persen	100,00	100,00	100,00
3.g.4	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	persen	nihil	-	persen	100,00	-	-
3.g.5	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah kabupaten/kota	persen	nihil	-	persen	100,00	-	-
3.g.6	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini		4.650,00	95,00	persen	90,00	100,00	100,00
Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan								
	Perencanaan dan Keuangan							
4.a.1	Rasio Belanja Pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan	persen	NA	22,38	persen	23,46	22,09	27,70
4.a.2	Rasio PAD	rasio	NA	2,21	persen	26,64	25,61	26,68
4.a.3	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	level	NA	2,00	level	3,00	3,00	3,00
4.a.4	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	level	NA	3,00	level	3,00	3,00	3,00
4.a.5	Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures)	persen	NA	78,92	persen	77,77	78,66	89,06
4.a.6	Opini Laporan Keuangan	indeks	NA	10,00	indeks	8,00	8,00	9,00
	Pengadaan							
4.b.1	Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya. yang ditandatangani pada kuartal pertama	persen	NA	-	persen	-	-	-
4.b.2	Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	persen	NA	4,52	persen	100,00	100,00	41,27
4.b.3	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	persen	NA	97,55	persen	19,51	14,70	100,00
4.b.4	Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, Dan Koperasi Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah	persen	NA	10,55	persen	26,11	-3,87	-18,79
	Kepegawaian							
4.c.1	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (persen) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)		NA	168,50	persen	83,66	66,05	69,66
4.c.2	Rasio pegawai Fungsional (persen) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	persen	NA	8,07	persen	19,20	22,35	21,06

No. IKK	IKK Outcome	Satuan	Capaian		Satuan	Capaian		
			2020	2021		2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.c.3	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (persen) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	persen	NA	1,82	persen	17,45	25,77	47,91
	Manajemen Keuangan							
4.d.1	Budget execution: Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	persen	NA	2,22	persen	3,23	2,33	1,15
4.d.2	Revenue mobilization: Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	persen	NA	17,66	persen	18,02	9,36	9,14
4.d.3	Manajemen Aset	persen	NA	4,00	persen	4,00	4,00	4,00
4.d.4	Cash Management: Rasio Anggaran Sisa terhadap Total Belanja dalam APBD Tahun Sebelumnya	persen	NA	11,91	persen	6,56	5,40	5,35
	Transparansi dan Partisipasi Publik							
4.e.1	Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan (Information on resources available to frontline service delivery units)	persen	NA	100,00	persen	100,00	100,00	94,30
4.e.2	Akses publik terhadap informasi keuangan daerah (Public access to fiscal information)	persen	NA	100,00	persen	100,00	100,00	100,00

Sumber: Bapperida Kota Pekalongan, data diolah, 2025

2.5. HASIL EVALUASI KINERJA PEMERINTAH DAERAH SAMPAI DENGAN TAHUN 2024

Berdasarkan Pasal 255 Permendagri No. 86 Tahun 2017 bahwa Evaluasi terhadap hasil RPJM Daerah antarkabupaten/kota dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun dengan menggunakan hasil evaluasi hasil RKPD Kabupaten/Kota masing-masing. Evaluasi capaian indikator kinerja daerah ditunjukkan dengan capaian Indikator Kinerja Utama dan Indikator Program yang terdiri atas Aspek Kesejahteraan Masyarakat, Aspek Pelayanan Umum dan Aspek Daya Saing Daerah. Pada evaluasi tersebut, status pencapaian kinerja yang dijabarkan dalam evaluasi terbagi dalam 2 kategori, yaitu tercapai dan tidak tercapai. Rekapitulasi capaian Indikator Kinerja Utama Daerah RPJM Daerah Tahun 2021-2026 di tahun 2024 dari 101 indikator sebagai berikut:

1. Evaluasi terhadap Perubahan RKPD Tahun 2024
 - Tercapai : 64 Indikator (63,37%)
 - Tidak Tercapai : 32 Indikator (31,68%)
 - Belum Tersedia Data : 5 Indikator (4,95%)
2. Evaluasi terhadap Target Akhir RPJM Daerah Tahun 2021-2026
 - Tercapai : 63 Indikator (62,38%)
 - Tidak Tercapai : 33 Indikator (32,67%)
 - Belum Tersedia Data : 5 Indikator (4,95%)

Tabel II-78
Capaian Indikator Kinerja Daerah (IKD) Kota Pekalongan
Sampai Dengan Tahun 2024

No.	Aspek	Satuan	Target Akhir RPJM Daerah	Kondisi Kinerja pada Awal RPJM Daerah	Realisasi Tahun 2023	Tahun 2024				Realisasi Capaian RPJM Daerah sd 2024	Persen capaian target RPJM Daerah	Status Ketercapaian Terhadap Target Akhir RPJM Daerah
						Target	Realisasi	Tingkat Capaian s.d 2024	Ketercapaian Terhadap Target Perub RKPD 2024			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Aspek Kesejahteraan Masyarakat												
1	Usia Harapan Hidup	Tahun	74.66	74.44	74.60	74.57	74.79	100.30	Tercapai	74.79	100.17	Tercapai
2	Angka Kemiskinan	Persen	5.89	7.59	6.81	6.29	6.71	93.74	Tidak Tercapai	6.71	87.78	Tidak Tercapai
3	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	76.03	75.40	76.71	75.71	77.21	101.98	Tercapai	77.21	101.55	Tercapai
4	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	5.99	6.89	5.02	6.31	4.91	128.51	Tercapai	4.91	122.00	Tercapai
5	Persentase kelurahan dengan kawasan kumuh kurang dari 10 persen	Persen	100.00	55.56	70.37	77.78	100.00	128.57	Tercapai	100.00	100.00	Tercapai
6	Persentase Luas genangan Banjir dan Rob	Persen	12.17	37.27	18.98	19.58	8.17	239.66	Tercapai	8.17	148.96	Tercapai
7	Persentase Capaian Layanan Infrastruktur Dasar	Persen	91.04	n/a	90.48	90.48	91.95	101.62	Tercapai	91.95	100.10	Tercapai
8	PDRB Perkapita	Rp. Juta/ Jiwa/Tahun	40.65	n/a	43.29	37.82	45.99	121.60	Tercapai	45.99	113.14	Tercapai
9	Jumlah konflik sosial	Kasus	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	100.00	Tercapai	0.00	100.00	Tercapai
10	Indeks Keluarga Sehat	Indeks	0.50	n/a	0.35	0.35	0.38	108.57	Tercapai	0.38	76.00	Tidak Tercapai
11	Angka Kematian Ibu	Per 100.000 KH	80.01	188.23	122.77	104.14	129.70	80.29	Tidak Tercapai	129.70	61.69	Tidak Tercapai
12	Angka Kematian Bayi (AKB)	Per 1.000 KH	7.00	8.90	13.71	7.60	10.12	75.10	Tidak Tercapai	10.12	69.17	Tidak Tercapai
13	Angka Kematian Balita (AKABA)	Per 1.000 KH	9.00	10.27	18.42	9.61	16.08	59.76	Tidak Tercapai	16.08	55.97	Tidak Tercapai
14	Persentase Penurunan Warga Miskin (DTKS)	Persen	11.89	n/a	4.40	2.50	5.69	227.60	Tercapai	5.69	47.86	Tidak Tercapai
15	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Indeks	61.00	57.87	n/a	65.31	n/a	n/a	Belum Tersedia Data	n/a	n/a	Belum Tersedia Data
16	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	Persen	71.34	75.77	73.95	74.22	76.06	102.48	Tercapai	76.06	106.62	Tercapai
17	Persentase perumahan dan permukiman yang tidak kumuh	Persen	100.00	n/a	95.09	96.24	94.12	97.80	Tidak Tercapai	94.12	94.12	Tidak Tercapai

No.	Aspek	Satuan	Target Akhir RPJM Daerah	Kondisi Kinerja pada Awal RPJM Daerah	Realisasi Tahun 2023	Tahun 2024				Realisasi Capaian RPJM Daerah sd 2024	Persen capaian target RPJM Daerah	Status Ketercapaian Terhadap Target Akhir RPJM Daerah
						Target	Realisasi	Tingkat Capaian s.d 2024	Ketercapaian Terhadap Target Perub RKPD 2024			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
18	Luas Genangan Banjir dan Rob	Hektar	565.00	1730.00	880.83	880.83	379.02	232.40	Tercapai	379.02	149.07	Tercapai
19	Persentase penduduk yang mendapatkan akses Layanan Air Minum	Persen	100.00	n/a	100.00	100.00	100.00	100.00	Tercapai	100.00	100.00	Tercapai
20	Persentase pelayanan sampah	Persen	73.12	73.75	71.45	71.12	71.85	101.03	Tercapai	71.85	98.26	Tidak Tercapai
21	Pertumbuhan ekonomi	Persen	4.55	3.59	5.44	3.32	5.34	160.84	Tercapai	5.34	117.36	Tercapai
22	Persentase pengelolaan potensi konflik sosial	Persen	100.00	n/a	100.00	100.00	100.00	100.00	Tercapai	100.00	100.00	Tercapai
Aspek Pelayanan Umum												
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR												
Urusan Pendidikan												
1	Persentase capaian SPM pendidikan serta ketercukupan pendidik dan tenaga kependidikan	Persen	100.00	59.51	99.67	100.00	99.12	99.12	Tidak Tercapai	99.12	99.12	Tidak Tercapai
2	Persentase sekolah yang menjalankan kurikulum muatan lokal	Persen	100.00	n/a	100.00	100.00	100.00	100.00	Tercapai	100.00	100.00	Tercapai
Urusan Kesehatan												
3	Persentase capaian SPM Kesehatan	Persen	100.00	n/a	106.85	100.00	97.52	97.52	Tidak Tercapai	97.52	97.52	Tidak Tercapai
Urusan Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang												
4	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik (IKK Outcome)	Persen	99.40	n/a	100.00	100.00	74.13	74.13	Tidak Tercapai	74.13	74.58	Tidak Tercapai
5	Persentase Luas Kawasan Kota Rawan Banjir dan Rob yang Terlindungi Oleh Infrastruktur Pengendalian Banjir	Persen	87.83	n/a	77.88	80.42	91.83	114.19	Tercapai	91.83	104.55	Tercapai
6	Persentase layanan air minum terhadap jumlah penduduk	Persen	92.115	n/a	100.00	100.00	100.00	111.53	Tercapai	100.00	108.56	Tercapai
7	Persentase Peningkatan Kemantapan Jalan	Persen	1.09	n/a	2.19	2.19	2.85	130.14	Tercapai	2.85	261.47	Tercapai
8	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Regulasi	96.251	n/a	99.89	99.89	99.45	99.56	Tidak Tercapai	99.45	103.32	Tercapai
9	Pengembangan Sarana Persampahan	Persen	100.00	n/a	20.00	60.00	60.00	100.00	Tercapai	60.00	60.00	Tidak Tercapai

No.	Aspek	Satuan	Target Akhir RPJM Daerah	Kondisi Kinerja pada Awal RPJM Daerah	Realisasi Tahun 2023	Tahun 2024				Realisasi Capaian RPJM Daerah sd 2024	Persen capaian target RPJM Daerah	Status Ketercapaian Terhadap Target Akhir RPJM Daerah
						Target	Realisasi	Tingkat Capaian s.d 2024	Ketercapaian Terhadap Target Perub RKPD 2024			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Urusan Perumahan Dan Kawasan Permukiman												
10	Persentase Jumlah Rumah Layak Huni	Persen	95.58	97.93	98.76	98.90	72.75	73.56	Tidak Tercapai	72.75	76.11	Tidak Tercapai
Urusan Ketentraman. Ketertiban Umum Dan Linmas												
12	Persentase Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum Sesuai Dengan SPM	Persen	100.00	n/a	82.41	85.00	90.74	106.75	Tercapai	90.74	90.74	Tidak Tercapai
13	Persentase korban bencana yang ditangani	Persen	100.00	11.77	100.00	100.00	100.00	100.00	Tercapai	100.00	100.00	Tercapai
14	Persentase penanganan bencana kebakaran	Persen	100.00	n/a	100.00	100.00	100.00	100.00	Tercapai	100.00	100.00	Tercapai
Urusan Sosial												
15	Persentase Penurunan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persen	3.82	n/a	17.64	4.00	16.68	417.00	Tercapai	16.68	436.65	Tercapai
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR												
Urusan Tenaga Kerja												
15	Persentase Tenaga Siap Pakai yang ditempatkan	Persen	52.36	68.00	49.26	52.29	56.82	108.66	Tercapai	56.82	108.52	Tercapai
Urusan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak												
16	Indeks sumbangan pendapatan perempuan dalam IDG	Indeks	28.53	n/a	n/a	28.56	n/a	n/a	Belum Tersedia Data	n/a	n/a	Belum Tersedia Data
17	Skor Kota Layak Anak	Skor	636.00	602.00	769.80	769.80	n/a	n/a	Belum Tersedia Data	n/a	n/a	Belum Tersedia Data
Urusan Pangan												
18	Persentase penanganan daerah rawan pangan	Persen	100.00	n/a	100.00	100.00	100.00	100.00	Tercapai	100.00	100.00	Tercapai
Urusan Pertanahan												
19	Persentase peta bidang tanah untuk pembangunan fasilitas umum yang sudah teregister	Persen	100.00	n/a	n/a	100.00	100.00	100.00	Tercapai	100.00	100.00	Tercapai
Urusan Lingkungan Hidup												
20	Persentase tingkat pencemaran air	Persen	60.00	n/a	28.57	42.86	54.29	78.95	Tidak Tercapai	54.29	110.52	Tercapai
21	Persentase Kenaikan Luasan RTH	Persen	0.34	0.00	1.31	0.24	0.11	45.83	Tidak Tercapai	0.11	32.35	Tidak Tercapai

No.	Aspek	Satuan	Target Akhir RPJM Daerah	Kondisi Kinerja pada Awal RPJM Daerah	Realisasi Tahun 2023	Tahun 2024				Realisasi Capaian RPJM Daerah sd 2024	Persen capaian target RPJM Daerah	Status Ketercapaian Terhadap Target Akhir RPJM Daerah
						Target	Realisasi	Tingkat Capaian s.d 2024	Ketercapaian Terhadap Target Perub RKPD 2024			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
22	Persentase peningkatan pengelolaan sampah	Persen	69.91	n/a	95.20	70.68	92.55	130.94	Tercapai	92.55	132.38	Tercapai
23	Tertib Hukum Lingkungan	Persen	60.10	20.00	43.04	43.00	43.51	101.19	Tercapai	43.51	72.40	Tidak Tercapai
Urusan Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil												
24	Tingkat cakupan layanan administrasi kependudukan	Persen	91.38	82.37	83.56	89.50	89.28	99.75	Tidak Tercapai	89.28	97.70	Tidak Tercapai
Urusan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa												
25	Persentase swadaya masyarakat dalam pembangunan berbasis masyarakat	Persen	10.00	n/a	8.45	9.02	9.51	105.43	Tercapai	9.51	95.10	Tidak Tercapai
Urusan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana												
26	Persentase pencapaian pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	Persen	67.65	n/a	61.46	67.55	64.41	95.35	Tidak Tercapai	64.41	95.21	Tidak Tercapai
Urusan Perhubungan												
27	Persentase Kinerja Ruas Jalan dengan Kategori A	Persen	28.00	n/a	24.69	28.00	23.53	84.04	Tidak Tercapai	23.53	84.04	Tidak Tercapai
Urusan Komunikasi Dan Informatika												
28	Indeks domain tata kelola SPBE	Indeks	3.25	n/a	3.29	3.30	3.30	100.00	Tercapai	3.30	101.54	Tercapai
29	Kinerja Unit Pelayanan Informasi Publik	Mutu Pelayanan	Sangat Baik (Nilai 88.31 – 100)	n/a	96.62	Sangat Baik (Nilai 88.31 – 100.00)	96.03	96.03	Tercapai	96.03	96.03	Tercapai
Urusan Koperasi dan UKM												
30	Nilai modal usaha UMKM dari koperasi	Rp. Trilyun	9.02	n/a	11.46	8.42	10.33	122.68	Tercapai	10.33	114.52	Tercapai
Urusan Penanaman Modal												
31	Nilai Investasi sampai dengan tahun rencana	Milyar Rupiah	216.78	410.60	765.82	212.54	171.08	80.49	Tidak Tercapai	171.08	78.92	Tidak Tercapai
Urusan Kebudayaan												
32	Persentase Peningkatan Kelompok Budaya	Persen	1.46	47.20	1.53	1.50	1.50	100.00	Tercapai	1.50	100.00	Tercapai
Urusan Perpustakaan												
33	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat (IKK Outcome)	Indeks	20.73	n/a	19.25	20.32	51.47	253.30	Tercapai	51.47	248.29	Tercapai

No.	Aspek	Satuan	Target Akhir RPJM Daerah	Kondisi Kinerja pada Awal RPJM Daerah	Realisasi Tahun 2023	Tahun 2024				Realisasi Capaian RPJM Daerah sd 2024	Persen capaian target RPJM Daerah	Status Ketercapaian Terhadap Target Akhir RPJM Daerah
						Target	Realisasi	Tingkat Capaian s.d 2024	Ketercapaian Terhadap Target Perub RKPD 2024			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Urusan Kearsipan												
34	Indeks Pengawasan Kearsipan Tingkat Kota (ANRI)	Indeks	74.40	87.59	91.02	91.04	91.39	100.38	Tercapai	91.39	122.84	Tercapai
Urusan Kepemudaan Dan Olahraga												
35	Tingkat partisipasi pemuda dalam pembangunan	Persen	1.37	n/a	1.39	1.39	2.75	197.84	Tercapai	2.75	200.73	Tercapai
36	Prestasi olahraga tingkat provinsi	Cabor	15.00	4.00	6.00	14.00	14.00	100.00	Tercapai	14.00	93.33	Tidak Tercapai
Urusan Statistik												
37	Persentase ketersediaan data statistik sektoral	Persen	80.00	n/a	77.73	98.50	97.87	99.36	Tidak Tercapai	97.87	122.34	Tercapai
Urusan Persandian												
38	Indeks Tata Kelola KAMI	Tingkat	2	n/a	II	II	III+	> 100.00	Tercapai	III+	> 100.00	Tercapai
URUSAN PILIHAN												
Urusan Kelautan dan Perikanan												
39	Jumlah Total Produksi Perikanan (Budidaya dan Tangkap) Kab/Kota	Ton	15,600.00	n/a	10,123.79	15,293.00	12,656.43	82.76	Tidak Tercapai	12,656.43	81.13	Tidak Tercapai
Urusan Pariwisata												
40	Tingkat Kunjungan Wisata	Orang	625,000	316,440	1,258,597	1,000,000	1,130,104	113.01	Tercapai	1,130,104	180.82	Tercapai
Urusan Pertanian												
41	Nilai produksi tanaman pangan. hortikultura dan peternakan	Rp. Juta	259,492,900	n/a	637,811,340	251,474,390	334,022.55	132.83	Tercapai	334,022.55	128.72	Tercapai
Urusan Perindustrian												
42	Pertumbuhan Industri	Persen	0.07	2.38	2.30	2.30	0.79	34.35	Tidak Tercapai	0.79	1,128.57	Tercapai
Urusan Perdagangan												
43	Nilai Ekspor Perdagangan	Juta USD	27.51	n/a	11.09	26.97	14.50	53.76	Tidak Tercapai	14.50	52.71	Tidak Tercapai
URUSAN PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN												
Sekretariat Daerah												
44	Persentase Capaian Kinerja Pembangunan	Persen	94.00	n/a	96.38	96.50	94.30	97.72	Tidak Tercapai	94.30	100.32	Tercapai
Sekretariat DPRD												
45	Persentase pelayanan agenda kerja DPRD	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	Tercapai	100.00	100.00	Tercapai
URUSAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN												

No.	Aspek	Satuan	Target Akhir RPJM Daerah	Kondisi Kinerja pada Awal RPJM Daerah	Realisasi Tahun 2023	Tahun 2024				Realisasi Capaian RPJM Daerah sd 2024	Persen capaian target RPJM Daerah	Status Ketercapaian Terhadap Target Akhir RPJM Daerah
						Target	Realisasi	Tingkat Capaian s.d 2024	Ketercapaian Terhadap Target Perub RKPD 2024			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Perencanaan												
46	Persentase Program RKPD selaras dengan RPJM Daerah	Persen	100.00	97.33	100.00	100.00	100.00	100.00	Tercapai	100.00	100.00	Tercapai
Keuangan												
47	Penetapan APBD dan penyusunan LKD tepat waktu	Persen	100.00	n/a	100.00	100.00	100.00	100.00	Tercapai	100.00	100.00	Tercapai
48	Rasio PAD	Persen	2.06	n/a	2.26	2.01	1.93	96.02	Tidak Tercapai	1.93	93.69	Tidak Tercapai
Kepegawaian												
49	Persentase laporan SKP ASN tepat waktu	Persen	90.00	n/a	98.90	90.00	99.97	111.07	Tercapai	99.97	111.07	Tercapai
Pendidikan dan Pelatihan												
50	Persentase jumlah ASN yang meningkat kompetensinya	Persen	40.00	n/a	34.37	40.00	75.18	187.95	Tercapai	75.18	187.95	Tercapai
Penelitian dan Pengembangan												
51	Persentase Laporan Hasil Litbang	Persen	100.00	n/a	100.00	100.00	100.00	100.00	Tercapai	100.00	100.00	Tercapai
UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN												
Inspektorat Daerah												
52	Persentase OPD yang telah menerapkan SPIP pada level terdefinisi	Persen	100.00	n/a	66.67	77.42	73.33	94.72	Tidak Tercapai	73.33	73.33	Tidak Tercapai
53	Jumlah OPD yang memenuhi standar pengusulan predikat WBK/WBBM	OPD	16.00	n/a	14.00	14.00	26.00	185.72	Tercapai	26.00	162.50	Tercapai
URUSAN KEWILAYAHAN												
Kecamatan												
54	Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan. Pelayanan Publik. Pemberdayaan Masyarakat. Trantibum (Kec.Pekalongan Utara)	Persen	100.00	n/a	99.84	100.00	103.33	103.33	Tercapai	103.33	103.33	Tercapai
55	Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan. Pelayanan Publik. Pemberdayaan Masyarakat. Trantibum (Kec. Pekalongan Selatan)	Persen	100.00	n/a	99.87	100.00	100.05	100.05	Tercapai	100.05	100.05	Tercapai
56	Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan. Pelayanan Publik.	Persen	100.00	n/a	99.73	100.00	102.31	102.31	Tercapai	102.31	102.31	Tercapai

No.	Aspek	Satuan	Target Akhir RPJM Daerah	Kondisi Kinerja pada Awal RPJM Daerah	Realisasi Tahun 2023	Tahun 2024				Realisasi Capaian RPJM Daerah sd 2024	Persen capaian target RPJM Daerah	Status Ketercapaian Terhadap Target Akhir RPJM Daerah
						Target	Realisasi	Tingkat Capaian s.d 2024	Ketercapaian Terhadap Target Perub RKPD 2024			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Pemberdayaan Masyarakat. Trantibum (Kec. Pekalongan Barat)											
57	Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan. Pelayanan Publik. Pemberdayaan Masyarakat. Trantibum (Kec. Pekalongan Timur)	Persen	100.00	n/a	100.00	100.00	113.13	113.13	Tercapai	113.13	113.13	Tercapai
UNSUR PEMERINTAHAN UMUM												
Kesatuan Bangsa dan Politik												
58	Persentase etnis/suku /agama/ormas dan LSM yang memahami nilai-nilai kehidupan berbangsa	Persen	100.00	n/a	100.00	100.00	100.00	100.00	Tercapai	100.00	100.00	Tercapai
59	Persentase Partai Politik dan Lembaga Pendidikan yang Memahami Tata Kehidupan Politik	Persen	100.00	n/a	100.00	100.00	100.00	100.00	Tercapai	100.00	100.00	Tercapai
Aspek Daya Saing												
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	50.90	54.31	56.24	64.11	59.15	92.26	Tidak Tercapai	59.15	116.21	Tercapai
2	Persentase Seni Budaya yang dilestarikan	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	Tercapai	100.00	100.00	Tercapai
3	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	75.69	69.66	77.12	73.69	87.31	118.48	Tercapai	87.31	115.35	Tercapai
4	Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	9.92	9.18	9.29	9.59	9.34	97.39	Tidak Tercapai	9.34	94.15	Tidak Tercapai
5	Persentase satuan pendidikan yang menerapkan pendidikan karakter dan pendidikan keagamaan	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	Tercapai	100.00	100.00	Tercapai
6	Kategori Kota Layak Anak	Kategori	Madya	Madya	Nindya	Nindya	n/a	n/a	Belum Tersedia Data	n/a	n/a	Belum Tersedia Data
7	Indeks Kualitas Air	Indeks	35.39	13.29	48.86	59.37	50.56	85.16	Tidak Tercapai	50.56	142.87	Tercapai
8	Indeks Kualitas Lahan	Indeks	23.61	5.17	24.39	37.64	26.14	69.45	Tidak Tercapai	26.14	110.72	Tercapai
9	Regulasi bidang perencanaan tata ruang dan pemanfaatan ruang yang ditetapkan	Regulasi	7.00	n/a	3.00	7.00	3.00	42.86	Tidak Tercapai	3.00	42.86	Tidak Tercapai
10	Tingkat pelayanan jalan (Level Of Service)	Kategori	B	C	B	B	B	100.00	Tercapai	B	100.00	Tercapai
11	Persentase keterhubungan jalan	Persen	100.00	n/a	100.00	100.00	100.00	100.00	Tercapai	100.00	100.00	Tercapai

No.	Aspek	Satuan	Target Akhir RPJM Daerah	Kondisi Kinerja pada Awal RPJM Daerah	Realisasi Tahun 2023	Tahun 2024				Realisasi Capaian RPJM Daerah sd 2024	Persen capaian target RPJM Daerah	Status Ketercapaian Terhadap Target Akhir RPJM Daerah
						Target	Realisasi	Tingkat Capaian s.d 2024	Ketercapaian Terhadap Target Perub RKPD 2024			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12	Persentase Penyelenggaraan Event Budaya	Persen	100.00	n/a	111.11	122.00	146.67	120.22	Tercapai	146.67	146.67	Tercapai
13	Indeks SPBE	Indeks	3.25	n/a	3.29	3.32	3.76	113.25	Tercapai	3.76	115.69	Tercapai
14	IKM Kota	Persen	84.09	80.83	90.69	83.79	90.77	108.33	Tercapai	90.77	107.94	Tercapai
15	Nilai Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Tingkat Kota	Skor	97.50	n/a	96.62	97.00	96.03	99.00	Tidak Tercapai	96.03	98.49	Tidak Tercapai
16	Indeks Merit System	Indeks	260.00	n/a	327.00	327.00	327.00	100.00	Tercapai	327.00	125.77	Tercapai
17	Nilai SAKIP Kota	Skor	76.07	73.16	72.83	75.07	73.02	97.27	Tidak Tercapai	73.02	95.99	Tidak Tercapai
18	Opini BPK Atas Laporan Keuangan (IKK Outcome)	Kategori	WTP	WTP	n/a	WTP	n/a	n/a	Belum Tersedia Data	n/a	n/a	Belum Tersedia Data
19	Maturitas SPIP	Nilai	4.00	3.00	3.002	3.60	3.005	83.47	Tidak Tercapai	3.005	75.13	Tidak Tercapai
20	Jumlah OPD yang menyandang predikat WBK/WBBM	OPD	8.00	n/a	3.00	6.00	3.00	50.00	Tidak Tercapai	3.00	37.50	Tidak Tercapai

Sumber: Bapperida Kota Pekalongan (diolah), pusaka.pekalongankota.go.id, 2025

Tabel II-79
Capaian Indikator Kinerja Utama Kota Pekalongan Sampai Dengan Tahun 2024

No.	Aspek/ Indikator	Satuan	Target Akhir RPJM Daerah	Kondisi Awal RPJM Daerah	Realisasi s.d. 2023	Tahun 2024		Realisasi RPJM Daerah s.d. 2024	Tingkat Capaian RPJM Daerah	Ketercapaian Thd Target Akhir RPJM Daerah
						Target	Realisasi			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
A. Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar										
1.01. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN										
1.01.01. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota										
1	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	persen	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	Tercapai
2	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	persen	100.00	100.00	103.01	100.00	100.07	100.07	100.07	Tercapai
3	Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	persen	100.00	100.00	100.00	100.00	106.75	106.75	106.75	Tercapai
1.01.02. Program Pengelolaan Pendidikan										
1	Persentase capaian SPM pendidikan	persen	100.00	76.37	99.67	89.50	99.12	99.12	99.12	Tidak Tercapai
Capaian indikator Persentase capaian SPM pendidikan tidak memenuhi target dikarenakan ada beberapa capaian indikator mutu pada SPM yang belum mencapai target, yaitu APS 5-6 tahun, APM, APS 7-12 tahun, Indeks Iklim Inklusivitas SD, APS 13-15 tahun, Kemampuan Numerasi SMP, dan APS 7-18 tahun.										
1.01.03. Program Pengembangan Kurikulum										
1	Persentase ketersediaan kurikulum muatan lokal jenjang PAUD/PNF dan Dikdas	persen	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	Tercapai
1.01.04. Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan										
1	Persentase ketercukupan pendidik dan tenaga kependidikan	persen	100.00	100.00	56.11	100.00	60.00	60.00	60.00	Tidak Tercapai
Capaian indikator Persentase ketercukupan pendidik dan tenaga kependidikan tidak memenuhi target dikarenakan Jumlah pendidik berkualifikasi minimal S1 dan bersertifikasi yang meninggal dunia maupun memasuki usia pensiun, tidak sebanding dengan alokasi kuota peserta sertifikasi pendidik yang disediakan oleh pemerintah pusat.										
1.02. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN										
1.02.01. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota										
1	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	Tercapai
2	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	99.90	99.90	99.90	Tidak Tercapai
3	Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	92.56	92.56	92.56	Tidak Tercapai
4	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	persen	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	Tercapai
5	Persentase ketersediaan layanan BLUD	persen	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	Tercapai

No.	Aspek/ Indikator	Satuan	Target Akhir RPJM Daerah	Kondisi Awal RPJM Daerah	Realisasi s.d. 2023	Tahun 2024		Realisasi RPJM Daerah s.d. 2024	Tingkat Capaian RPJM Daerah	Ketercapaian Thd Target Akhir RPJM Daerah
						Target	Realisasi			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	persen	100.00	100.00	100.00	100.00	158.33	158.33	158.33	Tercapai
1.02.02. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat										
1	Persentase penduduk yang memanfaatkan layanan UKM dan UKP rujukan tingkat kabupaten/kota	Persen	92.00	88.00	18.00	91.00	13.52	13.52	14.70	Tidak tercapai
Capaian indikator Persentase penduduk yang memanfaatkan layanan UKM dan UKP rujukan tingkat kabupaten/kota tidak memenuhi target dikarenakan Jumlah kunjungan penduduk yang memanfaatkan layanan UKM dan UKP rujukan tingkat kabupaten/kota rendah menunjukkan derajat kesehatan masyarakatnya baik..										
2	Persentase RS rujukan tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi (IKK Outcome)	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	Tercapai
3	Persentase ketersediaan sarana, prasarana dan alat kesehatan di puskesmas yang sesuai standar	Persen	90.00	70.00	72.00	85.00	79.45	79.45	88.28	Tidak Tercapai
Capaian indikator Persentase ketersediaan sarana, prasarana dan alat kesehatan di puskesmas yang sesuai standar tidak memenuhi target dikarenakan ketersediaan sarana, prasarana, dan alkes sedang dalam proses pemenuhan yang sesuai standar. Mulai tahun 2024 pengadaan alkes melalui Strengthening of Primary Healthcare in Indonesia (SOPHI) - sistemnya adalah dropping dari pusat, dan rencana untuk alkes lima tahun kedepan akan dipenuhi melalui SOPHI ini.										
4	Persentase ketersediaan sarana, prasarana dan alat kesehatan di RSUD yang sesuai standar	persen	72.50	60.00	100.00	100.00	100.00	100.00	137.93	Tercapai
Capaian indikator Persentase ketersediaan sarana, prasarana dan alat kesehatan di RSUD yang sesuai standar jauh melebihi target dikarenakan Pengembangan Pelayanan dan Inovasi di RSUD Bendan dalam pemenuhan sarana, prasarana dan alat kesehatan di RSUD sudah memenuhi standar yang dipersyaratkan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit (Tipe C)										
1.02.03. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan										
1	Persentase tenaga kesehatan yang memiliki Surat Ijin Praktek	Persen	95.50	93.00	90.59	94.50	94.17	94.17	98.61	Tidak Tercapai
Capaian indikator Persentase tenaga kesehatan yang memiliki Surat Ijin Praktek tidak memenuhi target dikarenakan: 1. Nakes punya STR tp tidak pelayanan 2. Nakes tidak mengurus SIP 3. Nakes sedang proses pengurusan/telat perpanjangn jd di sistem terbaca tidak punya SIP										
2	Persentase tenaga kesehatan di RSUD yang memiliki kompetensi yang dipersyaratkan	persen	60.00	35.00	100.00	100.00	100.00	100.00	166.67	Tercapai
Capaian indikator Persentase tenaga kesehatan di RSUD yang memiliki kompetensi yang dipersyaratkan jauh melebihi target dikarenakan Capaian indikator Persentase tenaga kesehatan di RSUD yang memiliki kompetensi yang dipersyaratkan jauh melebihi target dikarenakan Capaian jauh melebihi target dikarenakan adanya UU Nomor 17 tahun 2023 dimana diwajibkan tenaga medis dan tenaga kesehatan yang akan menjalankan praktik wajib memiliki STR dan SIP, sehingga pada saat ini semua tenaga kesehatan RSUD yang masuk dan bekerja di RSUD telah memiliki kompetensi yang dipersyaratkan.										
1.02.04. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman										
1	Persentase sarana farmasi yang memenuhi standar	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	Tercapai

No.	Aspek/ Indikator	Satuan	Target Akhir RPJM Daerah	Kondisi Awal RPJM Daerah	Realisasi s.d. 2023	Tahun 2024		Realisasi RPJM Daerah s.d. 2024	Tingkat Capaian RPJM Daerah	Ketercapaian Thd Target Akhir RPJM Daerah
						Target	Realisasi			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Persentase produk pangan olahan industri rumah tangga yang bebas dari cemaran	Persen	100.00	92.00	100.00	98.00	97.22	97.22	97.22	Tidak Tercapai
Capaian indikator Persentase produk pangan olahan industri rumah tangga yang bebas dari cemaran tidak memenuhi target dikarenakan terdapat 1 sampel produk olahan kerupuk yang terdeteksi tidak bebas dari cemaran.										
3	Persentase tempat pengelolaan makanan (TPM) dan Depot Air Minum (DAM) yang memenuhi syarat	Persen	97.00	95.00	94.22	96.00	91.67	95.80	98.76	Tidak Tercapai
Capaian indikator Persentase tempat pengelolaan makanan (TPM) dan Depot Air Minum (DAM) yang memenuhi syarat tidak memenuhi target dikarenakan Jumlah TPM (jasa boga/ katering, restoran, depot air minum, rumah makan) hasil pendataan tahun 2024 meningkat. Dengan meningkatnya jumlah industri boga baru yang masih awam akan syarat2 higiene sanitasi, maka dinkes akan meningkatkan pembinaan dengan memberikan pelatihan HSP bagi tempat pengelilaan pangan, dan meningkatkan monev di TPP.										
1.02.05. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan										
1	Persentase Rumah Tangga Sehat	Persen	95	90	98.65	93.00	97.22	97.22	102.34	Tercapai
1.03. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG										
1.03.01. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota										
1	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	persen	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	Tercapai
2	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	persen	100.00	100.00	100.28	100.00	98.21	98.21	98.21	Tidak Tercapai
3	Persentase Pengadaan/ Pemeliharaan barang milik daerah	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	Tercapai
1.03.02. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (sda)										
1	Persentase sarpras pengendali banjir dan rob dalam kondisi baik	Persen	93.10	82.76	100.00	93.10	100.00	100.00	107.41	Tercapai
1.03.03. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum										
1	Cakupan layanan air minum yang dikelola oleh pemerintah	Persen	92.11	85.77	67.42	89.66	53.15	53.15	57.70	Tidak Tercapai
Capaian indikator Cakupan layanan air minum yang dikelola oleh pemerintah tidak memenuhi target dikarenakan Adanya perubahan data dukung, yang semula menggunakan data Dinas Kesehatan berubah menggunakan data Omahe Dewe (Dinperkim). DPUPR sudah dan akan berupaya untuk mengusulkan fasilitasi terkait sarpras Air Minum Kepada Pemerintah Pusat.										
1.03.04. Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional										
1	Persentase Ketersediaan Sarana Persampahan Regional	persen	100.00	0.00	20.00	60.00	60.00	60.00	60.00	Tidak Tercapai
Capaian indikator Persentase Ketersediaan Sarana Persampahan Regional tidak memenuhi target dikarenakan target 100 persen sampai dengan tahun 2026, tidak mencapai target karena akan ada penambahan TPS3R pada tahun 2026										
1.03.05. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah										
1	Persentase rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik (IKK outcome)	persen	12.87	9.87	17.68	11.67	17.96	17.96	139.53	Tercapai

No.	Aspek/ Indikator	Satuan	Target Akhir RPJM Daerah	Kondisi Awal RPJM Daerah	Realisasi s.d. 2023	Tahun 2024		Realisasi RPJM Daerah s.d. 2024	Tingkat Capaian RPJM Daerah	Ketercapaian Thd Target Akhir RPJM Daerah
						Target	Realisasi			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Capaian indikator Persentase rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik (IKK outcome) jauh melebihi target dikarenakan terdapat penambahan jumlah KK yang terlayani IPLT dikarenakan adanya tambahan pengadaan dari Organisasi Non Pemerintah (seperti kemitraan), pendanaannya di luar APBD untuk pembangunan MCK dan lain-lain.										
1.03.06. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase										
1	Persentase drainase dalam kondisi baik	persen	71.49	66.45	68.58	69.48	69.48	69.48	97.19	Tidak Tercapai
Capaian indikator Persentase drainase dalam kondisi baik tidak memenuhi target dikarenakan Terkait drainase masih dalam proses penanganan hingga tahun 2026										
1.03.08. Program Penataan Bangunan Gedung										
1	Rasio Kepatuhan PBG Kab/Kota	persen	18.74	17.24	17.34	18.14	17.38	17.38	92.74	Tidak Tercapai
Capaian indikator Rasio Kepatuhan PBG Kab/Kota tidak memenuhi target dikarenakan Prosedur pengajuan PBG menggunakan aplikasi SIM-BG yang membutuhkan persyaratan lebih rumit sehingga banyak pemohon yang tidak dapat memenuhi persyaratan kelengkapannya										
1.03.10. Program Penyelenggaraan Jalan										
1	Tingkat Kemantapan Jalan Kab/Kota (IKK Outcome)	persen	86.57	81.12	83.77	84.39	84.50	84.50	97.61	Tidak Tercapai
Capaian indikator Tingkat Kemantapan Jalan Kab/Kota (IKK Outcome) tidak memenuhi target dikarenakan Target tahun 2026, tingkat kemantapan jalan adalah sebesar 86,57 persen atau sepanjang 130,092 km. Sedangkan target tahun 2024 adalah sepanjang 126,98 km. Sehingga walaupun target tahun 2024 tercapai 100 persen, tapi tetap akan kurang 3,112 km dari target tahun 2026. Oleh karena itu, dalam mencapai target tahun 2026, Pemerintah Kota Pekalongan melalui DPUPR pada tahun 2025 akan melakukan pekerjaan Rekonstruksi Jalan yang meliputi 10 paket pekerjaan dengan perkiraan output jalan mantap sepanjang 2,7 km dan Rehabilitasi Jalan meliputi 4 paket pekerjaan dengan perkiraan output jalan mantap sepanjang 0,25 km. Sedangkan untuk pekerjaan-pekerjaan pada tahun 2026 sedang dalam proses pengusulan penanganan										
1.03.11. Program Pengembangan Jasa Konstruksi										
1	Rasio Tenaga Bangunan yang memiliki sertifikat kompetensi	persen	21.20	7.87	7.61	15.87	8.79	8.79	41.46	Tidak Tercapai
Capaian indikator Rasio Tenaga Bangunan yang memiliki sertifikat kompetensi tidak memenuhi target dikarenakan dari kuota fasilitasi pelatihan 40 orang yang hadir mengikuti pelatihan hanya 36 orang.										
1.03.12. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang										
1	Persentase Penetapan Rencana Tata Ruang Kab/Kota	persen	100.00	0.00	45.24	100.00	73.81	73.81	73.81	Tidak Tercapai
Capaian indikator Persentase Penetapan Rencana Tata Ruang Kab/Kota tidak memenuhi target dikarenakan materi teknis penyusunan Raperda Bangunan Gedung baru selesai pada triwulan III 2024 sehingga tidak memungkinkan penetapan di tahun 2024 sehingga target berubah menjadi pada triwulan I tahun 2025 dan sudah dikoordinasikan pada bagian Hukum Setda Kota Pekalongan. Perwal Penataan dan Pengendalian Jaringan Fiber Optik 2024 dan Perwal Penataan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi 2024 akan ditetapkan pada Tahun 2025 Triwulan II										
1.04. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN										
1.04.01. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota										
1	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	persen	100.00	100.00	99.17	100.00	100.00	100.00	100.00	Tercapai
2	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	persen	100.00	100.00	100.00	100.00	105.95	105.95	105.95	Tercapai
3	Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	persen	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	Tercapai

No.	Aspek/ Indikator	Satuan	Target Akhir RPJM Daerah	Kondisi Awal RPJM Daerah	Realisasi s.d. 2023	Tahun 2024		Realisasi RPJM Daerah s.d. 2024	Tingkat Capaian RPJM Daerah	Ketercapaian Thd Target Akhir RPJM Daerah
						Target	Realisasi			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.04.02. Program Pengembangan Perumahan										
1	Persentase Ketersediaan Rumah Layak Huni	persen	92.35	0.00	100.00	91.68	68.78	68.78	74.48	Tidak Tercapai
Capaian indikator Persentase Ketersediaan Rumah Layak Huni tidak memenuhi target dikarenakan Data RTLH 2024 (berdasarkan data OMAHE NDEWE) = 18727 Data rumah se-kota (berdasarkan data OMAHE NDEWE, pendataan masih 89 persen) = 68699 Rasio RTLH = 27,25 Catatan: (1) Pendataan tahun 2024 baru mencapai 89 persen (2) Adanya pertumbuhan Rumah Tidak Layak Huni baru.										
1.04.03. Program Kawasan Permukiman										
1	Luas kawasan permukiman kumuh	hektar	0.00	498.47	227.55	174.47	126.32	126.32	0.00	Tidak Tercapai
Capaian indikator Luas kawasan permukiman kumuh tidak memenuhi target dikarenakan 1. Kegiatan Teknis (fisik) tidak berada dilokasi SK Kumuh 2. Road Map penanganan kumuh yang tertuang dalam dokumen RP2KPKP belum menjadi acuan 3. Dengan munculnya Update SK Kumuh 2024 maka perlu dilakukan review dokumen RP2KPKP 4. Koordinasi Pokja PKP untuk penyusunan rencana penanganan infrastruktur dilokasi kumuh mengacu pada dokumen hasil Update dok RP2KPKP										
1.04.04. Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh										
1	Luas kawasan permukiman tidak kumuh	hektar	2147.88	1649.41	1,920.55	1,973.41	2.021,56	2.021,56	94.12	Tidak Tercapai
Capaian indikator Luas kawasan permukiman tidak kumuh tidak memenuhi target dikarenakan berdasarkan SK kumuh Tahun 2024 terdapat penambahan daerah kumuh, yaitu di kelurahan : Panjang Wetan, Tirto, Degayu, dan Pasir Kraton Kramat, dan akan terus diupayakan untuk pengurangan luasan kumuh Kota Pekalongan.										
1.04.05. Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (psu)										
1	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum) (IKK Outcome)	persen	14.55	14.44	15.86	14.51	6.80	6.80	46.74	Tidak Tercapai
Capaian indikator Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum) (IKK Outcome) tidak memenuhi target dikarenakan beberapa pengembang belum menyerahkan PSU kepada Pemda menunggu penjualan rumah 100 persen dan semestinya data pembandingnya bukan jumlah rumah sekota namun jumlah rumah pada kompleks perumahan se-kota pekalongan.										
1.05. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT										
1.05.01. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota										
1	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	Tercapai
2	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	100.17	100.17	100.17	Tercapai
3	Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	Tercapai
4	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	persen	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	Tercapai
5	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	persen	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	Tercapai
6	Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	persen	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	Tercapai
1.05.02. Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum										
1	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan (IKK outcome)	Persen	70.00	60.00	80.00	66.00	80.00	80.00	114.29	Tercapai

No.	Aspek/ Indikator	Satuan	Target Akhir RPJM Daerah	Kondisi Awal RPJM Daerah	Realisasi s.d. 2023	Tahun 2024		Realisasi RPJM Daerah s.d. 2024	Tingkat Capaian RPJM Daerah	Ketercapaian Thd Target Akhir RPJM Daerah
						Target	Realisasi			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Capaian indikator Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan (IKK outcome) jauh melebihi target dikarenakan dari 20 perda prioritas selama tahun 2024 pelaksanaan penegakan perda baik secara rutin maupun berdasarkan laporan dari masyarakat terkaitnya hanya di 16 perda (1. Perda No. 12 Tahun 2011 ttg Pajak Reklame, 2. Perda No. 5 Tahun 2019 ttg Perubahan atas Perda No. 5 tahun 2013 tentang Ketertiban Umum, 3. Perda No. 2 Tahun 2018 ttg Penyelenggaraan Reklame, 4. Perda No. 13 Tahun 2000 ttg Pengawasan dan Larangan Minuman Beralkohol, 5. Perda No. 16 Tahun 2015 ttg Penyelenggaraan Usaha Warung Internet, 6. Perda No. 04 Tahun 2009 ttg Perubahan atas peraturan daerah Kota Pekalongan No. 19 Tahun 2000 tentang Retribusi Izin Bangunan, 7. Perda No. 7 Tahun 2013 ttg Larangan Penggunaan Bahan Tambahan Pangan Berbahaya, 8. Perda No. 12 Tahun 2014 ttg Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, 9. Perda No. 1 Tahun 2018 ttg Izin Usaha Industri, 10. Perda No. 12 Tahun 2018 ttg Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan No. 11 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan, 11. Perda No. 16 Tahun 2011 ttg Penyelenggaraan dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi di Kota Pekalongan, 12. Perda No. 1 Tahun 2019 ttg Pengelolaan Barang Milik Daerah, 13. Perda No. 15 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Rumah Kos, 14. Perda No. 9 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Air Limbah, 15. Perda No. 15 Tahun 2011 Penyelenggaraan dan Retribusi Izin Gangguan, 16. Perda No. 35 Tahun 2011 Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, sehingga capaiannya 80 persen.										
1.05.03. Program Penanggulangan Bencana										
1	persentase korban bencana alam yang ditangani	persen	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	Tercapai
1.05.04. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran										
1	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran (SPM / IKK Outcome)	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	Tercapai
1.06. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL										
1.06.01. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota										
1	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	Persen	100	100	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	Tercapai
2	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Persen	100	100	100.00	100.00	100.13	100.13	100.13	Tercapai
3	Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	Persen	100	100	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	Tercapai
1.06.02. Program Pemberdayaan Sosial										
1	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang diberdayakan	Persen	75	42	65.41	67.00	100.00	100.00	133.33	Tercapai
Capaian indikator Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang diberdayakan jauh melebihi target dikarenakan sharing kegiatan dari Dinas sosial provinsi jawa tengah diselesaikan pada TW 4 dan semua PSKS mengikuti kegiatan dengan rincian Surat Tanda Daftar = 19 LKS dan ber-SK Kemenhumham = 41 LKS										
1.06.04. Program Rehabilitasi Sosial										
1	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan tuna sosial (gelandangan dan pengemis) yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (SPM/IKK outcome)	Persen	100	100	100.00	100.00	126.14	126.14	126.14	Tercapai
Capaian indikator Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan tuna sosial (gelandangan dan pengemis) yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (SPM/IKK outcome) jauh melebihi target dikarenakan banyaknya kelayan yang terlayani berasal dari luar kota pekalongan baik itu disabilitas terlantar, lansia terlantar, dan gepeng										

No.	Aspek/ Indikator	Satuan	Target Akhir RPJM Daerah	Kondisi Awal RPJM Daerah	Realisasi s.d. 2023	Tahun 2024		Realisasi RPJM Daerah s.d. 2024	Tingkat Capaian RPJM Daerah	Ketercapaian Thd Target Akhir RPJM Daerah
						Target	Realisasi			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.06.05. Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial										
1	Persentase keluarga miskin yang memperoleh perlindungan dan layanan Jaminan Sosial	Persen	52.49	60.45	57.38	55.12	27.64	27.64	52.66	Tidak Tercapai
Capaian indikator Persentase keluarga miskin yang memperoleh perlindungan dan layanan Jaminan Sosial tidak memenuhi target dikarenakan perbandingan jumlah penerima sembako (BPNT) dan PKH jauh lebih sedikit daripada jumlah DTKS pada Kota Pekalongan, meskipun ada upaya update verval data.										
1.06.06. Program Penanganan Bencana										
1	Persentase korban bencana pada saat dan setelah tanggap darurat bencana yang mendapat perlindungan dan jaminan sosial (SPM)	Persen	100	100	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	Tercapai
1.06.07. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan										
1	Persentase Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan	Persen	100	100	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	Tercapai
B. Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar										
2.07. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA										
2.07.03. Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja										
1	Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi (IKK Outcome)	persen	0.55	0.33	1.09	0.46	1.41	1.41	256.36	Tercapai
Capaian indikator Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi (IKK Outcome) jauh melebihi target dikarenakan - Hingga Tw IV Tahun 2024 (persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi) adalah 1,41 persen dan target akhir RPJM Daerah adalah 0,5 persen sehingga capaiannya adalah 256,84 persen. - Melebihi target karena adanya penambahan peserta yang bersertifikasi dari beberapa LPKS yang ada di Kota Pekalongan sebanyak 802 peserta.										
2.07.04. Program Penempatan Tenaga Kerja										
1	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kab/kota (IKK Outcome)	persen	29.93	19.93	16.70	25.93	33.81	33.81	112.96	Tercapai
Capaian indikator Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kab/kota (IKK Outcome) jauh melebihi target dikarenakan kompetensi yang dibutuhkan sesuai dengan pasar kerja.										
2.07.05. Program Hubungan Industrial										
1	Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan) (IKK Outcome)	persen	49.02	45.33	49.93	47.51	50.93	50.93	103.90	Tercapai
2.08. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK										
2.08.02. Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan										
1	Persentase kegiatan perangkat daerah yang sudah responsif gender	Persen	11.09	1.85	5.98	7.39	19.09	19.09	172.14	Tercapai

No.	Aspek/ Indikator	Satuan	Target Akhir RPJM Daerah	Kondisi Awal RPJM Daerah	Realisasi s.d. 2023	Tahun 2024		Realisasi RPJM Daerah s.d. 2024	Tingkat Capaian RPJM Daerah	Ketercapaian Thd Target Akhir RPJM Daerah
						Target	Realisasi			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Capaian indikator Persentase kegiatan perangkat daerah yang sudah responsif gender jauh melebihi target dikarenakan (1). Komitmen OPD terhadap pangarusutamaan gender semakin meningkat; (2) Terdapat beberapa OPD yang menyusun lebih dari target yaitu masing-masing OPD dua sub kegiatan.										
2.08.03. Program Perlindungan Perempuan										
1	Rasio kekerasan terhadap perempuan (IKK Outcome)	Persen	23.99	23.99	15.01	23.99	4.60	4.60	521.19	Tercapai
Capaian indikator Rasio kekerasan terhadap perempuan (IKK Outcome) jauh melebihi target dikarenakan Adanya faktor yang mendukung ketercapaian : (1). adanya sosialisasi, advokasi dan edukasi hukum terkait perlindungan perempuan meningkatkan kesadaran dan kepedulian masyarakat untuk melapor dan tidak melakukan tindak kekerasan terhadap perempuan; (2). terbentuknya PATBM (Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat) tingkat kecamatan dan kelurahan dan kader SAPA (Sahabat Peduli Perempuan dan Anak) kecamatan dan kelurahan; (3). pendampingan dan advokasi langsung oleh PATBM dan SAPA tingkat kecamatan dan kelurahan; (4). bintek terhadap tim PATBM dan kelurahan, (4) Semakin meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap tindakan kekerasan terhadap perempuan.										
2.08.06. Program Pemenuhan Hak Anak (pha)										
1	Persentase Dekela (desa/kelurahan layak anak)	Persen	55.56	25.93	33.33	40.74	40.74	40.74	73.33	Tidak Tercapai
Capaian indikator Persentase Dekela (desa/kelurahan layak anak) tidak memenuhi target dikarenakan Capaian indikator Persentase Dekela (desa/kelurahan layak anak) tidak memenuhi target dikarenakan Dekela (desa/kelurahan layak anak) sampai dengan akhir periode RPJM Daerah ditargetkan 15 kelurahan dari 27 kelurahan se Kota Pekalongan Data awal tahun 2021 Dekela sejumlah 7 kelurahan Tahun 2022 ditargetkan 8 kelurahan atau 29.63 persen (bertambah 1 kelurahan) Tahun 2023 ditargetkan 9 kelurahan atau 33.33 persen (bertambah 1 kelurahan) Tahun 2024 ditargetkan 11 kelurahan atau 40.74 persen (bertambah 4 kelurahan) Tahun 2025 ditargetkan 13 kelurahan atau 48.14 persen (bertambah 2 kelurahan) Tahun 2026 ditargetkan 15 kelurahan atau 55.56 persen (bertambah 2 kelurahan) sehingga pada tahun 2024 secara target yang direncanakan/ditetapkan sudah tercapai.										
2.08.07. Program Perlindungan Khusus Anak										
1	Persentase pengaduan kasus anak yang terlayani	persen	100	0	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	Tercapai
2.09. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN										
2.09.03. Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat										
1	Persentase cadangan pangan daerah	persen	4.8	3.8	4.45	4.60	5.58	5.58	116.15	Tercapai
Capaian indikator Persentase cadangan pangan daerah jauh melebihi target dikarenakan Kebutuhan Cadangan Pangan Kota Pekalongan berdasarkan perhitungan sesuai Peraturan Kepala Badan Pangan Nasional RI Nomor 15 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penghitungan Jumlah Cadangan Beras Pemerintah Daerah yaitu sebanyak 22,06 Ton. Jumlah Cadangan Pangan Beras yang teranggarkan Tahun 2024 sebanyak 10 Ton (memenuhi 45,33 persen dari kebutuhan yang seharusnya dianggarkan pemerintah daerah). Mengingat keterbatasan anggaran yang ada di daerah (rata-rata baru mencapai 41 persen dari perhitungan sesuai Peraturan Badan Pangan Nasional) dan dalam rangka penguatan cadangan pangan di daerah, kemudian diterbitkan SE Gubernur Jawa Tengah Nomor 526/0002817 tanggal 4 April 2024 tentang Penguatan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah bahwa Pemda secara wajib memenuhi minimal persentase cadangan pangan dengan tahapan sebagai berikut : 1) Tahun 2024 sebesar 50 persen dari perhitungan berdasarkan Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 15 Tahun 2023 dan 2). Tahun 2025 sebesar 50-75 persen dari perhitungan berdasarkan Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 15 Tahun 2023. Sehingga capaian cadangan pangan Kota Pekalongan (jika dibandingkan dengan kebutuhan cadangan pangan hasil perhitungan Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 15 Tahun 2023) = 10 Ton /22,06 Ton *100 persen = 45,33 persen dan capaian cadangan pangan Kota Pekalongan (jika berdasarkan kewajiban yang termuat dalam SE Gubernur Jawa Tengah Nomor 526/0002817) adalah : 10 Ton / (50%*22,06) *100 = 90,66 persen (belum tercapai). Adapun Target 4,6 sudah tidak relevan dengan kondisi saat ini, karena penentuan target 4,6 tersebut masih berdasarkan perhitungan yang lama yaitu berdasarkan Peraturan menteri Pertanian RI Nomor : 11/PERMENTAN/KN.130/4/2018 Tentang Penetapan Jumlah Cadangan Beras Pemerintah Daerah. Hasil perhitungan pada saat penentuan target bahwa kebutuhan cadangan pangan beras Kota Pekalongan sebanyak 115.680 kg, sementara cadangan pangan yang mampu teranggarkan pada saat itu hanya sebanyak maksimal 5.000 Kg (baru memenuhi : 5.000kg / 115.680 kg *100 persen = 4,32 persen).										

No.	Aspek/ Indikator	Satuan	Target Akhir RPJM Daerah	Kondisi Awal RPJM Daerah	Realisasi s.d. 2023	Tahun 2024		Realisasi RPJM Daerah s.d. 2024	Tingkat Capaian RPJM Daerah	Ketercapaian Thd Target Akhir RPJM Daerah
						Target	Realisasi			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.09.04. Program Penanganan Kerawanan Pangan										
1	Persentase kecamatan tahan pangan di Kota Pekalongan	persen	100	100	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	Tercapai
2.09.05. Program Pengawasan Keamanan Pangan										
1	Persentase pangan segar aman yang ditemukan dari pengawasan keamanan pangan	persen	88	80	91.73	84.80	98.53	98.53	111.97	Tercapai
Capaian indikator Persentase pangan segar aman yang ditemukan dari pengawasan keamanan pangan jauh melebihi target dikarenakan Jumlah pangan segar aman yang ditemukan / Jumlah pangan segar yang dijadikan bahan uji*100 persen = 67 sampel/ 68 sampel* 100 persen. Pada tahun 2024 pengujian pangan segar aman asal tumbuhan dilakukan pada 68 sampel dan ditemukan 1 sampel pangan segar asal tumbuhan yang tidak aman.										
2.10. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN										
2.10.05. Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan										
1	Persentase permasalahan pertanahan yang tertangani	persen	100	0	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	Tercapai
2.10.06. Program Redistribusi Tanah, Serta Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum Dan Tanah Absentee										
1	Persentase tindak lanjut penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	persen	50	0	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	Tidak Tercapai
Capaian indikator Persentase tindak lanjut penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee tidak memenuhi target dikarenakan tidak ada tanah yang memenuhi kriteria untuk ditetapkan Objek Redistribusi Tanah (tidak ada kegiatan redistribusi tanah pada tahun 2024)										
2.11. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP										
2.11.01. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota										
1	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	persen	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	Tercapai
2	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	persen	100.00	100.00	103.06	100.00	102.76	102.76	102.76	Tercapai
3	Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	persen	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	Tercapai
2.11.03. Program Pengendalian Pencemaran Dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup										
1	Persentase limbah yang diolah	persen	49.01	33.37	92.65	45.02	108.23	108.23	220.83	Tercapai
Capaian indikator Persentase limbah yang diolah jauh melebihi target dikarenakan Limbah dihasilkan dalam 1 tahun 1.263.456 m3 dan limbah yang diolah dalam 1 tahun 341.856 m3 Sampai dengan Triwulan IV Tahun 2024 tidak ada pembangunan IPAL baru ataupun revitalisasi IPAL sehingga jumlah limbah yang dapat diolah, masih tetap sesuai dengan kemampuan IPAL eksisting.										
2.11.04. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (kehati)										
1	Persentase Ruang Terbuka Hijau	persen	2.95	2.89	2.94	2.93	2.37	2.37	80.40	Tidak Tercapai
Capaian indikator Persentase Ruang Terbuka Hijau tidak memenuhi target dikarenakan Luasan RTH di Akhir tahun 2024 adalah 110.062 Ha. Atau 2,37 persen dari luasan kota Pekalongan. Pada tahun 2024 terdapat penambahan RTH Publik baru seluas 0,12 Ha dari pengalihan lahan eks bengkok di Kelurahan Klego (Seruni Green Park).										
2.11.05. Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (b3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (limbah B3)										

No.	Aspek/ Indikator	Satuan	Target Akhir RPJM Daerah	Kondisi Awal RPJM Daerah	Realisasi s.d. 2023	Tahun 2024		Realisasi RPJM Daerah s.d. 2024	Tingkat Capaian RPJM Daerah	Ketercapaian Thd Target Akhir RPJM Daerah
						Target	Realisasi			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Persentase persetujuan teknis pengelolaan limbah B3 yang diberikan	persen	100.00	31.12	57.78	13.33	71.11	71.11	71.11	TidakTercapai
Capaian indikator Persentase persetujuan teknis pengelolaan limbah B3 yang diberikan tidak memenuhi target dikarenakan pelaksanaan kegiatan direncanakan bertahap dari 2021 s.d 2026 dengan target 45 perusahaan. Sampai dengan triwulan IV tahun 2024 telah tercapai 71,11 persen (32 perusahaan).										
2.11.06. Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)										
1	Persentase usaha/kegiatan yang mendapat rekomendasi persetujuan teknis lingkungan dan persetujuan teknis PPLH	persen	100.00	16.67	40.67	16.67	48.33	48.33	48.33	Tidak Tercapai
Capaian indikator Persentase usaha/kegiatan yang mendapat rekomendasi persetujuan teknis lingkungan dan persetujuan teknis PPLH tidak memenuhi target dikarenakan Sejak keluar peraturan PP No. 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan LH maka semua perizinan lingkungan khususnya usaha menengah ke bawah (wajib SPPL) pengurusannya melalui OSS RBA dan terbit otomatis										
2.11.08. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat										
1	Persentase masyarakat/ komunitas peduli LH yang mendapat edukasi Lingkungan Hidup	persen	50.00	0.00	50.00	50.00	100.00	100.00	200.00	Tercapai
Capaian indikator Persentase masyarakat/ komunitas peduli LH yang mendapat edukasi Lingkungan Hidup jauh melebihi target dikarenakan Komunitas selalu dilibatkan dalam setiap kegiatan DLH dalam rangka memperingati Hari Besar Lingkungan Hidup atau untuk kegiatan penghijauan, pembersihan lingkungan, dan lain-lain, diantaranya : Komunitas Sapu Lidi, WCD (World Cleanup Day), Komunitas Peduli Kali Loji, KOBAR, Green Generation.										
2.11.09. Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat										
1	Persentase perolehan penghargaan bidang LH	persen	75.00	75.00	100.00	75.00	100.00	100.00	133.33	Tercapai
Capaian indikator Persentase perolehan penghargaan bidang LH jauh melebihi target dikarenakan Kegiatan di DLH ada 4 penghargaan yang diselenggarakan: CSAP, CSAN/CSAM, CSAK, dan Proper. Pada tahun 2024 ke-4 penghargaan tersebut berhasil diraih oleh Kota Pekalongan.										
2.11.10. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup										
1	Persentase pengaduan lingkungan hidup dari masyarakat yang ditindaklanjuti	persen	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	Tercapai
2.11.11. Program Pengelolaan Persampahan										
1	Persentase pengelolaan sampah	persen	0.31	2.19	0.31	0.29	0.30	0.30	98.23	Tidak Tercapai
Capaian indikator Persentase pengelolaan sampah tidak memenuhi target dikarenakan Timbulan sampah tahun 2024 lebih banyak dibandingkan dengan kapasitas pengelolaan yang dimiliki oleh Kota Pekalongan. Untuk mengatasi hal tersebut, perlu adanya peningkatan kapasitas dengan penambahan fasilitas pengelolaan atau pemberlakuan sistem yang dapat mengurangi timbulan sampah.										
2.12. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL										
2.12.01. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota										
1	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	persen	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	Tercapai

No.	Aspek/ Indikator	Satuan	Target Akhir RPJM Daerah	Kondisi Awal RPJM Daerah	Realisasi s.d. 2023	Tahun 2024		Realisasi RPJM Daerah s.d. 2024	Tingkat Capaian RPJM Daerah	Ketercapaian Thd Target Akhir RPJM Daerah
						Target	Realisasi			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	persen	100.00	100.00	100.46	100.00	109.53	109.53	109.53	Tercapai
3	Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	persen	100.00	100.00	77.78	100.00	100.00	100.00	100.00	Tercapai
2.12.02. Program Pendaftaran Penduduk										
1	Rata-rata ketercapaian pelayanan pendaftaran penduduk	persen	88.75	80.00	86.69	85.30	88.97	88.97	100.25	Tercapai
2.12.03. Program Pencatatan Sipil										
1	Rata-rata ketercapaian pelayanan pencatatan sipil	persen	94.00	93.25	80.43	93.70	89.58	89.58	95.30	Tidak Tercapai
2.12.04. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan										
1	Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama (IKK Outcome)	OPD	14.00	5.00	9.00	10.00	10.00	10.00	71.43	Belum Tercapai
Capaian indikator Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama (IKK Outcome) tidak memenuhi target dikarenakan Proses pengajuan terkendala adanya Persyaratan sertifikasi ISO keamanan data yang belum bisa dipenuhi oleh OPD. Upaya untuk mendongkrak capaian program ini adalah dengan merubah klausul dalam PKS untuk pemanfaatan data (data agregat) tanpa akses ke dalam sistem data										
2.13. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA										
2.13.01. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota										
1	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	Tercapai
2	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Persen	100.00	100.00	101.77	100.00	100.00	100.00	100.00	Tercapai
3	Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	Tercapai
2.13.03. Program Peningkatan Kerja Sama Desa										
1	Persentase ketercapaian Fasilitasi Kerjasama TNI dan kelurahan	Persen	100.00	16.67	50.00	66.67	72.22	72.22	72.22	Tidak Tercapai
Capaian indikator Persentase ketercapaian Fasilitasi Kerjasama TNI dan kelurahan tidak memenuhi target dikarenakan Kegiatan TMMD dilaksanakan tiap tahun dengan target untuk memfasilitasi 3 Kelurahan tiap tahunnya hingga akhir tahun RPJM Daerah, sampai dengan triwulan IV tahun 2024 ada 19 kelurahan dari target 18 kelurahan yang difasilitasi										
2.13.04. Program Administrasi Pemerintahan Desa										
1	Persentase kelurahan dengan kriteria *cepat berkembang*	Persen	70.37	51.85	81.48	62.96	88.89	88.89	126.32	Tercapai
Capaian indikator Persentase kelurahan dengan kriteria *cepat berkembang* jauh melebihi target dikarenakan (1) Adanya monitoring dan evaluasi secara berkala; (2) Adanya pendampingan dari OPD kepada kelurahan ; (3) Kelurahan aktif menginput data pada aplikasi Epdeskel yang dijadikan acuan penilaian										
2.13.05. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat										
1	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif dalam pemberdayaan masyarakat	Persen	96.92	95.97	97.64	96.54	97.68	97.68	100.78	Tercapai

No.	Aspek/ Indikator	Satuan	Target Akhir RPJM Daerah	Kondisi Awal RPJM Daerah	Realisasi s.d. 2023	Tahun 2024		Realisasi RPJM Daerah s.d. 2024	Tingkat Capaian RPJM Daerah	Ketercapaian Thd Target Akhir RPJM Daerah
						Target	Realisasi			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.14. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA										
2.14.02. Program Pengendalian Penduduk										
1	Persentase rumah tangga yang dilakukan pendataan/Updating data keluarga	persen	100.00	100.00	70.28	100.00	82.60	82.60	82.60	Tidak Tercapai
Capaian indikator Persentase rumah tangga yang dilakukan pendataan/Updating data keluarga tidak memenuhi target dikarenakan pada kegiatan pendataan dilaksanakan dengan cara pengambilan data secara sampling dari jumlah seluruh rumah tangga sekota Pekalongan.										
2.14.03. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)										
1	Penurunan Angka Perkawinan di bawah 21 Tahun	Persen	7.20	8.20	14.44	7.60	11.28	11.28	63.85	Tidak Tercapai
Capaian indikator Penurunan Angka Perkawinan di bawah 21 Tahun tidak memenuhi target dikarenakan meningkatnya angka perkawinan dibawah 21 tahun sebagai dampak dari adanya kemiskinan dan kenaikan jumlah anak tidak sekolah										
2.14.04. Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)										
1	Unmeet need KB	Persen	12.00	17.00	14.95	14.00	8.48	8.48	141.58	Tercapai
Capaian indikator Unmeet need KB jauh melebihi target dikarenakan pemenuhan kebutuhan masyarakat Kota Pekalongan untuk ber-KB semakin baik.										
2.15. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN										
2.15.01. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota										
1	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	persen	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	Tercapai
2	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	persen	100.00	100.00	100.12	100.00	100.00	100.00	100.00	Tercapai
3	Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	persen	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	Tercapai
2.15.02. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (llaj)										
1	Persentase ketersediaan fasilitas LLAJ	persen	100.00	87.00	164.69	95.00	103.28	103.28	103.28	Tercapai
2	V/C Rasio Kab/Kota (IKK Outcome)	rasio	0.44	0.35	0.44	0.44	0.44	0.44	100.00	Tercapai
3	Persentase Peningkatan Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji (KBWU) yang melaksanakan uji berkala	persen	0.74	17.94	-9.90	0.75	-8.33	-8.33	-1,125.05	Tidak Tercapai
Capaian indikator Persentase Peningkatan Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji (KBWU) yang melaksanakan uji berkala tidak memenuhi target dikarenakan Kurangnya kesadaran masyarakat pemilik kendaraan barang untuk melakukan kewajiban uji berkala, untuk meningkatkan kesadaran pemilik kendaraan barang, Dinas Perhubungan melakukan upaya mengingatkan dengan via SMS Gateway kepada pemilik kendaraan bermotor dan melaksanakan operasi laik jalan. Pada tahun 2024 ini pelaksanaan uji berkala sudah tidak berbayar dengan adanya UJI KIR gratis diharapkan jumlah kendaraan yang melaksanakan uji dapat meningkat dari tahun ke tahun.										
2.16. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA										
2.16.01. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota										
1	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	Tercapai

No.	Aspek/ Indikator	Satuan	Target Akhir RPJM Daerah	Kondisi Awal RPJM Daerah	Realisasi s.d. 2023	Tahun 2024		Realisasi RPJM Daerah s.d. 2024	Tingkat Capaian RPJM Daerah	Ketercapaian Thd Target Akhir RPJM Daerah
						Target	Realisasi			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Persen	100.00	100.00	100.52	100.00	100.00	100.00	100.00	Tercapai
3	Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	persen	100.00	100.00	100.00	100.00	103.17	103.17	103.17	Tercapai
2.16.02. Program Informasi Dan Komunikasi Publik										
1	Persentase penyelesaian permohonan informasi publik	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.005	Tercapai
2.16.03. Program Aplikasi Informatika										
1	Indeks Aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi	Indeks	3.30	2.80	3.00	3.10	3.25	3.25	98.48	Tidak Tercapai
Capaian indikator Indeks Aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi tidak memenuhi target dikarenakan Walaupun target belum tercapai, peningkatan nilai indeks yang konsisten setiap tahun mencerminkan upaya perbaikan yang terus dilakukan dan berkelanjutan. Penerapan SPBE, khususnya TIK sesuai kebijakan, tata kelola dan manajemen masih terus diupayakan peningkatan level maturitasnya, sehingga nilai indeks aspek ini dapat mencapai nilai 3,30 sesuai target akhir RPJM Daerah. Aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) memiliki beberapa indikator, antara lain Pembangunan Aplikasi SPBE, Layanan Pusat Data, Jaringan Intra Pemerintah Daerah, dan Sistem Penghubung Layanan. Untuk meningkatkan indeks aspek TIK sesuai dengan target RPJM Daerah (3,30), perlu dilakukan upaya peningkatan tingkat kematangan pada setiap indikator tersebut sehingga indeks aspek TIK dapat mencapai target yang telah ditetapkan.										
2.17. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH										
2.17.03. Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi										
1	Persentase koperasi yang berkualitas (IKK Outcome)	persen	33.23	24.59	29.70	31.49	30.77	30.77	92.60	Tidak Tercapai
Capaian indikator Persentase koperasi yang berkualitas (IKK Outcome) tidak memenuhi target dikarenakan Terkendalanya koperasi untuk melakukan RAT karena adanya keterbatasan pengurus dalam menyajikan laporan keuangan.										
2.17.05. Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian										
1	Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kab/kota	persen	59.68	38.36	97.20	58.77	88.32	88.32	147.99	Tercapai
Capaian indikator Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kab/kota jauh melebihi target dikarenakan Pendidikan dan Pelatihan yang dilaksanakan sesuai dengan juknis DAK PK2UMK yang mengakomodir untuk Koperasi dan UMKM.										
2.17.08. Program Pengembangan Umkm										
1	Meningkatnya usaha Mikro yang menjadi wira usaha (IKK Outcome)	persen	12.37	11.85	11.38	12.16	25.58	25.58	206.65	Tercapai
Capaian indikator Meningkatnya usaha Mikro yang menjadi wira usaha (IKK Outcome) jauh melebihi target dikarenakan Pelatihan yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi UMKM dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Pekalongan dan juga didukung oleh kolaborasi yang dilakukan dengan Pemerintah Provinsi dan Nasional. Sehingga fasilitasi terhadap UMKM dapat dilaksanakan di Kota Pekalongan dan memiliki dampak meluas yang berimbas pada meningkatnya usaha mikro yang menjadi wirausaha.										
2.18. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL										
2.18.01. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota										
1	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	persen	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	Tercapai

No.	Aspek/ Indikator	Satuan	Target Akhir RPJM Daerah	Kondisi Awal RPJM Daerah	Realisasi s.d. 2023	Tahun 2024		Realisasi RPJM Daerah s.d. 2024	Tingkat Capaian RPJM Daerah	Ketercapaian Thd Target Akhir RPJM Daerah
						Target	Realisasi			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	persen	100.00	100.00	103.58	100.00	100.87	100.87	100.87	Tercapai
3	Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	persen	100.00	100.00	100.00	100.00	105.72	105.72	105.72	Tercapai
2.18.02. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal										
1	Penambahan Peraturan Fasilitas/Insentif di Bidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	6.00	1.00	3.00	1.00	6.00	6.00	100.00	Tercapai
2.18.03. Program Promosi Penanaman Modal										
1	Persentase Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	persen	100.00	50.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	Tercapai
2.18.04. Program Pelayanan Penanaman Modal										
1	Penerbitan perizinan dan non perizinan penanaman modal	dokumen	2500.00	2500.00	4,878.00	2,500.00	5,038.00	5,038.00	201.52	Tercapai
Capaian indikator Penerbitan perizinan dan non perizinan penanaman modal jauh melebihi target dikarenakan 1. Melebihi target karena kesadaran dari masyarakat mengajukan izin meningkat 2. dengan penggunaan OSS RBA yang memudahkan pelaku usaha dalam pengajuan izin 3. Karena digunakan untuk persyaratan pinjaman modal										
2.18.05. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal										
1	Nilai Investasi Baru pertahun	Miliar Rupiah	40.53,00	6.42,00	229.10	6.96	238.05	238.05	587.34	Tercapai
Capaian indikator Nilai Investasi Baru pertahun jauh melebihi target dikarenakan Investor yang masuk melebihi target dengan upaya dari jajaran DPMPTSP senantiasa melakukan pendampingan, pembinaan dan pengawasan secara intensif terhadap keberlangsungan izin usaha di Kota Pekalongan agar para pelaku usaha ini selalu patuh dan taat mengurus izin maupun laporan penanaman modal usahanya.										
2.18.06. Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal										
1	Persentase Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan yang Terintegrasi Pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	persen	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	Tercapai
2.19. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA										
2.19.02. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan										
1	Persentase Organisasi Kepemudaan yang dibina	Persen	95.24	91.95	95.24	94.31	125.00	125.00	131.25	Tercapai
Capaian indikator Persentase Organisasi Kepemudaan yang dibina jauh melebihi target dikarenakan Banyaknya kegiatan anggota dewan (pokir) yang melibatkan pemuda dan organisasi kepemudaan										
2.19.03. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan										
1	Persentase Ketersediaan Sarpras Olahraga sesuai Jenis Cabor	persen	42.86	11.43	55.00	34.29	52.38	52.38	122.21	Tercapai
Capaian indikator Persentase Ketersediaan Sarpras Olahraga sesuai Jenis Cabor jauh melebihi target dikarenakan ketersediaan sarpras olahraga telah memenuhi target dari 21 cabor ada 11 cabor yang difasilitasi sarprasnya.										

No.	Aspek/ Indikator	Satuan	Target Akhir RPJM Daerah	Kondisi Awal RPJM Daerah	Realisasi s.d. 2023	Tahun 2024		Realisasi RPJM Daerah s.d. 2024	Tingkat Capaian RPJM Daerah	Ketercapaian Thd Target Akhir RPJM Daerah
						Target	Realisasi			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.20. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK										
2.20.02. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral										
1	Persentase Perangkat Daerah yang menyediakan data statistik sektoral	Persen	100.00	66.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	Tercapai
2.21. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN										
2.21.02. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi										
1	Persentase sistem elektronik yang telah dilakukan pengujian kerentanan	Persen	3.74	0.93	2.80	2.80	2.80	2.80	79.97	Tidak Tercapai
Capaian indikator Persentase sistem elektronik yang telah dilakukan pengujian kerentanan tidak memenuhi target dikarenakan Pengujian sistem elektronik ditargetkan tiap tahun sekitar 3 atau 4 sistem hingga akhir RPJM Daerah. Sistem elektronik yang telah dilakukan pengujian kerentanan sampai tahun 2024 mencapai 2,8 persen dan masih terus ditingkatkan menjadi 3,74 persen pada akhir RPJM Daerah yaitu tahun 2025										
2.22. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN										
2.22.02. Program Pengembangan Kebudayaan										
1	Persentase Event kesenian dan kebudayaan yang disiapkan	persen	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	Tercapai
2.22.03. Program Pengembangan Kesenian Tradisional										
1	Persentase komunitas/sanggar kesenian yang difasilitasi	persen	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	Tercapai
2.22.04. Program Pembinaan Sejarah										
1	Persentase pembinaan Pelestarian Sejarah Menuju Perkembangan Obyek Wisata Budaya	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	Tercapai
2.22.05. Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya										
1	Tingkat pelestarian cagar budaya (IKK Outcome)	Persen	97.52	88.65	91.67	93.97	116.67	116.67	114.51	Tercapai
Capaian indikator Tingkat pelestarian cagar budaya (IKK Outcome) jauh melebihi target dikarenakan Karenana data bersifat akumulasi dari tahun sebelumnya. dan pada tahun ini ditetapkan 4 cagar budaya dari target 3										
2.22.06. Program Pengelolaan Permuseuman										
1	Persentase pengunjung museum batik	Persen	4.80	4.55	8.29	4.71	3.96	3.96	82.50	Tidak Tercapai
Capaian indikator Persentase pengunjung museum batik tidak memenuhi target dikarenakan karena jumlah kunjungan wisatawan nusantara di objek wisata yang dikelola masyarakat sangat tinggi sedangkan jumlah pengunjung ke museum tidak naik secara signifikan sehingga prosentase pengunjung museum tidak memenuhi target.										
2.23. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN										
2.23.02. Program Pembinaan Perpustakaan										
1	Rasio Pengunjung Perpustakaan Per Tahun (Penduduk Usia 5-60 tahun)	Indeks	16.58	15.77	27.96	16.25	30.96	30.96	186.75	Tercapai
Capaian indikator Rasio Pengunjung Perpustakaan Per Tahun (Penduduk Usia 5 - 60 tahun) jauh melebihi target dikarenakan jumlah kunjungan meningkat dikarenakan adanya kegiatan promosi perpustakaan dan literasi (Roadshow bunda literasi, Kunjungan dr sekolah2 sinergis kurikulum merdeka, Fungsi sbg destinasi wisata anak-anak, festival literasi dan lain-lain);										

No.	Aspek/ Indikator	Satuan	Target Akhir RPJM Daerah	Kondisi Awal RPJM Daerah	Realisasi s.d. 2023	Tahun 2024		Realisasi RPJM Daerah s.d. 2024	Tingkat Capaian RPJM Daerah	Ketercapaian Thd Target Akhir RPJM Daerah
						Target	Realisasi			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Adanya pembinaan perpustakaan (pusling, perpumas dan TBM); Petugas yang menguasai /kompeten dlm pelayanan; Memfasilitasi /MoU kegiatan dg sektor lain; Mobilisasi memperkenalkan perpustakaan baru										
2.23.03. Program Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno										
2	Regulasi pelestarian koleksi dan naskah kuno yang ditetapkan	Regulasi	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	100.00	Tercapai
2.24. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN										
2.24.01. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota										
1	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	persen	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	Tercapai
2	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Persen	100.00	100.00	100.35	100.00	109.25	109.25	109.25	Tercapai
3	Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	100.85	100.85	100.85	Tercapai
2.24.02. Program Pengelolaan Arsip										
1	Persentase nilai pengawasan Kearsipan OPD dengan kategori baik	Persen	66.67	33.33	96.67	53.33	100.00	100.00	149.99	Tercapai
Capaian indikator Persentase nilai pengawasan Kearsipan OPD dengan kategori baik jauh melebihi target dikarenakan seluruh OPD sudah bernilai baik pada pelaksanaan pengawasan kearsipan internal tahun 2024										
2	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggung jawaban nasional (IKK outcome)	Indeks	52.50	40.00	75.00	47.50	87.69	87.69	167.03	Tercapai
Capaian indikator Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggung jawaban nasional (IKK outcome) jauh melebihi target Rata-rata nilai OPD mengalami kenaikan signifikan dikarenakan adanya partisipasi OPD dan tahun ini merupakan monitoring tahun lalu sehingga OPD melengkapi kekurangan.										
2.24.03. Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip										
1	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggung jawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat (IKK Outcome)	Persen	100.00	100.00	66.67	100.00	66.67	66.67	66.67	Belum Tercapai
Capaian indikator Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggung jawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat (IKK Outcome) tidak memenuhi target dikarenakan tidak ada kegiatan penyelamatan arsip perangkat daerah yang digabung dan atau dibubarkan.										
2.24.04. Program Perizinan Penggunaan Arsip										

No.	Aspek/ Indikator	Satuan	Target Akhir RPJM Daerah	Kondisi Awal RPJM Daerah	Realisasi s.d. 2023	Tahun 2024		Realisasi RPJM Daerah s.d. 2024	Tingkat Capaian RPJM Daerah	Ketercapaian Thd Target Akhir RPJM Daerah
						Target	Realisasi			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Persentase kinerja pelayanan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup sesuai NSPK	persen	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	Belum Tercapai
Capaian indikator Persentase kinerja pelayanan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup sesuai NSPK tidak memenuhi target dikarenakan Belum Tercapai dikarenakan tidak adanya pengajuan permohonan penggunaan arsip yang bersifat tertutup										
C. Urusan Pemerintahan Pilihan										
3.25. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN										
3.25.01. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota										
1	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	persen	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	Tercapai
2	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	persen	100.00	100.00	100.89	100.00	100.38	100.38	100.38	Tercapai
3	Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	persen	100.00	100.00	100.00	100.00	131.83	131.83	131.83	Tercapai
3.25.03. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap										
1	Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap bersumber dari TPI	persen	6.07	1.00	-0.04	1.00	26.51	26.51	436.81	Tercapai
Capaian indikator Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap bersumber dari TPI jauh melebihi target dikarenakan jumlah produksi meningkat dibandingkan dengan tahun kemarin dikarenakan jumlah kapal yang meningkat, dimana Intensitas kapal Arek Ragan (Rembang) yang bersandar, bongkar dan lelang di TPI Kota pekalongan.										
2	Peningkatan Pendapatan Daerah bersumber dari TPI	persen	6.15	1.00	-0.15	1.00	-2.04	-2.04	-33.31	Tidak Tercapai
Capaian indikator Peningkatan Pendapatan Daerah bersumber dari TPI tidak memenuhi target dikarenakan Jumlah pendapatan daerah menurun dibandingkan dengan tahun kemarin dikarenakan menyesuaikan penerapan retribusi layanan baru yang menyamaratakan jenis dan kualitas ikan . Sesuai dengan Perda atas dasar Peraturan Pemerintah. Hal tersebut mengakibatkan perbedaan perhitungan retribusi dengan tahun sebelumnya yang mengenakan retribusi sebesar 3 persen dari nilai produksi										
3.25.04. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya										
1	Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	persen	6.15	1.00	7.53	1.00	-0.32	-0.32	-5.23	Tidak Tercapai
Capaian indikator Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya tidak memenuhi target dikarenakan terjadi penurunan produksi dibandingkan tahun sebelumnya dikarenakan karena pada triwulan 4 khususnya produksi udang vaname mengalami gagal panen dikarenakan adanya penyakit pada budidaya udang. Untuk komoditas lain seperti ikan bandeng, ikan lele dan ikan nila mengalami kenaikan, namun belum bisa mencapai target produksi tahun 2024.										
3.25.06. Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan										
1	Peningkatan Jumlah Pengusaha Perikanan	persen	12.20	12.20	26.73	12.20	37.75	37.75	309.46	Tercapai
Capaian indikator Peningkatan Jumlah Pengusaha Perikanan jauh melebihi target dikarenakan Jumlah pengusaha perikanan pengolahan dan pemasaran yang dibina : 155 orang; Jumlah pengusaha perikanan pengolahan dan pemasaran adalah 345 orang. Adanya Pelaksanaan pembinaan oleh penyuluh secara rutin dalam setiap bulannya dan pembinaan ke lapangan langsung oleh petugas.										
2	Pelaku diversifikasi produk perikanan yang lulus inkubasi (tenant)	pelaku usaha	12.00	2.00	6.00	2.00	3.00	3.00	25.00	Tidak Tercapai

No.	Aspek/ Indikator	Satuan	Target Akhir RPJM Daerah	Kondisi Awal RPJM Daerah	Realisasi s.d. 2023	Tahun 2024		Realisasi RPJM Daerah s.d. 2024	Tingkat Capaian RPJM Daerah	Ketercapaian Thd Target Akhir RPJM Daerah
						Target	Realisasi			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Capaian indikator Pelaku diversifikasi produk perikanan yang lulus inkubasi (tenant) tidak memenuhi target dikarenakan proses pencapaian target bertahap hingga akhir periode RPJM Daerah. dimana target setiap tahun adalah 2 Pelaku diversifikasi produk perikanan yang lulus inkubasi (tenant). Pada Tahun 2024 2 Pelaku usaha UMKM pemula di bidang perikanan yang mengikuti pembinaan Anisah Nur, dan Zahrotun serta terdapat tambahan pelaku usaha dengan nama Eta Retno Suwaryani. total 3 UMKM pemula di bidang perikanan yang mengikuti pembinaan										
3.26. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA										
3.26.01. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota										
1	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	Persen	100.00	100.00	116.67	100.00	100.00	100.00	100.00	Tercapai
2	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	persen	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	Tercapai
3	Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	persen	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	Tercapai
3.26.02. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata										
1	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD (IKK Outcome)	Persen	12.50	10.00	12.82	11.50	12.24	12.24	97.90	Tidak Tercapai
Capaian indikator Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD (IKK Outcome) tidak memenuhi target dikarenakan kondisi perekonomian yang melemah turut andil dalam kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD.										
3.26.03. Program Pemasaran Pariwisata										
1	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan Domestik per kebangsaan (IKK Outcome)	Persen	46.98	21.98	243.53	36.98	70.89	70.89	150.89	Tercapai
Capaian indikator Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan Domestik per kebangsaan (IKK Outcome) jauh melebihi target dikarenakan Acara acara keagamaan yang diselenggarakan oleh masyarakat Kota Pekalongan menarik minat WNA untuk ikut menghadirinya. Demikian juga acara keagamaan diluar Kota Pekalongan yang menghadirkan WNA kemudian WNA tersebut mampir ke pekalongan untuk berziarah.										
3.26.04. Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual										
1	Persentase pelaku EKRAF yang terfasilitasi untuk berekspresi, berpromosi dan berinteraksi	persen	59.52	0.00	71.33	41.67	73.83	73.83	124.05	Tercapai
Capaian indikator Persentase pelaku EKRAF yang terfasilitasi untuk berekspresi, berpromosi dan berinteraksi jauh melebihi target dikarenakan Masifnya informasi yang disampaikan terkait acara ekraf yang berlangsung memdbuat animo masyarakat untuk ikut serta meningkat.										
3.26.05. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif										
1	Persentase pelaku EKRAF yang terfasilitasi untuk pengembangan kompetensi tingkat dasar	persen	100.00	0.00	296.73	60.00	306.73	306.73	306.73	Tercapai
Capaian indikator Persentase pelaku EKRAF yang terfasilitasi untuk pengembangan kompetensi tingkat dasar jauh melebihi target dikarenakan Masifnya informasi yang disampaikan terkait acara ekraf yang berlangsung memdbuat animo masyarakat untuk ikut serta meningkat										
3.27. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN										
3.27.01. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota										
1	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	persen	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	Tercapai

No.	Aspek/ Indikator	Satuan	Target Akhir RPJM Daerah	Kondisi Awal RPJM Daerah	Realisasi s.d. 2023	Tahun 2024		Realisasi RPJM Daerah s.d. 2024	Tingkat Capaian RPJM Daerah	Ketercapaian Thd Target Akhir RPJM Daerah
						Target	Realisasi			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	persen	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	Tercapai
3	Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	persen	100.00	100.00	50.00	100.00	100.00	100.00	100.00	Tercapai
3.27.02. Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian										
1	Nilai produksi pertanian pertahun	Miliar Rupiah	55.84	55.56	59.29	55.73	60.27	60.27	107.93	Tercapai
2	Nilai produksi peternakan pertahun	Miliar Rupiah	203.65	184.46	259.61	195.75	273.75	273.75	134.42	Tercapai
Capaian indikator Nilai produksi peternakan pertahun jauh melebihi target dikarenakan merupakan hasil kolaborasi antara pemerintah daerah, peternak, dan berbagai pihak terkait dalam menciptakan ekosistem peternakan yang lebih produktif, berkelanjutan, dan inovatif.										
3.27.03. Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian										
1	Persentase pelaksanaan kegiatan pembangunan prasarana pertanian	persen	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	Tercapai
3.27.04. Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner										
1	Persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	persen	5.00	5.00	98.40	5.00	32.26	32.26	645.16	Tercapai
Capaian indikator Persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular jauh melebihi target dikarenakan Angka kesakitan hewan ternak menurun.										
3.27.05. Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian										
1	Persentase pelaksanaan kegiatan pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian kabupaten/ kota	persen	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	Tercapai
3.27.06. Program Perizinan Usaha Pertanian										
1	persentase usaha pertanian/peternakan yang memiliki ijin	persen	100.00	0.00	54.32	75.00	0.00	0.00	0.00	Tidak Tercapai
Capaian indikator persentase usaha pertanian/peternakan yang memiliki ijin tidak memenuhi target dikarenakan Dinperpa tidak melakukan pendataan terkait perijinan usaha pertanian/peternakan di Kota Pekalongan.										
3.27.07. Program Penyuluhan Pertanian										
1	Persentase kenaikan kelas kelompok tani per tahun	persen	5.00	5.00	8.70	5.00	4.76	4.76	95.24	Tidak Tercapai
Capaian indikator Persentase kenaikan kelas kelompok tani per tahun tidak memenuhi target dikarenakan Kelompok tani yang mengalami peningkatan masih di kelas yang sama.										
3.30. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN										
3.30.01. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota										
1	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	persen	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	Tercapai
2	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	persen	100.00	100.00	101.66	100.00	100.00	100.00	100.00	Tercapai
3	Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	persen	100.00	100.00	100.00	100.00	93.19	93.19	93.19	Tidak Tercapai
3.30.02. Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan										

No.	Aspek/ Indikator	Satuan	Target Akhir RPJM Daerah	Kondisi Awal RPJM Daerah	Realisasi s.d. 2023	Tahun 2024		Realisasi RPJM Daerah s.d. 2024	Tingkat Capaian RPJM Daerah	Ketercapaian Thd Target Akhir RPJM Daerah
						Target	Realisasi			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko (IKK Outcome)	persen	77.70	73.93	81.07	76.17	86.869	86.869	111.79	Tercapai
Capaian indikator Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko (IKK Outcome) jauh melebihi target dikarenakan Meningkatnya tingkat pemahaman masyarakat mengenai perizinan dan legalitas dalam usaha, serta didukung dengan adanya kemudahan dalam mengakses perizinan										
3.30.03. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan										
1	Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya	persen	100.00	75.00	68.75	93.75	75.00	75.00	75.00	Belum Tercapai
Capaian indikator Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya tidak memenuhi target dikarenakan Pembangunan pada Pasar Kecamatan dialihkan guna mendukung Pembangunan Pasar Banjarsari berupa DED Pagar Pasar Banjarsari.										
3.30.04. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting										
1	Persentase obyek sasaran pengawasan barang beredar dan pemantauan harga yang terlaksana pemantauanya	persen	100.00	80.00	100.00	92.00	100.00	100.00	100.00	Tercapai
3.30.05. Program Pengembangan Ekspor										
1	Persentase peningkatan volume ekspor	persen	8.19	7.24	-0.04	7.79	7.50	7.50	91.54	Tidak Tercapai
Capaian indikator Persentase peningkatan volume ekspor tidak memenuhi target dikarenakan Peningkatan capaian ekspor belum mencapai target karena adanya penurunan permintaan dari negara tujuan ekspor. Namun, apabila dibandingkan dengan capaian Ekspor pada Tahun 2023, capaian ekspor tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar 3,72 persen. Pemerintah Kota Pekalongan terus berusaha terus untuk melakukan upaya peningkatan ekspor produk unggulan salah satunya melalui keikutsertaan dalam pameran produk unggulan										
3.30.06. Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen										
1	Persentase alat-alat ukur, timbang, takar dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku (IKK Outcome)	persen	83.99	73.99	59.02	79.99	87.20	87.20	103.82	Tercapai
3.30.07. Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri										
1	Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran (IKK Output)	persen	7.50	2.09	0.96	5.34	2.05	2.05	27.33	Tidak Tercapai
Capaian indikator Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran (IKK Output) tidak memenuhi target dikarenakan Keterbatasan dalam penyediaan pemasaran berupa pameran sehingga tidak dapat mengakomodir seluruh UMKM untuk mendapatkan fasilitasi pemasaran tersebut.										
3.31. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN										
3.31.01. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota										
1	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	persen	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	Tercapai
2	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	persen	100.00	100.00	100.30	100.00	99.25	99.25	99.25	Tidak Tercapai

No.	Aspek/ Indikator	Satuan	Target Akhir RPJM Daerah	Kondisi Awal RPJM Daerah	Realisasi s.d. 2023	Tahun 2024		Realisasi RPJM Daerah s.d. 2024	Tingkat Capaian RPJM Daerah	Ketercapaian Thd Target Akhir RPJM Daerah
						Target	Realisasi			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	persen	100.00	100.00	100.00	100.00	118.77	118.77	118.77	Tercapai
3.31.02. Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri										
1	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP (IKK Outcome)	persen	21.04	20.59	75.34	20.75	82.71	82.71	393.11	Tercapai
Capaian indikator Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP (IKK Outcome) jauh melebihi target dikarenakan (1) pertumbuhan jumlah industri yang cukup tinggi, dengan cepatnya laju perekonomian di sektor perdagangan melalui media offline maupun online turut membuat laju pertumbuhan industri di pekalongan semakin meningkat, (2). besarnya nilai investasi, pertumbuhan jumlah industri tentunya diikuti oleh pertumbuhan nilai investasi selain itu dengan adanya sistem OSS yang berperan dalam hal kemudahan perizinan berusaha berperan besar dalam pencatatan nilai investasi yang semakin rapi.										
3.31.03. Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/kota										
1	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait (IKK Outcome)	persen	26.00	23.00	9.04	25.00	25.03	25.03	96.27	Tidak Tercapai
Capaian indikator Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait (IKK Outcome) tidak memenuhi target dikarenakan Ijin usaha industri kecil dan menengah sejak diberlakukan OSS tidak diperlukan verifikasi dari OPD terkait, sehingga ijin usaha yg terbit jumlahnya besar, sedangkan sumber daya yang ada jumlahnya sedikit. Kondisi ini menyebabkan pemantauan dan pengawasan ijin dari instansi terkait tidak mengikuti. Sehingga target akhir RPJM Daerah tidak tercapai										
3.31.04. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional										
1	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini (IKK Outcome)	persen	100.00	100.00	95.00	100.00	100.00	100.00	100.00	Tercapai
D, Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan										
4.01. SEKRETARIAT DAERAH										
4.01.01. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota										
1	Persentase ketercapaian tata laksana, penataan kelembagaan serta kinerja dan reformasi birokrasi	persen	100.00	100.00	100.00	100.00	166.67	166.67	166.67	Tercapai
2	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	persen	100.00	100.00	99.71	100.00	100.00	100.00	100.00	Tercapai
3	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum, dan jasa penunjang urusan pemerintahan	persen	100.00	100.00	103.65	100.00	99.86	99.86	99.86	Tidak Tercapai
4	Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	persen	100.00	100.00	100.00	100.00	97.62	97.62	97.62	Tidak Tercapai
5	Persentase ketersediaan layanan administrasi keuangan, operasional dan kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	persen	100.00	100.00	75.00	100.00	70.84	70.84	70.84	Tidak Tercapai
6	Persentase pelayanan keprotokoleran	persen	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	Tercapai

No.	Aspek/ Indikator	Satuan	Target Akhir RPJM Daerah	Kondisi Awal RPJM Daerah	Realisasi s.d. 2023	Tahun 2024		Realisasi RPJM Daerah s.d. 2024	Tingkat Capaian RPJM Daerah	Ketercapaian Thd Target Akhir RPJM Daerah
						Target	Realisasi			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.01.02. Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat										
1	Penyusunan dokumen LPPD dan LKPJ tepat waktu	persen	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	Tercapai
2	Persentase Raperda menjadi Peraturan Daerah yang berasal dari eksekutif	persen	100.00	100	90.00	100.00	122.22	122.22	122.22	Tercapai
Capaian indikator Persentase Raperda menjadi Peraturan Daerah yang berasal dari eksekutif jauh melebihi target dikarenakan Karena adanya penambahan pembuatan Perda Perubahan tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah Kepada BUMD dan APBD Tahun 2025.										
3	Persentase capaian fasilitasi pemberdayaan masyarakat	persen	100.00	100	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	Tercapai
4.01.03. Program Perekonomian Dan Pembangunan										
1	Persentase Kegiatan strategis bidang perindustrian, perdagangan, koperasi- UKM, BUMD, Pertanian, Perikanan, Kelautan, Ketahanan pangan yang dikoordinasikan	Persen	100.00	100	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	Tercapai
2	Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD (IKK Outcome)	persen	6.00	7	3.62	6.00	9.60	9.60	62.50	Tidak Tercapai
Capaian indikator Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD (IKK Outcome) tidak memenuhi target dikarenakan masih perhitungan sementara, belum merupakan hasil akhir capaian (masih akan dilakukan rekon LRA)										
3	Persentase Keberhasilan Pengadaan Barang/Jasa	persen	100.00	100	97.50	100.00	100.00	100.00	100.00	Tercapai
4.02. SEKRETARIAT DPRD										
4.02.01. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota										
1	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	persen	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	Tercapai
2	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	persen	100.00	100.00	102.02	100.00	102.84	102.84	102.84	Tercapai
3	Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	persen	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	Tercapai
4	Persentase ketersediaan layanan administrasi, keuangan dan kesejahteraan DPRD	persen	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	Tercapai
4.02.02. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD										
1	Persentase Perda yang ditetapkan	persen	100.00	100.00	75.00	100.00	64.71	64.71	64.71	Tidak Tercapai
Capaian indikator Persentase Perda yang ditetapkan tidak memenuhi target dikarenakan panjangnya proses pembahasan Raperda, sehingga masih ada 6 Raperda yang belum selesai pembahasannya dan akan dilanjutkan proses pembahasannya di tahun 2025, yaitu : (1). Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengawasan Jaminan Produk Halal dan Perlindungan Konsumen; (2). Rancangan Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tawuran Peserta Didik; (3). Rancangan Peraturan Daerah tentang Pelestarian dan Peningkatan Guru Ngaji Al Qur'an (Propemperda Tahun 2023); (4). Rancangan Peraturan Daerah tentang Pencabutan Perda Kota Pekalongan Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kota Pekalongan (Propemperda Tahun 2023); (5). Rancangan Peraturan Daerah tentang Bangunan Gedung; (6). Rancangan Peraturan Daerah tentang Penataan dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan (Propemperda Tahun 2023)										

No.	Aspek/ Indikator	Satuan	Target Akhir RPJM Daerah	Kondisi Awal RPJM Daerah	Realisasi s.d. 2023	Tahun 2024		Realisasi RPJM Daerah s.d. 2024	Tingkat Capaian RPJM Daerah	Ketercapaian Thd Target Akhir RPJM Daerah
						Target	Realisasi			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Persentase pembahasan dokumen penganggaran tepat waktu	persen	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	Tercapai
E. Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan										
5.01. PERENCANAAN										
5.01.01. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota										
1	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	persen	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	Tercapai
2	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	persen	100.00	100.00	100.08	100.00	100.34	100.34	100.34	Tercapai
3	persentase pengadaan / pemeliharaan barang milik daerah	persen	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	Tercapai
5.01.02. Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah										
1	Persentase ketersediaan dokumen evaluasi dan pelaporan triwulanan tepat waktu	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	Tercapai
2	Persentase penyediaan data-informasi perencanaan tepat waktu	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	Tercapai
3	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan tepat waktu	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	Tercapai
5.01.03. Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah										
1	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan bidang Pemsosbud	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	Tercapai
2	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan bidang Perekonomian	persen	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	Tercapai
3	Persentase ketersediaan dokumen Perencanaan Bidang Infrastruktur Wilayah	persen	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	Tercapai
5.02. KEUANGAN										
5.02.01. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota										
1	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	Tercapai
2	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	persen	100.00	100.00	100.46	100.00	100.00	100.68	100.68	Tercapai
3	Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	persen	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	102.39	102.39	Tercapai
5.02.02. Program Pengelolaan Keuangan Daerah										

No.	Aspek/ Indikator	Satuan	Target Akhir RPJM Daerah	Kondisi Awal RPJM Daerah	Realisasi s.d. 2023	Tahun 2024		Realisasi RPJM Daerah s.d. 2024	Tingkat Capaian RPJM Daerah	Ketercapaian Thd Target Akhir RPJM Daerah
						Target	Realisasi			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya (IKK Outcome)	Persen	7.26	11.91	5.79	7.66	5.06	5.06	143.44	Tercapai
Capaian indikator Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya (IKK Outcome) jauh melebihi target dikarenakan Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun sebelumnya (N-1), rasio antara sisa anggaran terhadap total belanja anggaran mencapai 5,06 persen. Nilai ini diperoleh dari perhitungan rasio antara realisasi SiLPA sebesar Rp53.925.975.806 dengan total belanja anggaran yang terealisasi sebesar Rp1.065.447.392.000. Perhitungan ini menunjukkan bahwa dari keseluruhan anggaran belanja yang direncanakan dan dilaksanakan pada tahun tersebut. Rasio ini mencerminkan efektivitas pelaksanaan anggaran, termasuk kemampuan pemerintah daerah dalam merencanakan dan merealisasikan belanja daerah secara optimal. Sisa lebih perhitungan anggaran dapat menunjukkan efisiensi penggunaan anggaran, namun juga dapat menjadi indikator adanya potensi pengelolaan yang perlu ditingkatkan, seperti percepatan pelaksanaan program atau optimalisasi penganggaran agar lebih sesuai dengan kebutuhan. Dengan rasio sebesar 5,06 persen, penting bagi pemerintah daerah untuk mengevaluasi strategi pengelolaan anggaran guna mendukung pencapaian target pembangunan secara lebih optimal. Atas capaian tersebut Pemerintah Kota Pekalongan menjadi 5 kota terbaik se-Indonesia bersama Kota Probolinggo, Kota Jambi, Kota Blitar dan Kota Malang yang menerima anugerah APBD Award 2024 dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) kategori Realisasi Belanja Tertinggi.										
5.02.03. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah										
1	Indeks Pengelolaan Aset Baik (Persentase ketersediaan daftar aset tetap, manual, Penyusunan daftar aset tetap dan proses inventarisasi aset tahunan) (IKK Outcome)	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	Tercapai
5.02.04. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah										
1	Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD (IKK Outcome)	Persen	5.00	5.00	4.80	5.00	0.30	0.30	100.00	Tercapai
5.03. KEPEGAWAIAN										
5.03.01. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota										
1	Persentase Ketersediaan Laporan Capaian Kinerja	persen	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	Tercapai
2	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	persen	100.00	100.00	100.00	100.00	102.13	102.13	102.13	Tercapai
3	Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	persen	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	Tercapai
5.03.02. Program Kepegawaian Daerah										
1	Persentase PNS berkembang karier	persen	50.00	50.00	66.67	50.00	106.67	106.67	213.33	Tercapai
Capaian indikator Persentase PNS berkembang karier jauh melebihi target dikarenakan Di dorong oleh Kebijakan SE menpan RB nomor 28 th 2021 dan perwal kota pekalongan 27 tahun 2023 yang memberikan kemudahan PNS dalam meningkatkan kompetensi melalui jalur pendidikan antara lain: (1). ijin tugas belajar utk prodi dg Status akreditasi C atau Baik dapat diberikan selama ada rekomendasi dari menpan RB, (2). Pembelajaran jarak jauh, kelas khusus maupun kelas jauh dapat diberikan selama ada ijin dari Dirjen Dikti.										
2	Tingkat Pelaporan Kinerja ASN	persen	100.00	100.00	98.90	100.00	99.97	99.97	99.97	Tidak Tercapai
Capaian indikator Tingkat Pelaporan Kinerja ASN tidak memenuhi target dikarenakan Satu orang ASN tidak bersedia menyusun SKP karena yang bersangkutan tidak melaksanakan tugas										
3	Persentase Keterisian Jabatan	persen	90.00	90.00	97.41	90.00	95.61	95.61	107.95	Tercapai
4	Persentase Keterpenuhan Formasi ASN	Persen	80.00	80.00	64.35	80.00	48.14	48.14	60.18	Tidak Tercapai

No.	Aspek/ Indikator	Satuan	Target Akhir RPJM Daerah	Kondisi Awal RPJM Daerah	Realisasi s.d. 2023	Tahun 2024		Realisasi RPJM Daerah s.d. 2024	Tingkat Capaian RPJM Daerah	Ketercapaian Thd Target Akhir RPJM Daerah
						Target	Realisasi			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Capaian indikator Persentase Keterpenuhan Formasi ASN tidak memenuhi target dikarenakan Formasi tidak terpenuhi 100 persen dikarenakan moratorium penerimaan CPNS berlangsung selama 5 tahun dari tahun 2015 sd 2019 Jumlah formasi yang ada juga termasuk formasi tampungan bagi ASN yang akan naik jabatan.										
5.04. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN										
5.04.02. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia										
1	Persentase PNS berkembang kompetensinya	persen	100.00	100.00	149.29	100.00	100.99	107.99	107.99	Tercapai
5.05. PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN										
5.05.02. Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah										
1	Persentase Litbang yang sesuai dengan Arah Kebijakan RPJM Daerah	persen	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	Tercapai
2	Skor Capaian Nilai RiDA (SiDA)	skor	76.00	70.93	0.00	74.00	0.00	0.00	0.00	Tidak Tercapai
Capaian indikator Skor Capaian Nilai RiDA (SiDA) tidak memenuhi target dikarenakan Indikator kinerja skor capaian nilai RiDA (SiDA) data tidak tersedia, dikarenakan tidak dilakukan pengukuran RiDA Kota Pekalongan oleh BRIN. Hal ini mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional, pengukuran Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SiDA) saat ini telah bertransformasi menjadi Indeks Daya Saing Daerah (IDSD). Fasilitasi Pengukuran Kapasitas Inovatif Daerah Tahun 2023-2025 (R-SiDA) akan dilakukan dengan penyesuaian pengukuran IDSD..										
3	Persentase Pemberdayaan Stakeholder Kelitbangan	persen	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	Tercapai
F. Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan										
6.01. INSPEKTORAT DAERAH										
6.01.01. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota										
1	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	persen	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	Tercapai
2	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	persen	100.00	100.00	100.00	100.00	107.60	107.60	107.60	Tercapai
3	Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	persen	100.00	100.00	100.00	100.00	112.00	112.00	112.00	Tercapai
6.01.02. Program Penyelenggaraan Pengawasan										
1	Persentase tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan	persen	85.00	85.00	52.94	85.00	3.00	3.00	102.40	Tercapai
6.01.03. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi										
1	Level Kapabilitas APIP	Persen	3.00	3.00	3.09	3.00	3.00	3.00	100.00	Tercapai
Capaian indikator Level Kapabilitas APIP tidak memenuhi target dikarenakan menunggu rilis data nilai kapabilitas APIP dari BPKP pada triwulan IV										
G. Unsur Kewilayahan										
7.01. KECAMATAN										
7.01.01. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota										
1	Persentase Ketersediaan Laporan Capaian Kinerja (Kec. Pekalongan Utara)	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	Tercapai

No.	Aspek/ Indikator	Satuan	Target Akhir RPJM Daerah	Kondisi Awal RPJM Daerah	Realisasi s.d. 2023	Tahun 2024		Realisasi RPJM Daerah s.d. 2024	Tingkat Capaian RPJM Daerah	Ketercapaian Thd Target Akhir RPJM Daerah
						Target	Realisasi			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Persentase Ketersediaan Layanan Administrasi Kepegawaian, Administrasi Umum dan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Kec. Pekalongan Utara)	Persen	100.00	100.00	100.24	100.00	101.99	101.99	101.99	Tercapai
3	Persentase Pengadaan/Pemeliharaan Barang Milik Daerah (Kec. Pekalongan Utara)	Persen	100.00	100.00	96.67	100.00	100.00	100.00	100.00	Tercapai
4	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja (Kec. Pekalongan Selatan)	persen	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	Tercapai
5	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah (Kec. Pekalongan Selatan)	persen	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	Tercapai
6	Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah (Kec. Pekalongan Selatan)	persen	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	Tercapai
7	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja (Kec. Pekalongan Barat)	persen	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	Tercapai
8	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah (Kec. Pekalongan Barat)	persen	100.00	100.00	97.84	100.00	100.00	100.00	100.00	Tercapai
9	Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah (Kec. Pekalongan Barat)	persen	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	Tercapai
10	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja (Kec. Pekalongan Timur)	persen	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	Tercapai
11	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah (Kec. Pekalongan Timur)	persen	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	Tercapai
12	Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah (Kec. Pekalongan Timur)	persen	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	Tercapai
7.01.02. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik										
1	Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik di Wilayah Utara	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	Tercapai
2	Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik di Wilayah Selatan	persen	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	Tercapai
3	Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik di Wilayah Barat	persen	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	Tercapai

No.	Aspek/ Indikator	Satuan	Target Akhir RPJM Daerah	Kondisi Awal RPJM Daerah	Realisasi s.d. 2023	Tahun 2024		Realisasi RPJM Daerah s.d. 2024	Tingkat Capaian RPJM Daerah	Ketercapaian Thd Target Akhir RPJM Daerah
						Target	Realisasi			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik di Wilayah Timur	persen	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	Tercapai
7.01.03. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan										
1	Tingkat Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan / Kelurahan di Wilayah Utara	Persen	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	Tercapai
2	Tingkat Kinerja pemberdayaan masyarakat kecamatan/kelurahan di Wilayah Selatan	persen	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	Tercapai
3	Tingkat Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan / Kelurahan di Wilayah Barat	persen	100.00	100	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	Tercapai
4	Tingkat Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan / Kelurahan di Wilayah Timur	persen	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	Tercapai
7.01.04. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum										
1	Tingkat Kinerja Trantibum Wilayah Utara	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	Tercapai
2	Tingkat kinerja Trantibum Wilayah Selatan	persen	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	Tercapai
3	Tingkat Kinerja Trantibum di wilayah Barat	persen	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	Tercapai
4	Tingkat kinerja Trantibum di Wilayah Timur	persen	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	Tercapai
7.01.05. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum										
1	Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum di Wilayah Utara	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	Tercapai
2	Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum di Wilayah Selatan	persen	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	Tercapai
3	Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum di Wilayah Barat	persen	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	Tercapai
4	Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum di Wilayah Timur	persen	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	Tercapai
H. Unsur Pemerintahan Umum										
8.01. KESATUAN BANGSA DAN POLITIK										
8.01.01. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota										
1	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	persen	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	Tercapai
2	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	persen	100.00	100.00	100.33	100.00	102.95	102.95	102.95	Tercapai
3	Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	persen	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	Tercapai
8.01.02. Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan										

No.	Aspek/ Indikator	Satuan	Target Akhir RPJM Daerah	Kondisi Awal RPJM Daerah	Realisasi s.d. 2023	Tahun 2024		Realisasi RPJM Daerah s.d. 2024	Tingkat Capaian RPJM Daerah	Ketercapaian Thd Target Akhir RPJM Daerah
						Target	Realisasi			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Persentase etnis/suku/agama/ormas dan LSM yang paham terhadap ideologi pancasila dan wawasan kebangsaan	persen	100.00	100.00	100.74	100.00	100.00	100.00	100.00	Tercapai
8.01.03. Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik										
1	Jumlah parpol dan lembaga pendidikan yang mengikuti pendidikan politik	lembaga	16.00	0.00	16.00	16.00	16.00	16.00	100.00	Tercapai
8.01.04. Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan										
1	Persentase ormas yang mendapatkan fasilitasi dan pembinaan	persen	100.00	100.00	90.48	100.00	100.00	100.00	100.00	Tercapai
8.01.05. Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya										
1	Persentase etnis/suku/agama/ormas dan LSM yang memahami tentang ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	persen	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	Tercapai
8.01.06. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial										
1	Persentase penanganan kejadian terkait konflik sosial	persen	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	Tercapai

Sumber: Bapperida Kota Pekalongan (diolah), pusaka.pekalongankota.go.id, 2025

2.6. GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

Prospek perekonomian Kota Pekalongan diperkirakan masih akan dipengaruhi oleh dinamika perekonomian global dan nasional. Dalam RPJM Nasional, Pemerintah menetapkan target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8 persen pada tahun 2029, dengan peningkatan *Gross National Income* (GNI) per kapita menjadi USD 8.000. Target ini akan memberikan dampak signifikan terhadap perekonomian daerah, termasuk Kota Pekalongan.

Sebagai kota dengan sektor unggulan di bidang industri batik dan perikanan, Pekalongan berpeluang meraih manfaat dari peningkatan investasi, perdagangan, dan konsumsi domestik yang tumbuh seiring dengan penguatan ekonomi nasional. Pertumbuhan ekonomi yang kuat dapat mendorong permintaan produk lokal, memperluas pasar, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penciptaan lapangan kerja dan peningkatan daya beli.

Secara umum Perekonomian global pada periode 2025-2029 masih diliputi ketidakpastian akibat beberapa faktor utama, yaitu:

1. Geopolitik dan Geoekonomi, konflik berkepanjangan seperti Rusia-Ukraina serta ketegangan di Timur Tengah dapat mengganggu rantai pasok global dan meningkatkan harga energi serta bahan baku.
2. Pelemahan Ekonomi China, jika ekonomi China melambat, permintaan ekspor dari negara lain termasuk Indonesia bisa menurun, menghambat pertumbuhan sektor perdagangan dan industri.
3. Dampak Perubahan Iklim Global, meningkatnya bencana alam akan berpengaruh pada sektor pertanian dan perikanan, meningkatkan biaya ekonomi dan mempersulit produksi pangan.
4. Kebijakan Proteksionisme Amerika Serikat, peningkatan tarif impor AS dapat menghambat ekspor dari banyak negara, termasuk Indonesia, yang bisa berdampak pada volume perdagangan global.

Sementara kondisi lingkungan nasional yang akan berpengaruh positif terhadap perekonomian Kota Pekalongan antara lain:

- 1) Pada tahun 2024, kondisi fiskal Indonesia tetap terkendali dengan pendapatan negara yang tumbuh positif, seiring dengan penerimaan perpajakan dan PNBPN yang meningkat. Hingga September 2024, pendapatan negara mencapai Rp2.150 triliun, tumbuh sekitar 5,6 persen (YoY), dengan realisasi APBN mencapai 85,2 persen dari target tahunan. Belanja negara juga mengalami pertumbuhan moderat, mencapai Rp2.050 triliun, didorong oleh penguatan belanja pemerintah pusat dan transfer ke daerah (TKD). Defisit fiskal tetap terjaga dalam batas aman, dengan rasio utang pemerintah berada di kisaran 37,5 persen terhadap PDB.
- 2) Sepanjang tahun 2024, Bank Indonesia telah mengambil langkah-langkah untuk menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan stabilitas harga. Suku bunga acuan dipertahankan pada level 6,0 persen guna merespons dinamika global dan domestik, termasuk tekanan inflasi serta fluktuasi nilai tukar rupiah.
- 3) Likuiditas perekonomian dan perbankan tetap dalam kondisi memadai meskipun terjadi sedikit pengetatan akibat kebijakan moneter yang lebih ketat. Perbankan terus menunjukkan peran intermediasi yang baik, dengan pertumbuhan kredit di sektor riil mencapai 8,2 persen (YoY), terutama di sektor industri manufaktur, perdagangan, dan UMKM

- 4) Tren inflasi domestik menunjukkan perbaikan dengan angka inflasi tahunan pada akhir 2024 diproyeksikan berada di kisaran 3,2 persen, masih dalam target yang ditetapkan pemerintah. Stabilitas harga pangan dan energi menjadi faktor utama yang menjaga inflasi tetap terkendali, meskipun terdapat tantangan dari sisi cuaca dan gangguan rantai pasok global.
- 5) Sektor pariwisata terus menunjukkan pemulihan yang kuat, dengan kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia mencapai 4,8 juta orang hingga triwulan III 2024, tumbuh sekitar 44 persen (YoY). Pemulihan ini berdampak positif pada sektor ekonomi kreatif dan industri lokal, termasuk industri batik di Kota Pekalongan yang memiliki potensi besar untuk menarik wisatawan budaya dan ekonomi kreatif.
- 6) Tren perdagangan produk ekonomi kreatif tetap mengalami surplus, dengan ekspor yang tumbuh sekitar 6,5 persen (YoY). Namun, defisit dalam penggunaan kekayaan intelektual masih menjadi tantangan, dengan defisit biaya penggunaan kekayaan intelektual mencapai USD590 juta pada triwulan III 2024. Diperlukan penguatan ekosistem perlindungan hak kekayaan intelektual dan strategi komersialisasi yang lebih agresif agar ekonomi kreatif, termasuk industri batik Pekalongan, dapat lebih kompetitif di pasar global.

Beberapa tantangan global dan nasional yang harus dihadapi Kota Pekalongan yaitu:

- a. Berakhirnya status pandemi *Covid-19* sebagai kejadian darurat kesehatan publik bukanlah akhir dari tantangan global yang harus dihadapi oleh suatu negara. Disamping itu potensi munculnya varian baru membutuhkan kewaspadaan dan kesiap-siagaan Perkembangan dinamika global yang sedemikian cepat pasca pandemi telah menciptakan kompleksitas yang berat dalam tahun tahun sekarang dan ke depan.
- b. Ketegangan geopolitik menjadi tantangan paling berat. Meningkatnya tensi geopolitik menyebabkan perubahan signifikan arah kebijakan ekonomi negara-negara besar menjadi *inward looking*. Akibatnya, dunia semakin terfragmentasi dan tren globalisasi berubah menjadi deglobalisasi.
- c. Tantangan selanjutnya yakni kecepatan perkembangan teknologi digital. Perubahan teknologi informasi yang cepat membawa manfaat bagi masyarakat maupun efisiensi produksi. Namun di sisi lain, hal ini menghadirkan tantangan berupa penghematan tenaga kerja manusia secara masif, persoalan privasi, dan keamanan siber.
- d. Perubahan iklim serta respon kebijakannya turut menjadi tantangan global. Respon kebijakan mitigasi dan adaptasi oleh negara maju terhadap perubahan iklim menimbulkan persoalan bagi banyak negara berkembang. Seperti kebijakan *Inflation Reduction Act* (IRA) di Amerika Serikat dan *Carbon Border Adjustment Mechanism* (CBAM) di Uni Eropa. Perubahan iklim yang terjadi secara masif di berbagai panjung dunia menyebabkan kekeringan, panas bumi naik, dan gelombang panas. Menyebabkan turunnya produksi beras yang menjadi bahan pokok di dalam negeri dan mempengaruhi ketahanan pangan.
- e. Pemindahan ibu kota negara akan berdampak pada banyak aspek, termasuk dana transfer dan biaya perjalanan dinas koordinasi negara. Pemindahan ibu kota negara akan memerlukan alokasi anggaran yang signifikan untuk pembangunan infrastruktur baru, seperti pembangunan gedung-gedung pemerintahan, jalan, jembatan, serta penyediaan fasilitas publik lainnya. Anggaran untuk proyek-proyek ini kemungkinan besar akan berasal dari anggaran pemerintah pusat dan dapat mengganggu alokasi dana untuk program-program penting lainnya, termasuk dana transfer ke daerah-daerah yang membutuhkan. Pemindahan ibu kota juga akan berdampak pada biaya perjalanan dinas koordinasi ke pemerintah pusat.

- f. Kenaikan tarif tol memiliki dampak yang kompleks pada anggaran belanja daerah. Kenaikan tarif tol akan memicu kendaraan melewati jalur dalam kota, sehingga akan berdampak timbulnya kemacetan dan meningkatnya biaya pemeliharaan infrastruktur.
- g. Hilirisasi temuan inovasi dihadapkan pada tantangan dalam pengembangan proses bisnis industri di Kota Pekalongan, penciptaan produk – produk khas Kota Pekalongan dengan nilai tambah yang tinggi dan menerapkan penggunaan bahan baku yang ramah lingkungan.
- h. Penerapan kebijakan nasional terkait manajemen birokrasi antara lain berupa penyelesaian tenaga non ASN yang harus diikuti dengan peningkatan kompetensi sebagai akibat pola rekrutmen non ASN sebelumnya yang sangat lemah dalam memperhatikan aspek kompetensi. Kondisi ini berdampak pada peningkatan beban anggaran belanja peningkatan SDM yang sebelumnya belum menempati prioritas dibanding permasalahan riil di Kota Pekalongan seperti banjir rob ataupun penataan kota lainnya.
- i. Pembangunan KITB diyakini akan memberikan dampak terhadap kondisi perekonomian Kota Pekalongan. Peningkatan sarana pendukung yang dimungkinkan akan dipenuhi secara mandiri di KITB, akan berdampak pada menurunnya kunjungan ke Kota Pekalongan sehingga akan menurunkan pula perputaran uang di Kota Pekalongan atau dengan kata lain PDRB Kota Pekalongan akan menurun pada sektor yang selama ini dipengaruhi oleh perdagangan dan jasa serta akomodasi perhotelan dan restoran.
- j. Perubahan kepemimpinan dapat memiliki dampak pada kebijakan keuangan, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi kapasitas/kemampuan keuangan daerah.

Selama kurun waktu beberapa tahun terakhir, struktur perekonomian Kota Pekalongan tidak bergeser dari lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, lapangan usaha Industri Pengolahan dan lapangan usaha Konstruksi, yang terlihat dari peranan lapangan usaha tersebut setiap tahunnya terhadap pembentukan PDRB Kota Pekalongan. Hal tersebut merupakan perwujudan perkembangan sebuah kota, dimana sektor primer sudah tidak mendominasi lagi dalam perekonomian.

Hasil analisa terhadap tantangan dan prospek perekonomian maka diperlukan usaha intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah. Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan yang merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran yang selanjutnya akan menjadi penerimaan daerah. Upaya peningkatan intensifikasi dan ekstensifikasi PAD dilakukan melalui pemberdayaan dan peningkatan kinerja BUMD, (termasuk di dalamnya upaya meninjau sekaligus pembentukan kembali Peraturan Daerah tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kota Pekalongan), optimalisasi pelayanan BLUD, Perangkat Daerah penghasil dan pengelolaan aset Pemerintah Kota Pekalongan.

Dengan memperhatikan kondisi di atas, selanjutnya akan dibahas gambaran pengelolaan keuangan daerah yang berisi penjelasan tentang kinerja pengelolaan keuangan di masa lalu, perilaku data dan informasi pertanggungjawaban keuangan daerah, dan bagaimana proyeksi ketersediaan dana pembangunan pada perodesasi RPJM Daerah Tahun 2025-2029 mendatang. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Sedangkan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah.

Analisis pengelolaan keuangan daerah pada dasarnya dimaksudkan untuk menghasilkan gambaran tentang kapasitas atau kemampuan keuangan daerah dalam mendanai penyelenggaraan pembangunan daerah, hal ini sangat penting dalam penyusunan

RPJM Daerah Tahun 2025-2029 . Untuk memahami tingkat kemampuan keuangan daerah, maka perlu dicermati kondisi kinerja keuangan daerah, baik kinerja keuangan masa lalu maupun kebijakan yang melandasi pengelolaannya.

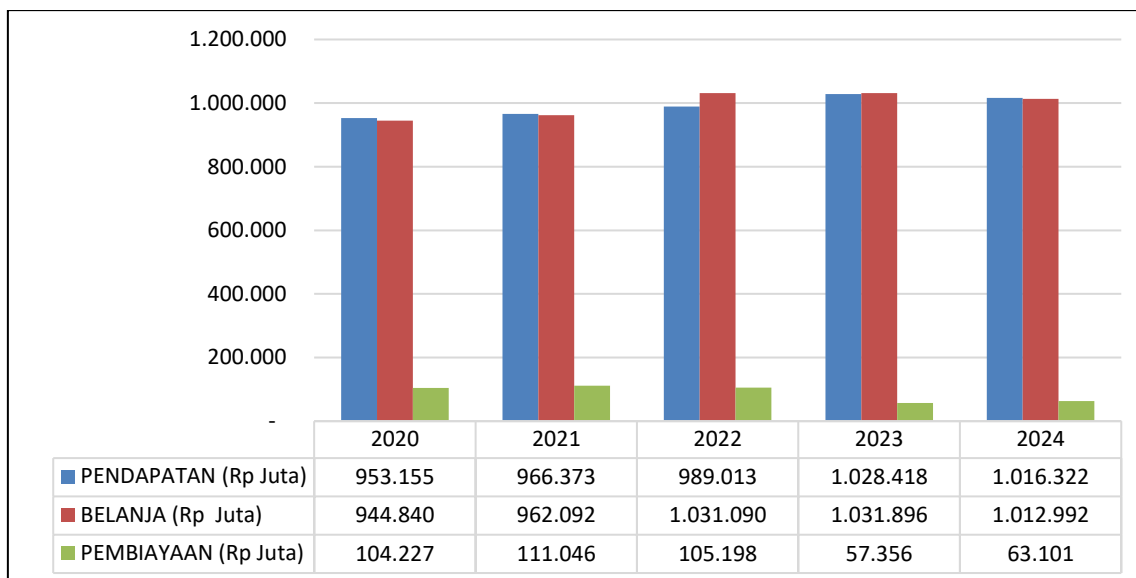
2.6.1. Gambaran Ringkas Kondisi Keuangan Daerah Lima Tahun Terakhir (Tahun 2020 s/d Tahun 2024)

Keuangan Daerah merupakan komponen daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang menyatu dalam kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). APBD hakikatnya merupakan salah satu instrumen kebijakan untuk meningkatkan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat di daerah. APBD sebagai bentuk penjabaran kuantitatif dari tujuan dan sasaran Pemerintah Daerah serta tugas pokok dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah, disusun dalam suatu struktur yang menggambarkan besarnya pendanaan atas berbagai sasaran yang hendak dicapai, tugas-tugas pokok dan fungsi sesuai kondisi, potensi, aspirasi dan kebutuhan riil di masyarakat untuk suatu tahun tertentu.

Analisis kinerja keuangan daerah diperlukan dalam rangka mengoptimalkan penyelenggaraan fungsi pemerintah daerah melalui pemberian sumber-sumber penerimaan yang cukup kepada daerah dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penerimaan daerah mencakup pendapatan dan penerimaan pembiayaan daerah. Oleh karenanya untuk mengetahui kinerja keuangan daerah diperlukan pemahaman yang baik tentang obyek pendapatan, belanja dan pembiayaan sesuai dengan kewenangan dan struktur APBD. Dalam rangka memahami kinerja keuangan Kota Pekalongan, maka diperlukan analisis kinerja keuangan masa lalu, yakni kinerja keuangan Kota Pekalongan tahun 2020-2024. Secara berturut-turut pada sub bagian ini akan dijelaskan kinerja keuangan yang mencakup pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.

2.6.1.1. Kinerja Pelaksanaan APBD

Kinerja pelaksanaan APBD Kota Pekalongan dapat dilihat dari Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah. Pendapatan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Belanja daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Sementara itu pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya. Secara umum perkembangan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah Kota Pekalongan dari tahun ke tahun menunjukkan peningkatan, seperti disajikan dalam gambar II.51 berikut:



Sumber: BPKAD Kota Pekalongan, 2025

Gambar II-53
Perkembangan Pendapatan, Belanja Daerah dan Pembiayaan Kota Pekalongan
Tahun 2020-2024

1. Pendapatan Daerah

Perkembangan pendapatan daerah Kota Pekalongan dalam kurun waktu lima tahun terakhir menunjukkan kenaikan rata-rata sebesar 1,63 persen, dimana pendapatan pada tahun 2020 sebesar Rp. 953.155.394.615,- menjadi Rp. 1.016.321.692.109,- pada tahun 2024. Perkembangan Pendapatan Asli Daerah mengalami kenaikan dalam kurun waktu lima tahun terakhir (2020-2024) sebesar 4,27 persen dan Pendapatan Transfer meningkat rata-rata sebesar 1,62 persen. Dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah yang ditindaklanjuti Penetapan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 terdapat perubahan struktur Pendapatan Pajak Daerah yang terdiri dari :

- 1) Pajak Barang dan Jasa Tertentu atau PBJT atas :
 - Penjualan/penyerahan/konsumsi Makanan dan Minuman
 - Penjualan/penyerahan/konsumsi Tenaga Listrik
 - Penjualan/penyerahan/konsumsi Perhotelan
 - Penjualan/penyerahan/konsumsi Jasa Parkir
 - Penjualan/penyerahan/konsumsi Jasa Kesenian dan Hiburan
- 2) Pajak Reklame
- 3) Pajak Air Tanah
- 4) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
- 5) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
- 6) Opsen Pajak Kendaraan Bermotor
- 7) Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Di samping perubahan struktur Pendapatan Pajak Daerah, pada komponen Retribusi Daerah dan Lain-lain PAD yang sah juga mengalami terdapat perubahan rekening yang semula pendapatan BLUD RSUD, BLUD Puskesmas dan BLUD PSPJ masuk komponen pendapatan Lain-lain PAD Yang Sah, pada Tahun Anggaran 2024 Pendapatan BLUD masuk komponen Pendapatan Retribusi Daerah. Hal ini yang menyebabkan rata-rata pertumbuhan Retribusi Daerah sebesar 198,52 persen dan Lain-lain PAD Yang Sah mengalami pertumbuhan negatif sebesar 25,40 persen.

Pada tahun anggaran 2024, walaupun secara keseluruhan realisasi pendapatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah melebihi dari target yang ditetapkan, tetapi terdapat beberapa komponen Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang sebenarnya tidak tercapai, Lain-lain PAD yang Sah juga tidak mencapai target. Berikut penyebab beberapa Pendapatan Asli Daerah tidak mencapai target antara lain :

- 1) PBJT-Jasa Perhotelan : walaupun Kota Pekalongan mengalami peningkatan jumlah hotel, penerimaan pajak hotel justru tidak menunjukkan peningkatan yang signifikan. Hal ini mengindikasikan adanya faktor lain yang lebih dominan mempengaruhi pendapatan pajak hotel, seperti berkurangnya jumlah event berskala nasional pada tahun 2024 yang berdampak pada okupansi kamar hotel.
- 2) PBJT-Jasa Parkir : adanya perubahan regulasi yaitu dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 yang menurunkan tarif pajak parkir dari 20 persen dan 25 persen menjadi 10 persen untuk semua jenis parkir. Penurunan tarif secara signifikan ini menjadi salah satu faktor utama yang menyebabkan penurunan pendapatan pajak parkir.
- 3) PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan : adanya perubahan regulasi yaitu dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 dan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 yang menurunkan tarif PBJT- tontonan film atau bentuk tontonan audio visual lainnya yang dipertontonkan secara langsung di suatu lokasi tertentu dari 20 persen menjadi 10 persen dan juga penurunan tarif PBJT- olahraga permainan dengan menggunakan tempat/ruang dan /atau peralatan dan perlengkapan untuk olahraga dan kebugaran dari 20 persen menjadi 10 persen. Penurunan tarif secara signifikan ini menjadi salah satu faktor utama yang menyebabkan penurunan pendapatan PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan.
- 4) Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan : belum maksimal potensi WR Pelayanan Persampahan/ Kebersihan, Perubahan tarif retribusi berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak dan Retribusi Daerah seharusnya tanggal 1 Januari 2024 sudah diterapkan namun pelaksanaan penarikan retribusi sampah sesuai Peraturan Daerah tersebut baru mulai dilaksanakan bulan April 2024 secara bertahap, terdapat beberapa wajib retribusi yang membayar bukan berdasarkan jumlah volume sampah yang diambil tetapi sesuai dengan penggolongan kategori usaha.
- 5) Retribusi Pelayanan Pasar : masih banyak lapak los yang kosong, tetapi masuk dalam hitungan potensi, sehingga retribusi los dan kios tidak memenuhi target dan ada beberapa pedagang kios dan los yang menolak untuk membayar, padahal berjualan terus, sehingga tidak memenuhi target.
- 6) Retribusi Pelayanan TPI : Diakhir tahun 2024 (November dan Desember) banyak kapal yang tidak berlayar khususnya kapal arek rembang, arek obor dan kapal bertonase dibawah 30 GT disebabkan adanya himbauan/larangan berlayar oleh BMKG, karena ketinggian ombak diatas 2,5 meter dilaut jawa dan perbatasan diantaranya.
- 7) Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga : Euforia masyarakat yang semakin menurun pada beberapa obyek wisata, kondisi obyek yang panas dikarenakan pohon peneduh, telah ditanam tapi gagal tumbuh akibat terkena air laut ataupun lambat pertumbuhannya dan beberapa fasilitas yang rusak belum diperbaiki.
- 8) Retribusi Rumah Potong Hewan : keniakan harga sapi, tidak ada regenerasi atas meninggalnya jagal yang setiap hari melakukan pemotongan, adanya peredaran daging beku, daya beli daging masyarakat menurun dan adanya bantuan langsung dari pemerintah berupa daging.

- 9) Realisasi atas penerimaan jasa giro sesuai dengan penempatan giro kas daerah, sehingga target tidak dapat diperhitungkan secara tepat;
- 10) Rekening pendapatan Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah berasal dari bunga deposito. Realisasinya tergantung atas jumlah dan jangka waktu penempatan deposito di bank pengelola RKUD yang tidak dapat diprediksi sesuai dengan kondisi likuiditas kas daerah;
- 11) Realisasi atas TGR BPOTKI belum ada tambahan realisasi. Selama tahun 2024 telah disampaikan surat penagihan atas piutang TGR BOPTKI tersebut;
- 12) Penurunan pendapatan denda PBB di Kota Pekalongan pada tahun 2024 disebabkan oleh kebijakan pemerintah kota yang memberikan relaksasi berupa penghapusan denda PBB selama beberapa bulan, yaitu Februari, April, Agustus, dan September. Kebijakan ini memberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk melunasi tunggakan PBB tanpa dikenakan denda, sehingga berdampak pada penurunan penerimaan denda.

Gambaran tentang Pendapatan Daerah yang disajikan selama lima tahun terakhir menginformasikan mengenai rata-rata pertumbuhan realisasi Pendapatan Daerah sebagaimana disajikan dalam tabel berikut.

Tabel II-80
Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Kota Pekalongan
Tahun 2020-2024

URAIAN	REALISASI (Rp.Jutaan)					Rata-rata Pertumb (persen)
	2020	2021	2022	2023	2024	
PENDAPATAN	953.155,39	966.372,56	989.013,07	1.028.430,78	1.016.321,69	1,63
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	229.867,94	252.037,00	263.475,95	263.355,74	271.121,33	4,27
Pendapatan Pajak Daerah	76.255,22	87.382,43	101.303,22	115.437,06	111.866,94	10,35
Hasil Retribusi Daerah	14.870,12	14.748,21	19.088,52	16.704,86	146.661,80	198,52
Hasil Pengel.Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	5.821,08	5.805,51	6.434,31	7.117,20	7.197,60	5,58
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	132.921,51	144.100,85	136.649,89	124.096,61	5.394,99	-25,40
PENDAPATAN TRANSFER	700.838,01	686.765,22	725.537,13	763.287,05	739.160,25	1,62
Transfer Pemerintah Pusat	625.666,10	607.835,27	618.566,27	667.941,86	644.045,00	1,06
Bagi Hasil Pajak	27.182,87	32.286,14	30.825,73	31.492,86	29.999,41	2,92
Bagi Hasil Sumber Daya Alam	1.780,90	2.091,31	3.054,97	1.950,24	1.401,60	-0,20
Dana Alokasi Umum	433.354,91	426.399,74	424.427,25	451.200,06	476.430,59	2,46
Dana Alokasi Khusus	104.991,52	125.528,55	155.562,05	162.020,13	136.213,41	7,93
Dana Insentif Daerah	-	21.529,53	4.696,26	21.278,58	-	35,05
Dana Penyesuaian	58.355,91	-	-	-	-	7,35
Transfer Pemerintah Daerah	75.171,91	78.929,95	106.970,86	95.345,18	95.115,25	4,67
Dana Bagi hasil Pajak dari Propinsi	63.377,91	76.876,98	72.380,35	72.883,76	74.727,56	364,50
Bantuan Keuangan Provinsi	11.794,00	1.952,97	34.590,51	22.461,42	20.387,69	-44,30
Bantuan Keuangan Umum Dari Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	-	100,00	-	-	-	-71,97
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	22.449,45	27.570,33	-	1.788,00	-	-25,00
Pendapatan Hibah	22.449,45	2.718,27	-	1.788,00	-	1,63
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan PerUndang-undangan	-	24.852,06	-	-	-	4,27

Sumber: BPKAD Kota Pekalongan, 2025

2. Belanja Daerah

Tren pertumbuhan realisasi belanja daerah selama 5 (lima) tahun dari tahun 2020-2024 tumbuh 1,81 persen. Dalam kurun waktu tersebut belanja operasi tumbuh 4,04 persen dan belanja modal tumbuh 1,41 persen. Beberapa hal yang dapat dilihat dari dinamika belanja selama 5 (lima) tahun kurang lebih dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Belanja pegawai mempunyai kecenderungan naik 0,66 persen. Walau secara rata-rata mengalami kenaikan tetapi dari tahun 2021 ke tahun 2022 mengalami penurunan karena reklasifikasi belanja pegawai ke belanja barang dan jasa pada BLUD sebagai tindak lanjut rekomendasi BPK. Kenaikan terjadi kembali di tahun 2023 dan 2024 sebagai akibat pengadaan pegawai.
2. Belanja barang dan jasa mempunyai rata-rata pertumbuhan 8 persen, belanja barang jasa meliputi belanja barang, belanja jasa, belanja pemeliharaan, belanja perjalanan dinas, dan Belanja Uang dan/atau Jasa untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat.
3. Belanja hibah dan bantuan sosial masing-masing mempunyai rata-rata pertumbuhan 4,09 persen dan 49,01 persen. Angka ini masih sedikit berbeda dengan ketentuan pengelolaan keuangan daerah yang mengamanatkan agar daerah mengutamakan belanja wajib terlebih dahulu sebelum mengalokasikan belanja hibah dan bantuan sosial.
4. Belanja modal tanah pada umumnya berada pada kisaran 3-4 Milyar. Kenaikan pada tahun 2020 dan 2021 secara signifikan sangat dipengaruhi oleh kebijakan belanja lahan untuk keperluan pendukung program pengendalian banjir rob sistem Loji Banger.
5. Belanja modal lainnya menunjukkan gejala yang fluktuatif sebagai akibat karena dinamika kebutuhan di lapangan.
6. Belanja tak terduga mengalami kenaikan signifikan pada tahun 2020 sebagai dampak *Covid-19* dimana pemerintah pusat dan daerah didorong untuk mengalokasikan anggarannya dalam penanganan *Covid-19* tersebut.

Realisasi belanja daerah selama 5 (lima) tahun terakhir dari tahun 2020-2024 disajikan dalam tabel berikut.

Tabel II-81
Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Belanja Daerah Kota Pekalongan
Tahun 2020-2024

URAIAN	REALISASI (Rp. Juta)					Rata-rata Pertumb (persen)
	2020	2021	2022	2023	2024	
BELANJA	944.840,46	962.091,79	1.031.090,19	1.031.847,57	1.012.991,72	1,81
BELANJA OPERASI	760.543,10	792.174,65	830.611,30	858.205,17	891.029,01	4,04
Belanja Pegawai	394.421,56	391.695,12	375.774,56	380.545,14	403.864,63	0,66
Belanja Barang dan Jasa	327.664,41	367.573,74	413.865,97	431.075,38	444.343,00	8,00
Belanja Bunga	-	-	-	-	-	0,00
Belanja Subsidi	-	-	-	-	-	0,00
Belanja Hibah	36.250,15	32.149,23	37.814,80	44.257,04	41.171,58	4,09
Belanja Bantuan Sosial	2.206,98	756,57	3.155,97	2.327,61	1.649,80	49,01
Belanja Bantuan Keuangan	-	-	-	-	-	
BELANJA MODAL	126.926,09	160.513,73	196.569,44	170.653,38	119.315,36	1,41

URAIAN	REALISASI (Rp. Juta)					Rata-rata Pertumb (persen)
	2020	2021	2022	2023	2024	
Belanja Modal Tanah	13.144,23	11.302,75	4.442,47	3.036,18	479,10	-47,65
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	29.046,00	37.536,79	55.027,76	38.881,46	25.882,05	3,26
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	33.911,23	48.754,92	35.349,62	54.122,62	22.491,21	2,73
Belanja Modal Jalan	50.106,24	59.561,97	99.405,99	72.047,10	68.057,61	13,18
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	644,61	3.357,30	2.343,60	2.566,03	2.357,00	97,99
Belanja Aset Lainnya	73,79	-	-	-	48,39	-34,42
BELANJA TAK TERDUGA	57.371,26	9.403,41	3.909,45	2.989,02	2.647,36	-44,25
Belanja Tak Terduga	57.371,26	9.403,41	3.909,45	2.989,02	2.647,36	-44,25

Sumber: BPKAD Kota Pekalongan, 2025

3. Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah mempunyai kecenderungan berkurang sekitar 8,55 persen. Penurunan dari komponen SiLPA menunjukkan bahwa kinerja APBD semakin baik. Kondisi pembiayaan daerah Kota Pekalongan disajikan dalam tabel berikut.

Tabel II-82
Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Pembiayaan Daerah Kota Pekalongan
Tahun 2020-2024

URAIAN	REALISASI (Rp. Juta)					Rata-rata Pertumb (persen)
	2020	2021	2022	2023	2024	
PEMBIAYAAN	104.227,37	111.045,91	105.197,66	57.355,90	63.101,43	-8,55
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	108.748,00	112.545,91	115.339,44	68.808,51	63.101,43	-10,67
Penggunaan SiLPA	95.101,71	112.542,30	115.326,67	63.120,55	53.939,12	-9,75
Pencairan Dana Cadangan	12.704,35	-	-	5.680,00	9.126,38	-9,83
Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen Lainnya	941,94	3,60	12,77	-	-	0,00
Pinjaman Dalam Negeri	-	-	-	7,96	35,93	117,15
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	4.520,63	1.500,00	10.141,78	11.452,60	-	105,56
Pembentukan Dana Cadangan	-	1.000,00	7.141,78	6.664,60	-	126,87
Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah	4.518,00	500,00	3.000,00	4.788,00	-	92,67
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri	2,63	-	-	-	-	-25,00

Sumber: BPKAD Kota Pekalongan, 2025

2.6.1.2. Neraca Daerah

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset kewajiban dan ekuitas dana pada tanggal tertentu. Unsur yang dicakup oleh neraca terdiri dari aset, kewajiban dan ekuitas dana. Neraca Kota Pekalongan pada periode tahun 2020-2024 menunjukkan perkembangan yang cukup baik. Hal tersebut terlihat pada aset lancar yang merupakan unsur dominan dalam pembentukan total aset. Rincian Neraca Pemerintah Kota Pekalongan disajikan dalam tabel berikut.

Tabel II-83
Neraca Pemerintah Kota Pekalongan Tahun 2020-2024

Uraian	Tahun (Rp. Milyar)					Rata-rata Pertumbuhan (persen)
	2020	2021	2022	2023	2024	
ASET						
Aset Lancar						
Kas	112,54	115,33	63,12	53,94	66,43	-8,50
Piutang	29,55	59,02	43,09	49,58	51,25	22,87
Piutang lainnya	9,28	-	0,05	-	-	-100,00
Persediaan	36,75	22,84	21,04	19,32	19,43	-13,11
Biaya dibayar dimuka	0,04	0,12	0,14	0,08	0,07	34,70
Jumlah aset lancar	188,16	197,31	127,43	122,92	137,19	-5,29
Investasi jangka Panjang						
Investasi non permanen	0,28	-	-	-	-	-
Investasi permanen	95,40	96,60	100,97	105,49	105,66	2,61
Jumlah investasi jangka Panjang	95,68	96,60	100,97	105,49	105,66	2,53
Aset tetap						
Tanah	1.333,44	1.457,35	1.555,45	1.562,82	1.597,33	4,68
Peralatan dan mesin	540,27	567,91	613,89	624,18	647,49	4,67
Gedung dan bangunan	805,61	851,63	883,51	946,57	998,70	5,52
Jalan, jaringan dan instalansi	883,80	939,18	1.185,09	1.263,58	1.345,28	11,39
Aset tetap lainnya	33,94	35,24	12,50	9,44	9,97	-19,26
Konstruksi dalam pengerjaan	1,17	4,25	3,54	1,97	3,32	61,23
Akumulasi penyusutan	-1.105,10	-1.192,53	-1.310,16	-1.296,87	-1.454,75	7,23
Jumlah aset tetap	2.493,13	2.663,03	2.943,83	3.111,70	3.147,34	6,05
Dana cadangan						
Dana cadangan	-	1,00	8,14	9,13	-	-
Jumlah dana cadangan	-	1,00	8,14	9,13	-	-
Aset lainnya	-	-	-	-	-	-
Tagihan piutang penjualan angsuran	-	-	-	-	-	-
Tagihan tuntutan ganti kerugian daerah	-	-	-	-	-	-
Kemitraan dengan pihak ketiga	12,33	12,33	11,08	11,08	11,08	-2,53
Aset tidak berwujud	1,03	0,92	0,84	0,81	0,54	-13,91
Aset lain-lain	131,37	77,52	78,28	82,85	82,34	-8,72
Aset rusak berat/proses penghapusan	-	-	-	-	-	-
Uang Jaminan	0,23	-	3,60	-	-	-
Jumlah aset lainnya	144,96	90,77	93,79	94,74	93,96	-8,46
JUMLAH ASET	2.921,92	3.048,71	3.274,16	3.443,98	3.484,14	4,52
KEWAJIBAN						
Kewajiban jangka pendek						
Utang perhitungan pihak ketiga	0,00	0,00	0,00	-	-	-34,85
Utang bunga	-	-	-	-	-	-
Utang pajak	-	-	-	-	-	-
Bagian lancar utang jangka Panjang	-	-	-	-	-	-
Pendapatan diterima dimuka	3,22	1,68	1,93	1,93	3,41	10,63
Utang Belanja	14,15	19,36	9,40	9,56	7,87	-7,70
Utang jangka pendek lainnya	-	-	-	-	-	-
Utang Jangka Pendek pada Kemitraan Pihak ketiga	0,07	1,27	0,30	0,33	0,47	-
Utang uang jaminan	0,23	-	-	-	-	-
Jumlah kewajiban jangka pendek	17,68	22,30	11,63	11,82	11,75	-5,17
Kewajiban jangka Panjang						
Utang dalam negeri	-	-	-	-	-	-
Utang luar negeri	-	-	-	-	-	-
Jumlah kewajiban jangka Panjang	-	-	-	-	-	-
Jumlah kewajiban	17,68	22,30	11,63	11,82	11,75	-5,17
EKUITAS DANA						
Ekuitas Dana	2.904,24	3.026,64	3.262,75	3.457,15	3.494,57	4,76
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	2.921,92	3.048,94	3.274,39	3.468,97	3.506,32	4,68

Sumber: BPKAD Kota Pekalongan, 2025

2.6.1.3. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Periode 2020-2024

Belanja Daerah digunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan. Dalam hal ini, belanja penyelenggaraan pemerintahan diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial, fasilitas umum yang layak, serta mengembangkan sistem jaminan sosial.

Analisis belanja dilakukan untuk memperoleh gambaran realisasi dari kebijakan pembelanjaan dan pengeluaran pembiayaan daerah pada periode tahun anggaran sebelumnya. Analisis ini digunakan sebagai bahan untuk menentukan kebijakan pembelanjaan dan pengeluaran pembiayaan di masa datang dalam rangka peningkatan kapasitas pendanaan pembangunan daerah. Analisis belanja yang dilakukan mencakup: Rasio Kemandirian Daerah, Proporsi Penggunaan Anggaran, Rasio Belanja Modal, dan Analisis Pembiayaan.

1. Rasio Kemandirian Daerah

Rasio Kemandirian Pemerintah Kota Pekalongan selama kurun waktu 2020 sampai dengan 2024 sebagaimana disajikan dalam tabel di bawah ini.

Tabel II-84
Rasio Kemandirian Daerah Kota Pekalongan Tahun 2020 - 2024

URAIAN	TAHUN				
	2020	2021	2022	2023	2024
Pendapatan Daerah (Rp. Juta)	953.155,39	966.372,56	989.013,07	1.028.430,78	1.016.321,69
Pendapatan Asli Daerah (Rp. Juta)	229.867,94	252.037,00	263.475,95	263.355,74	271.121,33
Rasio PAD (persen)	24,12	26,08	26,64	25,61	26,68
Pendapatan Transfer (Rp. Juta)	700.838,01	686.765,22	725.537,13	763.287,05	745.200,36
Rasio Transfer (persen)	73,53	71,07	73,36	74,22	73,32

Sumber: BPKAD Kota Pekalongan, 2025

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa rasio kemandirian Pemerintah Kota Pekalongan masih termasuk dalam kategori rendah karena angka rasio transfer masih lebih besar dibanding rasio PAD. Namun untuk pergerakan dari tahun ke tahun menunjukkan peningkatan atas rasio kemandirian Pemerintah Kota Pekalongan yang dibuktikan dengan peningkatan rasio PAD kecuali di tahun 2023 yang mengalami penurunan sedikit dimana rasio PAD tahun anggaran 2023 mencapai 25,61 persen. dibanding tahun 2022 sebesar 26,64 persen. Adapun rasio transfer menunjukkan penurunan dibuktikan dengan penurunan rasio transfer dari semula 73,53 persen pada tahun 2020 turun menjadi 73,32 persen di tahun 2024, walaupun pada tahun 2023 naik apabila dibandingkan dengan 2022 yang nilai rasionya 73,36 persen karena pada tahun 2022 Pemerintah Kota Pekalongan hanya mendapat DID sebesar Rp.4.696.260.000,- sedang pada tahun 2023 atas kinerja tahun berjalan mendapat tambahan DID yang secara total menjadi Rp.21.278.579.000,-. Hal ini menunjukkan Pemerintah Kota Pekalongan meskipun memiliki ketergantungan yang cukup besar terhadap Pusat namun pergerakan dari tahun ke tahun mengalami peningkatan dibuktikan dengan semakin bertambahnya rasio PAD dan semakin berkurangnya rasio transfer.

2. Proporsi Penggunaan Anggaran

Proporsi realisasi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur terhadap total belanja dan pengeluaran pembiayaan daerah Tahun 2020-2024 disajikan dalam Tabel II-90. Belanja pemenuhan kebutuhan aparatur diperhitungkan dari belanja gaji pegawai dan tenaga kontrak Wali Kota.

Tabel II-85
Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur
Kota Pekalongan Tahun 2020-2024

URAIAN	TAHUN				
	2020	2021	2022	2023	2024
Total Belanja Pegawai (Rp. Juta)	394.421,56	391.695,12	375.774,56	380.545,14	403.864,63
Total Pengeluaran (Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan) (Rp. Juta)	949.361,09	963.591,79	1.041.231,97	1.043.300,17	1.012.991,72
Proporsi Belanja Aparatur (persen)	41,55	40,65	36,09	36,48	39,87

Sumber: BPKAD Kota Pekalongan, 2025

Secara rupiah untuk belanja pegawai dalam lima tahun terakhir mengalami penurunan dimana pada tahun 2020 sebesar Rp. 394.421.563.850,00 dan pada tahun 2024 menjadi Rp. 403.864.630.837,00. Secara rata-rata proporsi juga mengalami penurunan dimana pada tahun 2020 proporsi belanja pegawai sebesar 41,55 persen, dan tahun 2024 menjadi 39,87 persen. Walaupun secara rata-rata mengalami penurunan tapi untuk belanja pegawai di tahun 2020 dan 2021 mengalami kenaikan baik secara rupiah maupun secara proporsi apabila dibandingkan dengan tahun 2019, hal ini karena kewajiban pembayaran gaji dan tunjangan CPNS Formasi 2018 menjadi PNS di tahun 2020 (penerimaan gaji dan tunjangan 100 persen) dan kebutuhan penganggaran tambahan penghasilannya, kebutuhan penganggaran untuk PPPK yang telah lulus seleksi pada tahun 2019 serta memperhitungkan kebutuhan penganggaran gaji dan tunjangan CPNS Formasi 2019 sebanyak 207 orang disamping kenaikan komponen lainnya termasuk kenaikan belanja insentif pajak dan retribusi yang mengikuti kenaikan capaian realisasi target pendapatan. Pada tahun 2021 juga terdapat tambahan belanja pegawai untuk alokasi gaji PPPK. Pada tahun 2024 belanja pegawai mengalami kenaikan secara signifikan karena ada kenaikan gaji sebesar 8 persen dan terdapat pengadaan formasi PPPK 150 orang. Pada rencana 5 (lima) tahun yang akan datang kondisi ini perlu dilakukan upaya agar belanja pegawai dapat memenuhi ketentuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan menuju angka 30 persen.

3. Rasio Belanja Modal

Rasio Belanja Modal Kota Pekalongan selama kurun waktu 2020 sampai dengan 2024 sebagaimana disajikan dalam tabel di bawah ini.

Tabel II-86
Rasio Belanja Modal Kota Pekalongan Tahun 2020-2024

URAIAN	TAHUN				
	2020	2021	2022	2023	2024
Belanja Modal (Rp. Juta)	126.926,09	160.513,73	196.569,44	170.653,38	119.315,36
Belanja (Rp. Juta)	944.840,46	962.091,79	1.031.090,19	1.031.847,57	1.012.991,72
Rasio Belanja Modal (persen)	13,43	16,68	19,06	16,54	11,78

Sumber: BPKAD Kota Pekalongan, 2025

Rasio belanja modal terhadap total belanja daerah Pemerintah Kota Pekalongan selama kurun waktu 2020 sampai dengan 2024 mengalami penurunan yang cukup signifikan, dari rasio belanja modal 13,43 persen di tahun 2019 turun menjadi 11,78 persen di tahun 2024.

4. Analisis Pembiayaan

Pembiayaan daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah. Penerimaan pembiayaan daerah terdiri dari: Penggunaan SiLPA Tahun Anggaran Sebelumnya (pelampauan penerimaan dana perimbangan, pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan yang sah, penerimaan kembali sisa Belanja atau akibat lainnya, sisa belanja DAK, sisa belanja dana bagi hasil, pelampauan penerimaan PAD, pelampauan penerimaan pembiayaan daerah, sisa dana pengeluaran pembiayaan daerah), penerimaan dana cadangan serta penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah. Sedangkan pengeluaran pembiayaan daerah terdiri dari: Pembentukan dana cadangan, Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah daerah serta pembayaran pokok utang.

Penerimaan pembiayaan daerah digunakan untuk menutup defisit riil yang meliputi selisih pendapatan dengan belanja dan pengeluaran daerah. Defisit riil anggaran tahun 2020-2024 disajikan dalam tabel dibawah ini.

Tabel II-87
Defisit Riil Anggaran Kota Pekalongan Tahun 2020-2024

Uraian	Realisasi Tahun (Rp. Juta)				
	2020	2021	2022	2023	2024
Pendapatan Daerah	953.155,39	966.372,56	989.013,07	1.028.430,78	1.016.321,69
Dikurangi					
Belanja Daerah	944.840,46	962.091,79	1.031.090,19	1.031.847,57	1.012.991,72
Pengeluaran Pembiayaan Daerah	4.520,63	1.500,00	10.141,78	11.452,60	0,00
Total Pengeluaran (Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan)	949.361,09	963.591,79	1.041.231,97	1.043.300,17	1.012.991,72
Surplus / Defisit	3.794,30	2.780,77	-52.218,90	-14.869,39	3.329,97

Sumber: BPKAD Kota Pekalongan, 2025

Dari data di atas terlihat bahwa pada tahun 2022 dan 2023 terdapat defisit, namun pada tahun 2020, 2021 dan 2024 terjadi surplus anggaran. Selanjutnya Defisit Riil Anggaran Pemerintah Kota Pekalongan Tahun 2022 dan 2023 tersebut ditutup dengan penerimaan pembiayaan daerah, dengan komposisi sebagaimana ditunjukkan dalam tabel berikut.

Tabel II-88
Komposisi Penutup Riil Anggaran Kota Pekalongan Tahun 2020-2024

Uraian	Proporsi Dari Total Defisit Riil (Rp. Juta)				
	2020	2021	2022	2023	2024
Penggunaan SiLPA	surplus	surplus	115.326,67	63.120,55	surplus
Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen Lainnya	surplus	surplus	12,77	7,96	surplus
Pencairan Dana Cadangan	surplus	surplus	0	5.680,00	surplus
Pinjaman Dalam Negeri	surplus	surplus	0	0	surplus

Sumber: BPKAD Kota Pekalongan, 2025

Data di atas menunjukkan realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun sebelumnya, untuk tahun 2022 mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2021. Walaupun tahun 2022 mengalami kenaikan karena penghematan belanja tetapi untuk pelampauan penerimaan PAD menurun signifikan. Sedangkan apabila dibandingkan dengan tahun 2022, pada tahun 2023 realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun sebelumnya mengalami penurunan yang bersumber dari pelampuan PAD dan sisa penghematan belanja. Namun demikian hal tersebut, bukan berarti bahwa target kinerja dari Pemerintah Kota Pekalongan tidak tercapai. Sisa penghematan belanja bisa disebabkan karena adanya sisa-sisa kontrak.

Tabel II-89
Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Kota Pekalongan Tahun 2021 - 2024

Uraian	Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024	
	Rp. (Juta)	Persen dari SiLPA	Rp. (Juta)	Persen dari SiLPA	Rp. (Juta)	Persen dari SiLPA	Rp. (Juta)	Persen dari SiLPA
Jumlah SiLPA	112.542,30		115.339,44		63.120,55		53.939,12	
Pelampuan Penerimaan PAD	15.871,36	14,10	4.124,53	3,58	4.031,96	6,39	7.855,58	14,56
Pelampuan Penerimaan Dana Perimbangan	-13.279,91	-11,80						
Pelampuan Penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	40.956,24	36,39						
Sisa Penghematan Belanja akibat lainnya	67.898,33	60,33	69.653,83	60,39	49.700,30	78,74	32.385,87	60,04
Kewajiban kepada pihak ketiga sampai akhir tahun belum terselisaikan	22.304,17	19,82	11.634,56	10,09	n/a		35,93	0,07
Kegiatan lanjutan	0	0	0		0			

Sumber: BPKAD Kota Pekalongan, 2025

2.6.2. Proyeksi Keuangan Daerah Lima Tahun Ke Depan

Pada bagian kerangka pendanaan memberikan gambaran tentang proyeksi proyeksi pendapatan dan belanja daerah, belanja wajib dan mengikat, serta penghitungan kerangka pendanaan.

2.6.2.1. Proyeksi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan

1. Proyeksi Pendapatan Daerah

Proyeksi pendapatan daerah, rata-rata pertumbuhan pendapatan Daerah tahun 2025-2030 melambat atau menurun sebesar 0,04 persen. Hal ini dikarenakan proyeksi pendapatan Daerah dari tahun 2025 ke tahun 2026 menurun sebesar 1,67 persen. Penurunan ini karena pajak daerah yang bersifat insidentil dan dana insentif daerah yang ada di dalam perhitungan Pendapatan Daerah tahun 2025, tidak dimasukkan ke dalam perhitungan proyeksi pendapatan Daerah tahun 2026-2030. Selanjutnya, pendapatan Daerah tahun 2026-2029 diproyeksikan mengalami rata-rata pertumbuhan sebesar 0,28 persen.

Pendapatan Daerah tahun 2025 diproyeksikan sebesar Rp.1.042.814.536.000 dan di akhir periode RPJM Daerah Tahun 2025-2029 diproyeksikan sebesar Rp.1.034.138.549.000. Komponen pendapatan Daerah yang diproyeksikan mengalami kenaikan yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sedangkan Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Insentif Daerah (DID) dan Pendapatan Transfer lainnya diasumsikan tetap. Sementara itu, Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah tidak dimasukkan ke dalam

proyeksi pendapatan karena belum adanya perkiraan akan diterimanya Pendapatan Hibah dan Pendapatan Lainnya. Selengkapnya proyeksi pendapatan daerah Kota Pekalongan Tahun 2026 – 2030 tersaji pada Tabel II-90.

Berkaitan dengan PAD, proyeksi kenaikan diasumsikan sebagai berikut:

- a. Perkiraan kenaikan potensi pajak dan retribusi dengan upaya intensifikasi dan ekstensifikasi yang mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah termasuk mempertimbangkan implementasi Opsen PKB dan Opsen BBNKB;
- b. Kemungkinan realisasi penagihan piutang;
- c. Perkiraan investasi di Kota Pekalongan tahun 2026-2030 berupa pembangunan beberapa hotel dan restoran baru;
- d. Mempertimbangkan realisasi pendapatan Lain-lain PAD yang Sah selama 5 tahun terakhir;
- e. Perkiraan suku bunga BI (Bank Indonesia);
- f. Potensi aset yang disewakan, estimasi perhitungan aset yang akan dilelang;
- g. Estimasi denda pajak dan retribusi yang akan diterima.

Perhitungan proyeksi PAD tahun 2026-2030 diproyeksikan mengalami pertumbuhan sebesar 0,37 persen. Walau secara rata-rata mengalami kenaikan tetapi untuk tahun 2026 dibanding 2025 mengalami penurunan, dikarenakan terdapat pajak daerah yang bersifat insidentil tidak dimasukkan ke dalam perhitungan proyeksi PAD tahun 2026-2030. Adapun proyeksi PAD tahun 2026 sebesar Rp.294.279,488.000, tahun 2027 sebesar Rp.295.600.935.000, dan terus mengalami kenaikan sampai akhir periode RPJM Daerah Tahun 2025-2029 menjadi sebesar Rp.309.445.389.000.

Komponen PAD yang diproyeksi mengalami rata-rata pertumbuhan tinggi adalah Lain-lain PAD yang Sah sebesar 5,12 persen dimana pada tahun 2026 diproyeksi sebesar Rp. 3.500.000.000,- dan diproyeksi terus mengalami kenaikan sampai tahun 2030 sebesar Rp. 4.267.000.000,-. Hal ini karena Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan diproyeksikan akan meningkat karena peningkatan jumlah BMD yang akan dihapuskan dan Pendapatan BLUD RSUD Benda juga diproyeksikan meningkat untuk Pendapatan Jasa Giro Rekening BLUD, Pendapatan Studi Banding dan pendapatan lainnya.

Sementara untuk pendapatan transfer baik transfer pusat maupun transfer provinsi diproyeksi sama seperti tahun 2025 kecuali untuk Insentif Fiskal yang tidak dipasang. Hal ini karena adanya kebijakan pusat tertuang dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBD dan APBD Tahun 2025 dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/833/SJ tanggal 23 Februari 2025 tentang Penyesuaian Pendapatan dan Efisiensi Belanja Daerah Dalam APBD 2025, yang membuat alokasi Dana Transfer ke Daerah masih penuh ketidakpastian.

Tindak lanjut atas berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2023, Pemerintah Kota Pekalongan telah mengesahkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Wali Kota dan Peraturan Wali Kota Nomor 10 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administratif Pajak Daerah yang berlaku sejak tanggal 1 Januari 2024. Konsekuensi atas terbitnya regulasi tersebut struktur APBD mengalami perubahan untuk nomenklatur Pajak Daerah dan nomenklatur Retribusi Daerah. Pada struktur APBD, Pendapatan Daerah terdiri atas Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yg Sah. Pendapatan Asli Daerah terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain PAD yang sah. Untuk

Pendapatan Transfer terdiri atas Transfer Pemerintah Pusat dan Transfer Antar Daerah. Sedangkan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah terdiri atas Hibah, Dana Darurat dan Lain-lain Pendapatan sesuai Peraturan Undang-Undang.

Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 terdapat nomenklatur Pajak Daerah baru yaitu Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT). PBJT merupakan integrasi dari 5 jenis Pajak Daerah yang berbasis pada konsumsi yaitu pajak Makanan dan/atau Minuman, Tenaga Listrik, Jasa Perhotelan, Jasa Parkir, dan Jasa Kesenian dan Hiburan. Selain perubahan nomenklatur Pajak Daerah, terdapat jenis Pajak Daerah baru yaitu Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). Opsen adalah pungutan tambahan pajak menurut persentase tertentu dari pokok pajak terutang yang dipungut bersamaan dengan pajak yang dikenakan opsen (Pajak PKB, dan BBNKB). Sedangkan untuk Retribusi Daerah, terdapat beberapa Retribusi Daerah yang sudah tidak dipungut antara lain : Retribusi Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor, Retribusi Izin Trayek, Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dan Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang.

Dengan tidak dipungutnya kembali Retribusi Daerah tersebut dan penurunan beberapa tarif Pajak Daerah dapat berpotensi menurunkan PAD sehingga diperlukan usaha intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah. Upaya peningkatan intensifikasi dan ekstensifikasi Pendapatan Daerah dilakukan melalui peningkatan pelayanan, penanganan piutang, optimalisasi Retribusi Daerah, peningkatan kinerja BUMD, optimalisasi pemanfaatan Aset, dan peningkatan dana insentif fiskal.

Dalam struktur APBD Kota Pekalongan komposisi kontribusi penerimaan PAD terhadap pembangunan Kota Pekalongan masih relatif kecil dibandingkan dengan sumber dana yang berasal dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi. Kondisi ini merupakan tantangan bagi Pemerintah Kota Pekalongan dalam usaha meningkatkan pembiayaan yang bersumber dana dari PAD.

Komponen pendapatan yang diproyeksikan berkontribusi paling besar terhadap Pendapatan Daerah secara rupiah adalah Dana Perimbangan. PAD diproyeksikan meningkat setiap tahunnya tetapi PAD masih lebih kecil apabila dibandingkan dengan Dana Perimbangan. Untuk meningkatkan PAD pada masa yang akan datang, beberapa upaya dan langkah akan ditempuh oleh pemerintah daerah Kota Pekalongan antara lain sebagai berikut:

- a. Sosialisasi secara bertahap dan berkelanjutan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dan Peraturan Wali Kota Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administratif Pajak Daerah;
- b. Evaluasi pungutan pajak dan retribusi daerah atas implementasi Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- c. Sinergitas antara Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kota Pekalongan, Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka implementasi Opsen Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
- d. Penyusunan/ Penyempurnaan Peraturan Wali Kota Pekalongan tentang tata cara pemungutan pajak dan retribusi daerah;
- e. Implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemda (ETP), dengan pembayaran non tunai untuk Pajak dan Retribusi sesuai dengan Roadmap (ETP) 2021-2025;
- f. Penyusunan buku Potensi PAD berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

- g. Pelaksanaan E-monitoring pajak daerah (tapping box dan sejenisnya);
- h. Peningkatan koordinasi sinergis dan kerjasama antar Perangkat Daerah pengelola pendapatan membentuk Tim Pelaksana Optimalisasi Penerimaan PAD;
- i. Pelaksanaan Gebyar Pajak PBB dan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (Restoran);
- j. Penggunaan ZNT BPN sebagai dasar perhitungan NJOP PBB P2;
- k. Pelaksanaan kegiatan Pemeriksaan Pajak Daerah;
- l. Melakukan pendataan, pemutakhiran data, monitoring dan evaluasi serta verifikasi lapangan terhadap subjek maupun objek pajak;
- m. Pelayanan PBB Online dan tanda tangan elektronik untuk dokumen pajak daerah;
- n. Pengembangan dan Penyempurnaan Aplikasi Pendapatan (Simpatda, Sismiop, e-BPHTB, e-SPTD) menyesuaikan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- o. Melakukan integrasi data Subjek Pajak dan Objek antara data Simpatda di BPKAD dengan aplikasi dinas terkait guna mempercepat proses pelayanan, update data, pembayaran pajak daerah lainnya;
- p. Meningkatkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam upaya meningkatkan keuntungan agar meningkatkan kontribusi Pendapatan Daerah;
- q. Optimalisasi manajemen kas daerah dengan memanfaatkan *idle cash* dalam bentuk deposito;
- r. Optimalisasi pelayanan Badan Layanan Usaha Daerah (BLUD) melalui penciptaan *brand image*;
- s. Peningkatan kualitas manajemen aset daerah melalui inventarisasi, sertifikasi dan optimalisasi serta pemberdayaan aset daerah;
- t. Menyusun arah kebijakan, program dan kegiatan yang orientasinya untuk memenuhi target kinerja peringkat DID;
- u. Menyusun Rencana Aksi untuk peningkatan prestasi dan kinerja perangkat daerah dalam rangka peningkatan Dana Insentif;
- v. Peningkatan kordinasi/kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka optimalisasi penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak;
- w. Peningkatan kerjasama dengan berbagai pihak untuk mendukung penyelenggaraan pembangunan melalui berbagai sumber pendanaan dari berbagai pihak diluar pemerintah yang bersifat tidak mengikat.

Tabel II-90
Proyeksi Pendapatan Daerah Kota Pekalongan Tahun 2026 s.d 2030

URAIAN	Pertumb 2020 – 2024 (persen)	Baseline (Rp. juta)		Proyeksi (Rp. juta)					Rata-Rata Pertumb 2026 - 2030
		2024 (R)	2025 (T)	2026	2027	2028	2029	2030	
PENDAPATAN	1,63	1.016.321,69	1.042.814,54	1.025.375,33	1.026.696,77	1.030.455,38	1.034.138,55	1.040.541,23	0,37
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4,27	271.121,33	304.502,20	294.279,49	295.600,94	299.359,54	303.042,71	309.445,39	1,27
Pendapatan Pajak Daerah	10,35	111.866,94	148.200,00	136.379,00	137.267,00	138.423,00	139.374,00	140.024,00	0,66
Hasil Retribusi Daerah	198,52	146.661,80	145.287,82	148.313,59	148.337,59	150.685,05	153.020,42	158.244,16	1,64
Hasil Pengel.Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	5,58	7.197,60	7.226,93	6.086,89	6.381,34	6.496,49	6.778,30	6.910,23	3,23
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	-25,40	5.394,99	3.787,45	3.500,00	3.615,00	3.755,00	3.870,00	4.267,00	5,12
PENDAPATAN TRANSFER	1,62	745.200,36	738.312,34	731.095,84	731.095,84	731.095,84	731.095,84	731.095,84	0,00
Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	1,06	650.085,11	687.345,47	680.128,97	680.128,97	680.128,97	680.128,97	680.128,97	0,00
Bagi Hasil Pajak	2,92	29.999,41	42.623,77	42.623,77	42.623,77	42.623,77	42.623,77	42.623,77	0,00
Bagi Hasil Sumber Daya Alam	-0,20	1.401,60	994,81	994,81	994,81	994,81	994,81	994,81	0,00
Dana Alokasi Umum	2,46	476.430,59	488.347,07	488.347,07	488.347,07	488.347,07	488.347,07	488.347,07	0,00
Dana Alokasi Khusus	7,93	136.213,41	148.163,33	148.163,33	148.163,33	148.163,33	148.163,33	148.163,33	0,00
Dana Insentif Daerah	35,05	6.040,11	7.216,50	-	-	-	-	-	-
Transfer Pemerintah Provinsi	7,35	95.115,25	50.966,87	50.966,87	50.966,87	50.966,87	50.966,87	50.966,87	0,00
Dana Bagi hasil Pajak dari Propinsi	4,67	74.727,56	50.966,87	50.966,87	50.966,87	50.966,87	50.966,87	50.966,87	0,00
Bantuan Keuangan Provinsi	364,50	20.387,69	-	-	-	-	-	-	-
LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH	-44,30	-	-	-	-	-	-	-	
Pendapatan Hibah	-71,97		-	-	-	-	-	-	-
Pendapatan Lainnya	-25,00		-	-	-	-	-	-	-

Sumber: BPKAD Kota Pekalongan, 2025

2. Proyeksi Belanja Daerah

Proyeksi Belanja Daerah untuk tahun 2026-2030 diproyeksikan mengalami kenaikan setiap tahunnya dan rata-rata pertumbuhannya sebesar 0,35 persen, untuk tahun 2026 sebesar Rp. 1.061.776.151.000,- dan di akhir periode pada tahun 2030 diproyeksikan menjadi Rp. 1.076.735.515.000,-. Proyeksi belanja daerah Kota Pekalongan dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Belanja Operasi diproyeksikan naik setiap tahun dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 1,67 persen dengan rincian:
 - a. Rata-rata pertumbuhan belanja pegawai sebesar 3,62 persen per tahun, dengan asumsi bahwa adanya peningkatan jumlah pegawai atau ASN dan kenaikan gaji ASN (PNS dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja).
 - b. Belanja barang dan jasa diasumsikan naik rata-rata sebesar 0,12 persen per tahun. Kenaikan tersebut yang diprediksikan akan digunakan untuk menyikapi kenaikan tarif listrik dan kebijakan pemerintah dibidang kesehatan, jaminan perlindungan sosial serta inflasi. Namun demikian kenaikan Belanja Barang dan Jasa tidak linier setiap tahun karena terjadi kenaikan yang cukup tinggi pada tahun 2028 dan 2029 yaitu untuk mendukung pelaksanaan Pilkada Tahun 2029. Sehingga perlu pencermatan dalam penganggaran di setiap tahun anggaran.
 - c. Proyeksi belanja hibah tahun 2025 sampai 2027 dialokasikan turun rata-rata sebesar (-0,91) persen pertahun, namun untuk tahun 2028 dan 2029 mengalami kenaikan dikarenakan adanya hibah untuk pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2029.
 - d. Proyeksi belanja bantuan sosial mulai tahun 2026 sampai 2030 diasumsikan tetap per tahunnya sama dengan belanja bantuan sosial tahun 2025, yaitu sebesar Rp. 1.464.650.000,-.
- 2) Belanja modal diasumsikan turun dengan rata-rata sebesar (-9,93) persen per tahun.
- 3) Belanja Tak Terduga diasumsikan tetap yaitu sebesar Rp. 2.484.000.000,-/tahun.
- 4) Belanja daerah diprioritaskan pada pemenuhan belanja wajib dan mengikat, pemenuhan SPM serta belanja dalam rangka perwujudan Visi Misi Wali Kota – Wakil Wali Kota terpilih.

Tabel II-91
Proyeksi Belanja Daerah Kota Pekalongan
Tahun 2026 s.d 2030

Uraian	Pertumb 2020-2024 (persen)	Kondisi Awal (Rp. juta)		Proyeksi (Rp. juta)					Rata-rata Pertumb (persen)
		2024 (R)	2025 (T)	2026	2027	2028	2029	2030	
BELANJA	1,81	1.012.991,73	1.056.151,64	1.061.776,15	1.061.669,09	1.073.856,82	1.081.723,18	1.076.735,52	0,35
BELANJA OPERASI	4,04	891.029,01	946.608,22	918.993,31	932.564,65	956.660,45	976.207,09	981.908,37	1,67
Belanja Pegawai	0,66	403.864,63	438.089,47	418.252,00	433.254,23	448.900,11	465.219,79	482.244,91	3,62
Belanja Barang dan Jasa	8	444.343,00	473.119,25	456.856,29	456.273,81	458.555,18	458.596,94	459.071,61	0,12
Belanja Hibah	4,09	41.171,58	33.800,61	42.420,37	41.571,96	47.740,52	50.925,71	39.127,20	-0,91
Belanja Bantuan Sosial	49,01	1.649,80	1.598,90	1.464,65	1.464,65	1.464,65	1.464,65	1.464,65	0,00
BELANJA MODAL	1,41	119.315,36	107.059,42	140.298,85	126.620,44	114.712,37	103.032,09	92.343,14	-9,93
BELANJA TAK TERDUGA	-44,25	2.647,36	2.484,00	2.484,00	2.484,00	2.484,00	2.484,00	2.484,00	0,00

Sumber: BPKAD Kota Pekalongan, Bapperida Kota Pekalongan, 2025 (diolah)

3. Proyeksi Pembiayaan Daerah

Pembiayaan Daerah untuk tahun 2026-2030 diproyeksikan naik dengan rata-rata sebesar 1,47 persen pertahun. Berkaitan dengan peningkatan kinerja pemerintahan, penerimaan pembiayaan yang berasal dari Silpa tahun 2026 sampai 2030 ditargetkan turun sebesar (-2,40) persen pertahun. Penerimaan pembiayaan 2028 dan 2029 diproyeksikan naik yang berasal dari Pencairan Dana Cadangan untuk pelaksanaan Pilkada serentak Tahun 2029. Sejalan dengan kebutuhan penyelenggaraan Pilkada serentak pada tahun 2029 yang diprediksikan mengalami kenaikan maka pembentukan dana cadangan pada pengeluaran pembiayaan perlu dialokasikan dari tahun 2025 sampai dengan tahun 2028 sebagaimana amanat Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2029. Selengkapnya proyeksi pembiayaan daerah Kota Pekalongan Tahun 2025-2029 ditunjukkan dalam tabel berikut.

Tabel II-92
Proyeksi Pembiayaan Daerah Kota Pekalongan Tahun 2026 s.d 2030

URAIAN	Pertumb 2020-2024 (persen)	Kondisi Awal (Rp. juta)		PROYEKSI (Rp. juta)					Rata-rata Pertumb (persen)
		2024 (R)	2025 (T)	2026	2027	2028	2029	2030	
PEMBIAYAAN	-8,55	63.101,43	59.981,39	36.400,82	34.972,32	43.401,44	47.584,63	36.194,29	1,47
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	-10,67	63.101,43	66.431,39	42.850,82	42.422,32	50.851,44	50.034,63	38.644,29	-1,38
Penggunaan SiLPA	-9,75	53.939,12	66.431,39	42.850,82	42.422,32	43.851,44	39.034,63	38.644,29	-2,40
Pencairan Dana Cadangan		9.126,38	0,00	0,00	0,00	7.000,00	11.000,00	0,00	0
Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen Lainnya	117,15	35,93	0	0	0	0	0	0	0
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	105,56	0,00	6.450,00	6.450,00	7.450,00	7.450,00	2.450,00	2.450,00	-12,90
Pembentukan Dana Cadangan		0,00	4.000,00	4.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	
Penyertaan Modal/ Investasi Pemerintah Daerah	92,67	0,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0

Sumber: BPKAD Kota Pekalongan, Bapperida Kota Pekalongan, 2025 (diolah)

2.6.2.2. Analisis Pengeluaran Periodik Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama

Pengeluaran periodik wajib dan mengikat serta prioritas utama merupakan kebutuhan pendanaan belanja dan pengeluaran pembiayaan yang tidak dapat dihindari atau harus dibayar setiap tahun oleh Pemerintah Kota Pekalongan. Pengeluaran tersebut merupakan komponen belanja operasi, belanja tidak terduga dan pengeluaran pembiayaan yang dapat diuraikan sebagai berikut:

1) Belanja Operasi

Pada pos belanja operasi, pengeluaran periodik wajib dan mengikat meliputi:

- Belanja Pegawai, terdiri dari belanja gaji dan tunjangan ASN dan gaji tenaga kontrak dengan SK Wali Kota.
- Belanja Barang dan Jasa, terdiri dari belanja telepon, belanja air, belanja listrik, belanja internet, Belanja Bahan Bakar dan belanja premi BPJS Kesehatan bagi warga tidak mampu dan BPJS tenaga kontrak SK Wali Kota.
- Belanja Hibah, terdiri dari hibah Pilkada dan Hibah partai Politik.

2) Belanja Tidak Terduga

Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.

3) Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat meliputi penyertaan modal BUMD dan pembentukan dana cadangan sesuai ketentuan yang berlaku.

Analisis pengeluaran periodik wajib dan mengikat serta prioritas utama Kota Pekalongan Tahun 2020-2024 ditunjukkan Tabel II-92. Dari data tersebut, berdasarkan realisasi lima tahun terakhir, dapat diproyeksikan belanja periodik dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat serta prioritas utama Kota Pekalongan 2026-2030 seperti yang ditunjukkan dalam tabel II-93.

Tabel II-93
Analisis Belanja Periodik Dan Pengeluaran Pembiayaan Yang Wajib Dan Mengikat Serta Prioritas Utama Kota Pekalongan Tahun 2020-2024

No.	Uraian	Realisasi (Rp. Juta)					Rata-rata Pertumb (persen)
		2020	2021	2022	2023	2024	
A	Belanja Operasi	445.015,28	451.067,28	433.626,67	442.849,78	500.076,14	3,14
1	Belanja Pegawai	394.421,56	391.695,12	375.774,56	380.545,14	436.968,61	2,84
2	Belanja Barang dan Jasa	50.593,72	59.372,16	57.852,11	62.304,64	63.107,53	5,93
3	Hibah	753,20	753,20	753,20	6.433,20	9.673,20	201,12
B	Belanja Tidak Terduga	57.371,26	9.403,41	3.909,45	2.989,02	2.647,36	-44,25
4	Belanja Tidak Terduga	57.371,26	9.403,41	3.909,45	2.989,02	2.647,36	-44,25
C	Pengeluaran Pembiayaan	4.518,00	1.500,00	10.141,78	11.452,60	0	105,56
5	Penyertaan Modal Daerah	4.518,00	500,00	3.000,00	4.788,00	0	92,67
6	Pembentukan Dana Cadangan	-	1.000,00	7.141,78	6.664,60	0	169,17
Jumlah		446.345,65	506.904,54	461.970,69	447.677,90	502.723,50	0,03

Sumber: BPKAD Kota Pekalongan, Bapperida Kota Pekalongan, 2025 (diolah)

Tabel II-94
Proyeksi Belanja Periodik Dan Pengeluaran Pembiayaan Yang Wajib Dan Mengikat
Serta Prioritas Utama Kota Pekalongan 2026-2030

No.	Uraian	Rata-rata pertumb 2020- 2024 (persen)	Kondisi Awal (Rp. Juta)		PROYEKSI (Rp. Juta)					Rata-rata Pertumb (persen)
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
A	Belanja Operasi	3,14	500.076	547.149	531.580	549.988	576.312	600.598	610.891	3,54
1	Belanja Pegawai	2,84	436.967	436.969	418.252	433.254	448.900	465.220	482.245	3,62
2	Belanja Barang dan Jasa	5,93	63.107	66.894	70.908	75.162	79.672	84.452	89.519	6,00
3	Hibah	201,12	9.673	43.286	42.420	41.572	47.741	50.926	39.127	- 0,91
B	Belanja Tidak Terduga	-44,25	2.647	2.484	2.484	2.484	2.484	2.484	2.484	0,00
4	Belanja Tidak Terduga	-44,25	2.647	2.484	2.484	2.484	2.484	2.484	2.484	0,00
C	Pengeluaran Pembiayaan	105,56	-	6.450	6.450	7.450	7.450	2.450	2.450	- 12,90
5	Penyertaan Modal Daerah	92,67	-	2.450	2.450	2.450	2.450	2.450	2.450	-
6	Pembentukan Dana Cadangan	169,17	-	4.000	4.000	5.000	5.000	-	-	-
Jumlah			502.723	556.083	540.514	559.922	586.246	605.532	615.825	3,32

Sumber: BPKAD Kota Pekalongan, Bapperida Kota Pekalongan, 2025 (diolah)

2.6.2.3. Penghitungan Kerangka Pendanaan

Dari uraian-ruaian pada bab sebelumnya, maka kapasitas riil keuangan daerah untuk mendanai program kegiatan selama 5 (lima) tahun ke depan (2026-2030) disajikan dalam Tabel II-94 berikut.

Tabel II-95
Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Untuk Mendanai Pembangunan Daerah
Kota Pekalongan Tahun 2026-2030

Uraian	Kondisi Awal (Rp. Juta)		Proyeksi (Rp. Juta)				
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1. Pendapatan	1.016.322	1.042.817	1.025.375	1.026.697	1.030.455	1.034.139	1.040.541
2. Pencairan Dana Cadangan	9.126	-	-	-	7.000	11.000	-
3. Sisa Lebih Riil Penggunaan Anggaran	53.939	15.000	53.400	52.866	52.337	51.814	51.296
4. Penerimaan kembali investasi pemerintah daerah	36	-	-	-	-	-	-
TOTAL PENERIMAAN	1.079.423	1.057.817	1.078.775	1.079.563	1.089.792	1.096.952	1.091.837
DIKURANGI							
5. Belanja Wajib Mengikat	556.083	556.083	540.514	559.922	586.246	605.532	615.825
Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan	523.340	501.734	538.261	519.641	503.546	491.420	476.012

Sumber: BPKAD Kota Pekalongan, Bapperida Kota Pekalongan, 2025 (diolah)

Kerangka pendanaan yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan tersaji pada tabel berikut:

Tabel II-96
Kerangka Pendanaan yang Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Tahun 2025-2030

Uraian	Pertumb 2020-2024 (persen)	Kondisi Awal (Rp. juta)		Proyeksi (Rp. juta)					Rata-rata Pertumb (persen)
		2024 (R)	2025 (T)	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
PENDAPATAN	1,63	1.016.321,69	1.030.825,53	1.038.835,58	1.039.472,66	1.043.121,27	1.047.104,43	1.051.407,11	0,30
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4,27	271.121,33	298.449,59	305.000,00	306.330,94	309.979,54	313.962,71	318.265,39	1,07
Pendapatan Pajak Daerah	10,35	111.866,94	140.250,26	146.874,75	146.997,00	148.043,00	149.294,00	150.344,00	0,59
Hasil Retribusi Daerah	198,52	146.661,80	141.820,51	145.631,32	148.337,59	150.685,05	153.020,42	155.744,16	1,69
Hasil Pengel.Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	5,58	7.197,60	7.400,30	7.226,93	7.381,34	7.496,49	7.778,30	7.910,23	2,29
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	-25,40	5.394,99	8.978,53	5.267,00	3.615,00	3.755,00	3.870,00	4.267,00	-3,54
PENDAPATAN TRANSFER	1,62	745.200,36	731.561,56	733.835,58	733.141,72	733.141,72	733.141,72	733.141,72	-0,02
Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	1,06	650.085,11	676.922,69	681.822,83	681.128,97	681.128,97	681.128,97	681.128,97	-0,03
Bagi Hasil Pajak	2,92	29.999,41	42.623,77	42.623,77	42.623,77	42.623,77	42.623,77	42.623,77	0,00
Bagi Hasil Sumber Daya Alam	-0,20	1.401,60	994,81	994,81	994,81	994,81	994,81	994,81	0,00
Dana Alokasi Umum	2,46	476.430,59	485.041,03	485.041,03	488.347,07	488.347,07	488.347,07	488.347,07	0,17
Dana Alokasi Khusus	7,93	136.213,41	141.046,59	148.163,23	148.163,33	148.163,33	148.163,33	148.163,33	0,00
Insentif Fiskal		6.040,11	7.216,50	5.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	-20,00
Dana Penyesuaian		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transfer Antar Daerah	7,35	95.115,25	54.638,87	52.012,76	52.012,76	52.012,76	52.012,76	52.012,76	0,00
Dana Bagi hasil Pajak dari Propinsi	4,67	74.727,56	50.966,87	52.012,76	52.012,76	52.012,76	52.012,76	52.012,76	0,00
Bantuan Keuangan Provinsi	385,86	20.387,69	3.672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bantuan Keuangan Umum Dari Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		0,00	814,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Hibah		0,00	814,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Uraian	Pertumb 2020-2024 (persen)	Kondisi Awal (Rp. juta)		Proyeksi (Rp. juta)					Rata-rata Pertumb (persen)
		2024 (R)	2025 (T)	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
BELANJA	1,81	1.012.991,72	1.090.810,37	1.075.236,41	1.074.444,98	1.086.522,71	1.094.689,07	1.087.601,40	0,29
BELANJA OPERASI	4,04	891.029,01	946.608,22	954.743,84	959.173,73	973.596,73	993.467,31	999.489,36	1,15
Belanja Pegawai	0,66	403.864,63	438.089,47	440.576,51	443.254,23	448.900,11	465.219,79	482.244,91	2,29
Belanja Barang dan Jasa	8,00	444.343,00	473.119,25	480.141,09	482.541,80	484.954,51	485.128,27	485.735,60	0,29
Belanja Hibah	4,09	41.171,58	33.800,61	32.427,34	31.778,80	38.143,22	41.520,36	29.909,95	-0,27
Belanja Bantuan Sosial	49,01	1.649,80	1.598,90	1.598,90	1.598,90	1.598,90	1.598,90	1.598,90	0,00
BELANJA MODAL	1,41	119.315,36	133.402,15	117.005,56	111.784,25	109.438,98	97.734,76	84.625,04	-7,67
BELANJA TAK TERDUGA	-44,25	2.647,36	10.800,00	3.487,00	3.487,00	3.487,00	3.487,00	3.487,00	0,00
Total (Surplus/Defisit)		3.329,97	-59.984,85	-36.400,82	-34.972,32	-43.401,44	-47.584,63	-36.194,29	
PEMBIAYAAN DAERAH									
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	-10,67	63.101,43	66.434,85	42.850,82	42.422,32	50.851,44	50.034,63	38.644,29	-1,38
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA)	-9,75	53.939,12	66.431,39	42.850,82	42.422,32	43.851,44	39.034,63	38.644,29	-2,40
Pencairan Dana Cadangan	0,00	9.126,38	0,00	0,00	0,00	7.000,00	11.000,00	0,00	0,00
Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen Lainnya	117,15	35,93	3,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	105,56	0,00	6.450,00	6.450,00	7.450,00	7.450,00	2.450,00	2.450,00	-12,90
Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah	92,67	0,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00
Pembiayaan Netto	-8,55	63.101,43	59.984,85	36.400,82	34.972,32	43.401,44	47.584,63	36.194,29	1,47
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SiLPA)		66.431,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Sumber: BPKAD Kota Pekalongan, Bapperida Kota Pekalongan, 2025 (diolah)

2.7. PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

Analisis isu strategis merupakan pemahaman permasalahan pembangunan dan isu-isu penting dalam penyusunan rencana pembangunan jangka menengah Kota Pekalongan Tahun 2025-2029. Isu strategis merupakan tantangan atau peluang yang harus diperhatikan atau diprioritaskan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi masyarakat di masa mendatang. Suatu analisis isu-isu strategis menghasilkan rumusan kebijakan yang bersifat antisipatif dan solusi atas berbagai kondisi yang tidak ideal di masa depan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka menengah. Di sisi lain, permasalahan pembangunan daerah menggambarkan kinerja daerah atau kondisi masyarakat yang belum ideal. Dengan demikian, rumusan tentang permasalahan pembangunan dan isu strategis merupakan bagian penting dalam penentuan kebijakan pembangunan jangka menengah Kota Pekalongan.

2.7.1. Permasalahan Pembangunan Daerah

2.7.1.1. Perumusan Permasalahan Untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

Masalah didefinisikan sebagai suatu pernyataan tentang keadaan yang belum sesuai dengan yang diharapkan. Masalah juga digunakan untuk menggambarkan suatu keadaan yang bersumber dari hubungan antara dua faktor atau lebih yang menghasilkan situasi yang membingungkan. Masalah biasanya dianggap sebagai suatu keadaan yang harus diselesaikan. Masalah adalah ketika kenyataan yang terjadi atau realita fakta (*das sein*), yang tidak sesuai dengan yang diharapkan (*das sollen*). Dapat disimpulkan bahwa masalah merupakan kesenjangan antara kenyataan serta harapan, juga antara realitas dan ekspektasi. Permasalahan pembangunan daerah merupakan kesenjangan antara sasaran pembangunan yang ingin dicapai di masa mendatang dengan kondisi riil saat perencanaan pembangunan dilaksanakan. Untuk meminimalisir kesenjangan tersebut dalam rangka mewujudkan visi dan misi pembangunan, maka diperlukan perumusan yang tepat terkait permasalahan daerah.

Analisis permasalahan daerah diawali dengan analisis data capaian pembangunan sampai dengan tahun 2024 dan permasalahan yang ditemukan dalam rangka pelaksanaan arah kebijakan RPJP Daerah Kota Pekalongan Tahun 2025-2045 Tahap I. Selanjutnya dilakukan analisis melalui penjangkauan aspirasi masyarakat tentang permasalahan pembangunan selama ini dan harapan capaian ke depan. Di samping itu, juga dilakukan pra *Focus Group Discussion* (FGD) serta FGD tematik yang melibatkan pemangku kepentingan (*stakeholder*) terkait. Hasil FGD dipetakan dengan pendekatan kerangka logis masalah pokok, masalah dan akar masalah serta strategi untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan.

Hasil analisis permasalahan yang merupakan penjabaran Arah Kebijakan RPJP Daerah Kota Pekalongan Tahun 2025-2045 Tahap I, ditemukan 4 (empat) masalah pokok di Kota Pekalongan, yaitu:

1. Belum optimalnya implementasi tata kelola pemerintahan digital yang akuntabel, transparan, berintegritas, tangkas dan kolaboratif.
2. Belum optimalnya upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berkarakter dan religius.
3. Belum optimalnya kemandirian ekonomi Daerah.
4. Belum optimalnya tingkat kesejahteraan masyarakat.

Dalam rangka mewujudkan layanan publik dan kesejahteraan masyarakat. Secara sistematis uraian masalah pokok, masalah dan akar masalah dapat dijelaskan sebagai berikut.

1. Belum Optimalnya Implementasi Tata Kelola Pemerintahan Digital Yang Akuntabel, Transparan, Berintegritas, Tangkas Dan Kolaboratif.

Hasil pemetaan masalah pokok belum optimalnya implementasi tata kelola pemerintahan digital yang akuntabel, transparan, berintegritas, tangkas dan kolaboratif akan diukur dengan indikator indeks reformasi birokrasi. Data tahun 2024 menunjukkan bahwa indeks reformasi birokrasi di Kota Pekalongan sudah cukup tinggi, yaitu 87.31. Namun masih ditemukan beberapa faktor yang masih bisa ditingkatkan dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan digital yang lebih akuntabel, transparan, berintegritas, tangkas dan kolaboratif.

Masalah pokok ini kemudian dijabarkan dalam 4 (empat) masalah yang dijabarkan lagi ke dalam akar masalah sebagaimana ditunjukkan dalam tabel berikut.

Tabel II-97
Keterkaitan Masalah Pokok Belum Optimalnya Implementasi Tata Kelola Pemerintahan Digital yang Akuntabel, Transparan, Berintegritas, Tangkas dan Kolaboratif, Masalah dan Akar Masalah

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Belum Optimalnya Implementasi Tata Kelola Pemerintahan Digital Yang Akuntabel, Transparan, Berintegritas, Tangkas Dan Kolaboratif	Belum optimalnya implementasi sistem akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah	Belum optimalnya konsistensi dan keselarasan dalam perencanaan pembangunan
		Belum optimalnya kualitas pelaporan kinerja perangkat daerah
		Belum optimalnya kualitas tata kelola kearsipan daerah
	Belum optimalnya pengelolaan keuangan daerah	Belum optimalnya pengendalian waktu dalam tahapan penyusunan dokumen anggaran.
		Belum optimalnya pemahaman bendaharawan atas regulasi pengelolaan keuangan daerah
		Belum optimalnya pengendalian waktu dalam tahapan penyusunan dokumen laporan keuangan daerah.
		Data potensi pendapatan belum dimutakhirkan dengan baik
		Belum optimalnya implementasi penatausahaan barang milik daerah
	Belum optimalnya penguatan integritas dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih	Belum optimalnya tindak lanjut hasil pemeriksaan pengawasan dengan tujuan tertentu
		Belum optimalnya tindak lanjut hasil pemeriksaan pengawasan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah, pengawasan akuntabilitas keuangan daerah, dan pemeriksaan BPK dan APIP
		Belum optimalnya pemenuhan kebijakan teknis pengawasan
	Belum optimalnya pelayanan publik	Belum optimalnya pemenuhan permohonan informasi publik

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
	pemerintahan baik pada tingkat Kota ataupun tingkat Perangkat Daerah	Belum optimalnya penyediaan data statistik sektoral perangkat daerah
		Belum optimalnya pengembangan pola karir, peningkatan profesionalisme, dan interoperabilitas sistem database kepegawaian
		Belum optimalnya implementasi SPBE pada domain tata kelola
		Belum optimalnya tata kelola keamanan informasi
		Belum optimalnya kualitas riset dalam mendukung arah kebijakan daerah
		Belum optimalnya kematangan inovasi dalam mendukung indeks inovasi daerah
		Belum optimalnya partisipasi OPD dalam inovasi daerah
		Belum optimalnya tingkat pendidikan ASN
		Belum optimalnya keterisian jabatan ASN
		Belum optimalnya pelaporan kinerja ASN
		Belum optimalnya pengembangan kompetensi teknis, manajerial dan fungsional ASN
		Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan
		Belum optimalnya upaya pembinaan LKK dalam pemberdayaan masyarakat
		Belum optimalnya kemudahan persyaratan, prosedur, waktu, biaya, sarpras dan kompetensi pelayan dalam pelayanan masyarakat.
		Belum optimalnya layanan administrasi kependudukan yaitul layanan pendaftaran penduduk, pencatatan sipil dan pengelolaan administrasi kependudukan
		Belum optimalnya fasilitasi dalam penyusunan peraturan perundangan tepat waktu
		Belum optimalnya kinerja pelayanan, pemberdayaan dan trantibum di tingkat kecamatan
		Belum optimalnya tertib administrasi dan penyelesaian permasalahan pertanahan
		Belum optimalnya partisipasi kader pemuda dalam pembangunan

Sumber : Bapperida Kota Pekalongan, diolah, 2025

2. Belum optimalnya Upaya Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berkarakter Dan Religius

Hasil pemetaan masalah pokok belum optimalnya upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berkarakter dan religius akan diukur dengan indikator indeks pembangunan manusia. Data tahun 2024 menunjukkan bahwa Indeks Pembangunan Manusia di Kota Pekalongan sebesar 77.21, lebih tinggi dibandingkan dengan daerah sekitar, namun lebih rendah jika dibandingkan dengan Kota setara di Jawa Tengah.

Masalah pokok ini kemudian dijabarkan dalam 3 (tiga) masalah yang dijabarkan lagi ke dalam akar masalah sebagaimana ditunjukkan dalam tabel berikut.

Tabel II-98
Keterkaitan Masalah Pokok Belum optimalnya Upaya Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berkarakter dan Religius, Masalah dan Akar Masalah

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Belum optimalnya Upaya Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berkarakter Dan Religius	Belum optimalnya penyediaan akses dan kualitas mutu pendidikan serta kesadaran bersekolah	Belum optimalnya angka partisipasi sekolah pada jenjang PAUD, SD, SMP dan pendidikan kesetaraan.
		Belum optimalnya pemenuhan SPM khususnya ketercukupan pendidik dan tenaga kependidikan
		Belum optimalnya pemanfaatan perpustakaan sebagai sarana meningkatkan tingkat literasi masyarakat
	Belum optimalnya implementasi pendidikan karakter dan pendidikan keagamaan	Belum optimalnya implementasi kurikulum mulok yang mengembangkan pendidikan karakter dan keagamaan
	Belum optimalnya upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat	Belum optimalnya penyediaan sarpras kesehatan di Puskesmas yang sesuai standar
		Belum optimalnya validitas data penerima jaminan kesehatan nasional
		Belum optimalnya upaya penanganan kasus tuberkulosis
		Belum optimalnya kompetensi tenaga kesehatan yang sesuai persyaratan
		Belum optimalnya sediaan farmasi dan alat kesehatan yang baik.
		Belum optimalnya penyediaan rumah layak huni bagi warga
		Belum optimalnya penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum perumahan
		Belum optimalnya penanganan kawasan kumuh

Sumber : Bapperida Kota Pekalongan, diolah, 2025

3. Belum Optimalnya Kemandirian Ekonomi Daerah

Hasil pemetaan masalah pokok belum optimalnya kemandirian ekonomi daerah akan diukur dengan indikator pertumbuhan ekonomi. Data tahun 2024 menunjukkan

bahwa pertumbuhan ekonomi di Kota Pekalongan sebesar 5,34 persen, sedikit melambat dibandingkan capaian tahun 2023.

Masalah pokok ini kemudian dijabarkan dalam 4 (empat) masalah yang dijabarkan lagi ke dalam akar masalah sebagaimana ditunjukkan dalam tabel berikut.

Tabel II-99
Keterkaitan Masalah Pokok Belum Optimalnya Kemandirian Ekonomi Daerah,
Masalah dan Akar Masalah

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Belum Optimalnya Kemandirian Ekonomi Daerah	Belum optimalnya upaya peningkatan nilai investasi daerah	Belum optimalnya penyediaan dan implementasi peraturan dalam penanaman modal
		Belum optimalnya promosi investasi
		Belum optimalnya pembinaan pelaku usaha dalam menyampaikan Laporan Kemajuan Penanaman Modal (LKPM).
		Belum optimalnya pengelolaan data dan informasi perizinan yang terintegrasi
		Belum optimalnya proses pengadaan barang dan jasa
		Belum optimalnya serapan anggaran pada OPD
		Masih adanya konflik di masyarakat
		Masih adanya pelanggaran Peraturan Daerah di masyarakat
		Belum optimalnya penanganan limbah cair
		Terbatasnya lahan ruang terbuka hijau
		Belum optimalnya upaya pengurangan sampah dari hulu
		Belum optimalnya perencanaan dan antisipasi risiko bencana daerah
		Belum optimalnya kualitas dan kondisi jalan kota
		Belum optimalnya penyediaan air minum, baik dari sisi kualitas maupun kuantitas
		Belum optimalnya pengelolaan dan pengembangan sanitasi domestik
		Belum optimalnya penyediaan sarana prasarana persampahan
		Belum optimalnya kualitas sarpras pengendali banjir dan drainase kota
		Belum optimalnya kondisi sarpras transportasi dan penanganan kemacetan
	Belum optimalnya laju pertumbuhan PDRB pada lapangan usaha perdagangan	Kurangnya daya saing produk unggulan daerah dalam menembus pasar global
		Belum optimalnya nilai ekspor daerah
		Belum stabilnya harga barang kebutuhan pokok

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
		Belum optimalnya peran koperasi dalam mensejahterakan anggotanya
		Terbatasnya skala usaha mikro
		Keterbatasan lahan pertanian dalam upaya ketahanan pangan daerah
		Belum optimalnya produksi perikanan tangkap dan budidaya
	Belum optimalnya laju pertumbuhan PDRB pada lapangan usaha industri pengolahan	Ketergantungan import terutama bahan baku dan bahan penolong industri batik sangat tinggi
		Belum optimalnya kontribusi sektor industri pengolahan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi
		Belum optimalnya kualitas konsumsi pangan daerah
	Belum optimalnya laju pertumbuhan PDRB pada lapangan usaha akomodasi dan makan minum	Belum optimalnya pembinaan stakeholder budaya dalam sinergi pelestarian budaya lokal
		Belum optimalnya upaya pelestarian cagar budaya
		Belum optimalnya upaya promosi pariwisata daerah
		Belum optimalnya kualitas dan kuantitas obyek wisata daerah
		Terbatasnya kapasitas SDM pariwisata dan ekonomi kreatif

Sumber : Bapperida Kota Pekalongan, diolah, 2025

4. Belum Optimalnya Tingkat Kesejahteraan Masyarakat.

Hasil pemetaan masalah pokok belum optimalnya tingkat kesejahteraan masyarakat akan diukur dengan indikator PDRB per kapita. Data tahun 2024 menunjukkan bahwa PDRB per kapita di Kota Pekalongan sebesar Rp. 45.99 juta/jiwa/tahun. Capaian ini masih jauh dari target RPJP Daerah Kota Pekalongan tahun 2025-2045, yaitu sebesar Rp. 83,71-92,33 juta/jiwa/tahun pada tahun 2029.

Masalah pokok ini kemudian dijabarkan dalam 4 (empat) masalah yang dijabarkan lagi ke dalam akar masalah sebagaimana ditunjukkan dalam tabel berikut.

Tabel II-100
Keterkaitan Masalah Pokok Belum Optimalnya Tingkat Kesejahteraan Masyarakat, Masalah dan Akar Masalah

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Belum Optimalnya Tingkat Kesejahteraan Masyarakat	Masih tingginya populasi PPKS fakir miskin	Belum optimalnya upaya rehabilitasi sosial bagi PPKS
		Belum optimalnya upaya perlindungan sosial bagi korban bencana
		Belum optimalnya upaya jaminan sosial bagi PPKS
		Belum optimalnya upaya pengendalian jumlah penduduk

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
	Belum optimalnya upaya penurunan angka pengangguran terbuka	Belum optimalnya kompetensi tenaga kerja yang akan bekerja
		Belum optimalnya upaya penempatan calon tenaga kerja kepada pemberi kerja
		Belum optimalnya upaya mendorong perusahaan untuk menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, struktur skala upah, dsb)
	Belum optimalnya pemenuhan layanan berperspektif gender termasuk pada warga masyarakat berkebutuhan khusus	Belum optimalnya upaya advokasi kepada lembaga kemasyarakatan
		Belum optimalnya pelayanan pengaduan kasus perempuan dan permasalahan keluarga
	Belum optimalnya jaminan hak dan perlindungan anak	Belum optimalnya penanganan dan pelayanan kasus anak

Sumber : Bapperida Kota Pekalongan, diolah, 2025

2.7.1.2. Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

Permasalahan pembangunan daerah juga dapat diidentifikasi berdasarkan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah, dimana permasalahan urusan merupakan akar masalah di tingkat Kota. Identifikasi permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah tersaji dalam tabel berikut.

Tabel II-101
Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah

URUSAN	PERMASALAHAN
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	
<i>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN</i>	Belum optimalnya angka partisipasi sekolah pada jenjang PAUD, SD, SMP dan pendidikan kesetaraan.
	Belum optimalnya pemenuhan SPM khususnya ketercukupan pendidik dan tenaga kependidikan
	Belum optimalnya implementasi kurikulum mulok yang mengembangkan pendidikan karakter dan keagamaan
<i>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN</i>	Belum optimalnya peyediaan sarpras kesehatan di Puskesmas yang sesuai standar
	Belum optimalnya validitas data penerima jaminan kesehatan nasional
	Belum optimalnya upaya penanganan kasus tuberkolosis
	Belum optimalnya kompetensi tenaga kesehatan yang sesuai persyaratan
	Belum optimalnya sediaan farmasi dan alat kesehatan yang baik.
<i>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG</i>	Belum optimalnya kualitas dan kondisi jalan kota
	Belum optimalnya penyediaan air minum, baik dari sisi kualitas maupun kuantitas

URUSAN	PERMASALAHAN
	Belum optimalnya pengelolaan dan pengembangan sanitasi domestik
	Belum optimalnya penyediaan sarana prasarana persampahan
	Belum optimalnya kualitas sarpras pengendali banjir dan drainase kota
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Belum optimalnya penyediaan rumah layak huni bagi warga
	Belum optimalnya penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum perumahan
	Belum optimalnya penanganan kawasan kumuh
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Masih adanya pelanggaran Peraturan Daerah di masyarakat
	Belum optimalnya perencanaan dan antisipasi risiko bencana daerah
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	Belum optimalnya upaya rehabilitasi sosial bagi PPKS
	Belum optimalnya upaya perlindungan sosial bagi korban bencana
	Belum optimalnya upaya jaminan sosial bagi PPKS
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	Belum optimalnya kompetensi tenaga kerja yang akan bekerja
	Belum optimalnya upaya penempatan calon tenaga kerja kepada pemberi kerja
	Belum optimalnya upaya mendorong perusahaan untuk menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, struktur skala upah, dsb)
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Belum optimalnya upaya advokasi kepada lembaga kemasyarakatan
	Belum optimalnya pelayanan pengaduan kasus perempuan dan permasalahan keluarga
	Belum optimalnya penanganan dan pelayanan kasus anak
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	Belum optimalnya kualitas konsumsi pangan daerah
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	Belum optimalnya tertib administrasi dan penyelesaian permasalahan pertanahan
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Belum optimalnya penanganan limbah cair
	Terbatasnya lahan ruang terbuka hijau
	Belum optimalnya upaya pengurangan sampah dari hulu
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Belum optimalnya layanan administrasi kependudukan yaitu layanan pendaftaran penduduk, pencatatan sipil dan pengelolaan administrasi kependudukan
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Belum optimalnya upaya pembinaan LKK dalam pemberdayaan masyarakat
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Belum optimalnya upaya pengendalian jumlah penduduk

URUSAN	PERMASALAHAN
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	Belum optimalnya kondisi sarpras transportasi dan penanganan kemacetan
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Belum optimalnya implementasi SPBE pada domain tata kelola Belum optimalnya pemenuhan permohonan informasi publik
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	Belum optimalnya peran koperasi dalam mensejahterakan anggotanya Terbatasnya skala usaha mikro
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	Belum optimalnya penyediaan dan implementasi peraturan dalam penanaman modal Belum optimalnya promosi investasi Belum optimalnya pembinaan pelaku usaha dalam menyampaikan Laporan Kemajuan Penanaman Modal (LKPM). Belum optimalnya pengelolaan data dan informasi perizinan yang terintegrasi
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Belum optimalnya partisipasi kader pemuda dalam pembangunan
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	Belum optimalnya penyediaan data statistik sektoral perangkat daerah
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	Belum optimalnya tata kelola keamanan informasi
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	Belum optimalnya pembinaan stakeholder budaya dalam sinergi pelestarian budaya lokal Belum optimalnya upaya pelestarian cagar budaya
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	Belum optimalnya pemanfaatan perpustakaan sebagai sarana meningkatkan tingkat literasi masyarakat
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	Belum optimalnya kualitas tata kelola kearsipan daerah
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	Kurangnya daya saing produk unggulan daerah (perikanan) dalam menembus pasar global
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	Belum optimalnya upaya promosi pariwisata daerah Belum optimalnya kualitas dan kuantitas obyek wisata daerah Terbatasnya kapasitas SDM pariwisata dan ekonomi kreatif
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	Keterbatasan lahan pertanian dalam upaya ketahanan pangan daerah
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	Belum optimalnya nilai ekspor daerah
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	Kurangnya daya saing produk unggulan daerah (batik) dalam menembus pasar global Ketergantungan import terutama bahan baku dan bahan penolong industri batik sangat tinggi
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	
SEKRETARIAT DAERAH	Belum optimalnya kualitas pelaporan kinerja perangkat daerah Belum optimalnya proses pengadaan barang dan jasa

URUSAN	PERMASALAHAN
	Belum optimalnya serapan anggaran pada OPD
SEKRETARIAT DPRD	Belum optimalnya fasilitasi dalam penyusunan peraturan perundangan tepat waktu
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	
PERENCANAAN	Belum optimalnya konsistensi dan keselarasan dalam perencanaan pembangunan
KEUANGAN	Belum optimalnya pengendalian waktu dalam tahapan penyusunan dokumen anggaran.
	Belum optimalnya pemahaman bendaharawan atas regulasi pengelolaan keuangan daerah
	Belum optimalnya pengendalian waktu dalam tahapan penyusunan dokumen laporan keuangan daerah.
	Data potensi pendapatan belum dimutakhirkan dengan baik
	Belum optimalnya implementasi penatausahaan barang milik daerah
KEPEGAWAIAN	Belum optimalnya pengembangan pola karir, peningkatan profesionalisme, dan interoperabilitas sistem database kepegawaian
	Belum optimalnya tingkat pendidikan ASN
	Belum optimalnya keterisian jabatan ASN
	Belum optimalnya pelaporan kinerja ASN
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	Belum optimalnya pengembangan kompetensi teknis, manajerial dan fungsional ASN
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	Belum optimalnya kualitas riset dalam mendukung arah kebijakan daerah
	Belum optimalnya kematangan inovasi dalam mendukung indeks inovasi daerah
	Belum optimalnya partisipasi OPD dalam inovasi daerah
UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	
INSPEKTORAT DAERAH	Belum optimalnya tindak lanjut hasil pemeriksaan pengawasan dengan tujuan tertentu
	Belum optimalnya tindak lanjut hasil pemeriksaan pengawasan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah, pengawasan akuntabilitas keuangan daerah, dan pemeriksaan BPK dan APIP
	Belum optimalnya pemenuhan kebijakan teknis pengawasan
UNSUR KEWILAYAHAN	
KECAMATAN	Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan
	Belum optimalnya kinerja pelayanan, pemberdayaan dan trantibum di tingkat kecamatan
UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Masih adanya konflik di masyarakat
Non Urusan	

URUSAN	PERMASALAHAN
<i>Non Urusan</i>	Belum optimalnya kemudahan persyaratan, prosedur, waktu, biaya, sarpras dan kompetensi pelayan dalam pelayanan masyarakat.

Sumber : Bapperida Kota Pekalongan, diolah, 2025

2.7.2. Isu Strategis Daerah

2.7.2.1. Isu Global

1. Sustainable Development Goals (SDG's)

Sidang Umum PBB pada 4 Desember 2014 telah menyetujui platform agenda pembangunan dunia Post-2015 berdasar pada hasil *Open Working Group (OWG) on Sustainable Development Goals* yang akan menjadi target dan tujuan pembangunan dunia sampai 2030. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, SDG's disetujui untuk menciptakan masyarakat dunia 2030 jauh lebih baik dari saat ini. Ketujuh belas tujuan SDG's tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Mengakhiri segala bentuk kemiskinan dimana pun;
- b. Menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan;
- c. Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia;
- d. Menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua;
- e. Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum perempuan;
- f. Menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua;
- g. Menjamin akses energi yang terjangkau, handal, berkelanjutan, dan modern untuk semua;
- h. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua;
- i. Membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi;
- j. Mengurangi kesenjangan intra dan antarnegara;
- k. Menjadikan kota dan permukiman inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan;
- l. Menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan;
- m. Mengambil tindakan cepat untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya;
- n. Melestarikan dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya kelautan dan samudera untuk pembangunan berkelanjutan;
- o. Melindungi, merestorasi, dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan, mengelola hutan secara lestari, menghentikan penggururan, memulihkan degradasi lahan, serta menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati;
- p. Memperkuat masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua, dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel dan inklusif di semua tingkatan; serta

q. Memperkuat sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan.

Target pembangunan universal yang tertuang dalam SDG's membutuhkan dukungan dari semua elemen masyarakat dunia, termasuk dari pemerintahan, Lembaga Swadaya Masyarakat, swasta, perguruan tinggi, dan masyarakat. Di setiap negara, tidak hanya negara miskin dan berkembang tetapi juga negara maju, rumusan SDG's merupakan sumber penting untuk menyelaraskan strategi dan kebijakan agar kehidupan di muka bumi menjadi lebih baik. Di Indonesia khususnya Kota Pekalongan, rumusan SDG's dan target pencapaian harus menjadi rujukan dalam penyusunan rencana pembangunan jangka panjang daerah (RPJP Daerah).

2. Pemanasan dan Perubahan Iklim Global (*Global Warming and Climate Change*)

Pemanasan global atau *global warming* adalah meningkatnya suhu rata-rata atmosfer, bumi, dan lautan. Sedangkan perubahan iklim atau *climate change* merupakan perubahan yang signifikan pada iklim, seperti suhu udara atau curah hujan, selama kurun waktu 30 tahun atau lebih. Perubahan iklim merupakan proyeksi kelanjutan dari *global warming*. Dalam satu abad terakhir suhu permukaan global telah meningkat antara 0,74 – 0,18°C. Di Indonesia sendiri, menurut data Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), suhu rata-rata udara di permukaan tanah di Indonesia, mengalami peningkatan sebesar 0,5°C. Ke depan, pemanasan global dan perubahan iklim akan semakin meningkat. Masih menurut data Bappenas, jika dibandingkan dengan periode tahun 1961 hingga 1990, rata-rata suhu di Indonesia diproyeksikan meningkat 0,8 hingga 1,0°C antara tahun 2020 hingga 2050. Bahkan jika menilik model iklim milik *Intergovernmental Panel on Climate Change* (IPCC; Panel Antar pemerintah tentang Perubahan Iklim yang dibentuk PBB), menunjukkan suhu permukaan global akan mengalami peningkatan antara 1.1 hingga 6.4 derajat selama abad ke dua puluh satu. IPCC menyimpulkan bahwa pemanasan global yang terjadi sejak pertengahan abad ke-20 hingga kini sebagian besar disebabkan oleh meningkatnya konsentrasi gas-gas rumah kaca akibat kegiatan manusia seperti pembakaran bahan bakar fosil dan penggundulan hutan.

Dampaknya akan sangat dirasakan oleh manusia dan lingkungan hidup. Diantaranya dampak-dampak tersebut adalah tidak stabilnya iklim, meningkatnya permukaan air laut, gangguan ekologis, rusaknya infrastruktur, dan lain-lain. Masing-masing dampak tersebut pun masih akan mendatangkan berbagai dampak susulan lainnya baik dalam bidang ekonomi, ekologi, kesehatan, hingga sosial dan politik. Kota Pekalongan yang berlokasi pada pesisir pantai dan dengan topografi sangat landai, memiliki risiko dan ancaman dari pemanasan dan perubahan iklim ini, terutama adalah fenomena kenaikan permukaan air laut. Fenomena kenaikan permukaan air laut tersebut telah beberapa tahun ini, sangat dirasakan dampaknya oleh wilayah Kota Pekalongan khususnya. Oleh karena itu, pemanasan dan perubahan iklim global merupakan salah satu hal yang sangat berpengaruh dalam penyusunan isu strategis pembangunan Kota Pekalongan.

3. Perkembangan Teknologi Informasi yang Sangat Cepat dengan Menembus Batas-Batas Negara

Globalisasi yang terjadi saat ini salah satunya ditandai dengan kecepatan arus informasi dan ekonomi digital yang tidak dapat dilepaskan oleh pengaruh besar teknologi. Kemampuan teknologi dalam mengintegrasikan tradisi perdagangan, dapat mengubah bentuknya menjadi lebih sempurna, universal, dan spasial temporal (mampu menembus ruang dan waktu). Bagaimana kemudian teknologi juga mampu menggerakkan arus

informasi dan gagasan tanpa batas, sehingga yang diperlukan adalah kemampuan mentransformasikan teknologi informasi menjadi sebuah aktivitas positif, baik secara ekonomi, sosial, maupun budaya yang tetap sejalan dengan nilai-nilai luhur kepribadian bangsa Indonesia. Selain itu, bagaimana mengantisipasi dimulainya era industri 4.0 (industri yang mengkombinasikan kecerdasan buatan, data raksasa, komputasi awan, serba internet dan cetak tiga dimensi) terutama pada garmen, petrokimia, otomotif, serta industri makanan dan minuman dan lainnya, yang saat ini masih menjadi komoditas industri unggulan nasional maupun Jawa Tengah serta bagaimana mengkombinasikan dengan penyerapan dan penciptaan lapangan kerja baru.

Dunia tengah bergerak maju dengan cepat menuju masyarakat yang sepenuhnya digital. Di tingkat global, jumlah data diproyeksikan akan meningkat lebih dari lima kali lipat, dari 33 zettabyte pada tahun 2018 menjadi 175 zettabyte pada tahun 2025. Dari jumlah tersebut, 49 persen diperkirakan akan disimpan di cloud publik, dan jumlah perangkat yang terhubung melalui Internet of Things (IoT) diperkirakan akan mencapai sekitar 75 miliar, yang berarti sepuluh kali lipat populasi dunia, pada tahun 2025. Namun, kesenjangan digital—baik antara negara maju maupun negara berkembang—terus melebar. Kesenjangan ini khususnya memengaruhi negara berkembang, khususnya di Afrika, Negara-negara Kurang Berkembang, dan Negara-negara Kepulauan Kecil Berkembang, yang menghambat kemampuan mereka untuk berintegrasi ke dalam ekonomi global dan memperoleh manfaat darinya. Data adalah sumber utama pengambilan keputusan dan bahan baku akuntabilitas. Saat ini, di sektor swasta, analisis big data sudah menjadi hal yang lumrah, dengan pembuatan profil konsumen, layanan yang dipersonalisasi, dan analisis prediktif yang digunakan untuk pemasaran, periklanan, dan manajemen. Teknik serupa dapat diadopsi untuk mendapatkan wawasan terkini tentang kesejahteraan masyarakat dan untuk menargetkan intervensi bantuan kepada kelompok rentan. Sumber data baru - seperti data satelit -, teknologi baru, dan pendekatan analitis baru, jika diterapkan secara bertanggung jawab, dapat memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih tangkas, efisien, dan berbasis bukti serta dapat mengukur kemajuan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) dengan lebih baik dengan cara yang inklusif dan adil maupun untuk kepentingan yang lainnya.

Kemajuan teknologi dan inovasi digital yang sangat pesat terutama kecerdasan buatan (AI) dan pembelajaran mesin, bisa dibilang menjadi inti masalah dari semua megatren. Laju perubahan teknologi yang eksponensial (tidak lagi linier) cenderung memiliki implikasi luas yang telah mengganggu hampir semua industri. Orang dapat digantikan dengan mesin, robot dan AI dapat belajar lebih cepat daripada manusia. Fakta penting lainnya saat ini adalah data telah memposisikan dirinya sebagai komponen penggerak utama revolusi industri keempat yang hampir tidak pernah terbayangkan sebelum ini.

Kota Pekalongan sebagai salah satu kota kreatif dunia, harus dapat mengantisipasi perkembangan teknologi informasi yang sangat cepat ini. Penguasaan teknologi informasi, *big data* dan kecerdasan buatan merupakan salah satu prasyarat dalam era kompetisi antarnegara maupun antarwilayah ini. Diharapkan Kota Pekalongan dapat mendapatkan nilai tambah dan peningkatan daya saing yang signifikan melalui penguasaan teknologi informasi yang berkembang sangat pesat ini. Oleh karena itu, perkembangan teknologi informasi ini menjadi hal yang harus diperhatikan dalam penyusunan isu strategis pembangunan Kota Pekalongan.

4. Ketidakpastian Perekonomian Global

Kondisi perekonomian global diproyeksikan tumbuh pada rentang 2,7 persen - 3,3 persen pada tahun 2025. Sejumlah risiko ketidakpastian masih menjadi tantangan yang

menyebabkan dinamika ekonomi global mulai dari ketidakpastian kebijakan ekonomi dan geopolitik, pelambatan ekonomi sejumlah negara, tingginya inflasi sejumlah negara, tekanan pasar keuangan global, perubahan iklim, hingga disrupsi rantai pasok. Hingga tahun 2029, perekonomian global diperkirakan masih dilanda ketidakpastian. Beberapa fakta yang berimplikasi terhadap ketidakpastian ekonomi global tersebut, meliputi: 1) Kondisi Geopolitik dan Geoekonomi, yaitu berlanjutnya konflik geopolitik antara Rusia dan Ukraina, serta Israel dengan negara-negara Timur Tengah; 2) Pelemahan Ekonomi China, tren pelemahan ekonomi China berpotensi menurunkan ekspor negara-negara lain ke China; 3) Dampak Perubahan Iklim Global, peningkatan bencana alam yang menimbulkan dampak kerugian terhadap produksi sektor pertanian dan meningkatkan biaya ekonomi yang signifikan pada sektor terdampak; dan 4) Kebijakan Proteksionisme Amerika Serikat, yaitu peningkatan tarif impor ke pasar Amerika Serikat berdampak pada penurunan volume perdagangan dunia.

2.7.2.2. Isu Nasional

Isu nasional didasarkan atas Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045. RPJP Nasional Tahun 2025-2045 mampu merepresentasikan kondisi aktual dan cita-cita Indonesia jangka panjang ke depan. Visi RPJP Nasional 2025-2045 adalah “Negara Nusantara Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan”. Visi Indonesia Emas 2045 ini dicerminkan dalam 5 sasaran yang memberikan unsur imperatif pencapaian pembangunan jangka panjang. Sasaran yang pertama, yaitu “Pendapatan per Kapita Suatu Negara Maju” dengan indikator meningkatnya GNI per Kapita menjadi USD 23.000-30.300; meningkatnya kontribusi PDB Maritim sebesar 15,0 persen; serta meningkatnya Kontribusi PDB Manufaktur sebesar 28,0 persen di tahun 2045. Selanjutnya, sasaran yang kedua yaitu “Kemiskinan Menuju 0 persen dan Ketimpangan Berkurang” diterjemahkan dengan indikator menurunnya persentase Tingkat Kemiskinan menjadi 0,5-0,8 persen; menurunnya Rasio Gini menjadi 0,290-0,320; serta meningkatnya kontribusi Kawasan Timur Indonesia (KTI) terhadap PDB menjadi 28,5 persen. Sasaran yang ketiga, “Kepemimpinan dan Pengaruh Dunia Internasional Meningkat” diukur dengan meningkatnya Global Power Indeks menjadi 15 besar. Lalu, sasaran yang keempat melihat pada “Daya Saing Sumber Daya Manusia Meningkat” dengan indikator meningkatnya dari Human Capital Indeks (HCI) menjadi 0,73. Sasaran yang terakhir berfokus pada keberlanjutan, yaitu “Intensitas Emisi GRK Menuju Net Zero Emission” dengan penurunan menjadi 93,5 persen.

Dalam rangka mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045 tersebut, ditetapkan 8 Misi yang dijabarkan dalam 17 Arah Pembangunan. Delapan misi atau delapan agenda perubahan RPJP Nasional, meliputi: Pertama, Mewujudkan transformasi sosial; Kedua, Mewujudkan transformasi sosial; Ketiga, Mewujudkan transformasi tata kelola; Keempat, Memantapkan supremasi hukum, stabilitas, dan kepemimpinan Indonesia; Kelima, Memantapkan ketahanan sosial budaya dan ekologi; Keenam, Mewujudkan pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan; Ketujuh, Mewujudkan sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan; dan Kedelapan, Mewujudkan kesinambungan pembangunan. Sedangkan 17 arah pembangunan, dirincikan di bawah ini.

Tabel II-102
Misi dan Arah Kebijakan Indonesia Emas 2045

Transformasi Indonesia		
Misi 1 Transformasi Sosial	1	Kesehatan untuk Semua
	2	Pendidikan Berkualitas yang Merata
	3	Perlindungan Sosial yang Adaptif

Misi 2 Transformasi Ekonomi	4	Iptek, Inovasi dan Produktivitas Ekonomi
	5	Penerapan Ekonomi Hijau
	6	Transformasi Digital
	7	Integrasi Ekonomi Domestik dan Digital
	8	Perkotaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi
Misi 3 Transformasi Tata Kelola	9	Regulasi Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif
Landasan Transformasi		
Misi 4 Supremasi Hukum, Stabilitas dan Kepemimpinan Indonesia	10	Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional Tangguh, dan Demokrasi Substansial
	11	Stabilitas Ekonomi Makro
	12	Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gantar Kawasan
Misi 5 Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi	13	Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju
	14	Keluarga Berkualitas, Kesenjangan Gender, dan Masyarakat Inklusif
	15	Lingkungan Hidup Berkualitas
	16	Berketahanan Energi, Air dan Kemandirian Pangan
	17	Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim
Kerangka Implementasi Transformasi		
Misi 6 Mewujudkan Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan		
Misi 7 Mewujudkan Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan		
Misi 8 Mewujudkan Kesenambungan Pembangunan		

Sumber: Bapperida Kota Pekalongan 2025, diolah

Langkah reformasi tidak akan cukup untuk pendekatan pembangunan Indonesia, melainkan perlu diperkuat dengan transformasi yang menyeluruh di berbagai bidang pembangunan. Tiga fokus utama transformasi ini meliputi “Transformasi Sosial”, “Transformasi Ekonomi”, dan “Transformasi Tata Kelola”. Ketiga transformasi ini dapat berjalan dengan baik dengan ditunjang oleh landasan stabilitas nasional yang kuat, yang meliputi “Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Kepemimpinan Indonesia”. Selain itu, landasan transformasi “Ketahanan Sosial Budaya, dan Ekologi” juga diperlukan untuk menjamin kesejahteraan masyarakat dan pembangunan yang berkelanjutan ke depan. Transformasi dalam upaya mewujudkan Indonesia Emas 2045 tersebut akan diterjemahkan ke dalam pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan, yang didukung penuh oleh pembangunan sarana prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan, serta kaidah pelaksanaan untuk kesinambungan pembangunan.

Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka telah menetapkan delapan misi utama, dikenal sebagai Asta Cita, sebagai landasan untuk mencapai visi "Bersama Menuju Indonesia Emas 2045". Asta Cita tersebut meliputi:

Tabel II-103
Asta Cita Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka Tahun 2025-2029

No	Asta Cita / Misi	Uraian Asta Cita / Misi
1	Penguatan Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM)	Misi pertama menekankan pentingnya memperkuat pemahaman dan implementasi Pancasila sebagai ideologi negara, memperkuat sistem demokrasi, serta menjunjung tinggi HAM. Langkah ini bertujuan

No	Asta Cita / Misi	Uraian Asta Cita / Misi
		menciptakan masyarakat yang adil, makmur, dan berkeadaban
2	Penguatan Pertahanan dan Keamanan Nasional	Misi kedua fokus pada peningkatan pertahanan dan keamanan nasional melalui modernisasi alat utama sistem persenjataan (alutsista) dan peningkatan kesejahteraan prajurit. Selain itu, pemerintah berupaya mencapai kemandirian dalam bidang pangan, energi, dan air untuk memastikan ketahanan nasional yang komprehensif.
3	Penciptaan Lapangan Kerja Berkualitas dan Pengembangan Kewirausahaan	Misi ketiga Pemerintah berkomitmen menciptakan lapangan kerja berkualitas dengan mendorong pertumbuhan industri kreatif dan melanjutkan pembangunan infrastruktur. Selain itu, pengembangan kewirausahaan ditingkatkan melalui pelatihan dan akses permodalan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
4	Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Kesenjangan Gender	Misi keempat menitikberatkan pada pengembangan sumber daya manusia melalui peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan akses terhadap teknologi. Pemerintah juga mendorong kesetaraan gender dengan meningkatkan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas dalam berbagai sektor pembangunan.
5	Hilirisasi dan Industrialisasi untuk Nilai Tambah Ekonomi	Pemerintah berfokus pada hilirisasi dan industrialisasi sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi. Langkah ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan meningkatkan daya saing produk Indonesia di pasar global.
6	Pembangunan dari Desa untuk Pemerataan Ekonomi	Misi keenam menekankan pembangunan yang dimulai dari desa dengan tujuan pemerataan ekonomi dan percepatan pengentasan kemiskinan. Program ini melibatkan peningkatan akses infrastruktur, pendidikan, dan layanan kesehatan di daerah pedesaan.
7	Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi serta Pemberantasan Korupsi dan Narkoba	Pemerintah berkomitmen melakukan reformasi di bidang politik, hukum, dan birokrasi untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Selain itu, upaya pemberantasan korupsi dan narkoba akan diperkuat melalui penegakan hukum yang tegas dan kolaboratif.
8	Harmoni Lingkungan, Budaya, dan Toleransi Beragama	Misi terakhir menekankan pentingnya menjaga harmoni antara lingkungan dan budaya, serta mendorong toleransi antarumat beragama. Hal ini bertujuan menciptakan masyarakat yang inklusif, toleran, dan berkelanjutan.

Sumber: RPJM Nasional, 2025

Berbagai kementerian dan lembaga telah menyusun program strategis untuk mendukung pencapaian Asta Cita. Asta Cita merupakan cetak biru bagi pemerintah Indonesia

dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. Dengan fokus pada delapan misi strategis, pemerintah berupaya menciptakan pembangunan yang inklusif, berkelanjutan, dan berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM Nasional) Tahun 2024-2029 Buku III, terdapat highlight Indikasi Intervensi untuk Kawasan Perkotaan Pekalongan-Batang dan Kawasan Pengembangan Industri Batang, meliputi Kota Pekalongan, Kabupaten Pekalongan dan Kabupaten Batang, adalah sebagai berikut:

- Pengembangan dan penataan kawasan perkotaan Pekalongan-Batang, antara lain melalui:
 - Penyusunan masterplan penataan kawasan perkotaan dan rencana tata ruang yang mengintegrasikan potensi dan masalah perkotaan secara terpadu
 - Pemenuhan layanan dasar air minum, penanganan limbah dan penyediaan ruang terbuka hijau
 - Penyediaan dan peningkatan layanan pendidikan/ pelatihan tenaga kerja yang terintegrasi dengan sektor ketenagakerjaan
- Penataan permukiman kumuh terpadu perkotaan
- Pembangunan rumah murah bersanitasi baik bagi pekerja, MBR, Gen Z, dan milenial di kawasan perkotaan Pekalongan-Batang (PHTC)
- Pengembangan layanan unggulan kesehatan ibu-anak, kanker, jantung, stroke, dan sistem rujukan berbasis kompetensi di RSUD Provinsi dan Kabupaten/Kota, khususnya pada RSUD Kraton Kabupaten Pekalongan (PHTC)
- Pembangunan TPST Regional Pekalongan-Batang
- Pengembangan SPAM Regional Pekalongan-Batang
- Peningkatan ketahanan banjir perkotaan Pekalongan dan pembangunan pengaman pantai pesisir Pekalongan-Batang
- Pengembangan koridor industri Batang (sektor industri prioritas: industri mesin dan perlengkapan, industri kendaraan bermotor listrik berbasis baterai, industri semikonduktor, hilirisasi nikel)
- Pengembangan KIT Batang, termasuk infrastruktur pendukungnya seperti jalan, sistem penyediaan air baku dan air minum, telekomunikasi, *dry port*, pelabuhan, dsb.
- Pembangunan pipa gas bumi Cirebon-Semarang
- Perencanaan dan persiapan pembangunan Kereta Api Cepat (HST) Jakarta-Surabaya
- Pengembangan kota agropolitan Pekalongan

Penguatan pendidikan dan pelatihan vokasi, serta produktivitas tenaga kerja, melalui pembangunan/ pengembangan/ peningkatan Balai Latihan Kerja sesuai kebutuhan industri daerah.

2.7.2.3. Isu Strategis Provinsi Jawa Tengah

Isu strategis daerah Jawa Tengah diidentifikasi dengan mempertimbangkan pada permasalahan, lingkungan strategis (global, nasional, maupun daerah), dan potensi yang dimiliki Provinsi Jawa Tengah yang relevan dan menjadi tantangan dalam pembangunan daerah dua puluh tahun ke depan. Isu strategis daerah Jawa Tengah dua puluh tahun ke depan sebagai berikut.

1. Perekonomian daerah yang berdaya saing dan berkelanjutan

Pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah yang belum optimal salah satunya disebabkan oleh tingkat produktivitas sektor- sektor ekonomi yang belum optimal, serta belum memperhatikan keberlanjutan sumber daya alam sebagai sumber produksi ekonomi daerah. Oleh karena itu, isu ke depan adalah bagaimana mewujudkan perekonomian daerah yang berdaya saing dan berkelanjutan dengan melakukan transformasi ekonomi

untuk memperkuat perekonomian daerah Jawa Tengah. Transformasi ekonomi dilakukan dengan mendorong sektor-sektor ekonomi yang saat ini memiliki produktivitas rendah menjadi sektor-sektor ekonomi yang memiliki produktivitas tinggi, terutama dengan menggerakkan sektor-sektor unggulan daerah antara lain sektor pertanian, industri pengolahan, perdagangan, pariwisata, dan ekonomi kreatif. Transformasi ekonomi juga dilakukan dengan meningkatkan produktivitas tenaga kerja agar mampu menghasilkan produk-produk yang memiliki nilai tambah dan bersaing di pasar global. Transformasi ekonomi tersebut dilakukan dengan menerapkan ekonomi hijau. Ekonomi hijau adalah model pembangunan ekonomi yang menunjang pembangunan berkelanjutan dengan fokus pada investasi dan akumulasi modal yang lebih hijau (*green investment*), infrastruktur hijau, dan pekerjaan yang ramah lingkungan (*green jobs*) untuk mewujudkan kesejahteraan sosial, dan kelestarian lingkungan. Transformasi ekonomi akan tercapai juga apabila didukung dengan kondisi lingkungan wilayah yang kondusif yang akan menjamin lancar dan amannya semua pihak dalam proses pembangunan ekonomi Jawa Tengah.

2. Ketahanan pangan yang berkelanjutan

Jawa Tengah yang selama ini menjadi salah satu lumbung pangan nasional memiliki peranan penting dalam mendukung ketahanan pangan nasional. Ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi semua orang dan daerah/wilayah yang tercermin dari ketersediaan, keterjangkauan, dan pemanfaatan. Ketersediaan pangan yang bersumber dari pertanian, peternakan, dan perikanan harus dapat memenuhi kebutuhan penduduk di suatu wilayah dalam jangka panjang dan lintas generasi. Ketersediaan pangan akan dapat dicapai dan dijamin keberlanjutannya jika pembangunan memperhatikan sarana prasarana pertanian, konversi lahan/alih fungsi lahan yang terkendali, peningkatan produktivitas, diversifikasi pangan, dan *up-skilling* SDM pertanian. Faktor penting lainnya adalah memastikan keterjangkauan pangan oleh masyarakat yang dicerminkan oleh distribusi yang lancar dari produsen ke konsumen antarwaktu antarwilayah, stok pangan dan harga yang selalu terjaga. Selain itu perlu upaya yang lebih konkret bahwa pangan yang tersedia dan dapat dijangkau oleh setiap penduduk memiliki manfaat bagi tubuhnya. Hal ini dapat didukung dengan pola konsumsi yang seimbang dan beraneka ragam, kecukupan gizi, keamanan dan mutu pangan serta pengembangan pengolahan pangan lokal. Selain itu diperlukan pengembangan pertanian dalam arti luas sesuai dengan karakteristik dan potensi unggulan masing-masing daerah dalam provinsi yang terintegrasi dalam pengembangan kewilayahan di Jawa Tengah.

3. Penyediaan prasarana dan sarana yang berkualitas dan ramah lingkungan

Isu strategis lainnya berkaitan dengan upaya memperkuat perekonomian daerah dan mendukung perwujudan kualitas hidup masyarakat adalah penyediaan prasarana dan sarana yang berkualitas dan ramah lingkungan. Pembangunan prasarana dan sarana menjadi salah satu prasyarat penting dalam peningkatan perekonomian daerah dalam hal kelancaran perjalanan, distribusi barang dan jasa, serta dalam upaya meningkatkan aksesibilitas dan konektivitas antarwilayah. Penyediaan prasarana dan sarana juga diperuntukkan bagi masyarakat (termasuk untuk kelompok rentan dan berkebutuhan khusus) untuk mendukung aktivitas masyarakat serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Pembangunan prasarana dan sarana tersebut tetap berprinsip pada infrastruktur yang lebih ramah lingkungan guna menjaga kelestarian lingkungan serta mengurangi risiko kerusakan lingkungan, serta berpedoman pada rencana tata ruang. Selain dari sisi penyediaan prasarana dan sarana, pertumbuhan jumlah kendaraan juga menjadi isu yang cukup penting untuk dikendalikan

4. Keberlanjutan sumber daya alam dan lingkungan hidup, serta penanggulangan bencana

Keberlanjutan sumber daya alam, lingkungan hidup, dan bencana menjadi salah satu isu strategis pembangunan Jawa Tengah dua puluh tahun ke depan. Isu ini tidak terlepas dari kondisi daya dukung dan daya tampung yang saat ini mulai terlampaui. Maka menjadi penting untuk menjaga kelestarian sumber daya alam untuk menjaga keberlanjutan pembangunan daerah Jawa Tengah. Keberlanjutan proses pembangunan dipengaruhi oleh daya dukung dan daya tampung yang dapat terwujud hanya apabila sumber daya alam dan lingkungan hidup dijaga, dipelihara, dan dilestarikan. Dengan terjaganya sumber daya alam dan lestarinya lingkungan hidup akan mengurangi potensi terjadinya bencana.

5. Kualitas hidup dan daya saing sumber daya manusia

Isu berikutnya adalah bagaimana mewujudkan kualitas hidup dan daya saing sumber daya manusia yang semakin baik dengan menjamin tercukupinya kebutuhan dasar dan kecukupan ekonomi masyarakat agar terwujud manusia Jawa Tengah yang sehat, cerdas, kreatif, unggul, berdaya saing, dan semakin sejahtera. Perwujudan kualitas hidup dan daya saing sumber daya manusia Jawa Tengah dilakukan dengan mendorong akses pendidikan untuk seluruh lapisan masyarakat, kesehatan untuk semua, jaminan perlindungan sosial, dan mencukupi kebutuhan pangan secara mandiri.

6. Kekuatan budaya sebagai karakter dan jati diri Masyarakat

Isu strategis daerah Jawa Tengah yang juga penting adalah ketahanan budaya. Membangun ketahanan budaya adalah dalam upaya mitigasi dan adaptasi dampak modernisasi dan globalisasi yang masif saat ini. Modernisasi dan globalisasi memiliki dua sisi implikasi terhadap kehidupan masyarakat. Di satu sisi, kehidupan modern dan maju perlu direspon agar tidak terjadi ketertinggalan. Di sisi lain, modernisasi dan globalisasi juga memberikan implikasi negatif pada pola pikir dan perilaku masyarakat yang kehilangan identitas dan jati dirinya, sehingga muncul karakter baru yang tidak sejalan dengan budaya asli Jawa Tengah, mengabaikan aspek moral, serta menganggap bahwa nilai spiritual menjadi tidak penting. Untuk itu ketahanan budaya menjadi hal penting untuk kemudian akan mampu mengembalikan karakter masyarakat Jawa Tengah pada identitas dan jati diri yang sesuai dengan budaya luhur Jawa. Selain itu, ketahanan budaya yang kuat akan mampu menangkal segala bentuk ancaman yang sifatnya tindak kriminal, ekstremisme, radikalisme, dan terorisme, sehingga akan tercipta lingkungan yang aman dan nyaman bagi masyarakat.

7. Tata kelola pemerintahan yang dinamis

Isu strategis yang tidak bisa diabaikan adalah isu transformasi tata kelola pemerintahan dalam rangka mendorong pemerintah sebagai penyelenggara pemerintahan untuk bekerja lebih efektif, efisien, dan akuntabel, serta mampu memberikan pelayanan publik lebih optimal. Transformasi tata kelola pemerintahan ke depan mengarah pada tata kelola pemerintahan yang dinamis dengan memperkuat pemerintahan yang semakin adaptif dengan tetap taat pada asas yang berlaku dan mekanisme ko-kreasi antaraktor dapat dioptimalkan (kolaboratif). Hal tersebut perlu didukung dengan pemanfaatan teknologi dan sumber daya aparatur yang semakin berintegritas, serta adanya proses untuk mencapai pembangunan demokrasi yang lebih substansif guna peningkatan kualitas kebijakan publik. Transformasi tata kelola pemerintahan akan menjadi kerangka pengarusutamaan transformasi di Jawa Tengah dalam pembangunan dua puluh tahun ke depan.

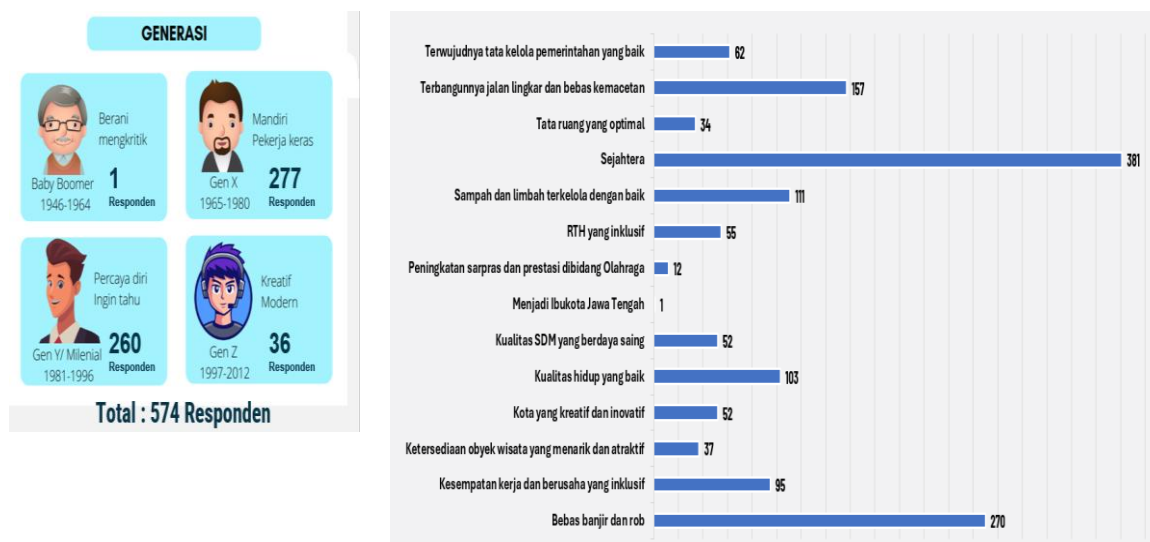
2.7.2.4. Hasil Telaahan RPJP Daerah Kota Pekalongan

RPJM Daerah Tahun 2025-2029 disusun dengan berpedoman pada RPJP Daerah. Visi RPJP Daerah merupakan rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan jangka panjang 20 (dua puluh) tahun. Visi menunjukkan gambaran masa depan yang ideal bagi masyarakat/daerah dan merupakan suatu pernyataan umum yang menjadi dasar/basis bagi semua elemen atau semua pelaku (*stakeholders*) dalam operasionalisasi perencanaan pembangunan daerah. Visi menjelaskan arah atau suatu kondisi ideal dimasa depan yang ingin dicapai (*clarity of direction*) berdasarkan kondisi dan situasi yang terjadi saat ini yang menciptakan kesenjangan (*gap*) antara kondisi saat ini dan masa depan yang ingin dicapai.

Visi RPJP Daerah

Visi mengarahkan kondisi daerah yang ingin dicapai dimasa depan (*desired future*) dalam 20 (dua puluh) tahun ke depan. Visi pembangunan jangka panjang daerah yang diterjemahkan dalam sasaran pokok dan arah kebijakan RPJP Daerah menjadi acuan bagi (calon) kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam merumuskan visinya pada periode lima tahun berkenaan dan bagaimana RPJM Daerah Tahun 2025-2029 dikembangkan

Visi RPJP Daerah Kota Pekalongan Tahun 2025-2045 dirumuskan, dibahas dan disepakati secara bersama-sama oleh seluruh pemangku kepentingan pembangunan daerah secara partisipatif. Perumusan Visi RPJP Daerah Kota Pekalongan Tahun 2025-2045 diawali dengan penjaringan harapan masyarakat Kota Pekalongan dengan hasil sebagaimana ditunjukkan dalam Gambar II-52 berikut.

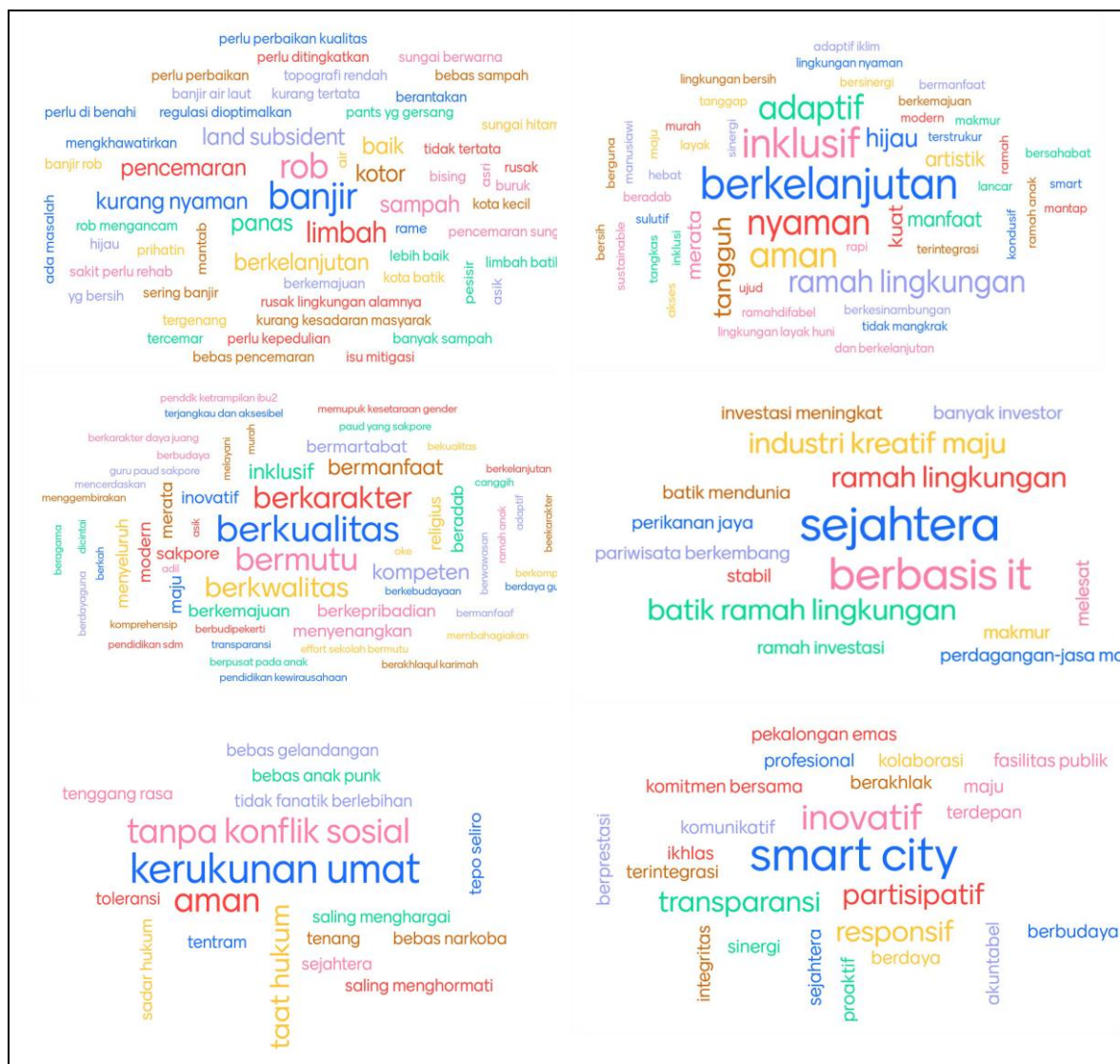


Sumber : RPJPD Kota Pekalongan Tahun 2025-2045, 2025

Gambar II-54
Hasil Penjaringan Harapan Masyarakat

Dari hasil penjaringan masyarakat tersebut, beberapa kata kunci yang mencerminkan keinginan masyarakat Kota Pekalongan pada 20 (dua puluh) tahun mendatang adalah; Sejahtera; Bebas Banjir-Rob; Terbangunnya Jalan Lingkar dan Bebas Macet; Sampah dan Limbah Terkelola dengan Baik, Kualitas Hidup yang Baik; Kesempatan Kerja Dan Berusaha Yang Inklusif; Tata Kelola Pemerintahan yang Baik; Ruang Terbuka Hijau yang inklusif; Kualitas SDM berdaya saing; serta Kota yang Kreatif dan Inovatif.

Selain penjaringan harapan masyarakat, juga dilakukan FGD Tematik. Hasil FGD tematik menghasilkan harapan masyarakat Kota Pekalongan sebagaimana ditunjukkan dalam Gambar II-53 berikut.



Sumber : RPJPD Kota Pekalongan Tahun 2025-2045, 2025

Gambar II-55
Hasil FGD Tematik

Dari hasil FGD Tematik tersebut, beberapa kata kunci yang mencerminkan keinginan masyarakat Kota Pekalongan pada 20 (dua puluh) tahun mendatang adalah; Bebas Banjir-Rob; Penanganan Limbah; Nyaman; Berkelanjutan; Berkualitas; Berkarakter; Religius; Sejahtera; Ekonomi Berbasis Teknologi Informasi; Industri Kreatif maju; Partisipatif; *Smart City*; Inovatif; Aman; Kerukunan Umat; serta Tanpa Konflik Sosial.

Dari hasil penjaringan harapan masyarakat dan FGD tematik dapat dirumuskan Visi RPJP Daerah Kota Pekalongan Tahun 2025-2045 sebagaimana ditunjukkan dalam tabel berikut.

Tabel II-104
Perumusan Visi

No	Harapan Masyarakat	Pokok Visi	Pernyataan Visi
1.	Sejahtera	Makmur	“PEKALONGAN Kota MINA BATIK yang BERKELANJUTAN” <i>Makmur, berIntegritas, Nyaman, Aman. berBudaya, Agamis, Transformatif, Inovatif, Kreatif yang Berkelanjutan</i>
2.	Transparansi	berIntegritas	
3.	Responsif		
4.	Profesional		
5.	Integritas		
6.	Sampah dan Limbah Terkelola dengan Baik	Nyaman	
7.	Nyaman		
8.	Terbangunnya Jalan Lingkar dan Bebas Macet		
9.	Aman	Aman	
10.	Kerukunan Umat		
11.	Tanpa Konflik Sosial		
12.	Berkarakter	berBudaya	
13.	Religius	Agamis	
14.	Kualitas Hidup yang Baik	Transformatif	
15.	Berkualitas		
16.	Kesempatan Kerja dan Berusaha yang Inklusif		
17.	Smart City	Inovatif	
18.	Kota yang Inovatif		
19.	Ekonomi Berbasis IT	Kreatif	
20.	Kota yang Kreatif		
21.	Industri Kreatif Maju		
22.	Bebas Banjir-Rob	Berkelanjutan	
23.	Ruang Terbuka Hijau yang inklusif		
24.	Berkelanjutan		

Sumber : RPJPD Kota Pekalongan Tahun 2025-2045, 2025

Pokok Visi

Dari hasil perumusan Visi tersebut, maka Visi RPJP Daerah Kota Pekalongan Tahun 2025-2045 adalah: **“PEKALONGAN Kota MINA BATIK yang BERKELANJUTAN”**



Sumber : RPJPD Kota Pekalongan Tahun 2025-2045, 2025

Gambar II-56
Visi Pembangunan Kota Pekalongan 2025-2045

Selanjutnya dapat dijelaskan pokok Visi RPJP Daerah Kota Pekalongan Tahun 2025-2045 sebagai berikut.

1. Makmur

Makmur menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), berarti serba kecukupan, tidak kekurangan. Makmur bisa juga diartikan sebagai keadaan yang mencukupi kebutuhan dasar dan dengan keadaan itu kita merasa puas. Sedangkan definisi kemakmuran dari Adam Smith, kemakmuran sebuah negara tidak hanya diukur dari kekayaan materialnya saja tetapi juga dari distribusi kekayaan tersebut yang memungkinkan warganya untuk menjalani kehidupan yang produktif dan memuaskan. Sementara itu, Amartya Sen mengatakan kemakmuran berkaitan erat dengan "kemampuan" (*capabilities*) individu untuk mencapai kehidupan yang mereka nilai. Ini mencakup kesehatan, pendidikan, dan peluang ekonomi. Sedangkan Joseph Stiglitz, mendefinisikan kemakmuran tidak hanya dalam hal pertumbuhan ekonomi tetapi juga kesejahteraan sosial yang luas, yang mencakup kesehatan, pendidikan, dan kesetaraan. Bagi Stiglitz, kemakmuran yang sebenarnya juga melibatkan keadilan sosial dan distribusi yang adil dari sumber daya dan peluang.

Merujuk pada definisi kemakmuran para ahli di atas, Kota Pekalongan digambarkan akan dapat mencapai kemakmuran dengan diindikasikan berupa tingginya PDRB per Kapita, rendahnya kesenjangan pendapatan (*Gini Ratio*) yang kemudian berdampak pada rendahnya kemiskinan.

2. Ber-Integritas

Integritas adalah konsisten berperilaku yang selaras dengan nilai, norma dan/atau etika organisasi, dan jujur dalam hubungan dengan manajemen, rekan kerja, bawahan langsung, dan pemangku kepentingan, menciptakan budaya etika tinggi, bertanggung jawab atas tindakan atau keputusan beserta risiko yang menyertainya (Peraturan Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2017 Tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara).

Pada tahun 2045 diharapkan kondisi para penyelenggara birokrasi pemerintahan dan pelayanan publik akan memiliki nilai-nilai kejujuran, patuh terhadap ketentuan peraturan perUndang-undangan, mampu bekerja sama, dan memiliki jiwa pengabdian yang tinggi kepada masyarakat, bangsa dan negara.

3. Nyaman

“Nyaman” mengacu pada penciptaan lingkungan perkotaan yang mengedepankan kenyamanan fisik dan psikologis bagi penduduknya. Prof. Dr. Ir. Bakti Setiawan, M.A, menyampaikan bahwa kenyamanan kota tidak hanya terkait dengan infrastruktur fisik yang memadai tetapi juga mencakup aspek keberlanjutan lingkungan dan kualitas hidup warganya. Beliau menekankan pentingnya perencanaan kota yang mengintegrasikan ruang hijau, aksesibilitas, dan keamanan untuk menciptakan kenyamanan bagi semua warga kota.

Prof. Dr. Ir. Danisworo Mukti mendefinisikan kenyamanan kota sebagai harmoni antara lingkungan binaan (*built environment*) dan lingkungan alami, yang mendukung kehidupan sosial dan ekonomi warganya. Menurutnya, kenyamanan urban tidak hanya mencakup infrastruktur fisik seperti jalan, gedung, dan fasilitas umum yang baik, tetapi juga aspek-aspek seperti kebersihan, keamanan, serta ketersediaan ruang terbuka hijau yang memadai. Prof. Danisworo juga menekankan pentingnya pengelolaan sumber daya alam dan energi yang berkelanjutan dalam menciptakan kota yang nyaman dan ramah lingkungan. Prof. Danisworo Mukti menambahkan perspektif penting tentang bagaimana perencanaan kota harus mengintegrasikan aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi untuk menciptakan kondisi yang optimal bagi kenyamanan dan keberlanjutan. Ini menunjukkan bahwa kenyamanan kota di Indonesia tidak hanya diukur dari kecanggihan infrastruktur, tetapi juga dari kualitas lingkungan hidup dan keberlanjutan penggunaan sumber dayanya.

Sementara itu menurut Undang-undang no. 26 tahun 2007 tentang penataan ruang, pengertian “nyaman” adalah keadaan masyarakat dapat mengartikulasikan nilai sosial budaya dan fungsinya dalam suasana yang tenang dan damai. Merujuk pada berbagai pengertian dan definisi di atas, makna nyaman untuk Kota Pekalongan tahun 2045 digambarkan Kota Pekalongan mampu mewujudkan suatu kondisi kota yang mampu memenuhi ketercukupan Ruang Terbuka Hijau (RTH) serta memiliki permukiman dimana rumah tangga yang ada di dalamnya memiliki akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan.

4. Aman

Aman menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), diartikan sebagai 1) bebas dari bahaya; 2) bebas dari gangguan (pencuri, hama, dan sebagainya); 3) terlindung atau tersembunyi; 4) pasti; tidak meragukan; tidak mengandung risiko; tenteram; tidak merasa takut atau khawatir. Menurut Oscar Newman, dalam karyanya tentang "*Defensible Space*", menjelaskan bahwa keamanan dapat ditingkatkan melalui desain urban yang memungkinkan penghuni untuk secara alami melindungi dan mengawasi lingkungan mereka. Desain yang efektif melibatkan pengaturan bangunan dan tata letak yang mendukung pengawasan alami dan memisahkan dengan jelas ruang publik dari ruang privat. Sementara itu, Jeffrey Ian Ross menggarisbawahi bahwa keamanan adalah kondisi di mana individu merasa terlindungi dari rasa takut dan potensi kerugian. Ross menekankan pentingnya keterlibatan komunitas, kebijakan pencegahan yang proaktif,

dan penggunaan teknologi untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman dan nyaman. Kedua pandangan ini memberikan insight penting dalam merancang strategi keamanan urban yang holistik, menggabungkan desain fisik dengan pendekatan sosial dan teknologi.

Maslow (2010) mendefinisikan rasa aman sebagai perasaan terlindungi dari ancaman atau teror dari luar dan dalam dirinya terkait dengan keamanan. Rasa aman merupakan sesuatu kebutuhan yang mendorong individu untuk memperoleh ketentraman, kepastian dan keteraturan dari keadaan lingkungan. Kebutuhan rasa aman tidak sebatas pada keamanan fisik, melainkan juga keamanan yang menyangkut psikologis yang di dalamnya berhubungan dengan jaminan keamanan, stabilitas sistem yang menghindarkan manusia dari rasa cemas, khawatir dan berbagai hal lainnya. Selain itu, Maslow (2010) berpendapat bahwa rasa aman merupakan salah satu kebutuhan yang meliputi kebutuhan untuk dilindungi dan jauh dari sumber bahaya, baik berupa ancaman fisik maupun psikologis.

Yang dimaksud dengan “aman” adalah situasi masyarakat dapat menjalankan aktivitas kehidupannya dengan terlindungi dari berbagai ancaman (UU No. 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang). Sejalan dengan definisi ini serta pengertian dari para ahli di atas, pada tahun 2045 Kota Pekalongan diharapkan dapat mewujudkan kondisi yang terbebas dari peristiwa kriminalitas dan juga konflik SARA.

5. Ber-Budaya

Budaya adalah konsep yang kompleks dan dinamis, yang telah dijelaskan oleh berbagai ahli dari berbagai sudut pandang. Menurut Edward B. Tylor, yang dianggap sebagai bapak antropologi Inggris, memberikan salah satu definisi budaya yang paling awal dalam bukunya yang berjudul "*Primitive Culture*". Menurut Tylor, budaya meliputi "semua pengetahuan, kepercayaan, seni, moral, hukum, adat, dan kemampuan lain serta kebiasaan yang diperoleh manusia sebagai anggota masyarakat." Definisi ini menekankan bahwa budaya bukan hanya sekumpulan objek atau praktik, tetapi juga mencakup pengetahuan dan nilai yang diwariskan dari generasi ke generasi.

Pendapat lain, Clifford Geertz, antropolog dari Amerika, memberikan perspektif yang lebih fokus pada simbol dan makna dalam bukunya "*The Interpretation of Cultures*". Geertz mendefinisikan budaya sebagai "sistem makna yang diwariskan yang tertanam dalam simbol, yang dijalankan oleh manusia untuk memberi bentuk dan arah pada perilaku mereka." Pendekatan Geertz menyoroti cara individu dalam masyarakat memahami dan menafsirkan dunia mereka, menjadikan budaya sebagai jaringan makna yang kaya dan kompleks.

Sementara itu Prof. Dr. Koentjaraningrat, salah satu antropolog terkemuka Indonesia mendefinisikan budaya sebagai keseluruhan gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia dalam kehidupan bermasyarakat yang dijadikan milik bersama melalui proses belajar. Pandangan ini menekankan bahwa budaya bukan hanya merupakan sekumpulan artefak atau objek material, tetapi juga meliputi nilai, norma, dan pola perilaku yang dipelajari dan diwariskan dari generasi ke generasi.

Melalui pandangan-pandangan ini, kita bisa melihat bahwa budaya adalah sesuatu yang jauh lebih luas dari sekedar gaya hidup atau adat-istiadat; ia adalah fondasi yang membentuk cara kita berpikir, bertindak, dan berinteraksi dalam kehidupan sehari-hari. Definisi-definisi ini membantu kita menghargai keragaman budaya sebagai bagian integral dari pengalaman manusia. Untuk Kota Pekalongan gambaran kondisi budaya

direpresentasikan dengan kondisi masyarakat yang mampu melestarikan budaya baik benda maupun tak benda secara turun temurun dan berkelanjutan.

6. Agamis

Emile Durkheim, seorang sosiolog terkemuka, memandang agama sebagai alat perekat sosial yang menguatkan ikatan dalam komunitas melalui sistem kepercayaan dan ritus bersama, menekankan bahwa menjadi agamis berarti lebih dari sekedar mengikuti ajaran; itu juga tentang berpartisipasi dalam praktik keagamaan yang mendukung kesatuan dan identitas kolektif suatu masyarakat. Sementara itu, Gordon Allport, seorang psikolog, membedakan antara motivasi intrinsik dan ekstrinsik dalam praktik keagamaan dan menunjukkan bahwa individu yang agamis secara intrinsik mengintegrasikan nilai-nilai agama sebagai pusat dari eksistensi mereka, menggambarkan keterikatan yang mendalam dan pribadi terhadap nilai-nilai ini. Kedua pandangan ini bersama-sama menyoroti bahwa agamis tidak hanya manifestasi eksternal tetapi juga internalisasi nilai agama yang mempengaruhi dan membentuk pandangan dunia serta perilaku seseorang, menghubungkan tindakan keagamaan dengan kontribusi terhadap solidaritas komunal dan transformasi personal.

Prof. Dr. Azyumardi Azra, CBE - Seorang intelektual Muslim terkemuka dan ahli sejarah Islam dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Menurut Prof. Azyumardi, sifat agamis tidak hanya terbatas pada ritual ibadah saja tetapi juga dalam implementasi nilai-nilai etis dan moral agama dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini mencakup bagaimana seseorang mengintegrasikan ajaran agamanya dalam interaksi sosial, kebijakan, dan kegiatan ekonomi, menunjukkan koherensi antara keyakinan pribadi dan tindakan.

Franz Magnis-Suseno, seorang Romo Yesuit dan filsuf terkemuka di Indonesia, memiliki pandangan mendalam tentang konsep keagamaan yang berakar pada pengalaman spiritual dan praktik etis dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Magnis-Suseno, seseorang yang agamis bukan hanya secara rutin menjalankan ibadah dan ritus keagamaan, tetapi lebih penting lagi, ia harus mengintegrasikan nilai-nilai keagamaan tersebut dalam tindakan nyata yang mencerminkan keadilan, kasih, dan kepedulian terhadap sesama.

Gambaran berbagai pandangan para ahli tersebut diharapkan terwujud di Kota Pekalongan pada tahun 2045. Pada akhir periode RPJP Daerah 2025 - 2045 masyarakat Kota Pekalongan akan memiliki ciri-ciri berupa tingginya kegiatan keagamaan yang disertai dengan nilai-nilai kerukunan umat beragama yang tertanam melalui penyelenggaraan kegiatan pendidikan keagamaan baik formal maupun non formal.

7. Transformatif

Transformatif dalam konstruksi visi Kota Pekalongan tahun 2025 - 2045 diarahkan pada makna dan aktivitas ekonomi. Dalam pengertian ini, dalam 20 tahun ke depan Kota Pekalongan akan melakukan transformasi ekonomi menuju ekonomi digital dengan tetap memperhatikan dinamika ekonomi dan potensi unggulan daerah.

Rhenald Kasali, profesor dan pengamat ekonomi digital, menekankan pada transformasi digital yang mengubah cara bisnis dilakukan. Menurutny, ekonomi digital mencakup segala aktivitas ekonomi yang berbasis teknologi informasi, termasuk cara baru dalam berkomunikasi, bertransaksi, dan mengubah berbagai sektor tradisional. Sementara itu, Onno W. Purbo, pakar teknologi informasi, mendefinisikan ekonomi digital lebih kepada penggunaan internet dan teknologi digital dalam mendukung aktivitas ekonomi. Ia menekankan pentingnya akses internet sebagai dasar dari ekonomi digital,

serta peran penting pendidikan dan infrastruktur dalam mendukung perkembangan ekonomi digital. Sedangkan Mari Elka Pangestu, mantan Menteri Perdagangan dan pakar ekonomi, sering membicarakan tentang pentingnya ekonomi digital dalam meningkatkan inklusivitas ekonomi. Definisi yang diusungnya menekankan pada integrasi digital dalam semua aspek kehidupan masyarakat, yang tidak hanya menciptakan efisiensi tetapi juga memperluas akses kepada peluang ekonomi. Kemudian Ilham Habibie, pakar teknologi dan ekonomi, mendefinisikan ekonomi digital melalui lensa inovasi dan teknologi. Ia berbicara tentang bagaimana teknologi seperti big data, *internet of things* (IoT), dan *artificial intelligence* (AI) dapat diintegrasikan ke dalam sektor-sektor ekonomi untuk menciptakan nilai tambah yang signifikan.

Dengan melihat perspektif ke depan dimana potensi terbesar pengembangan Kota Pekalongan sebagai kota perdagangan dan jasa, maka dukungan sarana, prasarana, sumber daya manusia, kelembagaan dan sistem (SPMLS) yang berbasis teknologi informasi menjadi faktor strategis untuk diwujudkan.

8. Inovatif

Menurut Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan inovasi. Inovasi adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Dalam merumuskan kebijakan inovasi, Pemerintahan Daerah mengacu pada prinsip: a. peningkatan efisiensi; b. perbaikan efektivitas; c. perbaikan kualitas pelayanan; d. tidak ada konflik kepentingan; e. berorientasi kepada kepentingan umum; f. dilakukan secara terbuka; g. memenuhi nilai-nilai kepatutan; dan h. dapat dipertanggungjawabkan hasilnya tidak untuk kepentingan diri sendiri.

Menurut Eko Prasjojo, akademisi dan mantan Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, menekankan pentingnya inovasi dalam pemerintahan untuk menciptakan pelayanan publik yang lebih efisien dan responsif. Inovatif dalam tata kelola pemerintahan melibatkan penggunaan teknologi informasi untuk memudahkan akses informasi dan pelayanan kepada masyarakat, sehingga meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.

Sementara menurut Agus Dwiyanto, ahli administrasi negara dari Universitas Gadjah Mada, berpendapat bahwa sifat inovatif dalam tata kelola pemerintahan harus melibatkan perubahan sistematis dalam tata kelola internal dan cara interaksi dengan masyarakat. Inovasi tidak hanya terbatas pada teknologi digital, tetapi juga mencakup perubahan dalam regulasi, kebijakan, dan praktik manajemen sumber daya manusia.

Dari sudut pandang ini, inovatif dalam tata kelola pemerintahan di Indonesia melibatkan serangkaian transformasi dalam cara pemerintah bekerja dan berinteraksi dengan berbagai pemangku kepentingan. Inisiatif inovatif diharapkan dapat mengatasi berbagai tantangan birokrasi, mempercepat proses, meningkatkan kualitas layanan, serta membangun pemerintahan yang lebih terbuka dan partisipatif. Implementasi teknologi digital, revisi kebijakan yang mendukung, dan praktik manajemen yang progresif adalah beberapa cara penting untuk mencapai tata kelola yang inovatif.

9. Kreatif

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kreatif mengandung makna memiliki daya cipta; memiliki kemampuan untuk menciptakan; bersifat (mengandung) daya cipta: pekerjaan yang menghendaki kecerdasan dan imajinasi;

Sementara itu menurut Aviliani - ekonom senior dan anggota dari *Institute for Development of Economics and Finance* (INDEF), menyoroti bahwa kreativitas adalah motor penggerak ekonomi kreatif, yang meliputi industri seperti desain, arsitektur, mode, dan multimedia. Menurut Aviliani, kreativitas tidak hanya meningkatkan nilai tambah produk, tetapi juga menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan ekspor, yang pada akhirnya berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi negara. Sementara itu menurut Mari Elka Pangestu - Mantan Menteri Perdagangan Indonesia berpendapat bahwa sektor ekonomi kreatif dapat menjadi sumber pertumbuhan baru bagi Indonesia. Kreativitas, menurut Mari, sangat penting dalam menstimulasi inovasi dan kompetitivitas yang pada gilirannya akan memperkuat ekonomi Indonesia dalam menghadapi persaingan global. Menurut Bambang Brodjonegoro - ekonom dan mantan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, mengemukakan bahwa kreativitas adalah kunci untuk transformasi ekonomi Indonesia dari yang berbasis sumber daya alam menjadi berbasis pengetahuan dan inovasi. Bambang menekankan bahwa pemerintah harus mendukung pengembangan kreativitas melalui kebijakan yang mendukung riset dan pengembangan, serta pendidikan dan pelatihan yang memadai.

Dari uraian di atas kreativitas dianggap sebagai salah satu pilar penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Para ahli menekankan pada pengembangan ekosistem yang mendukung inovasi dan kreativitas sebagai cara untuk meningkatkan daya saing dan keberlanjutan ekonomi kota.

10. Berkelanjutan

Menurut Undang-undang nomor 26 tahun 2007 tentang penataan ruang, pengertian “berkelanjutan” adalah kondisi kualitas lingkungan fisik dapat dipertahankan bahkan dapat ditingkatkan, termasuk pula antisipasi untuk mengembangkan orientasi ekonomi kawasan setelah habisnya sumber daya alam tak terbarukan.

Menurut Emil Salim – ekonom dan mantan Menteri Lingkungan Hidup, berkelanjutan sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan generasi saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi yang akan datang untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. Pendekatan ini menekankan pada keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, pelestarian lingkungan, dan keadilan sosial. Sementara menurut Arief Anshory Yusuf – profesor ekonomi dari Universitas Padjadjaran, berkelanjutan dengan fokus pada pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan secara bijaksana untuk mencegah kerusakan ekologi, mendukung stabilitas ekonomi, dan memastikan kesejahteraan sosial yang merata di antara masyarakat. Dalam konteks riset dan teknologi, menurut Satryo Soemantri Brodjonegoro, Mantan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, menyoroti pentingnya inovasi dan teknologi dalam mendukung pembangunan berkelanjutan. Keberlanjutan adalah tentang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk menemukan solusi yang efisien dan ramah lingkungan terhadap berbagai tantangan pembangunan.

Dari para ahli menunjukkan bahwa berkelanjutan adalah konsep multidimensi yang meliputi aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Tujuannya adalah mencapai keseimbangan antara ketiga pilar tersebut untuk memastikan bahwa pembangunan dapat terus berlangsung tanpa merugikan kebutuhan dan kesejahteraan masa depan.

Visi Kota Pekalongan Tahun 2025-2045 “PEKALONGAN Kota MINA BATIK yang BERKELANJUTAN” (Makmur, berIntegritas, Nyaman, Aman, berBudaya, Agamis, Transformatif, Inovatif, dan Kreatif yang Berkelanjutan) dijabarkan kedalam 5 (lima) misi pembangunan, 3 (tiga) sasaran utama visi, 10 (sepuluh) sasaran pokok dan arah (tujuan) pembangunan dan diukur dengan 45 (empat puluh lima) indikator utama pembangunan (IUP)

dengan demikian, angka 5 (lima) Misi mencerminkan Pancasila dan 3/10/45 (3 Oktober 1945) mencerminkan tanggal perjuangan para Pahlawan di Kota Pekalongan merebut kekuasaan dari tangan Jepang pada 3 Oktober 1945.



Sumber : RPJPD Kota Pekalongan Tahun 2025-2045, 2025

Gambar II-57
Kerangka Pikir RPJPD Kota Pekalongan 2025-2045

Sasaran Utama Visi

Pencapaian Visi RPJP Daerah Kota Pekalongan Tahun 2025-2045 “PEKALONGAN Kota MINA BATIK yang BERKELANJUTAN” (Makmur, berIntegritas, Nyaman, Aman, berBudaya, Agamis, Transformatif, Inovatif, dan Kreatif) tercermin dalam sasaran visi sebagai berikut:



Sumber : RPJPD Kota Pekalongan Tahun 2025-2045, 2025

Gambar II-58
Sasaran Utama Visi Pembangunan Kota Pekalongan 2025-2045

1. Sasaran pertama adalah terwujudnya masyarakat yang maju, sejahtera dan berkeadilan sasaran tersebut tercermin dengan meningkatnya PDRB Perkapita yang semakin tinggi, berkurangnya ketimpangan yang ditunjukkan dari rasio Indeks Gini yang semakin turun, menurunkan angka kemiskinan dan meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia.

2. Sasaran kedua adalah terwujudnya tata kelola pemerintahan yang unggul dan berintegritas, diukur dengan indikator Indeks SPBE dan Indeks Pelayanan Publik.
3. Sasaran ketiga adalah terwujudnya lingkungan hidup yang berkualitas yang diukur dengan Indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH).

Tabel II-105
Sasaran Utama Visi, Indikator dan Target Tahun 2029

Visi	Sasaran Visi	Indikator	Satuan	Baseline 2025	Target 2029
Pekalongan Kota MINA BATIK yang Berkelanjutan (Makmur, berIntegritas, Nyaman, Aman, berBudaya, Agamis, Transformatif, Inovatif, dan Kreatif yang Berkelanjutan)	Terwujudnya masyarakat yang maju, sejahtera dan berkeadilan	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Perkapita Kabupaten/ Kota	Rp. Juta	46,43 - 46,75	83,71 - 92,33
		Indeks Gini	Angka	0,321 - 0,310	0,310 - 0,270
		Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	77,39	79,46
		Tingkat Kemiskinan	Angka	6,27-6,70	5,02 - 6,27
	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang unggul dan berintegritas	Indeks SPBE	Angka	3,45	3,78
		Indeks Pelayanan Publik	Angka	4,46	4,00
	Terwujudnya lingkungan hidup yang berkualitas	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Angka	64,14	64,24

Sumber : RPJPD Kota Pekalongan Tahun 2025-2045, 2025

Misi

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Berdasarkan pokok visi RPJP Daerah Kota Pekalongan Tahun 2025-2045, dilakukan perumusan Misi sebagaimana ditunjukkan Gambar II-57 berikut.



Sumber : RPJPD Kota Pekalongan Tahun 2025-2045, 2025

Gambar II-59
Misi Pembangunan Kota Pekalongan 2025-2045

Dari hasil perumusan Misi RPJP Daerah, serta dengan memperhatikan isu strategis Kota Pekalongan sampai dengan tahun 2045, dapat dijelaskan bahwa upaya mewujudkan

“Pekalongan Kota Mina Batik Yang Berkelanjutan” ditempuh dengan 5 (lima) misi yang akan menjadi pemandu tugas bersama antara Pemerintah dan seluruh komponen masyarakat, yaitu:

- 1 Mewujudkan Transformasi Sosial yang Produktif, Berkarakter dan Berbudaya
- 2 Mewujudkan Kondusivitas Wilayah Untuk Memberikan Rasa Aman Bagi Warga
- 3 Menyelenggarakan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan Digital yang Akuntabel, Transparan, Berintegritas, Tangkas dan Kolaboratif
- 4 Mewujudkan Transformasi Ekonomi Menuju Ekonomi Sirkular yang Kreatif, Inovatif, Merata dan Inklusif
- 5 Mewujudkan lingkungan hidup, serta infrastruktur perkotaan dan permukiman yang berkualitas.

Arah Kebijakan Periode Pertama (2025-2029)

Perwujudan Pekalongan Kota MINA BATIK yang Berkelanjutan pada Tahun 2045 sebagaimana dalam RPJP Daerah Kota Pekalongan Tahun 2025-2045 terbagi ke dalam 4 (empat) tema besar yaitu Periode I : Penguatan Fondasi Perwujudan Mina Batik; Periode II : Percepatan Perwujudan Mina Batik; Periode III : Perwujudan Mina Batik yang mendukung ekspansi global dan Periode IV : Pekalongan Kota Mina Batik yang berkelanjutan sebagaimana gambar V-5. Periode lima tahun pertama (Tahun 2025-2029) dari pembangunan jangka panjang daerah Kota Pekalongan diarahkan pada kebijakan “Penguatan Fondasi Perwujudan Mina Batik”.



Sumber : RPJPD Kota Pekalongan Tahun 2025-2045, 2025

Gambar II-60

Tahapan Pembangunan RPJPD Kota Pekalongan 2025-2045

Periode pertama dari pembangunan jangka panjang daerah Kota Pekalongan diarahkan pada kebijakan “Penguatan Fondasi Perwujudan Mina Batik”. Tahap pertama ini dilakukan dengan penguatan fondasi transformasi ekonomi menuju ekonomi sirkular yang didukung dengan peningkatan lingkungan hidup dan infrastruktur yang berkualitas. Penguatan tersebut disertai dengan penguatan Transformasi Sosial yang Produktif, Berkarakter dan Berbudaya. Kebijakan tersebut dapat dicapai dengan dukungan penguatan landasan transformasi tata kelola pemerintahan digital yang akuntabel, transparan, berintegritas, tangkas dan kolaboratif serta penguatan kondusivitas wilayah yang memberikan rasa aman bagi warga.

Pada periode pertama, dalam rangka mewujudkan Transformasi Sosial yang Produktif, Berkarakter dan Berbudaya diarahkan pada peningkatan layanan pendidikan yang merata, inklusif dan berorientasi pada internalisasi nilai agama dan budaya dalam pendidikan karakter sebagai muatan lokal di semua jenjang pendidikan formal maupun non formal, pemenuhan pelayanan kesehatan untuk semua serta memperluas perlindungan sosial yang adaptif bagi masyarakat rentan. Perwujudan kondusivitas wilayah untuk memberikan rasa aman bagi warga diarahkan pada Pembangunan karakter masyarakat berwawasan kebangsaan dengan fondasi agama, peningkatan kualitas SDM penegak trantibum linmas, serta dukungan sarpras yang memadai. Transformasi tata kelola pemerintahan digital yang akuntabel, transparan, berintegritas, tangkas dan kolaboratif diarahkan pada Penguatan kelembagaan, SDM, regulasi yang tepat fungsi, partisipasi dan kolaborasi, disertai penguatan fondasi pemerintahan digital untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan akuntabel dengan fokus peningkatan akuntabilitas kinerja pemerintahan sampai level A.

Transformasi ekonomi menuju ekonomi sirkular yang kreatif, inovatif dan merata diarahkan pada penguatan fondasi perwujudan sektor perikanan, batik dan jasa sebagai produk unggulan serta implementasi ekonomi sirkular dengan fokus pada penguatan pengetahuan dan kesadaran pelaku dan stakeholder ekonomi, pembangunan sistem dan tata kelola, penguatan branding, penguatan riset dan inovasi untuk meningkatkan nilai tambah produk unggulan daerah. Perwujudan lingkungan hidup, infrastruktur perkotaan dan permukiman yang berkualitas diarahkan pada penguatan pengelolaan lingkungan hidup serta infrastruktur perkotaan dan permukiman yang nyaman dan berkualitas, dengan fokus pada kelompok air, manajemen limbah serta dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Sasaran Pokok dan Arah Pembangunan

Sasaran pokok pembangunan jangka panjang pada dasarnya adalah kuantifikasi visi dan misi pada akhir periode tahun ke-20 (dua puluh). Sasaran menjelaskan target dari capaian pembangunan jangka panjang pada akhir tahun ke-20. Sasaran pokok pembangunan disusun dan dirinci berdasarkan prioritas masing-masing misi pada setiap tahapan pembangunan. Sasaran pokok RPJP Daerah Tahun 2025-2045 merupakan gambaran kinerja daerah dalam pencapaian pembangunan yang menggambarkan secara langsung terwujudnya Visi RPJP Daerah Tahun 2025-2045. Arah Pembangunan Daerah merupakan strategi daerah dalam mencapai tujuan pembangunan daerah dan berkontribusi terhadap pencapaian tujuan pembangunan provinsi dan nasional jangka panjang yang sesuai dengan karakteristik dan potensi wilayah

Dalam rangka mewujudkan visi pembangunan Kota Pekalongan 2025-2045 ditetapkan 10 (sepuluh) sasaran pokok dengan 10 arah pembangunan daerah (10 Mina Batik/10MB) sebagai berikut.

Tabel II-106
Sasaran Pokok dan Arah Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Pekalongan
Tahun 2025-2045

No	Misi	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan
1	Mewujudkan Transformasi Sosial yang Produktif, Berkarakter dan Berbudaya	1. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat 2. Meningkatnya akses dan mutu pendidikan 3. Meningkatnya pendidikan karakter dan pemajuan budaya	MB01. Kesehatan untuk semua MB02. Pendidikan berkualitas secara inklusif MB03. Pemajuan kebudayaan dan pendidikan karakter MB04. Kesejahteraan masyarakat dan perlindungan sosial yang adaptif

No	Misi	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan
		4. Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat	
2	Mewujudkan Kondusivitas Wilayah Untuk Memberikan Rasa Aman Bagi Warga	5. Meningkatnya Kondusivitas Wilayah	MB05. Ketentraman dan ketertiban umum
3	Menyelenggarakan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan Digital yang Akuntabel, Transparan, Berintegritas, Tangkas dan Kolaboratif	6. Meningkatnya Kualitas Birokrasi	MB06. Regulasi dan tata kelola yang berintegritas, adaptif, dan kolaboratif
4	Mewujudkan Transformasi Ekonomi Menuju Ekonomi Sirkular Yang Kreatif, Inovatif, merata dan Inklusif	7. Meningkatnya Perekonomian Kota Pekalongan 8. Terwujudnya stabilitas ekonomi	MB07. Iptek, Inovasi dan produktivitas ekonomi MB08. Stabilitas ekonomi makro
5	Mewujudkan Lingkungan Hidup, serta infrastruktur perkotaan dan permukiman yang berkualitas	9. Meningkatnya Kualitas Infrastruktur 10. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	MB09. Infrastruktur perkotaan dan permukiman yang berkualitas MB10. Lingkungan hidup berkualitas

Sumber : RPJPD Kota Pekalongan Tahun 2025-2045, 2025

Penjelasan masing-masing sasaran pokok, arah pembangunan dan indikator utama pembangunan untuk mewujudkan Visi Kota Pekalongan menjadi Kota Mina Batik Yang Berkelanjutan pada Tahun 2045 tersaji sebagai berikut.

1. Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat

Peningkatan derajat kesehatan masyarakat Kota Pekalongan dengan arah pembangunan (MB01). Kesehatan untuk semua diukur dengan indikator pembangunan sebagai berikut:

Tabel II-107
Indikator Utama Pembangunan Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat
Tahun 2025-2029

Indikator Utama Pembangunan	Satuan	Baseline	Target 2029
1. Usia Harapan Hidup (UHH)	tahun	74,86	75,73
2. Kesehatan Ibu dan Anak:			
a). Angka Kematian Ibu	kasus	6,00	4
b). Prevalensi <i>Stunting</i> (pendek dan sangat pendek) pada balita	persen	14,14	11,98
3. Penanganan Tuberkulosis:			
a). Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (<i>treatment coverage</i>)	persen	90,00	92,50
b). Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (<i>treatment success rate</i>)	persen	90,00	96,25
4. Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional	persen	97,94	98,33
5. Indeks Keluarga Sehat	angka	0,36	0,42
6. Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (<i>Prevalence of Undernourishment</i>)	persen	6,24	5,09
7. Indeks Ketahanan Pangan (IKP)	angka	80,09	81,09
Catatan: Baseline dan target masih bersifat indikatif teknokratik			

Sumber : RPJPD Kota Pekalongan Tahun 2025-2045, 2025

Sasaran pembangunan peningkatan derajat kesehatan masyarakat Kota Pekalongan dapat diwujudkan melalui intervensi program sebagai berikut:

- Penguatan upaya promotif – preventif disertai dengan pembudayaan perilaku hidup sehat sebagai salah satu wujud penanggulangan penyakit dari sisi hulu;
- Pencegahan dan pengendalian penyakit, baik menular ataupun tidak menular, melalui peningkatan peran serta Masyarakat ataupun melalui pemberian imunisasi dasar lengkap;
- Peningkatan kecukupan gizi melalui pemberian makanan yang Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman;
- Peningkatan dan penguatan akses layanan Kesehatan untuk semua (Universal Health Coverage atau UHC);
- Penyelenggaraan pelayanan Kesehatan yang berkualitas didukung dengan ketersediaan sarana prasarana Kesehatan yang memadai serta tenaga Kesehatan yang profesional;
- Peningkatan sistem informasi kesehatan yang terintegrasi;
- Penguatan riset dan inovasi serta pemanfaatan teknologi di bidang Kesehatan;
- Penguatan sistem pengawasan obat dan makanan.

2. Peningkatan akses dan mutu pendidikan

Peningkatan akses dan mutu pendidikan Kota Pekalongan dengan arah pembangunan (MB02) Pendidikan Berkualitas Secara Inklusif diukur dengan indikator pembangunan sebagai berikut:

Tabel II-108
Indikator Utama Pembangunan Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan
Kota Pekalongan Tahun 2025-2029

Indikator Utama Pembangunan	Satuan	Baseline	Target 2029
8. Hasil Pembelajaran			
a). Persentase Siswa yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional (seluruh jenjang):			
i). Literasi Membaca SD/Sederajat	persen	61,52	63,36
ii). Literasi Membaca SMP/ Sederajat	persen	61,80	65,32
iii). Numerasi SD/Sederajat	persen	47,68	50,44
iv). Numerasi SMP/Sederajat	persen	36,30	39,90
b). Rata-Rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun	tahun	9,54	9,8
c). Harapan Lama Sekolah	tahun	13,24	13,06
9. Angka partisipasi sekolah 5 - 6 tahun	persen	91,27	93,27
10. Tingkat pemanfaatan perpustakaan	persen	0,44	0,61
Catatan: Baseline dan target masih bersifat indikatif teknokratik			

Sumber : RPJPD Kota Pekalongan Tahun 2025-2045, 2025

Sasaran pembangunan peningkatan akses dan mutu pendidikan Kota Pekalongan dapat diwujudkan melalui intervensi program sebagai berikut:

- Peningkatan kesadaran masyarakat yang disertai dengan peningkatan akses layanan Pendidikan sampai dengan Pendidikan Tinggi dalam rangka peningkatan rata-rata lama sekolah;

- b. Peningkatan akses layanan Pendidikan bagi semua secara adil dan merata dengan mempertimbangkan keseimbangan gender dan aspek difabilitas;
- c. Percepatan wajib belajar 13 tahun yang didukung dengan peningkatan akses layanan Pendidikan anak usia dini serta Pendidikan non formal yang sejalan dengan penguatan akses Pendidikan dasar;
- d. Peningkatan kualitas dan profesionalisme pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan tuntutan dinamika kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta sejalan dengan arah penyelenggaraan Pendidikan nasional;
- e. Peningkatan kualitas sarana dan prasarana Pendidikan sebagai pendukung operasionalisasi kurikulum pendidikan;
- f. Penguatan kurikulum muatan lokal yang sesuai dengan kebutuhan daerah sebagai bagian dalam penyiapan generasi yang adaptif, inovatif, berakhlak, religius, dan berintegritas;
- g. Penguatan peran Masyarakat sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam penyelenggaraan Pendidikan, baik pada sisi input, proses, maupun output pendidikan.

3. Peningkatan pendidikan karakter dan pemajuan budaya

Peningkatan pendidikan karakter dan pemajuan budaya Kota Pekalongan dengan arah pembangunan (MB03) Pemajuan kebudayaan dan pendidikan karakter diukur dengan indikator pembangunan sebagai berikut:

Tabel II-109
Indikator Utama Pembangunan Peningkatan Pendidikan Karakter dan Pemajuan Budaya Kota Pekalongan Tahun 2025-2029

Indikator Utama Pembangunan	Satuan	Baseline	Target 2029
11. Persentase satuan pendidikan yang mempunyai guru mengajar mulok bahasa daerah/seni budaya dan mengarusutamakan kebudayaan	persen	6,63	6,83
12. Persentase Cagar Budaya (CB) dan Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) yang dilestarikan	persen	18,05	21,86
13. Jumlah pengunjung tempat bersejarah	orang	53.864	65.864
14. Persentase kelompok kesenian yang aktif terlibat/mengadakan pertunjukan kesenian dalam 1 tahun terakhir	persen	20,63	24,60
Catatan: Baseline dan target masih bersifat indikatif teknokratik			

Sumber : RPJPD Kota Pekalongan Tahun 2025-2045, 2025

Sasaran pembangunan peningkatan pendidikan karakter dan pemajuan budaya Kota Pekalongan dapat diwujudkan melalui intervensi program sebagai berikut:

- a. Penguatan penanaman nilai-nilai budaya Jawa sejak dini dengan edukasi budaya Jawa - Pekalongan mulai dari dalam keluarga, sekolah, dan lingkungan masyarakat terkecil;
- b. Internalisasi kurikulum kebudayaan Jawa di semua jenjang pendidikan, disertai peningkatan kualitas tenaga pendidik dalam implementasi budaya Jawa - Pekalongan pada anak-anak sekolah;
- c. Edukasi di keluarga dilakukan oleh orang tua kepada anak-anaknya untuk mengajarkan identitas Kota Pekalongan melalui tutur kata sehari-hari, termasuk melakukan parenting untuk para orang tua terkait pembelajaran karakter masyarakat Kota Pekalongan dalam kehidupan sehari-hari;

- d. Pengembangan dan pemanfaatan warisan budaya, kearifan lokal, tradisi, kesenian sebagai salah satu sumber perekonomian daerah, dan berdampak pada kesejahteraan masyarakat;
- e. Penguatan internalisasi dan aktualisasi nilai-nilai agama sebagai landasan spiritual, etika, dan moral dalam kehidupan masyarakat;
- f. Penguatan komitmen pemerintah dalam memperkuat pembentukan karakter masyarakat Kota Pekalongan yang salah satunya tercermin dari politik kebudayaan untuk memprioritaskan pendidikan kebudayaan dan kesenian untuk masyarakat Kota Pekalongan, serta;
- g. Pemantapan kohesi sosial melalui edukasi tentang keberagaman, toleransi, spiritualisme, dan kewarganegaraan kepada seluruh lapisan masyarakat sejak dini.

4. Peningkatan kesejahteraan masyarakat

Peningkatan kesejahteraan masyarakat Kota Pekalongan dengan arah pembangunan (MB04) Kesejahteraan masyarakat dan perlindungan sosial yang adaptif, diukur dengan indikator pembangunan sebagai berikut:

Tabel II-110
Indikator Utama Pembangunan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat
Kota Pekalongan Tahun 2025-2029

Indikator Utama Pembangunan	Satuan	Baseline	Target 2029
15. Tingkat Kemiskinan	persen	6,27 - 6,70	5,02 – 6,27
16. Tingkat Pengangguran Terbuka	persen	5,05 - 4,47	4,90 – 4,50
17. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	persen	58,69	62,7
18. Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	persen	39,9	43,2
19. Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	angka	0,20 - 0,18	0,18 – 0,17
20. Indeks Pembangunan Keluarga (Ibangga)	Angka	64,81 – 65,81	64,81 – 66,81
Catatan: Baseline dan target masih bersifat indikatif teknokratik			

Sumber : RPJPD Kota Pekalongan Tahun 2025-2045, 2025

Sasaran pembangunan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Kota Pekalongan dapat diwujudkan melalui intervensi program sebagai berikut:

- a. Perlindungan sosial adaptif, terintegrasi, dan inklusif bagi seluruh kelompok masyarakat, terutama bagi kelompok marjinal dan rentan, dengan mengoptimalkan pemanfaatan sistem Regsosek agar tepat sasaran, tepat guna, dan efisien;
- b. Penyiapan keterampilan (*soft skill/hard skill*) agar tenaga kerja di Kota Pekalongan semakin memiliki daya saing;
- c. Perluasan penyediaan bantuan sosial, seperti bantuan pembiayaan pendidikan, bantuan pembiayaan kesehatan, bantuan pemenuhan dan peningkatan ketahanan pangan dan gizi, bantuan pemenuhan kebutuhan hidup keluarga, bantuan penyediaan tempat tinggal yang layak, bantuan pemberdayaan ekonomi dan pekerjaan dan sebagainya, terutama bagi kelompok marjinal dan rentan;
- d. Perluasan penyediaan jaminan sosial, seperti jaminan kesehatan, jaminan ketenagakerjaan, jaminan kematian, jaminan hari tua, terutama bagi kelompok marjinal dan rentan;
- e. Pemberdayaan ekonomi mikro, kecil, dan menengah yang inklusif dan berbasis kerakyatan;
- f. Peningkatan ketahanan keluarga dan lingkungan pendukung berbasis kearifan lokal;

- g. Penguatan pengarusutamaan gender dan inklusi sosial dalam pembangunan;
- h. Pemenuhan hak dan perlindungan anak, perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia;
- i. Pemberdayaan perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia, melalui penguatan kapasitas, kemandirian, kemampuan dalam pengambilan keputusan, serta peningkatan partisipasi di berbagai bidang pembangunan.

5. Meningkatnya Kondusivitas Wilayah

Kondusivitas wilayah untuk memberikan rasa aman bagi warga kota Pekalongan, difokuskan pada sasaran peningkatan kondusivitas wilayah dengan arah pembangunan (MB05) ketentraman dan ketertiban umum. Sasaran ini diukur dengan indikator pembangunan sebagai berikut:

Tabel II-111
Indikator Utama Pembangunan Peningkatan Kondusivitas Wilayah
Kota Pekalongan Tahun 2025-2029

Indikator Utama Pembangunan	Satuan	Baseline	Target 2029
21. Jumlah Kejadian Konflik SARA	kali	0	0
22. Indeks Risiko Bencana (IRB)	angka	133,30-131,95	125,25-121,65
Catatan: Baseline dan target masih bersifat indikatif teknokratik			

Sumber : RPJPD Kota Pekalongan Tahun 2025-2045, 2025

Sasaran pembangunan peningkatan kondusivitas wilayah Kota Pekalongan dapat diwujudkan melalui intervensi program sebagai berikut:

- a. Penguatan keamanan dan ketertiban untuk mengurangi tingkat kriminalitas,
- b. Penguatan toleransi intern dan antar umat beragama,
- c. Penguatan peran masyarakat, kerjasama, saling pengertian, saling menghargai, kritis terhadap informasi yang berkembang di masyarakat dan menghormati perbedaan.
- d. Penegakan hukum yang berkeadilan,
- e. Penguatan peran pemerintah daerah dalam mewujudkan kehidupan demokrasi yang sehat, serta
- f. Penguatan integritas partai politik.

6. Meningkatnya Kualitas Birokrasi

Transformasi tata kelola pemerintahan digital yang akuntabel, transparan, berintegritas, tangkas dan kolaboratif difokuskan pada sasaran peningkatan kualitas birokrasi dengan arah pembangunan (MB06) regulasi dan tata kelola yang berintegritas, adaptif, dan kolaboratif. Sasaran ini diukur dengan indikator pembangunan sebagai berikut:

Tabel II-112
Indikator Utama Pembangunan Peningkatan Kualitas Birokrasi
Kota Pekalongan Tahun 2025-2029

Indikator Utama Pembangunan	Satuan	Baseline	Target 2029
23. Indeks Reformasi Birokrasi	angka	72,86	74,69
24. Indeks Reformasi Hukum	angka	38,30	60,00
25. Indeks Pelayanan Publik	angka	4,46	4,50

Indikator Utama Pembangunan	Satuan	Baseline	Target 2029
26. Indeks Integritas Nasional	angka	82,42	84,42
27. Indeks Inovasi Daerah	angka	61,00	65,00
28. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	angka	3,45	3,78
Catatan: Baseline dan target masih bersifat indikatif teknokratik			

Sumber : RPJPD Kota Pekalongan Tahun 2025-2045, 2025

Sasaran pembangunan peningkatan kualitas birokrasi Kota Pekalongan dapat diwujudkan melalui intervensi program sebagai berikut:

- Penguatan pelayanan publik yang cepat, tepat, berbasis digital, serta keterbukaan pelayanan pengaduan masyarakat (open government),
- Penguatan manajemen pemerintahan yang semakin adaptif, partisipatif, dan berorientasi pada hasil, berbasis riset, dan risiko,
- Penguatan kelembagaan yang efektif,
- Digitalisasi tata kelola pemerintahan,
- akselerasi peningkatan kompetensi ASN melalui penguatan manajemen ASN dan manajemen talenta secara efektif dan efisien,
- Penyederhanaan regulasi dan penguatan penegakan hukum,
- Penguatan manajemen pengawasan yang independen dan berintegritas dalam rangka percepatan pemberantasan korupsi,
- Penguatan kolaborasi dan kerja sama antardaerah, antara daerah dan pemangku kepentingan lainnya dalam rangka perwujudan cita-cita pembangunan daerah, serta
- Penguatan integritas setiap penyelenggara pemerintahan dan masyarakat termasuk partai politik.

7. Peningkatan Perekonomian Kota Pekalongan

Peningkatan Perekonomian Kota Pekalongan dengan arah pembangunan (MB07) Iptek, Inovasi dan Produktivitas Ekonomi diukur dengan indikator pembangunan sebagai berikut:

Tabel II-9
Indikator Utama Pembangunan Peningkatan Perekonomian
Kota Pekalongan Tahun 2025-2029

Indikator Utama Pembangunan	Satuan	Baseline	Target 2029
29. Rasio PDRB Industri Pengolahan	persen	21,25	22,11
30. Pengembangan Pariwisata:			
a). Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum	persen	6,04	6,94
b). Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara	orang	300	330
31. Produktivitas UMKM, koperasi, BUMD			
a). Rasio Kewirausahaan Daerah	persen	7,20	8,44
b). Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB	persen	34,11	35,11
c). Return on Aset (ROA) BUMD	persen	1,89	2,09
d). Disparitas Harga	persen	± 10	± 10
32. Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)	persen	38,33	36,01
33. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Perkapita Kabupaten/ Kota	Rp. juta	46,43 – 46,75	83,71 - 92,33

Indikator Utama Pembangunan	Satuan	Baseline	Target 2029
34. Distribusi Pengeluaran Berdasarkan Kriteria Bank Dunia	persen	22,21 – 22,41	22,41 - 24,21
35. Inovasi:			
a). Kapabilitas Inovasi	angka	2,90 – 3,00	3,00 - 3,25
b). Indeks Daya Saing Daerah	angka	3,60 – 3,70	3,70 - 3,80
Catatan: Baseline dan target masih bersifat indikatif teknokratik			

Sumber : RPJPD Kota Pekalongan Tahun 2025-2045, 2025

Sasaran pembangunan Peningkatan Perekonomian Kota Pekalongan dapat diwujudkan melalui intervensi program sebagai berikut:

Sektor Perikanan

- Pembinaan dan penguatan masyarakat nelayan tangkap dan budidaya;
- Penguatan manajemen dan pengawasan sumber daya perikanan;
- Peningkatan produksi dan produktivitas perikanan yang berkelanjutan melalui pembangunan pelabuhan perikanan *onshore*, implementasi teknologi dan modernisasi dalam pembangunan sektor perikanan berbasis riset, teknologi, dan inovasi baik di sisi hulu maupun hilir;
- Penyediaan bibit dan varietas unggul untuk komoditas perikanan budidaya yang bernilai tinggi yang dapat berpotensi masuk pasar regional/nasional;
- Perbaikan habitat ekologi pesisir pantai dalam rangka rehabilitasi ekosistem pantai,
- Modernisasi kapal dan sarana produksi perikanan dalam upaya menjaga rantai dingin untuk menjaga kualitas ikan.

Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor

- Penguatan kapasitas dan kompetensi pelaku usaha perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor;
- Penguatan iklim berwirausaha yang sehat dan iklim kemitraan yang mendorong produktivitas perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor;
- Optimalisasi penguatan dan peningkatan sektor perdagangan jasa sehingga fungsi sebagai pusat kegiatan wilayah dapat berkembang; dan
- Peningkatan penyediaan infrastruktur pendukung perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor.

Sektor Industri pengolahan

- Penguatan kapasitas dan kompetensi pelaku usaha industri;
- Penguatan iklim berwirausaha yang sehat dan iklim kemitraan yang mendorong produktivitas industri pengolahan;
- Penguatan industri kecil dan menengah berbasis potensi lokal dengan memanfaatkan kemajuan teknologi, riset dan inovasi, digitalisasi industri pengolahan, serta ramah lingkungan (*green investment*);
- Penguatan integrasi rantai pasok antarindustri didukung dengan ketersediaan infrastruktur konektivitas dan logistik pendukung industri;
- Peningkatan penyediaan infrastruktur pendukung industri pengolahan.

Sektor UMKM dan Koperasi

- Peningkatan kapasitas dan kompetensi pelaku UMKM dan IKM untuk mampu mengembangkan produk UMKM dan IKM yang memiliki standar pasar regional, nasional maupun global,

- b. Peningkatan kualitas produk unggulan UMKM dan IKM berbasis riset, inovasi, dan teknologi,
- c. Fasilitasi perluasan akses pasar, kemitraan, modal/pembiayaan inovatif, kemasan, standar produk, dan manajemen usaha,
- d. Akselerasi digitalisasi dan penggunaan teknologi bagi pelaku UMKM dan IKM disertai dengan penyediaan akses internet dan teknologi yang memadai dan terjangkau,
- e. Pengembangan wirausaha baru,
- f. Penguatan koperasi sebagai konsolidator UMKM terutama bagi usaha mikro kecil,
- g. Perbaikan mekanisme pengawasan dan penjaminan koperasi simpan pinjam,
- h. Industrialisasi koperasi melalui hilirisasi komoditas unggulan daerah,
- i. Peningkatan kelembagaan dan kualitas sumber daya manusia koperasi, serta
- j. Peningkatan produktivitas UMKM.

Sektor Pariwisata

- a. Pengembangan pariwisata berbasis masyarakat dan berkelanjutan;
- b. Penguatan promosi pariwisata berbasis digital;
- c. Peningkatan kualitas destinasi wisata berbasis klaster dengan perbaikan sarana prasarana destinasi wisata;
- d. Penguatan diversifikasi daya tarik pariwisata sesuai dengan karakteristik dan potensi daerah seperti pemanfaatan keragaman sumber daya alam, budaya, kreativitas, dan olahraga berbasis digital;
- e. Peningkatan infrastruktur konektivitas dan integrasi antardestinas wisata;
- f. Penguatan kapasitas sumber daya manusia pelaku pariwisata, termasuk pelaku UMKM pariwisata;
- g. Penguatan fasilitasi kemitraan untuk pengembangan destinasi pariwisata, serta;
- h. *City beautification* dalam rangka membangun citra, karakter, dan *dignity* kota, sekaligus meningkatkan daya tarik pariwisata *urban tourism*.

Sektor Ekonomi Kreatif

- a. Peningkatan kualitas sumber daya manusia ekonomi kreatif;
- b. Pengembangan dan penguatan sistem kelembagaan ekonomi kreatif dan jejaringnya;
- c. Peningkatan pemasaran dan promosi produk ekonomi kreatif;
- d. Penyediaan infrastruktur yang memadai dan inklusif untuk mendukung pengembangan kreativitas;
- e. Peningkatan perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan sumber daya alam dan warisan budaya lokal sebagai bahan baku usaha ekonomi kreatif;
- f. Peningkatan apresiasi masyarakat terhadap kreativitas dan perlindungan hak kekayaan intelektual;
- g. Pengembangan dan penguatan jejaring kota kreatif;
- h. Pengembangan dan penguatan kampung kreatif terutama pada produk kreatif unggulan;
- i. Pengembangan ekonomi kreatif yang mendukung industri pariwisata melalui penciptaan iklim yang kondusif, serta;
- j. Pengembangan riset ekonomi kreatif.

Sektor Produktivitas Tenaga Kerja

- a. Penguatan pendidikan dan pelatihan vokasi berbasis kebutuhan dunia usaha dan dunia industri;
- b. Penguatan keahlian dan kompetensi digital, riset dan inovasi;

- c. Penguatan sistem perlindungan tenaga kerja;
- d. Penguatan iklim ketenagakerjaan yang mendukung pasar kerja yang inklusif termasuk penerapan upah minimum yang berkeadilan;
- e. Penuntasan pekerja anak, serta;
- f. Penyediaan informasi pasar kerja dalam jangkauan luas berbasis digital terintegrasi dengan dunia usaha dunia industri.

Sektor Penguatan Riset dan Inovasi

- a. Penguatan peran dan kapasitas pusat riset dan inovasi di semua lembaga dan perusahaan, serta perguruan tinggi mitra pemerintah;
- b. Penguatan kapasitas dan kualitas sumber daya manusia riset dan inovasi di semua sektor;
- c. Penguatan tata kelola kelembagaan riset dan inovasi;
- d. Penguatan relevansi dan produktivitas hasil riset dan inovasi di semua sektor pembangunan;
- e. Penguatan kerja sama riset dan inovasi antar pelaku usaha, swasta, dan pemerintah, serta;
- f. Penguatan inkubasi hasil riset dan inovasi, serta fasilitasi hak kekayaan intelektual dan hak paten atas hasil riset dan inovasi.

8. Terwujudnya Stabilitas Ekonomi

Terwujudnya stabilitas ekonomi Kota Pekalongan dengan arah pembangunan (MB08) stabilitas ekonomi makro diukur dengan indikator pembangunan sebagai berikut:

Tabel II-113
Indikator Utama Pembangunan Peningkatan Kondusivitas Wilayah
Kota Pekalongan Tahun 2025-2029

Indikator Utama Pembangunan	Satuan	Baseline	Target 2029
36. Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	persen	1,06	1,07
37. Pendalaman/ Intermediasi Sektor Keuangan:			
a). Total Dana Pihak Ketiga Pada Bank Milik Kabupaten/ Kota per PDRB	persen	29,54 – 29,75	17,95 – 19,80
c). Total Kredit Pada Bank Milik Kabupaten/Kota per PDRB	persen	26,66 - 26,84	16,20 - 17,87
Catatan: Baseline dan target masih bersifat indikatif teknokratik			

Sumber : RPJPD Kota Pekalongan Tahun 2025-2045, 2025

Sasaran pembangunan terwujudnya stabilitas ekonomi Kota Pekalongan dapat dilakukan melalui intervensi program sebagai berikut:

- a. Penguatan potensi pembiayaan alternatif dan kreatif daerah;
- b. Penguatan pengendalian inflasi daerah;
- c. Mendorong diversifikasi ekonomi dengan mengembangkan sektor lain seperti pariwisata, perdagangan dan industri kreatif;
- d. Pengembangan infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, dan transportasi publik untuk mendukung kelancaran arus barang dan orang, serta mendorong investasi swasta;
- e. Meningkatkan kapasitas pemerintah daerah dan lembaga keuangan lokal untuk mengelola kebijakan ekonomi secara efektif, termasuk pengelolaan anggaran,

pemantauan pasar, dan penerapan regulasi yang mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan;

- f. Pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan keterampilan tenaga kerja lokal agar sesuai dengan kebutuhan pasar tenaga kerja, termasuk keterampilan dalam industri tekstil dan batik serta sektor-sektor ekonomi lainnya yang berkembang;
- g. Mendorong kewirausahaan lokal dengan menyediakan pendanaan, pelatihan, dan akses ke pasar bagi pengusaha kecil dan menengah. Ini dapat membantu meningkatkan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi;
- h. Pengelolaan yang berkelanjutan terhadap lingkungan dan sumber daya alam untuk mendukung pertumbuhan ekonomi jangka panjang tanpa merusak ekosistem lokal;

9. Peningkatan Kualitas Infrastruktur

Peningkatan kualitas infrastruktur dengan arah pembangunan (MB09) Infrastruktur perkotaan dan permukiman yang berkualitas yang diukur indikator pembangunan sebagai berikut:

Tabel II-114
Indikator Utama Pembangunan Peningkatan Kualitas Infrastruktur
Kota Pekalongan Tahun 2025-2029

Indikator Utama Pembangunan	Satuan	Baseline	Target 2029
38. Persentase Rumah Tangga dengan Akses Internet	persen	100	100
39. Rumah tangga:			
a). Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak	persen	81,92 (2023)	86,43
b). Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	persen	11,75	12,00
40. Persentase Panjang Jalan Kondisi Permukaan Mantap Kewenangan Kabupaten/Kota	persen	82,16 (2023)	86,62
41. Persentase Kelengkapan Jalan yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal pada Jalan Kabupaten/ Kota	persen	72,95	79,10
Catatan: Baseline dan target masih bersifat indikatif teknokratik			

Sumber : RPJPD Kota Pekalongan Tahun 2025-2045, 2025

Sasaran pembangunan peningkatan kualitas infrastruktur Kota Pekalongan dapat diwujudkan melalui intervensi program sebagai berikut:

- a. Pengelolaan sumber daya air, meliputi air permukaan, air tanah bebas, air tanah tertekan, termasuk pengendalian banjir dan rob;
- b. Pemantapan jalan dan jembatan sesuai standar merata di seluruh wilayah guna memperlancar distribusi barang dan jasa;
- c. Pembangunan jalan lingkar untuk memisahkan lalu lintas lokal dan regional serta mengoptimalkan tata ruang wilayah;
- d. Peningkatan keselamatan perjalanan transportasi, efisiensi sistem logistik untuk mendorong pertumbuhan sektor-sektor unggulan dan menjadi andalan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi serta pemantapan kualitas pelayanan transportasi terutama angkutan umum massal (termasuk di kawasan aglomerasi perkotaan dan lintas wilayah pengembangan) untuk meningkatkan konektivitas antarwilayah, serta penerapan transportasi ramah lingkungan;
- e. Penguatan pemenuhan dan pemerataan perumahan dan kawasan permukiman yang layak, terutama pengembangan secara vertikal;

- f. Pembangunan pusat pertumbuhan baru di Kota Pekalongan, sebagai upaya untuk penyediaan infrastruktur perkotaan yang berkualitas serta mampu menggerakkan perekonomian;
- g. Penguatan implementasi penataan ruang.

10. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup

Peningkatan kualitas lingkungan hidup dengan arah pembangunan (MB10) lingkungan hidup berkualitas, diukur dengan indikator pembangunan sebagai berikut:

Tabel II-115
Indikator Utama Pembangunan Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup
Kota Pekalongan Tahun 2025-2029

Indikator Utama Pembangunan	Satuan	Baseline	Target 2029
42. Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan	persen	36,16	40,00
43. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	indeks	64,14	64,24
44. Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah	persen	9,50	15,00
45. Kontribusi Penurunan Emisi GRK	Ton CO ₂ eq	950.947,74	4.239.510,90
Catatan: Baseline dan target masih bersifat indikatif teknokratik			

Sumber : RPJPD Kota Pekalongan Tahun 2025-2045, 2025

Sasaran pembangunan peningkatan kualitas lingkungan hidup Kota Pekalongan dapat diwujudkan melalui intervensi program sebagai berikut:

- a. Penguatan pengelolaan keanekaragaman hayati, pesisir dan laut yang berkelanjutan;
- b. Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
- c. Pengelolaan sampah terintegrasi hulu-hilir yang berbasis masyarakat;
- d. Penataan dan peningkatan ruang terbuka hijau seperti halnya alun-alun, taman kota, ataupun ruang terbuka hijau lainnya serta vegetasi tutupan lahan;
- e. Penguatan penyediaan air minum dan sanitasi yang aman bagi masyarakat.

2.7.2.5. Hasil Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kota Pekalongan

Berdasarkan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM Daerah) Kota Pekalongan Tahun 2025 – 2029, terdapat beberapa isu strategis KLHS yang dirumuskan berdasarkan beberapa pertimbangan yaitu isu tujuan pembangunan berkelanjutan, isu muatan lingkungan, hasil konsultasi publik, isu dokumen kebijakan lainnya. Berikut dijabarkan terkait perumusan isu strategis Kota Pekalongan untuk Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJM Daerah Tahun 2025-2029.

1. Belum meratanya akses pemenuhan kualitas hidup sumber daya manusia dan kesejahteraan masyarakat

Pemenuhan kualitas hidup untuk meningkatkan sumber daya manusia berupa pemenuhan kebutuhan dasar pendidikan dan kesehatan. Kesejahteraan masyarakat akan dapat dicapai jika kebutuhan dasar pendidikan dan kesehatan dapat terpenuhi dan berkualitas baik pemenuhan secara individu maupun secara keluarga. Dengan demikian dalam pencapaian kesejahteraan masyarakat harus diawali dengan pemenuhan kebutuhan dasar untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Jika kualitas sumber daya manusia dapat terpenuhi secara berkualitas maka diharapkan kemiskinan dapat dituntaskan dan kesejahteraan masyarakat dapat tercapai. Permasalahan

kesejahteraan masyarakat yang belum merata di Kota Pekalongan dipengaruhi oleh beberapa hal terkait akses pemenuhan untuk kualitas hidup sumber daya manusia yang belum merata.

Di **bidang kesehatan**, peningkatan derajat kesehatan mencakup pengendalian penyakit menular dan tidak menular seperti obesitas, tekanan darah tinggi, HIV, tuberkulosis, dan filariasis. Tren HIV meningkat dari 0,02 persen (2019) menjadi 0,84 persen (2022), sementara angka merokok mencapai 24,19 persen. Sarana kesehatan juga masih terbatas, dengan ketersediaan vaksin dan obat di puskesmas baru 81 persen, serta cakupan jaminan kesehatan yang belum 100 persen. **Bidang pendidikan**, rata-rata lama sekolah di Kota Pekalongan baru 9,2 tahun, masih di bawah target wajib belajar 12 tahun. Angka Partisipasi Kasar (APK) untuk PAUD, SD, dan SMP perlu ditingkatkan untuk mendorong kesetaraan pendidikan. Kemiskinan yang sempat meningkat akibat pandemi *Covid-19* mencapai 7 persen pada 2022 namun mulai pulih. **Bidang Perlindungan sosial** juga belum merata, termasuk jaminan kesehatan dan bantuan bagi kelompok rentan. Dari **aspek kesetaraan gender dan kependudukan**, keterwakilan perempuan di parlemen serta posisi pengambil keputusan masih rendah. Selain itu, penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) baru 18,07 persen, sehingga perlu upaya peningkatan untuk pengendalian penduduk.

2. Belum optimalnya pengelolaan sanitasi, sampah, dan air bersih

Peningkatan pencemaran air di Kota Pekalongan dipengaruhi oleh meningkatnya polutan yang masuk ke air permukaan maupun air tanah. Peningkatan polutan yang masuk ke dalam air permukaan dan air tanah tersebut disebabkan karena sebagian besar limbah domestik baik cair (air limbah) maupun padat (sampah) yang tidak terkelola dengan baik sehingga masuk ke badan air. Peningkatan pencemaran yang terjadi di air permukaan maupun air tanah dari sumur dangkal menyebabkan sumber daya air permukaan tidak bisa dimanfaatkan oleh Kota Pekalongan untuk menjadi sumber air baku.

Tantangan sanitasi semakin kompleks terutama di wilayah pesisir yang terdampak banjir rob, dengan banyaknya infrastruktur sanitasi yang rusak. Akses sanitasi aman juga masih perlu ditingkatkan, mengingat kualitas air permukaan terus menurun dari Indeks Kualitas Air (IKA) 46 pada 2018 menjadi 45,33 pada 2022 akibat pencemaran oleh limbah domestik, pertanian, dan industri.

Ketersediaan air di Kota Pekalongan masih bergantung pada air tanah, yang berdampak pada penurunan tanah di wilayah pesisir. Kualitas air permukaan yang tidak sesuai baku mutu memaksa Kota Pekalongan mengandalkan pasokan air dari Kabupaten Pekalongan dan Kabupaten Batang. Selain itu, pengelolaan sampah di Kota Pekalongan menghadapi kendala, terutama di TPA Degayu yang sudah mengalami kelebihan kapasitas. Penyediaan lahan TPA yang sesuai standar juga menjadi tantangan, sementara jumlah sampah terus meningkat seiring pertumbuhan penduduk. Oleh karena itu, diperlukan langkah strategis dalam pengelolaan limbah, sanitasi, dan penyediaan air bersih agar masalah lingkungan ini dapat teratasi secara berkelanjutan.

3. Peningkatan intensitas bencana banjir dan rob akibat perubahan iklim dan penataan ruang

Salah satu penyebab utama Peningkatan intensitas bencana banjir dan rob di Kota Pekalongan adalah penurunan muka tanah, terutama di wilayah Pantura, yang terjadi akibat karakteristik tanah lunak dengan ketebalan hingga 40 meter di bawah permukaan. Penurunan ini semakin tinggi ke arah utara, diperparah oleh aktivitas manusia seperti

pembebanan infrastruktur dan eksploitasi air tanah yang masif akibat keterbatasan sumber air permukaan. Dampak perubahan iklim juga berkontribusi terhadap permasalahan ini, dengan peningkatan muka air laut yang memperparah banjir rob serta meningkatkan kerentanan wilayah pesisir utara Kota Pekalongan.

Banjir dan rob menjadi bencana dengan intensitas kejadian tertinggi di Kota Pekalongan, khususnya di wilayah pesisir utara. Faktor geografis seperti ketinggian wilayah yang hanya 0-6 meter di atas permukaan laut, kemiringan lahan rendah, serta berkurangnya kawasan resapan air akibat padatnya bangunan turut memperburuk situasi. Pendangkalan sungai di wilayah hilir juga memperparah risiko banjir. Pada tahun 2022, banjir rob melanda tiga kecamatan, yaitu Pekalongan Utara, Pekalongan Timur, dan Pekalongan Barat, dengan luas area terdampak mencapai 357 hektar. Dampak dari bencana ini meliputi kerusakan lingkungan, kerugian ekonomi, serta gangguan terhadap kehidupan sosial masyarakat. Upaya mitigasi yang lebih strategis dan berkelanjutan diperlukan untuk mengurangi dampak bencana di Kota Pekalongan..

4. Belum optimalnya daya saing dan keberlanjutan sektor ekonomi unggulan daerah

Sektor ekonomi unggulan Kota Pekalongan, khususnya industri batik, menjadi tulang punggung perekonomian daerah dengan kontribusi signifikan terhadap sektor perdagangan jasa dan industri. Hampir setengah dari aktivitas ekonomi kota ini bergantung pada industri batik, baik dalam proses produksi maupun distribusi. Namun, daya saing sektor ini masih menghadapi berbagai tantangan, termasuk keterbatasan dalam diversifikasi ekonomi. Oleh karena itu, penguatan sektor lain seperti pariwisata menjadi penting untuk meningkatkan ketahanan ekonomi Kota Pekalongan. Selain itu, pertumbuhan industri batik juga berdampak pada keberlanjutan lingkungan, khususnya pencemaran air yang terjadi akibat limbah industri yang belum terkelola dengan optimal.

Limbah cair dari industri batik menjadi penyumbang terbesar pencemaran air di Kota Pekalongan, dengan volume limbah mencapai 4.371 m³/hari pada tahun 2022. Kapasitas Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) komunal yang tersedia belum mampu menampung seluruh limbah, sehingga banyak industri yang masih membuang limbah tanpa melalui proses pengolahan.

Selain tantangan lingkungan, akses keuangan bagi industri kecil dan menengah (IKM) juga menjadi kendala, terutama dalam layanan keuangan untuk UMKM serta keterbatasan proporsi kredit bagi sektor ini. Untuk meningkatkan daya saing dan keberlanjutan ekonomi, diperlukan strategi yang mencakup peningkatan akses keuangan, optimalisasi pengolahan limbah, serta pengembangan sektor ekonomi alternatif guna mengurangi ketergantungan pada industri batik.

5. Perlunya meningkatkan reformasi birokrasi dalam keamanan, pelayanan publik, dan kapasitas keuangan daerah

Reformasi birokrasi di Kota Pekalongan diperlukan untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, terutama dalam aspek keamanan, pelayanan publik, dan kapasitas keuangan daerah. Reformasi ini bertujuan untuk menciptakan birokrasi yang lebih adaptif terhadap dinamika perubahan, sehingga dapat memberikan pelayanan yang lebih efektif kepada masyarakat. Dalam aspek pelayanan publik, akses informasi masih perlu ditingkatkan, dengan publikasi data yang lebih luas dan peningkatan kepuasan konsumen terhadap layanan Badan Pusat Statistik (BPS).

Di bidang keuangan daerah, rasio penerimaan pajak terhadap PDB yang masih rendah, yakni 2,09 persen pada tahun 2022, menunjukkan perlunya optimalisasi sistem

akuntabilitas kinerja pemerintah. Selain itu, skema kerja sama antara pemerintah dan badan usaha (KPBU) perlu diperkuat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.

Dalam aspek keamanan dan penegakan hukum, tantangan yang dihadapi mencakup keberadaan kelompok masyarakat dengan ego sektoral berdasarkan paham masing-masing. Oleh karena itu, diperlukan strategi untuk memperkuat kerukunan sosial dan meningkatkan efektivitas penegakan hukum. Melalui reformasi birokrasi yang menyeluruh, Kota Pekalongan dapat mewujudkan pemerintahan yang lebih transparan, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

2.7.2.6. Hasil Telaahan RPJM Daerah Tahun 2025-2029 terhadap RPJM Daerah Sekitar

Kota Pekalongan berbatasan langsung dengan Kabupaten Pekalongan dan Kabupaten Batang. Dalam perumusan perencanaan pembangunan daerah, kedua kabupaten tersebut memiliki keterhubungan sehingga di dalam satu region dapat saling mendukung untuk pencapaian tujuan pembangunan daerah. Dokumen RPJM Daerah kedua kabupaten tersebut mempunyai visi dan misi yang sama-sama kuat dan mempunyai tujuan yang sama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam rangka pencapaian visi tersebut, mereka mempunyai misi yang sebagian lingkup besarnya adalah pertumbuhan ekonomi, pembangunan sumber daya manusia, pembangunan infrastruktur dan peningkatan kelembagaan pemerintahan.

Pada dokumen RPJM Daerah kedua kabupaten tersebut mempunyai tujuan/sasaran yang melingkupi cakupan permasalahan daerah masing-masing dengan poin penting berupa tujuan dan sasaran yang mengacu pada misi RPJM Daerah masing-masing daerah. Berikut ini adalah telaah masing-masing dokumen yang mempunyai agenda yang berhubungan dengan Kota Pekalongan:

1. RPJM Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2025-2029

Kota Pekalongan berbatasan langsung dengan Kabupaten Pekalongan pada wilayah Barat dan Selatan. Hubungan yang erat antara Kota Pekalongan dan Kabupaten Pekalongan terjadi karena hubungan sosial, budaya dan ekonomi antar wilayah yang tidak dapat dipisahkan karena saling terkait dan saling membutuhkan. Dalam sistem perkotaan nasional pun, Kota Pekalongan merupakan Pusat Kegiatan Wilayah (PKW), salah satu kawasan *hinterland*-nya adalah Kabupaten Pekalongan. Oleh karena itu, dibutuhkan tinjauan kebijakan Kabupaten Pekalongan karena dapat berimplikasi terhadap kebijakan pembangunan Kota Pekalongan. RPJM Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2025-2029 yang disusun berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP Daerah) Tahun 2025-2045. Isu strategis pembangunan Kabupaten Pekalongan Tahun 2025-2029 meliputi:

1. Optimalisasi potensi ekonomi lokal didukung pengembangan sektor industri kreatif, pariwisata, dan UMKM untuk meningkatkan daya saing daerah serta kesejahteraan masyarakat Kabupaten Pekalongan.
2. Pembangunan Kualitas Sumberdaya Manusia, Penguatan kohesi sosial dan peningkatan kualitas hidup masyarakat yang merata serta inklusif.
3. Pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan, adaptasi terhadap perubahan iklim dan ketahanan terhadap bencana.
4. Pembangunan infrastruktur wilayah yang berkualitas dan merata.
5. Reformasi birokrasi, pelayanan publik dan pemanfaatan IPTEK.

Visi pembangunan Bupati dan Wakil Bupati Pekalongan tahun 2025-2030 adalah **“Kabupaten Pekalongan Maju, Adil, dan Sejahtera”**. Untuk mencapai visi tersebut, maka disusun misi pembangunan sebagai berikut:

1. Memperkuat kualitas sumber daya manusia (SDM) warga Kabupaten Pekalongan.
2. Menuntaskan pembangunan dan penyediaan infrastruktur yang merata dan berkualitas.
3. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan UMKM yang berdaya saing.
4. Memperkuat ketahanan bencana dan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan.
5. Menguatkan implementasi tata kelola pemerintahan yang melayani.

Untuk mewujudkan visi dan misi tersebut maka dirumuskan arah kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2025-2029 disajikan dalam tabel berikut.

Tabel II-116
Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Pekalongan Tahun 2025-2029

No	Misi	Arah Kebijakan
1	Memperkuat kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Kabupaten Pekalongan.	- Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan layanan kesehatan yang berkualitas dan merata - Meningkatkan aksesibilitas dan distribusi Pangan Beragam Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA) - Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan yang unggul dan berdaya saing - Meningkatkan daya saing kepemudaan dan olahraga - Meningkatkan pelestarian seni dan budaya daerah - Meningkatkan kualitas pembangunan keluarga, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak - Meningkatkan kualitas pengendalian kependudukan yang didukung dengan data administrasi yang valid untuk mendukung kinerja sasaran pembangunan
2	Menuntaskan pembangunan dan penyediaan infrastruktur yang merata dan berkualitas.	- Meningkatkan Keberkelanjutan penanganan infrastruktur wilayah - Menyediakan kebutuhan tanah untuk menunjang pembangunan daerah dan mendukung reforma agraria - Meningkatkan kualitas penataan perumahan dan kawasan permukiman - Meningkatkan konektivitas layanan transportasi
3	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan UMKM yang berdaya saing.	- Meningkatkan kontribusi sektor PDRB dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang berdaya saing, inklusif, dan berkelanjutan - Meningkatkan kinerja BUMD dan investasi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi daerah - Meningkatkan peran desa sebagai pendorong pembangunan dan perekonomian daerah - Meningkatkan ketentraman dan ketertiban wilayah - Meningkatkan peran lembaga keuangan daerah dalam mendukung pembiayaan ekonomi lokal dan pengembangan sektor produktif - Meningkatkan penyerapan tenaga kerja dan pengurangan pengangguran di masyarakat - Meningkatkan penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)

No	Misi	Arah Kebijakan
		- Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam program transmigrasi untuk mendukung pengurangan kemiskinan
4	Memperkuat ketahanan bencana dan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan	- Meningkatkan ketangguhan menghadapi risiko bencana - Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan
5	Menguatkan implementasi tata kelola pemerintahan yang melayani.	- Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang inovatif, adaptif dan berintegritas - Meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang bermartabat - Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah yang didukung dengan ketersediaan data statistik yang valid - Meningkatkan kualitas pengelolaan SDM Aparatur - Meningkatkan kualitas pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan akuntabel - Meningkatkan kualitas tata kelola keuangan dan barang milik pemerintah daerah - Meningkatkan peran kecamatan dalam mendukung pembangunan dan pembinaan desa

Sumber: RPJM Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2025-2029, 2025

2. RPJM Daerah Kabupaten Batang Tahun 2025-2029

Kota Pekalongan berbatasan langsung dengan Kabupaten Batang pada wilayah Timur dan Selatan. Hubungan yang erat antara Kota Pekalongan dan Kabupaten Batang terjadi karena hubungan sosial, budaya dan ekonomi antarwilayah yang tidak dapat dipisahkan karena saling terkait dan saling membutuhkan. Dalam sistem perkotaan nasional pun, Kota Pekalongan merupakan Pusat Kegiatan Wilayah (PKW), salah satu kawasan *hinterland*-nya adalah Kabupaten Batang. Oleh karena itu, dibutuhkan tinjauan kebijakan Kabupaten Batang karena dapat berimplikasi terhadap kebijakan pembangunan Kota Pekalongan. RPJM Daerah Kabupaten Batang Tahun 2025-2029 disusun berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP Daerah) Kabupaten Batang Tahun 2025-2045. Isu strategis RPJM Daerah Kabupaten Batang Tahun 2025-2029 yaitu:

1. Kualitas Sumber Daya Manusia dan daya Saing Tenaga Kerja
2. Pengentasan Kemiskinan
3. *Clean Industrial City*
4. Degradasi lingkungan dan dampak perubahan iklim
5. Konektivitas wilayah dalam mendukung daya saing daerah
6. Pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan merata berbasis industri dan pariwisata
7. Tata Kelola Pemerintahan yang bersih, profesional, dan inovatif
8. Ketahanan pangan yang berkelanjutan
9. Stabilitas dan Kondusivitas Wilayah

Visi pembangunan Bupati dan Wakil Bupati Batang Tahun 2025-2030 adalah **“Terwujudnya Kabupaten Batang Yang Mandiri dan Berdaya Saing Menuju Indonesia Emas 2045”**. Untuk mencapai visi tersebut, maka disusun misi pembangunan sebagai berikut:

1. Mewujudkan masyarakat Batang yang agamis, berbudaya dan harmonis
2. Mewujudkan sdm yang berdaya saing melalui peningkatan kualitas kesehatan dan pendidikan masyarakat secara menyeluruh
3. Menjadikan Batang sebagai pusat industri dan mendukung hilirisasi berbasis alih teknologi yang ramah lingkungan
4. Akselerasi ekonomi
5. Meningkatkan pemerataan dan interkoneksi infrastruktur sampai ke pelosok desa
6. Mewujudkan batang yang tangguh dan berkelanjutan
7. Percepatan penurunan kemiskinan yang inklusif, merata dan berorientasi pada keadilan sosial
8. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional, adaptif, inovatif, dan berintegritas

Untuk mewujudkan visi dan misi tersebut maka dirumuskan arah kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Batang Tahun 2025-2029 sebagai berikut.

Tabel II-117
Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Batang Tahun 2025-2029

No	Misi	Arah Kebijakan
1.	Mewujudkan masyarakat Batang yang agamis, berbudaya dan harmonis	- Penguatan modal sosial untuk kesadaran hukum, ketenteraman dan ketertiban umum serta memelihara nilai-nilai kebudayaan
2.	Mewujudkan sdm yang berdaya saing melalui peningkatan kualitas kesehatan dan pendidikan masyarakat secara menyeluruh	- Meningkatkan akses dan pemerataan kualitas pendidikan dan kesehatan - Peningkatan daya saing tenaga kerja dan pembangunan kepemudaan; - Mendorong kolaborasi dengan sektor swasta dan lembaga-lembaga pendidikan dalam penyediaan tenaga kerja;
3.	Menjadikan Batang sebagai pusat industri dan mendukung hilirisasi berbasis alih teknologi yang ramah lingkungan	- Pengembangan program konservasi tanah dan air untuk melindungi kualitas tanah dan mendukung pembangunan berkelanjutan - Penerapan prinsip Circular Economy dalam mendukung pembangunan berkelanjutan - Penguatan perlindungan terhadap ekosistem - Mendorong pengembangan industri ramah lingkungan dalam mendukung clean industrial city
4.	Akselerasi ekonomi	- Mengoptimalkan potensi alam dan budaya Batang untuk menjadi daya tarik wisata utama dengan memanfaatkan peluang pengembangan sektor pariwisata yang berkelanjutan - Pengembangan inovasi dan ekonomi kreatif daerah
5.	Meningkatkan pemerataan dan interkoneksi infrastruktur sampai ke pelosok desa	- Meningkatkan pembangunan infrastruktur dalam mendukung konektivitas antar wilayah serta pengembangan sektor perdagangan dan jasa; - Pengembangan dan penetapan zonasi kawasan ekonomi dan infrastruktur yang berfokus pada sektor unggulan
6.	Mewujudkan batang yang tangguh dan berkelanjutan	- Penguatan sektor pertanian dalam meningkatkan produktivitas dan ketahanan pangan, serta merespons tren pasar produk pertanian yang lebih efisien dan berkelanjutan.

No	Misi	Arah Kebijakan
		- Peningkatan kemandirian masyarakat untuk mencapai kesejahteraan dan pembangunan yang berkelanjutan
7.	Percepatan penurunan kemiskinan yang inklusif, merata dan berorientasi pada keadilan sosial	- Penguatan modal sosial untuk kesadaran hukum, ketenteraman dan ketertiban umum serta memelihara nilai-nilai kebudayaan - Pembangunan sosial masyarakat yang inklusif dengan memastikan pemenuhan hak anak, menjamin kesetaraan gender dalam pembangunan, serta memperkuat ketahanan keluarga - Pengentasan kemiskinan berbasis desa melalui pemberdayaan potensi ekonomi lokal dan peningkatan sistem perlindungan sosial bagi kelompok miskin dan rentan; - Penguatan kolaborasi multisektor dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat
8.	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional, adaptif, inovatif, dan berintegritas	- Penguatan tata kelola pemerintahan yang dinamis, responsif dan inovatif - Memperluas alternatif sumber pendanaan serta Mendorong kemitraan publik-swasta (PPP) dalam proyek pembangunan infrastruktur

Sumber: RPJM Daerah Kabupaten Batang Tahun 2025-2029, 2025

2.7.2.7. Isu-Isu Strategis Kota Pekalongan

Berangkat dari berbagai permasalahan daerah, isu global, isu nasional, isu strategis Provinsi Jawa Tengah serta isu strategis dokumen perencanaan Kota Pekalongan maka dirumuskan isu strategis pembangunan daerah Kota Pekalongan melalui berbagai pertimbangan di antaranya memiliki pengaruh yang besar terhadap pencapaian sasaran Pembangunan Nasional, merupakan tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah, luasnya dampak yang ditimbulkan terhadap daerah dan masyarakat, memiliki daya ungkit terhadap pembangunan daerah, dan kemudahan untuk dikelola. Adapun isu strategis tersebut adalah sebagai berikut.

1. Tata Kelola Pemerintahan

Tuntutan tata kelola pemerintahan dalam era global adalah mampu mengikuti perkembangan teknologi informasi yang sangat cepat dan menembus batas. Kemajuan teknologi informasi yang demikian pesat serta potensi pemanfaatannya secara luas, membuka peluang bagi pengaksesan, pengelolaan, dan pendayagunaan informasi dalam volume yang lebih besar secara cepat dan akurat. Kenyataan telah menunjukkan bahwa penggunaan media elektronik merupakan faktor yang sangat penting dalam berbagai transaksi internasional, terutama dalam transaksi perdagangan, sehingga pemerintah harus mampu memberikan informasi yang komprehensif kepada masyarakat internasional agar tidak terjadi kesalahpahaman yang dapat meletakkan bangsa Indonesia pada posisi yang serba salah. Ketidakmampuan menyesuaikan diri dengan kecenderungan global tersebut akan membawa masyarakat ke dalam jurang *digital divide*, yaitu keterisolasian dari perkembangan global karena tidak mampu memanfaatkan informasi. Dengan demikian pemerintah harus segera melaksanakan proses transformasi menuju *e-government*. Melalui proses transformasi tersebut, pemerintah dapat mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi untuk mengeliminasi sekat-sekat organisasi birokrasi, serta membentuk jaringan sistem

manajemen dan proses kerja yang memungkinkan instansi-instansi pemerintah bekerja secara terpadu untuk menyederhanakan akses ke semua informasi dan layanan publik yang harus disediakan oleh pemerintah. *e-Government* adalah pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses pemerintahan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan pelayanan publik.

Isu strategis tata kelola pemerintahan didasarkan pada kondisi bahwa tata kelola pemerintahan Kota Pekalongan menunjukkan belum optimalnya implementasi tata kelola pemerintahan digital yang akuntabel, transparan, berintegritas, tangkas dan kolaboratif. Berdasarkan kondisi tersebut, maka Pemerintah Kota Pekalongan secara konsisten terus melaksanakan reformasi birokrasi. Pada dasarnya, reformasi birokrasi ditujukan untuk menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik, berintegrasi, berkinerja tinggi, bebas dan bersih KKN, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara. Berbagai permasalahan/hambatan yang mengakibatkan sistem penyelenggaraan pemerintahan tidak berjalan atau diperkirakan tidak akan berjalan dengan baik harus ditata ulang atau diperharui. Reformasi birokrasi dilaksanakan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Dengan kata lain, reformasi birokrasi adalah langkah strategis untuk membangun aparatur negara agar lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam mengemban tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional. Selain itu dengan sangat pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi informasi dan komunikasi serta perubahan lingkungan strategis menuntut birokrasi pemerintahan untuk direformasi dan disesuaikan dengan dinamika tuntutan masyarakat. Oleh karena itu harus segera diambil langkah-langkah yang bersifat mendasar, komprehensif, dan sistematis, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan efektif dan efisien. Reformasi di sini merupakan proses pembaharuan yang dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan, sehingga tidak termasuk upaya dan/atau tindakan yang bersifat radikal dan revolusioner.

Tata kelola (*governance*) tidak dapat dilepaskan dari prinsip-prinsip dasar penyelenggaraan pemerintahan yang baik, yaitu transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas sebagai unsur utama. Terminologi *good governance* memang belum baku, tetapi sudah banyak definisi yang coba membedah makna dari *good governance*. Namun demikian, tidak dapat disangkal lagi bahwa *good governance* telah dianggap sebagai elemen penting untuk menjamin kesejahteraan nasional (*national prosperity*). Dengan cara meningkatkan akuntabilitas, reliabilitas (kehandalan), dan pengambilan kebijakan, yang diperkirakan di dalam organisasi pemerintah, korporasi (sektor swasta), bahkan dalam organisasi masyarakat sipil. Komisi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (*UN Commission on Human Rights*) mengidentifikasi beberapa prinsip yakni transparansi, pertanggungjawaban (*responsibility*), akuntabilitas, partisipasi, dan ketanggapan (*responsiveness*) sebagai prinsip kunci *good governance*.

Dari berbagai definisi dan prinsip-prinsip *good governance* tersebut, indikator penilaian di dalam dokumen ini mengambil prinsip Transparansi, Partisipasi, Akuntabilitas dan Koordinasi sebagai faktor kunci penilaian. Keempat prinsip kunci inilah kemudian digunakan sebagai dasar penilaian yang dilihat dari sisi landasan hukum, aktor dan implementasinya. Pemilihan keempat prinsip *good governance* dalam indikator bukan untuk tujuan simplifikasi, melainkan untuk memudahkan identifikasi persoalan melalui pengelompokan indikator-indikator berdasarkan prinsip minimum tercapainya tata kelola yang baik.

Pertama, **Transparansi**, adalah proses keterbukaan untuk menyampaikan aktivitas yang dilakukan sehingga pihak luar (termasuk masyarakat lokal/adat, pelaku usaha, maupun instansi pemerintah lain) dapat mengawasi dan memperhatikan aktivitas tersebut. Memfasilitasi akses informasi merupakan hal yang terpenting untuk menginformasikan dan mendorong partisipasi masyarakat. Komponen transparansi mencakup komprehensifnya informasi, ketepatan waktu dalam pelayanan informasi, ketersediaan informasi bagi publik, dan adanya upaya untuk memastikan sampainya informasi kepada kelompok rentan.

Kedua, **Partisipasi (inklusifitas)**, adalah proses pelibatan pemangku kepentingan (*stakeholder*) seluas mungkin dalam pembuatan kebijakan. Masukan yang beragam dari berbagai pihak dalam proses pembuatan kebijakan dapat membantu pembuat kebijakan untuk mempertimbangkan berbagai persoalan, perspektif, dan opsi-opsi alternatif dalam menyelesaikan suatu persoalan. Proses partisipasi membuka peluang bagi pembuat kebijakan untuk mendapatkan pengetahuan baru, mengintegrasikan harapan publik kedalam proses pengambilan kebijakan, sekaligus mengantisipasi terjadinya konflik sosial yang mungkin muncul. Komponen yang menjamin akses partisipasi mencakup, tersedianya ruang formal melalui forum-forum yang relevan, adanya mekanisme untuk memastikan partisipasi publik, proses yang inklusif dan terbuka, dan adanya kepastian masukan dari publik akan diakomodir di dalam penyusunan kebijakan.

Ketiga, **Akuntabilitas**, adalah mekanisme tanggung-gugat antara pembuat kebijakan dengan stakeholder yang dilayani. Adanya mekanisme akuntabilitas memberikan kesempatan kepada stakeholder untuk meminta penjelasan dan pertanggungjawaban apabila terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan konsesus dalam pelaksanaan tata kelola pemerintahan. Di dalam dokumen indikator tata kelola, akses kepada keadilan (*access to justice*) dikategorikan sebagai bagian dari mekanisme akuntabilitas.

Keempat, **Koordinasi**, adalah mekanisme yang memastikan sejauhmana pihak-pihak lain (khususnya institusi pemerintah) yang memiliki kepentingan dan memiliki kesamaan tujuan yang tercermin di dalam program kerjanya, umumnya persoalan minimnya koordinasi menjadi faktor utama yang menyebabkan tidak efisiensi dan efektifnya tata kelola pemerintahan.

Berdasarkan kajian teoritik dan permasalahan pembangunan, isu strategis tata kelola pemerintahan menjadi pilihan tepat karena dengan perwujudan tata pemerintahan yang baik maka akan dapat semakin menjamin terwujudnya visi pembangunan jangka panjang Kota Pekalongan tahun 2045. Urgensi isu strategis tata kelola pemerintahan, didasarkan atas belum optimalnya implementasi tata kelola pemerintahan digital yang akuntabel, transparan, berintegritas, tangkas dan kolaboratif di lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan.

Belum optimalnya implementasi tata kelola pemerintahan digital yang akuntabel, transparan, berintegritas, tangkas dan kolaboratif di lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan, dapat didasarkan atas identifikasi masalah yang dihadapi selama ini, meliputi: 1). Belum optimalnya implementasi sistem akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah; 2). Belum optimalnya pengelolaan keuangan daerah; 3). Belum optimalnya penguatan integritas dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih; dan 4). Belum optimalnya pelayanan publik pemerintahan baik pada tingkat Kota ataupun tingkat Perangkat Daerah.

1. Belum optimalnya implementasi sistem akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah, ditandai dengan peningkatan nilai SAKIP Kota Pekalongan tahun 2020-2024 yang

belum optimal. Penguatan Akuntabilitas Kinerja terus dilaksanakan dengan peningkatan implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dari tahun ke tahun Nilai Akuntabilitas Kota Pekalongan terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2020 Nilai SAKIP Kota Pekalongan adalah 73,07 dengan predikat BB, meningkat menjadi 73,16 pada tahun 2021 dengan predikat BB. Mulai tahun 2022 digunakan sistem penghitungan yang berbeda. Pada tahun 2022 memiliki nilai SAKIP 73,31 dengan predikat BB dan pada tahun 2024 menjadi 73,02 dengan predikat BB. Capaian menurun tersebut harus dioptimalkan agar dapat mencapai predikat yang semakin baik, yaitu ditandai dengan semakin meningkatnya akuntabilitas kinerja secara terus-menerus.

2. Belum optimalnya pengelolaan keuangan daerah. Dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2014, Pemerintah Kota Pekalongan belum mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Kondisi ini menuntut kerja bersama segenap elemen Pemerintah Kota Pekalongan agar dapat memperoleh Opini WTP pada tahun berikutnya. Upaya ini membuahkan hasil, dimana pada tahun 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 dan 2024, sehingga dalam sepuluh tahun terakhir secara berturut-turut Pemerintah Kota Pekalongan mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK. Meskipun demikian, capaian tersebut harus terus dilakukan optimalisasi karena masih terdapat permasalahan terkait pengelolaan keuangan daerah.
3. Belum optimalnya penguatan integritas dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih diukur dengan Indeks Integritas Nasional. Walaupun capaian nilai SPI / IIN Kota Pekalongan dalam kurun waktu tahun 2021-2024 cenderung meningkat, dimana pada tahun 2024 sebesar 82,25 dengan kategori TERJAGA, lebih tinggi dari capaian Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 sebesar 79,47, lebih tinggi jika dibandingkan dengan kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah, dan bahkan untuk tipe kota kecil, IIN Kota Pekalongan menempati posisi terbaik tingkat nasional, namun upaya menjaga integritas tetap harus dilakukan. Upaya mewujudkan birokrasi yang bersih, akuntabel, pelayanan publik yang prima menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) menjadi isu penting dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme.
4. Belum optimalnya pelayanan publik pemerintahan baik pada tingkat Kota ataupun tingkat Perangkat Daerah, pada umumnya ditandai dengan Indeks Pelayanan Publik (IPP) dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Indeks Pelayanan Publik (IPP) alat ukur yang digunakan untuk menilai kinerja pelayanan publik di lingkungan pemerintah daerah di Indonesia. IPP Kota Pekalongan terus mengalami peningkatan sehingga pada tahun 2024 sebesar 4,59 lebih tinggi dari IPP Provinsi Jawa Tengah sebesar 4,53. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya. Data IKM menunjukkan bahwa hingga saat ini nilai IKM OPD belum semuanya memiliki status “baik sekali”. Oleh karena itu, pelayanan publik pemerintahan harus secara terus-menerus dioptimalkan.

Dalam RPJP Nasional, transformasi tata kelola ini merupakan landasan untuk transformasi Indonesia. Artinya, optimalnya akuntabilitas, transparansi dan partisipasi masyarakat serta penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik merupakan salah satu landasan atau prasyarat untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045.

Dikaitkan dengan isu global, Tata Kelola Pemerintahan juga menjadi fokus dan tujuan pembangunan berkelanjutan yaitu menguatkan masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua, dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel dan inklusif di semua tingkatan. Oleh karena itu, tata kelola pemerintahan harus terus dioptimalkan dalam rangka melayani kepentingan masyarakat.

2. Kualitas Sumber Daya Manusia

Di era globalisasi dan persaingan ekonomi yang semakin ketat, pengembangan sumber daya manusia menjadi salah satu kunci keberhasilan pembangunan ekonomi suatu negara. Oleh karena itu, pengembangan sumber daya manusia harus menjadi prioritas utama dalam agenda pembangunan nasional. Dengan pengembangan sumber daya manusia, suatu negara dapat mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Urgensi pembangunan sumber daya manusia menjadi faktor kunci dalam memenangkan persaingan global, yang membawa konsekuensi semakin ketatnya persaingan ditengah ketidakpastian, langkah strategis ini sudah selayaknya mendapatkan dukung penuh dari seluruh pemangku kepentingan. Penguatan sumber daya manusia menuju manusia unggul memiliki korelasi yang erat dengan peningkatan produktivitas kerja, dalam memenangkan persaingan di tengah perubahan-perubahan yang berlangsung sangat cepat dalam dunia bisnis, ekonomi politik dan budaya. Di tengah gejolak ekonomi dunia yang semakin bersaing, Indonesia dituntut untuk tetap konsisten menaikkan angka pertumbuhan ekonomi, guna menjawab masalah peningkatan kesejahteraan rakyat. Hal ini berbarengan dengan derasnya harapan untuk menjadikan Indonesia sebagai negara maju dengan potensi bonus demografi dan anugerah sumber daya alam. Harapan ini tidaklah berlebihan bila melihat capaian pembangunan yang telah berhasil diraih oleh bangsa Indonesia dalam waktu akhir-akhir ini, dan juga beberapa prediksi lembaga survei asing, yang memproyeksikan Indonesia akan sejajar dengan Cina dan Amerika Serikat sebagai negara dengan ekonomi terbesar di dunia pada tahun 2030.

Indonesia juga memiliki berbagai aspek potensial yang dapat menjadi ‘senjata ampuh’ bila kita mampu mentransformasikannya menjadi potensi yang berkontribusi positif terhadap pencapaian Indonesia unggul, utamanya dalam mewujudkan impian besar para pendiri bangsa akan peningkatan kesejahteraan rakyat. Pembangunan sumber daya manusia menjadi tantangan tersendiri bagi bangsa Indonesia bila mencermati data yang dikeluarkan Bank Dunia, dimana pada tahun 2018 Bank Dunia menyebutkan bahwa kualitas SDM Indonesia berada di peringkat 87 dari 157 negara. Sementara itu, di tahun yang sama, *Business World* memaparkan bahwa peringkat daya saing SDM Indonesia berada di ranking 45 dari 63 negara. Peringkat ini masih kalah dari dua negara tetangga yaitu Singapura dan Malaysia yang masing-masing berada di peringkat 13 dan 22. Oleh karena itu pilihan strategi pembangunan dengan fokus utama pembangunan sumber daya manusia sangat tepat untuk menjawab tantangan bagi Indonesia, mengingat Indonesia saat ini berada dalam periode Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) yang menuntut sumber daya manusia Indonesia yang terampil dan unggul agar memiliki daya saing yang tinggi sehingga memiliki kontribusi dalam pembangunan bangsa.

Isu strategis kualitas sumber daya manusia selaras dengan isu global pembangunan berkelanjutan, yaitu 1) menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata; 2) meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua; serta 3) menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk

semua usia. Isu strategis kualitas sumber daya manusia harus didorong karena dapat menjadi pengungkit dalam upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia Kota Pekalongan secara berkelanjutan.

Sampai dengan saat ini, Kota Pekalongan memiliki nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terendah dibandingkan kota lainnya di Jawa Tengah dan bahkan beberapa kabupaten memiliki IPM yang lebih tinggi dibandingkan Kota Pekalongan. Hal ini tentunya sangat memprihatinkan dan menjadi tantangan pembangunan ke depan. Kota Pekalongan dengan luas wilayah dan kekayaan sumber daya alam yang sangat terbatas, meletakkan sumber daya manusia sebagai modal utama untuk terus berkembang.

Dalam konteks Kota Pekalongan, kualitas sumber daya manusia sangat penting untuk terus ditingkatkan, untuk mendukung terwujudnya generasi Kota Pekalongan menjadi yang unggul, sehingga mampu memperbaiki ekonomi keluarganya. Generasi unggul tersebut minimal harus didukung dengan sistem pendidikan yang layak dan inklusif serta sistem pelayanan kesehatan yang optimal dan dapat diakses oleh seluruh masyarakat.

Isu strategis kualitas sumber daya manusia menjadi sangat relevan untuk diangkat karena berbagai pertimbangan tersebut di atas. Kota Pekalongan yang merupakan salah satu anggota Jejaring Kota Kreatif Dunia dan perekonomian daerah sangat ditopang oleh budaya batik maka sangat membutuhkan pembangunan sumber daya manusia ini. Isu kualitas sumber daya manusia didasarkan atas beberapa permasalahan, meliputi: 1) belum optimalnya penyediaan akses dan kualitas mutu pendidikan serta kesadaran bersekolah; 2) belum optimalnya implementasi pendidikan karakter dan pendidikan keagamaan; serta 3) belum optimalnya upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat.

Pembangunan pendidikan di Kota Pekalongan belum mencapai hasil yang optimal, hal ini dapat dibuktikan dengan belum meratanya akses dan kualitas pendidikan serta belum optimalnya partisipasi *stakeholder* pendidikan. Akses pendidikan yang belum merata ditandai dengan kesempatan pendidikan belum merata dirasakan seluruh masyarakat Kota Pekalongan, hal ini dikarenakan masing-masing memiliki kesempatan yang berbeda terhadap pendidikan. Kesempatan yang berbeda tersebut diakibatkan pemahaman pentingnya pendidikan maupun kondisi sosial ekonomi masyarakat yang berbeda. Kesempatan pendidikan yang belum merata ini, dapat diukur dengan APK (Angka Partisipasi Kasar) SMP/MTS/ sederajat dan SMA/SMK/MA/ sederajat Kota Pekalongan yang tertinggal dibandingkan APK Provinsi Jawa Tengah dalam beberapa tahun terakhir. Untuk APK SD/MI/ sederajat relatif sama antara Kota Pekalongan dan Provinsi Jawa Tengah. Angka rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah, sebagai pembentuk Indeks Pembangunan Manusia, pun belum memiliki capaian yang optimal. Capaian Kota Pekalongan masih tertinggal dibandingkan kota-kota lain di Provinsi Jawa Tengah. Kondisi ini pada akhirnya mencerminkan kondisi kualitas pendidikan yang belum merata dan partisipasi *stakeholder* pendidikan yang belum optimal, termasuk belum optimalnya kesadaran masyarakat (=siswa, orang tua dan masyarakat) tentang pentingnya bersekolah. Ketika kesadaran tersebut belum optimal maka sebagian masyarakat masih berpandangan bahwa bersekolah tidak memiliki manfaat bagi masa depan anak-anaknya, apalagi untuk pembentukan generasi unggul di masa depan. Pada dasarnya, pendidikan merupakan tanggung jawab pemerintah, sekolah maupun masyarakat dan orang tua. Selama ini, berkembang pemahaman bahwa pendidikan hanyalah merupakan tanggung jawab pemerintah dan sekolah semata.

Globalisasi yang ditandai dengan perkembangan teknologi informasi, berimplikasi terhadap penyebaran data dan informasi serba cepat, sehingga secara langsung maupun tidak langsung akan berpengaruh terhadap masyarakat di belahan dunia manapun. Derasnya arus informasi tersebut sangat berpengaruh terhadap tatanan sosial budaya yang selama ini telah menjadi patron. Perubahan sikap, cara pandang, maupun perilaku yang menuju terhadap hal-hal yang berkonotasi negatif, diakibatkan oleh karakter masyarakat yang belum kuat. Tentunya hal ini, salah satunya disebabkan oleh lemahnya pendidikan karakter dan pendidikan keagamaan. Data sekolah di Kota Pekalongan yang mengimplementasikan pendidikan keagamaan dan pendidikan karakter telah mencapai 100 persen namun lemahnya pendidikan karakter ini masih menjadi tantangan pembangunan yang harus diselesaikan ke depan. Apakah pendidikan karakter dan pendidikan keagamaan tersebut belum diimplementasikan dengan sebaik-baiknya ataukah derasnya arus informasi negatif yang menyebabkan perubahan sikap, cara pandang, maupun perilaku yang menuju terhadap hal-hal yang berkonotasi negatif? Menjadi tantangan ke depan bahwa pendidikan karakter dan pendidikan keagamaan harus memberikan *outcome*, manfaat maupun dampak yang signifikan bagi pembentukan karakter generasi unggul Kota Pekalongan yang akan datang.

Di samping permasalahan pendidikan, Kota Pekalongan juga masih memiliki permasalahan kesehatan yang mendasar, yaitu belum optimalnya upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Belum optimalnya upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat tersebut, salah satunya diwujudkan dengan masih rendahnya pemahaman dan perilaku hidup sehat. Perwujudan dari masih rendahnya pemahaman dan perilaku hidup sehat tersebut meliputi: 1) AKB, angka kematian bayi, yang masih berfluktuasi dari tahun ke tahun dan pada tahun 2024 masih memiliki nilai 10,89 per 1.000 kelahiran hidup; 2) AKABA, angka kematian balita, yang masih berfluktuasi dan belum menurun secara optimal serta pada tahun 2024 adalah 16,08 per kelahiran hidup dan angka yang lebih tinggi dibandingkan Provinsi Jawa Tengah; 3) AKI, angka kematian ibu, yang masih berfluktuasi dari tahun ke tahun dan pada tahun 2024 masih bernilai 129,70 per 100.000 kelahiran hidup; 4) Angka kesakitan yang cenderung meningkat dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2024 dan pada tahun 2024 memiliki angka 15,29 persen; dan 5) Prevalensi balita *stunting* yang masih berfluktuasi dan pada tahun 2024 masih memiliki angka 17,63 persen. Dari data indeks keluarga sehat (IKS) pun, angka yang dicapai Kota Pekalongan masih sangat jauh dari ideal, meskipun memiliki kecenderungan meningkat dari tahun ke tahun. Ideal IKS adalah 0,8 dan capaian IKS Kota Pekalongan pada tahun 2024 adalah 0,38.

3. Perekonomian Daerah yang Berdaya Saing

Melihat berbagai permasalahan dalam perekonomian daerah, isu-isu global, nasional, regional dan telaah dokumen perencanaan Kota Pekalongan, isu strategis yang diangkat adalah Perekonomian Daerah yang Berdaya Saing. *Sustainable Development Goals (SDGs)* atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) adalah kesepakatan pembangunan berkelanjutan berdasarkan hak asasi manusia (HAM) dan kesetaraan. TPB merupakan komitmen bersama untuk mencapai kesejahteraan masyarakat sekaligus tetap melestarikan lingkungan. TPB memiliki tiga prinsip utama yaitu universal, integrasi, dan inklusif untuk meyakinkan bahwa tidak ada satu pun yang tertinggal atau *no one left behind*. Di dalam SDGs terdapat 17 tujuan dengan 169 target. Masing-masing tujuan memiliki makna dan target yang diharapkan dapat tercapai pada 2030. Tujuan ke-8 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) adalah mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, inklusif dan berkelanjutan, lapangan kerja penuh dan produktif serta pekerjaan yang layak untuk semua. Target-targetnya meliputi mempertahankan pertum

buhan ekonomi per kapita; mencapai tingkat produktivitas ekonomi lebih tinggi; menggalakkan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif; penciptaan lapangan kerja layak; mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha kecil dan menengah (UKM); mengurangi proporsi usia muda yang tidak bekerja; tidak menempuh pendidikan atau pelatihan (NEET, *Not in Education, Employment, or Training*); mempromosikan pariwisata berkelanjutan; memperkuat lembaga keuangan. Isu strategis peningkatan nilai tambah produk unggulan daerah memiliki kaitan yang sangat erat dengan TPB dan merupakan upaya untuk mewujudkan tujuan ke-8 TPB tersebut.

Isu strategis perekonomian daerah yang berdaya saing juga selaras dengan isu global perkembangan teknologi informasi, Misi ke-2 RPJP Nasional berkaitan dengan Transformasi Ekonomi dengan arah kebijakan IPTEK, Inovasi dan Produktivitas Ekonomi, Transformasi Digital, Integrasi Ekonomi Domestik dan Digital serta Perkotaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi. Provinsi Jawa Tengah juga menempatkan perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan sebagai isu strategis RPJP Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Kota Pekalongan sangat berkepentingan untuk mewujudkan perekonomian daerah yang berdaya saing, karena menjadi salah satu pengungkit dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Isu strategis perekonomian daerah yang berdaya saing merupakan upaya berkesinambungan dalam mewujudkan peningkatan nilai tambah produk unggulan daerah. Isu strategis ditujukan untuk meningkatkan nilai tambah (*value added*) produk unggulan Kota Pekalongan secara optimal. Terdapat beberapa masalah yang juga menjadi penyebab pentingnya perekonomian daerah yang berdaya saing, meliputi: 1) Belum optimalnya upaya peningkatan nilai investasi daerah; 2) Belum optimalnya laju pertumbuhan PDRB pada lapangan usaha perdagangan; 3) Belum optimalnya laju pertumbuhan PDRB pada lapangan usaha industri pengolahan; serta 4) Belum optimalnya laju pertumbuhan PDRB pada lapangan usaha akomodasi dan makan minum.

Kota Pekalongan yang terkenal dengan kerajinan batiknya, telah dinobatkan oleh *United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization* (UNESCO) sebagai Kota Kreatif Dunia dari total 28 kota kreatif di berbagai penjuru dunia, untuk kategori Kerajinan dan Kesenian Rakyat (*Craft & Folk Arts*) pada tanggal 1 Desember 2014. Kota Pekalongan terletak di pesisir Laut Jawa, juga dikenal sebagai penghasil perikanan, meskipun pada saat ini terus menurun dibandingkan pada tahun 1990-an sebagai akibat pendangkalan di sisi muara serta semakin tingginya intensitas dan frekuensi genangan rob. Kota Pekalongan pun memiliki potensi kepariwisataan yang cukup besar, meskipun hanya memiliki luas wilayah dan sumberdaya alam yang relatif terbatas. Potensi kepariwisataan yang dimiliki terutama adalah yang berbasis budaya. Kota Pekalongan juga merupakan salah satu PKW (Pusat Kegiatan Wilayah) di Jawa Tengah. PKW adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten/kota. Potensi dan peran yang dimiliki Kota Pekalongan tersebut cukup besar, apalagi Kota Pekalongan terletak pada median antara Kota Surabaya dan DKI Jakarta, sehingga menambah potensi dan keunggulan Kota Pekalongan.

Namun demikian, potensi dan peran yang dimiliki Kota Pekalongan tersebut, belum dapat memacu secara optimal pertumbuhan atau perkembangan perekonomian wilayahnya. Hal ini dapat dilihat dari pertumbuhan ekonominya (pertumbuhan PDRB, Produk Domestik Regional Bruto). PDRB adalah jumlah nilai tambah bruto yang timbul dari seluruh sektor perekonomian di daerah tersebut. Oleh karena nilai tambah bruto dari seluruh sektor perekonomian tidak bertambah optimal, sehingga pertumbuhan ekonominya belum optimal. Pertumbuhan ekonomi Kota Pekalongan, dua dekade ini

pada kisaran angka 5 persen per tahun (kecuali pada saat pandemi *Covid-19*) dan meskipun lebih bagus dibandingkan pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Tengah, namun belum optimal. Akibat pertumbuhan ekonomi yang belum optimal maka salah satunya berdampak terhadap pertumbuhan PDRB per kapita Kota Pekalongan yang belum optimal juga, sehingga memiliki nilai di bawah Provinsi Jawa Tengah, apalagi nasional. Sebagai gambaran bahwa PDRB per kapita tahun 2022 Kota Pekalongan adalah Rp. 45,99 juta, Provinsi Jawa Tengah adalah Rp. 47,97 juta, nasional sebesar Rp. 78,61 juta. Untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045 maka salah satu sasarannya adalah pendapatan per kapita nasional adalah setara dengan pendapatan negara maju yaitu PDRB per kapita minimal sebesar US\$ 13.800 atau setara dengan Rp. 218,59 juta (Rata-rata kurs rupiah sepanjang tahun 2024 berjalan atau *year to date/YtD* terpantau senilai Rp15.840 per dolar AS). Sebagai daerah yang memiliki potensi dan peran yang cukup strategis, ke depan khususnya dari sisi PDRB per kapita, Kota Pekalongan seharusnya tidak lagi menjadi beban Provinsi Jawa Tengah maupun nasional. Oleh karena itu, dibutuhkan optimalisasi peningkatan nilai tambah produk unggulan, sehingga dapat meningkatkan PDRB dan perekonomian Kota Pekalongan, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya.

Sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pekalongan Tahun 2009 – 2029 (Peraturan Daerah Kota Pekalongan No. 9 Tahun 2020), tujuan penataan ruang wilayah Kota Pekalongan adalah “terwujudnya kota kreatif yang didukung perdagangan dan jasa, industri, dan perikanan, yang nyaman, aman, produktif, serta berkelanjutan”. Berdasarkan tujuan penataan ruang tersebut bahwa pengembangan wilayah Kota Pekalongan ke depan, dilakukan dengan berbasis pada beberapa sektor unggulan yaitu perdagangan dan jasa, industri pengolahan, serta perikanan dan kelautan. Selama ini, sektor perdagangan dan jasa serta sektor industri pengolahan telah memberikan kontribusi terbesar terhadap PDRB Kota Pekalongan. Pada tahun 2024 sektor perdagangan dan jasa memberikan kontribusi sebesar 20,76 persen serta sektor industri pengolahan memberikan kontribusi sebesar 19,86 persen. Dalam beberapa tahun terakhir, kedua sektor tersebut cenderung tertekan dan memiliki pertumbuhan sektor yang belum optimal. Pada tahun 2024, pertumbuhan sektor perdagangan dan jasa sebesar 3,74 persen serta sektor industri pengolahan sebesar 0,79 persen. Terdapat sektor unggulan lain di Kota Pekalongan yaitu sektor penyediaan akomodasi dan makan minum yang memiliki kontribusi terhadap PDRB masih relatif kecil. Pada tahun 2024 sektor penyediaan akomodasi dan makan minum memiliki kontribusi terhadap PDRB sebesar 6,8 persen dan pertumbuhan sebesar 15,16 persen. Sektor penyediaan akomodasi dan makan minum dalam beberapa tahun terakhir memiliki pertumbuhan yang tertinggal, dibandingkan sektor-sektor lainnya.

Kota Pekalongan memiliki keterbatasan sumber daya alam, termasuk luas wilayah yang sangat terbatas. Di sisi lain, secara geografis Kota Pekalongan memiliki posisi yang sangat strategis, terletak di jalur utama Pantura (Pantai Utara Jawa) serta memiliki jumlah penduduk perkotaan yang relatif cukup besar dibandingkan wilayah sekitarnya. Ternyata kondisi ini belum cukup menjadi daya tarik bagi penanaman modal atau investasi secara optimal, meskipun Pemerintah Kota Pekalongan secara terus-menerus berupaya mengimplementasikan kebijakan bagi kemudahan pelayanan perizinan. Perkembangan nilai investasi di Kota Pekalongan masih berfluktuasi, belum optimal, belum menunjukkan kecenderungan yang meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2024, nilai investasi di Kota Pekalongan sebesar 863 Milyar Rupiah.

Dalam rangka pengembangan kawasan perdagangan dan jasa, kebijakan yang disusun adalah pengembangan Kawasan perdagangan dan jasa yang mampu meningkatkan peran Kota sebagai pusat kawasan regional Petanglong. Kebijakan ini

diwujudkan dengan beberapa strategi sebagai berikut: 1). mengembangkan kawasan perdagangan di kawasan pusat pelayanan kota dan kawasan sub pusat pelayanan kota; 2). mengembangkan kawasan perdagangan dan jasa yang terintegrasi dengan pengembangan wisata belanja; 3). menghubungkan pusat-pusat pelayanan dengan sistem jaringan jalan; 4). meningkatkan integrasi sistem antar moda; dan 5). mengembangkan fasilitas TOD (*Transit Oriented Development*). Pada RTRW Kota Pekalongan telah dialokasikan kawasan strategis kota dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi serta kawasan perdagangan dan jasa pada beberapa koridor jalan utama di Kota Pekalongan seluas 386 hektar. Namun demikian, alokasi lahan tersebut belum dapat optimal mendukung perkembangan perekonomian di Kota Pekalongan khususnya melalui sektor perdagangan dan jasa.

Belum optimalnya laju pertumbuhan PDRB pada lapangan usaha perdagangan dan jasa tersebut dibuktikan dengan perkembangan kawasan perdagangan dan jasa, yang telah dialokasikan RTRW Kota Pekalongan, tidak berkembang optimal. Sesuai RTRW Kota Pekalongan, kawasan perdagangan dan jasa yang terletak pada koridor jalan utama belum dimanfaatkan dengan optimal. Salah satu penyebab belum dimanfaatkan dengan optimal karena banyaknya unit usaha pada koridor tersebut yang tutup atau tidak berkembang karena lalu lintas kendaraan yang sangat padat, akibat koridor tersebut merupakan jalan utama Pantura.

Sesuai dengan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kota Pekalongan tahun 2013 – 2028 yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Kota Pekalongan No. 18 Tahun 2013, visi pembangunan kepariwisataan Kota Pekalongan adalah “Terwujudnya Kota Pekalongan Sebagai Destinasi Pariwisata Utama”. Dalam mewujudkan visi pembangunan kepariwisataan Kota Pekalongan ditempuh melalui 4 (empat) misi pembangunan kepariwisataan Daerah dengan mengembangkan: 1). destinasi pariwisata yang mempunyai keunikan lokal, aman, nyaman, menarik, mudah dicapai, berwawasan lingkungan, meningkatkan pendapatan masyarakat dan daerah; 2). pemasaran pariwisata yang efektif, sinergis, dan bertanggungjawab untuk meningkatkan kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara; 3). industri pariwisata yang berdaya saing, menggerakkan kemitraan usaha, bertanggungjawab terhadap pelestarian lingkungan alam dan sosial budaya; dan 4). organisasi Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat, sumber daya manusia, regulasi, optimalisasi pelayanan dan mekanisme operasional yang efektif dan efisien dalam rangka mendorong terwujudnya pembangunan kepariwisataan yang berkelanjutan.

Kualitas dan kuantitas destinasi dan sarpras pendukung wisata di Kota Pekalongan yang belum optimal menyebabkan jumlah dan lama kunjungan wisatawan ke Kota Pekalongan belum optimal. Jumlah dan lama kunjungan yang belum optimal berimplikasi terhadap perkembangan perekonomian atau nilai tambah yang belum optimal juga. Jumlah kunjungan wisatawan ke Kota Pekalongan masih berfluktuasi dan belum menunjukkan kecenderungan meningkat. Jumlah wisatawan yang berkunjung ke Kota Pekalongan selama tahun 2024 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pada tahun 2023 ada sebanyak 517.063 wisatawan domestik tetapi tidak ada wisatawan mancanegara. Sedangkan pada tahun 2024 menurun menjadi 140.899 wisatawan domestik dan 327 wisatawan mancanegara. Fasilitas akomodasi di Kota Pekalongan cukup tersedia. Di Kota Pekalongan terdapat 40 hotel yang terdiri dari 12 hotel berbintang dan 28 hotel non bintang. Selama tahun 2024 tersedia 1.445 kamar hotel yang siap disewa oleh para pengunjung. Optimalisasi harus dilakukan, khususnya terhadap kualitas dan kuantitas destinasi dan sarpras pendukung wisata. Misalkan, Taman Wisata Laut (TWL) yang menjadi salah satu ikon destinasi wisata baru di Kota Pekalongan,

mengalami tantangan pengembangan karena aksesibilitas menuju TWL yang kurang memadai, yaitu seringkali tergenang banjir dan rob sehingga wisatawan mengalami kesulitan akses untuk mencapainya. Beberapa destinasi wisata lainnya pun juga memiliki sarpras pendukung yang tidak memadai, seperti keterbatasan kualitas dan kuantitas toilet, tempat parkir, kuliner dll. Terutama untuk destinasi wisata berbasis relia di Kota Pekalongan.

Pelestarian dan pemanfaatan budaya di Kota Pekalongan pun belum optimal. Jumlah kelompok kesenian di Kota Pekalongan selama beberapa tahun ini stagnan, yaitu berjumlah 144 kelompok dan jumlah gedung kesenian 4 buah. Yang terlibat di dalam kelompok kesenian pun adalah individu lama, generasi muda masih sangat terbatas di dalam kelompok kesenian. Gedung kesenian pun berjumlah tetap, sehingga menyebabkan terbatasnya sarana publik untuk latihan maupun pentas kesenian. Oleh karena itu, pelestarian dan pemanfaatan budaya belum optimal. Padahal, pelestarian dan pemanfaatan budaya yang optimal, dapat diparalelkan dengan pengembangan perekonomian, khususnya pengembangan kepariwisataan.

Akar masalah lain adalah belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi sesuai perkembangan zaman dalam dunia usaha (marketing dan keuangannya). Perkembangan teknologi informasi yang pesat telah membawa perubahan yang cukup signifikan pada segala aspek, termasuk perekonomian, khususnya di dalam dunia usaha. Beberapa wirausahawan muda Kota Pekalongan beberapa waktu lalu, ketika pandemi *Covid-19*, telah sukses mengembangkan usaha batik, dengan memanfaatkan teknologi informasi. Namun demikian, cerita sukses tersebut hanya dilakukan sekelompok kecil masyarakat dan belum dilakukan sebagian besar wirausahawan di Kota Pekalongan. Padahal, penguasaan teknologi informasi akan sangat menentukan keberhasilan pengembangan perekonomian, khususnya dalam pengelolaan dunia usaha.

Berdasarkan visi Rencana Pembangunan Industri Kota Pekalongan tahun 2020 – 2040 yang disahkan dalam Peraturan Daerah Kota Pekalongan No. 1 Tahun 2020, visi pembangunan industri Kota Pekalongan adalah “Terwujudnya Industri Kota Pekalongan yang Maju Berbasis Ekonomi Kreatif dan Kearifan Lokal”. Dalam mewujudkan Visi Pembangunan Industri Kota Pekalongan, disusun 6 (enam) misi yaitu: 1). meningkatkan peran industri Kota Pekalongan sebagai pilar dan penggerak perekonomian Kota Pekalongan; 2).memperkuat dan memperdalam struktur industri Kota Pekalongan; 3). mewujudkan industri yang mandiri, berdaya saing, dan berkelanjutan berbasis produk unggulan dan kearifan lokal; 4). menjamin kepastian berusaha, persaingan yang sehat, dan mencegah pemusatan atau penguasaan industri oleh satu kelompok atau perseorangan yang merugikan masyarakat; 5). membuka kesempatan berusaha dan perluasan kesempatan kerja; dan 6). mengoptimalkan potensi masyarakat melalui pengembangan ekonomi kreatif.

Peningkatan nilai tambah produk unggulan daerah yang tidak optimal juga disebabkan oleh masih adanya ketergantungan ketersediaan bahan baku, kestabilan harga dan belum optimalnya promosi industri produk/komoditi unggulan. Kota Pekalongan memiliki luas wilayah yang terbatas dan memiliki keterbatasan sumberdaya sehingga akan sangat tergantung kepada daerah atau negara lain terhadap bahan baku untuk proses produksinya. Sebagai contoh adalah industri batik, dimana sebagian besar bahan bakunya berasal dari daerah lain/negara lain. Termasuk juga industri tahu dan tempe maka Kota Pekalongan akan sangat tergantung bahan baku kedelai, dengan daerah lain atau negara lain. Kondisi ini menyebabkan Kota Pekalongan sangat tergantung bahan baku dari luar dan kestabilan harga. Beberapa upaya telah dilakukan untuk melindungi ketersediaan dan kestabilan harga harga, diantaranya adalah Peraturan

Daerah Kota Pekalongan Nomor 7 Tahun 2019 tentang Ketersediaan Bahan Baku Batik. Namun demikian implementasi Peraturan Daerah tersebut belum optimal. Belum optimalnya promosi industri produk/komoditi unggulan juga menyebabkan peningkatan nilai tambah produk unggulan daerah yang tidak optimal. Promosi terhadap produk/komoditi unggulan selama ini sudah dilakukan, tetapi harus terus dilakukan dan ditingkatkan, agar masyarakat luas, nasional dan internasional, memahami produk unggulan Kota Pekalongan, yaitu batik.

Peningkatan nilai tambah produk unggulan daerah yang belum optimalnya juga disebabkan belum optimalnya inovasi dan kreativitas dalam mendukung daya saing ekonomi. Selama ini, Pemerintah Kota Pekalongan telah mendukung dan menciptakan ekosistem inovasi dan kreativitas yang mampu mendukung daya saing ekonomi. Namun demikian, upaya tersebut belum dapat mendukung terwujudnya optimalisasi peningkatan daya saing. Ke depan, ekosistem inovasi dan kreativitas harus terus didorong dan diberdayakan untuk mewujudkan peningkatan daya saing daerah yang optimal. Peningkatan daya saing ekonomi ke depan dilakukan juga dengan memanfaatkan kebijakan nasional tentang pengembangan Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB). Kota Pekalongan yang memiliki keterkaitan erat dengan wilayah Kabupaten Batang dapat memanfaatkan potensi jasa dan penyediaan tenaga kerja. Di samping itu, juga dikembangkan keterkaitan produk-produk di Kota Pekalongan dengan KITB.

Peningkatan daya saing sektor perdagangan dan jasa Kota Pekalongan dilakukan dengan semakin memperkuat fungsi pelayanan regional wilayah Petanglong dan daerah sekitarnya dengan pembangunan kembali pasar Banjarsari. Diharapkan pasar Banjarsari dapat memperkuat perekonomian dengan semakin meningkatnya aktivitas perdagangan, baik secara *online* maupun *offline*.

Di samping upaya untuk peningkatan sektor unggulan, Kota Pekalongan sangat berkepentingan dalam rangka menjawab ketahanan pangan daerah karena isu ketahanan pangan merupakan isu strategis Provinsi Jawa Tengah sebagai lumbung pangan nasional. Kota Pekalongan merupakan kawasan perkotaan, Dimana kawasan perkotaan merupakan kawasan yang fungsi utamanya adalah non pertanian. Namun demikian, guna mendukung ketahanan pangan di Kota Pekalongan masih terdapat LP2B (Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan), sesuai RTRW Kota Pekalongan. Ketahanan Pangan tidak hanya berfokus pada lahan pertanian, tapi juga perikanan. Beberapa upaya yang dilakukan meliputi perikanan tangkap (penanaman terumbu/rumah ikan, bantuan kapal dan jaring nelayan), perikanan budidaya (bandeng, nila, udang), dan juga pengolahan hasil perikanan (*cold storage*, surimi, HPI, *frozen food*, pengalengan, pengasapan).

Tantangan Kota Pekalongan ke depan adalah peningkatan nilai tambah produk unggulan daerah agar perekonomian Kota Pekalongan terus bertumbuh dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dari penelitian yang dilakukan, terdapat 13 rantai industri batik yang diidentifikasi. Dari ketiga belas rantai tersebut, ditengarai bahwa nilai tambah industri batik, sebagian besar dinikmati oleh masyarakat di luar wilayah Kota Pekalongan. Pelaku usaha dan tenaga kerja industri batik di wilayah Kota Pekalongan hanya menerima sebagian kecil dari nilai tambah industri batiknya. Upaya untuk peningkatan nilai tambah produk unggulan daerah, salah satunya adalah dengan mengoptimalkan nilai tambah industri batik agar sebagian besar dapat diterima oleh masyarakat Kota Pekalongan.

Di sektor perikanan Kota Pekalongan memiliki beberapa potensi antara lain: 1) Fasilitas strategis skala nasional yaitu PPN Pekalongan; 2) Industri pengolahan perikanan (PT. Mayafood Industries, PT. Blue Sea Industries, PT. CNL); 3) Sarana prasarana

perikanan tangkap (16 cold storage, 12 galangan dan docking kapal, 2 SPBN (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan), 390-an unit kapal di atas 30 GT dengan pemilik berdomisili dan berpangkalan di PPN Pekalongan, 4.700-an orang, industri rumah tangga perbaikan jaring (tukang kiteng)). Kota Pekalongan juga pernah mengalami kejayaan perikanan tangkap pada tahun 1990-an. Saat ini Kota Pekalongan masih berupaya untuk mengusulkan pembangunan pelabuhan perikanan *onshore* untuk mengembalikan kejayaan perikanan tersebut.

4. Infrastruktur Perkotaan dan Permukiman

Infrastruktur yang kuat dan andal adalah tulang punggung dari pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Akses terhadap infrastruktur berkualitas tinggi, seperti transportasi, komunikasi, energi, dan air bersih, memainkan peran penting dalam mendorong kemajuan ekonomi dan meningkatkan kualitas hidup. *Sustainable Development Goals* (SDG) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, khususnya SDG 9, menekankan pentingnya membangun infrastruktur yang tahan lama, mendorong industrialisasi inklusif dan berkelanjutan, serta mendukung inovasi.

Berdasarkan analisis permasalahan, belum optimalnya kualitas dan kuantitas sarana prasarana perkotaan merupakan salah satu permasalahan yang mengakibatkan belum optimalnya kemandirian ekonomi daerah atau perekonomian daerah yang berdaya saing. Infrastruktur perkotaan dan permukiman harus didorong menjadi isu strategis karena perannya yang sangat penting sebagai faktor pengungkit daya tarik kota, keamanan kota, kenyamanan kota, produktivitas kota maupun keberlanjutan kota. Jika dianalisis lebih dalam, maka sebagai faktor penyebab infrastruktur perkotaan dan permukiman ditetapkan sebagai salah satu isu strategis, meliputi: 1) belum optimalnya kualitas dan kondisi jalan kota; 2) belum optimalnya penyediaan air minum, baik dari sisi kualitas maupun kuantitas; 3) belum optimalnya pengelolaan dan pengembangan sanitasi domestik dan pengelolaan limbah industri; 4) belum optimalnya penyediaan sarana prasarana persampahan; 5) belum optimalnya kualitas sarpras pengendali banjir dan drainase kota; serta 6) belum optimalnya kondisi sarpras transportasi dan penanganan kemacetan. Apalagi Pemerintah Kota Pekalongan telah menetapkan status darurat sampah setelah Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Degayu resmi ditutup oleh Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) pada 20 Maret 2025 maka infrastruktur perkotaan dan permukiman merupakan salah satu komponen vital suatu perkotaan. Yang menjadi catatan penting juga bahwa pengembangan dan pemanfaatan infrastruktur perkotaan dan permukiman ke depan, bukan hanya menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah semata, tetapi yang sangat dibutuhkan adalah partisipasi seluruh pemangku kepentingan.

Kota Pekalongan, seperti daerah maupun kawasan perkotaan lainnya, terus berkembang mengalami urbansasi (proses pengkotaan) akibat pertambahan jumlah penduduk maupun semakin tingginya fungsi pelayanan yang harus diembannya. Kota Pekalongan yang terletak pada posisi strategis dan peran sebagai PKW (pusat kegiatan wilayah) berimplikasi terhadap kebutuhan penyediaan infrastruktur perkotaan dan permukiman yang semakin meningkat, baik dari sisi kuantitas maupun kualitas. Kuantitas dan kualitas infrastruktur perkotaan dan permukiman yang memadai, sangat berpengaruh terhadap peran pelayanan kota yang dijalankan. Penyediaan kuantitas dan kualitas penyediaan infrastruktur perkotaan dan permukiman di Kota Pekalongan selama ini masih dirasakan belum optimal karena kuantitas dan kualitas penyediaan infrastruktur perkotaan dan permukiman sangat menentukan kenyamanan warganya maupun menjadi daya tarik suatu kota. Berdasarkan penilaian Ikatan Ahli Perencanaan (IAP) Indonesia melalui penyusunan MLCI (*Most Livable City Index*). MLCI adalah sebuah penelitian

terkait kota layak huni yang dikeluarkan oleh IAP. Berdasarkan MLCI terbaru tahun 2022, Kota Pekalongan termasuk ke dalam kategori yang memiliki skor rata-rata, di bawah Kota Tegal. Kota yang paling layak huni adalah Surakarta, Yogyakarta, Cirebon, Magelang dan Semarang.

Isu strategis infrastruktur perkotaan dan permukiman didasarkan dari data capaian, permasalahan, telaahan dokumen perencanaan, isu global, isu nasional, dan isu regional. Dari data capaian, pemenuhan penduduk yang terlayani air bersih masih rendah. Dari RTRW Kota Pekalongan diketahui permasalahan banjir masih menjadi pekerjaan yang secara terus menerus perlu dicarikan solusi. Dari analisis permasalahan ditemukan beberapa permasalahan seperti tingkat kemacetan, air bersih, sanitasi, drainase, *land subsidence*, dan rumah yang kurang layak. Isu strategis juga selaras dengan isu global yaitu menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua; serta Menjadikan kota dan permukiman inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan. Isu strategis juga selaras dengan RPJP Nasional dan RPJP Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pekalongan Tahun 2009 – 2029 (Peraturan Daerah Kota Pekalongan No. 9 Tahun 2020), dalam rangka peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan dan permukiman disusun kebijakan peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan prasarana. Kebijakan ini dilaksanakan dengan beberapa strategi sebagai berikut: 1). meningkatkan kualitas sistem dan sarana prasarana transportasi; 2). meningkatkan kapasitas jaringan dan pelayanan energi listrik; 3). meningkatkan kapasitas jaringan dan pelayanan jaringan telekomunikasi kabel dan nirkabel; 4). meningkatkan prasarana dan pendayagunaan sumber daya air; 5). meningkatkan kapasitas dan pelayanan jaringan air minum; 6). meningkatkan kapasitas dan pelayanan sistem persampahan; 7). meningkatkan kapasitas dan pelayanan jaringan air limbah; dan 8). meningkatkan kapasitas dan pelayanan jaringan drainase.

Rumusan isu strategis tersebut juga didasarkan atas penilaian kondisi bahwa berkembangnya perekonomian daerah juga didasarkan atas kuantitas dan kualitas infrastruktur perkotaan dan permukiman. Kuantitas dan kualitas yang memadai, akan menjadi magnet daya tarik bagi kunjungan masyarakat dari daerah lain, semakin banyak kunjungan akan berimplikasi terhadap semakin berputarnya pergerakan ekonomi suatu daerah. Pada akhirnya, ketersediaan kuantitas dan kualitas infrastruktur perkotaan dan permukiman yang optimal dapat berperan dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat. Apalagi Kota Pekalongan, memiliki peran sebagai kota jasa maupun kota yang memiliki posisi strategis karena berada pada median Kota Surabaya dan DKI Jakarta, sehingga harus memanfaatkan keunggulan komparatifnya tersebut, yaitu dengan terus meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur perkotaan dan permukiman secara optimal.

Masalah daerah yaitu belum optimalnya kualitas infrastruktur perkotaan dan permukiman, jika diidentifikasi maka memiliki enam akar masalah, yaitu 1) belum adanya jalan lingkar sehingga menyebabkan bercampurnya kendaraan lokal dan regional; 2) cakupan layanan air perpipaan belum menjangkau seluruh wilayah di Kota Pekalongan; 3) masih rendahnya kualitas sanitasi; 4) belum optimalnya sistem drainase kota, tingginya laju penurunan tanah (*Land Subsidence*), sarpras pengendali banjir dan rob kurang optimal (khususnya pada sisi Barat yaitu sistem Brengsi-Meduri); 5) masih kurang baiknya tata letak bangunan gedung di lingkungan permukiman; dan 6) masih adanya kondisi rumah yang kurang layak. Wilayah Kota Pekalongan sangat dirasakan memiliki permasalahan lalu lintas yang sangat fundamental, yaitu bercampurnya lalu lintas lokal dan regional serta banyaknya perlintasan sebidang kereta api. Hingga saat ini, lalu lintas

regional dan lokal masih bercampur pada ruas-ruas jalan di wilayah Kota Pekalongan. Lalu lintas regional yang mendominasi adalah kendaraan barang dan penumpang (AKAP maupun AKDP) yang berdimensi besar maupun kendaraan pribadi yang masih memilih melewati jalur jalan nasional dibandingkan jalan tol trans Jawa. Masih bercampurnya lalu lintas tersebut sangat berimplikasi bagi keselamatan, keamanan, ketertiban pengguna jalan, serta kebersihan dan kenyamanan kota terutama pada aspek tata ruang kota.

Dampak yang paling dirasakan adalah keamanan dan kenyamanan warga Kota Pekalongan dalam berlalu lintas karena bercampur dengan lalu lintas regional. Dampak lainnya, terutama karena kendaraan berdimensi besar, maka sebagian kawasan perdagangan dan jasa di wilayah Kota Pekalongan tidak bisa berkembang dengan optimal. Kondisi ini terutama terjadi pada koridor Jl. Jenderal Sudirman yang tidak berkembang. Oleh karena itu, salah satu upaya sistemik dalam mengatasi bercampurnya lalu lintas regional dan lokal di Kota Pekalongan adalah pembangunan jalan lingkar di Kota Pekalongan. Lebih tepatnya Jalan Lingkar Petanglong (Kota Pekalongan, Kabupaten Batang dan Kabupaten Pekalongan). Jalan lingkar tersebut diharapkan berdampak bagi mengatasi permasalahan kemacetan dan keamanan lalu lintas, kebersihan dan kenyamanan kota, serta yang utama adalah optimalisasi tata ruang, utamanya kawasan perdagangan dan jasa. Optimalisasi kawasan perdagangan dan jasa diharapkan dapat semakin memperkuat peran sektor perdagangan dan jasa bagi perkembangan perekonomian Kota Pekalongan. Upaya memperkuat perekonomian juga dilakukan dengan membangun pusat pertumbuhan baru di wilayah kota Pekalongan, misalnya kawasan Pekalongan Baru. Diharapkan kawasan Pekalongan baru dapat berkembang menjadi kawasan yang dapat memacu pertumbuhan ekonomi.

Akses pelayanan air minum juga belum optimal. Cakupan layanan air perpipaan belum menjangkau seluruh wilayah di Kota Pekalongan. Jika pada tahun 2019, cakupan pelayanan air bersih sebesar 88,60 persen, maka terus menurun dan pada tahun 2023, cakupan pelayanan menjadi 67,42 persen. Kondisi ini menunjukkan bahwa akses pelayanan air minum belum optimal, bahkan mengalami penurunan cakupan. Tidak optimalnya cakupan pelayanan disebabkan keterbatasan air baku di wilayah Kota Pekalongan dan keterbatasan kemampuan sosial ekonomi masyarakat sehingga tidak mampu mengakses pelayanan air perpipaan (JP, jaringan perpipaan). Tantangan ke depan adalah bagaimana cakupan pelayanan ini dapat menjangkau seluruh wilayah Kota Pekalongan dan dengan kualitas atau standar yang dipersyaratkan. Pemerintah Kota Pekalongan harus berkolaborasi dengan Pemerintah, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Daerah sekitar.

Sanitasi perkotaan yang berkualitas dapat berdampak secara langsung terhadap wajah suatu wilayah. Kota Pekalongan masih memiliki permasalahan terkait rendahnya kualitas sanitasi. Sesuai dengan ketentuan, cakupan sanitasi meliputi air limbah domestik, pengelolaan sampah dan drainase lingkungan. Ketercapaian ODF Kota Pekalongan tahun 2022 mencapai 100 persen. *Open Defecation Free* (ODF) atau Stop Buang Air Besar Sembarangan adalah kondisi ketika setiap individu dalam komunitas tidak buang air besar sembarangan, pembuangan tinja yang tidak memenuhi syarat sangat berpengaruh pada penyebaran penyakit berbasis lingkungan. Namun demikian, untuk mencapai akses aman limbah domestik, masih dilakukan upaya yang signifikan.

Pengelolaan sampah di Kota Pekalongan masih menghadapi tantangan yang sangat berat, pada tahun 2024 penanganan sampah di Kota Pekalongan hanya 76,29 persen. Kondisi ini diakibatkan produksi sampah yang semakin meningkat, namun kapasitas pengelolaan yang semakin menurun. Apalagi Kota Pekalongan menghadapi darurat sampah karena ditutupnya TPA Degayu oleh Kementerian Lingkungan Hidup.

Kondisi drainase lingkungan pun juga masih membutuhkan upaya signifikan untuk merehabilitasi. Drainase sekunder hanya 57,41 persen yang memiliki kondisi baik pada tahun 2022. Kondisi ini berimplikasi tidak terkelolanya limpasan air hujan (*run off*) dengan baik, sehingga memiliki risiko sangat tinggi terjadinya banjir maupun genangan air. Secara umum sistem drainase dan sarpras pengendali banjir masih membutuhkan upaya yang sangat signifikan, tentunya dengan melibatkan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Hal ini dikarenakan wilayah yang masih memiliki risiko tergenang banjir dan rob adalah 21,11 persen pada tahun 2022. Ancaman banjir dan rob, masih sangat tinggi karena proses penurunan tanah (*land subsidence*) yang masif. Dari beberapa lokasi titik kontrol pengukuran, ancaman penurunan tanah di Kota Pekalongan masih sangat serius. Dibutuhkan upaya yang signifikan dan membutuhkan partisipasi seluruh pemangku kepentingan di Kota Pekalongan.

Pengendalian banjir dan rob sampai dengan 2024 telah tertangani pada sisi timur Kota Pekalongan (sungai Loji dan sungai Banger). Sedangkan pada sisi barat perlu penanganan untuk menanggulangi permasalahan banjir dan rob pada wilayah sepanjang sungai Bremsi dan sungai Meduri yang dampaknya sudah meluas pada sisi selatan jalan Pantura. Sesuai *detail engineering design* (DED) yang telah dibuat oleh Dinas Pusdataru Provinsi Jawa Tengah, pada muara sungai Bremsi dan Meduri perlu ditutup dan dibangun pintu pengendali banjir, tanggul sungai dan stasiun pompa sehingga akan mengurangi dampak banjir dan rob secara signifikan pada sisi barat Kota Pekalongan. Kemudian pada tahun 2023, AMDAL disusun oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Wajah Kota Pekalongan, termasuk *facade* bangunan yang belum sesuai dengan fungsi kawasan menjadi tantangan berat tersendiri, karena masih kurang baiknya tata letak bangunan gedung di lingkungan permukiman. Seperti di sepanjang sempadan sungai masih terbentuk tata letak bangunan yang mengikuti sempadan. Rasio Bangunan ber-IMB per satuan bangunan (persen) pada tahun 2021 hanya mencapai 1,97 persen. Kondisi ini menyebabkan terbatasnya prasarana lingkungan yang berkualitas, seperti jalan dan drainase lingkungan yang buruk..

Permasalahan lain yang dihadapi Kota Pekalongan adalah masih adanya kondisi rumah yang kurang / tidak layak huni. Berdasarkan data aplikasi Omahe Ndhewe, saat ini masih terdapat 9.693 unit rumah atau 12,72 persen rumah tidak layak huni. Kekurangan penyediaan perumahan dan permukiman pun juga masih signifikan. Pembangunan perumahan dan kawasan permukiman Kota Pekalongan ke depan memiliki tantangan yang sangat besar terkait kualitas dan kuantitas. Wilayah Kota Pekalongan yang sangat terbatas, mengharuskan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman dikembangkan secara vertikal, namun hal tersebut akan menimbulkan risiko pembebanan lahan yang semakin besar sehingga berpotensi memperbesar terjadinya penurunan permukaan lahan (*land subsidence*).

Kualitas infrastruktur perkotaan dan permukiman yang tinggi menjadi tantangan pembangunan ke depan yang sangat signifikan. Kualitas infrastruktur perkotaan dan permukiman yang handal sangat berdampak terhadap kinerja aspek lainnya dalam pengelolaan kota. Wajah kota yang menarik dapat menjadi daya tarik suatu kota sehingga menjadi *pull factor* kunjungan dari wilayah lain, sehingga dapat mempercepat pergerakan roda perekonomian daerah. Oleh karena itu, penataan kualitas infrastruktur perkotaan dan permukiman menjadi kebutuhan nyata bagi pengembangan Kota Pekalongan ke depan.

5. Kondusivitas Wilayah

Berdasarkan analisis permasalahan, kondusivitas wilayah Kota Pekalongan belum berperan optimal dalam mendukung investasi. Investasi berperan penting dalam perwujudan kemandirian ekonomi daerah maupun peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pertimbangan lain, kondusivitas wilayah didorong menjadi salah satu isu strategis daerah karena sangat berpotensi mendorong terwujudnya ketentraman dan ketertiban umum, yaitu mewujudkan keamanan dan kenyamanan kehidupan masyarakat. Fakta di lapangan menyatakan urgensi kondusivitas wilayah karena masih adanya konflik di masyarakat serta masih adanya pelanggaran Peraturan Daerah di masyarakat.

Suasana nyaman dan kondusif menjadi syarat utama dalam kemajuan pembangunan di suatu daerah, karena menjadi syarat untuk investasi swasta masuk dan ikut memajukan perekonomian. Dalam membangun daerah dibutuhkan suasana yang aman nyaman. Konflik sosial dan kejahatan akan menyebabkan investor enggan berinvestasi. Oleh karena itu, kondusivitas wilayah menjadi prasyarat penting pembangunan. Pemerintah tidak akan mampu mewujudkan pembangunan berkelanjutan tanpa adanya kerjasama yang sinergis antara semua *stakeholder* (pemangku kepentingan).

Pengelolaan potensi konflik sosial dan kejahatan harus terus dilakukan melalui berbagai program dengan melibatkan sinergi pemangku kepentingan. Upaya preventif salah satunya dapat dilakukan dengan pendekatan keagamaan dan pengembangan kebiasaan berpikir kritis dalam menyaring informasi. Pendekatan keagamaan sering kali menjadi titik fokus untuk meredakan konflik. Pemimpin agama dan kelompok keagamaan menjadi media pemersatu perbedaan dan mengajak masyarakat untuk hidup harmonis. Agama menjadi landasan moral dan etika yang mengarahkan masyarakat untuk berperilaku baik dan berkontribusi positif dalam pembangunan. Sementara itu, pentingnya mengembangkan kemampuan berpikir kritis agar dapat memfilter dan mengevaluasi informasi dari media maupun yang beredar di masyarakat juga merupakan upaya preventif dalam mewujudkan kondusivitas wilayah.

Penataan pedagang kaki lima yang belum optimal, karena munculnya pasar musiman (pasar tiban) di beberapa tempat membutuhkan kebijakan yang saling menguntungkan, antara pemerintah dan pedagang kaki lima. Penegakan hukum yang bersifat persuasif dalam penataan pedagang kaki lima sangat diperlukan untuk menciptakan ketertiban lalu lintas dan memberikan rasa aman bagi pengguna jalan.

Dikaitkan dengan isu nasional dalam RPJP Nasional Tahun 2025-2045, dalam Misi 5 Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi, khususnya pada arah kebijakan ke-13 yaitu “Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju”, isu kerukunan umat beragama menjadi isu nasional yang harus terus menjadi perhatian.

6. Kualitas Lingkungan Hidup

Isu strategis kualitas lingkungan hidup harus didorong karena merupakan salah satu faktor yang menentukan belum optimalnya kemandirian ekonomi daerah. Berdasarkan analisis permasalahan lingkungan hidup merupakan salah satu faktor yang dianggap penting bagi perkembangan perekonomian Kota Pekalongan. Dengan kata lain bahwa lingkungan hidup memiliki korelasi yang signifikan dengan perkembangan perekonomian daerah. Urgensi isu strategis kualitas lingkungan hidup didasarkan atas beberapa fakta, meliputi: 1) belum optimalnya penanganan limbah cair; 2) terbatasnya

lahan ruang terbuka hijau; 3) belum optimalnya upaya pengurangan sampah dari hulu; serta 4) belum optimalnya perencanaan dan antisipasi risiko bencana daerah.

Isu strategis kualitas lingkungan hidup dirumuskan didasarkan atas fakta bahwa kualitas lingkungan hidup, sebagai keadaan lingkungan yang dapat memberikan daya dukung yang optimal bagi kelangsungan hidup manusia di suatu wilayah. Oleh karena itu, kualitas lingkungan menjadi ukuran yang penting dan merupakan kebutuhan pokok masyarakatnya. Urgensi perumusan isu strategis ini adalah karena kondisi menurunnya kualitas lingkungan hidup di Kota Pekalongan. Lingkungan hidup adalah sebuah sistem yang harus mendukung sistem yang lain, yaitu sistem ekonomi, sistem sosial budaya maupun sistem lainnya. Menjadi kebutuhan bagi proses sistem lainnya, sistem lingkungan hidup harus mampu mendukung proses sistem yang lain. Proses produksi, yang merupakan bagian dari sistem perekonomian, membutuhkan faktor produksi, termasuk ketersediaan sumberdaya alam, termasuk lingkungan hidup. Jika kualitas lingkungan hidup rendah, dapat berimplikasi tidak dapat mendukung proses produksi maupun sistem-sistem yang lain. Oleh karena itu, pembangunan mutlak membutuhkan lingkungan hidup yang berkualitas agar mendukung terwujudnya visi pembangunan.

Pemerintah Kota Pekalongan selama ini telah melakukan berbagai upaya, dengan dukungan seluruh pemangku kepentingan, agar kualitas lingkungan hidup tidak semakin menurun. Dari sisi ukuran kualitas lingkungan hidup, yaitu IKLH (Indeks Kualitas Lingkungan Hidup), capaian beberapa tahun terakhir mengalami peningkatan dan pada tahun 2024 memiliki capaian 59,15. Namun demikian, capaian tersebut belum menunjukkan kualitas lingkungan hidup yang mampu menopang daya dukung yang optimal. Perumusan isu strategis peningkatan kualitas lingkungan hidup, didasarkan atas masalah pembangunan, yaitu menurunnya kualitas lingkungan hidup. Masalah penurunan kualitas lingkungan hidup, dapat diidentifikasi lebih lanjut akar masalahnya, meliputi: 1) masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam menjaga keberlanjutan lingkungan hidup; 2) masih tingginya tingkat pencemaran limbah cair; 3) overloasnya TPA karena belum optimalnya olah pilah sampah dari sumbernya dan sejak 20 Maret 2025 TPA Degayu telah ditutup oleh Kementerian Lingkungan Hidup; 4) rendahnya luasan Ruang Terbuka Hijau (RTH); dan 5) rendahnya kualitas air tanah dan air permukaan.

Sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pekalongan Tahun 2009 – 2029 (Peraturan Daerah Kota Pekalongan No. 9 Tahun 2020), dalam rangka peningkatan kualitas lingkungan hidup disusun kebijakan pengelolaan dan pelestarian kawasan lindung. Kebijakan ini dilaksanakan dengan beberapa strategi yaitu: 1). menetapkan dan meningkatkan fungsi perlindungan kawasan yang berfungsi lindung; 2). menetapkan dan melakukan mitigasi serta adaptasi pada kawasan rawan bencana; 3). Melestarikan kawasan cagar budaya; dan 4). mempertahankan dan meningkatkan luasan ruang terbuka hijau secara proporsional di seluruh wilayah kota termasuk menata alun-alun dan taman kota lainnya.. Kebijakan lain yang terkait dengan peningkatan kualitas lingkungan hidup adalah pengelolaan dan pengembangan kawasan budidaya sesuai dengan daya tampung dan daya dukung Kawasan. Kebijakan ini dilaksanakan melalui beberapa strategi yaitu: 1). mengendalikan perkembangan kawasan budidaya sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan; 2). mengendalikan alih fungsi lahan pertanian untuk kegiatan non pertanian untuk mendukung kelestarian lahan pertanian tanaman pangan berkelanjutan; 3). mengembangkan perumahan secara vertikal pada kawasan permukiman di koridor-koridor utama kota; 4). mengoptimalkan penggunaan lahan di koridor-koridor utama kota dengan menciptakan ruang-ruang kawasan yang efisien dan kompak, serta mengarahkan pembangunan secara vertikal; 5). mengembangkan kawasan pantai yang berwawasan lingkungan untuk mendukung

perwujudan kawasan minapolitan; dan 6). mendukung penetapan kawasan pertahanan dan keamanan.

Keberlanjutan lingkungan hidup menentukan keberlanjutan pembangunan maupun perikehidupan manusia. Lingkungan hidup memiliki kemampuan daya dukung maupun daya tampung terhadap seluruh kehidupan makhluk hidup di atasnya. Dalam beberapa proses KLHS (Kajian Lingkungan Hidup Strategis) yang telah dilakukan terhadap proses penyusunan rencana pembangunan dan rencana tata ruang, sebagian besar aspek daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup telah dilampauinya. Kondisi tersebut tidak disadari oleh sebagian masyarakat, masih ada anggapan bahwa lingkungan hidup masih baik-baik saja sehingga proses produksi maupun perikehidupan lainnya, tidak memperhitungkan dan mempertimbangkan lingkungan hidup memiliki batas toleransi.

Rendahnya kesadaran masyarakat dalam menjaga keberlanjutan lingkungan hidup masih banyak ditemui. Masyarakat masih banyak ditemui membuang sampah pada badan air ataupun tempat yang tidak semestinya. Mengambil air tanah tanpa izin. Termasuk juga sebagian besar industri masih membuang limbah langsung ke alam, tanpa melakukan proses pengolahan limbah. Wujud dari kesadaran yang masih rendah tersebut adalah masih tingginya tingkat pencemaran limbah cair di Kota Pekalongan. Meskipun tidak dapat dipungkiri bahwa tingginya pencemaran tersebut tidak bersumber semuanya dari Kota Pekalongan, tetapi juga berasal dari wilayah lain.

Wujud lain kesadaran masyarakat dan pengelolaan yang belum optimal adalah overloadnya TPA karena belum optimalnya olah pilah sampah dari sumbernya. Hingga tahun 2024, penanganan sampah (terangkut ke TPA) sebanyak 45.187,00 ton atau 76,29 persen dari timbunan sampah. Ke depan dengan ditutupnya TPA Degayu maka harus mendorong pengelolaan sampah di “hulu” dengan melakukan pengurangan (*reduce*, *reuse* dan *recycle*) serta mendorong peningkatan pengelolaan sampah di “tengah” (TPS3R dan TPST). Upaya sistemik untuk mengubah sistem pengelolaan sampah adalah dengan mengefektifkan olah dan pilah sampah, serta meningkatkan ekonomi sirkular sampah.

Akar masalah lainnya yang sangat mendasar dan dapat diidentifikasi adalah rendahnya luasan ruang terbuka hijau (RTH). Dari gambaran citra satelit wilayah Kota Pekalongan, dapat diidentifikasi bahwa tutupan lahan wilayah Kota Pekalongan sangat rendah. Dari identifikasi langsung lapangan, dapat diketahui bahwa masih terbatas tutupan lahan maupun vegetasi di wilayah Kota Pekalongan. Dari RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) Kota Pekalongan Tahun 2009-2029, RTH (rencana tata ruang) eksisting sesuai RTRW saat ini adalah 2,94 persen dari luas wilayah. Sesuai RTRW, sampai 2029 RTH yang harus dialokasikan adalah sebesar 13,04 persen. Idealnya sebuah kota memiliki 20 persen RTH publik dan 10 persen RTH privat. Tantangan untuk menambah RTH cukup berat karena keterbatasan lahan, padahal RTH sangat dibutuhkan. RTH berfungsi sebagai paru-paru dari sebuah kota atau wilayah. Hal ini dikarenakan seluruh tumbuhan yang ada pada RTH dapat menyerap karbondioksida (CO₂), menghasilkan oksigen, menurunkan suhu dan memberikan suasana sejuk serta menjadi area resapan air.

Penyebab kualitas lingkungan hidup yang rendah lainnya adalah rendahnya kualitas air tanah dan air permukaan. Rendahnya kualitas air tanah dan air permukaan adalah akibat proses produksi dan kegiatan domestik (rumah tangga) yang tidak memperhatikan lingkungan hidup. Pada umumnya limbah proses produksi dan limbah domestik dibuang ke alam, tanpa melalui proses pengolahan. Dalam kadar tertentu, alam mampu menetralkan berbagai limbah tersebut, namun ketika melampaui daya dukung dan daya

tampungnya, maka limbah proses produksi maupun limbah domestik tersebut membebani lingkungan hidup, terjadilah pencemaran lingkungan hidup, serta wujudnya dapat berupa rendahnya kualitas air tanah dan air permukaan. Tanpa diikuti dengan kesadaran masyarakat, jika limbah proses produksi maupun limbah domestik semakin besar maka akan berdampak kualitas air tanah dan air permukaan yang semakin memburuk. Apalagi kondisi geologi/tanah merupakan hasil sedimentasi sehingga memiliki sifat yang berbeda. Tantangan untuk mengembalikan kualitas lingkungan hidup, khususnya kualitas air tanah dan air permukaan, membutuhkan upaya sistemik, partisipasi seluruh pemangku kepentingan serta membutuhkan proses yang lama dan kontinyu karena lingkungan hidup memiliki sifat ireversibel, yaitu tidak dapat diubah atau membutuhkan waktu yang relatif sangat lama.

Lingkungan hidup yang berkualitas merupakan landasan untuk pengembangan perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya yang lebih berkualitas. Tatanan masyarakat yang aman, nyaman dan sehat tidak bisa diwujudkan tanpa dilandasi kualitas lingkungan hidup yang optimal. Menjadi pekerjaan rumah besar Kota Pekalongan ke depan, adalah bagaimana menjaga agar kualitas lingkungan hidup tidak bertambah turun, padahal di sisi sistem ekonomi harus mewujudkan perwujudan nilai tambah yang optimal. Oleh karena itu, karena adanya timbal balik tersebut, pengembangan sistem ekonomi ke depan harus disesuaikan dengan upaya untuk mengoptimalkan kualitas lingkungan hidup Kota Pekalongan. Beberapa pilihannya adalah pengembangan ekonomi hijau berbasis potensi lokal Kota Pekalongan.

Pemerintah Kota Pekalongan mempunyai kewajiban untuk mendukung kebijakan nasional berupa pengembangan sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan. Dengan melihat potensi sinar matahari sebagai sumber Energi Baru Terbarukan (EBT) dapat dikembangkan pada stasiun pompa pengendali banjir yang berada di sisi utara dan barat Kota Pekalongan, perkantoran, penerangan jalan umum dan ruang terbuka.

7. Kelestarian budaya lokal

Berdasarkan analisis permasalahan yang dilakukan maka belum optimalnya pelestarian dan pengembangan budaya lokal berimplikasi terhadap belum optimalnya kemandirian ekonomi daerah. Terdapat hubungan yang signifikan bahwa kelestarian budaya lokal harus diangkat menjadi isu strategis karena pelestarian dan pengembangan budaya lokal Kota Pekalongan memiliki korelasi yang signifikan dengan kemandirian atau perkembangan ekonomi daerah, sehingga juga berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat. Belum optimalnya pelestarian dan pengembangan budaya lokal Kota Pekalongan, didasarkan atas fakta bahwa; 1) belum optimalnya pembinaan stakeholder budaya dalam sinergi pelestarian budaya lokal; serta 2) Belum optimalnya upaya pelestarian cagar budaya.

Budaya lokal merupakan nilai-nilai lokal hasil budi daya masyarakat suatu daerah yang terbantuk secara alami dan diperoleh melalui proses belajar dari waktu ke waktu. Budaya lokal tersebut bisa berupa hasil seni, tradisi, pola pikir, atau hukum adat. Melestarikan budaya lokal menjadi penting untuk mencegah hilangnya identitas dan kekayaan budaya yang tak ternilai. Budaya lokal merupakan sumber daya berharga bagi pembangunan berkelanjutan, karena menawarkan solusi berbasis kearifan lokal. Isu strategis kelestarian budaya lokal didasarkan pada permasalahan belum optimalnya pelestarian dan pengembangan budaya lokal.

Kota Pekalongan dikenal sebagai salah satu pusat batik terbesar di Indonesia, dengan warisan budaya yang kaya dan beragam. Budaya Pekalongan tidak hanya

tercermin dalam seni batik, tetapi juga dalam tradisi, adat istiadat, dan kehidupan sehari-hari masyarakatnya. Sejarah batik di Pekalongan dimulai sejak zaman kerajaan, di mana batik menjadi bagian dari kehidupan masyarakat. Batik Pekalongan memiliki ciri khas yang membedakannya dari batik daerah lain, yaitu motif yang lebih beragam dan warna yang cerah. Misalnya, batik “Kawung” dan “Mega Mendung” adalah contoh motif yang sangat terkenal. Masyarakat Pekalongan terus melestarikan seni batik ini dengan mengajarkan keterampilan membatik kepada generasi muda, sehingga tradisi ini tetap hidup hingga sekarang. Setiap tahun, Kota Pekalongan mengadakan berbagai festival budaya dan kesenian untuk merayakan kekayaan budaya lokal. Salah satu festival yang paling dinantikan adalah Festival Batik. Masyarakat Pekalongan memiliki berbagai tradisi dan adat istiadat yang masih dilestarikan hingga saat ini. Komunitas di Kota Pekalongan memainkan peran penting dalam pelestarian budaya. Banyak kelompok seni dan komunitas batik yang aktif mengadakan pelatihan dan workshop untuk masyarakat. Sekolah dan lembaga pendidikan di Kota Pekalongan telah memasukkan pembelajaran batik ke dalam kurikulum mereka. Hal ini bertujuan untuk menanamkan rasa cinta terhadap budaya lokal sejak dini kepada anak-anak. Dengan adanya dukungan dari komunitas, budaya Pekalongan dapat terus berkembang dan dikenali oleh generasi berikutnya.

Namun demikian, seluruh hal yang telah dilakukan tersebut di atas, belum mampu melestarikan dan mengembangkan budaya lokal lebih optimal. Dibutuhkan komitmen seluruh pemangku kepentingan untuk berkolaborasi dan bersinergi dalam rangka pelestarian budaya lokal Pekalongan. Salah satu hal yang akan terus dikembangkan yaitu melakukan harmonisasi agar upaya pelestarian dan pengembangan budaya lokal dapat sejalan dengan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

8. Kesejahteraan Masyarakat

Kesejahteraan merupakan suatu tolak ukur dalam menentukan apakah suatu individu ataupun kelompok masyarakat berada pada kondisi yang sejahtera. Kesejahteraan dapat diindikasikan ketika kondisi kesehatan baik, perekonomian yang meningkat, tingkat pendidikan yang tinggi serta kualitas hidupnya yang layak. Kesejahteraan masyarakat merupakan salah satu tujuan dari Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau *Sustainable Development Goals* (SDGs) yang menjadi gambaran dari keberhasilan pemerintah dalam membangun perekonomian sebuah negara. Perekonomian suatu negara sejatinya selalu mengalami perubahan di setiap tahunnya karena adanya kegiatan perekonomian yang berlangsung serta diupayakan semakin meningkat dari periode sebelumnya. Keberhasilan suatu negara dalam mengelola sumber daya yang dimiliki dilihat dari besar kecilnya pendapatan yang diperoleh yang digambarkan dari laju pertumbuhan ekonomi yang semakin meningkat setiap tahunnya. Semakin besar pendapatan yang diperoleh juga akan menggambarkan kondisi kesejahteraan masyarakatnya. Tingkat pendapatan suatu negara juga akan menunjukkan bagaimana kondisi serta tingkat pertumbuhan ekonominya. Pada dasarnya, manfaat dari adanya peningkatan pertumbuhan ekonomi tidak selamanya dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat. Sebagai negara berkembang, Indonesia kerap mengalami berbagai masalah dari ketidakstabilan pertumbuhan ekonomi seperti adanya kesenjangan pendapatan yang tinggi antar masyarakatnya yang menyebabkan angka kemiskinan meningkat sehingga akan berpengaruh pula pada tingkat kesejahteraan masyarakatnya.

Isu strategis kesejahteraan masyarakat harus diangkat karena merupakan upaya sistematis yang ditujukan agar kesejahteraan masyarakat Kota Pekalongan dapat meningkat terus menerus secara optimal. Beberapa permasalahan, urgensi perlu

didorongnya isu strategis kesejahteraan masyarakat ini, meliputi: 1) masih tingginya populasi PPKS fakir miskin; 2) belum optimalnya upaya penurunan angka pengangguran terbuka; 3) belum optimalnya pemenuhan layanan berperspektif gender termasuk pada warga masyarakat berkebutuhan khusus; serta 4) belum optimalnya jaminan hak dan perlindungan anak.

Upaya peningkatan kesejahteraan, khususnya kemiskinan perlu dilakukan melalui berbagai sektor, seperti pendidikan (berupa peningkatan rata-rata sekolah), sektor kesehatan (berupa peningkatan derajat kesehatan masyarakat), ataupun melalui sektor ekonomi (berupa peningkatan keterampilan bekerja dan berusaha, ataupun akses permodalan usaha). Terkait kemiskinan ini, juga harus didasarkan atas kondisi sosiologi dan antropologi masyarakatnya, sehingga pendekatan atau strategi yang dipilih dapat tepat sasaran dan tepat manfaat atau dampaknya.

Isu strategis kesejahteraan masyarakat selaras dengan isu global pembangunan berkelanjutan. Isu tersebut meliputi: mengakhiri segala bentuk kemiskinan dimana pun; menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan; menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia; menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua; serta mencapai kesetaraan gender, memberdayakan kaum perempuan dan pemenuhan hak anak.

Permasalahan lainnya adalah belum optimalnya perwujudan GESI (*Gender Equity Social Inclusion*). Kesetaraan gender dan inklusi sosial merupakan hal yang penting dalam proses pembangunan. Jika kita ingin memastikan bahwa prosesnya adil dan manfaatnya menjangkau kelompok-kelompok yang terpinggirkan, proses pembangunan harus didasari oleh suara-suara yang beragam. Salah satu ukuran yang digunakan adalah IDG dan IPG. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) adalah indeks komposit yang mengukur peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik. Selama lima tahun terakhir belum menunjukkan kecenderungan angka yang meningkat dan capaian tahun 2024 sebesar 65,1 dan masih tertinggal dibandingkan Provinsi Jawa Tengah dengan nilai sebesar 72,8. Indeks Pembangunan Gender (IPG) merupakan indeks pencapaian kemampuan dasar pembangunan manusia yang sama seperti IPM dengan memperhitungkan ketimpangan gender. IPG dapat digunakan untuk mengetahui kesenjangan pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan. Kesetaraan gender terjadi apabila nilai IPM sama dengan nilai IPG. Perkembangan IPG Kota Pekalongan sepanjang tahun 2020-2024 belum menunjukkan kecenderungan yang terus meningkat. Jika dibandingkan dengan IPG Provinsi Jawa Tengah, IPG Kota Pekalongan masih berada di atas rata-rata Provinsi Jawa Tengah. Pada tahun 2024, IPG Kota Pekalongan sebesar 95,49 mengalami sedikit penurunan dibanding tahun 2023. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas sumber daya manusia perempuan di Kota Pekalongan semakin membaik khususnya pada bidang pendidikan, kesehatan dan upaya peningkatan pendapatan, namun belum secara optimal. Sedangkan jika dibandingkan dengan IPG Provinsi Jawa Tengah, IPG Kota Pekalongan masih di atas rata-rata Provinsi Jawa Tengah. Tantangan ke depan adalah mengoptimalkan IDG dan terwujudnya inklusi sosial yang lebih bermakna. Pembangunan tidak hanya ditujukan terhadap masyarakat pada umumnya, tetapi juga kelompok-kelompok marginal, sehingga pembangunan ditujukan untuk seluruh masyarakat.

Akar masalah lainnya, penyebab kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat yang belum optimal adalah belum optimalnya penurunan angka kemiskinan dan pengangguran. Angka kemiskinan dan pengangguran (TPT, tingkat pengangguran terbuka)

adalah dua dari enam indikator kinerja makro penyelenggaraan pemerintahan daerah. Angka kemiskinan Kota Pekalongan sudah menunjukkan kecenderungan yang menurun dari tahun ke tahun, kecuali pada saat pandemi *Covid-19* tahun 2020 dan 2021. Angka kemiskinan Kota Pekalongan tahun 2024 adalah 6,71 persen. Namun demikian penurunan angka kemiskinan tersebut belum optimal. Penurunan angka kemiskinan pada angka satu digit akan mengalami tantangan yang lebih besar karena harus berhadapan dengan kemiskinan struktural, apalagi angka kemiskinan telah mencapai 6,71 persen. Upaya-upaya yang dilakukan tidak hanya bersifat strategi-strategi yang selama ini telah dilakukan, tetapi juga menyangkut kondisi sosial budaya masyarakat, cara pandang maupun perilaku masyarakat miskin. Sementara TPT Kota Pekalongan juga belum menunjukkan kecenderungan penurunan, masih berfluktuasi, serta tidak memiliki korelasi yang signifikan dengan angka pertumbuhan ekonomi. Secara teori, pertumbuhan ekonomi akan berdampak bagi penciptaan lapangan dan kesempatan kerja, sehingga pada gilirannya akan menurunkan TPT. Namun demikian, hal tersebut tidak berlaku di Kota Pekalongan. Oleh karena itu, seperti halnya penanganan kemiskinan, upaya optimalisasi penurunan TPT tahun 2024 adalah sebesar 4,91 persen.

Kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat merupakan suatu kondisi yang dicita-citakan setiap negara maupun daerah. Kualitas dan kesejahteraan masyarakat merupakan kondisi yang menandakan bahwa pembangunan nasional maupun pembangunan daerah berhasil. Kualitas dan kesejahteraan masyarakat merupakan cerminan kehidupan keseharian keberhasilan pembangunan, yang sifatnya bukan bangunan megah menjulang tinggi dan kokoh, tetapi terimplementasi dalam keseharian masyarakatnya. Implementasinya dapat berwujud masyarakat yang aman, nyaman, makmur, berpendidikan dan sehat. Oleh karena itu, Kota Pekalongan merumuskan bahwa peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat yang optimal menjadi isu strategis pembangunan.

Berdasarkan dokumen *Grand Design* Pembangunan Kependudukan (GDPK) Kota Pekalongan Tahun 2022 – 2045, visi pembangunan kependudukan Kota Pekalongan adalah “terwujudnya masyarakat kota pekalongan yang lebih sejahtera, mandiri, dan religius”. Selanjutnya visi ini dijabarkan ke dalam beberapa arah kebijakan yaitu: 1). Meningkatkan kualitas penduduk atau kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan derajat kesehatan, pendidikan, sosial, ekonomi dan budaya dan penguatan karakter Masyarakat; 2). Mengelola pengendalian kuantitas penduduk untuk menekan laju pertumbuhan penduduk secara seimbang dan terkendali, dengan cara mengatur kelahiran, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan reproduksi dan keluarga berencana; 3). Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam rangka penanggulangan kemiskinan melalui peningkatan kualitas angkatan kerja, penyediaan lapangan kerja, peningkatan jejaring perluasan kesempatan kerja dan pemberdayaan masyarakat dan desa; 4). Meningkatkan kualitas, kesejahteraan dan ketahanan keluarga dalam rangka pembangunan keluarga secara terintegrasi dan berkesinambungan; 5). Mengatur persebaran dan mobilitas penduduk secara lebih seimbang sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan, dengan upaya pendekatan pembangunan secara merata secara kewilayahan dan regional; 6). Mengembangkan data kependudukan yang akurat dan dapat dipercaya, yang terintegrasi dalam satu sistem informasi serta dapat dimanfaatkan sebagai dasar bagi pengambilan keputusan secara *valid*.

Sedangkan tujuan pembangunan kependudukan Kota Pekalongan adalah sebagai berikut: 1). tercapainya kualitas penduduk yang tinggi untuk mencapai Kota Pekalongan yang maju, mandiri, adil, sejahtera, berkelanjutan, dan berbudaya; 2. terwujudnya data dan informasi kependudukan yang akurat (*valid*) dan dapat dipercaya serta terintegrasi

melalui pengembangan sistem informasi data kependudukan; 3). terwujudnya tertib administrasi sesuai dengan ketentuan/pedoman; 4). terwujudnya peningkatan kualitas sumber daya manusia serta peningkatan koordinasi, sinkronisasi dalam penyelenggaraan di bidang administrasi kependudukan; dan 5). terwujudnya peningkatan pelayanan masyarakat di bidang administrasi kependudukan.

Tujuan utama dalam penyusunan GDPK adalah untuk mewujudkan kualitas penduduk yang tinggi sehingga dapat menjadi faktor yang penting dalam mencapai kemajuan bangsa. Selain sebagai sebuah rujukan dalam perencanaan pembangunan di bidang kependudukan dokumen Grand Design Pembangunan Kependudukan yang berisi 5 pilar pembangunan kependudukan yang selanjutnya disebut dengan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) 5 Pilar menjadi penting sebagai alat bantu dalam memantau dan mengevaluasi pelaksanaan pembangunan di bidang kependudukan, agar arahnya tidak melenceng dari garis-garis yang telah ditetapkan dalam perencanaan pembangunan di bidang kependudukan itu sendiri.

2.7.2.8. Keterkaitan Isu Strategis Kota Pekalongan, Isu Internasional, Isu/ Kebijakan Nasional, Isu/ Kebijakan Provinsi Jawa Tengah serta Isu Strategis KLHS

Berdasarkan uraian di atas, hubungan isu strategis Kota Pekalongan dengan isu Isu Internasional, Isu/Kebijakan Nasional, Isu/Kebijakan Provinsi Jawa Tengah dijelaskan dalam tabel berikut.

Tabel II-118
Keterkaitan Isu Strategis Kota Pekalongan, Isu Internasional, Isu/ Kebijakan Nasional,
Isu/ Kebijakan Provinsi Jawa Tengah serta Isu Strategis KLHS

NO	Isu Strategis Kota Pekalongan	Masalah	Isu Internasional (SDGs)	Isu / Kebijakan Nasional	Isu / Kebijakan Provinsi Jawa Tengah	Isu Strategis KLHS
1	2	3	4	5	6	7
1	Tata kelola pemerintahan	a. Belum optimalnya implementasi sistem akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah b. Belum optimalnya pengelolaan keuangan daerah c. Belum optimalnya penguatan integritas dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih d. Belum optimalnya pelayanan publik pemerintahan baik pada tingkat Kota ataupun tingkat Perangkat Daerah	16. Menguatkan masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua, dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel dan inklusif di semua tingkatan;	7. Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi serta Pemberantasan Korupsi dan Narkoba	7. Tata kelola pemerintahan yang dinamis.	5. Perlunya meningkatkan reformasi birokrasi dalam keamanan, pelayanan publik, dan kapasitas keuangan daerah
2	Kualitas Sumber Daya Manusia	a. Belum optimalnya penyediaan akses dan kualitas mutu pendidikan serta kesadaran bersekolah b. Belum optimalnya implementasi pendidikan karakter dan pendidikan keagamaan c. Belum optimalnya upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat	3. Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia; 4. Menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua;	4. Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Kesenjangan Gender	5. Kualitas hidup dan daya saing sumber daya manusia;	1. Belum meratanya akses pemenuhan kualitas hidup sumber daya manusia dan kesejahteraan masyarakat
3	Perekonomian Daerah yang berdaya saing	a. Belum optimalnya upaya peningkatan nilai investasi daerah b. Belum optimalnya laju pertumbuhan PDRB pada lapangan usaha perdagangan c. Belum optimalnya laju pertumbuhan PDRB pada lapangan usaha industri pengolahan	8. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua; 11. Mengurangi kesenjangan intra dan antarnegara; 12. Menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan.	3. Penciptaan Lapangan Kerja Berkualitas dan Pengembangan Kewirausahaan 5. Hilirisasi dan Industrialisasi untuk Nilai Tambah Ekonomi	1. Perekonomian daerah yang berdaya saing dan berkelanjutan.	4. Belum optimalnya daya saing dan keberlanjutan sektor ekonomi unggulan daerah

NO	Isu Strategis Kota Pekalongan	Masalah	Isu Internasional (SDGs)	Isu / Kebijakan Nasional	Isu / Kebijakan Provinsi Jawa Tengah	Isu Strategis KLHS
1	2	3	4	5	6	7
		d. Belum optimalnya laju pertumbuhan PDRB pada lapangan usaha akomodasi dan makan minum		6. Pembangunan dari Desa untuk Pemerataan Ekonomi		
4	Infrastruktur Perkotaan dan Permukiman	a. Belum optimalnya kualitas dan kuantitas sarpras perkotaan	6. Menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua; 7. Menjamin akses energi yang terjangkau, handal, berkelanjutan, dan modern untuk semua; 9. Membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi; 11. Menjadikan kota dan permukiman inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan; 17. Memperkuat sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan.	3. Penciptaan Lapangan Kerja Berkualitas dan Pengembangan Kewirausahaan 6. Pembangunan dari Desa untuk Pemerataan Ekonomi	3. Penyediaan prasarana dan sarana yang berkualitas dan ramah lingkungan; 4. Keberlanjutan sumber daya alam dan lingkungan hidup, serta penanggulangan bencana.	3. Peningkatan intensitas bencana banjir dan rob akibat perubahan iklim dan penataan ruang
5	Kondusivitas Wilayah	a. Belum optimalnya kondusivitas daerah dalam mendukung investasi	16. Memperkuat masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua, dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel dan inklusif di semua tingkatan.	1. Penguatan Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM) 2. Penguatan Pertahanan dan Keamanan Nasional 8. Harmoni Lingkungan, Budaya, dan Toleransi Beragama	6. Kekuatan budaya sebagai karakter dan jatidiri masyarakat.	5. Perlunya meningkatkan reformasi birokrasi dalam keamanan, pelayanan publik, dan kapasitas keuangan daerah

NO	Isu Strategis Kota Pekalongan	Masalah	Isu Internasional (SDGs)	Isu / Kebijakan Nasional	Isu / Kebijakan Provinsi Jawa Tengah	Isu Strategis KLHS
1	2	3	4	5	6	7
6.	Kualitas Lingkungan Hidup	a. Belum optimalnya kualitas lingkungan hidup yang mendukung kenyamanan dan iklim investasi	13. Mengambil tindakan cepat untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya; 14. Melestarikan dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya kelautan dan samudera untuk pembangunan berkelanjutan; 15. Melindungi, merestorasi, dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan, mengelola hutan secara lestari, menghentikan penggurunan, memulihkan degradasi lahan, serta menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati.	8. Harmoni Lingkungan, Budaya, dan Toleransi Beragama	3. Penyediaan prasarana dan sarana yang berkualitas dan ramah lingkungan 4. Keberlanjutan sumber daya alam dan lingkungan hidup, serta penanggulangan bencana	2. Belum optimalnya pengelolaan sanitasi, sampah, dan air bersih
7	Kelestarian budaya lokal	Belum optimalnya pelestarian dan pengembangan budaya lokal	-	8. Harmoni Lingkungan, Budaya, dan Toleransi Beragama	6. Kekuatan budaya sebagai karakter dan jati diri masyarakat.	4. Belum optimalnya daya saing dan keberlanjutan sektor ekonomi unggulan daerah
8	Kesejahteraan Masyarakat	a. Masih tingginya populasi PPKS fakir miskin b. Belum optimalnya upaya penurunan angka pengangguran terbuka c. Belum optimalnya pemenuhan layanan berperspektif gender termasuk pada warga masyarakat berkebutuhan khusus d. Belum optimalnya jaminan hak dan perlindungan anak	1. Mengakhiri segala bentuk kemiskinan dimana pun; 2. Menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan; 5. Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum perempuan;	3. Penciptaan Lapangan Kerja Berkualitas dan Pengembangan Kewirausahaan	2. Ketahanan pangan yang berkelanjutan	1. Belum meratanya akses pemenuhan kualitas hidup sumber daya manusia dan kesejahteraan masyarakat

Sumber: Bapperida Kota Pekalongan, 2025

BAB III VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

3.1. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

3.1.1. Visi

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJM Daerah pada dasarnya merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah sebagaimana disebutkan pada Pasal 12 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Sesuai dengan visi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pekalongan periode tahun 2025-2029, maka visi RPJM Daerah Tahun 2025-2029 adalah :

“Mewujudkan Kota Pekalongan Lebih Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan Berlandaskan Akhlaqul Karimah”

Untuk mengetahui gambaran Visi tersebut, maka perlu diberikan gambaran pemaknaan atas uraian visi. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan arah yang lebih jelas atas kondisi atau gambaran yang ingin diwujudkan pada akhir periode RPJM Daerah Tahun 2025-2029.



Sumber : Bapperida Kota Pekalongan, 2025

Gambar III-1
Gambaran Visi RPJM Daerah Tahun 2025-2029

3.1.1.1. Gambaran Kota Pekalongan dalam visi tahun 2025-2029

Kota Pekalongan lahir pada tanggal 1 April 1906. Hal ini tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 6 Tahun 2007 tentang Penetapan Hari Jadi Kota Pekalongan. Dalam konsiderannya dinyatakan secara sadar tentang arti penting Hari Jadi bagi warga Kota

Pekalongan untuk memperkokoh jati diri sekaligus untuk meningkatkan motivasi, rasa kecintaan, kebanggaan dan rasa handarbeni (memiliki) terhadap daerahnya.

Kota Pekalongan memiliki logo berupa perisai berwarna kuning dengan komponen yang menonjol berupa canting, ikan, melati, dan benteng. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 3 Tahun 2017 tentang Lambang Daerah Kota Pekalongan disebutkan bahwa desain Logo Daerah Kota Pekalongan mempunyai 4 elemen yang terkandung dalam logo Kota Pekalongan tersebut, yaitu warna dasar kuning emas muda melambangkan kesejahteraan berisi lukisan canting berwarna merah sebagai lambang hidup dan tangkainya berwarna hijau daun padi yang sedang tumbuh sebagai lambang tumbuh kesejahteraan, kemudian motif batik Jlamprang sebagai motif asli Kota Pekalongan, warna dasar biru menggambarkan laut berisi tiga ikan putih perak menggambarkan trias politika di dalam jaring hitam yang menggambarkan sejarah pertumbuhan asal mulanya Kota Pekalongan (A--Pek--Alongan). Terakhir adalah Perisai bertajuk lukisan benteng berwarna hitam batu dengan lima menara yang melambangkan Pancasila dan kekuatan. Kemudian, pada bagian tengah berupa pintu gerbang dan sedikit lebih tinggi dari yang lain, menggambarkan adanya satu sila dari Pancasila yang menonjol yaitu "Ketuhanan Yang Maha Esa" yang berarti penduduknya beribadah. Dengan demikian, baik hari jadi maupun logo, keduanya telah menjadi pemersatu dan pengikat dinamika hidup dan kehidupan Pemerintah dan masyarakat Kota Pekalongan.

Kota Pekalongan berada di titik tengah pantai utara Pulau Jawa. Dalam jalur perekonomian regional maupun nasional, posisi ini sangat menguntungkan karena menjadi jalur utama perekonomian antar berbagai kota di pantai utara Jawa. Distribusi barang, baik untuk keperluan industri dan produksi ataupun untuk keperluan konsumsi antar kota di pantai utara Pulau Jawa, dipastikan akan melalui Kota Pekalongan. Selain distribusi barang, Kota Pekalongan juga dilalui jalur kereta api, dimana semua kereta penumpang berhenti di Stasiun Besar Pekalongan.

Kondisi geografis yang cenderung memberikan keuntungan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, kondisinya sedikit berbeda dengan kondisi geologi Kota Pekalongan. Karakteristik batuan muda yang cenderung mampat serta ditambah dengan aktivitas manusia di atas hamparan Kota Pekalongan telah menyebabkan fenomena land subsidence (amblesan tanah) yang cukup serius. Saat ini, di beberapa wilayah Kota Pekalongan telah memiliki ketinggian daratan yang berada di bawah permukaan air laut (under sea level). Di sisi lain, fenomena kenaikan permukaan air laut sebagai akibat pemanasan global telah memperburuk posisi daratan Kota Pekalongan dibandingkan secara relatif dengan permukaan air laut. Oleh karena itu, berbagai bangunan tanggul pantai dan sungai, serta operasionalisasi stasiun pompa untuk mendukung fungsi sistem drainase akan menjadi salah satu wujud Kota Pekalongan di tahun-tahun yang akan datang.

Upaya untuk melindungi Kota Pekalongan dengan berbagai bangunan infrastruktur tersebut akan memberikan ruang bagi penduduk Kota Pekalongan dalam menjalankan aktivitasnya, baik sosial, ekonomi, ataupun aktivitas lainnya. Jumlah penduduk Kota Pekalongan saat ini adalah 321.095 jiwa (tahun 2024). Jumlah ini diprediksikan akan menjadi 340.250 jiwa pada tahun 2030. Ini berarti Kota Pekalongan akan memiliki kepadatan 6.917,17 jiwa / km². Jumlah tersebut, terdiri dari 224.626 jiwa (69,96%) penduduk usia produktif, dan 96.469 jiwa (30,04%) usia tidak produktif, atau dengan kata lain memiliki angka ketergantungan 42,95. Sedangkan dilihat dari tingkat pendidikannya, diprediksikan penduduk Kota Pekalongan akan memiliki tingkat pendidikan minimal SLTA Kelas 2 pada tahun 2030.

Kondisi penduduk dengan tingkat pendidikan yang relatif tinggi tersebut, akan sangat mendukung pondasi ekonomi Kota Pekalongan yang meletakkan pondasinya pada industri pengolahan, serta perdagangan dan jasa, dengan produk unggulan bertumpu pada batik, perikanan, wisata belanja, serta kuliner.

Hal lain yang tetap akan terjaga adalah karakteristik religius dengan tetap mengedepankan kerukunan antar umat beragama. Aspek akhlaqul karimah, dijaga untuk terus terbangun dari berbagai aspek tata kehidupan masyarakat.

3.1.1.2. Lebih Maju

Beroperasinya Pasar Banjarsari akan menjadi momentum baru dalam menumbuhkan perdagangan konvensional dan menyasar langsung ke UMKM dan masyarakat berpenghasilan rendah. Demikian juga dengan Taman Sorogenen yang semula menjadi lokasi pasar darurat pasca terbakarnya Pasar Banjarsari, akan dibangun menjadi fasilitas olahraga, taman, kuliner, dan pasar burung malam, juga akan menjadi pendukung majunya aktivitas perdagangan di Kota Pekalongan. Selain perdagangan konvensional, masyarakat Kota Pekalongan, terutama yang berada dalam link value perdagangan produk batik, juga terus meningkatkan aktivitasnya melalui format “e-market place”.

Pada sektor lain, yaitu perikanan, juga diharapkan akan mendapatkan momentum baru dalam bertumbuh kembang di waktu yang akan datang. Rencana pembangunan pelabuhan perikanan *onshore* melalui *Project Sector Loan for Integrated Fishing Ports and International Fish Markets* (IFP-IFM) *Phase I* yang bersumber dari pembiayaan JICA, diharapkan akan menjadi pendorong yang cukup kuat bagi upaya memajukan perikanan di Kota Pekalongan. Momentum ini juga akan menjadi bangkitan ekonomi baru pada titik dan jalur distribusi perikanan dari dan ke pelabuhan perikanan tersebut.

Kemajuan lain yang nantinya akan terwujud adalah penataan ruang-ruang terbuka publik, jalan kota, air bersih, sanitasi dan persampahan, serta pengembangan infrastruktur pengendali banjir dan rob yang merata di kawasan rawan bencana banjir dan rob. Penataan Taman Sorogenen setelah berpindahnya aktivitas pasar darurat akan memecahkan keramaian di alun-alun yang sudah sangat padat dan sangat mengurangi kenyamanan pengunjung. Penataan alun-alun juga nantinya akan didukung dengan adanya pembangunan pusat kuliner di eks pendopo oleh Pemerintah Kabupaten Pekalongan.

Peningkatan kualitas jalan kota juga secara bertahap dan berkelanjutan terus dilakukan dalam mendukung layanan mobilitas penduduk. Hal yang mungkin akan menjadi tantangan ke depan adalah penanganan terintegrasi atas persimpangan sebidang dengan rel kereta api. Dengan semangat Pemerintah Pusat untuk mendorong kolaborasi dan sinergi antar level pemerintahan ataupun antar pemerintah daerah diharapkan dapat menjadi peluang bagi penataan persimpangan sebidang tersebut.

Infrastruktur pelayanan publik lain yang diharapkan akan dapat diwujudkan adalah peningkatan layanan air bersih, sanitasi dan persampahan. Dorongan untuk terus mengembangkan SPAMREG PETANGLONG, serta adanya berbagai rekayasa ilmu pengetahuan khususnya dalam pengelolaan air payau menjadi air bersih akan dapat mendukung percepatan pemenuhan layanan air bersih dari sumber air baku permukaan. Sementara itu, untuk layanan sanitasi dan persampahan, Pemerintah Kota Pekalongan akan terus mendorong peran serta masyarakat secara aktif mengingat kedua hal tersebut dirasakan akan sangat bergantung pada peran masyarakat. Disamping itu, Pemerintah Pusat juga telah menetapkan Pembangunan TPST Regional Pekalongan-Batang ke dalam Program Pembangunan Kewilayahan RPJM Nasional 2024-2029. Tentu saja, kesempatan ini harus dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan pelayanan persampahan di Kota Pekalongan.

Dan yang terakhir adalah infrastruktur pengendali banjir dan rob, dimana kebijakan ini akan bersinergi dengan kebijakan Pemerintah Pusat yang telah menetapkan Peningkatan Ketahanan Banjir Perkotaan Pekalongan dan Pembangunan Pengaman Pantai Pesisir Pekalongan - Batang dalam Program Pembangunan Kewilayahan RPJM Nasional 2024-2029.

Kemajuan lain yang akan diwujudkan adalah kualitas layanan publik dengan akan terus meningkatnya Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Layanan tersebut, tidak hanya bersifat operasionalisasi internal birokrasi pemerintahan, tetapi juga layanan untuk aktivitas bisnis, ataupun layanan kesejahteraan masyarakat.

3.1.1.3. Lebih Sejahtera

Berbagai upaya pembangunan yang akan dilakukan, mulai dari infrastruktur (pengendalian banjir dan rob beserta sistem drainase perkotaannya, jaringan jalan, listrik, layanan telekomunikasi, air bersih, sanitasi dan persampahan), sarana dan prasarana produksi batik dan perikanan beserta jaringan distribusi perdagangannya, serta penataan taman kota untuk menjadikan kondisi kota yang nyaman, diharapkan akan sejalan dengan penyerapan tenaga kerja di Kota Pekalongan. Disamping itu, perkembangan lingkungan eksternal Kota Pekalongan, baik di regional Jawa Tengah ataupun lingkungan nasional dan global, diharapkan akan semakin mampu memberikan pengaruh positif dalam upaya menurunkan tingkat pengangguran terbuka.

Berkurangnya pengangguran, baik karena bekerja ataupun melakukan wirausaha sebagai dampak banyaknya aktivitas pembangunan yang akan membuka lapangan kerja dan lapangan usaha, diharapkan akan berdampak positif terhadap peningkatan pendapatan per kapita penduduk. Kondisi tersebut juga diharapkan akan didukung oleh dampak positif dari program strategis nasional, berupa Makan Bergizi Gratis bagi anak sekolah. Mekanisme Program Makan Bergizi Gratis yang melibatkan UMKM, baik di sisi produksi ataupun pasokan bahan makanan, setidaknya akan memberikan dampak berupa terdistribusikannya aliran uang UMKM dan masyarakat berpenghasilan rendah. Jika ini berjalan, maka bukan tidak mungkin selain akan meningkatkan pendapatan per kapita, juga akan menurunkan kesenjangan pendapatan (*Gini Ratio*).

Saat ini, gini *ratio* Kota Pekalongan berada di angka 0,330. Dengan adanya distribusi pendapatan melalui kebijakan pemerintah yang mendorong peran UMKM seperti halnya Makan Bergizi Gratis, maka gini *ratio* Kota Pekalongan diharapkan akan berada di bawah angka 0,3 di akhir RPJM Daerah pada tahun 2030.

Dampak ikutan lain sebagai akibat kondisi di atas adalah menurunnya angka kemiskinan. Saat ini, angka kemiskinan di Kota Pekalongan masih di angka 6,81. Berbagai alokasi anggaran telah diluncurkan secara kolaboratif oleh Pemerintah Pusat, Provinsi, Kota Pekalongan, dan juga peran dunia usaha melalui dana Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungannya (TJSL) atau CSR. Alokasi anggaran tersebut dikemas dengan berbagai program, seperti program menurunkan beban pengeluaran penduduk miskin, program peningkatan ketrampilan bekerja dan berusaha, ataupun juga program stimulan modal usaha. Gayung bersambut dengan berbagai implementasi program tersebut adalah upaya Pemerintah Pusat yang telah menyatukan data sasaran program penanggulangan kemiskinan, yaitu DTSEN (Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional). Dengan adanya integrasi data-data tersebut, diharapkan berbagai program yang dilaksanakan akan lebih tepat sasaran. Dengan demikian, angka kemiskinan di Kota Pekalongan diharapkan akan turun di bawah 5,02 - 6,27 persen pada tahun 2030.

Rangkaian dari menurunnya angka kemiskinan ini nantinya adalah semakin baiknya kondisi pendidikan dan kesehatan masyarakat Kota Pekalongan. Kondisi Pendidikan yang akan mencerminkan membaiknya pendidikan masyarakat dapat dilihat dari rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah. Saat ini, rata-rata lama sekolah Kota Pekalongan adalah 9,34 tahun, sedangkan harapan lama sekolah adalah 12,89 tahun. Pada tahun 2030, kondisi ini diharapkan akan mencapai angka di atas 11 tahun untuk rata-rata lama sekolah, dan mencapai angka di atas 14 tahun untuk harapan lama sekolah. Sedangkan untuk Kesehatan yang akan diukur dengan

Indeks Keluarga Sehat, dimana saat ini telah mencapai 0,38 maka di tahun 2030 diharapkan akan dapat mencapai angka 0,42.

3.1.1.4. Berkelanjutan

Menurut Undang-undang No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan. Dalam konteks Kota Pekalongan, pembangunan berkelanjutan setidaknya mencakup aspek Sumber Daya Manusia yang dilihat dari kesejahteraan (kemiskinan, pendidikan, kesehatan, kesetaraan gender, perlindungan perempuan dan anak, dan juga pangan), kemudian aspek lingkungan seperti air bersih, sanitasi, pengelolaan limbah dan sampah, serta tidak kalahnya pentingnya aspek ekonomi dimana Kota Pekalongan sangat bertumpu pada industri pengolahan dan sektor perdagangan dengan produk unggulan berupa batik, perikanan, dan wisata (belanja dan religi).

Dalam kerangka pembangunan berkelanjutan dari aspek Sumber Daya Manusia, pada tahun 2030 nanti diharapkan Kota Pekalongan akan memiliki penduduk dengan tingkat kemiskinan 5,02 - 6,27 persen, rata-rata lama pendidikan 9,87 tahun, indeks kesehatan 0.42 (indeks keluarga sehat) dan Pola Pangan Harapan 95,12. Dengan kondisi ini, maka keberlanjutan pembangunan menuju pada kondisi yang lebih maju dan sejahtera akan dapat terus dilakukan di masa-masa yang akan datang.

Sementara itu, jika dilihat dari aspek lingkungan, kondisi Kota Pekalongan pada tahun 2030 diharapkan akan dapat terwujudkan pemenuhan cakupan layanan air bersih dari sumber air baku permukaan sebanyak 34,58 persen, cakupan layanan sanitasi mencapai 12 persen, layanan persampahan 96,85 persen, dan pengelolaan limbah dapat mencapai 1,35 persen terselesaikan dari sisi hulu. Kondisi seperti ini diharapkan akan dapat memberikan jaminan ketersediaan daya dukung lingkungan yang akan dapat digunakan sebagai sumber daya pembangunan oleh generasi yang akan datang.

3.1.1.5. Belandaskan Akhlaqul Karimah

Pembangunan Kota Pekalongan yang maju, sejahtera, dan berkelanjutan harus berpijak pada nilai-nilai moral yang kuat. "Belandaskan Akhlaqul Karimah" menegaskan bahwa setiap kebijakan, program, dan interaksi sosial dalam pemerintahan serta masyarakat harus mencerminkan akhlak yang mulia. Akhlaqul Karimah bukan sekadar aspek spiritual, tetapi juga menjadi pedoman dalam membangun etos kerja yang jujur, amanah, dan profesional di segala bidang kehidupan. Dengan nilai ini, Pekalongan tidak hanya berkembang dalam aspek fisik dan ekonomi, tetapi juga dalam karakter masyarakatnya yang beradab dan harmonis.

Dalam tata kelola pemerintahan, Akhlaqul Karimah menjadi prinsip utama dalam menciptakan pelayanan publik yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Setiap pemimpin dan aparatur pemerintah diharapkan menjunjung tinggi integritas, mengedepankan keadilan, dan menghindari praktik korupsi. Dengan kepemimpinan yang berakhlak, masyarakat akan semakin percaya pada pemerintahan, yang pada akhirnya memperkuat partisipasi publik dalam pembangunan kota.

Pada aspek sosial dan budaya, penerapan Akhlaqul Karimah berarti membangun masyarakat yang saling menghormati, peduli, dan memiliki semangat gotong royong. Kota Pekalongan harus menjadi tempat di mana keberagaman budaya dan agama dapat hidup berdampingan dengan harmonis, serta nilai-nilai luhur seperti tolong-menolong, kejujuran, dan rasa tanggung jawab ditanamkan sejak dini melalui pendidikan, keluarga, dan lingkungan sosial.

Dalam bidang ekonomi dan pembangunan berkelanjutan, prinsip Akhlaqul Karimah menuntun dunia usaha dan industri agar beroperasi secara etis, adil, dan berwawasan lingkungan. Pertumbuhan ekonomi tidak boleh mengorbankan kesejahteraan sosial atau merusak lingkungan. Oleh karena itu, pengembangan usaha berbasis syariah, bisnis yang bertanggung jawab, serta praktik industri yang ramah lingkungan harus terus diperkuat agar kemajuan Pekalongan tidak hanya menguntungkan segelintir pihak, tetapi dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.

"Berlandaskan Akhlaqul Karimah" bukan hanya semboyan, tetapi menjadi pedoman dalam membangun Pekalongan yang lebih maju, sejahtera, dan berkelanjutan. Dengan menanamkan nilai-nilai akhlak yang mulia dalam setiap aspek kehidupan, Pekalongan dapat tumbuh menjadi kota yang tidak hanya unggul dalam pembangunan fisik, tetapi juga dalam kualitas moral dan kebahagiaan warganya.

3.1.2. Misi

Untuk mewujudkan visi tersebut, RPJM Daerah Tahun 2025-2029 ini merumuskan 9 (sembilan) misi yang menjawab isu strategis daerah sebagaimana tersaji pada tabel Tabel III-1. Misi ini akan menjadi pemandu tugas bersama antara Pemerintah dan seluruh komponen masyarakat.

Tabel III-1
Keterkaitan Isu Strategis dengan Misi Daerah

ISU STRATEGIS	MISI DAERAH
1. Tata Kelola pemerintahan	Misi 1: Menjunjung tinggi hukum demi menjamin hak-hak rakyat dengan mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, Kolaboratif, dan Sinergis sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945
2. Kualitas Sumber Daya Manusia	Misi 2: Meningkatkan Akses dan Kualitas Pendidikan di semua jenjang secara merata Misi 3: Meningkatkan kualitas kesehatan dan mewujudkan jaminan Layanan Kesehatan Masyarakat
3. Perekonomian Daerah yang berdaya saing	Misi 6: Membangun Kemandirian Ekonomi daerah berbasis potensi sumber daya lokal.
4. Infrastruktur Perkotaan dan Permukiman	Misi 4: Membangun Infrastruktur yang Berkelanjutan dan Ramah Lingkungan
5. Kondusivitas Wilayah	Misi 8: Meningkatkan keamanan dan kondusivitas wilayah.
6. Kualitas Lingkungan Hidup	Misi 9: Mewujudkan Pengelolaan Lingkungan yang Bersih dan Berkelanjutan. Misi 4: Membangun Infrastruktur yang Berkelanjutan dan Ramah Lingkungan.
7. Kelestarian budaya lokal	Misi 7: Melestarikan dan Mengembangkan Budaya Lokal.
8. Kesejahteraan Masyarakat	Misi 5: Peningkatan Layanan untuk mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat.

Sumber: Bapperida Kota Pekalongan, 2025

3.1.2.1. Menjunjung tinggi hukum demi menjamin hak-hak rakyat dengan mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, Kolaboratif, dan Sinergis sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945

Fondasi utama dalam mencapai Kota Pekalongan yang lebih maju, sejahtera, dan berkelanjutan berlandaskan Akhlaqul Karimah adalah pemerintahan yang berlandaskan hukum yang memastikan bahwa setiap kebijakan dan tindakan pemerintah didasarkan pada prinsip keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat. Dengan menjunjung tinggi hukum, pemerintah Kota Pekalongan dapat membangun kepercayaan masyarakat, menciptakan rasa aman, serta menegakkan keadilan sosial di semua aspek kehidupan.

Transparansi dan akuntabilitas dalam tata kelola pemerintahan menjadi kunci dalam menciptakan sistem birokrasi yang bersih dan responsif. Setiap kebijakan harus dibuat secara terbuka, dengan melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan serta memastikan bahwa penggunaan anggaran daerah dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, potensi penyalahgunaan wewenang dan korupsi dapat ditekan, sehingga pembangunan berjalan lebih efektif dan benar-benar memberikan manfaat bagi kesejahteraan rakyat.

Prinsip kolaborasi dan sinergi dalam pemerintahan juga sangat penting untuk mewujudkan Pekalongan yang lebih maju dan berkelanjutan. Pemerintah tidak dapat bekerja sendiri dalam membangun kota, tetapi harus menggandeng berbagai pihak, termasuk akademisi, pelaku usaha, komunitas, dan media, guna menciptakan solusi yang inovatif dan tepat sasaran. Melalui pendekatan sinergis, setiap kebijakan yang dibuat dapat selaras dengan kebutuhan masyarakat serta mampu mengatasi berbagai tantangan pembangunan secara efektif.

Dengan mengimplementasikan tata kelola pemerintahan yang baik sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945, Pekalongan dapat mewujudkan kesejahteraan yang berkeadilan serta pembangunan yang inklusif bagi seluruh warganya. Hal ini juga sejalan dengan prinsip Akhlaqul Karimah, di mana nilai-nilai moral seperti kejujuran, keadilan, dan kepedulian menjadi pedoman utama dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dengan demikian, misi ini menjadi landasan kokoh dalam mencapai visi Kota Pekalongan yang lebih maju, sejahtera, dan berkelanjutan dalam bingkai nilai-nilai luhur dan hukum yang berkeadilan.

3.1.2.2. Meningkatkan Akses dan Kualitas Pendidikan di semua jenjang secara merata

Misi ini menekankan pentingnya pemerataan akses pendidikan yang berkualitas bagi seluruh masyarakat Kota Pekalongan, tanpa terkecuali. Pendidikan yang baik adalah kunci untuk menciptakan sumber daya manusia yang unggul, berdaya saing, dan memiliki karakter berlandaskan Akhlaqul Karimah. Oleh karena itu, pemerintah harus memastikan bahwa setiap anak, tanpa memandang latar belakang ekonomi atau geografis, memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan yang layak.

Peningkatan kualitas pendidikan mencakup penguatan kurikulum yang relevan dengan kebutuhan zaman, peningkatan kompetensi guru, serta penyediaan sarana dan prasarana pendidikan yang memadai. Selain itu, sinergi antara sekolah, dunia usaha, dan perguruan tinggi perlu diperkuat agar pendidikan di Pekalongan tidak hanya berorientasi pada teori, tetapi juga membekali peserta didik dengan keterampilan praktis yang sesuai dengan tuntutan dunia kerja dan industri.

Pemerintah juga harus mendorong inovasi dalam sistem pendidikan, termasuk pemanfaatan teknologi digital untuk memperluas akses belajar. Pendidikan berbasis karakter dan kearifan lokal juga harus dikembangkan untuk memastikan bahwa generasi mendatang

tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga memiliki moral yang kuat sesuai dengan nilai-nilai Akhlaqul Karimah.

Misi ini bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang lebih maju dan sejahtera, di mana setiap individu memiliki kesempatan untuk berkembang dan berkontribusi bagi kemajuan kota. Pendidikan yang merata dan berkualitas akan menjadi fondasi bagi pembangunan yang berkelanjutan.

3.1.2.3. Meningkatkan kualitas kesehatan dan mewujudkan jaminan Layanan Kesehatan Masyarakat

Peningkatan kualitas kesehatan mencakup penguatan layanan di puskesmas, rumah sakit, serta fasilitas kesehatan lainnya agar lebih responsif dan efisien dalam menangani kebutuhan masyarakat. Pemanfaatan teknologi digital dalam pelayanan kesehatan, seperti rekam medis elektronik dan layanan telemedicine, juga dapat menjadi solusi untuk meningkatkan akses dan efektivitas layanan kesehatan, terutama bagi kelompok rentan dan masyarakat di daerah dengan akses terbatas.

Selain itu, aspek preventif harus menjadi prioritas utama dalam kebijakan kesehatan. Program edukasi mengenai pola hidup sehat, peningkatan gizi, pencegahan penyakit menular, serta promosi kesehatan mental harus diperluas agar masyarakat lebih sadar dan proaktif dalam menjaga kesehatannya. Pemerintah juga perlu memperkuat jaminan kesehatan bagi seluruh warga, baik melalui optimalisasi BPJS maupun program subsidi bagi masyarakat kurang mampu, sehingga tidak ada warga yang tertinggal dalam mendapatkan hak kesehatan mereka.

Misi ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh masyarakat Kota Pekalongan dapat mengakses layanan kesehatan yang berkualitas, adil, dan berkelanjutan. Kesehatan merupakan hak dasar setiap warga dan menjadi faktor utama dalam menciptakan masyarakat yang produktif serta sejahtera. Oleh karena itu, pemerintah harus berkomitmen dalam meningkatkan infrastruktur kesehatan, memperbaiki sistem layanan, serta memastikan tersedianya tenaga medis yang profesional dan merata di seluruh wilayah kota. Dengan misi ini, Kota Pekalongan akan menjadi kota yang lebih sehat, di mana setiap warganya memiliki kualitas hidup yang lebih baik. Peningkatan kualitas kesehatan dan jaminan layanan yang merata akan mendukung pencapaian visi kota yang lebih maju, sejahtera, dan berkelanjutan, berlandaskan nilai-nilai Akhlaqul Karimah.

3.1.2.4. Membangun Infrastruktur yang Berkelanjutan dan Ramah Lingkungan

Misi ini menegaskan komitmen Kota Pekalongan dalam membangun infrastruktur yang tidak hanya mempertimbangkan fungsi, tetapi juga berorientasi pada keberlanjutan dan kelestarian lingkungan. Infrastruktur yang baik menjadi pilar utama dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat, mendukung pertumbuhan ekonomi, serta menciptakan kota yang lebih tangguh terhadap perubahan iklim dan bencana alam. Oleh karena itu, setiap pembangunan harus dirancang dengan prinsip efisiensi energi, pengurangan emisi karbon, serta pemanfaatan teknologi hijau agar dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi generasi mendatang.

Pembangunan yang berkelanjutan berarti memastikan bahwa infrastruktur seperti jalan, drainase, jembatan, dan fasilitas umum lainnya dibangun dengan perencanaan yang matang dan tahan terhadap tantangan lingkungan. Salah satu prioritas utama adalah mengatasi permasalahan banjir rob yang sering terjadi di Pekalongan dengan membangun sistem pengendalian air yang lebih baik, termasuk peningkatan kapasitas drainase, serta pengelolaan tata air yang berbasis ekosistem.

Melalui misi ini, Kota Pekalongan tidak hanya berfokus pada kemajuan infrastruktur, tetapi juga memastikan bahwa setiap pembangunan memberikan dampak positif bagi lingkungan dan

kesejahteraan masyarakat. Dengan infrastruktur yang berkelanjutan dan ramah lingkungan, kota ini akan menjadi lebih layak huni, lebih tangguh menghadapi perubahan iklim, serta selaras dengan visi untuk menjadi kota yang lebih maju, sejahtera, dan berlandaskan Akhlaqul Karimah.

3.1.2.5. Peningkatan Layanan untuk mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat.

Pemerintah memiliki peran penting dalam memastikan bahwa seluruh warga, terutama kelompok rentan seperti lansia, penyandang disabilitas, dan masyarakat kurang mampu, mendapatkan akses terhadap layanan sosial yang memadai. Hal ini mencakup penyediaan bantuan sosial, peningkatan akses kesehatan dan pendidikan, serta pemberdayaan ekonomi berbasis komunitas untuk menciptakan kemandirian dan mengurangi kesenjangan sosial.

Perlindungan anak dan pemberdayaan perempuan menjadi prioritas dalam menciptakan masyarakat yang lebih berdaya dan sejahtera. Pemerintah perlu memperkuat kebijakan yang melindungi hak-hak anak, termasuk mencegah eksploitasi, kekerasan, dan perdagangan anak. Selain itu, perempuan harus diberikan kesempatan yang lebih luas dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam bidang ekonomi, politik, dan sosial, dengan menyediakan akses terhadap pendidikan, pelatihan keterampilan, serta program kewirausahaan yang mendorong kemandirian.

Peningkatan keswadayaan masyarakat juga menjadi strategi utama dalam mendukung Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Dengan membangun sistem layanan yang partisipatif dan berbasis komunitas, masyarakat akan semakin aktif dalam merancang dan menjalankan solusi untuk meningkatkan kesejahteraan bersama. Pendekatan ini tidak hanya meningkatkan efektivitas layanan publik, tetapi juga memperkuat rasa kepemilikan dan gotong royong di antara warga Kota Pekalongan.

Misi ini bertujuan untuk menciptakan ekosistem layanan sosial yang lebih responsif, inklusif, dan berbasis pada nilai-nilai Akhlaqul Karimah. Dengan pelayanan yang lebih baik, masyarakat akan merasakan manfaat nyata dari pembangunan, sehingga kesejahteraan yang diidamkan dapat terwujud secara merata dan berkelanjutan.

Misi ini juga sekaligus sejalan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 dan Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 dimana Program penanggulangan kemiskinan yang akan terus dilaksanakan di Kota Pekalongan melalui pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah dengan fokus pada 3 (tiga) program yaitu:

1. Program bantuan sosial dan jaminan sosial terpadu berbasis rumah tangga, keluarga atau individu yang bertujuan untuk melakukan pemenuhan hak dasar, pengurangan beban hidup dan perbaikan kualitas hidup masyarakat miskin;
2. Program pemberdayaan masyarakat dan penguatan pelaku usaha mikro dan kecil yang bertujuan untuk memperkuat kapasitas kelompok masyarakat miskin untuk terlibat dan mengambil manfaat dari proses pembangunan; dan
3. Program lainnya yang secara langsung atau tidak langsung dapat meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat miskin, termasuk program dengan dana kelurahan.

Kemudian upaya penanggulangan kemiskinan tersebut akan didukung dengan komitmen pendanaan melalui APBD dengan sasaran Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEIN) mendukung perwujudan sekolah rakyat dan melaporkan secara berkala atau sewaktu-waktu kepada Gubernur Jawa Tengah.

3.1.2.6. Membangun Kemandirian Ekonomi daerah berbasis potensi sumber daya lokal.

Misi ini bertujuan untuk memperkuat kemandirian ekonomi Kota Pekalongan dengan memanfaatkan secara optimal potensi sumber daya lokal, terutama sektor unggulan seperti

batik dan perikanan. Sebagai kota yang dikenal sebagai pusat batik nasional, Pekalongan memiliki peluang besar untuk meningkatkan daya saing industri kreatifnya melalui inovasi, peningkatan kualitas produk, serta perluasan pasar baik di dalam maupun luar negeri. Dukungan terhadap para pengrajin dan pelaku usaha batik perlu diperkuat melalui pelatihan, fasilitasi permodalan, serta pengembangan teknologi yang ramah lingkungan agar industri ini tetap berkelanjutan dan semakin berkembang.

Di sektor perikanan, Kota Pekalongan memiliki potensi besar dalam perikanan tangkap maupun budidaya. Penguatan infrastruktur perikanan seperti pelabuhan, tempat pelelangan ikan, serta fasilitas pengolahan hasil laut akan meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan nelayan. Selain itu, penerapan teknologi modern dalam budidaya perikanan serta diversifikasi produk olahan perikanan dapat meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk perikanan lokal.

Selain batik dan perikanan, sektor ekonomi kreatif, UMKM, serta pariwisata berbasis budaya dan kearifan lokal juga harus dikembangkan sebagai sumber pertumbuhan ekonomi baru. Pemerintah perlu menciptakan ekosistem usaha yang kondusif dengan kebijakan yang mendukung kewirausahaan, akses pasar, serta digitalisasi usaha agar pelaku ekonomi lokal mampu bersaing di era globalisasi.

Sejalan dengan salah satu program delegasi Gubernur Jawa Tengah yaitu "Mengembangkan 10 Titik Aglomerasi menjadi Episentrum Pertumbuhan Ekonomi Baru", upaya Pemerintah Kota Pekalongan untuk terus mengembangkan sektor unggulan yaitu Batik, Perikanan dan Pariwisata serta dengan mendedikasikan Kota Pekalongan sebagai Kota Perdagangan dan Jasa maka hal ini akan sejalan dengan strategi kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yaitu:

- a. Program Unggulan Penggerak Pertumbuhan Ekonomi;
- b. Pengembangan Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB) sebagai Kawasan Industri Manufaktur Berteknologi Tinggi;
- c. Program Strategis Penggerak Pertumbuhan Ekonomi:
 - 1) Pengembangan *Shopping Tourism*, Pariwisata Alam, Budaya dan Ekonomi Kreatif;
 - 2) Peningkatan produksi dan hilirisasi sektor pertanian (komoditas unggulan: teh dan perikanan tangkap).

Dengan membangun kemandirian ekonomi berbasis potensi daerah, Kota Pekalongan akan semakin maju dan sejahtera. Keberlanjutan ekonomi ini harus tetap berlandaskan pada prinsip keadilan, keberlanjutan lingkungan, dan nilai-nilai Akhlaqul Karimah agar memberikan manfaat yang luas bagi masyarakat dan generasi mendatang.

3.1.2.7. Melestarikan dan Mengembangkan Budaya Lokal

Pelestarian dan pengembangan budaya lokal menjadi bagian penting dalam memperkuat identitas Kota Pekalongan serta menggerakkan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Kota Pekalongan memiliki kekayaan budaya yang khas, baik dari seni, tradisi, maupun warisan sejarah, yang harus dijaga agar tidak hilang oleh arus modernisasi. Upaya pelestarian budaya dilakukan secara sistematis melalui edukasi, dokumentasi, serta pewarisan nilai-nilai budaya kepada generasi muda agar tetap hidup dan berkembang di tengah perubahan zaman.

Salah satu strategi utama dalam pelestarian budaya adalah dengan mengembangkan program pagelaran dan festival budaya tahunan. Acara ini tidak hanya menjadi ajang ekspresi seni dan budaya lokal, tetapi juga menjadi sarana promosi wisata budaya yang dapat menarik wisatawan domestik maupun mancanegara. Festival-festival ini dapat mencakup pertunjukan seni tradisional, pameran batik, kuliner khas, serta berbagai bentuk ekspresi budaya lainnya

yang menjadi kebanggaan masyarakat Pekalongan. Dokumentasi dan inventarisasi seni budaya daerah dilakukan agar kekayaan budaya daerah tercatat dengan baik dan dapat diwariskan kepada generasi berikutnya. Upaya ini juga harus diiringi dengan mendorong pengakuan budaya daerah sebagai warisan budaya tak benda, baik di tingkat nasional maupun internasional, sehingga semakin memperkuat posisi Pekalongan sebagai kota yang kaya akan budaya.

Penyediaan ruang publik yang dapat menjadi wadah bagi komunitas seni dan budaya juga merupakan langkah penting dalam mendukung kreativitas masyarakat. Ruang-ruang ini harus didesain sebagai tempat interaksi, pembelajaran, dan pengembangan bakat seni, sehingga budaya lokal dapat terus berkembang tanpa kehilangan nilai-nilai aslinya.

Misi ini tidak hanya berusaha melestarikan budaya warisan leluhur, tetapi juga mengembangkannya agar tetap relevan dengan perkembangan zaman. Budaya yang terjaga dengan baik akan menjadi bagian dari identitas masyarakat serta berkontribusi dalam menciptakan kota yang lebih maju, sejahtera, dan berkelanjutan, berlandaskan nilai-nilai Akhlaqul Karimah.

3.1.2.8. Meningkatkan Keamanan dan Kondusivitas Wilayah.

Keamanan dan ketertiban adalah kunci pembangunan berkelanjutan serta kesejahteraan warga. Upaya ini dilakukan melalui sinergi antara pemerintah, aparat keamanan, tokoh masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan untuk meningkatkan stabilitas sosial. Kerjasama dengan pemangku kepentingan di bidang keamanan diperkuat melalui koordinasi intensif dan pemanfaatan teknologi. Peran tokoh agama dan masyarakat juga penting dalam membangun kesadaran kolektif akan pentingnya menjaga ketertiban serta memperkuat nilai kebersamaan.

Selain itu, menjaga kerukunan umat beragama dan semangat gotong royong menjadi prioritas dalam menciptakan harmoni sosial. Partisipasi aktif masyarakat dalam keamanan lingkungan, seperti ronda malam dan sistem keamanan lingkungan (siskamling), akan didorong agar ketertiban semakin terjaga. Dengan misi ini, Kota Pekalongan berkomitmen mewujudkan keamanan wilayah yang didukung oleh kebersamaan, sehingga tercipta lingkungan yang harmonis dan sejahtera sesuai dengan visi kota yang maju, sejahtera, dan berkelanjutan berlandaskan Akhlaqul Karimah.

3.1.2.9. Mewujudkan Pengelolaan Lingkungan yang Bersih dan Berkelanjutan

Pengelolaan lingkungan yang baik menjadi kunci dalam menghadapi tantangan seperti pencemaran, perubahan iklim, dan pengelolaan sampah yang efektif. Pemerintah berkomitmen untuk meningkatkan kesadaran serta partisipasi masyarakat dalam menjaga kebersihan kota melalui program edukasi, kampanye lingkungan, serta penerapan teknologi ramah lingkungan. Penguatan sistem pengelolaan sampah berbasis ekonomi sirkular dan pengurangan limbah plastik juga menjadi prioritas untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan.

Selain itu, Kota Pekalongan akan mendorong penggunaan energi terbarukan, pelestarian ruang hijau, serta pengelolaan sumber daya alam yang bijak agar pembangunan berjalan selaras dengan kelestarian lingkungan. Kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk dunia usaha, akademisi, dan komunitas lingkungan, akan diperkuat untuk menciptakan inovasi dalam menjaga kelestarian alam. Dengan misi ini, Kota Pekalongan bertekad menjadi kota yang lebih hijau, sehat, dan berkelanjutan, selaras dengan visi pembangunan yang maju, sejahtera, dan berlandaskan Akhlaqul Karimah.

3.1.3. Tujuan dan Sasaran RPJM Daerah Tahun 2025-2029

Tujuan RPJM Daerah Tahun 2025-2029 adalah rangkaian kinerja yang menggambarkan tercapainya visi selama 5 (lima) tahun. Sedangkan Sasaran RPJM Daerah Tahun 2025-2029

adalah rangkaian kinerja yang berupa hasil penyelenggaraan pembangunan daerah menuju tercapainya tujuan RPJM Daerah Tahun 2025-2029. Tujuan RPJM Daerah Tahun 2025-2029 merupakan dampak (*impact*) keberhasilan pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian berbagai Program Perangkat Daerah terkait. Selaras dengan penggunaan paradigma penganggaran berbasis kinerja maka perencanaan pembangunan daerah pun menggunakan prinsip yang sama. Pengembangan rencana pembangunan daerah lebih ditekankan pada target kinerja, baik pada dampak, hasil, maupun keluaran dari suatu kegiatan, program, dan sasaran. Perumusan tujuan dan sasaran RPJM Daerah Tahun 2025-2029 juga menjadi landasan perumusan tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

Untuk mewujudkan visi pembangunan Kota Pekalongan 2025-2029, uraian tujuan dan sasaran RPJM Daerah Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

Tujuan 1 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, Kolaboratif, dan Sinergis sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945.

Tujuan Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, Kolaboratif, dan Sinergis sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945 dilakukan dalam rangka mewujudkan misi 1 yaitu; Menjunjung tinggi hukum demi menjamin hak-hak rakyat dengan mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, Kolaboratif, dan Sinergis sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945. Tujuan RPJM Daerah ini akan diukur dengan indikator indeks reformasi birokrasi.

Untuk melaksanakan tujuan ini, sasaran RPJM Daerah Tahun 2025-2029 adalah : **Terwujudnya sistem birokrasi yang efektif, akuntabel, inovatif dan pelayanan publik berbasis digital.**

Sasaran ini diukur dengan indikator sasaran Nilai SAKIP Kota, Opini BPK atas laporan keuangan, Indeks Integritas Nasional (IIN) (IUP) dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kota.

Tujuan 2 : Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Berlandaskan Akhlakul Karimah

Tujuan Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia berlandaskan akhlakul karimah dilakukan dalam rangka mewujudkan misi 2 dan Misi 3 yaitu; Meningkatkan Akses dan Kualitas Pendidikan di semua jenjang secara merata dan Meningkatkan kualitas kesehatan dan mewujudkan jaminan Layanan Kesehatan Masyarakat. Tujuan RPJM Daerah Tahun 2025-2029 ini akan diukur dengan indikator indeks pembangunan manusia (IPM).

Untuk melaksanakan tujuan ini, sasaran RPJM Daerah Tahun 2025-2029 adalah:

a. Meningkatnya akses dan mutu pendidikan serta pendidikan karakter.

Sasaran ini diukur dengan indikator sasaran Rata-rata Lama Sekolah penduduk di atas 15 tahun, dan Persentase Satuan Pendidikan yang menerapkan Pendidikan Karakter dan Pendidikan Keagamaan.

b. Meningkatnya derajat kesehatan.

Sasaran ini diukur dengan indikator sasaran; Usia Harapan Hidup.

Tujuan 3 : Membangun Kemandirian Ekonomi Daerah Berbasis Potensi Sumberdaya Lokal Yang Berkelanjutan.

Tujuan Membangun kemandirian ekonomi daerah berbasis potensi sumber daya lokal yang berkelanjutan dilakukan dalam rangka mewujudkan misi 4, 6, 7, 8 dan 9 yaitu; Membangun Infrastruktur yang Berkelanjutan dan Ramah Lingkungan; Membangun Kemandirian Ekonomi daerah berbasis potensi sumber daya lokal;

Melestarikan dan Mengembangkan Budaya Lokal; Meningkatkan keamanan dan kondusivitas wilayah; dan Mewujudkan Pengelolaan Lingkungan yang Bersih dan Berkelanjutan.

Tujuan RPJM Daerah Tahun 2025-2029 ini akan diukur dengan indikator Pertumbuhan Ekonomi. Untuk melaksanakan tujuan ini, sasaran RPJM Daerah Tahun 2025-2029 adalah:

a. Meningkatkan investasi daerah.

Sasaran ini diukur dengan indikator sasaran nilai realisasi investasi tahun berkenaan.

b. Meningkatkan pertumbuhan PDRB sektor industri pengolahan, perdagangan dan jasa.

Sasaran ini diukur dengan indikator sasaran pertumbuhan PDRB lapangan usaha perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor; pertumbuhan PDRB lapangan usaha industri pengolahan; dan pertumbuhan PDRB sektor penyediaan akomodasi dan makan minum.

Tujuan 4 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat

Tujuan Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat dilakukan dalam rangka mewujudkan misi 5 yaitu; Peningkatan Layanan untuk mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat.

Tujuan RPJM Daerah Tahun 2025-2029 ini akan diukur dengan indikator Tingkat kemiskinan. Untuk melaksanakan tujuan ini, sasaran RPJM Daerah Tahun 2025-2029 adalah:

a. Menurunnya populasi PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial).

Sasaran ini diukur dengan indikator sasaran Persentase populasi PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial).

b. Menurunnya angka pengangguran.

Sasaran ini diukur dengan indikator sasaran Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT).

c. Optimalnya pengarusutamaan gender.

Sasaran ini diukur dengan indikator sasaran Indeks Ketimpangan Gender dan Kategori Kota Layak Anak.

Gambaran konsep implementasi pencapaian tujuan dan sasaran dalam RPJM Daerah Tahun 2025 – 2029 tersebut dapat digambarkan sebagai berikut :



Sumber : Bapperida Kota Pekalongan, 2025

Gambar III-2
Konsep Pencapaian Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Penjabaran tujuan dan sasaran RPJM Daerah Tahun 2025-2029 seperti yang diuraikan di atas disusun juga dengan kaitan untuk mendukung pencapaian prioritas RPJM Nasional tahun 2025-2029, dan RPJM Daerah Provinsi Jawa Tengah. Selanjutnya Keterkaitan Tujuan, Sasaran, Indikator, dan Target dalam Pencapaian Visi RPJM Daerah Tahun 2025– 2029 disajikan dalam tabel berikut.

Tabel III-2
Keterkaitan Tujuan, Sasaran, Indikator, dan Target dalam Pencapaian Visi
RPJM Daerah Tahun 2025– 2029

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN / SASARAN	SATUAN	BASELINE		TARGET KINERJA					KONDISI AKHIR RPJMD
					2024 (R)	2025 (T)	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, Kolaboratif, dan Sinergis sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945	Terwujudnya sistem birokrasi yang efektif, akuntabel, inovatif dan pelayanan publik berbasis digital	Indeks Reformasi Birokrasi	indeks	87,25	87,31	87,33	87,34	87,35	87,36	87,37	87,37
			Nilai SAKIP Kota	nilai	73,02	74,41	75,81	77,21	78,60	80,00	81,40	81,40
			Opini BPK atas laporan keuangan	kategori	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
			Indeks Integritas Nasional (IIN) (IUP)	indeks	82,25	82,25	82,25	82,25	82,25	82,25	82,25	82,25
			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kota	indeks	91,37	91,38	91,39	91,40	91,41	91,42	91,43	91,43
			Indeks Pelayanan Publik (IPP) (IUP)	indeks	4,59	4,59	4,59	4,59	4,59	4,59	4,59	4,59
2	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia berlandaskan akhlakul karimah	Meningkatnya akses dan mutu pendidikan serta pendidikan karakter	Indeks Pembangunan Manusia	indeks	77,21	77,39	77,88	78,38	78,87	79,36	79,85	79,85
			Rata-rata lama sekolah penduduk di atas 15 tahun (IUP)	tahun	9,62	9,68	9,74	9,80	9,86	9,92	9,98	9,98
			Persentase satuan pendidikan yang	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN / SASARAN	SATUAN	BASELINE		TARGET KINERJA					KONDISI AKHIR RPJMD
					2024 (R)	2025 (T)	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		pendidikan serta pendidikan karakter	menerapkan pendidikan karakter dan pendidikan keagamaan									
		Meningkatnya derajat kesehatan	Usia Harapan Hidup (UHH) (IUP)	tahun	74,79	74,86	75,08	75,30	75,51	75,73	75,95	75,95
3	Membangun kemandirian ekonomi daerah berbasis potensi sumberdaya lokal yang berkelanjutan		Pertumbuhan Ekonomi	persen	5,34	5,44 - 6,00	5,7 - 6,20	5,7 - 7,20	5,7 - 7,20	5,7 - 7,70	5,7 - 8,10	5,7 - 8,10
		Meningkatnya investasi daerah	Nilai realisasi investasi tahun N	miliar rupiah	238,05	491,75	180,00	181,80	183,62	185,45	187,31	187,31
		Meningkatnya pertumbuhan PDRB sektor industri pengolahan, perdagangan dan jasa	Pertumbuhan PDRB lapangan usaha perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor	persen	3,74	3,32	3,35	3,39	3,42	3,45	3,49	3,49
			Pertumbuhan PDRB lapangan usaha industri pengolahan	persen	0,79	2,30	2,38	2,46	2,54	2,62	2,70	2,70
			Pertumbuhan PDRB sektor penyediaan akomodasi dan makan minum	persen	9,26	9,89	10,00	11,00	11,50	12,00	13,00	13,00
4	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat		Tingkat Kemiskinan (IUP)	persen	6,71	6,27 - 6,70	5,96 - 6,59	5,65 - 6,49	5,33 - 6,38	5,02 - 6,27	4,71 - 6,16	4,71 - 6,16
		Menurunnya populasi PPKS	Persentase populasi PPKS (Pemerlu	persen	7,52	7,50	7,38	7,27	7,16	7,04	6,92	6,92

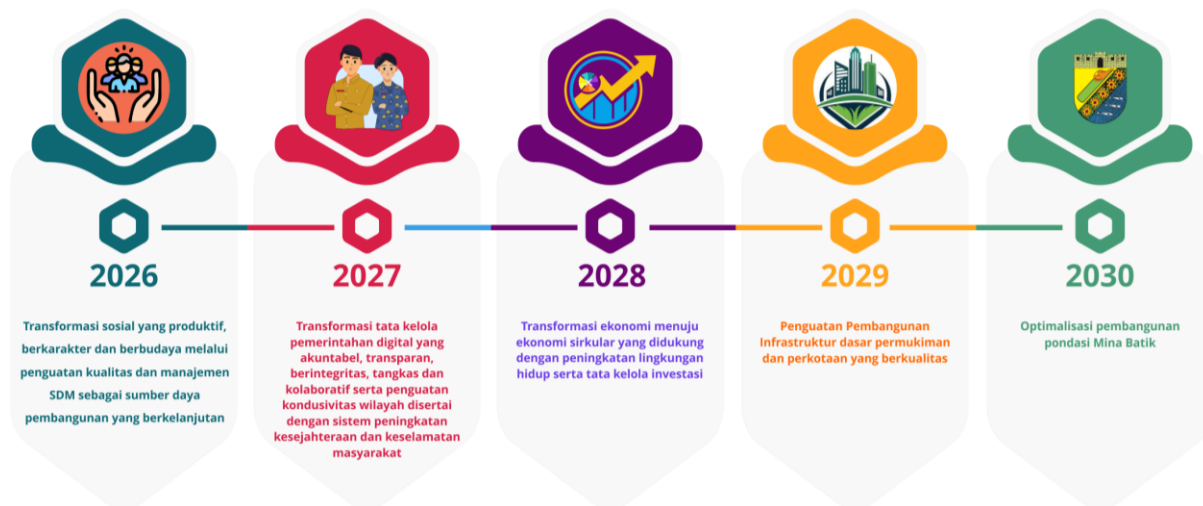
NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN / SASARAN	SATUAN	BASELINE		TARGET KINERJA					KONDISI AKHIR RPJMD
					2024 (R)	2025 (T)	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		(Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial)	Pelayanan Kesejahteraan Sosial)									
		Menurunnya angka pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka (IUP)	persen	4,91	5,05 - 4,47	5,01 - 4,35	4,98 - 4,24	4,94 - 4,12	4,90 - 4,00	4,86 - 3,88	4,86 - 3,88
		Optimalnya pengarusutamaan gender	Indeks Ketimpangan Gender (IKG) (IUP)	angka	0,18	0,185 - 0,176	0,183 - 0,167	0,182 - 0,158	0,181 - 0,149	0,180 - 0,140	0,179 - 0,131	0,179 - 0,131
			Kategori Kota Layak Anak	Kategori	Nindya	Nindya	Nindya	Nindya	Nindya	Nindya	Nindya	Nindya

Sumber: Bapperida Kota Pekalongan, 2025

3.2. STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

3.2.1. Strategi

Strategi merupakan rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah-langkah/upaya yang akan dilakukan diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, tahapan, lokus dan penentuan program prioritas dalam menghadapi lingkungan dinamis untuk mencapai tujuan/sasaran RPJM Daerah Tahun 2025-2029. Pentahapan pembangunan dimaksud adalah prioritas pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran kepala daerah.



Sumber : Bapperida Kota Pekalongan, 2025

Gambar III-3
Tema pada tahapan tahunan pembangunan

Tahapan dan prioritas tahunan dalam rangka mencapai tujuan/sasaran RPJM Daerah Tahun 2025-2029 adalah:

1. Tahun I, penyelenggaraan pembangunan pada tahun 2026 difokuskan pada ***”Transformasi sosial yang produktif, berkarakter dan berbudaya melalui penguatan kualitas dan manajemen SDM sebagai sumber daya pembangunan yang berkelanjutan”*** dengan prioritas pembangunan pada:
 - a. Penguatan regulasi dan peningkatan kapasitas SDM dalam perencanaan, pengelolaan keuangan dan BMD, penerapan sistem merit, penguatan integritas ASN, serta pengembangan literasi digital.
 - b. Peningkatan SDM pendidikan untuk memenuhi kualifikasi dan kompetensi dalam mendukung akses dan mutu pendidikan yang smart, inklusif, berkarakter dan religius
 - c. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui penyediaan/pembinaan/ pengembangan SDM kesehatan yang berkompeten, peningkatan akses dan mutu layanan kesehatan, serta peningkatan cakupan kualitas hunian layak yang memenuhi syarat kesehatan
 - d. Peningkatan kualitas SDM untuk mendukung penyediaan dan pengelolaan infrastruktur perkotaan yang memadai dan berkualitas

- e. Penguatan SDM dan kapasitas masyarakat untuk mendorong percepatan penanggulangan kemiskinan, penurunan angka pengangguran, serta peningkatan kesetaraan gender.
- f. Peningkatan kualitas SDM dan kolaborasi stakeholder yang mendukung pertumbuhan ekonomi
- g. Penguatan SDM pengelola dan pelaku budaya
- h. Penguatan pendidikan toleransi terhadap agama dan kebhinekaan secara dini pada keluarga, sekolah, lembaga pendidikan, media massa atau melalui komunitas-komunitas keagamaan, dan kebudayaan
- i. Peningkatan pemahaman dan kesadaran masyarakat dalam pengolahan sampah dan limbah cair dari hulu.

Pada tahun pertama (2026) juga diarahkan untuk mendukung dan bersinergi mewujudkan tahapan I RPJM Daerah Provinsi Jawa Tengah yaitu meneguhkan posisi Jawa Tengah sebagai lumbung pangan nasional yang telah dirumuskan melalui upaya:

- a. peningkatan produksi dan produktivitas sektor pertanian, peternakan, pangan, kelautan dan perikanan;
 - b. penguatan infrastruktur dan pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan yang mendukung kontinuitas produksi pangan;
 - c. pengendalian dan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan;
 - d. pemenuhan hak dasar atas pangan yang cukup, beragam, bergizi, seimbang, dan aman secara berkelanjutan, penguatan sistem rantai pasok, dan penguatan pengendalian harga pangan untuk menjamin aksesibilitas pangan;
 - e. penyediaan pangan lokal secara berkelanjutan;
 - f. peningkatan ketahanan pangan dan gizi hingga tingkat individu melalui pengembangan biofortifikasi dan fortifikasi pangan secara luas (*large scale food fortification/LSFF*);
 - g. pencegahan pemborosan pangan (*food loss and waste*).
2. Tahun II, penyelenggaraan pembangunan pada tahun 2027 difokuskan pada ***"Transformasi tata kelola pemerintahan digital yang akuntabel, transparan, berintegritas, tangkas dan kolaboratif serta penguatan kondusivitas wilayah disertai dengan sistem peningkatan kesejahteraan dan keselamatan masyarakat"*** dengan prioritas pembangunan pada:
- a. Penguatan kebijakan terkait perencanaan dan evaluasi kinerja, integritas, manajemen talenta, transformasi arsitektur dan kolaborasi digital, BMD, elektronifikasi transaksi pemerintah daerah (ETPD)
 - b. Transformasi Digital Pendidikan, serta peningkatan peran dan kerjasama stakeholder pendidikan dalam penguatan pendidikan karakter dan keagamaan sejak dini
 - c. Penguatan tata kelola kesehatan, peningkatan kolaborasi stakeholder dalam penerapan dan pembudayaan perilaku masyarakat hidup sehat
 - d. Peningkatan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi perwujudan infrastruktur perkotaan yang mendukung pengembangan wilayah
 - e. Penguatan tata kelola untuk memperluas jaminan perlindungan sosial bagi masyarakat rentan, perlindungan termasuk Perempuan dan anak serta peningkatan pemberdayaan LPKS dan BLKK dalam peningkatan kompetensi calon tenaga kerja.
 - f. Penguatan kebijakan pro investasi berbasis digital dan berorientasi pasar serta keberpihakan kepada UMKM
 - g. Penguatan jejaring lokal, nasional dan global dalam pelestarian dan penyelenggaraan event budaya lokal

- h. Penguatan sistem deteksi dini pengelolaan bencana dan konflik berbasis masyarakat
- i. Penguatan kelembagaan oleh pemerintah dan masyarakat dalam pengelolaan dan pengolahan sampah dan limbah cair, serta penguatan kerja sama daerah dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Pada tahun kedua (2027) juga diarahkan untuk mendukung dan bersinergi mewujudkan tahapan II RPJM Daerah Provinsi Jawa Tengah yaitu pengembangan pariwisata berkelanjutan dan ekonomi syariah sebagai tulang punggung pertumbuhan ekonomi, yang telah dirumuskan melalui upaya:

- a. pengembangan pariwisata berbasis masyarakat dan berkelanjutan;
 - b. penguatan promosi pariwisata berbasis digital;
 - c. peningkatan kualitas destinasi wisata berbasis klaster dengan perbaikan sarana prasarana destinasi wisata;
 - d. penguatan diversifikasi daya tarik pariwisata sesuai dengan karakteristik dan potensi daerah seperti pemanfaatan keragaman sumber daya alam, budaya, kreativitas, dan olahraga berbasis digital;
 - e. peningkatan infrastruktur konektivitas antar destinasi wisata;
 - f. penguatan integrasi antar destinasi wisata;
 - g. penguatan kapasitas SDM pelaku pariwisata termasuk pelaku UMKM pariwisata;
 - h. penguatan fasilitasi kemitraan untuk pengembangan destinasi pariwisata;
 - i. *city beautification* dalam rangka membangun citra, karakter, dan *dignity* kota, sekaligus meningkatkan daya tarik pariwisata *urban tourism*, terutama pada kawasan perkotaan;
 - j. pengembangan kepariwisataan dan ekosistem ekonomi kreatif yang holistik dengan pemenuhan paripurna aspek 6A (atraksi, aksesibilitas, amenitas, *ancillary services*, aktivitas, *available packages*);
 - k. penguatan ekonomi dan keuangan syariah melalui penguatan halal *value chain*, penguatan keuangan syariah, penguatan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), dan penguatan ekonomi digital.
3. Tahun III, penyelenggaraan pembangunan pada tahun 2028 difokuskan pada **”Transformasi ekonomi menuju ekonomi sirkular yang didukung dengan peningkatan lingkungan hidup serta tata kelola investasi”** dengan prioritas pembangunan pada:
- a. Peningkatan akuntabilitas kinerja dengan pendekatan partisipatif dan transparansi publik, pengelolaan layanan digital, mitigasi risiko korupsi, pemutakhiran data dan optimalisasi potensi pendapatan daerah, serta penguatan corporate university dalam pengembangan ASN yang mendukung perwujudan ekonomi sirkular dan Pembangunan yang berkelanjutan
 - b. Penguatan implementasi muatan lokal pendidikan kewirausahaan, kebencanaan dan lingkungan hidup dalam pendidikan formal dan non formal
 - c. Perwujudan fasilitas pelayanan kesehatan yang aman, tahan iklim, dan ramah lingkungan dalam rangka mendukung penguatan sistem ketahanan kesehatan masyarakat.
 - d. Pengembangan wilayah yang terintegrasi untuk meningkatkan perekonomian dengan pendekatan ekonomi sirkular intra dan antarwilayah
 - e. Peningkatan akses PPKS, calon tenaga kerja dan perempuan terhadap sumber daya ekonomi sirkular, kesempatan kerja dan kesempatan berusaha
 - f. Implementasi green industry, penciptaan produk unggulan berdaya saing global dan penguatan daya tarik investasi ramah lingkungan

- g. Penguatan inovasi dalam pelestarian dan penyelenggaraan budaya lokal
- h. Implementasi ekonomi sirkular dalam rangka peningkatan taraf hidup Masyarakat untuk menurunkan potensi konflik SARA dan penguatan resiliensi bencana
- i. Penguatan model ekonomi sirkular dalam pengolahan sampah dan limbah cair

Pada tahun ketiga (2028) juga diarahkan untuk mendukung dan bersinergi mewujudkan tahapan III RPJM Daerah Provinsi Jawa Tengah yaitu peningkatan dan pemerataan ekonomi berbasis potensi desa dan industri hijau, yang telah dirumuskan melalui upaya:

- a. peningkatan dan percepatan kinerja produktivitas sektor-sektor unggulan Jawa Tengah yaitu sektor industri pengolahan, perdagangan dan jasa, koperasi dan UMKM, pertanian dalam arti luas secara merata;
- b. peningkatan aksesibilitas dan keselamatan distribusi barang, jasa, dan penumpang, serta keterhubungan antar daerah dan kewilayahan;
- c. penerapan ekonomi hijau dan ekonomi biru;
- d. penerapan sirkular ekonomi dan dekarbonisasi industri melalui penggunaan energi terbarukan dan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan;
- e. penerapan standar industri hijau dan produk ramah lingkungan;
- f. peningkatan produktivitas perekonomian berbasis potensi unggulan lokal desa dengan upaya diversifikasi produk berbasis riset dan inovasi dan ekonomi kreatif.

4. Tahun IV, penyelenggaraan pembangunan pada tahun 2029 difokuskan pada **"Penguatan Pembangunan Infrastruktur dasar permukiman dan perkotaan yang berkualitas"** dengan prioritas pembangunan pada:

- a. Penguatan tata kelola SDM, keuangan daerah, dan optimalisasi pengamanan BMD untuk mendukung Pembangunan infrastruktur daerah
- b. Peningkatan dan pemerataan sarana prasarana layanan pendidikan yang smart, inklusif, berkarakter dan religius
- c. Penyediaan sarana prasarana layanan kesehatan primer dan rujukan yang sesuai standar serta peningkatan cakupan kualitas hunian layak yang memenuhi syarat kesehatan
- d. Peningkatan dan penguatan infratraktur perkotaan untuk mewujudkan fondasi mina batik
- e. Kolaborasi stakeholder dalam penyediaan infrastruktur yang mendukung penanggulangan kemiskinan, penurunan pengangguran dan pemenuhan layanan berperspektif gender yang inklusif
- f. Peningkatan infrastruktur untuk mendukung realisasi investasi ramah lingkungan
- g. Peningkatan Infrastruktur pelestarian dan inovasi untuk meningkatkan daya tarik Budaya lokal
- h. Peningkatan kualitas infrastruktur untuk peningkatan resiliensi bencana dan kondusivitas wilayah
- i. Pemantapan infrastruktur pengolahan sampah dan limbah cair dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup

Pada tahun keempat (2029) juga diarahkan untuk mendukung dan bersinergi mewujudkan tahapan IV RPJM Daerah Provinsi Jawa Tengah yaitu menumbuhkan daya saing daerah menuju Jawa Tengah maju dan berkelanjutan, yang telah dirumuskan melalui upaya:

- a. peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing dan berkarakter melalui peningkatan akses layanan pendidikan berkualitas, peningkatan derajat kesehatan

- masyarakat, peningkatan kebugaran dan daya saing olahraga, peningkatan budaya literasi masyarakat, peningkatan daya saing pemuda;
 - b. peningkatan pemerataan layanan dan perlindungan sosial bagi pemerlu kesejahteraan sosial;
 - c. peningkatan pembangunan berbasis gender dan ketahanan keluarga;
 - d. peningkatan kualitas, produktivitas, dan daya saing tenaga kerja;
 - e. pemantapan birokrasi yang berintegritas dan dinamis;
 - f. peningkatan kondusivitas wilayah dan demokrasi substansial.
5. Tahun V, penyelenggaraan pembangunan pada tahun 2030 difokuskan pada **”Optimalisasi pembangunan pondasi Mina Batik”** dengan prioritas pembangunan pada:
- a. Optimalisasi perwujudan profesionalitas ASN, regulasi yang tepat fungsi, akuntabilitas kinerja dan keuangan, serta perwujudan single platform digital dalam rangka perwujudan Fondasi Mina Batik
 - b. Pengembangan ekosistem pendidikan berkarakter dan penerapan kurikulum yang berorientasi Mina Batik di satuan pendidikan
 - c. Peningkatan inovasi layanan kesehatan yang efisien, terjangkau dan inklusif serta perwujudan Kota Sehat
 - d. Penguatan infrastruktur perkotaan untuk memantapkan perwujudan fondasi Mina Batik
 - e. Optimalisasi perlindungan sosial yang adaptif bagi masyarakat rentan, penurunan angka pengangguran terbuka, serta pemenuhan layanan berperspektif gender yang inklusif
 - f. Pengoptimalan potensi Mina Batik untuk meningkatkan realisasi investasi dan penggerak ekonomi kreatif
 - g. Perwujudan Pariwisata Budaya Lokal Berkelanjutan dan Berdaya Saing
 - h. Pemantapan kondusivitas wilayah yang mendukung investasi melalui pencegahan konflik SARA dan pembangunan karakter masyarakat berwawasan kebangsaan dengan fondasi agama
 - i. Pelestarian fungsi lingkungan hidup, menjaga keanekaragaman hayati, mengurangi dampak perubahan iklim, serta mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan.
- Pada tahun kelima (2030) juga diarahkan untuk mendukung dan bersinergi mewujudkan tahapan V RPJM Daerah Provinsi Jawa Tengah yaitu Perwujudan Jawa Tengah yang Maju dan Berkelanjutan.

3.2.2. Arah Kebijakan

Arah kebijakan RPJM Daerah Tahun 2025-2029 adalah rangkaian kerja yang merupakan penjabaran misi yang selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran RPJM Daerah Tahun 2025-2029. Arah kebijakan RPJM Daerah Tahun 2025-2029 dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Misi 1. Menjunjung tinggi hukum demi menjamin hak-hak rakyat dengan mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, Kolaboratif, dan Sinergis sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945, dengan arah kebijakan penguatan kelembagaan, profesionalitas ASN, regulasi yang tepat fungsi, akuntabilitas kinerja dan keuangan, serta peningkatan pelayanan publik berbasis digital, dalam rangka perwujudan pemerintahan yang bersih dan akuntabel.
2. Misi 2. Meningkatkan Akses dan Kualitas Pendidikan di semua jenjang secara merata, dengan arah kebijakan peningkatan akses dan mutu layanan pendidikan yang inklusif, serta

berorientasi pada internalisasi nilai agama dan budaya dalam pendidikan karakter sebagai muatan lokal di semua jenjang pendidikan.

3. Misi 3. Meningkatkan kualitas kesehatan dan mewujudkan jaminan Layanan Kesehatan Masyarakat, dengan arah kebijakan peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui pemenuhan pelayanan kesehatan untuk semua.
4. Misi 4. Membangun Infrastruktur yang Berkelanjutan dan Ramah Lingkungan, dengan arah kebijakan peningkatan kualitas dan kuantitas sarana prasarana perkotaan yang berkelanjutan.
5. Misi 5. Peningkatan Layanan untuk mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat, dengan arah kebijakan optimalisasi upaya penanggulangan kemiskinan melalui perlindungan sosial yang adaptif bagi masyarakat rentan, optimalisasi upaya menurunkan angka pengangguran terbuka, serta peningkatan pemenuhan layanan berperspektif gender yang inklusif.
6. Misi 6. Membangun Kemandirian Ekonomi daerah berbasis potensi sumber daya lokal, dengan arah kebijakan peningkatan realisasi investasi daerah melalui penguatan daya saing produk unggulan, implementasi ekonomi sirkular, menurunkan ketergantungan impor, penguatan branding, penguatan riset dan inovasi serta mendorong pertumbuhan PDRB pada sektor industri pengolahan, perdagangan jasa dan akomodasi.
7. Misi 7. Melestarikan dan Mengembangkan Budaya Lokal, dengan arah kebijakan penguatan nilai-nilai budaya masyarakat dan pelestarian budaya lokal untuk mendukung sektor pariwisata.
8. Misi 8. Meningkatkan Keamanan dan Kondusifitas Wilayah, dengan arah kebijakan perwujudan kondusifitas wilayah yang mendukung investasi melalui pencegahan konflik SARA dan pembangunan karakter masyarakat berwawasan kebangsaan dengan fondasi agama
9. Misi 9. Mewujudkan Pengelolaan Lingkungan yang Bersih dan Berkelanjutan dengan arah kebijakan pelestarian fungsi lingkungan hidup, menjaga keanekaragaman hayati, mengurangi dampak perubahan iklim, serta mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan disertai penguatan pondasi kerjasama daerah.

Perumusan arah strategi, arah kebijakan yang merupakan penjabaran misi dan mempertimbangkan masalah Kota Pekalongan dijelaskan dalam Tabel III-3.

Tabel III-3
Rumusan Misi, Strategi, Arah Kebijakan dan Masalah Kota Pekalongan Tahun 2025-2029

MISI, ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI	PENTAHAPAN					MASALAH YANG DIINTERVENSI
	2026	2027	2028	2029	2030	
Misi 1: Menjunjung tinggi hukum demi menjamin hak-hak rakyat dengan mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, Kolaboratif, dan Sinergis sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945						
Arah Kebijakan: Penguatan kelembagaan, profesionalitas ASN, regulasi yang tepat fungsi, akuntabilitas kinerja dan keuangan, serta peningkatan pelayanan publik berbasis digital, dalam rangka perwujudan pemerintahan yang bersih dan akuntabel						
Penguatan regulasi dan peningkatan kapasitas SDM dalam perencanaan, pengelolaan keuangan dan BMD, penerapan sistem merit, penguatan integritas ASN, serta pengembangan literasi digital.						Belum optimalnya implementasi sistem akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah
Penguatan kebijakan terkait perencanaan dan evaluasi kinerja, integritas, manajemen talenta, transformasi arsitektur dan kolaborasi digital, BMD, elektronifikasi transaksi pemerintah daerah (ETPD)						Belum optimalnya pelayanan publik pemerintahan baik pada tingkat Kota ataupun tingkat Perangkat Daerah
Peningkatan akuntabilitas kinerja dengan pendekatan partisipatif dan transparansi publik, pengelolaan layanan digital, mitigasi risiko korupsi, pemutakhiran data dan optimalisasi potensi pendapatan daerah, serta penguatan corporate university dalam pengembangan ASN yang mendukung perwujudan ekonomi sirkular dan Pembangunan yang berkelanjutan						Belum optimalnya pelayanan publik pemerintahan baik pada tingkat Kota ataupun tingkat Perangkat Daerah
Penguatan tata kelola SDM, keuangan daerah, dan optimalisasi pengamanan BMD untuk mendukung Pembangunan infrastruktur daerah						Belum optimalnya pengelolaan keuangan daerah antara lain pada kapasitas SDM untuk pengelolaan dan pelaporan keuangan se-Kota Pekalongan, updating data potensi pendapatan, serta data dan kelengkapan berkas administrasi untuk legalitas kepemilikan aset
Optimalisasi perwujudan profesionalitas ASN, regulasi yang tepat fungsi, akuntabilitas kinerja dan keuangan, serta perwujudan single platform digital dalam rangka perwujudan Fondasi Mina Batik						Belum optimalnya penguatan integritas dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih
Misi 2: Meningkatkan Akses dan Kualitas Pendidikan di semua jenjang secara merata						
Arah Kebijakan: Peningkatan akses dan mutu layanan pendidikan yang inklusif, serta berorientasi pada internalisasi nilai agama dan budaya						

MISI, ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI	PENTAHAPAN					MASALAH YANG DIINTERVENSI
	2026	2027	2028	2029	2030	
dalam pendidikan karakter sebagai muatan lokal di semua jenjang pendidikan						
Peningkatan SDM pendidikan untuk memenuhi kualifikasi dan kompetensi dalam mendukung akses dan mutu pendidikan yang smart, inklusif, berkarakter dan religius						Belum optimalnya penyediaan akses dan kualitas mutu pendidikan serta kesadaran bersekolah, Belum optimalnya implementasi pendidikan karakter dan pendidikan keagamaan
Transformasi Digital Pendidikan, serta peningkatan peran dan kerjasama stakeholder pendidikan dalam penguatan pendidikan karakter dan keagamaan sejak dini						Belum optimalnya penyediaan akses dan kualitas mutu pendidikan serta kesadaran bersekolah, Belum optimalnya implementasi pendidikan karakter dan pendidikan keagamaan
Penguatan implementasi muatan lokal pendidikan kewirausahaan, kebencanaan dan lingkungan hidup dalam pendidikan formal dan non formal						Belum optimalnya penyediaan akses dan kualitas mutu pendidikan serta kesadaran bersekolah, Belum optimalnya implementasi pendidikan karakter dan pendidikan keagamaan
Peningkatan dan pemerataan sarana prasarana layanan pendidikan yang smart, inklusif, berkarakter dan religius						Belum optimalnya penyediaan akses dan kualitas mutu pendidikan serta kesadaran bersekolah, Belum optimalnya implementasi pendidikan karakter dan pendidikan keagamaan
Pengembangan ekosistem pendidikan berkarakter dan penerapan kurikulum yang berorientasi Mina Batik di satuan pendidikan						Belum optimalnya penyediaan akses dan kualitas mutu pendidikan serta kesadaran bersekolah, Belum optimalnya implementasi pendidikan karakter dan pendidikan keagamaan
Misi 3: Meningkatkan kualitas kesehatan dan mewujudkan jaminan Layanan Kesehatan Masyarakat						
Arah Kebijakan: Peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui pemenuhan pelayanan kesehatan untuk semua						
Peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui penyediaan/pembinaan/pengembangan SDM kesehatan yang berkompeten, peningkatan akses dan mutu layanan kesehatan, serta peningkatan cakupan kualitas hunian layak yang memenuhi syarat kesehatan						Belum optimalnya upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat
Penguatan tata kelola kesehatan, peningkatan kolaborasi stakeholder dalam penerapan dan pembudayaan perilaku masyarakat hidup sehat						Belum optimalnya upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat
Perwujudan fasilitas pelayanan kesehatan yang aman, tahan iklim, dan ramah lingkungan dalam rangka mendukung penguatan sistem ketahanan kesehatan masyarakat.						Belum optimalnya upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat
Penyediaan sarana prasarana layanan kesehatan primer dan rujukan yang sesuai standar serta peningkatan cakupan kualitas hunian layak yang memenuhi syarat kesehatan						Belum optimalnya upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat

MISI, ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI	PENTAHAPAN					MASALAH YANG DIINTERVENSI
	2026	2027	2028	2029	2030	
Peningkatan inovasi layanan kesehatan yang efisien, terjangkau dan inklusif serta perwujudan Kota Sehat						Belum optimalnya upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat
Misi 4: Membangun Infrastruktur yang Berkelanjutan dan Ramah Lingkungan						
Arah Kebijakan: Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana prasarana perkotaan yang berkelanjutan						
Peningkatan kualitas SDM untuk mendukung penyediaan dan pengelolaan infrastruktur perkotaan yang memadai dan berkualitas						Belum optimalnya upaya peningkatan nilai investasi daerah
Peningkatan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi perwujudan infrastruktur perkotaan yang mendukung pengembangan wilayah						Belum optimalnya upaya peningkatan nilai investasi daerah
Pengembangan wilayah yang terintegrasi untuk meningkatkan perekonomian dengan pendekatan ekonomi sirkular intra dan antarwilayah						Belum optimalnya upaya peningkatan nilai investasi daerah
Peningkatan dan penguatan infratraktur perkotaan untuk mewujudkan fondasi mina batik						Belum optimalnya upaya peningkatan nilai investasi daerah
Penguatan infrastruktur perkotaan untuk memantapkan perwujudan fondasi Mina Batik						Belum optimalnya upaya peningkatan nilai investasi daerah
Misi 5: Peningkatan Layanan untuk mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat						
Arah Kebijakan: Optimalisasi upaya penanggulangan kemiskinan melalui perlindungan sosial yang adaptif bagi masyarakat rentan, optimalisasi upaya menurunkan angka pengangguran terbuka, serta peningkatan pemenuhan layanan berperspektif gender yang inklusif						
Penguatan SDM dan kapasitas masyarakat untuk mendorong percepatan penanggulangan kemiskinan, penurunan angka pengangguran, serta peningkatan kesetaraan gender.						Mengoptimalkan upaya penanggulangan kemiskinan dengan fokus pada penanganan PPKS fakir miskin dan memperluas perlindungan sosial yang adaptif bagi masyarakat rentan, Belum optimalnya upaya penurunan angka pengangguran terbuka, Belum optimalnya pemenuhan layanan berperspektif gender termasuk pada warga masyarakat berkebutuhan khusus, Belum optimalnya jaminan hak dan perlindungan anak
Penguatan tata kelola untuk memperluas jaminan perlindungan sosial bagi masyarakat rentan, perlindungan termasuk Perempuan dan anak serta peningkatan pemberdayaan LPKS dan BLKK dalam peningkatan kompetensi calon tenaga kerja.						Mengoptimalkan upaya penanggulangan kemiskinan dengan fokus pada penanganan PPKS fakir miskin dan memperluas perlindungan sosial yang adaptif bagi masyarakat rentan, Belum optimalnya upaya penurunan angka pengangguran terbuka, Belum optimalnya pemenuhan layanan berperspektif

MISI, ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI	PENTAHAPAN					MASALAH YANG DIINTERVENSI
	2026	2027	2028	2029	2030	
						gender termasuk pada warga masyarakat berkebutuhan khusus, Belum optimalnya jaminan hak dan perlindungan anak
Peningkatan akses PPKS, calon tenaga kerja dan perempuan terhadap sumber daya ekonomi sirkular, kesempatan kerja dan kesempatan berusaha						Mengoptimalkan upaya penanggulangan kemiskinan dengan fokus pada penanganan PPKS fakir miskin dan memperluas perlindungan sosial yang adaptif bagi masyarakat rentan, Belum optimalnya upaya penurunan angka pengangguran terbuka, Belum optimalnya pemenuhan layanan berperspektif gender termasuk pada warga masyarakat berkebutuhan khusus, Belum optimalnya jaminan hak dan perlindungan anak
Kolaborasi stakeholder dalam penyediaan infrastruktur yang mendukung penanggulangan kemiskinan, penurunan pengangguran dan pemenuhan layanan berperspektif gender yang inklusif						Mengoptimalkan upaya penanggulangan kemiskinan dengan fokus pada penanganan PPKS fakir miskin dan memperluas perlindungan sosial yang adaptif bagi masyarakat rentan, Belum optimalnya upaya penurunan angka pengangguran terbuka, Belum optimalnya pemenuhan layanan berperspektif gender termasuk pada warga masyarakat berkebutuhan khusus, Belum optimalnya jaminan hak dan perlindungan anak
Optimalisasi perlindungan sosial yang adaptif bagi masyarakat rentan, penurunan angka pengangguran terbuka, serta pemenuhan layanan berperspektif gender yang inklusif						Mengoptimalkan upaya penanggulangan kemiskinan dengan fokus pada penanganan PPKS fakir miskin dan memperluas perlindungan sosial yang adaptif bagi masyarakat rentan, Belum optimalnya upaya penurunan angka pengangguran terbuka, Belum optimalnya pemenuhan layanan berperspektif gender termasuk pada warga masyarakat berkebutuhan khusus, Belum optimalnya jaminan hak dan perlindungan anak
Misi 6: Membangun Kemandirian Ekonomi daerah berbasis potensi sumber daya lokal						
Arah Kebijakan: Peningkatan realisasi investasi daerah melalui penguatan daya saing produk unggulan, implementasi ekonomi sirkular, menurunkan ketergantungan impor, penguatan branding, penguatan riset dan inovasi serta mendorong pertumbuhan PDRB pada sektor industri pengolahan, perdagangan jasa dan akomodasi						
Peningkatan kualitas SDM dan kolaborasi stakeholder yang mendukung pertumbuhan ekonomi						(1).Belum optimalnya upaya peningkatan nilai investasi daerah; (2). Belum optimalnya laju pertumbuhan PDRB pada lapangan usaha perdagangan; (3). Belum optimalnya laju pertumbuhan PDRB pada lapangan usaha industri pengolahan; dan (4). Belum optimalnya laju pertumbuhan PDRB pada lapangan usaha akomodasi dan makan minum
Penguatan kebijakan pro investasi berbasis digital dan berorientasi pasar serta keberpihakan kepada UMKM						(1).Belum optimalnya upaya peningkatan nilai investasi daerah; (2). Belum optimalnya laju pertumbuhan PDRB pada lapangan usaha perdagangan; (3). Belum optimalnya laju pertumbuhan PDRB pada lapangan usaha industri

MISI, ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI	PENTAHAPAN					MASALAH YANG DIINTERVENSI
	2026	2027	2028	2029	2030	
						pengolahan; dan (4). Belum optimalnya laju pertumbuhan PDRB pada lapangan usaha akomodasi dan makan minum
Implementasi <i>green industry</i> , penciptaan produk unggulan berdaya saing global dan penguatan daya tarik investasi ramah lingkungan						(1).Belum optimalnya upaya peningkatan nilai investasi daerah; (2). Belum optimalnya laju pertumbuhan PDRB pada lapangan usaha perdagangan; (3). Belum optimalnya laju pertumbuhan PDRB pada lapangan usaha industri pengolahan; dan (4). Belum optimalnya laju pertumbuhan PDRB pada lapangan usaha akomodasi dan makan minum
Peningkatan infrastruktur untuk mendukung realisasi investasi ramah lingkungan						(1).Belum optimalnya upaya peningkatan nilai investasi daerah; (2). Belum optimalnya laju pertumbuhan PDRB pada lapangan usaha perdagangan; (3). Belum optimalnya laju pertumbuhan PDRB pada lapangan usaha industri pengolahan; dan (4). Belum optimalnya laju pertumbuhan PDRB pada lapangan usaha akomodasi dan makan minum
Pengoptimalan potensi Mina Batik untuk meningkatkan realisasi investasi dan penggerak ekonomi kreatif						(1).Belum optimalnya upaya peningkatan nilai investasi daerah; (2). Belum optimalnya laju pertumbuhan PDRB pada lapangan usaha perdagangan; (3). Belum optimalnya laju pertumbuhan PDRB pada lapangan usaha industri pengolahan; dan (4). Belum optimalnya laju pertumbuhan PDRB pada lapangan usaha akomodasi dan makan minum
Misi 7: Melestarikan dan Mengembangkan Budaya Lokal						
Arah Kebijakan: Penguatan nilai-nilai budaya masyarakat dan pelestarian budaya lokal untuk mendukung sektor pariwisata						
Penguatan SDM pengelola dan pelaku budaya						Belum optimalnya upaya peningkatan nilai investasi daerah
Penguatan jejaring lokal, nasional dan global dalam pelestarian dan penyelenggaraan event budaya lokal						Belum optimalnya upaya peningkatan nilai investasi daerah
Penguatan inovasi dalam pelestarian dan penyelenggaraan budaya lokal						Belum optimalnya upaya peningkatan nilai investasi daerah
Peningkatan Infrastruktur pelestarian dan inovasi untuk meningkatkan daya tarik Budaya lokal						Belum optimalnya upaya peningkatan nilai investasi daerah
Perwujudan Pariwisata Budaya Lokal Berkelanjutan dan Berdaya Saing						Belum optimalnya upaya peningkatan nilai investasi daerah
Misi 8: Meningkatkan Keamanan dan Kondusivitas Wilayah						
Arah Kebijakan: Perwujudan kondusifitas wilayah yang mendukung investasi melalui pencegahan konflik SARA dan pembangunan karakter masyarakat berwawasan kebangsaan dengan fondasi agama						
Penguatan pendidikan toleransi terhadap agama dan kebhinekaan secara dini pada keluarga, sekolah, lembaga pendidikan, media massa atau melalui komunitas-komunitas keagamaan, dan kebudayaan						Belum optimalnya upaya peningkatan nilai investasi daerah

MISI, ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI	PENTAHAPAN					MASALAH YANG DIINTERVENSI
	2026	2027	2028	2029	2030	
Penguatan sistem deteksi dini pengelolaan bencana dan konflik berbasis masyarakat						Belum optimalnya upaya peningkatan nilai investasi daerah
Implementasi ekonomi sirkular dalam rangka peningkatan taraf hidup Masyarakat untuk menurunkan potensi konflik SARA dan penguatan resiliensi bencana						Belum optimalnya upaya peningkatan nilai investasi daerah
Peningkatan kualitas infrastruktur untuk peningkatan resiliensi bencana dan kondusivitas wilayah						Belum optimalnya upaya peningkatan nilai investasi daerah
Pemantapan kondusivitas wilayah yang mendukung investasi melalui pencegahan konflik SARA dan pembangunan karakter masyarakat berwawasan kebangsaan dengan fondasi agama						Belum optimalnya upaya peningkatan nilai investasi daerah
Misi 9: Mewujudkan Pengelolaan Lingkungan yang Bersih dan Berkelanjutan						
Arah Kebijakan: Pelestarian fungsi lingkungan hidup, menjaga keanekaragaman hayati, mengurangi dampak perubahan iklim, serta mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan disertai penguatan Fondasi kerjasama daerah						
Peningkatan pemahaman dan kesadaran masyarakat dalam pengolahan sampah dan limbah cair dari hulu						Belum optimalnya upaya peningkatan nilai investasi daerah
Penguatan kelembagaan oleh pemerintah dan masyarakat dalam pengelolaan dan pengolahan sampah dan limbah cair, serta penguatan kerja sama daerah dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup						Belum optimalnya upaya peningkatan nilai investasi daerah
Penguatan model ekonomi sirkular dalam pengolahan sampah dan limbah cair						Belum optimalnya upaya peningkatan nilai investasi daerah
Pemantapan infrastruktur pengolahan sampah dan limbah cair dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup						Belum optimalnya upaya peningkatan nilai investasi daerah
Pelestarian fungsi lingkungan hidup, menjaga keanekaragaman hayati, mengurangi dampak perubahan iklim, serta mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan						Belum optimalnya upaya peningkatan nilai investasi daerah

Sumber, Bapperida Kota Pekalongan, 2025 (data diolah)

- c. Kawasan koridor Jalan Imam Bonjol – Jalan Pemuda - Jalan KH. Mansyur – Jalan Jenderal Sudirman – Jalan dr. Setiabudi, di Kelurahan Padukuhan Kraton, Kelurahan Bendan Kergon, Kelurahan Podosugih, Kelurahan Sapuro Kebulen, Kelurahan Kauman dan Kelurahan Noyontaansari.
- d. Kawasan koridor Jalan dr. Sutomo di Kelurahan Noyontaansari, Kelurahan Setono, Kelurahan Kalibaros, Kelurahan Gamer, Kecamatan Pekalongan Timur;
- e. Kawasan koridor Jalan Urip Sumoharjo – Jalan Gatot Subroto (Pasar Banyurip) di Kelurahan Podosugih, Kelurahan Medono, Kelurahan Pringrejo, Kelurahan Buaran Kradenan dan Kelurahan Banyurip; dan
- f. Kawasan koridor Jalan WR. Supratman, di Kelurahan Panjang Wetan Kecamatan Pekalongan Utara;

Kawasan Strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi berbasis perikanan diarahkan pada pengembangan kawasan perikanan berada di Kecamatan Pekalongan Utara. Sebagai daerah yang telah berkembang dan Produk Domestik Regional Bruto yang cukup besar di sektor perdagangan, industri pengolahan dan konstruksi, serta posisi strategis Kota Pekalongan di jalur Pantai Utara Jawa maka tentunya Kota Pekalongan memiliki keunggulan komparatif (*comparative advantage*) dibandingkan daerah lainnya. Dengan kepadatan penduduk yang sangat padat mencapai 7.096 jiwa/km² pada tahun 2024, dapat menyebabkan berbagai masalah sehingga dibutuhkan penambahan pusat kegiatan untuk mengurangi kepadatan di wilayah inti dan mendistribusikan aktivitas ke wilayah lain. Pusat Kegiatan tersebut juga dimaksudkan sebagai pembangkit perekonomian baru.

Dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pekalongan, Pembangunan dan pengembangan Kawasan Pekalongan Baru di Sebelah Timur Kota pekalongan diharapkan dapat menjadi pusat pertumbuhan baru. Pekalongan Baru juga direncanakan mampu untuk memberikan kontribusi dengan fungsi komersial dan titik hiburan (*amusement point*).

2. Kawasan Strategis Kota dari sudut kepentingan sosial dan budaya

Kawasan Strategis dari sudut kepentingan sosial budaya adalah kawasan Jetayu, yang terdiri atas:

- a. Kawasan Jetayu sebagai kawasan *heritage* berada di Kelurahan Panjang Wetan, Kelurahan Kandang Panjang dan Kelurahan Padukuhan Kraton Kecamatan Pekalongan Utara. Deliniasi kawasan dilakukan untuk melindungi dan melestarikan aset bangunan bersejarah.
- b. Kawasan cagar budaya di Kelurahan Krapyak Kecamatan Pekalongan Utara, dan Kelurahan Klego Kecamatan Pekalongan Timur. Deliniasi kawasan dilakukan sebagai tempat pelestarian dan pengembangan adat istiadat tradisi syawalan.
- c. Lingkungan etnis sebagai tempat perlindungan terhadap keanekaragaman budaya, dilakukan sebagai tempat yang memberikan perlindungan terhadap keanekaragaman budaya, meliputi :
 - 1) Kampung Arab di Kelurahan Kauman Kecamatan Pekalongan Timur; dan
 - 2) Kampung Pecinan berada di Kelurahan Kauman Kecamatan Pekalongan Timur.

3. Kawasan Strategis Kota dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup

Kawasan Strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup, meliputi:

- a. kawasan sekitar polder pengendali banjir dan rob di Kelurahan Kandang Panjang dan Kelurahan Bandengan Kecamatan Pekalongan Utara; dan
- b. kawasan konservasi pantai yang diperuntukkan bagi pengembangan hutan bakau (*mangrove park*) berada di wilayah pantai Kelurahan Bandengan dan Kelurahan Kandang Panjang Kecamatan Pekalongan Utara.

3.2.3.2. Keterkaitan Kota Pekalongan dengan Wilayah Sekitar (Petanglong)

Kota Pekalongan memiliki posisi strategis, karena berlokasi pada titik tengah jalur transportasi regional pantai Utara Jawa (jalan raya maupun rel kereta api) antara Kota Surabaya dan Jakarta serta “titik leleh” tol trans Jawa. Posisi strategis tersebut harus dapat dimanfaatkan bagi peningkatan peran Kota Pekalongan dalam konteks regional dan peningkatan daya saing, sehingga dapat berdampak bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat Kota Pekalongan.

Dalam kebijakan pengembangan wilayah Provinsi Jawa Tengah dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Jawa Tengah (Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029), Kota Pekalongan merupakan bagian dari Kawasan Perkotaan Pekalongan. Kawasan Perkotaan Pekalongan merupakan salah satu Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) di Provinsi Jawa Tengah dan pusat dari Wilayah Pengembangan Petanglong. Wilayah Pengembangan Petanglong adalah kawasan regional yang memiliki keterkaitan pengembangan secara ekonomi, sosial, dan/atau budaya dengan cakupan daerah meliputi Kota Pekalongan, Kabupaten Batang, dan Kabupaten Pekalongan. Arah pengembangan Wilayah Pengembangan Petanglong adalah memadukan pembangunan Kota Pekalongan dengan wilayah sekitarnya, serta pengembangan wilayah yang didasarkan pada sektor unggulan meliputi: industri, perdagangan dan jasa, pertanian dan perikanan.

1. Sinergi Pengembangan Wilayah Dikaitkan dengan Pengembangan Kawasan Industri Terpadu Batang Dan Kawasan Industri Brebes

Setiap daerah harus meningkatkan daya saing wilayahnya agar kesejahteraan masyarakat semakin meningkat. Faktor penentu utama pertumbuhan ekonomi suatu daerah adalah berhubungan langsung dengan permintaan akan barang dan jasa dari luar daerah. Asumsi ini memberikan pengertian bahwa suatu daerah akan mempunyai sektor unggulan apabila daerah tersebut dapat memenangkan persaingan pada sektor yang sama dengan daerah lain sehingga dapat menghasilkan ekspor. Aktivitas basis memiliki peranan sebagai penggerak utama (*primer mover*) dalam pertumbuhan suatu wilayah. Semakin besar ekspor suatu wilayah ke wilayah lain akan semakin maju pertumbuhan wilayah tersebut, demikian sebaliknya. Setiap perubahan yang terjadi pada sektor basis akan menimbulkan efek ganda (*multiplier effect*) dalam perekonomian regional. Oleh karena itu, setiap daerah akan memanfaatkan sektorunggulannya dalam pengembangan wilayah, untuk mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Sesuai dengan Tabel 2.7, sektor yang memiliki kontribusi terbesar terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Pekalongan Tahun 2016-2020 meliputi: Lapangan Usaha (LU) Industri Pengolahan (rata-rata kontribusi di atas 20 persen); LU Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (rata-rata kontribusi di atas 20 persen); dan LU Konstruksi (rata-rata kontribusi di atas 14 persen). Sesuai dengan Tabel 2.8, sektor yang memiliki pertumbuhan tertinggi PDRB meliputi: LU Informasi dan Komunikasi (rata-rata pertumbuhan di atas 10 persen); LU Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial (rata-rata pertumbuhan di atas 8 persen); LU Jasa Perusahaan (rata-rata

pertumbuhan di atas 8 persen). Berdasarkan kedua tabel tersebut, dapat diidentifikasi LU tersebut merupakan sektor-sektor unggulan di Kota Pekalongan.

Analisis LQ (*location quotient*), dengan menggunakan data PDRB Kota Pekalongan dan Provinsi Jawa Tengah tahun 2020-2024, untuk mengetahui sektor-sektor unggulan di Kota Pekalongan disajikan dalam tabel III-4 di bawah ini:

Tabel III-4
Analisis LQ Kota Pekalongan Tahun 2020-2024

No	Lapangan Usaha	LQ					
		2020	2021	2022	2023	2024	Rata ²
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	0.37	0.35	0.35	0.35	0.37	0.37
2	Pertambangan dan Penggalian	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Industri Pengolahan	0.62	0.62	0.62	0.61	0.59	0.61
4	Pengadaan Listrik dan Gas	1.69	1.64	1.64	1.69	1.70	1.67
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	1.77	1.77	1.79	1.78	1.74	1.77
6	Konstruksi	1.34	1.35	1.34	1.36	1.36	1.35
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.49	1.48	1.46	1.46	1.45	1.47
8	Transportasi dan Pergudangan	2.23	2.21	1.89	1.88	1.89	2.02
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1.55	1.53	1.46	1.48	1.54	1.51
10	Informasi dan Komunikasi	1.13	1.11	1.11	1.08	1.05	1.10
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	2.16	2.14	2.14	2.14	2.13	2.14
12	Real Estat	1.53	1.52	1.51	1.50	1.51	1.51
13	Jasa Perusahaan	1.02	1.01	1.00	0.99	0.99	1.00
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1.65	1.64	1.63	1.59	1.52	1.60
15	Jasa Pendidikan	1.01	1.01	0.99	0.99	0.98	1.00
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1.45	1.47	1.46	1.43	1.40	1.44
17	Jasa lainnya	1.28	1.28	1.21	1.17	1.19	1.23

Sumber: Bapperida, Hasil Analisis, 2025

Dari hasil analisis LQ tersebut dapat diketahui bahwa sektor basis di Kota Pekalongan sebanyak 14 dari 17 lapangan usaha (LU). Sesuai dengan perkembangan fungsi kota sebagai pusat pelayanan wilayah maka sektor primer yaitu LU Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, serta LU Pertambangan dan Penggalian tidak menjadi sektor basis. Sektor yang memiliki rata-rata nilai LQ tertinggi adalah LU Jasa Keuangan dan Asuransi, LU Transportasi dan Pergudangan, dan LU Pengadaan Listrik dan Gas. Satunya-satunya sektor sekunder yang bukan merupakan sektor basis adalah LU Industri Pengolahan, yang memiliki nilai rata-rata LQ sebesar 0,61.

LU Industri Pengolahan di Kota Pekalongan tidak menjadi sektor basis berarti bahwa sumbangan LU Industri Pengolahan Kota Pekalongan masih lebih kecil dibandingkan kabupaten/kota lain di Provinsi Jawa Tengah. Padahal, LU Industri

Pengolahan merupakan sektor yang menyumbangkan kontribusinya terbesar yaitu di atas 19 persen, bersama LU Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor. Industri pengolahan tidak dapat berkembang di wilayah Kota Pekalongan secara maksimal karena sifat alamiah perkotaan, disebabkan keterbatasan ketersediaan lahan yang sesuai. Pengembangan kawasan budidaya yang paling berkembang adalah untuk kawasan perumahan serta kawasan perdagangan dan jasa. Sesuai dengan RTRW Kota Pekalongan (Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 30 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pekalongan Tahun 2009-2029), luas wilayah Kota Pekalongan adalah 4.642 Ha. Alokasi untuk Kawasan peruntukan industri seluas 189 Ha, Kawasan perdagangan dan jasa seluas 386 Ha dan Kawasan Perumahan seluas 2.430 Ha.

Dalam konteks regional, pengembangan wilayah Kota Pekalongan diarahkan untuk menjadi daerah tujuan, bukan hanya sebagai tempat persinggahan. Oleh karena itu, potensi yang dimiliki Kota Pekalongan selama ini, terutama industri batik, dimanfaatkan sebagai penggerak utama (*prime mover*) untuk semakin tumbuh dan berkembangnya sektor-sektor lainnya, seperti pariwisata, perdagangan jasa dan industri lainnya. Rencana pengembangan Pelabuhan Perikanan *onshore* diharapkan akan menjadi pengungkit pertumbuhan sektor perikanan sebagaimana yang telah dicapai Kota Pekalongan di masa lalu. Beberapa ikon atau destinasi akan dikembangkan di Kota Pekalongan seperti wisata pantai, TOD (*transit oriented development*) Stasiun Besar Pekalongan, serta Kawasan Pekalongan Baru. Kesemua upaya dari sinergi para pemangku kepentingan tersebut diharapkan dapat semakin memperkuat peran strategis Kota Pekalongan maupun peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Kebijakan pengembangan wilayah Kota Pekalongan, tidak semata-mata didasarkan atas potensi yang dimiliki dan rencana pengembangan yang akan diimplementasikan, tetapi juga kebijakan pengembangan wilayah di kawasan sekitar Kota Pekalongan. Perkembangan terkini dari rencana Pemerintah Pusat yaitu dikembangkannya Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB) dan rencana yang sebelumnya telah ada adalah Kawasan Industri Brebes (KIB).

Berdirinya Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB) di Kabupaten Batang sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN) didesain untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan mendukung pemulihan ekonomi nasional. KITB membuka peluang ekonomi dengan kebutuhan penyerapan tenaga kerja dari daerah sekitar dan pemenuhan kebutuhan manusia lainnya. Dekatnya lokasi KITB menjadikan Kota Pekalongan dengan semua potensinya termasuk potensi ekonomi baru yang berbasis Sumber Daya lokal, berpeluang untuk dapat memenuhi kebutuhan KITB.

KITB direncanakan seluas ± 4.300 Ha dan terdiri atas 3 (tiga) klaster. Klaster 1 (seluas 3.100 Ha) akan dikembangkan untuk Industri Peralatan Otomotif dan Peralatan Transportasi, Industri Tekstil dan Baterai, serta Industri Kimia. Klaster 2 (seluas 800 Ha) akan dikembangkan untuk Industri Makanan dan Minuman, serta Industri Makanan dan Minuman. Klaster 3 (seluas 400 Ha) akan dikembangkan untuk R & D, serta Komersial-

Menurut Grand Batang City (2024); Kumparan (2024); Nurdifa (2024), rencana kebutuhan tenaga kerja di KI Terpadu Batang pada klaster 1 seluas 3100 hektar yang terdiri dari tenant industri, komersial dan guna lahan lainnya dibutuhkan sebanyak 250.000 - 280.000 orang pekerja. Hingga tahun 2024, sebanyak 18 tenant industri telah mengisi KI Terpadu Batang, sebanyak delapan (8) tenant industri merupakan penanaman modal asing (PMA) dan sepuluh (10) tenant industri berasal dari penanaman modal dalam negeri (PMDN) (Grand Batang City, 2024b; Samah et al., 2024).

Pembangunan dan pengembangan Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB) harus dipandang Kota Pekalongan sebagai peluang dalam meningkatkan peran dan daya saing Kota Pekalongan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat Kota Pekalongan. Strategi pengembangan wilayah dalam rangka memaksimalkan peran Kota Pekalongan terhadap Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB) dan Kawasan Industri Brebes (KIB), meliputi:

a. Penguatan Kerjasama

Penguatan kerjasama Pemerintah Kota Pekalongan dengan Pemerintah Kabupaten Batang dan Kabupaten Brebes, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Pemerintah Pusat dan pemangku kepentingan lainnya dalam rangka a) penguatan sektor unggulan Kota Pekalongan; b) peningkatan peran Kota Pekalongan untuk mendukung Kawasan Industri Terpadu Batang dan Brebes; dan c) peningkatan kerjasama wilayah pengembangan Petanglong.

b. Meningkatkan keterkaitan antara usaha dengan industri hulu dan hilir

Pengembangan sektor unggulan atau produk di Kota Pekalongan diarahkan untuk mengaitkan usaha atau produk dengan Kawasan Industri Terpadu Batang dan Brebes sehingga memperkuat posisi produk Kota Pekalongan dalam skala regional.

c. Spesialisasi produk unggulan industri

Produk industri Kota Pekalongan sebagai sektor basis, khususnya batik, harus diarahkan agar Kota Pekalongan semakin kuat posisinya dalam skala regional. Untuk mendukungnya, dibutuhkan jaminan ketersediaan bahan baku, penguatan permodalan, fasilitasi HAKI, serta peningkatan promosi produksi dan branding Kota Pekalongan.

d. Peningkatan kapasitas sumberdaya manusia

Peningkatan ketrampilan dan pengetahuan tenaga kerja serta keterkaitan dunia usaha, dunia industri, lembaga pendidikan, dan pemerintah, sehingga tenaga kerja Kota Pekalongan memiliki nilai kompetitif yang unggul dibanding tenaga kerja wilayah sekitar.

e. Peningkatan iklim usaha yang kondusif

Iklim usaha yang kondusif harus ditingkatkan sehingga pengembangan produk, utamanya produk basis di Kota Pekalongan dapat semakin meningkat.

f. Pengembangan prasarana perkotaan dan destinasi di Kota Pekalongan

Peningkatan peran Kota Pekalongan dalam skala regional juga dilakukan dengan pengembangan prasarana dan sarana perkotaan di Kota Pekalongan yang unggul dan berkualitas, termasuk destinasi yang kompetitif di Kota Pekalongan sehingga dapat meningkatkan daya tarik Kota Pekalongan.

2. Urgensi Jalan Lingkar Kota Pekalongan dan Petanglong

Hingga saat ini, lalu lintas regional dan lokal masih bercampur pada ruas-ruas jalan di wilayah Kota Pekalongan. Lalu lintas regional yang mendominasi adalah kendaraan barang dan penumpang (AKAP maupun AKDP) yang berdimensi besar maupun kendaraan pribadi yang masih memilih melewati jalur jalan nasional dibandingkan jalan tol trans Jawa. Meskipun dari pengukuran saat ini, VCR menunjukkan angka yang lebih rendah dibandingkan sebelum operasionalnya jalan tol trans Jawa, tetapi pada waktu tertentu, kemacetan masih seringkali terjadi di wilayah Kota Pekalongan. Hal ini juga sebagai implikasi terdapatnya beberapa perlintasan sebidang jalur kereta api.

Masih bercampurnya lalu lintas tersebut sangat berimplikasi bagi keamanan, ketertiban, kebersihan dan kenyamanan kota serta tata ruang kota. Dampak yang paling dirasakan adalah keamanan dan kenyamanan warga Kota Pekalongan dalam berlalu

lintas karena bercampur dengan lalu lintas regional. Risiko terjadinya kecelakaan lalu lintas sangat besar. Akibat lalu lintas yang bercampur, terutama kendaraan berdimensi besar, sebagian kawasan perdagangan dan jasa di wilayah Kota Pekalongan tidak bisa berkembang dengan optimal karena masyarakat lebih memilih kawasan perdagangan dan jasa yang memiliki fasilitas parkir yang lebih luas dan nyaman. Kondisi ini dapat diidentifikasi terutama pada kawasan perdagangan dan jasa koridor Jl. Jenderal Sudirman yang tidak berkembang dan cenderung berkurang aktivitasnya. Padahal, salah satu sektor andalan Kota Pekalongan adalah perdagangan dan jasa. Dengan luas wilayah kota serta kawasan perdagangan dan jasa yang terbatas, tentunya penataan ruang di wilayah Kota Pekalongan sangat ditentukan dengan keberadaan jalan nasional yang mampu mendukung pengembangan wilayah. Jika kawasan perdagangan dan jasa tidak bisa berkembang optimal tentunya akan berdampak juga bagi upaya-upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Oleh karena itu, salah satu upaya sistemik dalam mengatasi bercampurnya lalu lintas regional dan lokal di Kota Pekalongan adalah pembangunan jalan lingkar di Kota Pekalongan. Lebih tepatnya jalan lingkar Petanglong (Kota Pekalongan, Kabupaten Batang dan Kabupaten Pekalongan). Sesuai dengan Kebijakan Pengembangan Wilayah Provinsi Jawa Tengah, wilayah Petanglong, yang berpusat di Perkotaan Petanglong, merupakan salah satu Wilayah Pengembangan (WP) di Jawa Tengah. Sesuai dengan RTRW Provinsi Jawa Tengah, perkotaan Petanglong merupakan salah satu Kawasan Strategis Provinsi (KSP). Jalan lingkar tersebut diharapkan berdampak bagi upaya mengatasi permasalahan kemacetan dan keamanan lalu lintas, kebersihan dan kenyamanan kota, serta yang utama adalah optimalisasi tata ruang, di wilayah Kota Pekalongan khususnya, dan wilayah Petanglong pada umumnya.

Urgensi lainnya dengan keberadaan Jalan Lingkar Utara Petanglong, akan menghubungkan kawasan strategis PLTU Batang dan Kawasan Industri Terpadu (di Kabupaten Batang) dengan Kawasan Pelabuhan Perikanan Nusantara dan Kawasan Wisata Pantai (di Kota Pekalongan) dan dengan rencana Kawasan Industri (di Kabupaten Pekalongan) serta dengan jalur Pantura. Adanya Jalan Lingkar Utara Petanglong ini akan mempermudah akses ke kawasan-kawasan strategis tersebut, sehingga harapannya akan menaikkan potensi pertumbuhan ekonomi di 3 daerah tersebut.

Dalam dimensi yang lain, mencontoh kasus di daerah lain, pembangunan jalan lingkar di Kota Petanglong dan/atau Kawasan Perkotaan Petanglong dapat dilakukan dengan konstruksi yang sekaligus dapat berfungsi sebagai tanggul penahan rob. Jika jalan lingkar tersebut dapat terwujud diharapkan dapat menjadi katalis bagi penataan ruang dan pengembangan wilayah Kota Pekalongan dan kawasan sekitarnya.

Pada tahun 2014 dan 2015 yang lalu, Pemerintah Kota Pekalongan, Pemerintah Kabupaten Pekalongan dan Batang, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah serta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, melalui Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) VII, telah mengadakan serangkaian pertemuan untuk merencanakan pembangunan jalan lingkar Utara (jalinkut) Petanglong (Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Batang dan Kota Pekalongan). Selanjutnya, BBPJN VII pun juga telah melakukan penyusunan *detail engineering design* (DED) rencana jalan tersebut. Rencana jalinkut Petanglong saat itu pun, merupakan salah satu kegiatan prioritas nasional karena tercantum pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM Nasional) Tahun 2015–2019.

Oleh karena itu, dibutuhkan komitmen seluruh pemangku kepentingan, baik di Kota Pekalongan, Wilayah Petanglong, Provinsi Jawa Tengah maupun nasional, bahwa

pembangunan jalan lingkar merupakan solusi sistemik dalam rangka penataan ruang dan pengembangan wilayah. Tidak hanya dampaknya dalam mengatasi permasalahan kemacetan yang masih sering terjadi, tetapi yang utama adalah bagi tata ruang wilayah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

3. SPAM Regional

Perkembangan kota dan wilayah berimplikasi terhadap semakin meningkatnya kebutuhan penyediaan prasarana dan sarana kota. Kebutuhan penyediaan tersebut, bukan hanya aspek kuantitas semata, tetapi juga menyangkut kualitas ketersediaannya. Termasuk Kota Pekalongan yang semakin tumbuh dan berkembang, yang ditandai dengan peran pelayanan Kota Pekalongan yang semakin meningkat dan pertumbuhan jumlah penduduknya.

Peningkatan peran pelayanan dan pertumbuhan jumlah penduduk berimplikasi terhadap semakin meningkatnya kebutuhan penyediaan prasarana dan sarana perkotaan. Salah satu yang sangat dibutuhkan adalah penyediaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM). Hingga saat ini cakupan pelayanan air minum di Kota Pekalongan belum dapat mencapai 100 persen dan kualitas air minum pun juga harus terus ditingkatkan.

Permasalahan utama penyediaan air minum di Kota Pekalongan adalah terbatasnya air baku bagi air minum di wilayah Kota Pekalongan. Air baku yang bersumber dari air permukaan, hingga saat ini belum dapat diandalkan karena kondisi air permukaan yang tidak memenuhi persyaratan sehingga teknologi dan biaya untuk mengolah menjadi air baku bagi air minum sangatlah mahal. Air baku yang berasal dari air tanah tersedia dalam jumlah terbatas sehingga tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan untuk air bersih. Bahkan berdasarkan pendapat para ahli, meskipun masih diperdebatkan, bahwa penurunan tanah (*land subsidence*) di wilayah Kota Pekalongan, salah satunya, diakibatkan eksploitasi air tanah yang melebihi daya dukungnya.

Oleh karena itu, pemenuhan penyediaan air baku bagi air minum di wilayah Kota Pekalongan mengandalkan sumber dari wilayah sekitar, yaitu Kabupaten Batang dan Kabupaten Pekalongan. Hingga saat ini, oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Pusat, telah dikembangkan SPAM Regional Petanglong, namun ternyata debit atau volume air baku yang dikirimkan di wilayah Kota Pekalongan belum mampu mendukung cakupan pelayanan seluruh masyarakat.

Kerjasama pengelolaan SPAM Petanglong ini harus dilanjutkan dan ditingkatkan, yaitu dengan Pemerintah Kabupaten Batang, Pemerintah Kabupaten Pekalongan, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Pusat. Komitmen dari seluruh pemangku kepentingan pembangunan agar SPAM Petanglong dapat mendukung cakupan air minum 100 persen di wilayah Kota Pekalongan.

Kerjasama sistem SPAM Petanglong (Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Batang dan Kota Pekalongan) yang berkapasitas. SPAM Regional Petanglong yang sudah dirintis sejak Tahun 2011 (MoU tahun 2011, PKS tahun 2012, kemudian diperbaharui dengan MoU Mei 2016, PKS Desember 2016) dan setelah banyak kendala yang harus dilalui, akhirnya SPAM Regional Petanglong Sistem Jambangan dengan kapasitas 200 lt/dtk untuk layanan ke Kota Pekalongan 150 lt/dtk 12.000 Sambungan Rumah dan untuk melayani Kabu[at]ten Pekalongan 50 lt/dtk 4.000 Sambungan Rumah. Sistem jambangan ini merupakan titik awal operasional SPAM Regional Petanglong rencana kapasitas 850 lt/dtk meliputi Sistem Jambangan 400 lt/dtk, Sistem Kaliboyo 450 lt/dt, yang ditargetkan dapat digunakan untuk melayani 68.000 Sambungan Rumah di Kabupaten Pekalongan, Kota Pekalongan, Kabupaten Batang.

3.2.3.3. Rencana Penyelenggaraan Pelayanan Perkotaan

Permendagri Nomor 24 Tahun 2024 mengatur perencanaan pelayanan perkotaan secara menyeluruh. Rencana Sistem Pelayanan meliputi penyediaan layanan Perkotaan, pengoperasian layanan Perkotaan, pemeliharaan layanan Perkotaan, pembinaan sumber daya manusia dalam penyediaan, pengoperasian, dan pemeliharaan layanan Perkotaan, serta pengembangan teknologi dan inovasi dalam penyediaan, pengoperasian, dan pemeliharaan layanan Perkotaan dengan pendekatan kota cerdas.

Tahapan Rencana Sistem Pelayanan Perkotaan adalah sebagai berikut :

- a. Pemetaan rencana dalam dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah dan/atau rencana detail tata ruang;
- b. Identifikasi kelompok target penerima layanan Perkotaan;
- c. Pemetaan titik fasilitas Pelayanan Perkotaan;
- d. Pemetaan kawasan perumahan;
- e. Penilaian kinerja pengelola layanan Perkotaan;
- f. Analisis kinerja layanan Perkotaan;
- g. Penghitungan kebutuhan layanan Perkotaan;
- h. Perumusan tujuan RP2P;
- i. Konsolidasi perencanaan;
- j. Penyusunan peta jalan penyediaan, pengoperasian dan pemeliharaan layanan Perkotaan; dan
- k. Penyusunan matriks perencanaan ke dalam sistem informasi RP2P dan terintegrasi dalam SIPD.

3.2.4. Program Unggulan Daerah

Program Unggulan Kota Pekalongan Tahun 2025-2029 yang merupakan program prioritas Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah dijelaskan pada bab sebelumnya, dijabarkan dalam strategi rencana tindak sebagai berikut.

Tabel III-5
Rencana Implementasi Program Prioritas Daerah Tahun 2025-2029

No	Misi / Tujuan / Sasaran / Outcome	Indikator Tujuan / Sasaran / Outcome	Program Prioritas	Konsep Operasional	Indikasi Rencana Implementasi	Pelaksana	Program pada Perangkat Daerah Pelaksana
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Menjunjung tinggi hukum demi menjamin hak-hak rakyat dengan mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, Kolaboratif, dan Sinergis sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945.						
	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, Kolaboratif, dan Sinergis sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945	Indeks Reformasi Birokrasi					
	Terwujudnya sistem birokrasi yang efektif, akuntabel, inovatif dan pelayanan publik berbasis digital	Nilai SAKIP Kota					
	Meningkatnya fasilitasi lembaga kemasyarakatan	Persentase capaian fasilitasi lembaga kemasyarakatan	Peningkatan Bantuan operasional untuk takmir masjid dan mushola	Program ini dilakukan untuk mendukung pengelola masjid dan mushola dalam bentuk bantuan operasional guna meningkatkan pelayanan keagamaan di masyarakat.	Penyusunan mekanisme bantuan, Pendataan penerima manfaat dan distribusi bantuan.	Sekretariat Daerah	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat
	Terwujudnya sistem birokrasi yang efektif, akuntabel, inovatif dan pelayanan publik berbasis digital	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kota					
	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat Kelurahan	Persentase ketercapaian pemberdayaan masyarakat kelurahan	Peningkatan bantuan RT/RW	Program ini dilakukan untuk memberikan dukungan operasional bagi Ketua RT dan RW dalam bentuk bantuan sarana prasarana dan peningkatan insentif guna memperkuat peran mereka di masyarakat.	Penyusunan mekanisme bantuan insentif bagi Ketua RT/RW dan bantuan sarana prasarana.	Kelurahan	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
	Meningkatnya cabor yang memiliki sarpras olahraga	Persentase cabor yang memiliki Sarpras Olahraga	Pembangunan kolam renang berstandar	Program ini dilakukan untuk menyediakan sarana olahraga air yang memenuhi standar nasional, serta membangun Youth Centre	- Pembangunan fasilitas kolam renang sesuai standar nasional.	Pengampu Urusan	Program Pengembangan

No	Misi / Tujuan / Sasaran / Outcome	Indikator Tujuan / Sasaran / Outcome	Program Prioritas	Konsep Operasional	Indikasi Rencana Implementasi	Pelaksana	Program pada Perangkat Daerah Pelaksana
1	2	3	4	5	6	7	8
			Nasional dan Youth Centre	sebagai pusat kegiatan kepemudaan guna mendukung pengembangan bakat, kreativitas, dan prestasi generasi muda di Kota Pekalongan.	- Penyediaan Youth Centre dengan sarana pendukung seperti ruang pelatihan, workshop, dan tempat ekspresi seni budaya.	Kepemudaan dan Olahraga	Kapasitas Daya Saing Keolahragaan
2 Meningkatkan Akses dan Kualitas Pendidikan di semua jenjang secara merata							
	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia berlandaskan akhlakul karimah	Indeks Pembangunan Manusia					
	Meningkatnya akses dan mutu pendidikan serta pendidikan karakter	Rata-rata lama sekolah penduduk di atas 15 tahun					
	Meningkatnya distribusi guru	Tingkat distribusi guru	Beasiswa studi lanjut bagi guru sekolah dan madrasah	Program ini dilakukan untuk memberikan bantuan pendidikan D3 ke S1 bagi guru sekolah dan madrasah ASN dan Non-ASN yang ingin melanjutkan studi pada perguruan tinggi yang ditunjuk oleh Pemerintah Kota Pekalongan guna meningkatkan kualitas pengajaran.	Penyusunan mekanisme seleksi penerima beasiswa, kerja sama dengan perguruan tinggi.	Pengampu Urusan Pendidikan	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan
	Meningkatnya partisipasi sekolah usia 7-18 tahun (kesetaraan)	Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7-18 (Kesetaraan)	Akses pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus	Program ini dilakukan untuk memastikan anak berkebutuhan khusus mendapatkan fasilitas pendidikan yang layak melalui pembangunan atau renovasi ruang kelas inklusif.	Identifikasi kebutuhan ruang kelas SLB, penyusunan anggaran, pembangunan atau renovasi RKB untuk pendidikan inklusi.	Pengampu Urusan Pendidikan	Program Pengelolaan Pendidikan
	Meningkatnya partisipasi sekolah usia 5-6 tahun	Angka Partisipasi Sekolah (APS) 5-6	Bantuan peralatan sekolah bagi anak yatim dan keluarga rentan	Program ini dilakukan untuk membantu anak dari keluarga kurang mampu dan anak yatim dalam memperoleh perlengkapan sekolah guna mendukung pendidikan mereka.	Pendataan penerima manfaat, penyusunan juknis, dan distribusi bantuan.	Pengampu Urusan Pendidikan dan Pengampu Urusan Sosial	Program Pengelolaan Pendidikan
3 Meningkatkan kualitas kesehatan dan mewujudkan jaminan Layanan Kesehatan Masyarakat.							

No	Misi / Tujuan / Sasaran / Outcome	Indikator Tujuan / Sasaran / Outcome	Program Prioritas	Konsep Operasional	Indikasi Rencana Implementasi	Pelaksana	Program pada Perangkat Daerah Pelaksana
1	2	3	4	5	6	7	8
	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia berlandaskan akhlakul karimah	Indeks Pembangunan Manusia					
	Meningkatnya derajat kesehatan	Usia Harapan Hidup					
	Meningkatnya luasan kawasan kumuh yang ditangani	Luas kawasan permukiman kumuh yang ditangani	Bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	Program ini dilakukan untuk memberikan bantuan perbaikan rumah bagi warga terdampak bencana rob, kebakaran, dan bencana lainnya agar memiliki tempat tinggal yang layak.	Identifikasi calon penerima bantuan dan pelaksanaan perbaikan rumah.	Pengampu Urusan Perumahan dan Permukiman	Program Kawasan Permukiman
	Meningkatnya kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional	Persentase Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional	Jaminan Kesehatan bagi penduduk Kota Pekalongan (berobat cukup bawa KTP)	Program ini dilakukan untuk memastikan seluruh penduduk Kota Pekalongan mendapatkan akses layanan kesehatan dengan cukup menunjukkan KTP sebagai bukti kependudukan.	Koordinasi dengan BPJS, penyusunan regulasi, dan sosialisasi ke masyarakat.	Pengampu Urusan Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
	Meningkatnya rumah tangga sehat Meningkatnya pemberdayaan masyarakat di Kelurahan	Persentase Rumah Tangga Sehat Persentase ketercapaian pemberdayaan masyarakat kelurahan	Peningkatan bantuan operasional posyandu	Program ini dilakukan untuk meningkatkan fasilitas dan dukungan operasional bagi Posyandu guna meningkatkan layanan di tingkat kelurahan.	Bantuan kader posyandu layanan kesehatan dan Insentif bagi posyandu berprestasi per kelurahan	Pengampu Urusan Kesehatan dan Kelurahan	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan Pada Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kesehatan dan Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Pada Kelurahan
	Meningkatnya rumah tangga sehat	Persentase Rumah Tangga Sehat	Beasiswa studi lanjut bagi tenaga kesehatan	Program ini dilakukan untuk memberikan bantuan pendidikan D3 ke S1 bagi tenaga kesehatan ASN dan Non-ASN yang ingin melanjutkan studi pada perguruan tinggi yang ditunjuk oleh Pemerintah Kota	Penyusunan regulasi dan skema seleksi penerima beasiswa, kerja sama dengan perguruan tinggi.	Pengampu Urusan Kesehatan	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan

No	Misi / Tujuan / Sasaran / Outcome	Indikator Tujuan / Sasaran / Outcome	Program Prioritas	Konsep Operasional	Indikasi Rencana Implementasi	Pelaksana	Program pada Perangkat Daerah Pelaksana
1	2	3	4	5	6	7	8
				Pekalongan guna meningkatkan kompetensi dan kualitas layanan kesehatan.			
4	Peningkatan Layanan untuk mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat.						
	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat	Tingkat Kemiskinan					
	Optimalnya pengarusutamaan gender	Indeks Ketimpangan Gender Kategori Kota Layak Anak					
	Meningkatnya layanan permasalahan keluarga yang ditangani	Persentase Layanan Permasalahan Keluarga Yang Terlayani	Rumah Aman untuk anak dan perempuan korban bullying	Program ini dilakukan untuk menyediakan fasilitas perlindungan bagi anak dan perempuan korban kekerasan serta perundungan guna memberikan rasa aman dan dukungan pemulihan.	Penambahan kapasitas UPTD LP-PAR menjadi rumah aman dan Layanan Crisis Center atau nama lain yang menjadi bagian dari posyandu di Kelurahan	Pengampu Urusan Perlindungan Anak dan Pengampu Urusan Sosial	Program Peningkatan Kualitas Keluarga
5	Membangun Kemandirian Ekonomi daerah berbasis potensi sumber daya lokal.						
	Membangun kemandirian ekonomi daerah berbasis potensi sumber daya lokal yang berkelanjutan	Pertumbuhan Ekonomi					
	Meningkatnya pertumbuhan PDRB sektor industri pengolahan, perdagangan jasa dan akomodasi	Pertumbuhan PDRB lapangan usaha penyediaan akomodasi dan makan minum					
	Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	Menambah ruang kreatif dan seni budaya	Program ini dilakukan untuk menyediakan ruang kreatif dan seni budaya bagi masyarakat, khususnya generasi muda, melalui penataan kawasan Jetayu sebagai pusat aktivitas seni dan budaya.	Penyusunan desain tata ruang kreatif, pelaksanaan revitalisasi kawasan, serta penyediaan fasilitas seni budaya.	Pengampu Urusan Pariwisata	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
	Meningkatnya pertumbuhan PDRB sektor industri	Pertumbuhan PDRB lapangan usaha					

No	Misi / Tujuan / Sasaran / Outcome	Indikator Tujuan / Sasaran / Outcome	Program Prioritas	Konsep Operasional	Indikasi Rencana Implementasi	Pelaksana	Program pada Perangkat Daerah Pelaksana
1	2	3	4	5	6	7	8
	pengolahan, perdagangan jasa dan akomodasi	perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor					
	Meningkatnya pengembangan usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha	Persentase pengembangan usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha			- Pelatihan dan pendampingan usaha berbasis ekonomi sirkular bagi UMKM dan komunitas kreatif.	PD Pengampu Urusan Koperasi, UKM	Program Pengembangan UMKM pada PD Pengampu Urusan Koperasi, UKM
6 Mewujudkan Pengelolaan Lingkungan yang Bersih dan Berkelanjutan							
	Membangun kemandirian ekonomi daerah berbasis potensi sumber daya lokal yang berkelanjutan	Pertumbuhan Ekonomi					
	Meningkatnya investasi daerah	Nilai realisasi investasi tahun N					
	Meningkatnya pengelolaan sampah	Persentase pengelolaan sampah	Menumbuhkan kegiatan ekonomi sirkular (Pemanfaatan limbah, daur ulang dan lain-lain)	Program ini dilakukan untuk menciptakan ekonomi berkelanjutan dengan memanfaatkan limbah dan bahan bekas melalui proses daur ulang dan upcycling, sehingga dapat meningkatkan nilai ekonomi serta mengurangi dampak lingkungan. melalui inisiasi proyek percontohan di beberapa kelurahan. (bertambah 2 kelurahan setiap tahun)	- Penguatan program bank sampah dan ekosistem daur ulang di tingkat kelurahan/RT/RW	PD Pengampu Urusan Lingkungan Hidup	Program Pengelolaan Persampahan pada Perangkat Daerah Pengampu Urusan Lingkungan Hidup
					- Kolaborasi dengan pelaku industri dan akademisi dalam inovasi pengelolaan limbah	PD Pengampu Urusan Koperasi, UKM	Program Pengelolaan Persampahan pada Perangkat Daerah Pengampu Urusan Lingkungan Hidup

Sumber : Bapperida Kota Pekalongan, 2025

3.2.5. Program Pembangunan Daerah

Mendasari pada strategi, arah kebijakan dan program prioritas sebagaimana diuraikan pada bab sebelumnya, maka untuk mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan guna mewujudkan Visi dan Misi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pekalongan Tahun 2025-2029, maka daftar program Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 dalam mencapai kinerja pembangunan daerah dan Indikator program, target dan pagu indikatif program Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 dijabarkan pada sebagaimana ditunjukkan dalam tabel III-6 berikut.

Tabel III-6
Program Pembangunan Daerah Kota Pekalongan Tahun 2025-2029
Dalam Rangka Pencapaian Visi dan Misi Wali Kota

KODE	TUJUAN / SASARAN / PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	OUTCOME	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN /SASARAN/PROGRAM)	SATUAN	BASELINE		KINERJA DAN USULAN PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD	PENANGGUNG JAWAB
					Th. 2024	Th. 2025	Th. 2026		Th. 2027		Th. 2028		Th. 2029		Th. 2030			
							Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, Kolaboratif, dan Sinergis sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945		Indeks Reformasi Birokrasi	indeks	87,25	87,31	87,33		87,34		87,35		87,36		87,37		87,37	
1.1.	Terwujudnya sistem birokrasi yang efektif, akuntabel, inovatif dan pelayanan publik berbasis digital		Nilai SAKIP Kota	nilai	73,02	74,41	75,81		77,21		78,6		80		81,4		81,4	
5.01.02	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan, evaluasi, dan pelaporan tepat waktu						365,16		366,00		366,00		416,00		466,00		
			Persentase ketersediaan dokumen perencanaan tepat waktu	persen	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	PD Pengampu Urusan Perencanaan
			Skor Satu Data Indonesia (SDI)	persen	N/A	71,44	72,44		73,44		74,44		75,44		76,44		76,44	PD Pengampu Urusan Perencanaan
			Persentase ketersediaan dokumen evaluasi dan pelaporan triwulanan tepat waktu	persen	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	PD Pengampu Urusan Perencanaan
5.01.03	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Meningkatnya koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah						426,35		516,34		516,34		516,34		551,38		
			Persentase konsistensi perencanaan pembangunan (Rata-rata nilai keselarasan program pada RKPD-RPJM Daerah, dan Kegiatan/Sub Kegiatan pada Renja-Renstra) bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	persen	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	PD Pengampu Urusan Perencanaan
			Persentase konsistensi perencanaan pembangunan (Rata-rata nilai keselarasan program pada RKPD-RPJM Daerah, dan Kegiatan/Sub Kegiatan pada Renja-Renstra) bidang Perekonomian	persen	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	PD Pengampu Urusan Perencanaan
			Persentase konsistensi perencanaan pembangunan (Rata-rata nilai keselarasan program pada RKPD-RPJM Daerah, dan Kegiatan/Sub Kegiatan pada Renja-Renstra) Bidang Infrastruktur Wilayah	persen	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	PD Pengampu Urusan Perencanaan

KODE	TUJUAN / SASARAN / PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	OUTCOME	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN /SASARAN/PROGRAM)	SATUAN	BASELINE		KINERJA DAN USULAN PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD	PENANGGUNG JAWAB
					Th. 2024	Th. 2025	Th. 2026		Th. 2027		Th. 2028		Th. 2029		Th. 2030			
							Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
4.01.02	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Meningkatnya kualitas koordinasi di bidang pemerintahan dan kesejahteraan masyarakat						18.129,90		15.895,53		16.681,86		19.441,50		18.371,37		
			Persentase penyusunan dokumen LPPD dan LKPJ tepat waktu	persen	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	Sekretariat Daerah
			Indeks Reformasi Hukum (IUP)	persen	96,76	96,77	96,78		96,79		96,80		96,81		96,82		96,82	Sekretariat Daerah
			Persentase capaian fasilitasi lembaga kemasyarakatan	persen	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	Sekretariat Daerah
2.24.02	Program Pengelolaan Arsip	Meningkatnya kualitas pengelolaan arsip daerah						254,46		326,00		350,00		375,00		400,00		
			Persentase ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Ps40 dan 59 U 43/2009)	persen	73,63	73,73	73,83		73,93		74,03		74,13		74,23		74,23	PD Pengampu Urusan Perpustakaan
2.24.03	Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	Terwujudnya perlindungan dan penyelamatan arsip						152,32		173,00		185,00		197,00		209,00		
			Persentase keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggung jawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat (IKK Outcome)	persen	33,33	33,43	33,53		33,63		33,73		33,83		33,93		33,93	PD Pengampu Urusan Perpustakaan
1.1.	Terwujudnya sistem birokrasi yang efektif, akuntabel, inovatif dan pelayanan publik berbasis digital	Opini BPK atas laporan keuangan		kategori	WTP	WTP	WTP		WTP		WTP		WTP		WTP		WTP	
5.02.02	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah yang tepat waktu dan berkualitas						4.976,05		5.160,79		5.160,79		5.160,79		5.160,79		
			Pesentase ketepatan waktu dalam penyusunan APBD	persen	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	PD Pengampu Urusan Keuangan
			Persentase realisasi APBD (belanja pegawai, belanja barang jasa dan belanja modal)	persen	94,34	91,67	91,67		91,67		91,67		91,67		91,67		91,67	PD Pengampu Urusan Keuangan
			Persentase laporan keuangan daerah tepat waktu	persen	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	PD Pengampu Urusan Keuangan
5.02.03	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Meningkatnya pengelolaan barang milik daerah tingkat kota yang akuntabel dan sesuai peraturan perundangan						794,65		1.013,00		1.095,00		1.013,00		1.013,00		
			Persentase SKPD yang tertib penatausahaan BMD yang sesuai peraturan perundang-undangan	persen	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	PD Pengampu Urusan Keuangan

KODE	TUJUAN / SASARAN / PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	OUTCOME	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN /SASARAN/PROGRAM)	SATUAN	BASELINE		KINERJA DAN USULAN PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD	PENANGGUNG JAWAB
					Th. 2024	Th. 2025	Th. 2026		Th. 2027		Th. 2028		Th. 2029		Th. 2030			
							Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
5.02.04	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Meningkatnya kinerja pengelolaan pendapatan daerah						1.421,07		2.027,50		2.050,00		2.275,00		2.295,00		
			Ketetapan Pajak Daerah (non opsen) dan retribusi daerah	miliar rupiah	255,88	257,16	258,44		259,73		261,03		262,34		263,65		263,65	PD Pengampu Urusan Keuangan
			Persentase realisasi PAD	persen	102,35	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	PD Pengampu Urusan Keuangan
1.1.	Terwujudnya sistem birokrasi yang efektif, akuntabel, inovatif dan pelayanan publik berbasis digital		Indeks Integritas Nasional (IIN) (IUP)	indeks	82,25	82,25	82,25		82,25		82,25		82,25		82,25		82,25	
6.01.02	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pengawasan internal						300,00		300,00		300,00		300,00		300,00		
			Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) pengawasan akuntabilitas keuangan daerah dan kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang selesai ditindaklanjuti	persen	59,72	80,00	81,00		82,00		83,00		84,00		85,00		85,00	Inspektorat Daerah
			Persentase temuan hasil pengawasan dengan tujuan tertentu yang selesai ditindaklanjuti	persen	46,34	50,00	53,00		55,00		57,00		60,00		65,00		65,00	Inspektorat Daerah
6.01.03	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang bersih						500,00		350,00		350,00		350,00		350,00		
			Indeks pencegahan korupsi daerah (IPKD)	indeks	96,03	96,03	96,05		96,25		96,50		96,75		97,00		97,00	Inspektorat Daerah
1.1.	Terwujudnya sistem birokrasi yang efektif, akuntabel, inovatif dan pelayanan publik berbasis digital		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kota	indeks	91,37	91,38	91,39		91,4		91,41		91,42		91,43		91,43	
1.05.04	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Meningkatnya pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran						831,97		1.226,50		1.288,00		1.346,50		1.359,00		
			Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran (SPM / IKK Outcome)	persen	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	PD Pengampu Urusan Trantibum
2.10.05	Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan	Meningkatnya permasalahan pertanahan yang tertangani						644,72		738,22		738,22		738,22		738,22		
			Persentase permasalahan pertanahan yang tertangani	persen	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	PD Pengampu Urusan Pertanahan
2.10.06	Program Redistribusi Tanah, dan Ganti Kerugian Program Tanah	Meningkatnya kualitas layanan redistribusi tanah serta ganti kerugian tanah						9,09		99,80		99,80		99,80		99,80		

KODE	TUJUAN / SASARAN / PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	OUTCOME	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN /SASARAN/PROGRAM)	SATUAN	BASELINE		KINERJA DAN USULAN PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD	PENANGGUNG JAWAB
					Th. 2024	Th. 2025	Th. 2026		Th. 2027		Th. 2028		Th. 2029		Th. 2030			
							Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	kelebihan maksimum dan tanah absentee																
			Persentase tindak lanjut penetapan subjek dan objek redistribusi tanah serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee	persen		75,00	75,00		75,00		75,00		75,00		75,00		75,00	PD Pengampu Urusan Pertanahan
2.12.02	Program Pendaftaran Penduduk	Meningkatnya kualitas layanan pendaftaran penduduk						334,56		360,00		370,00		390,00		415,00		
			Rata-rata ketercapaian pelayanan pendaftaran penduduk	persen	88,97	88,10	89,94		90,61		91,27		91,94		92,61		92,61	PD Pengampu Urusan Adminduk Capi
2.12.03	Program Pencatatan Sipil	Meningkatnya kualitas layanan pencatatan sipil						361,61		361,61		361,61		361,61		361,61		
			Rata-rata ketercapaian pelayanan pencatatan sipil	persen	89,58	93,85	99,84		99,84		99,85		99,85		99,85		99,85	PD Pengampu Urusan Adminduk Capi
2.12.04	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Meningkatnya pemanfaatan data kependudukan						71,00		200,00		239,00		258,00		277,00		
			Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	OPD	10,00	12,00	13,00		14,00		15,00		16,00		17,00		17,00	PD Pengampu Urusan Adminduk Capi
2.19.02	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Meningkatnya kapasitas daya saing kepemudaan						4.083,00		332,00		342,00		352,00		362,00		
			Persentase anggota organisasi kepemudaan yang dibina	persen	55,12	55,12	56,10		57,07		58,05		59,02		60,00		60,00	PD Pengampu Urusan Kepemudaan dan Olahraga
2.19.03	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Meningkatnya kapasitas daya saing keolahragaan						6.599,50		16.520,00		5.770,00		5.820,00		5.970,00		
			Persentase cabor yang memiliki sarpras olahraga	persen	N/A	42,00	43,00		44,00		45,00		46,00		47,00		47,00	PD Pengampu Urusan Kepemudaan dan Olahraga
2.19.04	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Meningkatnya kapasitas Kepramukaan						100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
			Persentase kegiatan kepramukaan yang dilaksanakan pada tahun N	persen	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	PD Pengampu Urusan Kepemudaan dan Olahraga
4.02.02	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Meningkatnya kualitas dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD						26.958,64		26.958,64		26.958,64		26.958,64		26.958,64		
			Persentase pembahasan dokumen penganggaran tepat waktu	persen	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	Sekretariat DPRD

KODE	TUJUAN / SASARAN / PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	OUTCOME	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN /SASARAN/PROGRAM)	SATUAN	BASELINE		KINERJA DAN USULAN PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD	PENANGGUNG JAWAB
					Th. 2024	Th. 2025	Th. 2026		Th. 2027		Th. 2028		Th. 2029		Th. 2030			
							Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Persentase penetapan ranperda pada tahun N	persen	29,41	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	Sekretariat DPRD
X.XX.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan daerah						622.336,67		636.040,28		644.119,96		655.199,44		664.161,23		
			Persentase keselarasan perencanaan, kinerja evaluasi dan kinerja keuangan perangkat daerah	persen	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	Semua PD
			Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	persen	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	Semua PD
			Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	persen	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	Semua PD
			Persentase ketersediaan layanan BLUD	persen	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	PD Pengampu Urusan Kesehatan
			Nilai Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik	Angka	97,74	97,74	97,74		97,75		97,75		97,76		97,76		97,76	Sekretariat Daerah
			Persentase ketersediaan layanan administrasi keuangan, operasional dan kerumahtanggan Sekretariat Daerah	persen	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	Sekretariat Daerah
			Persentase pelayanan keprotokolan	persen	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	Sekretariat Daerah
			Persentase keselarasan perencanaan, kinerja evaluasi dan kinerja keuangan perangkat daerah	persen	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	Sekretariat DPRD
			Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian,administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	persen	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	Sekretariat DPRD
			Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	persen	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	Sekretariat DPRD
			Persentase ketersediaan layanan administrasi, keuangan dan kesejahteraan DPRD	persen	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	Sekretariat DPRD
1.1.	Terwujudnya sistem birokrasi yang efektif, akuntabel, inovatif dan pelayanan publik berbasis digital	Indeks Pelayanan Publik (IPP) (IUP)		indeks	4,59	4,59	4,59		4,59		4,59		4,59		4,59		4,59	
5.03.02	Program Kepegawaian Daerah	Terwujudnya ASN yang profesional dan berkinerja baik						880,06		1.167,58		1.188,58		1.209,58		1.210,58		

KODE	TUJUAN / SASARAN / PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	OUTCOME	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN /SASARAN/PROGRAM)	SATUAN	BASELINE		KINERJA DAN USULAN PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD	PENANGGUNG JAWAB
					Th. 2024	Th. 2025	Th. 2026		Th. 2027		Th. 2028		Th. 2029		Th. 2030			
							Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Persentase keterpenuhan formasi ASN	persen	48,14	49,89	70,00		73,00		75,00		76,00		77,00		77,00	PD Pengampu Urusan Kepegawaian
			Persentase keterisian jabatan manajerial ASN	persen	95,61	90,21	95,00		95,00		95,00		90,00		90,00		90,00	PD Pengampu Urusan Kepegawaian
			Persentase peningkatan kompetensi ASN melalui jalur pendidikan	persen	25,53	26,07	27,00		27,00		27,00		28,00		28,00		28,00	PD Pengampu Urusan Kepegawaian
			Persentase pegawai dengan SKP bernilai minimal baik	persen	99,83	95,00	95,00		95,00		95,00		95,00		95,00		95,00	PD Pengampu Urusan Kepegawaian
5.04.02	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Meningkatnya kompetensi ASN						984,34		1.710,00		1.820,00		1.930,00		1.930,00		
			Persentase ASN berkembang kompetensi dasar, manajerial, dan fungsional	persen	13,20	14,00	50,00		55,00		60,00		65,00		70,00		70,00	PD Pengampu Urusan Kepegawaian
2.16.02	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan informasi publik						4.174,87		4.131,73		4.327,05		4.522,38		4.717,70		
			Persentase kepuasan masyarakat terhadap pelayanan informasi publik	persen	0,00	20,00	21,00		22,00		23,00		24,00		25,00		25,00	PD Pengampu Urusan Kominfo
2.16.03	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Meningkatnya kematangan SPBE, layanan pusat data, dan jaringan intra pemerintah daerah						2.306,18		2.761,70		2.893,19		3.024,90		3.156,85		
			Tingkat kematangan pembangunan aplikasi SPBE	nilai	4,00	4,00	4,00		4,00		4,00		4,00		5,00		5,00	PD Pengampu Urusan Kominfo
			Tingkat kematangan layanan pusat data	nilai	4,00	4,00	4,00		4,00		4,00		4,00		5,00		5,00	PD Pengampu Urusan Kominfo
			Tingkat kematangan layanan jaringan intra pemerintah daerah	nilai	3,00	3,00	4,00		4,00		4,00		4,00		5,00		5,00	PD Pengampu Urusan Kominfo
2.20.02	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Terwujudnya akurasi data statistik sektoral						107,46		114,00		120,50		132,50		140,50		
			Persentase ketersediaan data statistik sektoral	persen	98,48	95,00	95,50		96,00		96,50		97,00		98,00		98,00	PD Pengampu Urusan Statistik
2.21.02	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Terwujudnya keamanan informasi						179,77		193,20		202,20		211,20		221,20		
			Nilai kematangan penerapan manajemen keamanan informasi	nilai	4,00	4,00	4,00		4,00		4,00		4,00		5,00		5,00	PD Pengampu Urusan Persandian
5.05.03	Program Riset dan Inovasi Daerah	Meningkatnya kualitas riset dan inovasi daerah						1.025,24		592,40		962,40		597,40		602,40		
			Persentase kajian berbasis bukti dalam penyelesaian permasalahan daerah	persen	66,67	66,67	66,67		66,67		66,67		66,67		66,67		66,67	PD Pengampu Urusan Penelitian dan Pengembangan

KODE	TUJUAN / SASARAN / PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	OUTCOME	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN /SASARAN/PROGRAM)	SATUAN	BASELINE		KINERJA DAN USULAN PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD	PENANGGUNG JAWAB
					Th. 2024	Th. 2025	Th. 2026		Th. 2027		Th. 2028		Th. 2029		Th. 2030			
							Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Meningkatnya kualitas layanan Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik						40,00		48,03		49,89		55,67		58,84		
			Persentase kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik di wilayah utara	persen	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	Kec. Pekalongan Utara
			Persentase kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik di wilayah selatan	persen	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	Kec. Pekalongan Selatan
			Persentase kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik di wilayah barat	persen	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	Kec. Pekalongan Barat
			Persentase kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik di wilayah timur	persen	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	Kec. Pekalongan Timur
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat						16.657,37		13.141,79		13.709,72		14.388,50		14.881,70		
			Persentase Kelurahan yang menyelesaikan laporan kinerja pemberdayaan tepat waktu	persen	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	Kec. Pekalongan Utara
			Persentase kelurahan yang menyelesaikan laporan kinerja pemberdayaan tepat waktu	persen	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	Kec. Pekalongan Utara
			Persentase kelurahan yang menyelesaikan laporan kinerja pemberdayaan tepat waktu	persen	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	Kec. Pekalongan Selatan
			Persentase ketercapaian pemberdayaan masyarakat kelurahan	persen	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	Kec. Pekalongan Selatan
			Persentase Kelurahan yang menyelesaikan laporan kinerja pemberdayaan tepat waktu	persen	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	Kec. Pekalongan Barat
			Persentase ketercapaian pemberdayaan masyarakat kelurahan	persen	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	Kec. Pekalongan Barat
			Persentase kelurahan yang menyelesaikan laporan kinerja pemberdayaan tepat waktu	persen	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	Kec. Pekalongan Timur
			Persentase ketercapaian pemberdayaan masyarakat kelurahan	persen	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	Kec. Pekalongan Timur
7.01.04	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Meningkatnya Ketentraman dan ketertiban umum						803,17		823,05		888,35		1.015,00		1.041,98		
			Persentase kinerja trantibum wilayah utara	persen	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	Kec. Pekalongan Utara

KODE	TUJUAN / SASARAN / PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	OUTCOME	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN /SASARAN/PROGRAM)	SATUAN	BASELINE		KINERJA DAN USULAN PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD	PENANGGUNG JAWAB
					Th. 2024	Th. 2025	Th. 2026		Th. 2027		Th. 2028		Th. 2029		Th. 2030			
							Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Persentase kinerja trantibum wilayah selatan	persen	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	Kec. Pekalongan Selatan
			Persentase kinerja trantibum di wilayah barat	persen	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	Kec. Pekalongan Barat
			Persentase kinerja trantibum di wilayah timur	persen	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	Kec. Pekalongan Timur
7.01.05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Meningkatnya kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum						17,47		18,83		20,35		21,87		22,79		
			Persentase kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum di wilayah utara	persen	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	Kec. Pekalongan Utara
			Persentase kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum di wilayah selatan	persen	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	Kec. Pekalongan Selatan
			Persentase kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum di wilayah barat	persen	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	Kec. Pekalongan Barat
			Persentase kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum di wilayah timur	persen	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	Kec. Pekalongan Timur
2.13.03	Program Peningkatan Kerja Sama Desa	Meningkatnya kualitas kolaborasi dan pemberdayaan masyarakat						337,47		600,00		600,00		600,00		600,00		
			Persentase ketercapaian fasilitasi kerjasama TNI dan kelurahan	persen	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	PD Pengampu Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2.13.04	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Meningkatnya kualitas administrasi kelurahan						43,79		35,00		35,00		35,00		35,00		
			Persentase kelurahan dengan kriteria cepat berkembang	persen	88,89	88,89	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	PD Pengampu Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2.13.05	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Meningkatnya kualitas pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKK) dalam pembangunan						878,88		805,00		805,00		805,00		805,00		
			Persentase fasilitasi penataan kelembagaan lembaga kemasyarakatan kelurahan (LKK)	persen	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	PD Pengampu Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia berlandaskam akhlakul karimah	Indeks Pembangunan Manusia	indeks		77,21	77,39	77,88		78,38		78,87		79,36		79,85		79,85	
2.1.	Meningkatnya akses dan mutu pendidikan serta pendidikan karakter	Rata-rata lama sekolah penduduk di atas 15 tahun (IUP)	tahun		9,62	9,68	9,74		9,8		9,86		9,92		9,98		9,98	

KODE	TUJUAN / SASARAN / PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	OUTCOME	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN /SASARAN/PROGRAM)	SATUAN	BASELINE		KINERJA DAN USULAN PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD	PENANGGUNG JAWAB
					Th. 2024	Th. 2025	Th. 2026		Th. 2027		Th. 2028		Th. 2029		Th. 2030			
							Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1.01.02	Program Pengelolaan Pendidikan	Meningkatnya akses dan pemerataan partisipasi pendidikan bagi anak usia 5 - 18 tahun						53.579,68		53.779,68		53.979,68		54.179,68		54.379,68		
			Angka Partisipasi Sekolah (APS) 5-6	persen	90,58	91,87	93,15		94,44		95,73		97,01		100,00		100,00	PD Pengampu Urusan Pendidikan
			Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7-12	persen	99,70	99,70	99,72		99,74		99,76		99,78		99,80		99,80	PD Pengampu Urusan Pendidikan
			Angka Partisipasi Sekolah (APS) 13-15	persen	96,52	96,52	96,72		96,97		97,22		97,47		97,72		97,72	PD Pengampu Urusan Pendidikan
			Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7-18 (kesetaraan)	persen	25,96	30,94	35,92		40,90		45,87		50,85		55,83		55,83	PD Pengampu Urusan Pendidikan
1.01.04	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Meningkatnya kualitas pendidik pada satuan pendidikan TK, SD dan SMP Negeri						15.528,45		15.501,45		15.517,45		15.517,45		15.537,45		
			Persentase pendidik berkualifikasi pendidikan minimal S1 dan bersertifikasi profesi di satuan pendidikan TK, SD dan SMP Negeri	persen	71,29	74,77	78,44		81,47		84,54		87,27		90,26		90,26	PD Pengampu Urusan Pendidikan
2.23.02	Program Pembinaan Perpustakaan	Meningkatnya tingkat kegemaran membaca masyarakat						926,81		883,00		997,00		1.078,00		1.224,00		
			Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	indeks	80,67	80,87	81,07		81,27		81,47		81,67		81,87		81,87	PD Pengampu Urusan Perpustakaan
			Rasio pengunjung perpustakaan per tahun (penduduk usia 5 - 60 tahun)	persen	63,43	63,63	63,83		64,03		64,23		64,43		64,63		64,63	PD Pengampu Urusan Perpustakaan
2.23.03	Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	Terwujudnya pelestarian koleksi dan naskah kuno						0,00		0,00		35,00		0,00		40,00		
			Persentase koleksi dan naskah kuno yang telah didokumentasikan	naskah	0,00	0,00	0,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	PD Pengampu Urusan Perpustakaan
2.1.	Meningkatnya akses dan mutu pendidikan serta pendidikan karakter		Persentase satuan pendidikan yang menerapkan pendidikan karakter dan pendidikan keagamaan	persen	100	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
1.01.03	Program Pengembangan Kurikulum	Terwujudnya penerapan kurikulum muatan lokal kebencanaan berbasis karakter dan keagamaan pada seluruh jenjang pendidikan						83,80		260,00		222,00		173,50		185,00		

KODE	TUJUAN / SASARAN / PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	OUTCOME	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN /SASARAN/PROGRAM)	SATUAN	BASELINE		KINERJA DAN USULAN PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD	PENANGGUNG JAWAB
					Th. 2024	Th. 2025	Th. 2026		Th. 2027		Th. 2028		Th. 2029		Th. 2030			
							Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Persentase satuan PAUD yang mengembangkan program kurikulum muatan lokal kebencanaan berbasis karakter dan keagamaan	persen	0,00	0,00	20,22		40,07		59,93		77,90		100,00		100,00	PD Pengampu Urusan Pendidikan
			Persentase satuan pendidikan SD yang mengembangkan program kurikulum muatan lokal kebencanaan berbasis karakter dan keagamaan	persen	0,00	0,00	19,42		38,83		58,25		87,38		100,00		100,00	PD Pengampu Urusan Pendidikan
			Persentase satuan pendidikan SMP yang mengembangkan program kurikulum muatan lokal kebencanaan berbasis karakter dan keagamaan	persen	0,00	0,00	20,00		40,00		60,00		80,00		100,00		100,00	PD Pengampu Urusan Pendidikan
			Persentase satuan pendidikan Kesetaraan yang mengembangkan program kurikulum muatan lokal kebencanaan berbasis karakter dan keagamaan	persen	0,00	0,00	7,14		35,71		64,29		78,57		100,00		100,00	PD Pengampu Urusan Pendidikan
2.2.	Meningkatnya derajat kesehatan		Usia Harapan Hidup (UHH) (IUP)	tahun	74,79	74,86	75,08		75,30		75,51		75,73		75,95		75,95	
1.02.02	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Meningkatnya efektivitas pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat						76.680,96		77.512,60		78.566,70		78.666,64		78.981,24		
			Persentase ketersediaan sarana, prasarana dan alat kesehatan yang sesuai standar	persen	79,45	79,50	79,60		79,70		79,80		79,90		80,00		80,00	PD Pengampu Urusan Kesehatan
			Cakupan penerima pemeriksaan kesehatan gratis	persen	NA	30,00	40,00		50,00		60,00		70,00		80,00		80,00	PD Pengampu Urusan Kesehatan
			Persentase fasilitas kesehatan yang terintegrasi dalam sistem informasi kesehatan nasional	persen	NA	61,60	63,20		66,40		68,00		70,40		72,00		72,00	PD Pengampu Urusan Kesehatan
			Jumlah kasus kematian ibu (IUP)	kasus	5,00	5,00	5,00		5,00		5,00		4,00		4,00		4,00	PD Pengampu Urusan Kesehatan
			Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (IUP)	persen	98,32	98,43	98,54		98,65		98,76		98,86		99,00		99,00	PD Pengampu Urusan Kesehatan
			Jumlah kasus kematian balita	kasus	62,00	62,00	60,00		58,00		56,00		54,00		52,00		52,00	PD Pengampu Urusan Kesehatan
			Persentase desa/kelurahan sanitasi total berbasis masyarakat	persen	NA	3,70	11,11		18,52		25,93		33,33		40,74		40,74	PD Pengampu Urusan Kesehatan
			Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate) (IUP)	persen	91,06	91,10	91,20		91,30		91,40		91,50		91,60		91,60	PD Pengampu Urusan Kesehatan

KODE	TUJUAN / SASARAN / PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	OUTCOME	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN /SASARAN/PROGRAM)	SATUAN	BASELINE		KINERJA DAN USULAN PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD	PENANGGUNG JAWAB
					Th. 2024	Th. 2025	Th. 2026		Th. 2027		Th. 2028		Th. 2029		Th. 2030			
							Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Persentase fasyankes yang diberikan rekomendasi tepat waktu	persen		100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	PD Pengampu Urusan Kesehatan
			Prevalensi wasting balita	persen	8,43	8,18	7,93		7,68		7,43		7,18		6,93		6,93	PD Pengampu Urusan Kesehatan
			Persentase ketersediaan sarana, prasarana dan alat kesehatan di RSUD yang sesuai standar	persen	100,00	86,50	87,00		87,50		88,00		88,50		89,00		89,00	PD Pengampu Urusan Kesehatan
			Cakupan penerima pemeriksaan kesehatan gratis	persen	0,00	0,00	40,00		50,00		60,00		70,00		80,00		80,00	PD Pengampu Urusan Kesehatan
1.02.03	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Meningkatnya kapasitas sumber daya manusia kesehatan						608,58		538,02		549,02		566,02		582,02		
			Rasio tenaga kesehatan dan tenaga medis terhadap populasi	persen	4,83	4,83	4,85		4,91		4,90		4,94		5,04		5,04	PD Pengampu Urusan Kesehatan
			Persentase tenaga kesehatan (perawat) di area kritis (IBS, ICU/PICU/NICU, Dialisis) RSUD Benda yang memiliki kompetensi yang dipersyaratkan	persen	71,70	71,19	77,97		84,75		89,83		94,92		100,00		100,00	PD Pengampu Urusan Kesehatan
1.02.04	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Meningkatnya sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan minuman						492,24		493,59		493,75		494,98		494,98		
			Persentase rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan dari lintas sektor yang ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah	persen	NA	80,00	81,82		83,33		84,62		85,71		86,67		86,67	PD Pengampu Urusan Kesehatan
			Persentase pangan industri rumah tangga aman dan bermutu	persen	NA	75,00	76,92		77,78		78,00		79,63		80,00		80,00	PD Pengampu Urusan Kesehatan
			Persentase tempat pengelolaan pangan (TPP) yang memenuhi syarat	persen	NA	40,00	46,00		52,00		58,00		64,00		70,00		70,00	PD Pengampu Urusan Kesehatan
1.02.05	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan						2.775,83		1.726,97		1.728,01		1.728,21		1.729,07		
			Persentase rumah tangga sehat	persen	97,22	97,22	97,30		97,40		97,50		97,60		97,70		97,70	PD Pengampu Urusan Kesehatan
1.04.02	Program Pengembangan Perumahan	Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni di kawasan rawan bencana						1.643,71		1.740,61		1.740,61		1.740,61		1.740,61		
			Persentase ketersediaan rumah layak huni di kawasan rawan bencana	persen	74,88	75,05	75,22		75,39		75,56		75,72		75,89		75,89	PD Pengampu Urusan Perkum

KODE	TUJUAN / SASARAN / PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	OUTCOME	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN /SASARAN/PROGRAM)	SATUAN	BASELINE		KINERJA DAN USULAN PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD	PENANGGUNG JAWAB
					Th. 2024	Th. 2025	Th. 2026		Th. 2027		Th. 2028		Th. 2029		Th. 2030			
							Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1.04.03	Program Kawasan Permukiman	Meningkatnya kualitas kawasan permukiman						27.293,92		25.896,84		25.896,84		25.896,84		25.896,84		
			Luas kawasan permukiman kumuh yang ditangani	hektar	17,45	10,00	10,00		10,00		10,00		10,00		10,00		10,00	PD Pengampu Urusan Perkim
1.04.04	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Meningkatnya rumah tangga dengan akses hunian layak						8.516,10		6.840,51		6.840,51		6.840,51		6.840,51		
			Rumah tangga dengan akses hunian layak (IUP)	persen	0,00	87,61	88,34		89,06		89,79		90,52		91,25		91,25	PD Pengampu Urusan Perkim
1.04.05	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (Psu)	Meningkatnya kualitas perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)						8.377,40		8.468,59		8.468,59		8.468,59		8.468,59		
			Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum) (IKK Outcome)	persen	64,13	70,65	76,34		81,91		87,37		92,71		100,00		100,00	PD Pengampu Urusan Perkim
3.	Membangun kemandirian ekonomi daerah berbasis potensi sumberdaya lokal yang berkelanjutan	Pertumbuhan Ekonomi	persen	5,34	5,44 - 6,00	5,7 - 6,20		5,7 - 7,20		5,7 - 7,20		5,7 - 7,20		5,7 - 7,70		5,7 - 8,10		5,7 - 8,10
3.1.	Meningkatnya investasi daerah	Nilai realisasi investasi tahun N	Rp Milyar	238,05	491,75	180		181,8		183,618		185,45418		187,3087218		187,3087218		
2.18.02	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Meningkatnya realisasi investasi						26,30		85,47		38,34		42,70		105,99		
			Persentase realisasi investasi terhadap total realisasi investasi selama periode RPJMD (Tahun 2026-2030)	persen	N/A	N/A	19,60		39,40		59,40		79,60		100,00		100,00	PD Pengampu Urusan Penanaman Modal
2.18.03	Program Promosi Penanaman Modal	Meningkatnya investor						15,00		81,84		101,90		108,56		119,84		
			Pertumbuhan investor	persen	47,45	22,46	13,62		12,39		11,38		10,53		9,82		9,82	PD Pengampu Urusan Penanaman Modal
2.18.04	Program Pelayanan Penanaman Modal	Meningkatnya kualitas layanan penanaman modal						709,87		795,47		814,48		829,85		842,81		
			Persentase penerbitan perizinan dan non perizinan berusaha yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota	persen	91,63	91,73	91,83		91,93		92,03		92,13		92,23		92,23	PD Pengampu Urusan Penanaman Modal
2.18.05	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Meningkatnya kualitas pengendalian penanaman modal						99,02		216,66		235,73		267,17		309,87		
			Persentase pelaku usaha yang melaporkan LKPM	persen	38,46	44,00	45,00		46,00		47,00		48,00		49,00		49,00	PD Pengampu Urusan Penanaman Modal
2.18.06	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Meningkatnya kualitas Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal						93,36		119,49		124,19		133,59		147,69		

KODE	TUJUAN / SASARAN / PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	OUTCOME	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN /SASARAN/PROGRAM)	SATUAN	BASELINE		KINERJA DAN USULAN PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD	PENANGGUNG JAWAB
					Th. 2024	Th. 2025	Th. 2026		Th. 2027		Th. 2028		Th. 2029		Th. 2030			
							Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Persentase pemanfaatan data dan informasi penanaman modal	persen	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	PD Pengampu Urusan Penanaman Modal
1.05.02	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum						4.972,18		5.201,34		5.431,41		6.530,82		5.631,41		
			Persentase penegakan perda	persen	90,87	91,00	92,00		93,00		94,00		95,00		95,00		95,00	PD Pengampu Urusan Trantibum
			Persentase penyelenggaraan Trantibum	persen	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	PD Pengampu Urusan Trantibum
8.01.02	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Meningkatnya pemahaman dan pelaksanaan ideologi pancasila dan wawasan kebangsaan						1.518,39		883,03		883,03		883,03		883,03		
			persentase masyarakat yang paham terhadap ideologi pancasila dan wawasan kebangsaan	persen	0,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	PD Pengampu Urusan Kesbangpol
8.01.03	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Meningkatnya kualitas peran partai politik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara						1.187,32		889,40		889,40		1.089,40		889,40		
			Persentase anggota partai politik dan siswa lembaga pendidikan di Kota Pekalongan yang meningkat pemahamannya atas etika dan budaya politik	persen	0,00	85,71	87,76		89,80		91,84		93,88		95,92		95,92	PD Pengampu Urusan Kesbangpol
8.01.04	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Meningkatnya peran organisasi kemasyarakatan dalam pembangunan						258,00		258,00		258,00		258,00		258,00		
			Persentase organisasi kemasyarakatan yang aktif	persen	93,30	93,30	93,30		93,30		93,30		93,30		93,30		93,30	PD Pengampu Urusan Kesbangpol
8.01.05	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Meningkatnya masyarakat yang memahami tentang ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya						98,20		101,48		101,48		101,48		101,48		
			Persentase masyarakat yang memahami tentang ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya	persen	NA	NA	90,43		91,30		92,17		93,04		93,91		93,91	PD Pengampu Urusan Kesbangpol
8.01.06	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi	Menurunnya konflik sosial						288,93		288,93		288,93		288,93		288,93		

KODE	TUJUAN / SASARAN / PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	OUTCOME	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN /SASARAN/PROGRAM)	SATUAN	BASELINE		KINERJA DAN USULAN PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD	PENANGGUNG JAWAB
					Th. 2024	Th. 2025	Th. 2026		Th. 2027		Th. 2028		Th. 2029		Th. 2030			
							Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Penanganan Konflik Sosial																	
			Persentase konflik sosial yang tertangani	kali	NA	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	PD Pengampu Urusan Kesbangpol
1.03.02	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda)	Terwujudnya sarpras pengendali banjir dan rob dalam kondisi baik						13.611,56		13.700,00		13.800,00		13.900,00		14.000,00		
			Persentase sarpras pengendali banjir dan rob dalam kondisi baik	persen	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	PD Pengampu Urusan PUPR
1.03.03	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Terwujudnya layanan infrastruktur jaringan perpipaan air minum yang memadai						1.324,11		1.200,00		1.200,00		1.200,00		1.200,00		
			Panjang infrastruktur jaringan perpipaan air minum	meter	529.615,90	534.438,90	535.938,90		537.438,90		538.938,90		540.438,90		541.938,90		541.938,90	PD Pengampu Urusan PUPR
1.03.04	Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	Tersedianya sarpras persampahan yang memadai						617,69		850,00		850,00		920,00		920,00		
			Persentase penambahan sarpras persampahan	persen	0,00	0,00	16.67		33.33		50.00		66.67		100,00		100,00	PD Pengampu Urusan PUPR
1.03.05	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Terwujudnya layanan infrastruktur sistem air limbah yang memadai						1.895,42		2.035,00		2.290,00		2.290,00		2.290,00		
			Persentase rumah yang terlayani Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S) di daerah Kabupaten/Kota	persen	88,21	88,50	88,66		88,71		88,76		88,81		88,86		88,86	PD Pengampu Urusan PUPR
1.03.06	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Tersedianya drainase dalam kondisi mantap						2.244,72		2.468,19		2.600,00		2.800,00		3.000,00		
			Persentase drainase dalam kondisi mantap	persen	69,48	39,96	40,94		41,92		42,91		43,89		44,87		44,87	PD Pengampu Urusan PUPR
1.03.08	Program Penataan Bangunan Gedung	Terwujudnya penataan bangunan gedung yang sesuai ketentuan						1.215,18		1.160,00		1.160,00		1.160,00		1.160,00		
			Persentase penerbitan persetujuan bangunan gedung yang memenuhi persyaratan teknis bangunan	persen	84,31	85,00	86,00		87,00		88,00		89,00		90,00		90,00	PD Pengampu Urusan PUPR
1.03.10	Program Penyelenggaraan Jalan	Terwujudnya layanan infrastruktur jalan yang memadai						45.816,49		35.140,71		43.894,09		33.854,19		15.990,00		
			Persentase peningkatan kemantapan jalan	persen	1,09	-5,48	0,30		0,30		0,30		0,30		0,30		0,30	PD Pengampu Urusan PUPR
1.03.11	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Meningkatnya kualitas jasa konstruksi						58,28		233,00		246,00		259,00		272,00		
			Persentase jasa konstruksi dengan kinerja baik	persen	100,00	98.67	98.67		98.57		98.57		98.46		98.46		98.46	PD Pengampu Urusan PUPR

KODE	TUJUAN / SASARAN / PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	OUTCOME	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN /SASARAN/PROGRAM)	SATUAN	BASELINE		KINERJA DAN USULAN PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD	PENANGGUNG JAWAB
					Th. 2024	Th. 2025	Th. 2026		Th. 2027		Th. 2028		Th. 2029		Th. 2030			
							Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1.03.12	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Meningkatnya kualitas kinerja penyelenggaraan penataan ruang						535,54		975,00		425,00		625,00		460,00		
			Nilai kinerja penyelenggaraan penataan ruang	Nilai	82,64	82,64	83,00		83,00		83,50		83,50		84,00		84,00	PD Pengampu Urusan PUPR
2.15.02	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Meningkatnya kualitas layanan transportasi jalan						19.208,49		18.734,11		19.475,11		18.986,11		19.116,11		
			Persentase kelengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal pada jalan kabupaten/kota (IUP)	persen	21,88	22,77	23,66		24,55		25,45		26,34		27,23		27,23	PD Pengampu Urusan Perhubungan
			Persentase perlintasan sebidang yang tertangani pada jalan kota	persen	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	PD Pengampu Urusan Perhubungan
			Persentase jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji (KBWU) yang melaksanakan uji berkala	persen	63,92	63,94	63,94		63,94		63,94		64,94		63,94		63,94	PD Pengampu Urusan Perhubungan
2.11.02	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan lingkungan hidup						0,00		0,00		100,00		200,00		0,00		
			Persentase penyusunan dokumen perencanaan lingkungan hidup	persen	0,00	0,00	0,00		0,00		100,00		100,00		0,00		100,00	PD Pengampu Urusan LH
2.11.03	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Meningkatnya kualitas air sungai yang memenuhi baku mutu						1.136,97		1.396,13		1.397,38		1.398,63		1.399,88		
			Persentase air sungai yang memenuhi baku mutu	persen	45,71	41,67	45,83		50,00		54,17		58,33		62,50		62,50	PD Pengampu Urusan LH
2.11.04	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Meningkatnya kualitas RTH Publik						4.794,59		4.711,35		4.711,35		4.711,35		4.711,35		
			Persentase penambahan luasan RTH publik	persen	0,11	0,09	0,05		0,05		0,05		0,05		0,05		0,23	PD Pengampu Urusan LH
2.11.05	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Terwujudnya pengendalian bahan berbahaya dan beracun (B3) sesuai ketentuan peraturan perundangan						1,64		4,50		5,00		5,00		55,00		
			Persentase usaha/ kegiatan yang mengelola limbah B3 sesuai ketentuan peraturan perundangan	persen	71,11	70,83	75,00		81,25		87,50		93,75		100,00		100,00	PD Pengampu Urusan LH
2.11.06	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Terwujudnya pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin PPLH						29,59		44,38		44,38		45,02		48,48		

KODE	TUJUAN / SASARAN / PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	OUTCOME	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN /SASARAN/PROGRAM)	SATUAN	BASELINE		KINERJA DAN USULAN PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD	PENANGGUNG JAWAB
					Th. 2024	Th. 2025	Th. 2026		Th. 2027		Th. 2028		Th. 2029		Th. 2030			
							Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Persentase ketercapaian kegiatan pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang Izin lingkungan dan izin PPLH diterbitkan	persen	NA	NA	19,53		19,53		20,31		20,31		20,31		20,31	PD Pengampu Urusan LH
2.11.08	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Meningkatnya pemberdayaan komunitas peduli lingkungan hidup						352,50		352,50		352,50		352,50		352,50		
			Persentase komunitas peduli LH yang aktif	persen	100,00	100,00	33.33		33.33		33.33		40,00		40,00		40,00	PD Pengampu Urusan LH
2.11.09	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap lingkungan hidup						44,35		44,35		44,35		44,35		44,35		
			Persentase sekolah yang memenuhi standar Adiwiyata	persen	5,07	5,99	6,91		7,83		8,76		9,68		10,60		10,60	PD Pengampu Urusan LH
2.11.10	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Terwujudnya layanan pengaduan lingkungan hidup sesuai ketentuan						10,63		10,63		11,31		11,69		11,69		
			Persentase pengaduan lingkungan hidup dari masyarakat yang ditindaklanjuti	persen	NA	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	PD Pengampu Urusan LH
2.11.11	Program Pengelolaan Persampahan	Meningkatnya kualitas pengelolaan sampah						19.943,41		10.890,45		11.500,00		12.096,00		12.700,00		
			Persentase pengelolaan sampah	persen	25,12	21,85	46,75		47,65		48,38		48,51		49,55		49,55	PD Pengampu Urusan LH
1.05.03	Program Penanggulangan Bencana	Meningkatnya kualitas layanan penanganan bencana						1.520,38		1.442,00		1.792,00		1.287,00		1.287,00		
			Persentase penanganan bencana pada pra bencana, saat bencana dan pasca bencana	persen	75,00	82,58	86,36		90,15		93,94		97,73		100,00		100,00	PD Pengampu Urusan Trantibum
4.01.03	Program Perekonomian dan Pembangunan	Meningkatnya kualitas koordinasi di bidang perekonomian dan pembangunan						894,16		1.176,98		1.217,48		1.261,32		1.302,32		
			Return on Aset (ROA) BUMD	persen	0,66	0,20	0,30		0,40		0,60		0,80		1,00		1,00	Sekretariat Daerah
			Total dana pihak ketiga pada bank milik Kabupaten/Kota per PDRB	persen	0,33	0,34	0,35		0,36		0,37		0,38		0,39		0,39	Sekretariat Daerah
			Total kredit pada bank milik Kabupaten/Kota per PDRB	persen	0,47	0,48	0,49		0,50		0,51		0,52		0,53		0,53	Sekretariat Daerah
			tingkat kematangan UKPBJ	level	3,00	3,00	3,00		3,00		3,00		3,00		4,00		4,00	Sekretariat Daerah
3.2.	Meningkatnya pertumbuhan PDRB sektor industri pengolahan, perdagangan jasa dan akomodasi		Pertumbuhan PDRB lapangan usaha perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor	persen	3,74	3,32	3,35		3,39		3,42		3,45		3,49		3,49	

KODE	TUJUAN / SASARAN / PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	OUTCOME	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN /SASARAN/PROGRAM)	SATUAN	BASELINE		KINERJA DAN USULAN PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD	PENANGGUNG JAWAB
					Th. 2024	Th. 2025	Th. 2026		Th. 2027		Th. 2028		Th. 2029		Th. 2030			
							Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
3.27.02	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Meningkatnya Nilai produksi peternakan						317,10		273,68		286,52		299,70		313,11		
			Nilai produksi pertanian pertahun	miliar rupiah	60,27	61,72	62,27		63,27		64,72		65,27		66,27		66,27	PD Pengampu Urusan Pertanian
			Nilai produksi peternakan pertahun	miliar rupiah	273,75	279,83	285,43		291,14		296,97		302,90		308,95		308,95	PD Pengampu Urusan Pertanian
3.27.03	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Meningkatnya kualitas prasarana pertanian dan peternakan						541,48		94,20		97,05		99,96		102,90		
			Persentase prasarana pertanian dan peternakan dalam kondisi baik	persen	59,46	62,16	64,86		67,57		70,27		72,97		75,68		75,68	PD Pengampu Urusan Pertanian
3.27.04	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Meningkatnya layanan penanganan kasus penyakit hewan menular						305,88		277,80		286,11		294,57		303,28		
			Persentase kasus penyakit hewan menular yang tertangani	persen	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	PD Pengampu Urusan Pertanian
3.27.05	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Terwujudnya pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian di daerah						12,00		12,40		12,80		13,20		13,60		
			Persentase pelaksanaan kegiatan pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian kabupaten/ kota	persen	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	PD Pengampu Urusan Pertanian
3.27.07	Program Penyuluhan Pertanian	Meningkatnya kapasitas, kemandirian, dan daya saing kelompok tani						31,00		32,00		32,90		33,90		34,90		
			Persentase kenaikan nilai kelompok tani per tahun	persen	0,00	50,00	50,00		52,00		52,00		55,00		55,00		55,00	PD Pengampu Urusan Pertanian
3.30.02	Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	Terwujudnya legalitas dan pendaftaran sektor perdagangan						3,00		12,50		15,13		18,40		22,20		
			Persentase gudang yang terdaftar	persen	0,00	54.55	59.09		63.64		68.18		72.73		77.27		77.27	PD Pengampu Urusan Perdagangan
3.30.03	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Meningkatnya kualitas sarana distribusi perdagangan						6.829,67		7.090,93		7.090,93		7.090,93		7.090,93		
			Persentase sarana perdagangan yang ditingkatkan kualitasnya	persen	75,00	16.67	25,00		33.33		33.33		50,00		58.33		58.33	PD Pengampu Urusan Perdagangan
			Persentase pembinaan terhadap pedagang kaki lima	persen	0,00	6.25	37.5		56.25		75,00		93.75		100,00		100,00	PD Pengampu Urusan Perdagangan
3.30.04	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan	Terwujudnya stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting						76,20		164,10		172,30		182,00		191,30		

KODE	TUJUAN / SASARAN / PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	OUTCOME	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN /SASARAN/PROGRAM)	SATUAN	BASELINE		KINERJA DAN USULAN PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD	PENANGGUNG JAWAB
					Th. 2024	Th. 2025	Th. 2026		Th. 2027		Th. 2028		Th. 2029		Th. 2030			
							Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Pokok dan Barang Penting																	
			Persentase ketersediaan informasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting terkini	persen	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	PD Pengampu Urusan Perdagangan
3.30.05	Program Pengembangan Ekspor	Meningkatnya Volume Ekspor						96,10		160,00		180,00		200,00		220,00		
			Persentase peningkatan volume ekspor	persen	3,33	0,95	1,42		2,33		2,39		2,44		2,49		2,49	PD Pengampu Urusan Perdagangan
3.30.06	Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	Meningkatnya perlindungan konsumen						219,83		334,94		367,06		402,32		441,04		
			Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	persen	87,20	87,20	87,20		87,20		87,20		87,20		87,20		87,20	PD Pengampu Urusan Perdagangan
3.30.07	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Meningkatnya penggunaan produk dalam negeri						2.281,43		1.315,00		1.431,50		1.549,65		1.669,62		
			Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran	persen	2,25	2,41	2,66		2,94		3,22		3,50		3,78		3,78	PD Pengampu Urusan Perdagangan
2.17.03	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Meningkatnya kualitas dan kesehatan koperasi						129,80		176,43		130,61		185,00		139,60		
			Persentase koperasi dengan predikat *sehat*	persen	57,42	50,00	50,54		51,08		51,60		52,11		52,60		52,60	PD Pengampu Urusan Koperasi, UKM
2.17.05	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Meningkatnya kualitas SDM koperasi						29,20		29,20		29,20		29,20		29,20		
			Persentase SDM koperasi yang memiliki kompetensi bidang perkoperasian	persen	8,06	6,87	6,79		6,72		6,65		6,58		6,51		6,51	PD Pengampu Urusan Koperasi, UKM
2.17.08	Program Pengembangan Umkm	Meningkatnya kualitas dan kuantitas UMKM						733,30		685,00		695,00		705,00		715,00		
			Persentase pengembangan UMKM dengan orientasi peningkatan skala usaha	persen	40,33	40,29	30,78		31,40		32,03		32,66		33,32		33,32	PD Pengampu Urusan Koperasi, UKM
3.25.03	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Meningkatnya produksi perikanan tangkap						3.026,58		3.664,95		3.715,42		3.763,59		3.830,55		
			Jumlah produksi perikanan tangkap	ton	12.151,22	9.610,21	9.893,24		9.992,18		10.092,10		10.193,02		12.226,34		12.226,34	PD Pengampu Urusan Kelautan dan Perikanan
3.25.04	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Meningkatnya produksi perikanan budidaya						256,21		345,00		345,00		345,00		345,00		
			Jumlah produksi perikanan budidaya	ton	521,82	521,00	526,21		531,47		536,79		542,15		547,58		547,58	PD Pengampu Urusan Kelautan dan Perikanan

KODE	TUJUAN / SASARAN / PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	OUTCOME	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN /SASARAN/PROGRAM)	SATUAN	BASELINE		KINERJA DAN USULAN PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD	PENANGGUNG JAWAB
					Th. 2024	Th. 2025	Th. 2026		Th. 2027		Th. 2028		Th. 2029		Th. 2030			
							Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
3.25.06	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Meningkatnya produksi pengolahan dan pemasaran hasil perikanan						301,53		450,60		450,60		450,60		450,60		
			Jumlah produksi pengolahan dan pemasaran hasil perikanan	ton	29.083,60	29.374,44	29.668,18		29.964,86		30.264,51		30.567,16		30.872,83		30.872,83	PD Pengampu Urusan Kelautan dan Perikanan
3.26.02	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD						2.976,63		3.940,00		3.840,00		3.940,00		3.940,00		
			Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	persen	12,23	11,15	11,61		11,76		11,77		11,78		11,69		11,69	PD Pengampu Urusan Pariwisata
3.26.03	Program Pemasaran Pariwisata	Meningkatnya kunjungan Wisatawan						442,24		365,00		365,00		365,00		365,00		
			Jumlah tamu wisatawan mancanegara	orang	N/A	300,00	300,00		300,00		300,00		300,00		300,00		1.500,00	PD Pengampu Urusan Pariwisata
3.26.04	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Terwujudnya perlindungan HAKI di sektor ekonomi kreatif						15,00		475,00		275,00		275,00		275,00		
			Persentase pendaftaran HAKI di sektor ekonomi kreatif	persen	0,06	0,06	0,08		0,11		0,13		0,15		0,17		0,17	PD Pengampu Urusan Pariwisata
3.26.05	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Meningkatnya kualitas SDM Pariwisata dan ekonomi kreatif						998,78		900,00		900,00		900,00		900,00		
			Persentase SDM pariwisata dan ekonomi kreatif yang dikembangkan kapasitasnya	persen	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	PD Pengampu Urusan Pariwisata
3.2.	Meningkatnya pertumbuhan PDRB sektor industri pengolahan, perdagangan jasa dan akomodasi	Pertumbuhan PDRB lapangan usaha industri pengolahan		persen	0,79	2,30	2,38		2,46		2,54		2,62		2,70		2,70	
2.09.03	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Meningkatnya kualitas ketahanan pangan masyarakat						337,68		321,88		331,53		341,47		351,71		
			Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	angka	92,12	92,62	93,12		93,62		94,12		94,62		95,12		95,12	PD Pengampu Urusan Pangan
2.09.04	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Terwujudnya kelurahan tahan pangan						22,50		23,18		23,87		24,59		47,24		
			Persentase kelurahan tahan pangan/sangat tahan pangan	persen	92,59	92,59	92,59		96,30		96,30		96,30		100,00		100,00	PD Pengampu Urusan Pangan
2.09.05	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Meningkatnya mutu keamanan pangan						21,50		22,25		22,91		33,60		3,36		
			Persentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi persyaratan dan mutu keamanan pangan	persen	98,53	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	PD Pengampu Urusan Pangan
3.31.02	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Meningkatnya investasi sektor industri						135,15		734,00		279,50		294,00		415,00		

KODE	TUJUAN / SASARAN / PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	OUTCOME	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN /SASARAN/PROGRAM)	SATUAN	BASELINE		KINERJA DAN USULAN PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD	PENANGGUNG JAWAB
					Th. 2024	Th. 2025	Th. 2026		Th. 2027		Th. 2028		Th. 2029		Th. 2030			
							Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Nilai investasi sektor industri	miliar rupiah	86,30	86,73	87,16		87,59		88,02		88,45		88,88		88,88	PD Pengampu Urusan Perindustrian
3.31.04	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Meningkatnya kualitas penyediaan data industri						37,73		132,00		144,00		156,00		168,00		
			Peningkatan jumlah industri yang terdata dalam SIINAS	industri	166,00	186,00	206,00		226,00		246,00		266,00		286,00		286,00	PD Pengampu Urusan Perindustrian
3.2.	Meningkatnya pertumbuhan PDRB sektor industri pengolahan, perdagangan jasa dan akomodasi		Pertumbuhan PDRB sektor penyediaan akomodasi dan makan minum	persen	9,26	9,89	10,00		11,00		11,50		12,00		13,00		13,00	
2.22.02	Program Pengembangan Kebudayaan	Terwujudnya pengembangan kebudayaan dan seni						1.511,99		1.650,00		1.750,00		1.850,00		2.050,00		
			Persentase event kesenian dan kebudayaan yang disiapkan	persen	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	PD Pengampu Urusan Kebudayaan
2.22.03	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Terwujudnya pengembangan seni tradisional						130,55		200,00		200,00		200,00		200,00		
			Persentase kesenian tradisional yang dilestarikan	persen	83,33	91,67	91,67		91,67		91,67		91,67		100,00		100,00	PD Pengampu Urusan Kebudayaan
2.22.04	Program Pembinaan Sejarah	Terwujudnya pembinaan pelestarian sejarah						20,00		50,00		50,00		50,00		50,00		
			Persentase pembinaan pelestarian sejarah menuju perkembangan obyek wisata budaya	persen	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	PD Pengampu Urusan Kebudayaan
2.22.05	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Terwujudnya pelestarian dan pengelolaan Cagar Budaya						20,00		50,00		50,00		50,00		50,00		
			Persentase Cagar Budaya (CB) yang dilestarikan	persen	15,00	19,00	23,00		25,00		27,00		29,00		31,00		31,00	PD Pengampu Urusan Kebudayaan
2.22.06	Program Pengelolaan Permuseuman	Meningkatnya kualitas pengelolaan museum batik						1.584,02		2.250,00		2.250,00		2.250,00		2.250,00		
			Persentase peningkatan jumlah pengunjung museum batik	persen	N/A	5,00	5,00		5,00		5,00		5,00		5,00		5,00	PD Pengampu Urusan Kebudayaan
4.	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat		Tingkat Kemiskinan (IUP)	persen	6,71	6,27 - 6,70	5,96 - 6,59		5,65 - 6,49		5,33 - 6,38		5,02 - 6,27		4,71 - 6,16		4,71 - 6,16	
4.1.	Menurunnya populasi PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial)		Persentase populasi PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial)	persen	7,52	7,50	7,38		7,27		7,16		7,04		6,92		6,92	
1.06.02	Program Pemberdayaan Sosial	Meningkatnya kualitas pemberdayaan sosial						186,90		354,09		379,02		406,10		435,47		
			Persentase lembaga potensi sumber kesejahteraan sosial (PSKS) yang diberdayakan	persen	NA	74,67	74,67		80,00		85,33		90,67		94,67		94,67	PD Pengampu Urusan Sosial

KODE	TUJUAN / SASARAN / PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	OUTCOME	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN /SASARAN/PROGRAM)	SATUAN	BASELINE		KINERJA DAN USULAN PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD	PENANGGUNG JAWAB
					Th. 2024	Th. 2025	Th. 2026		Th. 2027		Th. 2028		Th. 2029		Th. 2030			
							Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1.06.04	Program Rehabilitasi Sosial	Meningkatnya kualitas rehabilitasi sosial						1.696,99		1.728,39		1.886,42		1.959,12		2.048,05		
			Persentase PPKS penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan tuna sosial (gelandangan dan pengemis) yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (SPM)	persen	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	PD Pengampu Urusan Sosial
1.06.05	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Meningkatnya kualitas perlindungan dan jaminan sosial bagi keluarga miskin						1.318,78		1.457,62		1.508,08		1.604,53		1.752,21		
			Persentase keluarga miskin berhak mendapat intervensi sosial yang mendapat intervensi sosial	keluarga	35,20	51,83	51,83		51,83		51,83		51,83		51,83		51,83	PD Pengampu Urusan Sosial
1.06.06	Program Penanganan Bencana	Meningkatnya kualitas perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan pasca bencana bagi korban bencana kabupaten/kota						310,54		379,62		429,62		479,62		529,62		
			Persentase perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan pasca bencana bagi korban bencana Kabupaten/Kota (SPM)	persen	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	PD Pengampu Urusan Sosial
1.06.07	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Meningkatnya kualitas Taman Makam Pahlawan						57,36		253,39		270,91		289,84		310,32		
			Persentase pemeliharaan taman makam pahlawan	persen	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	PD Pengampu Urusan Sosial
2.14.02	Program Pengendalian Penduduk	Terwujudnya pengendalian penduduk						201,08		237,90		243,90		250,40		257,40		
			Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR) (IKK)	persen	64,41	64,48	64,55		64,62		64,69		64,76		64,83		64,83	PD Pengampu Urusan KB
2.14.03	Program Pembinaan Keluarga Berencana (Kb)	Meningkatnya kualitas pembinaan keluarga berencana bagi pasangan usia subur						1.704,30		1.767,32		1.793,98		1.822,50		1.853,03		
			Persentase kebutuhan ber -KB yang tidak terpenuhi (unmeetneed KB) (IKK)	persen	8,48	9,50	9,25		9,00		8,75		8,50		8,40		8,40	PD Pengampu Urusan KB
2.14.04	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Menurunnya angka kelahiran pada remaja usia 15-19 tahun						1.597,16		1.656,80		1.676,80		1.696,80		1.716,80		
			Persentase angka kelahiran pada remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	angka	9,50	8,30	7,40		6,60		5,90		5,30		4,90		4,90	PD Pengampu Urusan KB

KODE	TUJUAN / SASARAN / PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	OUTCOME	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN /SASARAN/PROGRAM)	SATUAN	BASELINE		KINERJA DAN USULAN PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD	PENANGGUNG JAWAB
					Th. 2024	Th. 2025	Th. 2026		Th. 2027		Th. 2028		Th. 2029		Th. 2030			
							Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
4.2.	Menurunnya angka pengangguran		Tingkat Pengangguran Terbuka (IUP)	persen	4,91	5,05 - 4,47	5,01 - 4,35		4,98 - 4,24		4,94 - 4,12		4,90 - 4,00		4,86 - 3,88		4,86 - 3,88	
2.07.03	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Meningkatnya produktivitas tenaga kerja						4.493,49		4.684,42		4.684,84		4.735,27		4.735,70		
			Tingkat produktivitas tenaga kerja	Rp. Juta per orang	49,89	51,75	51,94		52,11		52,28		52,44		52,59		52,59	PD Pengampu Urusan Tenaga Kerja
2.07.04	Program Penempatan Tenaga Kerja	Meningkatnya kualitas penempatan tenaga kerja						173,43		195,84		200,74		205,75		210,81		
			Persentase tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja dalam wilayah Kabupaten/Kota (IKK Outcome)	persen	33,00	33,50	34,00		34,50		35,00		35,50		36,00		36,00	PD Pengampu Urusan Tenaga Kerja
2.07.05	Program Hubungan Industrial	Meningkatnya kualitas hubungan industrial						480,24		608,63		648,06		690,15		735,30		
			Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan) (IKK Outcome)	persen	11,59	12,20	12,80		13,21		13,62		14,02		14,43		14,43	PD Pengampu Urusan Tenaga Kerja
4.3.	Optimalnya pengarusutamaan gender		Indeks Ketimpangan Gender (IKG) (IUP)	angka	0,18	0,185 - 0,176	0,183 - 0,167		0,182 - 0,158		0,181 - 0,149		0,180 - 0,140		0,179 - 0,131		0,179 - 0,131	
2.08.02	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Meningkatnya partisipasi lembaga kemasyarakatan kelurahan dalam pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan						89,36		113,62		123,55		133,49		143,43		
			Persentase lembaga kemasyarakatan kelurahan yang teradvokasi	persen	N/A	N/A	14,29		28,57		42,86		57,14		71,43		71,43	PD Pengampu Urusan PPA
2.08.03	Program Perlindungan Perempuan	Menurunnya kekerasan terhadap perempuan						93,22		102,35		111,65		120,95		130,26		
			Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	Rasio per 100.000	18,46	18,46	18,46		18,46		18,46		18,46		18,46		18,46	PD Pengampu Urusan PPA
2.08.04	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Terwujudnya keluarga yang berkualitas						23,90		32,94		35,21		37,47		39,73		
			Persentase layanan permasalahan keluarga yang terlayani	persen	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	PD Pengampu Urusan PPA
4.3.	Optimalnya pengarusutamaan gender		Kategori Kota Layak Anak	Kategori	Nindya	Nindya	Nindya		Nindya		Nindya		Nindya		Nindya		Nindya	
2.08.06	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Meningkatnya pemenuhan hak anak						176,53		220,48		240,52		260,56		280,88		
			Skor kota layak anak	skor	769,80	769,90	769,90		770,00		770,1		770,20		770,30		770,30	PD Pengampu Urusan PPA

KODE	TUJUAN / SASARAN / PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	OUTCOME	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN /SASARAN/PROGRAM)	SATUAN	BASELINE		KINERJA DAN USULAN PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD	PENANGGUNG JAWAB
					Th. 2024	Th. 2025	Th. 2026		Th. 2027		Th. 2028		Th. 2029		Th. 2030			
							Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2.08.07	Program Perlindungan Khusus Anak	Meningkatnya kualitas layanan perlindungan khusus anak						72,54		79,80		87,05		94,31		101,56		
			Persentase pengaduan kasus anak yang terlayani	persen	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	PD Pengampu Urusan PPA

Sumber : Bapperida Kota Pekalongan, 2025

3.2.6. Dukungan Program Delegasi

Dalam upaya menjaga sinergi dan sinkronisasi pembangunan daerah di Kota Pekalongan dengan arah kebijakan Provinsi Jawa Tengah, maka Pemerintah Kota Pekalongan juga memberikan dukungan terhadap keberhasilan pelaksanaan pembangunan Provinsi Jawa Tengah khususnya pada program-program delegasi yang dimandatkan kepada Kabupaten/Kota di Jawa Tengah. Secara lengkap dukungan terhadap program delegasi dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel III-7
Dukungan terhadap Program Delegasi Provinsi Jawa Tengah kepada Kabupaten/Kota di Kota Pekalongan Tahun 2025-2030

NO	PROGRAM DELEGASI KE KABUPATEN/KOTA	SHARING KOTA	PERANGKAT DAERAH (PD) PELAKSANA
1	Pembentukan Kecamatan Berdaya (Pemberdayaan ekonomi bagi disabilitas, perempuan, pelaku ekonomi kreatif dan sport center) aset dari pemerintah kab/kota	1. Fasilitasi pelatihan pemberdayaan ekonomi bagi perempuan (produk olahan ikan, tata rias, menjahit, dll) 2. Pelatihan bagi disabilitas (produk olahan ikan, olahan pangan, tata rias, menjahit, pijat, dll) 3. Pelatihan bagi pelaku ekonomi kreatif (<i>digital marketing</i>, <i>packaging</i>, foto produk, dll) 4. Pelatihan bersumber dari Dana Kelurahan (setir mobil, tata boga, komputer, dll)	PD Pengampu Urusan Koperasi, UKM, PD Pengampu Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Anak, PD Pengampu Urusan Tenaga Kerja, PD Urusan Kelautan dan Perikanan, PD Pengampu Urusan Pangan, Kelurahan
2	Pembangunan Infrastruktur melalui Permukiman Layak Huni melalui 1 KK 1 rumah layak huni, Pengembangan Pusat Rekreasi dan Promosi Pembangunan, dan Gelanggang Olah Raga Internasional → Pembangunan RTLH 30 persen menjadi kewenangan Kabupaten/kota, dan 20 persen desa	1. Program pugar RTLH 2. Program penanganan kawasan permukiman kumuh 3. Program pengembangan destinasi pariwisata 4. Operasionalisasi pusat Badan Promosi Pariwisata Kota Pekalongan (BP2KP) 5. Pembangunan kolam renang berstandar nasional	PD Pengampu Urusan Perumahan Rakyat dan Permukiman, PD Pengampu Urusan Pariwisata, PD Pengampu Urusan Kepemudaan dan Olahraga
3	Pelatihan dan Pendidikan Anti Korupsi berbasis ISO 37001 untuk ASN dan Penyelenggara Pemerintah Desa bekerjasama dengan Aparat Penegak Hukum, OMBUDSMAN,	Program pengembangan sumber daya manusia	PD Pengampu Urusan Pendidikan dan Pelatihan

NO	PROGRAM DELEGASI KE KABUPATEN/KOTA	SHARING KOTA	PERANGKAT DAERAH (PD) PELAKSANA
	Kepolisian, Kejaksanaan, BPK & KPK		
4	Pelayanan kesehatan keliling, Puskesmas pembantu dan Pelayanan kesehatan di setiap desa	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	PD Pengampu Urusan Kesehatan
5	Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Tambak Ikan Nila	Program pengelolaan perikanan budidaya	PD Pengampu Urusan Kelautan dan Perikanan
6	Sekolah unggulan perkecamatan	Program pengembangan SD dan SMP unggulan	PD Pengampu Urusan Pendidikan
7	Mendorong pembentukan Rumah Perlindungan Anak, Perempuan dan disabilitas di setiap Kecamatan	Program rumah aman untuk anak dan perempuan korban bullying	PD Pengampu Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Anak
8	Membangun 1.000 desa/Kampung wisata baru	Program pengembangan destinasi pariwisata	PD Pengampu Urusan Pariwisata
9	BUMDES Berdaya (Kepastian Hukum dan Bantuan Modal Usaha setiap Bumdes di Jateng)	-	
10	Penguatan BPBD dan Tagana dalam Penanganan Bencana berbasis Kelompok Masyarakat	Pengembangan kelurahan tangguh bencana	PD Pengampu Urusan Trantibum
11	Cek Kesehatan Gratis	Program pemeriksaan kesehatan gratis	PD Pengampu Urusan Kesehatan
12	Mendorong penyediaan 1 Dokter, 1 Bidan setiap Puskesmas Pembantu.	Kegiatan Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	PD Pengampu Urusan Kesehatan
13	Melahirkan Pemerintahan yang Good Clear Government dan Collaborative Governance melalui peningkatan kesejahteraan, Profesionalitas dan kualitas ASN dan Perangkat Desa.	1. Implementasi pemberian TPP berbasis kinerja 2. Bimbingan teknis /pelatihan pengembangan kompetensi	PD Pengampu Urusan Kepegawaian, PD Pengampu Urusan Pendidikan dan Pelatihan
14	Memberikan bantuan hukum bagi guru, disabilitas, perempuan dan anak	1. Fasilitasi Bantuan Hukum bagi guru ASN 2. Program rumah aman untuk anak dan perempuan	PD Pengampu Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Anak

NO	PROGRAM DELEGASI KE KABUPATEN/KOTA	SHARING KOTA	PERANGKAT DAERAH (PD) PELAKSANA
		(termasuk disabilitas) korban bullying	
15	Mengembangkan 10 Titik Aglomerasi menjadi Episentrum Pertumbuhan Ekonomi Baru	Pengembangan destinasi wisata belanja	PD Pengampu Urusan Pariwisata, PD Pengampu Urusan Kelautan dan Perikanan, PD Pengampu Urusan Perhubungan, PD Pengampu Urusan Perindustrian
16	Pelindungan dan pemberdayaan anak terlantar dan fakir miskin	Program Rumah Perlindungan Sosial Berbasis Masyarakat (RPSBM)	PD Pengampu Urusan Sosial
17	Melahirkan ekosistem ekonomi syariah melalui penguatan regulasi dan pengembangan wisata ramah muslim	Program pengembangan destinasi pariwisata, bentuk dukungan kegiatan di antaranya melalui pelatihan <i>tour guide</i> , pelatihan bagi pramuwisata sopan dan profesional, festival masyarakat ekonomi syariah (<i>talkshow</i> pengembangan pariwisata ramah muslim, pembekalan jelajah QRIS, dll)	PD Pengampu Urusan Pariwisata
18	Pendampingan Sertifikasi Halal, HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual) dan P-IRT (Pangan Industri Rumah Tangga) secara Gratis	1. Fasilitasi pendampingan pembuatan sertifikasi halal 2. Fasilitasi HAKI untuk pelaku ekraf 3. Fasilitasi HAKI hasil riset dan inovasi 4. Fasilitasi P-IRT	PD Pengampu Urusan Koperasi, UKM, PD Pengampu Urusan Pariwisata, PD Pengampu Urusan Penelitian dan Pengembangan, PD Pengampu Urusan Kesehatan
19	Meningkatkan pelatihan untuk sertifikasi juru sembelih halal dan standar rumah pemotongan hewan	Pelatihan dan sertifikasi juru sembelih halal dan standar rumah pemotongan hewan	PD Pengampu Urusan Pertanian
20	Desa maju dan berdaya melalui pembangunan lumbung kesejahteraan, produk unggulan go internasional, Sistem Informasi Desa (SID), dan Tim Tanggap Bencana.	-	-
21	Peningkatan desa mandiri energi melalui Pengembangan bio gas, hydro, maupun tenaga surya	Pengembangan kelurahan mandiri energi (kelurahan sokoduwet)	Kelurahan
22	Pelatihan pengolahan dan manajemen keuangan bagi	Pembinaan Himpunan Wanita Nelayan	PD Pengampu Urusan Kelautan dan Perikanan

NO	PROGRAM DELEGASI KE KABUPATEN/KOTA	SHARING KOTA	PERANGKAT DAERAH (PD) PELAKSANA
	perempuan pesisir dan petani Perempuan		
23	Pelatihan 1000 konten kreator desa wisata	Program pengembangan destinasi pariwisata	PD Pengampu Urusan Pariwisata
24	Subsidi Modal dan Pendampingan UMKM 1RT 1 Kelompok UMKM	Fasilitasi program KUR	Pengampu Urusan Perekonomian pada Sekretariat Daerah
25	Hilirisasi Produk Unggulan dengan semangat Ekonomi Hijau	Program Project Green Batik Pekalongan	
26	Mendorong pemenuhan kebutuhan Ruang Terbuka Hijau (RTH) baik di Kawasan Perkotaan maupun Wilayah Desa	1. Pengendalian pemanfaatan ruang sesuai dengan perda RTRW 2. Evaluasi RTRW 2009-2029 3. Program pengelolaan keanekaragaman hayati	PD Pengampu Urusan Pekerjaan Umum, PD Pengampu Urusan Penanaman Modal, PD Pengampu Urusan Lingkungan Hidup
27	Moderasi Beragama dan wawasan kebangsaan melalui penguatan regulasi, pendidikan dan pelatihan	Program penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan (Forum kewaspadaan dini, pembinaan FKUB)	PD Pengampu Urusan Kesbangpol
28	Mendorong Penguatan forum kerukunan antar umat beragama dan forum pembauran Kebangsaan	Program penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan (Forum kewaspadaan dini, pembinaan FKUB)	PD Pengampu Urusan Kesbangpol
29	Peningkatan operasional kader Posyandu	1. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan operasional posyandu 2. Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Bantuan Transport Kader)	Semua Kelurahan PD Pengampu Urusan Kesehatan
30	Peningkatan kualitas hidup lansia	Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut)	PD Pengampu Urusan Kesehatan
31	Taruna karya mandiri melalui program kartu milenial untuk membuka lapangan kerja	1. Menambah ruang kreatif dan seni budaya (Program Unggulan) 2. Penyediaan akses internet gratis	PD Pengampu Urusan Pariwisata, PD Pengampu Urusan Komunikasi dan Informatika
32	Penguatan dan pemberdayaan koperasi untuk pengembangan perekonomian desa	Program pendidikan dan latihan perkoperasian (Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi)	PD Pengampu Urusan Koperasi, UKM

NO	PROGRAM DELEGASI KE KABUPATEN/KOTA	SHARING KOTA	PERANGKAT DAERAH (PD) PELAKSANA
33	Meningkatkan Kesejahteraan Atlet, Pelatih, dan Manajemen Olahraga	Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota	PD Pengampu Urusan Kepemudaan dan Olahraga
34	Pengembangan Sekolah Inklusif di setiap Kecamatan	Akses pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus(Program Unggulan)	PD Pengampu Urusan Pendidikan
35	Monitoring dan sistem peringatan dini bencana berbasis teknologi seluruh wilayah rawan bencana.	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten kota	PD Pengampu Urusan Trantibum

Sumber : Bapperida Kota Pekalongan, 2025

BAB IV PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

4.1. PROGRAM PERANGKAT DAERAH

Indikasi rencana program dalam RPJM Daerah Tahun 2025-2029 merupakan rencana program pembangunan daerah yang menunjang pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Program Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah.

Program Perangkat Daerah untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah terbagi ke dalam 6 (enam) urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, 18 (delapan belas) urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, 5 (lima) urusan pilihan, 2 (dua) unsur pendukung urusan pemerintahan, 5 (lima) unsur penunjang urusan pemerintahan, 1 (satu) unsur pengawasan urusan pemerintahan, 1 (satu) unsur kewilayahan, 1 (satu) unsur pemerintahan umum, dan Non Urusan.

4.1.1. Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

4.1.1.1. Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Program Pengelolaan Pendidikan

Fokus program adalah pengelolaan pendidikan anak usia dini (PAUD); pengelolaan pendidikan Sekolah Dasar; pengelolaan pendidikan Sekolah Menengah Pertama; pengelolaan pendidikan nonformal/kesetaraan. Indikator yang akan dicapai pada tahun 2030 yaitu Angka Partisipasi Sekolah (APS) 5-6 sebesar 100 persen; Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7-12 sebesar 99,80 Persen; Angka Partisipasi Sekolah (APS) 13-15 sebesar 97,72 persen; Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7-18 (kesetaraan) sebesar 55,83 persen.

Program ini mendukung program unggulan kepala daerah yaitu Bantuan peralatan sekolah bagi anak yatim dan keluarga rentan. Selain itu program ini juga mendukung program delegasi dari Provinsi ke Kabupaten/Kota yang berupa sekolah unggulan perkecamatan dan program pengembangan sekolah Inklusif di setiap Kecamatan.

2. Program Pengembangan Kurikulum

Fokus program adalah penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan dasar; penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal. Indikator yang akan dicapai pada tahun 2030 yaitu persentase satuan PAUD yang mengembangkan program kurikulum muatan lokal kebencanaan berbasis karakter dan keagamaan sebesar 100 persen; persentase satuan pendidikan SD yang

mengembangkan program kurikulum muatan lokal kebencanaan berbasis karakter dan keagamaan sebesar 100 persen; persentase satuan pendidikan SMP yang mengembangkan program kurikulum muatan lokal kebencanaan berbasis karakter dan keagamaan sebesar 100 persen; persentase satuan pendidikan kesetaraan yang mengembangkan program kurikulum muatan lokal kebencanaan berbasis karakter dan keagamaan sebesar 100 persen.

3. Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan

Fokus program adalah pemerataan kuantitas dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan bagi satuan pendidikan dasar, PAUD, dan pendidikan nonformal / kesetaraan. Indikator yang akan dicapai pada tahun 2030 yaitu persentase pendidik berkualifikasi pendidikan minimal S1 dan bersertifikasi profesi di satuan pendidikan TK, SD dan SMP Negeri sebesar 90,26 persen.

Program ini mendukung program unggulan kepala daerah yaitu Beasiswa studi lanjut bagi guru sekolah dan madrasah.

4.1.1.2. Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat

Fokus program adalah penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan untuk UKM dan UKP kewenangan daerah Kabupaten/Kota; penyediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP rujukan tingkat daerah Kabupaten/Kota; penyelenggaraan sistem informasi kesehatan secara terintegrasi; penerbitan izin Rumah Sakit kelas C, D dan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat daerah Kabupaten/Kota. Indikator yang akan dicapai pada tahun 2030 yaitu persentase ketersediaan sarana, prasarana dan alat kesehatan yang sesuai standar sebesar 80,00 persen; cakupan penerima pemeriksaan kesehatan gratis sebesar 80,00 persen, persentase fasilitas kesehatan yang terintegrasi dalam sistem informasi kesehatan nasional sebesar 72,00 persen; jumlah Kasus Kematian Ibu 4 kasus; Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional sebesar 99,00 persen; jumlah kasus kematian balita 52 kasus; persentase desa/kelurahan sanitasi total berbasis masyarakat sebesar 40,74 persen; angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (*treatment success rate*) sebesar 91,60 persen; persentase fasyankes yang diberikan rekomendasi tepat waktu sebesar 100 persen; *prevalensi wasting* balita sebesar 6,93 persen; persentase ketersediaan sarana, prasarana dan alat kesehatan di RSUD yang sesuai standar sebesar 89 persen; cakupan penerima pemeriksaan kesehatan gratis sebesar 80,00 persen.

Program ini mendukung program unggulan kepala daerah yaitu Jaminan Kesehatan bagi penduduk Kota Pekalongan (berobat cukup bawa KTP) dan peningkatan bantuan operasional posyandu. Selain itu program ini juga mendukung program delegasi dari Provinsi ke Kabupaten/Kota yang berupa Pelayanan kesehatan keliling, Puskesmas pembantu dan Pelayanan kesehatan di setiap desa, dan program Cek Kesehatan Gratis dan program peningkatan operasional kader Posyandu, serta program peningkatan kualitas hidup lansia.

2. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan

Fokus program adalah perencanaan kebutuhan dan pendayagunaan sumber daya manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di wilayah Kabupaten/Kota; pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi teknis sumber daya manusia kesehatan tingkat

daerah Kabupaten/Kota. Indikator yang akan dicapai pada tahun 2030 yaitu rasio tenaga kesehatan dan tenaga medis terhadap populasi sebesar 5,04 persen; persentase tenaga kesehatan (perawat) di area kritis (IBS, ICU/PICU/NICU, Dialisis) RSUD Bendan yang memiliki kompetensi yang dipersyaratkan sebesar 100 persen.

Program ini juga untuk mendukung program delegasi dari Provinsi ke Kabupaten/Kota yang berupa Mendorong penyediaan 1 Dokter, 1 Bidan setiap Puskesmas Pembantu.

3. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman

Fokus program adalah pemberian izin apotek, toko obat, toko alat kesehatan dan optikal, usaha mikro obat tradisional (UMOT); penerbitan sertifikat produksi pangan industri rumah tangga dan nomor P-IRT sebagai izin produksi, untuk produk makanan minuman tertentu yang dapat diproduksi oleh industri rumah tangga; penerbitan sertifikat laik higiene sanitasi tempat pengelolaan makanan (TPM) antara lain jasa boga, rumah makan/restoran dan depot air minum (DAM). Indikator yang akan dicapai pada tahun 2030 yaitu persentase rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan dari lintas sektor yang ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah sebesar 86,67 persen; persentase pangan industri rumah tangga aman dan bermutu sebesar 80,00 persen; persentase tempat pengelolaan pangan (TPP) yang memenuhi syarat sebesar 70,00 persen.

4. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan

Fokus program adalah advokasi, pemberdayaan, kemitraan, peningkatan peran serta masyarakat dan lintas sektor tingkat daerah Kabupaten/Kota; pelaksanaan sehat dalam rangka promotif preventif tingkat daerah Kabupaten/Kota. Indikator yang akan dicapai pada tahun 2030 yaitu persentase rumah tangga sehat sebesar 97,70 persen.

4.1.1.3. Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)

Fokus program adalah pengelolaan SDA dan bangunan pengaman pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) daerah Kabupaten/Kota; pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang luasnya di bawah 1000 Ha dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota. Indikator yang akan dicapai pada tahun 2030 yaitu persentase sarpras pengendali banjir dan rob dalam kondisi baik sebesar 100 persen.

2. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum

Fokus program adalah pengelolaan dan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di daerah Kabupaten/Kota, meliputi: penyediaan alternatif sumber air baku permukaan (sungai/embung maupun air laut dengan teknologi desalinasi), jaringan distribusi, hingga titik pelayanan (Sambungan Rumah/SR). Indikator yang akan dicapai pada tahun 2030 yaitu Panjang Infrastruktur Jaringan perpipaan air minum sebesar 541.938,90 meter.

3. Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional

Fokus program adalah pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan di daerah Kabupaten/Kota. Indikator yang akan dicapai pada tahun 2030 yaitu persentase penambahan sarpras persampahan sebesar 100 persen.

4. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah

Fokus program adalah pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik dalam daerah Kabupaten/Kota. Indikator yang akan dicapai pada tahun 2030 yaitu persentase rumah yang terlayani Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S) di daerah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan sebesar 88,86 persen.

5. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase

Fokus program adalah pengelolaan dan pengembangan sistem drainase yang terhubung langsung dengan sungai dalam daerah Kabupaten/Kota. Indikator yang akan dicapai pada tahun 2030 yaitu persentase drainase dalam kondisi mantap sebesar 44,87 persen.

6. Program Penataan Bangunan Gedung

Fokus program adalah penyelenggaraan bangunan gedung di wilayah daerah Kabupaten/Kota, pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan sertifikat laik fungsi bangunan gedung. Indikator yang akan dicapai pada tahun 2030 yaitu persentase penerbitan persetujuan bangunan gedung yang memenuhi persyaratan teknis bangunan sebesar 90 persen.

7. Program Penyelenggaraan Jalan

Fokus program adalah penyelenggaraan pelatihan tenaga terampil konstruksi; penyelenggaraan sistem informasi jasa konstruksi cakupan daerah Kabupaten/Kota. Indikator yang akan dicapai pada tahun 2030 yaitu persentase jasa konstruksi dengan kinerja baik sebesar 98,46 persen.

8. Program Pengembangan Jasa Konstruksi

Fokus program adalah penyelenggaraan pelatihan tenaga terampil konstruksi; penyelenggaraan sistem informasi jasa konstruksi cakupan daerah Kabupaten/Kota. Indikator yang akan dicapai pada tahun 2030 yaitu persentase pembinaan jasa konstruksi dengan kinerja baik sebesar 100 persen.

9. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang

Fokus program adalah penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota; koordinasi dan sinkronisasi perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota; koordinasi dan sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota; koordinasi dan sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota; koordinasi penyelenggaraan penataan ruang. Indikator yang akan dicapai pada tahun 2030 yaitu nilai kinerja penyelenggaraan penataan ruang sebesar 84 persen. Program ini juga untuk mendukung program delegasi dari Provinsi ke Kabupaten/Kota yang berupa mendorong pemenuhan kebutuhan Ruang Terbuka Hijau (RTH) baik di kawasan perkotaan maupun wilayah desa.

4.1.1.4. Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Program Pengembangan Perumahan

Fokus program adalah pendataan penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program Kabupaten/Kota; sosialisasi dan persiapan penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program Kabupaten/Kota; pembangunan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program Kabupaten/Kota; pembinaan pengelolaan rumah susun umum dan/atau rumah khusus. Indikator yang akan dicapai pada tahun 2030 yaitu persentase ketersediaan rumah layak

huni di kawasan rawan bencana sebesar 75,89 persen. Program ini mendukung program unggulan kepala daerah yaitu bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) korban rob dan korban kebakaran/bencana.

2. Program Kawasan Permukiman

Fokus program adalah penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) Ha; peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) Ha. Indikator yang akan dicapai pada tahun 2030 luas kawasan permukiman kumuh yang ditangani sebesar 10 hektar. Selain itu program ini juga untuk mendukung program delegasi dari provinsi ke kabupaten/kota yang berupa pembangunan infrastruktur melalui permukiman layak huni melalui 1 KK 1 rumah layak huni.

3. Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh

Fokus program adalah pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota. Indikator yang akan dicapai pada tahun 2030 yaitu rumah tangga dengan akses hunian layak (IUP) sebesar 91,25 persen. Selain itu program ini juga untuk mendukung program delegasi dari provinsi ke kabupaten/kota yang berupa pembangunan infrastruktur melalui permukiman layak huni melalui 1 KK 1 rumah layak huni.

4. Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)

Fokus program adalah urusan penyelenggaraan PSU Perumahan. Indikator yang akan dicapai pada tahun 2030 yaitu jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum) (IKK Outcome) sebesar 63,04 persen.

4.1.1.5. Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum

Fokus program adalah penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota; penegakan peraturan daerah Kabupaten/Kota dan peraturan Bupati/Wali Kota; pembinaan penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota. Indikator yang akan dicapai pada tahun 2030 yaitu persentase penegakan perda sebesar 95 persen; persentase penyelenggaraan trantibum sebesar 100 persen.

2. Program Penanggulangan Bencana

Fokus program adalah pelayanan informasi rawan bencana Kabupaten/Kota, pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana, dan penataan sistem dasar penanggulangan bencana. Indikator yang akan dicapai pada tahun 2030 yaitu persentase penanganan bencana pada pra bencana, saat bencana dan pasca bencana sebesar 100 persen.

3. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran

Fokus program adalah pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan, dan Penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam daerah Kabupaten/Kota; inspeksi peralatan proteksi kebakaran; pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran; penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan terhadap kondisi

membahayakan manusia. Indikator yang akan dicapai pada tahun 2030 yaitu persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran (SPM/IKK Outcome) sebesar 100 persen.

4.1.1.6. Urusan Pemerintahan Bidang Sosial

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Program Pemberdayaan Sosial

Fokus program adalah pengembangan potensi sumber kesejahteraan sosial daerah Kabupaten/Kota. Indikator yang akan dicapai pada tahun 2030 yaitu persentase lembaga Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang diberdayakan sebesar 94,67 persen.

2. Program Rehabilitasi Sosial

Fokus program adalah rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis di luar panti sosial; rehabilitasi sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA di luar panti sosial. Indikator yang akan dicapai pada tahun 2030 yaitu persentase PPKS penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan tuna sosial (gelandangan dan pengemis) yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (SPM) sebesar 100 persen.

3. Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial

Fokus program adalah pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah Kabupaten/Kota. Indikator yang akan dicapai yaitu persentase keluarga miskin berhak mendapat intervensi sosial yang mendapat intervensi sosial sebesar 51,83 persen.

4. Program Penanganan Bencana

Fokus program adalah perlindungan sosial korban bencana alam dan sosial Kabupaten/Kota; penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana Kabupaten/Kota. Indikator yang akan dicapai pada tahun 2030 yaitu persentase perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan pasca bencana bagi korban bencana kabupaten/kota (SPM) sebesar 100 persen.

5. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan

Fokus program adalah pemeliharaan taman makam pahlawan nasional Kabupaten/Kota. Indikator yang akan dicapai pada tahun 2030 yaitu persentase pemeliharaan taman makam pahlawan sebesar 100 persen.

4.1.2. Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

4.1.2.1. Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja

Fokus program adalah pelaksanaan pelatihan berdasarkan unit kompetensi; pembinaan lembaga pelatihan kerja swasta; konsultasi produktivitas pada perusahaan kecil; pengukuran produktivitas tingkat daerah Kabupaten/Kota. Indikator yang akan dicapai pada tahun 2030 yaitu tingkat produktivitas tenaga kerja sebesar Rp. 52,59 juta per orang.

2. Program Penempatan Tenaga Kerja

Fokus program adalah pelayanan antar kerja di Daerah Kabupaten/Kota; pengelolaan informasi pasar kerja; perlindungan PMI (pra dan purna penempatan) di daerah Kabupaten/Kota; penerbitan perpanjangan IMTA yang lokasi kerja dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota. Indikator yang akan dicapai pada tahun 2030 yaitu persentase tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja dalam wilayah kab/kota (IKK Outcome) sebesar 36,00 persen.

3. Program Hubungan Industrial

Fokus program adalah pengesahan peraturan perusahaan dan pendaftaran perjanjian kerja bersama untuk perusahaan yang hanya beroperasi dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota; pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan di daerah Kabupaten/Kota. Indikator yang akan dicapai pada tahun 2030 yaitu persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan) (IKK Outcome) sebesar 14,43 persen.

4.1.2.2. Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan

Fokus program adalah pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada lembaga pemerintah kewenangan Kabupaten/Kota; pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan kewenangan Kabupaten/Kota; Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota. Indikator yang akan dicapai pada tahun 2030 yaitu persentase lembaga kemasyarakatan kelurahan yang teradvokasi sebesar 71,43 persen. Program ini juga untuk mendukung program delegasi dari Provinsi ke Kabupaten/Kota yang berupa Pembentukan Kecamatan Berdaya (pemberdayaan ekonomi bagi disabilitas, perempuan, pelaku ekonomi kreatif dan sport center) aset dari pemerintah kab/kota, dan mendorong pembentukan rumah perlindungan anak, perempuan dan disabilitas di setiap Kecamatan.

2. Program Perlindungan Perempuan

Fokus program adalah pencegahan kekerasan terhadap perempuan lingkup daerah Kabupaten/Kota; penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi kewenangan Kabupaten/Kota; penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan tingkat daerah Kabupaten/Kota. Indikator yang akan dicapai pada tahun 2030 yaitu Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan) sebesar 18,46 Rasio per 100.000. Program ini juga untuk mendukung program delegasi dari Provinsi ke Kabupaten/Kota yang berupa Mendorong pembentukan rumah perlindungan anak, perempuan dan disabilitas di setiap Kecamatan dan program memberikan bantuan hukum bagi guru, disabilitas, perempuan dan anak

3. Program Peningkatan Kualitas Keluarga

Fokus program adalah penyediaan layanan bagi keluarga dalam mewujudkan KG dan hak anak yang wilayah kerjanya dalam daerah Kabupaten/Kota. Indikator yang akan dicapai

pada tahun 2030 yaitu persentase layanan permasalahan keluarga yang terlayani yang terlayani sebesar 100 persen.

4. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)

Fokus program adalah penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan Kabupaten/Kota. Indikator yang akan dicapai pada tahun 2030 yaitu skor kota layak anak sebesar 770,30 skor.

5. Program Perlindungan Khusus Anak

Fokus program adalah pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup daerah Kabupaten/Kota; penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat daerah Kabupaten/Kota; penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah Kabupaten/Kota. Indikator yang akan dicapai pada tahun 2030 yaitu persentase pengaduan kasus anak yang terlayani sebesar 100 persen. Program ini juga untuk mendukung program delegasi dari Provinsi ke Kabupaten/Kota yang berupa Mendorong pembentukan Rumah Perlindungan Anak, Perempuan dan Disabilitas di setiap Kecamatan dan program memberikan bantuan hukum bagi guru, disabilitas, perempuan dan anak

4.1.2.3. Urusan Pemerintahan Bidang Pangan

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat

Fokus program adalah penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya sesuai dengan kebutuhan daerah Kabupaten/Kota dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan; pengelolaan dan keseimbangan cadangan pangan Kabupaten/Kota; pelaksanaan pencapaian target konsumsi pangan perkapita/tahun sesuai dengan angka kecukupan gizi. Indikator yang akan dicapai pada tahun 2030 skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi sebesar 95,12.

2. Program Penanganan Kerawanan Pangan

Fokus program adalah penyusunan peta kerentanan dan ketahanan pangan Kecamatan. Indikator yang akan dicapai pada tahun 2030 yaitu persentase kelurahan tahan pangan/sangat tahan pangan sebesar 100 persen.

3. Program Pengawasan Keamanan Pangan

Fokus program adalah pelaksanaan pengawasan keamanan pangan segar daerah Kabupaten/Kota. Indikator yang akan dicapai pada tahun 2030 yaitu persentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi persyaratan dan mutu keamanan pangan sebesar 100 persen.

4.1.2.4. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan

Fokus program adalah penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh pemerintah daerah Kabupaten/Kota. Indikator yang akan dicapai pada tahun 2030 yaitu persentase permasalahan pertanahan yang tertangani sebesar 100 persen.

2. Program Redistribusi Tanah, dan Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah *Absentee*

Fokus program adalah penetapan subjek dan objek redistribusi tanah serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah *absentee* dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota. Indikator yang akan dicapai pada tahun 2030 yaitu persentase tindak lanjut penetapan subjek dan objek redistribusi tanah serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah *absentee* sebesar 75 persen.

4.1.2.5. Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Program Perencanaan Lingkungan Hidup

Fokus program adalah Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota; penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota. Indikator yang akan dicapai sampai dengan tahun akhir RPJM Daerah 2025-2029 yaitu persentase penyusunan dokumen perencanaan lingkungan hidup sebesar 100 persen.

2. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup

Fokus program adalah pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup Kabupaten/Kota; penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup Kabupaten/Kota. Indikator yang akan dicapai pada tahun 2030 yaitu persentase air sungai yang memenuhi baku mutu sebesar 62,50 persen.

3. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)

Fokus program adalah pengelolaan keanekaragaman hayati Kabupaten/Kota. Indikator yang akan dicapai pada tahun 2030 yaitu persentase penambahan luasan RTH publik sebesar 0,23 persen. Program ini juga untuk mendukung program delegasi dari Provinsi ke Kabupaten/Kota yang berupa mendorong pemenuhan kebutuhan Ruang Terbuka Hijau (RTH) baik di kawasan perkotaan maupun wilayah desa.

4. Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)

Fokus program adalah penyimpanan sementara limbah B3. Indikator yang akan dicapai pada tahun 2030 yaitu persentase usaha/ kegiatan yang mengelola limbah B3 sesuai ketentuan peraturan perundangan sebesar 100 persen.

5. Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)

Fokus program adalah pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/atau Kegiatan yang izin lingkungan dan izin PPLH diterbitkan oleh pemerintah daerah Kabupaten/Kota. Indikator yang akan dicapai pada tahun 2030 yaitu persentase ketercapaian kegiatan pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan izin PPLH diterbitkan sebesar 20,31 persen.

6. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat

Fokus program adalah penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan tingkat daerah Kabupaten/Kota. Indikator yang akan dicapai pada tahun 2030 yaitu persentase komunitas peduli LH yang aktif sebesar 40 persen.

7. Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat

Fokus program adalah pemberian penghargaan lingkungan hidup tingkat daerah Kabupaten/Kota. Indikator yang akan dicapai pada tahun 2030 yaitu persentase sekolah yang memenuhi standar adiwiyata sebesar 10,60 persen.

8. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup

Fokus program adalah penyelesaian pengaduan masyarakat di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota. Indikator yang akan dicapai pada tahun 2030 yaitu persentase pengaduan lingkungan hidup dari masyarakat yang ditindaklanjuti sebesar 100 persen.

9. Program Pengelolaan Persampahan

Fokus program adalah pengelolaan sampah. Indikator yang akan dicapai pada tahun 2030 yaitu persentase pengelolaan sampah sebesar 49,55 persen. Program ini mendukung program unggulan kepala daerah yaitu menumbuhkan kegiatan ekonomi sirkular (Pemanfaatan limbah, daur ulang dan lain-lain).

4.1.2.6. Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Program Pendaftaran Penduduk

Fokus program adalah pelayanan pendaftaran penduduk. Indikator yang akan dicapai pada tahun 2030 yaitu rata-rata ketercapaian pelayanan pendaftaran penduduk sebesar 92,61 persen.

2. Program Pencatatan Sipil

Fokus program adalah penyelenggaraan pencatatan sipil. Indikator yang akan dicapai pada tahun 2030 yaitu rata-rata ketercapaian pelayanan pencatatan sipil sebesar 99,85 persen.

3. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

Fokus program adalah penyelenggaraan pengelolaan informasi administrasi kependudukan. Indikator yang akan dicapai pada tahun 2030 yaitu jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama sebesar 17 OPD.

4.1.2.7. Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Program Peningkatan Kerjasama Desa

Fokus program adalah fasilitasi kerja sama antar desa. Indikator yang akan dicapai pada tahun 2030 yaitu persentase ketercapaian fasilitasi kerjasama TNI dan kelurahan sebesar 100 persen.

2. Program Administrasi Pemerintahan Desa

Fokus program adalah pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa. Indikator yang akan dicapai pada tahun 2030 yaitu persentase kelurahan dengan kriteria cepat berkembang sebesar 100 persen.

3. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat

Fokus program adalah pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang bergerak di bidang pemberdayaan desa dan lembaga adat tingkat daerah Kabupaten/Kota serta pemberdayaan masyarakat hukum adat yang masyarakat pelakunya hukum adat yang sama dalam daerah Kabupaten/Kota. Indikator yang akan dicapai pada tahun 2030 yaitu persentase fasilitasi penataan kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKK) sebesar 100 persen.

4.1.2.8. Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Program Pengendalian Penduduk

Fokus program adalah pemetaan perkiraan pengendalian penduduk cakupan daerah Kabupaten/Kota. Indikator yang akan dicapai pada tahun 2030 yaitu persentase pemakaian kontrasepsi modern (*Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR*) (IKK) sebesar 64,83 persen.

2. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)

Fokus program adalah pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi (kie) pengendalian penduduk dan KB sesuai kearifan budaya lokal; pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi serta pelaksanaan pelayanan KB di daerah Kabupaten/Kota. Indikator yang akan dicapai pada tahun 2030 yaitu persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (*unmet need KB*) (IKK) sebesar 8,40 persen.

3. Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)

Fokus program adalah pelaksanaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga. Indikator yang akan dicapai pada tahun 2030 yaitu persentase angka kelahiran pada remaja umur 15-19 tahun (*Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19*) sebesar 4,90 persen.

4.1.2.9. Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)

Fokus program adalah penyediaan perlengkapan jalan di jalan kabupaten/kota; penerbitan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir; pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan Kabupaten/Kota; persetujuan hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk jalan Kabupaten/Kota; penetapan rencana induk jaringan LLAJ Kabupaten/Kota; pengelolaan terminal penumpang tipe C; audit dan inspeksi keselamatan LLAJ di jalan; penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang antar kota dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota; pengujian berkala kendaraan bermotor. Indikator yang akan dicapai pada tahun 2030 yaitu persentase kelengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal pada jalan Kabupaten/Kota (IUP) sebesar 27,23 persen; persentase perlintasan sebidang yang tertangani pada jalan kota sebesar 100 persen; persentase jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji (KBWU) yang melaksanakan uji berkala sebesar 63,94 persen.

4.1.2.10. Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi Dan Informatika

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik

Fokus program adalah pengelolaan informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah Kabupaten/Kota. Indikator yang akan dicapai pada tahun 2030 yaitu persentase kepuasan masyarakat terhadap pelayanan informasi publik sebesar 25 Persen.

2. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika

Fokus program adalah pengelolaan nama domain yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan sub domain di lingkup pemerintah daerah Kabupaten/Kota; pengelolaan *e-government* di lingkup pemerintah daerah Kabupaten/Kota. Indikator yang akan dicapai pada tahun 2030 yaitu tingkat kematangan pembangunan aplikasi SPBE sebesar 5,00; tingkat kematangan layanan pusat data sebesar 5,00; tingkat kematangan layanan jaringan intra pemerintah daerah sebesar 5,00.

4.1.2.11. Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut

1. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi

Fokus program adalah pemeriksaan dan pengawasan koperasi, koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam daerah Kabupaten/ Kota. Indikator yang akan dicapai pada tahun 2030 yaitu persentase koperasi dengan predikat sehat sebesar 52,60 persen.

2. Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian

Fokus program adalah pendidikan dan latihan perkoperasian bagi koperasi yang wilayah keanggotaan dalam daerah Kabupaten/Kota. Indikator yang akan dicapai pada tahun 2030 yaitu persentase SDM koperasi yang memiliki kompetensi bidang perkoperasian sebesar 6,51 persen. Program ini juga untuk mendukung program delegasi dari Provinsi ke Kabupaten/Kota yang berupa Penguatan dan pemberdayaan koperasi untuk pengembangan perekonomian desa dan program prioritas nasional dalam pembinaan koperasi merah putih.

3. Program Pengembangan UMKM

Fokus program adalah pengembangan usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha kecil. Indikator yang akan dicapai pada tahun 2030 yaitu persentase pengembangan usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha sebesar 33,32 persen. Program ini juga untuk mendukung program delegasi dari Provinsi ke Kabupaten/Kota yang berupa Pendampingan Sertifikasi Halal, HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual) dan P-IRT (Pangan Industri Rumah Tangga) secara Gratis.

4.1.2.12. Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal

Fokus program adalah penetapan pemberian fasilitas/insentif dibidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten/Kota; pembuatan peta potensi investasi Kabupaten/Kota. Indikator yang akan dicapai pada tahun 2030 yaitu persentase realisasi investasi terhadap total realisasi investasi selama periode RPJMD (Tahun 2026-2030) sebesar 100 persen.

2. Program Promosi Penanaman Modal

Fokus program adalah penyelenggaraan promosi penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten/Kota. Indikator yang akan dicapai pada tahun 2030 yaitu pertumbuhan investor sebesar 9,82 persen.

3. Program Pelayanan Penanaman Modal

Fokus program adalah pelayanan perizinan dan non perizinan secara terpadu satu pintu dibidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten/ Kota. Indikator yang akan dicapai pada tahun 2030 yaitu Persentase Penerbitan perizinan dan non perizinan berusaha yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota sebesar 92,23 persen.

4. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

Fokus program adalah Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota. Indikator yang akan dicapai pada tahun 2030 yaitu Persentase Pelaku usaha yang melaporkan LKPM sebesar 42,03 persen.

5. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal

Fokus program adalah pengelolaan data dan informasi perizinan dan non perizinan yang terintegrasi pada tingkat daerah kabupaten/kota. Indikator yang akan dicapai pada tahun 2030 yaitu persentase pelaku usaha yang melaporkan LKPM sebesar 49 persen.

4.1.2.13. Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan Dan Olahraga

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan

Fokus program adalah Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota. Indikator yang akan dicapai pada tahun 2030 yaitu persentase anggota organisasi kepemudaan yang dibina sebesar 60 persen.

2. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan

Fokus program adalah pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan pada jenjang pendidikan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten/Kota; penyelenggaraan kejuaraan olahraga tingkat daerah Kabupaten/Kota; pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi tingkat daerah provinsi; pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi. Indikator yang akan dicapai pada tahun 2030 yaitu Persentase cabor yang memiliki Sarpras Olahraga sebesar 47 persen. Program ini mendukung program unggulan kepala daerah yaitu Pembangunan kolam renang berstandar Nasional dan *Youth Centre*. Selain itu program ini juga untuk mendukung program delegasi dari provinsi ke kab/kota yang berupa Pembangunan Infrastruktur melalui Permukiman Layak Huni melalui 1 KK 1 rumah layak huni, Pengembangan Pusat Rekreasi dan Promosi Pembangunan, dan Gelanggang Olah Raga Internasional, Pembangunan RTLH 30 persen menjadi kewenangan Kabupaten/kota, dan 20 persen desa, serta program meningkatkan kesejahteraan atlet, pelatih, dan manajemen olahraga.

3. Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan

Fokus program adalah Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan. Indikator yang akan dicapai pada tahun 2030 yaitu Persentase kegiatan kepramukaan yang dilaksanakan pada tahun N sebesar 100 persen.

4.1.2.14. Urusan Pemerintahan Bidang Statistik

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Program Penyelenggaraan Statistik Sektor

Fokus program adalah penyelenggaraan statistik sektoral di lingkup daerah Kabupaten/Kota. Indikator yang akan dicapai pada tahun 2030 yaitu persentase ketersediaan data statistik sektoral sebesar 98 persen.

4.1.2.15. Urusan Pemerintahan Bidang Persandian

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi

Fokus program adalah penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi pemerintah daerah Kabupaten/Kota; penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar perangkat daerah Kabupaten/Kota. Indikator yang akan dicapai pada tahun 2030 yaitu nilai kematangan penerapan manajemen keamanan informasi sebesar 5,00.

4.1.2.16. Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Program Pengembangan Kebudayaan

Fokus program adalah pengelolaan kebudayaan yang masyarakat pelakunya dalam daerah Kabupaten/Kota; pelestarian kesenian tradisional yang masyarakat pelakunya dalam daerah Kabupaten/Kota. Indikator yang akan dicapai pada tahun 2030 yaitu persentase event kesenian dan kebudayaan yang disiapkan sebesar 100 persen.

2. Program Pengembangan Kesenian Tradisional

Fokus program adalah pembinaan kesenian yang masyarakat pelakunya dalam daerah Kabupaten/Kota. Indikator yang akan dicapai pada tahun 2030 yaitu persentase kesenian tradisional yang dilestarikan sebesar 100 persen.

3. Program Pembinaan Sejarah

Fokus program adalah pembinaan sejarah lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota. Indikator yang akan dicapai pada tahun 2030 yaitu persentase pembinaan pelestarian Sejarah menuju perkembangan obyek wisata budaya sebesar 100 persen.

4. Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya

Fokus program adalah penetapan cagar budaya peringkat Kabupaten/Kota. Indikator yang akan dicapai pada tahun 2030 yaitu persentase cagar budaya (CB) yang dilestarikan sebesar 31 persen.

5. Program Pengelolaan Permuseuman

Fokus program adalah pengelolaan museum kabupaten/kota. Indikator yang akan dicapai pada tahun 2030 yaitu persentase peningkatan jumlah pengunjung museum batik sebesar 5 persen.

4.1.2.17. Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Program Pembinaan Perpustakaan

Fokus program adalah pembudayaan gemar membaca tingkat daerah Kabupaten/Kota; pengelolaan perpustakaan tingkat daerah Kabupaten/Kota. Indikator yang akan dicapai pada tahun 2030 yaitu nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat sebesar 81,87; rasio pengunjung perpustakaan per tahun (Penduduk Usia 5 - 60 tahun) sebesar 64,63.

2. Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno

Fokus program adalah Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota . Indikator yang akan dicapai pada tahun 2030 yaitu persentase koleksi dan naskah kuno yang telah didokumentasikan sebesar 100 persen.

4.1.2.18. Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Program Pengelolaan Arsip

Fokus program adalah pengelolaan arsip dinamis daerah Kabupaten/Kota; pengelolaan arsip statis daerah Kabupaten/Kota; pengelolaan simpul jaringan informasi kearsipan nasional tingkat Kabupaten/Kota; pengawasan kearsipan di kabupaten/kota. Indikator yang akan dicapai pada tahun 2030 yaitu persentase tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Ps40 dan 59 U 43/2009) sebesar 74,23 persen.

2. Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip

Fokus program adalah pemusnahan arsip di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang memiliki retensi di bawah 10 (Sepuluh) tahun; autentikasi arsip statis dan arsip hasil alih media Kabupaten/Kota. Indikator yang akan dicapai pada tahun 2030 yaitu persentase keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat (IKK *Outcome*) sebesar 33,93 Persen.

4.1.3. Urusan Pemerintahan Pilihan

4.1.3.1. Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan Dan Perikanan

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap

Fokus program adalah pengelolaan penangkapan ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota; pemberdayaan nelayan kecil dalam daerah Kabupaten/Kota; pengelolaan dan penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI); pencatatan kapal penangkap ikan berukuran sampai dengan 5 (lima) GT atau tanpa menggunakan kapal yang beroperasi di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota; Pendaftaran kapal perikanan berukuran sampai dengan 5 (lima) GT yang beroperasi di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota. Indikator yang akan dicapai pada tahun 2030 yaitu jumlah produksi perikanan tangkap sebesar 12.226,34 ton.

2. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya

Fokus program adalah pemberdayaan pembudi daya ikan kecil; pengelolaan pembudidayaan ikan. Indikator yang akan dicapai pada tahun 2030 yaitu jumlah produksi perikanan budidaya sebesar 547,58 ton.

Program ini juga untuk mendukung program delegasi dari Provinsi ke Kabupaten/Kota yang berupa pemberdayaan masyarakat pesisir tambak ikan nila.

3. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan

Fokus program adalah pembinaan mutu dan keamanan hasil perikanan bagi usaha pengolahan dan pemasaran skala mikro dan kecil; penyediaan dan penyaluran bahan baku industri pengolahan ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota; pembinaan teknis usaha pengolahan dan pemasaran ikan untuk skala usaha mikro dan skala usaha kecil; revitalisasi unit pengolahan ikan dan sentra pengolahan ikan untuk skala usaha mikro dan skala usaha kecil; Fasilitasi akses pasar dan promosi peningkatan konsumsi ikan untuk skala usaha mikro dan skala usaha kecil; fasilitasi penyediaan prasarana dan sarana usaha pengolahan dan pemasaran ikan untuk meningkatkan daya saing produk kelautan dan perikanan. Indikator yang akan dicapai pada tahun 2030 yaitu jumlah produksi pengolahan dan pemasaran hasil perikanan sebesar 30.872,83 ton.

4.1.3.2. Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata

Fokus program adalah pengelolaan daya tarik wisata kabupaten/kota; pengelolaan destinasi pariwisata kabupaten/kota; penetapan tanda daftar usaha pariwisata daerah Kabupaten/Kota. Indikator yang akan dicapai pada tahun 2030 yaitu Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD sebesar 11,69 persen.

Program ini mendukung program unggulan kepala daerah yaitu Menambah ruang kreatif dan seni budaya. Selain itu program ini juga untuk mendukung program delegasi dari provinsi ke kab/kota yang berupa pembangunan infrastruktur melalui permukiman layak huni melalui 1 KK 1 rumah layak huni, pengembangan pusat rekreasi dan promosi pembangunan, dan gelanggang olah raga internasional ➔ pembangunan RTLH 30 persen menjadi kewenangan Kabupaten/Kota, dan 20 persen desa, dan untuk mendukung program delegasi dari Provinsi ke Kabupaten/Kota yang berupa membangun 1.000 desa/kampung wisata baru. Secara bertahap Kota Pekalongan akan mengembangkan potensi-potensi wisata berupa kampung wisata serta sekaligus memroses penetapannya sesuai dengan ketentuan dalam Perda Jateng Nomor 2 Tahun 2019 tentang pemberdayaan masyarakat desa/kampung wisata. Selain itu program ini juga untuk mendukung pengembangan 10 Titik aglomerasi menjadi episentrum pertumbuhan ekonomi baru di Jawa Tengah dan melahirkan ekosistem ekonomi syariah melalui penguatan regulasi dan pengembangan wisata ramah muslim.

2. Program Pemasaran Pariwisata

Fokus program adalah pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri daya tarik, destinasi dan kawasan strategis pariwisata Kabupaten/Kota. Indikator yang akan dicapai pada tahun akhir RPJM Daerah 2025-2029 yaitu jumlah tamu wisatawan mancanegara sebesar 1.500 orang.

3. Program Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual

Fokus program adalah penyediaan prasarana (zona kreatif/ruang kreatif/kota kreatif) sebagai ruang berekspresi, berpromosi dan berinteraksi bagi insan kreatif di daerah Kabupaten/Kota; pengembangan ekosistem ekonomi kreatif. Indikator yang akan dicapai pada tahun 2030 yaitu pendaftaran HAKI di sektor ekonomi kreatif sebesar 0,17 persen.

Program ini juga untuk mendukung program delegasi dari Provinsi ke Kabupaten/Kota yang berupa taruna karya mandiri melalui program kartu zilenial untuk membuka lapangan kerja.

4. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Fokus program adalah pelaksanaan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat dasar; pengembangan kapasitas pelaku ekonomi kreatif. Indikator yang akan dicapai pada tahun 2030 yaitu persentase SDM Pariwisata dan ekonomi kreatif yang dikembangkan kapasitasnya sebesar 100 persen.

Program ini juga untuk mendukung program delegasi dari Provinsi ke Kabupaten/Kota yang berupa Pelatihan 1000 konten kreator desa wisata.

4.1.3.3 Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian

Fokus program adalah pengawasan penggunaan sarana pertanian; pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) hewan, tumbuhan, dan mikro organisme kewenangan Kabupaten/Kota; peningkatan mutu dan peredaran benih/bibit ternak dan tanaman pakan ternak serta pakan dalam daerah Kabupaten/Kota; pengendalian dan pengawasan penyediaan dan peredaran benih/bibit ternak, dan hijauan pakan ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota. Indikator yang akan dicapai pada tahun 2030 yaitu Nilai produksi pertanian pertahun sebesar 66,27 Miliar Rupiah dan nilai produksi peternakan pertahun sebesar 308,95 Miliar Rupiah.

2. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian

Fokus program adalah pembangunan prasarana pertanian. Indikator yang akan dicapai pada tahun 2030 yaitu persentase prasarana pertanian dan peternakan dalam kondisi baik sebesar 75,68 persen.

3. Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner

Fokus program adalah penjaminan kesehatan hewan, penutupan dan pembukaan daerah wabah penyakit hewan menular dalam daerah Kabupaten/Kota; pengawasan pemasukan dan pengeluaran hewan dan produk hewan daerah Kabupaten/Kota; pengawasan pemasukan dan pengeluaran hewan dan produk hewan daerah Kabupaten/Kota; pengelolaan pelayanan jasa laboratorium dan jasa medik veteriner dalam daerah Kabupaten/Kota; penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner. Indikator yang akan dicapai pada tahun 2030 yaitu persentase kasus penyakit hewan menular yang tertangani sebesar 100 persen.

Program ini juga untuk mendukung program delegasi dari Provinsi ke Kabupaten/Kota yang berupa meningkatkan pelatihan untuk sertifikasi juru sembelih halal dan standar rumah pemotongan hewan.

4. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian

Fokus program adalah pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian Kabupaten/Kota. Indikator yang akan dicapai pada tahun 2030 yaitu persentase pelaksanaan kegiatan pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian kabupaten/kota sebesar 100 persen.

5. Program Penyuluhan Pertanian

Fokus program adalah pelaksanaan penyuluhan pertanian. Indikator yang akan dicapai pada tahun 2030 yaitu persentase kenaikan kelas kelompok tani per tahun sebesar 55 persen.

4.1.3.4. Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan

Fokus program adalah penerbitan izin pengelolaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan, dan izin usaha toko swalayan; penerbitan tanda daftar gudang. Indikator yang akan dicapai pada tahun 2030 yaitu persentase gudang yang terdaftar sebesar 77,27 persen.

2. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan

Fokus program adalah pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan; pembinaan terhadap pengelola sarana distribusi perdagangan masyarakat di wilayah kerjanya. Indikator yang akan dicapai pada tahun 2030 yaitu persentase sarana perdagangan yang ditingkatkan kualitasnya sebesar 58,33 persen; persentase pembinaan terhadap pedagang kaki lima sebesar 100 persen.

3. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting

Fokus program adalah pengendalian harga, dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat pasar Kabupaten/Kota; pengawasan pupuk dan pestisida bersubsidi di tingkat daerah Kabupaten/Kota. Indikator yang akan dicapai pada tahun 2030 yaitu persentase ketersediaan informasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting terkini sebesar 100 persen.

4. Program Pengembangan Ekspor

Fokus program adalah penyelenggaraan promosi dagang melalui pameran dagang dan misi dagang bagi produk ekspor unggulan yang terdapat pada 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota. Indikator yang akan dicapai pada tahun 2030 yaitu persentase peningkatan volume ekspor sebesar 2,49 persen.

5. Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen

Fokus program adalah pelaksanaan Metrologi Legal, berupa tera, tera ulang, dan pengawasan. Indikator yang akan dicapai pada tahun 2030 yaitu persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku sebesar 87,20 persen.

6. Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri

Fokus program adalah pelaksanaan promosi, pemasaran dan peningkatan penggunaan produk dalam negeri. Indikator yang akan dicapai pada tahun 2030 yaitu persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran sebesar 3,78 persen.

4.1.3.5. Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri

Fokus program adalah penyusunan dan evaluasi rencana pembangunan industri Kabupaten/Kota. Indikator yang akan dicapai pada tahun 2030 yaitu nilai investasi sektor industri sebesar Rp. 88,88 miliar.

Program ini mendukung program unggulan kepala daerah yaitu menumbuhkan kegiatan ekonomi sirkular (pemanfaatan limbah, daur ulang dan lain-lain).

2. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional

Fokus program adalah penyediaan informasi industri untuk informasi industri untuk IUI, IPU, IUKI dan IPKI kewenangan Kabupaten/Kota. Indikator yang akan dicapai pada tahun 2030 yaitu peningkatan jumlah industri pengolahan yang terdata dalam SIINAS sebesar 286 industri.

4.1.4. Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan

4.1.4.1. Sekretariat Daerah

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

Fokus program adalah administrasi tata pemerintahan; fasilitasi kerja sama daerah; fasilitasi dan koordinasi hukum; pelaksanaan kebijakan kesejahteraan rakyat. Indikator yang akan dicapai pada tahun 2030 yaitu persentase penyusunan dokumen LPPD dan LKPD tepat waktu sebesar 100 persen; Indeks Reformasi Hukum (IUP) sebesar 96,82; persentase capaian fasilitasi lembaga kemasyarakatan sebesar 100 persen.

Program ini mendukung program unggulan kepala daerah yaitu peningkatan bantuan RT/RW. Selain itu program ini juga mendukung program delegasi dari Provinsi ke Kabupaten/Kota yang berupa memberikan bantuan hukum bagi guru, disabilitas, perempuan dan anak.

2. Program Perekonomian dan Pembangunan

Fokus program adalah pelaksanaan kebijakan perekonomian; pemantauan kebijakan sumber daya alam; pelaksanaan administrasi pembangunan; pengelolaan pengadaan barang dan jasa. Indikator yang akan dicapai pada tahun 2030 yaitu Return on Aset (ROA) BUMD sebesar 1 persen; total dana pihak ketiga pada bank milik Kabupaten/Kota per PDRB sebesar 0,39 persen; total kredit pada bank milik Kabupaten/Kota per PDRB sebesar 0,53 persen; Tingkat Kematangan UKPBJ level 4;

4.1.4.2. Sekretariat DPRD

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD

Fokus program adalah pembahasan kebijakan anggaran; peningkatan kapasitas DPRD; penyerapan dan penghimpunan aspirasi masyarakat; fasilitasi tugas DPRD; pembentukan peraturan daerah dan peraturan DPRD. Indikator yang akan dicapai pada tahun 2030 yaitu persentase pembahasan dokumen penganggaran tepat waktu sebesar 100 persen; persentase penetapan Ranperda pada tahun N sebesar 100 persen.

4.1.5. Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan

4.1.5.1. Perencanaan

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah

Fokus program adalah penyusunan perencanaan dan pendanaan; analisis data dan informasi pemerintahan daerah bidang perencanaan pembangunan daerah; pengendalian, evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan pembangunan daerah. Indikator yang akan dicapai pada tahun 2030 yaitu persentase ketersediaan dokumen perencanaan tepat waktu sebesar 100 persen; skor Satu Data Indonesia (SDI) sebesar 76,44 persen; persentase ketersediaan dokumen evaluasi dan pelaporan triwulanan tepat waktu sebesar 100 persen.

2. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah

Fokus program adalah koordinasi perencanaan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia; koordinasi perencanaan bidang Perekonomian dan SDA (sumber daya alam); koordinasi perencanaan bidang infrastruktur dan kewilayahan. Indikator yang akan dicapai pada tahun 2030 yaitu persentase konsistensi perencanaan pembangunan (rata-rata nilai keselarasan program pada RKPD-RPJM Daerah, dan kegiatan/sub kegiatan pada Renja-Renstra) bidang pemerintahan dan pembangunan manusia sebesar 100 persen; persentase konsistensi perencanaan pembangunan (rata-rata nilai keselarasan program pada RKPD-RPJM Daerah, dan kegiatan/sub kegiatan pada Renja-Renstra) bidang perekonomian sebesar 100 persen; persentase konsistensi perencanaan pembangunan (rata-rata nilai keselarasan program pada RKPD-RPJM Daerah, dan kegiatan/sub kegiatan pada Renja-Renstra) bidang infrastruktur wilayah sebesar 100 persen.

4.1.5.2. Keuangan

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Program Pengelolaan Keuangan Daerah

Fokus program adalah koordinasi dan penyusunan rencana anggaran daerah; koordinasi dan pengelolaan perbendaharaan daerah; penunjang urusan kewenangan pengelolaan keuangan daerah; koordinasi dan pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan daerah. Indikator yang akan dicapai pada tahun 2030 yaitu persentase ketepatan waktu dalam penyusunan APBD sebesar 100 persen; persentase realisasi APBD (Belanja Pegawai, Belanja Barang Jasa dan Belanja Modal) sebesar 91,67 persen; persentase laporan keuangan daerah tepat waktu sebesar 100 persen.

2. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah

Fokus program adalah pengelolaan barang milik daerah. Indikator yang akan dicapai pada tahun 2030 yaitu persentase SKPD yang tertib penatausahaan BMD yang sesuai peraturan perUndang-undangan sebesar 100 persen.

3. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah

Fokus program adalah kegiatan pengelolaan pendapatan daerah. Indikator yang akan dicapai yaitu ketetapan pajak daerah (non opsen) dan retribusi daerah sebesar 100 persen; persentase realisasi PAD sebesar 100 persen.

4.1.5.3. Kepegawaian

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Program Kepegawaian Daerah

Fokus program adalah pengadaan, pemberhentian dan informasi kepegawaian ASN; mutasi dan promosi ASN; pengembangan kompetensi ASN; penilaian dan evaluasi kinerja aparatur. Indikator yang akan dicapai pada tahun 2030 yaitu persentase keterpenuhan formasi ASN sebesar 77 persen; persentase keterisian jabatan manajerial ASN sebesar 90 persen; persentase peningkatan kompetensi ASN melalui jalur pendidikan sebesar 28 persen; persentase pegawai dengan SKP bernilai minimal baik sebesar 95 persen.

4.1.5.4. Pendidikan Dan Pelatihan

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia

Fokus program adalah pengembangan kompetensi teknis; sertifikasi, kelembagaan, pengembangan kompetensi manajerial dan fungsional. Indikator yang akan dicapai pada tahun 2030 yaitu persentase ASN berkembang kompetensi teknis, manajerial, dan fungsional sebesar 70 persen.

Program ini mendukung program unggulan kepala daerah yaitu beasiswa studi lanjut bagi tenaga kesehatan. selain itu program ini juga untuk mendukung program delegasi dari Provinsi ke Kabupaten/Kota yang berupa pelatihan dan pendidikan anti korupsi berbasis ISO 37001 untuk ASN dan penyelenggara pemerintah desa bekerjasama dengan aparat penegak hukum, OMBUDSMAN, kepolisian, kejaksanaan, BPK & KPK, dan untuk mendukung program delegasi dari Provinsi ke Kabupaten/Kota yang berupa melahirkan pemerintahan yang *good clear government* dan *collaborative governance* melalui peningkatan kesejahteraan, profesionalitas dan kualitas ASN dan perangkat desa.

4.1.5.5 Penelitian Dan Pengembangan

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Program Riset dan Inovasi Daerah

Fokus program adalah invensi dan inovasi Indikator yang akan dicapai pada tahun 2030 yaitu persentase kajian berbasis bukti dalam penyelesaian permasalahan daerah sebesar 66,67 persen.

4.1.6. Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan

4.1.6.1. Inspektorat Daerah

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Program Penyelenggaraan Pengawasan

Fokus program adalah penyelenggaraan pengawasan dengan tujuan tertentu; penyelenggaraan pengawasan internal. Indikator yang akan dicapai pada tahun 2030 yaitu persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan (TLHP) pengawasan akuntabilitas keuangan daerah dan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah yang selesai ditindaklanjuti sebesar 85 persen; persentase temuan hasil pengawasan dengan tujuan tertentu yang selesai ditindaklanjuti sebesar 65 persen.

2. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi

Fokus program adalah perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan; pendampingan dan asistensi. Indikator yang akan dicapai pada tahun 2030 yaitu Indeks Pencegahan Korupsi Daerah (IPKD) sebesar 97.

4.1.7. Unsur Kewilayahan

4.1.7.1. Kecamatan

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Fokus program adalah koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan dan pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat. Indikator yang akan dicapai pada tahun 2030 yaitu persentase kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik di wilayah utara sebesar 100 persen; persentase kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik di wilayah selatan sebesar 100 persen; persentase kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik di wilayah barat sebesar 100 persen; dan persentase kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik di wilayah timur sebesar 100 persen.

2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

Fokus program adalah pemberdayaan lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan; pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga tingkat kecamatan dan kelurahan. Indikator yang akan dicapai pada tahun 2030 yaitu persentase kelurahan yang menyelesaikan laporan kinerja pemberdayaan tepat waktu sebesar 100 persen; persentase ketercapaian pemberdayaan masyarakat kelurahan sebesar 100 persen.

Program ini juga untuk mendukung program delegasi dari Provinsi ke Kabupaten/Kota yang berupa Penguatan BPBD dan tagana dalam penanganan bencana berbasis kelompok masyarakat dan program desa maju dan berdaya melalui pembangunan lumbung kesejahteraan, produk unggulan go internasional, Sistem Informasi Desa (SID), dan tim tanggap bencana dan program peningkatan desa mandiri energi melalui pengembangan bio gas, *hydro*, maupun tenaga surya dan program peningkatan operasional kader Posyandu.

3. Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Fokus program adalah Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum. Indikator yang akan dicapai pada tahun 2030 yaitu persentase kinerja trantibum wilayah utara sebesar 100 persen; persentase kinerja trantibum wilayah selatan sebesar 100 persen; persentase kinerja trantibum wilayah barat sebesar 100 persen; dan persentase kinerja trantibum wilayah timur sebesar 100 Persen.

4. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Fokus program adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah. Indikator yang akan dicapai pada tahun 2030 yaitu persentase kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum wilayah utara sebesar 100 persen; persentase kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum wilayah selatan sebesar 100 persen; persentase kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum wilayah barat sebesar 100 persen; dan persentase kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum wilayah timur sebesar 100 persen.

4.1.8. Unsur Pemerintahan Umum

4.1.8.1. Kesatuan Bangsa dan Politik

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan

Fokus program adalah perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang ideologi pancasila dan karakter kebangsaan. Indikator yang akan dicapai pada tahun 2030 yaitu persentase masyarakat yang paham terhadap ideologi pancasila dan wawasan kebangsaan sebesar 100 persen.

Program ini juga untuk mendukung program delegasi dari Provinsi ke Kabupaten/Kota yang berupa moderasi beragama dan wawasan kebangsaan melalui penguatan regulasi, pendidikan dan pelatihan.

2. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik

Fokus program adalah perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, serta pemantauan situasi politik. Indikator yang akan dicapai pada tahun 2030 persentase anggota partai politik dan siswa lembaga pendidikan di kota pekalongan yang meningkat pemahamannya atas etika dan budaya politik sebesar 95,92 persen.

3. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan

Fokus program adalah perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan. Indikator yang akan dicapai pada tahun 2030 yaitu persentase organisasi kemasyarakatan yang aktif sebesar 93,30 persen.

Program ini juga untuk mendukung program delegasi dari Provinsi ke Kabupaten/Kota yang berupa mendorong penguatan forum kerukunan antar umat beragama dan forum pembauran kebangsaan.

4. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya

Fokus program adalah perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang ketahanan ekonomi, sosial dan budaya. Indikator yang akan dicapai pada tahun 2030 yaitu persentase masyarakat yang memahami tentang ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya sebesar 93,91 persen.

5. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial

Fokus program adalah perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan pemantapan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial. Indikator yang akan dicapai pada tahun 2030 yaitu persentase konflik sosial yang tertangani sebesar 100 persen.

4.1.9. Non Urusan

4.1.9.1. Non Urusan

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Fokus program adalah perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah; administrasi keuangan perangkat daerah; administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah; administrasi kepegawaian perangkat daerah; administrasi umum perangkat daerah; penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah; pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah; pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah; peningkatan pelayanan BLUD; administrasi keuangan dan operasional kepala daerah dan wakil kepala daerah; fasilitasi kerumahtanggaan sekretariat daerah; penataan organisasi; pelaksanaan protokol dan komunikasi pimpinan; layanan keuangan dan kesejahteraan DPRD; layanan administrasi DPRD.

Indikator yang akan dicapai pada tahun 2030 yaitu persentase keselarasan perencanaan, kinerja evaluasi dan kinerja keuangan perangkat daerah sebesar 100 persen; persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah sebesar 100 persen; persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah sebesar 100 persen; persentase ketersediaan layanan administrasi, keuangan dan kesejahteraan DPRD sebesar 100 persen; persentase Ketersediaan Layanan BLUD sebesar 100 persen; persentase ketersediaan layanan administrasi keuangan, operasional dan kerumahtanggaan sekretariat daerah sebesar 100 persen; Persentase ketersediaan layanan administrasi, keuangan dan kesejahteraan DPRD sebesar 100 persen; persentase pelayanan keprotokolan sebesar 100 persen dan nilai kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik sebesar 97,76.

Tabel IV-1
Indikasi Rencana Program Perangkat Daerah
Yang Disertai Kebutuhan Pendanaan Kota Pekalongan

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	OUTCOME	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	BASELINE		KINERJA DAN USULAN PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD	PENANGGUNG JAWAB
					Th. 2024	Th. 2025	Th. 2026		Th. 2027		Th. 2028		Th. 2029		Th. 2030			
							Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar							271.910,18		263.563,73		274.453,71		266.184,76		248.481,08		
1.01	Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan							69.191,93		69.541,13		69.719,13		69.870,63		70.102,13		
1.01.02	Program Pengelolaan Pendidikan	Meningkatnya akses dan pemerataan partisipasi pendidikan bagi anak usia 5 - 18 tahun						53.579,68		53.779,68		53.979,68		54.179,68		54.379,68		
			Angka Partisipasi Sekolah (APS) 5-6	persen	90,58	91,87	93,15		94,44		95,73		97,01		100,00		100,00	PD Pengampu Urusan Pendidikan
			Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7-12	persen	99,70	99,70	99,72		99,74		99,76		99,78		99,80		99,80	PD Pengampu Urusan Pendidikan
			Angka Partisipasi Sekolah (APS) 13-15	persen	96,52	96,52	96,72		96,97		97,22		97,47		97,72		97,72	PD Pengampu Urusan Pendidikan
			Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7-18 (kesetaraan)	persen	25,96	30,94	35,92		40,90		45,87		50,85		55,83		55,83	PD Pengampu Urusan Pendidikan
1.01.03	Program Pengembangan Kurikulum	Terwujudnya penerapan kurikulum muatan lokal kebencanaan berbasis karakter dan keagamaan pada seluruh jenjang pendidikan						83,80		260,00		222,00		173,50		185,00		
			Persentase satuan PAUD yang mengembangkan program kurikulum muatan lokal kebencanaan berbasis karakter dan keagamaan	persen	0,00	0,00	20,22		40,07		59,93		77,90		100,00		100,00	PD Pengampu Urusan Pendidikan
			Persentase satuan pendidikan SD yang mengembangkan program kurikulum muatan lokal kebencanaan berbasis karakter dan keagamaan	persen	0,00	0,00	19,42		38,83		58,25		87,38		100,00		100,00	PD Pengampu Urusan Pendidikan
			Persentase satuan pendidikan SMP yang mengembangkan program kurikulum muatan lokal kebencanaan berbasis karakter dan keagamaan	persen	0,00	0,00	20,00		40,00		60,00		80,00		100,00		100,00	PD Pengampu Urusan Pendidikan
			Persentase satuan pendidikan Kesetaraan yang mengembangkan program kurikulum muatan lokal kebencanaan berbasis karakter dan keagamaan	persen	0,00	0,00	7,14		35,71		64,29		78,57		100,00		100,00	PD Pengampu Urusan Pendidikan
1.01.04	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Meningkatnya kualitas pendidik pada satuan pendidikan TK, SD dan SMP Negeri						15.528,45		15.501,45		15.517,45		15.517,45		15.537,45		
			Persentase pendidik berkualifikasi pendidikan minimal S1 dan	persen	71,29	74,77	78,44		81,47		84,54		87,27		90,26		90,26	PD Pengampu Urusan Pendidikan

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	OUTCOME	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	BASELINE		KINERJA DAN USULAN PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD	PENANGGUNG JAWAB
					Th. 2024	Th. 2025	Th. 2026		Th. 2027		Th. 2028		Th. 2029		Th. 2030			
							Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			bersertifikasi profesi di satuan pendidikan TK, SD dan SMP Negeri															
1.02	Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan							80.557,61		80.271,19		81.337,48		81.455,85		81.787,31		
1.02.02	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Meningkatnya efektivitas pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat						76.680,96		77.512,60		78.566,70		78.666,64		78.981,24		
			Persentase ketersediaan sarana, prasarana dan alat kesehatan yang sesuai standar	persen	79,45	79,50	79,60		79,70		79,80		79,90		80,00		80,00	PD Pengampu Urusan Kesehatan
			Cakupan penerima pemeriksaan kesehatan gratis	persen	NA	30,00	40,00		50,00		60,00		70,00		80,00		80,00	PD Pengampu Urusan Kesehatan
			Persentase fasilitas kesehatan yang terintegrasi dalam sistem informasi kesehatan nasional	persen	NA	61,60	63,20		66,40		68,00		70,40		72,00		72,00	PD Pengampu Urusan Kesehatan
			Jumlah kasus kematian ibu (IUP)	kasus	5,00	5,00	5,00		5,00		5,00		4,00		4,00		4,00	PD Pengampu Urusan Kesehatan
			Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (IUP)	persen	98,32	98,43	98,54		98,65		98,76		98,86		99,00		99,00	PD Pengampu Urusan Kesehatan
			Jumlah kasus kematian balita	kasus	62,00	62,00	60,00		58,00		56,00		54,00		52,00		52,00	PD Pengampu Urusan Kesehatan
			Persentase desa/kelurahan sanitasi total berbasis masyarakat	persen	NA	3,70	11,11		18,52		25,93		33,33		40,74		40,74	PD Pengampu Urusan Kesehatan
			Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate) (IUP)	persen	91,06	91,10	91,20		91,30		91,40		91,50		91,60		91,60	PD Pengampu Urusan Kesehatan
			Persentase fasyankes yang diberikan rekomendasi tepat waktu	persen		100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	PD Pengampu Urusan Kesehatan
			Prevalensi wasting balita	persen	8,43	8,18	7,93		7,68		7,43		7,18		6,93		6,93	PD Pengampu Urusan Kesehatan
			Persentase ketersediaan sarana, prasarana dan alat kesehatan di RSUD yang sesuai standar	persen	100,00	86,50	87,00		87,50		88,00		88,50		89,00		89,00	PD Pengampu Urusan Kesehatan
			Cakupan penerima pemeriksaan kesehatan gratis	persen	0,00	0,00	40,00		50,00		60,00		70,00		80,00		80,00	PD Pengampu Urusan Kesehatan
1.02.03	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Meningkatnya kapasitas sumber daya manusia kesehatan						608,58		538,02		549,02		566,02		582,02		
			Rasio tenaga kesehatan dan tenaga medis terhadap populasi	persen	4,83	4,83	4,85		4,91		4,90		4,94		5,04		5,04	PD Pengampu Urusan Kesehatan
			Persentase tenaga kesehatan (perawat) di area kritis (IBS, ICU/PICU/NICU, Dialisis) RSUD Benda yang memiliki kompetensi yang dipersyaratkan	persen	71,70	71,19	77,97		84,75		89,83		94,92		100,00		100,00	PD Pengampu Urusan Kesehatan

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	OUTCOME	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	BASELINE		KINERJA DAN USULAN PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD	PENANGGUNG JAWAB
					Th. 2024	Th. 2025	Th. 2026		Th. 2027		Th. 2028		Th. 2029		Th. 2030			
							Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1.02.04	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Meningkatnya sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan minuman						492,24		493,59		493,75		494,98		494,98		
			Persentase rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan dari lintas sektor yang ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah	persen	NA	80,00	81,82		83,33		84,62		85,71		86,67		86,67	PD Pengampu Urusan Kesehatan
			Persentase pangan industri rumah tangga aman dan bermutu	persen	NA	75,00	76,92		77,78		78,00		79,63		80,00		80,00	PD Pengampu Urusan Kesehatan
			Persentase tempat pengelolaan pangan (TPP) yang memenuhi syarat	persen	NA	40,00	46,00		52,00		58,00		64,00		70,00		70,00	PD Pengampu Urusan Kesehatan
1.02.05	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan						2.775,83		1.726,97		1.728,01		1.728,21		1.729,07		
			Persentase rumah tangga sehat	persen	97,22	97,22	97,30		97,40		97,50		97,60		97,70		97,70	PD Pengampu Urusan Kesehatan
1.03	Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang							67.318,99		57.761,90		66.465,09		57.008,19		39.292,00		
1.03.02	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda)	Terwujudnya sarpras pengendali banjir dan rob dalam kondisi baik						13.611,56		13.700,00		13.800,00		13.900,00		14.000,00		
			Persentase sarpras pengendali banjir dan rob dalam kondisi baik	persen	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	PD Pengampu Urusan PUPR
1.03.03	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Terwujudnya layanan infrastruktur jaringan perpipaan air minum yang memadai						1.324,11		1.200,00		1.200,00		1.200,00		1.200,00		
			Panjang infrastruktur jaringan perpipaan air minum	meter	529.615,90	534.438,90	535.938,90		537.438,90		538.938,90		540.438,90		541.938,90		541.938,90	PD Pengampu Urusan PUPR
1.03.04	Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	Tersedianya sarpras persampahan yang memadai						617,69		850,00		850,00		920,00		920,00		
			Persentase penambahan sarpras persampahan	persen	0,00	0,00	16,67		33,33		50,00		66,67		100,00		100,00	PD Pengampu Urusan PUPR
1.03.05	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Terwujudnya layanan infrastruktur sistem air limbah yang memadai						1.895,42		2.035,00		2.290,00		2.290,00		2.290,00		
			Persentase rumah yang terlayani Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S) di daerah Kabupaten/Kota	persen	88,21	88,50	88,66		88,71		88,76		88,81		88,86		88,86	PD Pengampu Urusan PUPR
1.03.06	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Tersedianya drainase dalam kondisi mantap						2.244,72		2.468,19		2.600,00		2.800,00		3.000,00		
			Persentase drainase dalam kondisi mantap	persen	69,48	39,96	40,94		41,92		42,91		43,89		44,87		44,87	PD Pengampu Urusan PUPR

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	OUTCOME	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	BASELINE		KINERJA DAN USULAN PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD	PENANGGUNG JAWAB
					Th. 2024	Th. 2025	Th. 2026		Th. 2027		Th. 2028		Th. 2029		Th. 2030			
							Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1.03.08	Program Penataan Bangunan Gedung	Terwujudnya penataan bangunan gedung yang sesuai ketentuan						1.215,18		1.160,00		1.160,00		1.160,00		1.160,00		
			Persentase penerbitan persetujuan bangunan gedung yang memenuhi persyaratan teknis bangunan	persen	84,31	85,00	86,00		87,00		88,00		89,00		90,00		90,00	PD Pengampu Urusan PUPR
1.03.10	Program Penyelenggaraan Jalan	Terwujudnya layanan infrastruktur jalan yang memadai						45.816,49		35.140,71		43.894,09		33.854,19		15.990,00		
			Persentase peningkatan kemantapan jalan	persen	1,09	-5,48	0,30		0,30		0,30		0,30		0,30		0,30	PD Pengampu Urusan PUPR
1.03.11	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Meningkatnya kualitas jasa konstruksi						58,28		233,00		246,00		259,00		272,00		
			Persentase jasa konstruksi dengan kinerja baik	persen	100,00	98.67	98.67		98.57		98.57		98.46		98.46		98.46	PD Pengampu Urusan PUPR
1.03.12	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Meningkatnya kualitas kinerja penyelenggaraan penataan ruang						535,54		975,00		425,00		625,00		460,00		
			Nilai kinerja penyelenggaraan penataan ruang	Nilai	82,64	82,64	83,00		83,00		83,50		83,50		84,00		84,00	PD Pengampu Urusan PUPR
1.04	Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman							43.946,55		43.946,55		43.946,55		43.946,55		43.946,55		
1.04.02	Program Pengembangan Perumahan	Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni di kawasan rawan bencana						1.643,71		1.740,61		1.740,61		1.740,61		1.740,61		
			Persentase ketersediaan rumah layak huni di kawasan rawan bencana	persen	74,88	75,05	75,22		75,39		75,56		75,72		75,89		75,89	PD Pengampu Urusan Perkim
1.04.03	Program Kawasan Permukiman	Meningkatnya kualitas kawasan permukiman						27.293,92		25.896,84		25.896,84		25.896,84		25.896,84		
			Luas kawasan permukiman kumuh yang ditangani	hektar	17,45	10,00	10,00		10,00		10,00		10,00		10,00		10,00	PD Pengampu Urusan Perkim
1.04.04	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Meningkatnya rumah tangga dengan akses hunian layak						8.516,10		6.840,51		6.840,51		6.840,51		6.840,51		
			Rumah tangga dengan akses hunian layak (IUP)	persen	0,00	87,61	88,34		89,06		89,79		90,52		91,25		91,25	PD Pengampu Urusan Perkim
1.04.05	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (Psu)	Meningkatnya kualitas perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)						8.377,40		8.468,59		8.468,59		8.468,59		8.468,59		
			Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum) (IKK Outcome)	persen	64,13	70,65	76,34		81,91		87,37		92,71		100,00		100,00	PD Pengampu Urusan Perkim
1.05	Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat							7.324,53		7.869,84		8.511,41		9.164,32		8.277,41		
1.05.02	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum						4.972,18		5.201,34		5.431,41		6.530,82		5.631,41		
			Persentase penegakan perda	persen	90,87	91,00	92,00		93,00		94,00		95,00		95,00		95,00	PD Pengampu Urusan Trantibum

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	OUTCOME	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	BASELINE		KINERJA DAN USULAN PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD	PENANGGUNG JAWAB
					Th. 2024	Th. 2025	Th. 2026		Th. 2027		Th. 2028		Th. 2029		Th. 2030			
							Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Persentase penyelenggaraan Trantibum	persen	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	PD Pengampu Urusan Trantibum
1.05.03	Program Penanggulangan Bencana	Meningkatnya kualitas layanan penanganan bencana							1.520,38		1.442,00		1.792,00		1.287,00		1.287,00	
			Persentase penanganan bencana pada pra bencana, saat bencana dan pasca bencana	persen	75,00	82,58	86,36		90,15		93,94		97,73		100,00		100,00	PD Pengampu Urusan Trantibum
1.05.04	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Meningkatnya pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran							831,97		1.226,50		1.288,00		1.346,50		1.359,00	
			Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran (SPM / IKK Outcome)	persen	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	PD Pengampu Urusan Trantibum
1.06	Urusan Pemerintahan Bidang Sosial							3.570,57		4.173,11		4.474,05		4.739,21		5.075,67		
1.06.02	Program Pemberdayaan Sosial	Meningkatnya kualitas pemberdayaan sosial							186,90		354,09		379,02		406,10		435,47	
			Persentase lembaga potensi sumber kesejahteraan sosial (PSKS) yang diberdayakan	persen	NA	74,67	74,67		80,00		85,33		90,67		94,67		94,67	PD Pengampu Urusan Sosial
1.06.04	Program Rehabilitasi Sosial	Meningkatnya kualitas rehabilitasi sosial							1.696,99		1.728,39		1.886,42		1.959,12		2.048,05	
			Persentase PPKS penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan tuna sosial (gelandangan dan pengemis) yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (SPM)	persen	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	PD Pengampu Urusan Sosial
1.06.05	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Meningkatnya kualitas perlindungan dan jaminan sosial bagi keluarga miskin							1.318,78		1.457,62		1.508,08		1.604,53		1.752,21	
			Persentase keluarga miskin berhak mendapat intervensi sosial yang mendapat intervensi sosial	keluarga	35,20	51,83	51,83		51,83		51,83		51,83		51,83		51,83	PD Pengampu Urusan Sosial
1.06.06	Program Penanganan Bencana	Meningkatnya kualitas perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan pasca bencana bagi korban bencana kabupaten/kota							310,54		379,62		429,62		479,62		529,62	
			Persentase perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan pasca bencana bagi korban bencana Kabupaten/Kota (SPM)	persen	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	PD Pengampu Urusan Sosial
1.06.07	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Meningkatnya kualitas Taman Makam Pahlawan							57,36		253,39		270,91		289,84		310,32	
			Persentase pemeliharaan taman makam pahlawan	persen	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	PD Pengampu Urusan Sosial

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	OUTCOME	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	BASELINE		KINERJA DAN USULAN PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD	PENANGGUNG JAWAB
					Th. 2024	Th. 2025	Th. 2026		Th. 2027		Th. 2028		Th. 2029		Th. 2030			
							Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2	Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar							81.677,01		81.379,60		72.905,99		74.099,61		75.929,44		
2.07	Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja							5.147,16		5.488,89		5.533,63		5.631,17		5.681,81		
2.07.03	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Meningkatnya produktivitas tenaga kerja						4.493,49		4.684,42		4.684,84		4.735,27		4.735,70		
			Tingkat produktivitas tenaga kerja	Rp. Juta per orang	49,89	51,75	51,94		52,11		52,28		52,44		52,59		52,59	PD Pengampu Urusan Tenaga Kerja
2.07.04	Program Penempatan Tenaga Kerja	Meningkatnya kualitas penempatan tenaga kerja						173,43		195,84		200,74		205,75		210,81		
			Persentase tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja dalam wilayah Kabupaten/Kota (IKK Outcome)	persen	33,00	33,50	34,00		34,50		35,00		35,50		36,00		36,00	PD Pengampu Urusan Tenaga Kerja
2.07.05	Program Hubungan Industrial	Meningkatnya kualitas hubungan industrial						480,24		608,63		648,06		690,15		735,30		
			Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan) (IKK Outcome)	persen	11,59	12,20	12,80		13,21		13,62		14,02		14,43		14,43	PD Pengampu Urusan Tenaga Kerja
2.08	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak							455,56		549,18		597,98		646,78		695,86		
2.08.02	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Meningkatnya partisipasi lembaga kemasyarakatan kelurahan dalam pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan						89,36		113,62		123,55		133,49		143,43		
			Persentase lembaga kemasyarakatan kelurahan yang teradvokasi	persen	N/A	N/A	14,29		28,57		42,86		57,14		71,43		71,43	PD Pengampu Urusan PPA
2.08.03	Program Perlindungan Perempuan	Menurunnya kekerasan terhadap perempuan						93,22		102,35		111,65		120,95		130,26		
			Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	Rasio per 100.000	18,46	18,46	18,46		18,46		18,46		18,46		18,46		18,46	PD Pengampu Urusan PPA
2.08.04	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Terwujudnya keluarga yang berkualitas						23,90		32,94		35,21		37,47		39,73		
			Persentase layanan permasalahan keluarga yang terlayani	persen	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	PD Pengampu Urusan PPA
2.08.06	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Meningkatnya pemenuhan hak anak						176,53		220,48		240,52		260,56		280,88		
			Skor kota layak anak	skor	769,80	769,90	769,90		770,00		770,1		770,20		770,30		770,30	PD Pengampu Urusan PPA
2.08.07	Program Perlindungan Khusus Anak	Meningkatnya kualitas layanan perlindungan khusus anak						72,54		79,80		87,05		94,31		101,56		

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	OUTCOME	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	BASELINE		KINERJA DAN USULAN PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD	PENANGGUNG JAWAB
					Th. 2024	Th. 2025	Th. 2026		Th. 2027		Th. 2028		Th. 2029		Th. 2030			
							Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Persentase pengaduan kasus anak yang terlayani	persen	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	PD Pengampu Urusan PPA
2.09	Urusan Pemerintahan Bidang Pangan							381,68		367,30		378,31		399,66		402,31		
2.09.03	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Meningkatnya kualitas ketahanan pangan masyarakat						337,68		321,88		331,53		341,47		351,71		
			Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	angka	92,12	92,62	93,12		93,62		94,12		94,62		95,12		95,12	PD Pengampu Urusan Pangan
2.09.04	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Terwujudnya kelurahan tahan pangan						22,50		23,18		23,87		24,59		47,24		
			Persentase kelurahan tahan pangan/sangat tahan pangan	persen	92,59	92,59	92,59		96,30		96,30		96,30		100,00		100,00	PD Pengampu Urusan Pangan
2.09.05	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Meningkatnya mutu keamanan pangan						21,50		22,25		22,91		33,60		3,36		
			Persentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi persyaratan dan mutu keamanan pangan	persen	98,53	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	PD Pengampu Urusan Pangan
2.10	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan							653,81		838,02		838,02		838,02		838,02		
2.10.05	Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan	Meningkatnya permasalahan pertanahan yang tertangani						644,72		738,22		738,22		738,22		738,22		
			Persentase permasalahan pertanahan yang tertangani	persen	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	PD Pengampu Urusan Pertanahan
2.10.06	Program Redistribusi Tanah, dan Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	Meningkatnya kualitas layanan redistribusi tanah serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee						9,09		99,80		99,80		99,80		99,80		
			Persentase tindak lanjut penetapan subjek dan objek redistribusi tanah serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee	persen		75,00	75,00		75,00		75,00		75,00		75,00		75,00	PD Pengampu Urusan Pertanahan
2.11	Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup							26.313,68		17.454,29		18.166,27		18.864,54		19.323,25		
2.11.02	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan lingkungan hidup						0,00		0,00		100,00		200,00		0,00		
			Persentase penyusunan dokumen perencanaan lingkungan hidup	persen	0,00	0,00	0,00		0,00		100,00		100,00		0,00		100,00	PD Pengampu Urusan LH
2.11.03	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Meningkatnya kualitas air sungai yang memenuhi baku mutu						1.136,97		1.396,13		1.397,38		1.398,63		1.399,88		
			Persentase air sungai yang memenuhi baku mutu	persen	45,71	41,67	45,83		50,00		54,17		58,33		62,50		62,50	PD Pengampu Urusan LH

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	OUTCOME	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	BASELINE		KINERJA DAN USULAN PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD	PENANGGUNG JAWAB
					Th. 2024	Th. 2025	Th. 2026		Th. 2027		Th. 2028		Th. 2029		Th. 2030			
							Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2.11.04	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Meningkatnya kualitas RTH Publik						4.794,59		4.711,35		4.711,35		4.711,35		4.711,35		
			Persentase penambahan luasan RTH publik	persen	0,11	0,09	0,05		0,05		0,05		0,05		0,05		0,23	PD Pengampu Urusan LH
2.11.05	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Terwujudnya pengendalian bahan berbahaya dan beracun (B3) sesuai ketentuan peraturan perundangan						1,64		4,50		5,00		5,00		55,00		
			Persentase usaha/ kegiatan yang mengelola limbah B3 sesuai ketentuan peraturan perundangan	persen	71,11	70,83	75,00		81,25		87,50		93,75		100,00		100,00	PD Pengampu Urusan LH
2.11.06	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Terwujudnya pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin PPLH						29,59		44,38		44,38		45,02		48,48		
			Persentase ketercapaian kegiatan pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang Izin lingkungan dan izin PPLH diterbitkan	persen	NA	NA	19,53		19,53		20,31		20,31		20,31		20,31	PD Pengampu Urusan LH
2.11.08	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Meningkatnya pemberdayaan komunitas peduli lingkungan hidup						352,50		352,50		352,50		352,50		352,50		
			Persentase komunitas peduli LH yang aktif	persen	100,00	100,00	33.33		33.33		33.33		40,00		40,00		40,00	PD Pengampu Urusan LH
2.11.09	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap lingkungan hidup						44,35		44,35		44,35		44,35		44,35		
			Persentase sekolah yang memenuhi standar Adiwiyata	persen	5,07	5,99	6,91		7,83		8,76		9,68		10,60		10,60	PD Pengampu Urusan LH
2.11.10	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Terwujudnya layanan pengaduan lingkungan hidup sesuai ketentuan						10,63		10,63		11,31		11,69		11,69		
			Persentase pengaduan lingkungan hidup dari masyarakat yang ditindaklanjuti	persen	NA	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	PD Pengampu Urusan LH
2.11.11	Program Pengelolaan Persampahan	Meningkatnya kualitas pengelolaan sampah						19.943,41		10.890,45		11.500,00		12.096,00		12.700,00		
			Persentase pengelolaan sampah	persen	25,12	21,85	46,75		47,65		48,38		48,51		49,55		49,55	PD Pengampu Urusan LH

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	OUTCOME	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	BASELINE		KINERJA DAN USULAN PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD	PENANGGUNG JAWAB
					Th. 2024	Th. 2025	Th. 2026		Th. 2027		Th. 2028		Th. 2029		Th. 2030			
							Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2.12	Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil							767,17		921,61		970,61		1.009,61		1.053,61		
2.12.02	Program Pendaftaran Penduduk	Meningkatnya kualitas layanan pendaftaran penduduk						334,56		360,00		370,00		390,00		415,00		
			Rata-rata ketercapaian pelayanan pendaftaran penduduk	persen	88,97	88,10	89,94		90,61		91,27		91,94		92,61		92,61	PD Pengampu Urusan Adminduk Capil
2.12.03	Program Pencatatan Sipil	Meningkatnya kualitas layanan pencatatan sipil						361,61		361,61		361,61		361,61		361,61		
			Rata-rata ketercapaian pelayanan pencatatan sipil	persen	89,58	93,85	99,84		99,84		99,85		99,85		99,85		99,85	PD Pengampu Urusan Adminduk Capil
2.12.04	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Meningkatnya pemanfaatan data kependudukan						71,00		200,00		239,00		258,00		277,00		
			Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	OPD	10,00	12,00	13,00		14,00		15,00		16,00		17,00		17,00	PD Pengampu Urusan Adminduk Capil
2.13	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa							1.260,14		1.440,00		1.440,00		1.440,00		1.440,00		
2.13.03	Program Peningkatan Kerja Sama Desa	Meningkatnya kualitas kolaborasi dan pemberdayaan masyarakat						337,47		600,00		600,00		600,00		600,00		
			Persentase ketercapaian fasilitasi kerjasama TNI dan kelurahan	persen	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	PD Pengampu Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2.13.04	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Meningkatnya kualitas administrasi kelurahan						43,79		35,00		35,00		35,00		35,00		
			Persentase kelurahan dengan kriteria cepat berkembang	persen	88,89	88,89	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	PD Pengampu Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2.13.05	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Meningkatnya kualitas pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKK) dalam pembangunan						878,88		805,00		805,00		805,00		805,00		
			Persentase fasilitasi penataan kelembagaan lembaga kemasyarakatan kelurahan (LKK)	persen	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	PD Pengampu Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2.14	Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana							3.502,54		3.662,02		3.714,68		3.769,70		3.827,23		
2.14.02	Program Pengendalian Penduduk	Terwujudnya pengendalian penduduk						201,08		237,90		243,90		250,40		257,40		
			Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR) (IKK)	persen	64,41	64,48	64,55		64,62		64,69		64,76		64,83		64,83	PD Pengampu Urusan KB

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	OUTCOME	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	BASELINE		KINERJA DAN USULAN PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD	PENANGGUNG JAWAB
					Th. 2024	Th. 2025	Th. 2026		Th. 2027		Th. 2028		Th. 2029		Th. 2030			
							Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2.14.03	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Meningkatnya kualitas pembinaan keluarga berencana bagi pasangan usia subur						1.704,30		1.767,32		1.793,98		1.822,50		1.853,03		
			Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmeetneed KB) (IKK)	persen	8,48	9,50	9,25		9,00		8,75		8,50		8,40		8,40	PD Pengampu Urusan KB
2.14.04	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Menurunnya angka kelahiran pada remaja usia 15-19 tahun						1.597,16		1.656,80		1.676,80		1.696,80		1.716,80		
			Persentase angka kelahiran pada remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	angka	9,50	8,30	7,40		6,60		5,90		5,30		4,90		4,90	PD Pengampu Urusan KB
2.15	Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan							19.208,49		18.734,11		19.475,11		18.986,11		19.116,11		
2.15.02	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Meningkatnya kualitas layanan transportasi jalan						19.208,49		18.734,11		19.475,11		18.986,11		19.116,11		
			Persentase kelengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal pada jalan kabupaten/kota (IUP)	persen	21,88	22,77	23,66		24,55		25,45		26,34		27,23		27,23	PD Pengampu Urusan Perhubungan
			Persentase perlintasan sebidang yang tertangani pada jalan kota	persen	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	PD Pengampu Urusan Perhubungan
			Persentase jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji (KBWU) yang melaksanakan uji berkala	persen	63,92	63,94	63,94		63,94		63,94		64,94		63,94		63,94	PD Pengampu Urusan Perhubungan
2.16	Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika							6.481,05		6.893,43		7.220,24		7.547,27		7.874,55		
2.16.02	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan informasi publik						4.174,87		4.131,73		4.327,05		4.522,38		4.717,70		
			Persentase kepuasan masyarakat terhadap pelayanan informasi publik	persen	0,00	20,00	21,00		22,00		23,00		24,00		25,00		25,00	PD Pengampu Urusan Kominfo
2.16.03	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Meningkatnya kematangan SPBE, layanan pusat data, dan jaringan intra pemerintah daerah						2.306,18		2.761,70		2.893,19		3.024,90		3.156,85		
			Tingkat kematangan pembangunan aplikasi SPBE	nilai	4,00	4,00	4,00		4,00		4,00		4,00		5,00		5,00	PD Pengampu Urusan Kominfo
			Tingkat kematangan layanan pusat data	nilai	4,00	4,00	4,00		4,00		4,00		4,00		5,00		5,00	PD Pengampu Urusan Kominfo
			Tingkat kematangan layanan jaringan intra pemerintah daerah	nilai	3,00	3,00	4,00		4,00		4,00		4,00		5,00		5,00	PD Pengampu Urusan Kominfo
2.17	Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah							892,30		890,63		854,81		919,20		883,80		
2.17.03	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Meningkatnya kualitas dan kesehatan koperasi						129,80		176,43		130,61		185,00		139,60		
			Persentase koperasi dengan predikat *sehat*	persen	57,42	50,00	50,54		51,08		51,60		52,11		52,60		52,60	PD Pengampu Urusan Koperasi, UKM
2.17.05	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Meningkatnya kualitas SDM koperasi						29,20		29,20		29,20		29,20		29,20		

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	OUTCOME	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	BASELINE		KINERJA DAN USULAN PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD	PENANGGUNG JAWAB
					Th. 2024	Th. 2025	Th. 2026		Th. 2027		Th. 2028		Th. 2029		Th. 2030			
							Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Persentase SDM koperasi yang memiliki kompetensi bidang perkoperasian	persen	8,06	6,87	6,79		6,72		6,65		6,58		6,51		6,51	PD Pengampu Urusan Koperasi, UKM
2.17.08	Program Pengembangan Umkm	Meningkatnya kualitas dan kuantitas UMKM						733,30		685,00		695,00		705,00		715,00		
			Persentase pengembangan UMKM dengan orientasi peningkatan skala usaha	persen	40,33	40,29	30,78		31,40		32,03		32,66		33,32		33,32	PD Pengampu Urusan Koperasi, UKM
2.18	Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal							943,54		1.298,93		1.314,63		1.381,86		1.526,19		
2.18.02	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Meningkatnya realisasi investasi						26,30		85,47		38,34		42,70		105,99		
			Persentase realisasi investasi terhadap total realisasi investasi selama periode RPJMD (Tahun 2026-2030)	persen	N/A	N/A	19,60		39,40		59,40		79,60		100,00		100,00	PD Pengampu Urusan Penanaman Modal
2.18.03	Program Promosi Penanaman Modal	Meningkatnya investor						15,00		81,84		101,90		108,56		119,84		
			Pertumbuhan investor	persen	47,45	22,46	13,62		12,39		11,38		10,53		9,82		9,82	PD Pengampu Urusan Penanaman Modal
2.18.04	Program Pelayanan Penanaman Modal	Meningkatnya kualitas layanan penanaman modal						709,87		795,47		814,48		829,85		842,81		
			Persentase penerbitan perizinan dan non perizinan berusaha yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota	persen	91,63	91,73	91,83		91,93		92,03		92,13		92,23		92,23	PD Pengampu Urusan Penanaman Modal
2.18.05	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Meningkatnya kualitas pengendalian penanaman modal						99,02		216,66		235,73		267,17		309,87		
			Persentase pelaku usaha yang melaporkan LKPM	persen	38,46	44,00	45,00		46,00		47,00		48,00		49,00		49,00	PD Pengampu Urusan Penanaman Modal
2.18.06	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Meningkatnya kualitas Data dan Informasi Penanaman Modal						93,36		119,49		124,19		133,59		147,69		
			Persentase pemanfaatan data dan informasi penanaman modal	persen	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	PD Pengampu Urusan Penanaman Modal
2.19	Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga							10.782,50		16.952,00		6.212,00		6.272,00		6.432,00		
2.19.02	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Meningkatnya kapasitas daya saing kepemudaan						4.083,00		332,00		342,00		352,00		362,00		

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	OUTCOME	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	BASELINE		KINERJA DAN USULAN PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD	PENANGGUNG JAWAB
					Th. 2024	Th. 2025	Th. 2026		Th. 2027		Th. 2028		Th. 2029		Th. 2030			
							Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Persentase anggota organisasi kepemudaan yang dibina	persen	55,12	55,12	56,10		57,07		58,05		59,02		60,00		60,00	PD Pengampu Urusan Kepemudaan dan Olahraga
2.19.03	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Meningkatnya kapasitas daya saing keolahragaan						6.599,50		16.520,00		5.770,00		5.820,00		5.970,00		
			Persentase cabor yang memiliki sarpras olahraga	persen	N/A	42,00	43,00		44,00		45,00		46,00		47,00		47,00	PD Pengampu Urusan Kepemudaan dan Olahraga
2.19.04	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Meningkatnya kapasitas Kepramukaan						100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
			Persentase kegiatan kepramukaan yang dilaksanakan pada tahun N	persen	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	PD Pengampu Urusan Kepemudaan dan Olahraga
2.20	Urusan Pemerintahan Bidang Statistik							107,46		114,00		120,50		132,50		140,50		
2.20.02	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Terwujudnya akurasi data statistik sektoral						107,46		114,00		120,50		132,50		140,50		
			Persentase ketersediaan data statistik sektoral	persen	98,48	95,00	95,50		96,00		96,50		97,00		98,00		98,00	PD Pengampu Urusan Statistik
2.21	Urusan Pemerintahan Bidang Persandian							179,77		193,20		202,20		211,20		221,20		
2.21.02	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Terwujudnya keamanan informasi						179,77		193,20		202,20		211,20		221,20		
			Nilai kematangan penerapan manajemen keamanan informasi	nilai	4,00	4,00	4,00		4,00		4,00		4,00		5,00		5,00	PD Pengampu Urusan Persandian
2.22	Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan							3.266,56		4.200,00		4.300,00		4.400,00		4.600,00		
2.22.02	Program Pengembangan Kebudayaan	Terwujudnya pengembangan kebudayaan dan seni						1.511,99		1.650,00		1.750,00		1.850,00		2.050,00		
			Persentase event kesenian dan kebudayaan yang disiapkan	persen	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	PD Pengampu Urusan Kebudayaan
2.22.03	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Terwujudnya pengembangan seni tradisional						130,55		200,00		200,00		200,00		200,00		
			Persentase kesenian tradisional yang dilestarikan	persen	83,33	91,67	91,67		91,67		91,67		91,67		100,00		100,00	PD Pengampu Urusan Kebudayaan
2.22.04	Program Pembinaan Sejarah	Terwujudnya pembinaan pelestarian sejarah						20,00		50,00		50,00		50,00		50,00		
			Persentase pembinaan pelestarian sejarah menuju perkembangan obyek wisata budaya	persen	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	PD Pengampu Urusan Kebudayaan

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	OUTCOME	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	BASELINE		KINERJA DAN USULAN PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD	PENANGGUNG JAWAB
					Th. 2024	Th. 2025	Th. 2026		Th. 2027		Th. 2028		Th. 2029		Th. 2030			
							Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2.22.05	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Terwujudnya pelestarian dan pengelolaan Cagar Budaya						20,00		50,00		50,00		50,00		50,00		
			Persentase Cagar Budaya (CB) yang dilestarikan	persen	15,00	19,00	23,00		25,00		27,00		29,00		31,00		31,00	PD Pengampu Urusan Kebudayaan
2.22.06	Program Pengelolaan Permuseuman	Meningkatnya kualitas pengelolaan museum batik						1.584,02		2.250,00		2.250,00		2.250,00		2.250,00		
			Persentase peningkatan jumlah pengunjung museum batik	persen	N/A	5,00	5,00		5,00		5,00		5,00		5,00		5,00	PD Pengampu Urusan Kebudayaan
2.23	Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan							926,81		883,00		1.032,00		1.078,00		1.264,00		
2.23.02	Program Pembinaan Perpustakaan	Meningkatnya tingkat kegemaran membaca masyarakat						926,81		883,00		997,00		1.078,00		1.224,00		
			Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	indeks	80,67	80,87	81,07		81,27		81,47		81,67		81,87		81,87	PD Pengampu Urusan Perpustakaan
			Rasio pengunjung perpustakaan per tahun (penduduk usia 5 - 60 tahun)	persen	63,43	63,63	63,83		64,03		64,23		64,43		64,63		64,63	PD Pengampu Urusan Perpustakaan
2.23.03	Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	Terwujudnya pelestarian koleksi dan naskah kuno						0,00		0,00		35,00		0,00		40,00		
			Persentase koleksi dan naskah kuno yang telah didokumentasikan	naskah	0,00	0,00	0,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	PD Pengampu Urusan Perpustakaan
2.24	Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan							406,78		499,00		535,00		572,00		609,00		
2.24.02	Program Pengelolaan Arsip	Meningkatnya kualitas pengelolaan arsip daerah						254,46		326,00		350,00		375,00		400,00		
			Persentase ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Ps40 dan 59 U 43/2009)	persen	73,63	73,73	73,83		73,93		74,03		74,13		74,23		74,23	PD Pengampu Urusan Perpustakaan
2.24.03	Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	Terwujudnya perlindungan dan penyelamatan arsip						152,32		173,00		185,00		197,00		209,00		
			Persentase keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggung jawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat (IKK Outcome)	persen	33,33	33,43	33,53		33,63		33,73		33,83		33,93		33,93	PD Pengampu Urusan Perpustakaan
3	Urusan Pemerintahan Pilihan							18.903,54		20.774,09		20.286,82		20.673,83		21.092,03		
3.25	Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan							3.584,32		4.460,55		4.511,02		4.559,19		4.626,15		

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	OUTCOME	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	BASELINE		KINERJA DAN USULAN PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD	PENANGGUNG JAWAB
					Th. 2024	Th. 2025	Th. 2026		Th. 2027		Th. 2028		Th. 2029		Th. 2030			
							Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
3.25.03	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Meningkatnya produksi perikanan tangkap						3.026,58		3.664,95		3.715,42		3.763,59		3.830,55		
			Jumlah produksi perikanan tangkap	ton	12.151,22	9.610,21	9.893,24		9.992,18		10.092,10		10.193,02		12.226,34		12.226,34	PD Pengampu Urusan Kelautan dan Perikanan
3.25.04	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Meningkatnya produksi perikanan budidaya						256,21		345,00		345,00		345,00		345,00		
			Jumlah produksi perikanan budidaya	ton	521,82	521,00	526,21		531,47		536,79		542,15		547,58		547,58	PD Pengampu Urusan Kelautan dan Perikanan
3.25.06	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Meningkatnya produksi pengolahan dan pemasaran hasil perikanan						301,53		450,60		450,60		450,60		450,60		
			Jumlah produksi pengolahan dan pemasaran hasil perikanan	ton	29.083,60	29.374,44	29.668,18		29.964,86		30.264,51		30.567,16		30.872,83		30.872,83	PD Pengampu Urusan Kelautan dan Perikanan
3.26	Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata							4.432,66		5.680,00		5.380,00		5.480,00		5.480,00		
3.26.02	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD						2.976,63		3.940,00		3.840,00		3.940,00		3.940,00		
			Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	persen	12,23	11,15	11,61		11,76		11,77		11,78		11,69		11,69	PD Pengampu Urusan Pariwisata
3.26.03	Program Pemasaran Pariwisata	Meningkatnya kunjungan Wisatawan						442,24		365,00		365,00		365,00		365,00		
			Jumlah tamu wisatawan mancanegara	orang	N/A	300,00	300,00		300,00		300,00		300,00		300,00		1.500,00	PD Pengampu Urusan Pariwisata
3.26.04	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Terwujudnya perlindungan HAKI di sektor ekonomi kreatif						15,00		475,00		275,00		275,00		275,00		
			Persentase pendaftaran HAKI di sektor ekonomi kreatif	persen	0,06	0,06	0,08		0,11		0,13		0,15		0,17		0,17	PD Pengampu Urusan Pariwisata
3.26.05	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Meningkatnya kualitas SDM Pariwisata dan ekonomi kreatif						998,78		900,00		900,00		900,00		900,00		
			Persentase SDM pariwisata dan ekonomi kreatif yang dikembangkan kapasitasnya	persen	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	PD Pengampu Urusan Pariwisata
3.27	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian							1.207,46		690,08		715,39		741,34		767,80		
3.27.02	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Meningkatnya Nilai produksi peternakan						317,10		273,68		286,52		299,70		313,11		
			Nilai produksi pertanian pertahun	miliar rupiah	60,27	61,72	62,27		63,27		64,72		65,27		66,27		66,27	PD Pengampu Urusan Pertanian
			Nilai produksi peternakan pertahun	miliar rupiah	273,75	279,83	285,43		291,14		296,97		302,90		308,95		308,95	PD Pengampu Urusan Pertanian

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	OUTCOME	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	BASELINE		KINERJA DAN USULAN PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD	PENANGGUNG JAWAB
					Th. 2024	Th. 2025	Th. 2026		Th. 2027		Th. 2028		Th. 2029		Th. 2030			
							Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
3.27.03	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Meningkatnya kualitas prasarana pertanian dan peternakan						541,48		94,20		97,05		99,96		102,90		
			Persentase prasarana pertanian dan peternakan dalam kondisi baik	persen	59,46	62,16	64,86		67,57		70,27		72,97		75,68		75,68	PD Pengampu Urusan Pertanian
3.27.04	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Meningkatnya layanan penanganan kasus penyakit hewan menular						305,88		277,80		286,11		294,57		303,28		
			Persentase kasus penyakit hewan menular yang tertangani	persen	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	PD Pengampu Urusan Pertanian
3.27.05	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Terwujudnya pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian di daerah						12,00		12,40		12,80		13,20		13,60		
			Persentase pelaksanaan kegiatan pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian kabupaten/ kota	persen	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	PD Pengampu Urusan Pertanian
3.27.07	Program Penyuluhan Pertanian	Meningkatnya kapasitas, kemandirian, dan daya saing kelompok tani						31,00		32,00		32,90		33,90		34,90		
			Persentase kenaikan nilai kelompok tani per tahun	persen	0,00	50,00	50,00		52,00		52,00		55,00		55,00		55,00	PD Pengampu Urusan Pertanian
3.30	Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan							9.506,22		9.077,46		9.256,91		9.443,30		9.635,08		
3.30.02	Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	Terwujudnya legalitas dan pendaftaran sektor perdagangan						3,00		12,50		15,13		18,40		22,20		
			Persentase gudang yang terdaftar	persen	0,00	54.55	59.09		63.64		68.18		72.73		77.27		77.27	PD Pengampu Urusan Perdagangan
3.30.03	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Meningkatnya kualitas sarana distribusi perdagangan						6.829,67		7.090,93		7.090,93		7.090,93		7.090,93		
			Persentase sarana perdagangan yang ditingkatkan kualitasnya	persen	75,00	16.67	25,00		33.33		33.33		50,00		58.33		58.33	PD Pengampu Urusan Perdagangan
			Persentase pembinaan terhadap pedagang kaki lima	persen	0,00	6.25	37.5		56.25		75,00		93.75		100,00		100,00	PD Pengampu Urusan Perdagangan
3.30.04	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Terwujudnya stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting						76,20		164,10		172,30		182,00		191,30		
			Persentase ketersediaan informasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting terkini	persen	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	PD Pengampu Urusan Perdagangan
3.30.05	Program Pengembangan Ekspor	Meningkatnya Volume Ekspor						96,10		160,00		180,00		200,00		220,00		

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	OUTCOME	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	BASELINE		KINERJA DAN USULAN PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD	PENANGGUNG JAWAB
					Th. 2024	Th. 2025	Th. 2026		Th. 2027		Th. 2028		Th. 2029		Th. 2030			
							Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Persentase peningkatan volume ekspor	persen	3,33	0,95	1,42		2,33		2,39		2,44		2,49		2,49	PD Pengampu Urusan Perdagangan
3.30.06	Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	Meningkatnya perlindungan konsumen						219,83		334,94		367,06		402,32		441,04		
			Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	persen	87,20	87,20	87,20		87,20		87,20		87,20		87,20		87,20	PD Pengampu Urusan Perdagangan
3.30.07	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Meningkatnya penggunaan produk dalam negeri						2.281,43		1.315,00		1.431,50		1.549,65		1.669,62		
			Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran	persen	2,25	2,41	2,66		2,94		3,22		3,50		3,78		3,78	PD Pengampu Urusan Perdagangan
3.31	Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian							172,88		866,00		423,50		450,00		583,00		
3.31.02	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Meningkatnya investasi sektor industri						135,15		734,00		279,50		294,00		415,00		
			Nilai investasi sektor industri	miliar rupiah	86,30	86,73	87,16		87,59		88,02		88,45		88,88		88,88	PD Pengampu Urusan Perindustrian
3.31.04	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Meningkatnya kualitas penyediaan data industri						37,73		132,00		144,00		156,00		168,00		
			Peningkatan jumlah industri yang terdata dalam SIINAS	industri	166,00	186,00	206,00		226,00		246,00		266,00		286,00		286,00	PD Pengampu Urusan Perindustrian
4	Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan							45.982,70		44.031,14		44.857,97		47.661,46		46.632,33		
4.01	Sekretariat Daerah							19.024,06		17.072,51		17.899,33		20.702,82		19.673,69		
4.01.02	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Meningkatnya kualitas koordinasi di bidang pemerintahan dan kesejahteraan masyarakat						18.129,90		15.895,53		16.681,86		19.441,50		18.371,37		
			Persentase penyusunan dokumen LPPD dan LKPJ tepat waktu	persen	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	Sekretariat Daerah
			Indeks Reformasi Hukum (IUP)	persen	96,76	96,77	96,78		96,79		96,80		96,81		96,82		96,82	Sekretariat Daerah
			Persentase capaian fasilitasi lembaga kemasyarakatan	persen	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	Sekretariat Daerah
4.01.03	Program Perekonomian dan Pembangunan	Meningkatnya kualitas koordinasi di bidang perekonomian dan pembangunan						894,16		1.176,98		1.217,48		1.261,32		1.302,32		
			Return on Aset (ROA) BUMD	persen	0,66	0,20	0,30		0,40		0,60		0,80		1,00		1,00	Sekretariat Daerah
			Total dana pihak ketiga pada bank milik Kabupaten/Kota per PDRB	persen	0,33	0,34	0,35		0,36		0,37		0,38		0,39		0,39	Sekretariat Daerah
			Total kredit pada bank milik Kabupaten/Kota per PDRB	persen	0,47	0,48	0,49		0,50		0,51		0,52		0,53		0,53	Sekretariat Daerah

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	OUTCOME	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	BASELINE		KINERJA DAN USULAN PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD	PENANGGUNG JAWAB
					Th. 2024	Th. 2025	Th. 2026		Th. 2027		Th. 2028		Th. 2029		Th. 2030			
							Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			tingkat kematangan UKPBJ	level	3,00	3,00	3,00		3,00		3,00		3,00		4,00		4,00	Sekretariat Daerah
4.02	Sekretariat DPRD							26.958,64		26.958,64		26.958,64		26.958,64		26.958,64		
4.02.02	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Meningkatnya kualitas dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD						26.958,64		26.958,64		26.958,64		26.958,64		26.958,64		
			Persentase pembahasan dokumen penganggaran tepat waktu	persen	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	Sekretariat DPRD
			Persentase penetapan ranperda pada tahun N	persen	29,41	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	Sekretariat DPRD
5	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan							10.872,90		12.553,61		13.159,11		13.118,11		13.229,15		
5.01	Perencanaan							791,51		882,34		882,34		932,34		1.017,38		
5.01.02	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan, evaluasi, dan pelaporan tepat waktu						365,16		366,00		366,00		416,00		466,00		
			Persentase ketersediaan dokumen perencanaan tepat waktu	persen	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	PD Pengampu Urusan Perencanaan
			Skor Satu Data Indonesia (SDI)	persen	N/A	71,44	72,44		73,44		74,44		75,44		76,44		76,44	PD Pengampu Urusan Perencanaan
			Persentase ketersediaan dokumen evaluasi dan pelaporan triwulanan tepat waktu	persen	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	PD Pengampu Urusan Perencanaan
5.01.03	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Meningkatnya koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah						426,35		516,34		516,34		516,34		551,38		
			Persentase konsistensi perencanaan pembangunan (Rata-rata nilai keselarasan program pada RKPD-RPJM Daerah, dan Kegiatan/Sub Kegiatan pada Renja-Renstra) bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	persen	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	PD Pengampu Urusan Perencanaan
			Persentase konsistensi perencanaan pembangunan (Rata-rata nilai keselarasan program pada RKPD-RPJM Daerah, dan Kegiatan/Sub Kegiatan pada Renja-Renstra) bidang Perekonomian	persen	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	PD Pengampu Urusan Perencanaan
			Persentase konsistensi perencanaan pembangunan (Rata-rata nilai keselarasan program pada RKPD-RPJM Daerah, dan Kegiatan/Sub Kegiatan	persen	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	PD Pengampu Urusan Perencanaan

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	OUTCOME	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	BASELINE		KINERJA DAN USULAN PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD	PENANGGUNG JAWAB
					Th. 2024	Th. 2025	Th. 2026		Th. 2027		Th. 2028		Th. 2029		Th. 2030			
							Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			pada Renja-Renstra) Bidang Infrastruktur Wilayah															
5.02	Keuangan							7.191,76		8.201,29		8.305,79		8.448,79		8.468,79		
5.02.02	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah yang tepat waktu dan berkualitas						4.976,05		5.160,79		5.160,79		5.160,79		5.160,79		
			Pesentase ketepatan waktu dalam penyusunan APBD	persen	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	PD Pengampu Urusan Keuangan
			Persentase realisasi APBD (belanja pegawai, belanja barang jasa dan belanja modal)	persen	94,34	91,67	91,67		91,67		91,67		91,67		91,67		91,67	PD Pengampu Urusan Keuangan
			Persentase laporan keuangan daerah tepat waktu	persen	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	PD Pengampu Urusan Keuangan
5.02.03	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Meningkatnya pengelolaan barang milik daerah tingkat kota yang akuntabel dan sesuai peraturan perundangan						794,65		1.013,00		1.095,00		1.013,00		1.013,00		
			Persentase SKPD yang tertib penatausahaan BMD yang sesuai peraturan perundang-undangan	persen	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	PD Pengampu Urusan Keuangan
5.02.04	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Meningkatnya kinerja pengelolaan pendapatan daerah						1.421,07		2.027,50		2.050,00		2.275,00		2.295,00		
			Ketetapan Pajak Daerah (non opsen) dan retribusi daerah	miliar rupiah	255,88	257,16	258,44		259,73		261,03		262,34		263,65		263,65	PD Pengampu Urusan Keuangan
			Persentase realisasi PAD	persen	102,35	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	PD Pengampu Urusan Keuangan
5.03	Kepegawaian							880,06		1.167,58		1.188,58		1.209,58		1.210,58		
5.03.02	Program Kepegawaian Daerah	Terwujudnya ASN yang profesional dan berkinerja baik						880,06		1.167,58		1.188,58		1.209,58		1.210,58		
			Persentase keterpenuhan formasi ASN	persen	48,14	49,89	70,00		73,00		75,00		76,00		77,00		77,00	PD Pengampu Urusan Kepegawaian
			Persentase keterisian jabatan manajerial ASN	persen	95,61	90,21	95,00		95,00		95,00		90,00		90,00		90,00	PD Pengampu Urusan Kepegawaian
			Persentase peningkatan kompetensi ASN melalui jalur pendidikan	persen	25,53	26,07	27,00		27,00		27,00		28,00		28,00		28,00	PD Pengampu Urusan Kepegawaian
			Persentase pegawai dengan SKP bernilai minimal baik	persen	99,83	95,00	95,00		95,00		95,00		95,00		95,00		95,00	PD Pengampu Urusan Kepegawaian
5.04	Pendidikan dan Pelatihan							984,34		1.710,00		1.820,00		1.930,00		1.930,00		
5.04.02	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Meningkatnya kompetensi ASN						984,34		1.710,00		1.820,00		1.930,00		1.930,00		
			Persentase ASN berkembang kompetensi dasar, manajerial, dan fungsional	persen	13,20	14,00	50,00		55,00		60,00		65,00		70,00		70,00	PD Pengampu Urusan Kepegawaian
5.05	Penelitian dan Pengembangan							1.025,24		592,40		962,40		597,40		602,40		

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	OUTCOME	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	BASELINE		KINERJA DAN USULAN PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD	PENANGGUNG JAWAB
					Th. 2024	Th. 2025	Th. 2026		Th. 2027		Th. 2028		Th. 2029		Th. 2030			
							Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
5.05.03	Program Riset dan Inovasi Daerah	Meningkatnya kualitas riset dan inovasi daerah						1.025,24		592,40		962,40		597,40		602,40		
			Persentase kajian berbasis bukti dalam penyelesaian permasalahan daerah	persen	66,67	66,67	66,67		66,67		66,67		66,67		66,67		66,67	PD Pengampu Urusan Penelitian dan Pengembangan
6	Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan							800,00		650,00		650,00		650,00		650,00		
6.01	Inspektorat Daerah							800,00		650,00		650,00		650,00		650,00		
6.01.02	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pengawasan internal						300,00		300,00		300,00		300,00		300,00		
			Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) pengawasan akuntabilitas keuangan daerah dan kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang selesai ditindaklanjuti	persen	59,72	80,00	81,00		82,00		83,00		84,00		85,00		85,00	Inspektorat Daerah
			Persentase temuan hasil pengawasan dengan tujuan tertentu yang selesai ditindaklanjuti	persen	46,34	50,00	53,00		55,00		57,00		60,00		65,00		65,00	Inspektorat Daerah
6.01.03	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang bersih						500,00		350,00		350,00		350,00		350,00		
			Indeks pencegahan korupsi daerah (IPKD)	indeks	96,03	96,03	96,05		96,25		96,50		96,75		97,00		97,00	Inspektorat Daerah
7	Unsur Kewilayahan							17.518,00		14.031,70		14.668,32		15.481,03		16.005,31		
7.01	Kecamatan							17.518,00		14.031,70		14.668,32		15.481,03		16.005,31		
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Meningkatnya kualitas layanan Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik						40,00		48,03		49,89		55,67		58,84		
			Persentase kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik di wilayah utara	persen	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	Kec. Pekalongan Utara
			Persentase kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik di wilayah selatan	persen	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	Kec. Pekalongan Selatan
			Persentase kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik di wilayah barat	persen	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	Kec. Pekalongan Barat
			Persentase kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik di wilayah timur	persen	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	Kec. Pekalongan Timur
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat						16.657,37		13.141,79		13.709,72		14.388,50		14.881,70		

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	OUTCOME	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	BASELINE		KINERJA DAN USULAN PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD	PENANGGUNG JAWAB
					Th. 2024	Th. 2025	Th. 2026		Th. 2027		Th. 2028		Th. 2029		Th. 2030			
							Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Persentase Kelurahan yang menyelesaikan laporan kinerja pemberdayaan tepat waktu	persen	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	Kec. Pekalongan Utara
			Persentase kelurahan yang menyelesaikan laporan kinerja pemberdayaan tepat waktu	persen	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	Kec. Pekalongan Utara
			Persentase kelurahan yang menyelesaikan laporan kinerja pemberdayaan tepat waktu	persen	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	Kec. Pekalongan Selatan
			Persentase ketercapaian pemberdayaan masyarakat kelurahan	persen	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	Kec. Pekalongan Selatan
			Persentase Kelurahan yang menyelesaikan laporan kinerja pemberdayaan tepat waktu	persen	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	Kec. Pekalongan Barat
			Persentase ketercapaian pemberdayaan masyarakat kelurahan	persen	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	Kec. Pekalongan Barat
			Persentase kelurahan yang menyelesaikan laporan kinerja pemberdayaan tepat waktu	persen	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	Kec. Pekalongan Timur
			Persentase ketercapaian pemberdayaan masyarakat kelurahan	persen	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	Kec. Pekalongan Timur
7.01.04	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Meningkatnya Ketentraman dan ketertiban umum						803,17		823,05		888,35		1.015,00		1.041,98		
			Persentase kinerja trantibum wilayah utara	persen	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	Kec. Pekalongan Utara
			Persentase kinerja trantibum wilayah selatan	persen	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	Kec. Pekalongan Selatan
			Persentase kinerja trantibum di wilayah barat	persen	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	Kec. Pekalongan Barat
			Persentase kinerja trantibum di wilayah timur	persen	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	Kec. Pekalongan Timur
7.01.05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Meningkatnya kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum						17,47		18,83		20,35		21,87		22,79		
			Persentase kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum di wilayah utara	persen	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	Kec. Pekalongan Utara
			Persentase kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum di wilayah selatan	persen	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	Kec. Pekalongan Selatan
			Persentase kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum di wilayah barat	persen	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	Kec. Pekalongan Barat
			Persentase kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum di wilayah timur	persen	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	Kec. Pekalongan Timur
8	Unsur Pemerintahan Umum							3.350,83		2.420,84		2.420,84		2.620,84		2.420,84		
8.01	Kesatuan Bangsa dan Politik							3.350,83		2.420,84		2.420,84		2.620,84		2.420,84		

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	OUTCOME	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	BASELINE		KINERJA DAN USULAN PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD	PENANGGUNG JAWAB
					Th. 2024	Th. 2025	Th. 2026		Th. 2027		Th. 2028		Th. 2029		Th. 2030			
							Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
8.01.02	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Meningkatnya pemahaman dan pelaksanaan ideologi pancasila dan wawasan kebangsaan						1.518,39		883,03		883,03		883,03		883,03		
			persentase masyarakat yang paham terhadap ideologi pancasila dan wawasan kebangsaan	persen	0,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	PD Pengampu Urusan Kesbangpol
8.01.03	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Meningkatnya kualitas peran partai politik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara						1.187,32		889,40		889,40		1.089,40		889,40		
			Persentase anggota partai politik dan siswa lembaga pendidikan di Kota Pekalongan yang meningkat pemahamannya atas etika dan budaya politik	persen	0,00	85,71	87,76		89,80		91,84		93,88		95,92		95,92	PD Pengampu Urusan Kesbangpol
8.01.04	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Meningkatnya peran organisasi kemasyarakatan dalam pembangunan						258,00		258,00		258,00		258,00		258,00		
			Persentase organisasi kemasyarakatan yang aktif	persen	93,30	93,30	93,30		93,30		93,30		93,30		93,30		93,30	PD Pengampu Urusan Kesbangpol
8.01.05	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Meningkatnya masyarakat yang memahami tentang ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya						98,20		101,48		101,48		101,48		101,48		
			Persentase masyarakat yang memahami tentang ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya	persen	NA	NA	90,43		91,30		92,17		93,04		93,91		93,91	PD Pengampu Urusan Kesbangpol
8.01.06	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Menurunnya konflik sosial						288,93		288,93		288,93		288,93		288,93		
			Persentase konflik sosial yang tertangani	kali	NA	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	PD Pengampu Urusan Kesbangpol
X	Non Urusan							622.336,67		636.040,28		644.119,96		655.199,44		664.161,23		
X.XX	Urusan Pemerintahan Bidang Xx							622.336,67		636.040,28		644.119,96		655.199,44		664.161,23		
X.XX.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan daerah						622.336,67		636.040,28		644.119,96		655.199,44		664.161,23		

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	OUTCOME	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	BASELINE		KINERJA DAN USULAN PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD	PENANGGUNG JAWAB
					Th. 2024	Th. 2025	Th. 2026		Th. 2027		Th. 2028		Th. 2029		Th. 2030			
							Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Persentase keselarasan perencanaan, kinerja evaluasi dan kinerja keuangan perangkat daerah	persen	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	Semua PD
			Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	persen	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	Semua PD
			Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	persen	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	Semua PD
			Persentase ketersediaan layanan BLUD	persen	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	PD Pengampu Urusan Kesehatan
			Nilai Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik	Angka	97,74	97,74	97,74		97,75		97,75		97,76		97,76		97,76	Sekretariat Daerah
			Persentase ketersediaan layanan administrasi keuangan, operasional dan kerumahtanggan Sekretariat Daerah	persen	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	Sekretariat Daerah
			Persentase pelayanan keprotokolan	persen	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	Sekretariat Daerah
			Persentase keselarasan perencanaan, kinerja evaluasi dan kinerja keuangan perangkat daerah	persen	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	Sekretariat DPRD
			Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian,administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	persen	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	Sekretariat DPRD
			Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	persen	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	Sekretariat DPRD
			Persentase ketersediaan layanan administrasi, keuangan dan kesejahteraan DPRD	persen	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	Sekretariat DPRD

Sumber : Bapperida Kota Pekalongan, 2025

4.2. KINERJA PENYELENGGARA PEMERINTAHAN DAERAH

Indikator kinerja daerah disusun untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan indikator kinerja sasaran Visi Misi Wali Kota-Wakil Wali Kota Pekalongan. Indikator ini menjadi alat ukur untuk mengetahui ketercapaian visi dan misi RPJM Daerah Tahun 2025-2029.

Selanjutnya indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dari setiap aspek, fokus menurut bidang urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah kota sesuai dengan kewenangan. Indikator kinerja daerah secara teknis pada dasarnya dirumuskan dengan mengambil indikator dari Program Perangkat Daerah yang telah ditetapkan (*Outcome*) atau komposisinya (*impact*). Suatu indikator kinerja daerah dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program (*Outcome*) terhadap tingkat capaian indikator kinerja daerah berkenaan setelah program dan kegiatan prioritas ditetapkan.

Indikator Kinerja Utama Kota Pekalongan disajikan dalam tabel IV-2, sedangkan tabel Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan disajikan dalam tabel IV-3.

Tabel IV-2
Penetapan Indikator Kinerja Utama Kota Pekalongan

NO	INDIKATOR SASARAN (INDIKATOR KINERJA UTAMA)	SATUAN	BASELINE		TARGET KINERJA					KONDISI AKHIR RPJMD	PERANGKAT DAERAH KOORDINATOR
			Tahun 2024 (R)	Tahun 2025 (T)	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Tahun 2030		
1	Nilai SAKIP Kota	nilai	73,02	74,41	75,81	77,21	78,60	80,00	81,40	81,40	Sekretariat Daerah
2	Opini BPK atas laporan keuangan	kategori	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	Sekretariat Daerah
3	Indeks Integritas Nasional (IIN) (IUP)	indeks	82,25	82,25	82,25	82,25	82,25	82,25	82,25	82,25	Sekretariat Daerah
4	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kota	indeks	91,37	91,38	91,39	91,40	91,41	91,42	91,43	91,43	Sekretariat Daerah
5	Indeks Pelayanan Publik (IPP) (IUP)	indeks	4,59	4,59	4,59	4,59	4,59	4,59	4,59	4,59	Sekretariat Daerah
6	Rata-rata lama sekolah penduduk di atas 15 tahun (IUP)	tahun	9,62	9,68	9,74	9,80	9,86	9,92	9,98	9,98	Sekretariat Daerah
7	Persentase satuan pendidikan yang menerapkan pendidikan karakter dan pendidikan keagamaan	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Sekretariat Daerah
8	Usia Harapan Hidup (UHH) (IUP)	tahun	74,79	74,86	75,08	75,30	75,51	75,73	75,95	75,95	Sekretariat Daerah
9	Nilai realisasi investasi tahun N	miliar rupiah	238,05	491,75	180,00	181,80	183,62	185,45	187,31	187,31	Sekretariat Daerah
10	Pertumbuhan PDRB lapangan usaha perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor	persen	3,74	3,32	3,35	3,39	3,42	3,45	3,49	3,49	Sekretariat Daerah
11	Pertumbuhan PDRB lapangan usaha industri pengolahan	persen	0,79	2,30	2,38	2,46	2,54	2,62	2,70	2,70	Sekretariat Daerah
12	Pertumbuhan PDRB sektor penyediaan akomodasi dan makan minum	persen	9,26	9,89	10,00	11,00	11,50	12,00	13,00	13,00	Sekretariat Daerah
13	Persentase populasi PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial)	persen	7,52	7,50	7,38	7,27	7,16	7,04	6,92	6,92	Sekretariat Daerah
14	Tingkat Pengangguran Terbuka (IUP)	persen	4,91	5,05 - 4,47	5,01 - 4,35	4,98 - 4,24	4,94 - 4,12	4,90 - 4,00	4,86 - 3,88	4,86 - 3,88	Sekretariat Daerah
15	Indeks ketimpangan gender (IKG) (IUP)	angka	0,18	0,185 - 0,176	0,183 - 0,167	0,182 - 0,158	0,181 - 0,149	0,180 - 0,140	0,179 - 0,131	0,179 - 0,131	Sekretariat Daerah
16	Kategori kota layak anak	Kategori	Nindya	Nindya	Nindya	Nindya	Nindya	Nindya	Nindya	Nindya	Sekretariat Daerah

Sumber : Bapperida Kota Pekalongan, 2025

Tabel IV-3
Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan
Urusan Pemerintahan Kota Pekalongan

ASPEK/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN		SATUAN	BASELINE		TARGET KINERJA					KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD	KETERANGAN
			Tahun 2024 (R)	Tahun 2025 (T)	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Tahun 2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A. ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI											
	- Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IUP)	indeks	59,15	64,14	64,16	64,19	64,21	64,24	64,26	64,26	IUP / Indikator Tujuan
	- Timbulan sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah (IUP)	persen	12,56	47,35	90,82	93,26	95,65	96,26	96,85	96,85	IUP / IKU Renstra
	- Akses rumah tangga perkotaan terhadap air siap minum perpipaan (IUP)	persen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,16	0,32	0,32	IUP
	- Penurunan Emisi GRK (IUP)	TonCO2eq	NA	950.947,74	1.608.660,37	2.266.373,00	2.924.085,63	3.581.798,26	4.239.510,90	4.239.510,90	IUP
B. ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT											
	- Tingkat kemiskinan (IUP)	persen	6,71	6,27 - 6,70	5,96 - 6,59	5,65 - 6,49	5,33 - 6,38	5,02 - 6,27	4,71 - 6,16	4,71 - 6,16	IUP / Indikator Tujuan Kota
	- Pertumbuhan ekonomi	persen	5,34	5,44 - 6,00	5,7 - 6,20	5,7 - 7,20	5,7 - 7,20	5,7 - 7,70	5,7 - 8,10	5,7 - 8,10	IUP / Indikator Tujuan Kota
	- Indeks gini	indeks	0,33	0,321 - 0,31	0,32 - 0,3	0,32 - 0,29	0,31 - 0,28	0,31 - 0,27	0,31 - 0,26	0,31 - 0,26	IUP
	- Tingkat pengangguran terbuka (IUP)	persen	4,91	5,05 - 4,47	5,01 - 4,35	4,98 - 4,24	4,94 - 4,12	4,90 - 4,00	4,86 - 3,88	4,86 - 3,88	IUP / IKU Kota
	- Indeks pembangunan keluarga (Ibangga) (IUP)	angka	65,92	65,91 - 65,92	66,68 - 66,71	67,46 - 67,49	68,23 - 68,28	69,00 - 69,06	69,77 - 69,85	69,77 - 69,85	IUP / Indikator Tujuan OPD
	- Indeks ketimpangan gender (IKG) (IUP)	angka	0,18	0,185 - 0,176	0,183 - 0,167	0,182 - 0,158	0,181 - 0,149	0,180 - 0,140	0,179 - 0,131	0,179 - 0,131	IKU Kota
	- Usia Harapan Hidup (UHH) (IUP)	tahun	74,79	74,86	75,08	75,30	75,51	75,73	75,95	75,95	IUP / IKU Kota / Indikator Tujuan OPD
	- Jumlah kasus kematian ibu (IUP)	kasus	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	4,00	4,00	4,00	IUP
	- Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (IUP)	persen	19,30	18,44	17,58	16,72	15,86	15,00	14,14	14,14	IUP
	- Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (<i>treatment coverage</i>) (IUP)	persen	73,06	90,03	90,55	90,97	91,54	92,05	92,53	92,53	IUP
	- Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (<i>treatment success rate</i>) (IUP)	persen	91,06	91,15	91,22	91,30	91,43	91,48	91,62	91,62	IUP
	- Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (IUP)	persen	98,32	98,43	98,54	98,65	98,76	98,86	99,00	99,00	IUP

ASPEK/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN		SATUAN	BASELINE		TARGET KINERJA					KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD	KETERANGAN
			Tahun 2024 (R)	Tahun 2025 (T)	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Tahun 2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan (<i>prevalence of undernourishment</i>) (IUP)	persen	5,05	5,01	4,97	4,93	4,88	4,84	4,80	4,80	IUP / Indikator Tujuan OPD
	- Indeks Ketahanan Pangan (IKP) (IUP)	angka	78,27	80,09	80,34	80,59	80,84	81,09	82,09	82,09	IUP / IKU Renstra
	- Harapan lama sekolah (IUP)	tahun	12,89	12,96	12,98	13,01	13,03	13,06	13,09	13,09	IUP
	- Rata-rata lama sekolah penduduk di atas 15 tahun (IUP)	tahun	9,62	9,68	9,74	9,80	9,86	9,92	9,98	9,98	IUP / IKU Kota
	- Angka partisipasi sekolah 5 - 6 tahun (IUP)	persen	90,58	91,87	93,15	94,44	95,73	97,01	100,00	100,00	IUP
	- Literasi membaca SD/Sederajat (IUP)	persen	72,80	73,30	73,30	73,80	73,80	74,30	74,80	74,80	IUP
	- Literasi membaca SMP/Sederajat (IUP)	persen	79,10	80,10	80,10	81,10	81,10	82,10	83,10	83,10	IUP
	- Numerasi SD/Sederajat (IUP)	persen	71,70	71,70	72,20	72,70	73,20	73,70	74,20	74,20	IUP
	- Numerasi SMP/Sederajat (IUP)	persen	76,86	77,86	77,86	78,86	78,86	79,86	80,86	80,86	IUP
	- Persentase satuan pendidikan yang menerapkan pendidikan karakter dan pendidikan keagamaan	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	IKU Kota
	- Persentase Cagar Budaya (CB) dan Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) yang dilestarikan (IUP)	persen	NA	21,00	23,00	25,00	27,00	29,00	31,00	31,00	IUP
	- Jumlah pengunjung tempat bersejarah (IUP)	orang	44.532	53.864	56.864	59.864	62.864	65.864	68.864	68.864	IUP
	- Persentase kelompok kesenian yang aktif terlibat/mengadakan pertunjukan kesenian dalam 1 tahun terakhir (IUP)	persen	NA	42,42	42,54	42,65	42,75	42,86	42,96	42,96	IUP
	- Persentase populasi PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial)	persen	7,52	7,50	7,38	7,27	7,16	7,04	6,92	6,92	IKU Kota
	- Kategori kota layak anak	kategori	Nindya	Nindya	Nindya	Nindya	Nindya	Nindya	Nindya	Nindya	IKU Kota
	- Tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan (IUP)	persen	NA	58,69	59,69	60,70	61,70	62,70	63,70	63,70	IUP
C. ASPEK DAYA SAING DAERAH											
	- Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	indeks	77,21	77,39	77,88	78,38	78,87	79,36	79,85	79,85	IUP / Indikator Tujuan Kota
	- Kapabilitas inovasi (IUP)	angka	2,75	2,76-3,00	2,77-3,06	2,78-3,13	2,79-3,19	2,80-3,25	2,81-3,31	2,81-3,31	IUP
	- Indeks daya saing daerah (IUP)	indeks	3,87	3,60-3,90	3,63-3,93	3,65-3,96	3,68-3,99	3,70-4,02	3,73-4,05	3,73-4,05	IUP
	- Rasio kewirausahaan daerah (IUP)	persen	NA	2,97	3,11	3,24	3,42	3,49	3,63	3,63	IUP / Indikator Tujuan OPD
	- Rasio volume usaha koperasi terhadap PDRB (IUP)	persen	NA	1,85	1,88	1,89	1,94	2,00	2,03	2,03	IUP / Indikator Tujuan OPD
	- Return on Aset (ROA) BUMD (IUP)	persen	0,66	0,20	0,30	0,40	0,60	0,80	1,00	1,00	IUP / Indikator Program

ASPEK/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN		SATUAN	BASELINE		TARGET KINERJA					KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD	KETERANGAN
			Tahun 2024 (R)	Tahun 2025 (T)	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Tahun 2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- Cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan (IUP)	persen	35,61	37,50	38,93	40,35	41,38	43,20	45,02	45,02	IUP
	- Jumlah tamu wisatawan mancanegara (IUP)	orang	499,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	IUP / Indikator Program
	- Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Perkapita Kabupaten/Kota (IUP)	juta rupiah	45,99	46,43 - 49,29	51,24 - 54,1	56,06 - 58,92	60,87 - 63,73	83,71 - 92,33	70,5 - 73,36	70,5 - 73,36	IUP
	- Persentase rumah tangga dengan akses internet (IUP)	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	IUP
	- Distribusi Pengeluaran Berdasarkan Kriteria Bank Dunia (IUP)	persen	N/A	22,21 - 22,41	22,26 - 22,86	22,31 - 23,31	22,36 - 23,76	22,41 - 24,21	22,46 - 24,66	22,46 - 24,66	IUP / Indikator Program
	- Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB) (IUP)	persen	39,15	39,15	39,15	39,15	39,15	39,15	39,15	39,15	IUP / Indikator Program
	- Nilai realisasi investasi tahun N	miliar rupiah	238,05	491,75	180,00	181,80	183,62	185,45	187,31	187,31	IKU Kota
	- Persentase Panjang Jalan Kondisi Permukaan Mantap Kewenangan Kabupaten/Kota (IUP)	persen	84,50	79,02	79,26	79,49	79,73	79,97	80,21	80,21	IUP / IKU Renstra
	- Persentase Kelengkapan Jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal pada jalan kabupaten / kota (IUP)	persen	21,88	22,77	23,66	24,55	25,45	26,34	27,23	27,23	IUP / Indikator Program
	- Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman (IUP)	persen	0,58	0,77	0,96	1,16	1,35	1,55	1,74	1,74	IUP / IKU Renstra
	- Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak (IUP)	persen	86,88	87,46	88,04	88,63	89,21	89,79	90,37	90,37	IUP / Indikator Program
	- Rasio Pajak Daerah Terhadap PDRB (IUP)	persen	0,76	0,88	0,85	0,79	0,74	0,69	0,64	0,64	IUP
	- Total Dana Pihak Ketiga pada Bank Milik Kabupaten / Kota per PDRB (IUP)	persen	0,33	0,34	0,35	0,36	0,37	0,38	0,39	0,39	IUP / Indikator Program
	- Total Kredit pada Bank Milik Kabupaten / Kota per PDRB (IUP)	persen	0,47	0,48	0,49	0,50	0,51	0,52	0,53	0,53	IUP / Indikator Program
	- Pertumbuhan PDRB lapangan usaha perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor	persen	3,74	3,32	3,35	3,39	3,42	3,45	3,49	3,49	IKU Kota
	- Pertumbuhan PDRB lapangan usaha industri pengolahan	persen	0,79	2,30	2,38	2,46	2,54	2,62	2,70	2,70	IKU Kota
	- Pertumbuhan PDRB sektor penyediaan akomodasi dan makan minum	persen	9,26	9,89	10,00	11,00	11,50	12,00	13,00	13,00	IKU Kota

ASPEK/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN		SATUAN	BASELINE		TARGET KINERJA					KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD	KETERANGAN
			Tahun 2024 (R)	Tahun 2025 (T)	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Tahun 2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
D. ASPEK PELAYANAN UMUM											
	- Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) (IUP)	indeks	3,76	3,76	3,87	3,87	4,07	4,07	4,22	4,22	IUP / Indikator Tujuan OPD
	- Indeks Reformasi Birokrasi	indeks	87,25	87,31	87,33	87,34	87,35	87,36	87,37	87,37	IUP / Indikator Tujuan Kota
	- Nilai SAKIP Kota	nilai	73,02	74,41	75,81	77,21	78,60	80,00	81,40	81,40	IKU Kota
	- Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kota	indeks	91,37	91,38	91,39	91,40	91,41	91,42	91,43	91,43	IKU Kota
	- Indeks Pelayanan Publik (IPP) (IUP)	indeks	4,59	4,59	4,59	4,59	4,59	4,59	4,59	4,59	IKU Kota
	- Indeks Integritas Nasional (IIN) (IUP)	indeks	82,25	82,25	82,25	82,25	82,25	82,25	82,25	82,25	IKU Kota
	- Indeks Reformasi Hukum (IUP)	indeks	96,76	96,77	96,78	96,79	96,80	96,81	96,82	96,82	IUP / Indikator Program
	- Opini BPK atas laporan keuangan	kategori	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	IKU Kota
E. INDIKATOR KINERJA UTAMA/INDIKATOR KINERJA KUNCI PERANGKAT DAERAH											
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN										
	- Indeks SPM Pendidikan	persen	99,12	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	IKU Renstra
	- Persentase satuan pendidikan yang memiliki dan mengimplementasikan dokumen Kurikulum Satuan Pendidikan (KSP) untuk pengembangan karakter dan keagamaan	persen	NA	NA	55,00	60,00	65,00	70,00	75,00	75,00	IKU Renstra
	- Nilai SAKIP OPD	nilai	78,45	78,47	78,49	78,51	78,53	78,55	78,57	78,57	IKU Renstra
	- Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	persen	101,29	98,41	98,51	98,61	98,71	98,81	98,91	98,91	IKK
	- Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	persen	102,49	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	IKK
	- Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	persen	99,05	99,15	99,25	99,35	99,45	99,55	99,65	99,65	IKK
	- Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	persen	54,40	55,40	56,40	57,40	58,40	59,40	60,40	60,40	IKK

ASPEK/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN		SATUAN	BASELINE		TARGET KINERJA					KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD	KETERANGAN
			Tahun 2024 (R)	Tahun 2025 (T)	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Tahun 2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN										
	- Persentase capaian SPM Kesehatan	persen	97,80	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	IKU Renstra
	- Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	persen	NA	54,05	54,05	54,05	64,86	64,86	75,68	75,68	IKU Renstra
	- Nilai SAKIP OPD	nilai	83,20	83,22	83,24	83,26	83,28	83,30	83,32	83,32	IKU Renstra
	- Rasio daya tampung Rumah Sakit Rujukan	rasio	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,26	0,26	0,26	IKK
	- Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	IKK
	- Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	IKK
	- Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	IKK
	- Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	persen	99,53	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	IKK
	- Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	IKK
	- Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	IKK
	- Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	persen	90,35	90,75	91,25	91,75	92,25	92,75	93,25	93,25	IKK
	- Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	persen	98,64	99,14	99,64	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	IKK
	- Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	persen	81,68	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	IKK
	- Persentase penderita Diabetes Melitus (DM) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	IKK
	- Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	IKK
	- Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	IKK
	- Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	IKK

1	ASPEK/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN	SATUAN	BASELINE		TARGET KINERJA					KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD	KETERANGAN
			Tahun 2024 (R)	Tahun 2025 (T)	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Tahun 2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG											
	- Persentase Rumah yang Terlayani Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Perpipaan di daerah kab/kota	persen	34,11	34,99	35,07	35,20	35,33	35,46	35,59	35,59	IKU Renstra
	- Persentase pemenuhan prasarana persampahan	persen	72,73	81,82	84,85	87,88	90,91	93,94	100,00	100,00	IKU Renstra
	- Persentase wilayah kota yang bebas dari genangan banjir / rob	persen	91,83	91,83	94,24	94,89	95,44	96,44	99,47	99,47	IKU Renstra
	- Persentase pengawasan penataan ruang, bangunan gedung dan jasa konstruksi	persen	NA	88,77	89,22	89,52	90,02	90,32	90,82	90,82	IKU Renstra
	- Nilai SAKIP OPD	nilai	81,25	84,55	84,67	84,69	84,71	84,73	84,75	84,75	IKU Renstra
	- Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di Wilayah Sungai Kewenangan Kab/Kota	persen	80,07	86,43	87,12	88,57	89,80	92,05	98,81	98,81	IKK
	- Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kab/Kota	persen	100,00	92,83	92,83	93,52	94,25	94,84	99,47	99,47	IKK
	- Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	persen	86,64	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	IKK
	- Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	IKK
	- Rasio kepatuhan IMB Kabupaten/ kota	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	IKK
	- Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten/kota	persen	84,50	79,02	79,26	79,49	79,73	79,97	80,21	80,21	IKK
	- Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	persen	19,00	25,63	15,59	22,76	27,42	34,59	35,30	35,30	IKK
	- Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	IKK
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN											
	- Persentase pemenuhan sarpras dan utilitas perumahan dan kawasan permukiman yang berkualitas	persen	61,12	61,80	62,49	63,17	63,86	64,54	65,23	65,23	IKU Renstra
	- Nilai SAKIP OPD	nilai	74,75	74,77	74,79	74,81	74,83	74,85	74,87	74,87	IKU Renstra

ASPEK/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN		SATUAN	BASELINE		TARGET KINERJA					KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD	KETERANGAN
			Tahun 2024 (R)	Tahun 2025 (T)	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Tahun 2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	IKK
	- Fasilitas hunian penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	IKK
	- Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kab/ kota yang ditangani	persen	2,72	2,51	2,29	2,07	1,86	1,64	1,43	1,43	IKK
	- Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	persen	59,00	65,00	71,00	77,00	83,00	89,00	97,00	97,00	IKK
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT											
	- Persentase penegakan perda dan penyelenggaraan trantibum	persen	96,96	97,00	97,50	98,00	98,50	99,00	100,00	100,00	IKU Renstra
	- Rata-rata <i>response time rate</i> (tingkat waktu tanggap) terhadap wilayah manajemen kebakaran	menit	9,41	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	IKU Renstra
	- Indeks Ketahanan Daerah	indeks	0,58	0,59	0,60	0,61	0,62	0,63	0,63	0,63	IKU Renstra
	- Nilai SAKIP OPD	nilai	74,25	75,00	75,52	75,54	75,56	75,58	75,60	75,60	IKU Renstra Satpol P3KP
	- Nilai SAKIP OPD	nilai	75,45	76,00	76,52	76,54	76,56	76,58	76,60	76,60	IKU Renstra BPBD
	- Persentase penanganan gangguan trantibum (IKK outcome)	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	IKK
	- Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	persen	72,73	90,91	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	IKK
	- Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	IKK
	- Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	persen	0,33	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	IKK
	- Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	IKK
	- Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	IKK
	- Waktu tanggap (<i>response time</i>) penanganan kebakaran	menit	9,41	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	IKK

ASPEK/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN		SATUAN	BASELINE		TARGET KINERJA					KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD	KETERANGAN
			Tahun 2024 (R)	Tahun 2025 (T)	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Tahun 2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL										
	- Persentase PPKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	IKU Renstra
	- Jumlah keluarga miskin penerima perlindungan sosial yang tergraduasi dari kemiskinan	persen	240,00	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00	IKU Renstra
	- Nilai SAKIP OPD	nilai	75,90	75,92	75,94	75,96	75,98	76,00	76,02	76,02	IKU Renstra
	- Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM)	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	IKK
	- Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	IKK
	- TFR (Angka Kelahiran Total)	angka	2,19	2,18	2,18	2,17	2,17	2,16	2,16	2,16	IKK
	- Indeks Lansia Berdaya	Indeks	NA	58,40	58,90	59,30	59,70	60,10	60,50	60,50	IKK
	- Indeks Kesejahteraan Sosial (IKESOS)	Indeks	NA	62,00	63,00	64,00	65,00	66,00	67,00	67,00	IKK
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA										
	- Persentase calon tenaga kerja hasil pelatihan yang bersertifikat kompetensi	persen	88,49	89,00	89,20	89,40	89,60	89,80	90,00	90,00	IKU Renstra
	- Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	persen	NA	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	IKK
	- Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	persen	0,14	0,34	0,54	0,74	0,94	1,14	1,34	1,34	IKK
	- Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	juta rupiah per orang	49,89	51,75	51,94	52,11	52,28	52,44	52,59	52,59	IKK
	- Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan).	persen	11,59	12,20	12,80	13,21	13,62	14,02	14,43	14,43	IKK
	- Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten/kota	persen	33,00	33,50	34,00	34,50	35,00	35,50	36,00	36,00	IKK

ASPEK/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN		SATUAN	BASELINE		TARGET KINERJA					KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD	KETERANGAN
			Tahun 2024 (R)	Tahun 2025 (T)	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Tahun 2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di kab/kota	persen	9,97	2,40	0,78	0,78	0,77	0,76	0,76	0,76	IKK
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK										
	- Indeks Pembangunan Gender (IPG)	indeks	95,56	95,66	95,76	95,86	95,96	96,06	96,16	96,16	IKU Renstra
	- Persentase pendampingn pemenuhan hak anak (kelembagaan, hak sipil dan kebebasan, lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, kesehatan dasar dan kesejahteraan, pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya serta perlindungan khusus)	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	IKU Renstra
	- Persentase ARG pada belanja langsung APBD	persen	1,88	3,92	3,95	3,96	3,98	3,99	4,02	4,02	IKK
	- Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten/kota	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	IKK
	- Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	rasio per 100.000	18,46	15,01	18,46	18,46	18,46	18,46	18,46	18,46	IKK
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN										
	- Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/ jagung sesuai kebutuhan)	persen	45,33	50,00	52,50	55,00	57,50	60,00	62,50	62,50	IKK
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN										
	- Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum (IKK)	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	IKU Renstra
	- Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	IKK
	- Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	IKK
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP										
	- Indeks Kualitas Air (IKK)	indeks	50,56	59,42	59,47	59,52	59,57	59,62	59,67	59,67	IKU Renstra
	- Indeks Kualitas Udara	indeks	84,98	82,84	82,85	82,86	82,87	82,88	82,89	82,89	IKU Renstra
	- Indeks Kualitas Lahan (IKK)	indeks	26,14	37,65	37,66	37,67	37,68	37,69	37,70	37,70	IKU Renstra
	- Tertib hukum lingkungan hidup	persen	16,67	16,67	48,00	52,00	53,85	57,69	61,54	61,54	IKU Renstra
	- Nilai SAKIP OPD	nilai	85,45	86,30	86,57	86,59	86,61	86,63	86,65	86,65	IKU Renstra
	- Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan	persen	76,12	64,44	64,44	64,44	6,67	6,67	6,67	6,67	IKK

ASPEK/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN		SATUAN	BASELINE		TARGET KINERJA					KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD	KETERANGAN
			Tahun 2024 (R)	Tahun 2025 (T)	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Tahun 2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota										
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL											
-	Tingkat cakupan layanan administrasi kependudukan	persen	89,28	90,46	94,89	95,23	95,56	95,89	96,23	96,23	IKU Renstra
-	Nilai SAKIP OPD	nilai	82,90	82,92	82,94	82,96	82,98	83,00	83,02	83,02	IKU Renstra
-	Perekaman KTP elektronik	persen	97,77	97,88	98,00	98,00	98,00	98,00	98,00	98,00	IKK
-	Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	persen	69,32	70,00	72,00	74,00	76,00	78,00	80,00	80,00	IKK
-	Kepemilikan akta kelahiran	persen	99,35	99,36	99,37	99,38	99,39	99,40	99,41	99,41	IKK
-	Jumlah Perangkat Daerah yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	perangkat daerah	10,00	12,00	13,00	14,00	15,00	16,00	17,00	17,00	IKK
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA											
-	Persentase LKK yang aktif dalam pembangunan	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	IKU Renstra
-	Nilai SAKIP OPD	nilai	82,75	83,45	83,57	83,59	83,61	83,63	83,65	83,65	IKU Renstra
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA											
-	Total Fertility Rate	angka	2,19	2,18	2,18	2,17	2,17	2,16	2,16	2,16	IKU Renstra
-	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	persen	64,41	64,48	64,55	64,62	64,69	64,76	64,83	64,83	IKK
-	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	persen	8,48	9,50	9,25	9,00	8,75	8,50	8,40	8,40	IKK
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN											
-	Nilai SAKIP OPD	nilai	77,15	77,17	77,19	77,21	77,23	77,25	77,27	77,27	IKU Renstra
-	Rasio konektivitas kabupaten/kota	indeks	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	IKK
-	V/C rasio di jalan kabupaten/kota	rasio	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	IKK
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA											
-	Indeks Aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi	indeks	3,25	3,35	3,45	3,45	3,65	3,65	3,85	3,85	IKU Renstra
-	Kinerja unit pelayanan informasi publik	persen	82,84	82,90	83,00	83,25	83,50	83,75	84,00	84,00	IKU Renstra
-	Nilai SAKIP OPD	nilai	83,40	83,50	83,70	83,90	84,10	84,30	84,50	84,50	IKU Renstra
-	Persentase Perangkat Daerah (PD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	IKK

ASPEK/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN		SATUAN	BASELINE		TARGET KINERJA					KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD	KETERANGAN
			Tahun 2024 (R)	Tahun 2025 (T)	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Tahun 2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	IKK
	- Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota	persen	29,46	30,08	30,74	31,63	32,53	33,42	34,31	34,31	IKK
	- Akses publik terhadap informasi keuangan daerah (<i>public access to fiscal information</i>)	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	IKK
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH											
	- Persentase Koperasi Berkualitas	persen	14,19	12,64	13,04	13,44	13,83	14,21	14,58	14,58	IKU Renstra
	- Pertumbuhan UMKM	persen	0,21	0,21	0,21	0,21	0,22	0,22	0,23	0,23	IKU Renstra
	- Nilai SAKIP OPD	nilai	85,75	85,77	85,79	85,81	85,83	85,85	85,87	85,87	IKU Renstra
	- Meningkatkan Usaha Mikro yang menjadi wirasausaha	persen	0,82	0,83	0,84	0,86	0,87	0,89	0,91	0,91	IKK
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL											
	- Nilai realisasi investasi Non UMK	Rp. Milyar	166,00	487,00	150,00	151,50	153,02	154,55	156,09	156,09	IKU Renstra
	- Nilai SAKIP OPD	nilai	77,90	77,92	78,12	78,14	78,16	78,18	78,20	78,20	IKU Renstra
	- Persentase peningkatan investasi di kabupaten/kota	persen	-62,68	106,58	-63,40	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	IKK
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA											
	- Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)	Indeks	65,43	65,57	65,71	65,85	65,99	66,13	66,27	66,27	Indikator Tujuan
	- Tingkat partisipasi pemuda dalam pembangunan	persen	56,00	60,00	64,00	68,00	72,00	76,00	80,00	80,00	IKU Renstra
	- Persentase Cabor Olahraga berprestasi tingkat Provinsi	persen	NA	45,24	47,62	50,00	52,38	54,76	57,14	57,14	IKU Renstra
	- Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	persen	2,56	2,57	2,58	2,60	2,61	2,62	2,63	2,63	IKK
	- Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	persen	20,59	20,60	20,61	20,63	20,64	20,65	20,67	20,67	IKK
	- Peningkatan prestasi olahraga ditingkat provinsi	persen	283,33	15,00	15,00	15,00	14,81	15,00	15,00	15,00	IKK
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK											
	- Nilai indeks domain proses bisnis statistik	nilai	2,90	2,90	3,00	3,10	3,20	3,30	3,30	3,30	IKU Renstra
	- Persentase Perangkat Daerah (PD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	IKK

ASPEK/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN		SATUAN	BASELINE		TARGET KINERJA					KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD	KETERANGAN
			Tahun 2024 (R)	Tahun 2025 (T)	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Tahun 2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- Persentase PD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	IKK
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN										
	- Indeks tata kelola KAMI	indeks	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	100,00	105,00	105,00	IKU Renstra
	- Tingkat keamanan informasi pemerintah	persen	71,04	74,86	75,96	76,50	77,60	78,69	79,78	79,78	IKK
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN										
	- Persentase kelompok budaya yang aktif terlibat / mengadakan aktivitas budaya dalam 1 tahun terakhir	persen	1,50	42,42	42,54	42,65	42,75	42,86	42,96	42,96	IKU Renstra
	- Terlestarikannya Cagar Budaya	persen	16,00	21,00	23,00	25,00	27,00	29,00	31,00	31,00	IKK
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN										
	- Tingkat pemanfaatan perpustakaan (IUP)	persen	50,90	50,95	51,00	51,05	51,10	51,15	51,20	51,20	IUP
	- Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	indeks	80,67	80,87	81,07	81,27	81,47	81,67	81,87	81,87	IKK
	- Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	indeks	94,37	94,37	94,37	94,37	94,37	94,37	94,40	94,40	IKK
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN										
	- Persentase OPD dengan nilai pengawasan kearsipan kategori serendah rendahnya memuaskan	persen	53,33	53,33	56,67	60,00	63,33	66,67	70,00	70,00	IKU Renstra
	- Nilai SAKIP OPD	nilai	75,45	76,00	76,52	76,54	76,56	76,58	76,60	76,60	IKU Renstra
	- Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Ps40 dan 59 U 43/2009)	persen	73,63	73,73	73,83	73,93	74,03	74,13	74,23	74,23	IKK
	- URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN										
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN										
	- Realisasi produksi perikanan (tangkap dan budidaya)	ton	12.673,04	10.131,21	10.419,45	10.523,65	10.628,89	10.735,17	12.773,92	12.773,92	IKU Renstra
	- Nilai SAKIP OPD	nilai	83,25	83,27	83,29	83,31	83,33	83,35	83,37	83,37	IKU Renstra
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA										
	- Tingkat Kunjungan Wisata	orang	1.130.104	1.200.000	1.236.000	1.273.080	1.311.272	1.350.611	1.391.129	1.391.129	IKU Renstra
	- Nilai SAKIP OPD	nilai	77,55	78,05	78,32	78,34	78,36	78,38	78,40	78,40	IKU Renstra
	- Tingkat hunian akomodasi	persen	60,25	60,26	60,26	60,27	60,28	60,29	60,30	60,30	IKK

ASPEK/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN		SATUAN	BASELINE		TARGET KINERJA					KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD	KETERANGAN
			Tahun 2024 (R)	Tahun 2025 (T)	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Tahun 2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	persen	6,38	6,04	6,22	6,40	6,58	6,76	6,94	6,94	IKK
	- Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	persen	11,19	11,14	11,47	11,60	11,58	11,56	11,45	11,45	IKK
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN										
	- Nilai produksi tanaman pangan, hortikultura dan peternakan	Rp. Juta	334,02	341,84	348,01	354,74	362,02	368,52	375,59	375,59	IKU Renstra
	- Nilai SAKIP OPD	nilai	76,10	76,25	76,52	76,54	76,56	76,58	76,60	76,60	IKU Renstra
	- Produktivitas pertanian per hektar per tahun	Per ton per hektar	7,20	7,10	7,30	7,30	7,50	7,50	7,50	7,50	IKK
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN										
	- Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok	persen	NA	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	IKU Renstra
	- Nilai Ekspor Perdagangan	US \$	14.501.529,56	14.550.000,00	14.600.000,00	14.700.000,00	14.800.000,00	14.900.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	IKU Renstra
	- Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	persen	87,20	87,20	87,20	87,20	87,20	87,20	87,20	87,20	Indikator Program / IKK
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN										
	- Nilai SAKIP OPD	nilai	75,45	75,47	75,52	75,54	75,56	75,58	75,60	75,60	IKU Renstra
	- Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK	persen	62,24	63,24	64,24	65,24	66,24	67,24	68,24	68,24	IKK
	- Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	IKK
	- Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	IKK
	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN										
	SEKRETARIAT DAERAH										
	- Persentase OPD dengan pelaporan kinerja sangat baik	persen	63,33	63,33	63,33	63,33	66,67	66,67	66,67	66,67	IKU Renstra
	- Rata-rata capaian standar pelayanan minimal	persen	99,51	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	IKU Renstra
	- Nilai SAKIP OPD	nilai	81,50	81,75	82,02	82,04	82,06	82,08	82,10	82,10	IKU Renstra

ASPEK/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN		SATUAN	BASELINE		TARGET KINERJA					KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD	KETERANGAN
			Tahun 2024 (R)	Tahun 2025 (T)	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Tahun 2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- Persentase Keberhasilan Pengadaan Barang/Jasa	persen	77,35	77,85	78,35	78,85	79,35	79,85	80,35	80,35	IKU Renstra
	- Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Perekonomian	Persen	0,49	0,34	0,38	0,42	0,49	0,57	0,64	0,64	IKU Renstra
	- Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD)	indeks	5,05	5,08	5,09	5,11	5,12	5,13	5,14	5,14	IKK
	- Persentase kinerja realisasi pupuk	persen	68,98	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	IKK
SEKRETARIAT DPRD											
	- Persentase penetapan Ranperda tepat waktu	persen	41,67	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	IKU Renstra
	- Nilai SAKIP OPD	nilai	75,15	75,17	76,02	76,04	76,06	76,08	76,10	76,10	IKU Renstra
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN											
PERENCANAAN											
	- Persentase konsistensi perencanaan pembangunan (Rata-rata nilai keselarasan program pada RKPD-RPJMD, dan Kegiatan-Sub Kegiatan Renja-Renstra, serta nilai pengukuran kinerja)	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	IKU Renstra
	- Nilai SAKIP OPD	nilai	88,50	88,70	88,82	88,84	88,86	88,88	88,90	88,90	IKU Renstra
KEUANGAN											
	- Indeks pengelolaan keuangan daerah dimensi kualitas anggaran belanja, transparansi pengelolaan keuangan, dan penyerapan anggaran	indeks	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	IKU Renstra
	- Persentase Realisasi Pendapatan Daerah	persen	100,47	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	IKU Renstra
	- Persentase ketepatan waktu dalam penyampaian laporan BMD	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	IKU Renstra
	- Nilai SAKIP OPD	nilai	84,50	84,60	84,70	84,80	84,90	85,00	85,10	85,10	IKU Renstra
	- Rasio PAD	persen	26,68	28,95	0,29	0,29	0,30	0,30	0,30	0,30	IKK
	- Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures)	persen	89,06	83,54	85,63	86,17	85,95	86,81	89,00	89,00	IKK
KEPEGAWAIAN											
	- Rata-rata skor nilai merit sistem komponen manajemen ASN	persen	3,34	3,34	3,39	3,39	3,44	3,44	3,50	3,50	IKU Renstra
	- Nilai SAKIP OPD	nilai	83,20	84,00	84,02	84,04	84,06	84,08	85,10	85,10	IKU Renstra

ASPEK/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN		SATUAN	BASELINE		TARGET KINERJA					KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD	KETERANGAN
			Tahun 2024 (R)	Tahun 2025 (T)	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Tahun 2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	persen	69,66	68,87	69,53	70,45	71,15	71,77	72,35	72,35	IKK
	- Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	persen	21,06	24,14	27,37	27,36	27,53	27,91	28,76	28,76	IKK
	- Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	persen	47,91	45,95	45,91	51,32	56,46	61,11	65,26	65,26	IKK
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN											
	- Rata-rata skor nilai sistem merit komponen pengembangan kompetensi ASN	persen	3,20	3,00	3,05	3,25	3,30	3,30	3,35	3,35	IKU Renstra
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN											
	- Rata-rata kinerja Riset dan Inovasi (Kinerja Riset: Persentase riset sesuai arah Kebijakan RPJMD. Kinerja Inovasi: Persentase OPD yang memiliki inovasi daerah tahun n-1 dan n-2)	persen	NA	87,93	89,66	89,66	91,38	91,38	91,38	91,38	IKU Renstra
- PENGADAAN											
	- Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya yang ditandatangani pada kuartal pertama	persen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	IKK
	- Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	persen	95,14	95,14	95,14	95,14	95,14	95,14	95,14	95,14	IKK
UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN											
INSPEKTORAT DAERAH											
	- Kapabilitas APIP	level	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	IKU Renstra
	- Nilai SAKIP OPD	nilai	84,60	84,70	84,75	84,80	84,85	84,90	85,00	85,00	IKU Renstra
	- Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	level	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	IKK
UNSUR KEWILAYAHAN											
KECAMATAN											
	- Persentase kinerja layanan kecamatan	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	IKU Renstra Kec. Pekalongan Utara

ASPEK/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN		SATUAN	BASELINE		TARGET KINERJA					KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD	KETERANGAN
			Tahun 2024 (R)	Tahun 2025 (T)	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Tahun 2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- Persentase kinerja layanan kecamatan	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	IKU Renstra Kec. Pekalongan Selatan
	- Persentase kinerja layanan kecamatan	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	IKU Renstra Kec. Pekalongan Barat
	- Persentase kinerja layanan kecamatan	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	IKU Renstra Kec. Pekalongan Timur
	- Nilai SAKIP OPD	nilai	76,10	76,50	77,02	77,04	77,06	77,08	77,10	77,10	IKU Renstra Kec. Pekalongan Utara
	- Nilai SAKIP OPD	nilai	77,00	77,02	77,04	77,06	77,08	77,10	77,12	77,12	IKU Renstra Kec. Pekalongan Selatan
	- Nilai SAKIP OPD	nilai	76,15	76,17	76,52	76,54	76,56	76,58	76,60	76,60	IKU Renstra Kec. Pekalongan Barat
	- Nilai SAKIP OPD	nilai	76,25	76,27	76,29	76,31	76,33	76,35	76,37	76,37	IKU Renstra Kec. Pekalongan Timur
UNSUR PEMERINTAHAN UMUM											
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK											
	- Persentase konflik SARA yang tertangani	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	IKU Renstra
	- Nilai SAKIP OPD	nilai	73,45	73,70	73,97	73,99	74,01	74,03	74,05	74,05	IKU Renstra

Sumber: Bapperida Kota Pekalongan, 2025

BAB V PENUTUP

5.1. PEDOMAN TRANSISI

Pada saat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pekalongan Tahun 2030–2034 belum tersusun dan untuk menjaga kesinambungan pembangunan serta mengisi kekosongan RKPD setelah RPJM Daerah Tahun 2025-2029 berakhir, maka RPJM Daerah Tahun 2025-2029 ini menjadi pedoman penyusunan RKPD dan RAPBD tahun pertama di bawah kepemimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) periode berikutnya dan mengacu pada RPJP Daerah serta RPJM Daerah Provinsi Jawa Tengah yang berlaku.

5.2. KAIDAH PELAKSANAAN

RPJM Daerah Tahun 2025-2029 merupakan panduan bagi Pemerintah Kota Pekalongan serta pemangku kepentingan lainnya dalam melakukan pembangunan 5 (lima) tahun ke depan. Oleh karena itu, konsistensi, kerjasama, transparansi dan inovasi, serta rasa tanggung jawab tinggi diperlukan guna pencapaian target-target yang telah ditetapkan dalam RPJM Daerah Tahun 2025-2029 dengan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

- a. Wali Kota berkewajiban menyebarluaskan peraturan daerah tentang RPJM Daerah Tahun 2025-2029 kepada masyarakat;
- b. Seluruh Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Kota Pekalongan dan pemangku kepentingan agar mendukung pencapaian target-target sebagaimana yang telah ditetapkan dalam RPJM Daerah Tahun 2025-2029;
- c. Seluruh Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Kota Pekalongan dan pemangku kepentingan agar melaksanakan program-program yang tercantum di dalam RPJM Daerah Tahun 2025-2029 dengan sebaik-baiknya;
- d. Seluruh Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Kota Pekalongan dalam menyusun Renstra Perangkat Daerah berpedoman pada RPJM Daerah Tahun 2025-2029;
- e. Bapperida Kota Pekalongan melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan RPJM Daerah, mengkoordinasikan hasil evaluasi Renstra PD di lingkup Kota Pekalongan;
- f. Pelaksanaan pembangunan selama periode RPJM Daerah Tahun 2025-2029 memperhatikan kebijakan pengarusutamaan gender dan inklusi sosial.

Dokumen RPJM Daerah disusun sebagai penjabaran atas Visi dan Misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota ke dalam program-program pembangunan secara selaras dengan kebijakan dan program pembangunan nasional dan provinsi, sinergi antar program dan sumber daya, serta terukur ketercapaian target kinerjanya. Dengan konsep pemikiran semacam ini, diharapkan, pengalokasian sumber daya yang dimiliki oleh Kota Pekalongan ke dalam sistem pembangunan daerah akan lebih tepat sasaran dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan umum, peningkatan daya saing daerah, serta pada akhirnya bermuara pada peningkatan kesejahteraan rakyat.

Dokumen RPJM Daerah secara langsung ataupun tidak langsung pada dasarnya adalah pengejawantahan janji politik yang disampaikan oleh Wali Kota dan Wakil Wali Kota kepada rakyat pada saat kampanye. Dalam prosesnya, arah kebijakan, strategi, dan juga program

pembangunan daerah beserta Indikatornya dibahas bersama dengan anggota DPRD yang juga representasi dari rakyat. Kesepakatan politik yang muncul dan tertuang ke dalam dokumen RPJM Daerah ini kemudian menjadi pedoman pelaksanaan pembangunan tahunan oleh Perangkat Daerah. Oleh karena itu, pada akhir periode jabatan, Wali Kota dan Wakil Wali Kota mempunyai kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban atas amanah yang telah diberikan rakyat melalui mekanisme Pemilihan Kepala Daerah. Selain itu, sebagai bagian dari penyelenggaraan sistem pemerintahan Indonesia, Wali Kota dan Wakil juga mempunyai kewajiban untuk menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri.

Dengan melihat beban tanggung jawab yang sangat besar, maka dengan memanjatkan Do'a kepada Allah SWT, kita semua berharap semua penjabaran Visi dan Misi yang ada dalam dokumen RPJM Daerah ini dapat dilaksanakan dengan baik sehingga akan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Pekalongan di masa yang akan datang.

WALI KOTA PEKALONGAN,

TTD

STEMPEL

ACHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAID

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA PEKALONGAN



ADAM MUHAMAD, S.H
Pembina

NIP. 19790407 200902 1 004

DAFTAR PUSTAKA

- Undang-undang Dasar 1945;
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
- Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang;
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 30 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pekalongan Tahun 2009-2029 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pekalongan Tahun 2009-2029.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- Yayasan Mercy Corps Indonesia, 2021, *Laporan Loss and Damage Assesment in Pekalongan City dan Pekalongan Regency Under Zurich Flood Resilience Alliance Program*.
- Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;
- Badan Pusat Statistik Kota Pekalongan. (2025). Kota Pekalongan Dalam Angka.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah. (2025). Jawa Tengah Dalam Angka.
- Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan Hidup Kota Pekalongan Tahun 2024